Al Chaidar

Pengantar

Pemikiran Politik Proklamator

NEGARA ISLAM INDONESIA

S.M. KARTOSOEWIRJO

Mengungkap
Manipulasi Sejarah

AKAAN NASIONAL R I
ARTOSUWIRYO)
ALK
P

DI-TII
Lama
Baru

DARUL FALAH

Pengantar untuk buku Pemikiran Politik SM Kartosoewirjo

Diskusi seputar Pemerintahan Islam kian marak berlangsung di Indonesia. Kampus-kampus ramai menggelar keunggulan pemerintahan Islam ini, berbagai pemikiran dari luar negeri mencuat kepermukaan; Gagasan-gagasan Abul A'la Al Maududi dari Jamaat Al Islami Pakistan, Dr. Yusuf Qaradhawi dari Ikhwanul Muslimin – Mesir maupun Taqiyuddin An Nabhani dari Hizbut Tahrir.

Gegap gempita pembahasan ini mau tidak mau membuat fakta perjuangan Negara Islam pun tersingkap, dimasukkan dalam analisis diskusi demi diskusi. Berbagai penilaian atas NII pun bermunculan, dalam berbagai ragam keberpihakan.

Ketika DR. Yusuf Qardhawi mengulas tentang perjuangan NII ; *"Di Indonesia, terdapat pengalaman Darul Islam yang berlindung di gunung, mereka berperang sebagai pahlawan-pahlawan. Dan ini berlangsung beberapa tahun. Mereka telah melakukan contoh-contoh yang menakjubkan, dan kepahlawanan yang jarang bandingannya. Kemudian, mereka diusir oleh pesawat pesawat tempur .."* Orang terperangah dan berkata mengapa para pejuang itu kalah.

Ketika Hafidz Muhammad Al Ja'bari, menuliskan tentang Darul Islam dan Al Qoid Kartossuwiryo ia menulis : *"Adapun tatanan dan prinsip prinsip gerakan ini tidaklah keluar dari tuntunan Allah dan rosulNya serta hal hal yang pernah dilaksanakan oleh para sahabat rasulullah saw dan yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Undang undang negaranya adalah syariat Allah dan kekuasaan mutlak adalah pada syari'at . Dari segi akidah orang tak ragu bahwa Al Qoid Kartosuwiryo pengikut kaum salaf. Putra putri DI Indonesia telah mengikat diri dengan kuat. Hal itu dibuktikan dengan kerasnya Al Qaid dan keinginan beliau akan berdirinya Negara Islam Indonesia berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rosulullah saw. Beliau sangat kokoh menghadapi kelompok kelompok yang ingin memasukkan tatanan dan undang undang yang didatangkan ke negeri ini, mengganti kedudukan kitab Allah. "* Orang jadi bertanya mengapa ia ditinggalkan para pengawalnya, mengapa banyak orang menyebutnya sebagai pemberontak, pengacau dan sebutan buruk lainnya ..?

Ketika telah menjadi kesepakatan (Ijma') bahwa *"Mendirikan Negara Islam merupakan suatu kewajiban yang telah disepakati ulama di segala jaman" .* Orang jadi bertanya mengapa NII diburu dan dihancurkan orang, siapakah penghancur penghancur itu. Dan mengapa banyak orang ingin menghancurkannya, apakah NII didirikan di kawasan Non Muslim sehingga orang menolaknya? Pertanyaan ini sungguh menggelitik, dimana sebenarnya letak ketergeseran penilaian ini? Pada Negara yang diproklamasikannya? pada Imam sang proklamator? pada tentara yang besertanya?, pada rakyat yang mendukungnya? Atau pada interpretasi peristiwa karena kepentingan tertentu? Bukankah sejarah milik pihak yang menang?

Banyak orang mencoba coba menjawab ini, banyak analisa mencuat kepermukaan. Banyak dari analisis mereka sering kali terkesan 'miring' karena mengambil referensi dari sumber yang 'miring' pula. Sebab buku yang beredar jauh sebelum ini, memang banyak mengungkap data kejadian, tetapi tidak menukik pada masalah yang melatar belakangi kejadian kejadian itu. Sejarah menjadi kumpulan tahun dan tanggal, tetapi menutup mata dari gagasan dasar yang menjadikan sejarah itu membentuk dirinya.

Pada penerbitan perdana bulan April tahun ini penulis mencoba menganalisis kehadiran Negara Islam Indonesia dari konsep yang mendasarinya, dari gagasan pemikiran politik proklamatornya, dengan berusaha sebanyak mungkin mengutip fikiran fikiran autentik S.M. Kartosoewirjo sendiri. Baik dalam kapasitasnya sebagai pribadi muslim yang tercerahkan maupun dalam kapasitasnya sebagai Imam Negara Islam Indonesia setelah pemerintahan itu terbentuk.

Saya tersentak melihat antusiasme pembaca atas buku ini, 9000 buku terjual habis dalam waktu satu bulan saja, diskusi diskusi kian marak, dan topik pembicaraan kini bergeser. Bukan lagi pada masalah apa dan mengapa gerombolan Kartosoewirjo, tetapi bagaimana Negara Islam Indonesia.

Diskusi tidak lagi terfokus pada pribadi S.M. Kartosoewirjo, tetapi lebih terpusat pada Negara dan dokumen resminya. Ini sebuah perkembangan yang sehat dalam tataran diskusi ilmiah. Sebab sebagai pribadi baik anda maupun saya tidak ada hubungan apapun dengan pribadi besar ini. Namun sebagai sebuah kenyataan sejarah dimana S.M Kartosoewirjo hadir sebagai sosok yang memproklamasikan Negara Islam Indonesia, maka mengenal lebih jauh pribadi ini menjadi bagian dari desakan nurani ilmu pengetahuan, seperti kita ingin mengenal pribadi pribadi besar lainnya.

Mengenal masa silam adalah bagian dari upaya menatap masa depan secara lebih jernih. Negara Islam Indonesia yang lahir disaat Republik Indonesia sebagai negara mengalami krisis pemerintahan, ketika arah politik bergeser ke kiri kirian. Disini pun kita melihat dimana sifat negara yang stabil, rigid dan inhuman tidak selalu sejalan dengan sifat pemerintahan yang labil, tergantung pada siapa yang berkuasa. Baik Republik Indonesia yang telah stabil berdiri di atas dasar Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, maupun Negara Islam Indonesia yang ditegakkan di atas dasar Islam serta menjadikan Quran dan Hadits yang shohih sebagai hukum tertinggi, dalam perjalanannya tidaklah selalu stabil seperti watak negaranya. Sebab negara sebagai wadah pada tataran praktis diisi oleh manusia sebagai pemerintah dengan integritas moral yang variatif —yakni para manusia yang menjalankan kekuasaan dalam negara tersebut.

Negara Islam Indonesia, menjadikan Quran dan Hadits Shohih sebagai hukum tertinggi ini sudah pasti sebagai sebuah negara, namun bagaimana dengan kualitas pribadi tentaranya, integritas

moral rakyatnya, maka ini merupakan suatu pertanyaan yang terpisah. Negara adalah satu hal, sedang rakyat dan pemerintah adalah hal yang lain. Demikian juga dengan Republik Indonesia, walaupun negaranya berdasar Pancasila, tidak demikian halnya dengan pemerintah, sejarah membuktikan betapa pemerintah RI cenderung miring ke kiri ketika Nasakom dielu elukan Presiden Sukarno. Suasana Revolusi akan menapis setiap individu sehingga nyata emas dan loyang, hingga terbukti mana yang berjalan sesuai dengan asas dan hukum tertinggi negara, dan mana yang bergeser dengan berubahnya keadaan. Pengkajian sejarah membuktikan hal ini, sebagaimana Gustav Le Bon memaparkannya dalam psychology of Revolution.

Peperangan antara RI dan NII melahirkan beragam potret psikologis anak manusia, mulai dari yang berjuang mempertahankan masing masing negaranya, hingga "kutu Loncat" yang mengambil keuntungan dari konflik ideologis tersebut. Kita pun melihat bagaimana sebuah solusi ditawarkan, bagaimana upaya mencapai tujuan dijalankan. Dari sini kata "heroik" dan "pembangkangan", menjadi amat relatif, tergantung di fihak mana orang itu tengah berpendapat. Namun sebagai kenyataan sejarah, pergulatan bathin di tengah guruh debu dan mesiu, terlalu berarti untuk dikesampingkan.

Di dalamnya kita melihat betapa persahabatan dan permusuhan menjadi sangat relatif berhadapan dengan kepentingan memenangkan perjuangan. Pribadi besar S.M. Kartosoewirjo yang pernah menjabat sebagai wakil Presiden PSII, yang menuliskan Brosur Sikap Hijrah sebagai arah jihad PSII, akhirnya dipecat oleh karena PSII memilih untuk meninggalkan "sikap hijrah" itu dan bergabung dengan Gabungan Partai Partai Politk Indonesia lainnya guna menempuh kemerdekaan lewat jalur politik kooperatif. Akhirnya sikap konsisten pribadi besar S.M Kartosoewirjo mendorongnya untuk membuktikan sendiri apa yang digagaskannya bersama para ulama yang istiqamah dan membangun institut suffah, mempersiapkan kader negarawan yang ulama dan ulama yang negarawan, yang menjadi cikal bakal mujahid awal Negara Islam indonesia.

Setelah cetakan pertama buku ini beredar di pasaran, di saat saat sibuknya menghadiri simposium, kupas buku dan diskusi atas buku buku saya terdahulu. Pejuang maupun keluarga pejuang NII –yang walaupun secara pribadi dirinya tidak tertulis dalam buku itu namun mereka merasa memiliki peristiwa dan kejadian yang dipaparkan dalam buku tersebut– datang menemui saya. Mereka muncul dengan beragam komentar, variasi ungkapan psikologis, yang jelas kehadiran mereka menambah sejumlah data untuk diungkapkan kehadapan pembaca.

Saya merasa perlu merevisi buku yang baru saja 4 bulan terbit itu, sebab pandangan pandangan para pelaku sejarah itu sangat berharga untuk dicuatkan kepermukaan. Untuk difahami dan

diambil hikmahnya, betapa sebuah revolusi membentuk karakter para pelakunya, dan atas tuntutan objektivitas, maka dalam terbitan ini, semua pandangan dan gagasan Kartosoewirjo, baik sebagai individu maupun imam Negara Islam Indonesia, seluruhnya saya lampirkan di akhir buku ini.

Beberapa bagian dari buku ini saya hilangkan, beberapa cuplikan berita koran yang akhirnya saya ragukan kredibilitas pewartanya, setelah mendengar pengakuan para pelaku sejarah tersebut, terpaksa saya hapus. Diganti dengan analisa tambahan berdasarkan wawancara wawancara baru dengan para pelaku tadi. Dengan terbitnya edisi revisi ini, sekaligus meralat terbitan sebelumnya. Dan apa yang tidak ada di edisi revisi ini, harus dianggap tidak ada pada edisi sebelumnya.

Semoga terbitnya edisi revisi ini, dengan idzin Allah, mampu membangkitkan nuansa baru pada pembahasan dan diskusi diskusi Negara Islam Indonesia di masa masa mendatang. Aamiin Ya Robbal ‘Alamiin.

Jakarta 17 Jumadil Ula 1420 H

29 Agustus 1999 M

Pengantar penulis utk buku Pemikiran Politik SM Kartosoewirjo, edisi Pertama

Sejarah Islam mengungkapkan kepada kita bahwa Rasulullah Muhammad SAW telah berjuang semaksimal mungkin dengan mengerahkan kekuatan dan pikiran, yang ditopang hidayah wahyu, untuk mendirikan Daulah Islam atau negara bagi dakwah beliau serta penyelamat bagi para pengikut beliau. Orang-orang yang beriman tidak cukup hanya beriman saja, melainkan harus berhijrah dan berjihad memperjuang-kan tegaknya Dienullah dengan mengumpulkan segenap kekuatan dan kekuasaan. Negara adalah bentuk konkrit dari kekuatan dan kekuasaan itu. Kekuasaan itu sangat ajaib. Kita bisa berbuat apa saja dengan kekuasaan. Namun hanya kekuasaan yang berdasarkan Islam sajalah yang dapat dijamin akan memuaskan semua orang.

Tidak ada bentuk kekuasaan yang diterapkan atas manusia kecuali, mengutip istilah Yusuf Qardhawy , "kekuasaan syariat." Banyak orang menyebut kekuasaan berdasarkan syariat ini sebagai "theo-demokrasi" atau "demokrasi Islam" atau apa saja. Namun, di Indonesia, S.M. Kartosoewirjo secara tegas menyatakan bentuk kekuasaan itu sebagai negara Al-Jumhuriyah Al-Indonesiah atau suatu Ad-Daulatul Islamiyah atau dengan sebutan Darul Islam yang secara nasional dikenal dengan nama Negara Islam Indonesia.

Dalam mewujudkan Darul Islam pada masa Rasulullah SAW, beliau sendiri yang mendatangi berbagai kabilah, agar mereka beriman kepada Allah SWT dan mendukung untuk ikut menjaga dakwah beliau, hingga akhirnya Allah menganu-gerahkan "Anshar" dari kalangan Bani Aus dan Khazraj, yang beriman kepada risalah beliau. Kaum Anshar adalah "rakyat yang mendukung perjuangan tanpa ikut berhijrah secara fisik bersama-sama beliau." Tatkala Islam mulai menyebar di kalangan mereka, maka pada suatu musim haji datang utusan dari mereka yang terdiri dari tujuh puluh tiga orang laki-laki dan dua wanita, lalu mereka ber-bai'at kepada beliau, menyatakan kesediaan untuk melindungi beliau sebagaimana mereka melindungi diri sendiri, isteri dan anak-anak mereka, siap untuk tunduk dan taat, memerintahkan kepada yang ma'ruf (perbuatan yang baik), mencegah dari yang mungkar (perbuatan yang tidak baik) dan seterusnya. Mereka melakukan sumpah setia (baiat) untuk berjihad atas semua itu, hingga hijrah ke Madinah hanya sekedar sebagai upaya untuk mendirikan masyarakat Islam yang berdaulat, dengan daulah Islam yang juga berdiri sendiri.

Madinah menjadi "Darul-Islam" (wilayah Islam) dan pijakan daulah Islam yang baru, yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Beliau menjadi komandan tertinggi kaum Muslimin dan pemimpin mereka, sebagaimana beliau menjadi Nabi dan Rasul Allah yang diutus kepada mereka. Setelah Rasulullah SAW mendirikan Negara Madinah, tidak ada satu orang pun yang menapak tilas semangat jihad Rasulullah SAW di Indonesia ini selain S.M. Kartosoewirjo. Ia adalah ulama

besar dan negarawan sejati yang teguh hati dan jujur mulai dari pemikiran. Di Indonesia, pada abad ini, Darul Islam didirikan ulang oleh S.M. Kartosoewirjo dengan nama Negara Islam Indonesia (NII) yang memiliki kekuatan asykariah bernama Tentara Islam Indonesia (TII) atau Angkatan Perang Negara Islam Indonesia (APNII).

Sebagaimana dikatakan oleh Yusuf Al-Qardhawy, "Bergabung ke dalam daulah ini untuk mendukung kekuatannya, hidup di bawah lindungannya dan berjihad di bawah panjinya merupakan keharusan bagi siapa pun yang masuk Islam." Selan-jutnya, Yusuf Al-Qardhawy mengatakan, "Imannya belum dianggap sempurna kecuali jika dia ikut hijrah ke dalam wilayah Islam dan keluar dari wilayah orang-orang kafir dan yang memusuhi Islam. Imannya belum dianggap sempurna kecuali setelah dia ikut dalam barisan jama'ah orang-orang Mukmin yang berjihad dan yang menjadi sasaran serangan seluruh dunia saat itu." Allah befirman, "Dan (terhadap) orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atas kalian melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah." (Al-Anfal: 72).

Allah juga befirman tentang sikap atau respon yang harus diberikan kepada orang-orang yang tidak berhijrah ini,

"Maka janganlah kalian jadikan di antara mereka penolong-penolong (kalian), hingga mereka berhijrah kepada jalan Allah." (An-Nisa: 89).

Ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan diatas, sebagaimana dikatakan Yusuf Al-Qardhawy, memberikan ancaman yang keras terhadap orang-orang yang lebih suka memilih hidup di wilayah orang-orang kafir dan wilayah perang, tanpa mau mendu-kung penegakan agama dan melaksanakan kewajiban serta syiarnya. Maka jika masih memilih untuk tetap tinggal di negara kafir tidak ada kewajiban menolong orang-orang Mukmin yang disakiti, yang dibantai atau yang dizalimi. Begitu juga sikap yang diperlihatkan oleh Darul Islam, mereka tidak akan pernah meminta bantuan dari orang-orang yang tidak mau berhijrah ke Negara Islam Indonesia atau Darul Islam yang pernah didirikan oleh S.M. Kartosoewirjo yang masih ada hingga sekarang ini. Oleh karena itu, dalam sikap bara'ah-nya, Darul Islam tidak akan pernah membantu partai-partai Islam, apalagi yang sekuler, jika mereka tidak mau berhijrah atau setidak-tidaknya menjadi "kaum Anshar" dalam jihad untuk menegakkan hukum-hukum Allah di bumi Indonesia ini.

Banyak sikap yang ditunjukan oleh orang-orang yang mengaku dirinya Islam atau banyak orang-orang yang mengaku beriman terhadap Darul Islam atau Negara Islam Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa "Tidak ada Negara Islam" atau "Islam bukan negara", ada juga yang mengatakan "Tuhan tidak menyuruh kita mendiri-kan Negara Islam", atau ada pandangan yang menyebutkan bahwa "Tidak ada satu ayat pun yang menyebutkan keharusan atau kewajiban

mendirikan Negara Islam." Semua itu adalah usaha-usaha untuk menutupi cahaya agama Allah. Bahwa agama Allah, agama Islam, seakan-akan tidak mencakup semua segi kehidupan. Seakan-akan politik bukan bagian dari urusan Islam. Atau dengan cara yang sangat licik, ada beberapa ulama suu' yang mengatakan bahwa Negara RI yang berdasarkan Pancasila atau Negara Pancasila adalah Negara Islam, jadi perjuangan sudah final sehingga tidak perlu lagi memperjuangkan tegaknya Negara Islam di Indonesia. Berbagai cara ditempuh agar Daulah Islamiyah hilang dari muka bumi dan umat Islam berada dalam keadaan gelap gulita selamanya. Inilah ulah para elit penguasa atau kaum intelektual yang pekak, buta dan tuli terhadap realitas sosial Indonesia yang berkem-bang saat ini, yang tidak melihat pembantaian umat Islam di mana pun di dunia ini sebagai satu tanda perlunya negara ini diganti ideologinya dengan ideologi Islam. Setelah kita memiliki Negara Islam, baru wilayah-wilayah lain di mana umat Islam dibantai harus segera diperangi satu per satu dan kemudian menundukkan negara-negara kafirin lainnya yang tidak mau tunduk atau taslim pada sistem Allah.

Pada masa reformasi sekarang ini, di mana ideologi 'kiri radikal' bangkit melalui berbagai partai-partai sekuler dan corong-corong media massa yang mereka miliki, maka dakwah yang paling penting adalah "bagaimana mengubah ideologi negara" dengan ideologi Negara Islam. Kita berharap, dengan "dakwah siyasah" ini, maka pada milenium ketiga yang akan kita jelang beberapa saat lagi adalah milenium Negara Islam. Negara Islam Indonesia adalah Ad-Daulatul Islamiyah yang merupakan bentuk negara Al-Jumhuriyah Al-Indonesiah yang tegak setelah rakyat mengalami: kezaliman, penindasan, ketidakadilan, kesusahan, dan berada di bawah penguasa yang mengumbar janji-janji kosong.

Hal ini sudah lama diramalkan oleh empat tokoh wali abad XIX di Aceh yang berbentuk kasyaf yang berisi nasihat menghadapi "zaman edan" yang semakin anarkis akhir-akhir ini bagi rakyat Indonesia. Surat wasiat amanat yang —menurut sejarawan Ibrahim Alfian sangat tinggi nilainya dan penting artinya— ditulis pada 12 Rabiul Awwal 1283 H (14 Juli 1866 M), pada hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Isi amanahnya adalah sebagai berikut:

"Bahwa dalam Islam dunia ini mulai pada masa zaman dahulu dan pada masa zaman sekarang hingga pada zaman akan datang turun menurut yang sangat dihajat dan diharap oleh sekalian ummat manusia yaitu pertama-tama adil hukum dan kedua aman negeri dan ketiga senang rakyat dan keempat makmur dan kelima perjanjian dan pelajaran nasihat yang benar lagi teguh. Maka yang sangat dibenci dan amarah sakit hati sekalian ummat manusia, yaitu pertama zalim dan kedua tidak ada keadilan dan ketiga memberi susah atas rakyat dan keempat tidak memperbuat makmur dalam negeri, dan kelima mengubah janji dengan rakyat dan pelajaran nasihat yang tidak baik dan teguh setia. Maka dengan sebab lima perkara tersebut ini maka

jadilah huru-hara dalam alam dunia ini timur-barat tunong (utara) barôh (selatan), yaitu keluar sekalian perbuatan yang mungkar, dengki dan khianat dan tamak dan hasutan fitnah. Maka Allah Ta'ala Tuhan Rabbul Alamin menurunkan bala yang bermacam-macam, tetapi manusia pada masa itu tidak memikir dengan seluas-luas dan dengan faham yang mendalam. Pegang olehmu agama Islam yang suci lagi benar, selamat dunia akhirat, dan taat setialah pada qanun syara' (Undang-undang Dasar) Kerajaan Al-Jumhuriyah Al-Indonesiah dan jangan sekali-kali bughat yakni durhaka melawan Kerajaan Al-Jumhuriyah Al Indonesiah yang sah dan jangan sekali-kali dalam kerajaan mendirikan lagi kerajaan dan dalam negeri mendirikan negeri. Maka ingat jangan membikin pecah-belah ummat manusia dalam satu-satu kerajaan yang sah dengan keputusan ijma' mufakat alim ulama yang ahli sunnah wal jama'ah dan sekalian orang yang besar-besar yang cerdik ahli akal bijaksana faham luas dan fikiran yang tajam dan mendalam dan jernih hati dan sehat otak dengan dingin beserta rakyat yang terbanyak. Maka inilah yang mu'tamad saheh sah benar. Maka yang diluar yang tersebut ini, maka itulah bughat, maka tiap-tiap bughat berhak mesti Kerajaan Al-Jumhuriyah Al-Indonesiah menghancurkan dan menghilangkan dan melenyap-kan tiap-tiap bughat walau siapa-siapa sekalipun. Jangan diam. Wassalam."

Di dalam buku ini saya menggambarkan betapa hanya Darul Islam sajalah yang telah "menumpahkan darahnya" untuk memperjuangkan tegaknya Daulah Islamiyah di Indonesia. Tidak satu pun gerakan yang radikal yang berusaha untuk menegakkan kalimatillah di muka bumi ini secara lebih sistematis. Mereka adalah orang-orang yang anti perjanjian kompromistis dengan kekuatan-kekuatan bathil. Sebagaimana digambarkan oleh M. Isa Anshari, orang-orang Darul Islam adalah orang-orang yang tidak mudah dibujuk, tidak mudah dikalahkan, dan tidak pernah mau berkompromi dengan segala kemunafikan:

"Mereka orang pergerakan, orang perdjuangan. Mereka orang jang sangat fanatik, tak mudah dikalahkan. Mereka orang jang ,,konsekwen", tak mudah dibudjuk. Mereka menamakan diri kaum proklamator, anti imperialis dan kapitalis. Mereka anti KMB, tak boleh ditawar. Haluan politiknja lebih kiri daripada kiri. Lebih radikal dan revolusioner dari orang lain. Karena fanatiknja, ,,membang-kang" tak sudi bertolak angsur. Karena revolusionernja, tak sudi menjerah-kalah, bertekuk lutut kepada ,,lawan". Warna mereka berlain-lain. Tjoraknja berbeda-beda. Ada jang merah, ada jang hidjau. Tapi perdjuangannja paralel, sedjalan. Bukan setudjuan dan seasas. Pada pokoknja mereka mempunjai kejakinan. Kejakinan politik. Kejakinan perdjuangan. Tempo2 kejakinan itu merupakan "mistik". Perdjuangannja jang mistik itu, tidak lagi berdasarkan perhitungan akal dan pikiran.

Tetapi berdasarkan kejakinan mistik, kebatinan halus jang berpegang kepada jang ghaib, tidak berdasarkan perhitungan alam jang sjahadah. Jang demikian itu adalah Darul Islam, jang telah mendjadi buah tutur orang banjak itu. Itulah kaum jang telah memproklamasikan Negara Islam

Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949. Lepas dari Republik Indonesia. Mereka mempunjai Undang-undang Dasar sendiri, terdiri dari 34 fasal. Mereka mempunjai tentara sendiri, bernama Tentara Islam Indonesia. Apa dan bagaimana kejakinan politiknja? Apa dan bagaimana kejakinan perdjuangannja? Mari kita ikuti analisa-kupasannja tentang djalannja revolusi Indonesia."

Dalam penerbitan buku kali ini, kami baru dapat menghadirkan analisis pemikiran S.M. Kartosoewirjo dengan mengambil beberapa kutipan dari sekian banyak karya besar Sang Proklamator Negara Islam Indonesia tersebut. Berhubung semakin dekatnya waktu pelaksanaan pemilu dan begitu gencarnya arus kiri dalam mengadakan aksi propagandanya untuk menghadirkan ideologi sesatnya di bumi Indonesia yang mayoritas Muslim. Sehingga perlulah kami menyegerakan penerbitan buku ini yang seyogyanya disertai dengan lampiran terlengkap tulisan-tulisan baik berupa artikel-artikel maupun buku karangan langsung S.M. Kartosoewirjo.

Di antara karya-karya beliau adalah sebagai berikut:

1. Artikel-artikel di Harian Fadjar Asia dari tahun 1929-1930, sebanyak tiga puluh delapan buah.
2. Brosoer Sikap Hidjrah PSII.
3. Sikap Hidjrah PSII, jilid 1.
4. Sikap Hidjrah PSII, jilid 2.
5. Daftar Oesaha Hidjrah PSII.
6. Artikel di Madjalah Soeara PSII.
7. Artikel di Madjalah Soera MIAI.
8. I'tibar Ma'ani dan Madjazi daripada Perjalanan Isra' dan Mi'radj Rasulullah SAW.
9. Pedoman Dharma Bakti, jilid 1.
10. Pedoman Dharma Bakti, jilid 2.
11. Haloean Politik Islam.
12. Tulisan yang berjudul "Menjongsong Ad-Daulatul Islamiyah" di dalam buku Sebuah Manifesto karya M. Isa Anshari.

Dan, buku Pengantar Pemikiran Politik Proklamtor Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo ini tidak disertai tulisan-tulisan tersebut dengan pertimbangan agar lebih cepat terbit untuk mengantisipasi gerakan-gerakan "radikal-kiri", seperti: Komu-nisme, Sosialisme atau Sekulerisme lainnya yang saat ini sudah sedemikian parah dan menyakitkan umat Islam. Kampanye mereka harus dipatahkan oleh perlawanan "radikal-kanan" atau Darul Islam yang selama hampir seabad ini menjadi "predator alam" bagi mereka. Bagaimanapun, mengutip istilah Pram, dengan segala kemampuan dan ketidakmampuan kita telah melawan.

Selama lebih kurang tiga puluh dua tahun umat Islam Indonesia melakukan perlawanan bersenjata maupun tidak bersenjata berada dalam penindasan Orde Baru yang dipimpin oleh rezim otoriter Soeharto. Bentuk-bentuk penindasan itu sangat beragam, dari pembantaian rakyat, ulama hingga pemenjaraan tokoh-tokoh politik dan aktivis yang memperjuangkan tegaknya Negara Islam di bumi Allah ini. Ketika gelombang demokratisasi dan gerakan reformasi mencuat di tengah-tengah kebekuan politik, Soeharto terpaksa turun dari kursi kekuasaannya. Maka sejumlah tokoh pun berkoar dan menguak semua kebohongan penguasa.

Maka terungkaplah sisi-sisi gelap penguasa yang telah membantai umat Islam di Aceh, Lampung, Haor Koneng, Tanjung Priok, bahkan hingga kepada kekerasan negara di Kupang, Ketapang, Ambon, Tual, dan Sambas. Umat Islam hidup di tengah-tengah sistem yang zalim; menjadi domba yang lemah dan tak berdaya di tengah-tengah kawanan serigala. Namun, di tengah-tengah suasana reformasi yang anarkis ini, ada seberkas cahaya yang dipendarkan oleh beberapa ilmuwan dan ahli sejarah yang membongkar kembali semua manipulasi sejarah yang dilakukan oleh rezim Orde Baru Soeharto dan Orde Lama Soekarno.

Sejarah mulai terluruskan kembali. Sejauh ini upaya perekaman catatan-catatan sejarah dan pelurusan kembali sejarah pergerakan umat Islam berjalan sangat lamban. Kesibukan mengejar ketinggalan dari gerakan-gerakan reformasi telah justru tidak menyisakan perhatian kepada nasib anak bangsa sendiri. Buku ini berusaha mencoba merekam kisah-kisah yang rasional maupun yang terjadi secara tidak logis yang dialami oleh para pejuang Islam di Indonesia.

Bahkan, banyak karomah yang tidak masuk akal terjadi dan juga banyak kisah-kisah kekejaman yang menyelimuti perjalanan dakwah mereka serta kisah-kisah lucu menyangkut sosialisasi dan hubungan para tahanan dan narapidana Islam dengan aparat militer selama berlangsungnya masa tahanan tersebut. Ketakutan, kelucuan, humor dan kesedihan yang mereka alami bercampur-aduk menjadi satu. Namun uniknya, tidak ada satu pun yang merasa menyesal dan menyimpan dendam terhadap tentara Orde Baru. Seakan mereka menyadari bahwa tentara hanyalah alat penguasa yang bekerja tanpa kesadaran. Bahkan, karena sikap mulia para mujahidin Darul Islam selama berada dalam tahanan, tidak sedikit tentara yang kemudian simpati dan mendukung ideologi para tapol/napol. Hanya Islam yang mengajarkan kepada manusia bagaimana menghargai hidup ini dan hanya Islam sajalah yang mengajarkan kepada manusia tentang bagaimana indahnya mati di jalan Allah. Maka, hanya Islam sajalah yang bisa menunjuki jalan bagi manusia di mana pun di muka bumi ini, khususnya rakyat Indonesia, untuk keluar dari kemelut sosial, politik dan ekonomi yang tak pernah habisnya dihadapi manusia.

Dengan hadirnya buku ini, kita berharap petunjuk ke arah Indonesia yang lebih baik di masa depan mulai terterangi. Dan para pejuang Darul Islam diharapkan bersatu dan tidak lagi berpecah-belah. Penulis mengharapkan kritik, saran dan peringatan dari para pembaca. Selama penyusunan buku ini juga penulis banyak dibantu oleh Bapak Dr. Ahman Sya di Tasikmalaya yang telah meminjamkan bahan-bahan langka tulisan S.M. Kartosoewirjo. Juga kepada Nyonya Hajjah Endang Saifuddin Anshari, kepada Bapak Sardjana Kartosoewirjo serta kepada akhi Usep, akhi Syahrul, akhi Abdurrauf, akhi Anhar, akhi Haris Amir Falah, akhi Abdurrahman, akhi Rakhmat di Pontianak, akhi Jamaluddin di Kendari, akhi Ruli dan juga Bapak Maman Abdurrahman serta Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Kepada Imam Shalahudin serta Zulfikar Shalahudin.

Jakarta, 1 Muharram 1420 H.

17 April 1999 M.

Wajah Negara Islam

Islam tidak pernah memaksakan seseorang dan tidak pula disebarkan lewat tajamnya pedang, sebagaimana yang diklaim oleh musuh-musuh Islam. Islam mensyariatkan perang, untuk menyingkirkan thaghut-thaghut yang menghalangi jalan dakwah ke rakyat dan penduduk. Setelah thaghut-thaghut ini disingkirkan dan dakwah Islam dikumandangkan, permasalahannya terserah kepada rakyat, apakah mereka mau menerima Islam, ataukah tetap pada agamanya sendiri, tapi ia harus tunduk sebagai ahlu dzimmah.

Tendensi dakwah Islam semacam ini dikuatkan dengan perkataan Rab'i bin 'Amir di hadapan Rustum, pemimpin pasukan Persia, "Kami diutus Allah untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan makhluk ke penyembahan Allah, dari dunia yang sempit ke dunia yang lapang dan dari kesewenangan agama ke keadilan Islam."

Mengenai jizyah yang harus disetorkan oleh ahli dzimmah, bukan dimaksud untuk memberi penekanan-penekanan tertentu agar mereka mau masuk Islam, sekali-kali tidak, jizyah itu sebagai pengganti dari tanggung jawab dan jerih payah orang-orang Islam untuk melindungi mereka.

Kebebasan yang diberikan kepada orang-orang yang ditundukkan kaum Muslimin untuk memilih masuk Islam ataukah membayar jizyah, merupakan bukti yang kuat, jelas dan gamblang bahwa Islam melarang mengetrapkan kultur paksaan.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah." (Al-Baqarah: 256).

Orang-orang yang membayar jizyah kepada pemerintah Islam dinamakan ahlu dzimmah. Mereka berhak menerima hak dan jaminan seperti yang diterima oleh orang-orang Islam. Salah seorang gubernur pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada beliau yang isinya menerangkan bahwa ahli dzimmah yang baru masuk Islam justru lebih berbahaya kalau seandainya mereka tidak dibebani jizyah. Maka dengan dasar pikiran semacam ini, ia tetap menarik jizyah meskipun ada ahli dzimmah yang sudah masuk Islam.

Setelah membaca surat tersebut, Khalifah Umar bin Abdul Aziz segera mengirim surat yang isinya: "Allah memburukkan pendapatmu itu. Karena sesungguhnya Allah tidak mengutus Muhammad Shallallahu Alaihi wa Salam sebagai pemungut pajak. Tapi beliau diutus untuk memberi hidayah. Apabila suratku ini telah kau baca maka segera batalkan jizyah itu bagi ahlu dzimmah yang telah masuk Islam."

Abu Yusuf menyebutkan dalam bukunya bahwa Umar bin Khathab bertemu dengan seorang tua ahlu dzimmah peminta-minta di pintu masjid untuk membayar jizyah, demi kebutuhannya, Umar berkata kepada orang tua itu, "Kami akan berbuat adil terhadapmu, kami bebaskan setelah kamu tua." Kemudian Umar membawa orang tersebut ke Baitulmal, lalu diberinya kebutuhan secukupnya dan ia dibebaskan dari pembayaran jizyah. Lebih lanjut hal ini dikuatkan lagi dengan pengakuan-pengakuan beberapa orang yang pernah mempelajari Islam secara benar. Dalam bukunya "Dakwah kepada Islam", Arnold Toynbe seorang guru besar berkata, "Setelah pasukan tentara Islam yang dipimpin Abu Ubaidah sampai di lembah Urdun, para penduduk yang beragama Kristen yang menetap di situ menulis surat yang ditujukan kepada orang-orang Arab yang beragama Islam itu, yang berbunyi: 'Wahai semua orang Islam, kalian lebih kami cintai daripada orang-orang Romawi, meskipun mereka seagama dengan kami. Kalian lebih menepati janji, bersikap lemah-lembut kepada kami, mencegah kesewenangan yang menimpa kami dan mau menjaga diri kami. Tapi orang-orang Romawi itu menindas kami dan bumi kami.'

Para penduduk kota saling menutup pintu masuk agar tentara Heraclius tidak menjarah. Mereka menyampaikan kabar kepada orang-orang Islam bahwa mereka lebih senang dengan orang-orang Islam dan keadilan mereka daripada kesewenang-wenangan orang-orang Greek itu. Segala pikiran dan tuduhan bahwa peranan pedanglah yang telah mengubah manusia masuk Islam, jelas merupakan tuduhan yang jauh dari benar. Dakwah dan pemuasan merupakan dua faktor esensial tersebarnya dakwah Islam, dan bukan karena kekuatan dan kekerasan." Crustav Loban juga mengeluarkan kata-kata yang sangat terkenal, "Sejarah manusia tidak mengenal penakluk yang adil dan lebih lemah lembut kecuali dari orang-orang Islam." Itulah sebagian kecil hak-hak yang telah diberikan kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang hidup di bawah perlindungan Negara Islam. Suatu hak yang tidak akan didapati dalam agama samawi lain, atau undang-undang dan tatanan yang dibuat oleh manusia sepanjang zaman.

KATA PENGANTAR

MENIMBANG KETOKOHAN S.M. KARTOSOEWIRJO DAN PEMIKIRAN POLITIKNYA

Oleh : Ahmad Suhelmi, MA

PROLOG

Pepatah mengatakan sejarah itu berulang, "*L'histoire serepete*". Kebenaran pepatah ini menemukan relevansinya saat ketika kita menyaksikan belakangan ini gejala kebangkitan 'politik aliran' atau ideologi politik yang pernah hidup di zaman lampau . 'Politik aliran' atau ideologi politik yang saya maksud adalah ideologi kiri radikal (Komunisme, PKI) dan ideologi kanan radikal (Darul Islam).

Komunisme, apa pun definisinya, bangkit kembali. Tidak mudah untuk meng-identifikasi secara pasti organisasi dan aktivis berideologi komunis yang bangkit itu. Namun, dengan mengamati berbagai gejala politik yang belakangan terjadi sukar mempercayai Komunisme telah benar-benar mati . Pembebasan Napol/Tapol PKI, an-tara lain kolonel (pur.) Latief, Dr. Subandrio, Bungkoes, Ketek, Rewang dan bebas berkeliarannya mantan tokoh Lekra (Lembaga Kesenian Rakyat), Pramoedya Ananta Toer, tampaknya memiliki andil dalam membangkitkan kembali ideologi Komunisme.

Menolak versi sejarah Orde Baru yang menganggap PKI aktor utama tragedi 30 September 1965, beberapa mantan PKI itu mengatakan bahwa aktor utama gerakan bukanlah PKI karena ia hanyalah 'korban' pertarungan di tubuh Angkatan Darat. PKI digunakan sebagai 'alat' oleh segelintir elite Angkatan Darat, antara lain mantan Presiden Soeharto, untuk memukul lawan-lawan politiknya. Kini para mantan PKI itu ingin 'meluruskan sejarah' PKI seperti yang dilakukan Pramoedya, Carmel Budiardjo dan mantan penculik Mayjen M.T. Haryono, eks. Serda Bongkoes. Tidak tertutup kemung-kinan usaha 'pelurusan sejarah' itu tendensius: 'upaya cuci tangan' tokoh-tokoh PKI atas kejahatan-kejahatan politiknya di masa lampau. Mereka menyadari era keterbukaan saat ini adalah 'peluang emas' untuk bersih-bersih diri.

Sejarah Indonesia kontemporer ibarat bandul jam yang bergerak ke kanan, ke kiri. Ketika bergerak ke kiri, ada kekuatan yang menariknya ke arah berlawanan. Proses historis itulah yang kini terjadi. Kebangkitan Komunisme diikuti oleh kebangkitan 'ideologi radikal kanan' lawannya, Darul Islam (aktivitas NII). Aktivis NII yang selama Orde Baru berkuasa bergerilya politik di bawah tanah (underground movement) menggugat wacana sejarah Orde Baru yang amat memojokkan

perjuangan 'suci' Darul Islam. Sejarah DI, dalam perspektif mereka, tidak seburuk yang dikonstruksikan Orde Baru. Gerakan Darul Islam sesungguhnya tidak pernah 'mati', tetap survive. Kini terasa telah muncul usaha menawarkan ideologi DI sebagai wacana ideologi alternatif. Dan momentum politik saat ini dinilai paling tepat untuk itu.

IDEOLOGI DARUL ISLAM

Ideologi sesungguhnya tak pernah mati, apalagi ia bersumber pada ajaran agama-agama klasik seperti Islam. Dalam suatu kurun sejarah tertentu --karena ditindas penguasa politik-- bisa saja ideologi itu tenggelam, tapi suatu saat ia akan bangkit kembali manakala situasinya kondusif.

Strategi 'pagar betis' TNI (1960-an) telah berhasil menumpas para pejuang DI. Pemimpinnya, S.M. Kartosoewirjo diekskusi mati, 1962. Tapi kematian para pejuang DI itu, bukan berarti ideologi Negara Islam yang mereka perjuangkan mati pula. Ideologi itu tetap survive hingga memasuki dekade 1980-an.

Apa latar belakang kebangkitan kembali ideologi DI, juga ideologi radikal kiri seperti Komunisme, saat ini? Mengapa sebagian kaum muda kita tertarik pada ideologi-ideologi radikal anti kemapanan itu? Apa daya tariknya?

Dari perspektif struktural, kebangkitan DI saat ini akibat struktural kekuasaan repressif Orde Baru selama berkuasa tiga dekade. Di bawah kekuasaan Orde Baru, ideologi negara Pancasila menjadi demikian repressif dan monolitik (monolithic ideo-logy). Penguasa Orde Baru mengklaim hanya Pancasila yang boleh hidup, sementara ideologi lain termasuk ideologi Negara Islam mesti dikubur dalam-dalam. DI diseja-jarkan dengan PKI dan Kartosoewirjo dengan Muso dan Aidit. Image DI pengkhianat dan pemberontak ditanamkan sedemikian rupa agar menimbulkan ketakutan kepada siapa pun yang ingin mengetahui --meski dalam bentuk kajian ilmiah-- apa sesungguhnya DI dan ajaran-ajaran Kartosoewirjo. Buku-buku DI dilarang, para penerbit atau mengedarnya dituduh subversif. Aktivis-aktivis DI ditangkapi dan pengadilan terhadap mereka diekspose di berbagai media massa.

Repressif politik Orde Baru meredam gerakan DI dan ideologinya itu memang efektif untuk jangka waktu tertentu. Namun, cara itu justru membangkitkan ingin tahu publik (curiousity) --khususnya anak-anak muda Muslim yang kritis dan enerjik-- tentang apa sesungguhnya DI itu dan mengapa ia dilarang, ditutup-tutupi. Maka, semakin pemerintah melarang dan merepressif DI, semakin kuat rasa ingin tahu mereka. Disadari atau tidak tindakan repressif penguasa Orde Baru justru membuat ideologi DI dan Kartosoewirjo semakin populer di kalangan aktivis-aktivis muda Islam. Mereka, melalui jalur-jalur khusus yang 'rahasia' --memperoleh karya-karya tentang DI dan

karangan-karangan Kartosoewirjo. Dari sinilah rasa ketertarikan itu mendorong mereka kemudian terlibat dalam gerakan DI bawah tanah. Dalam konteks inilah ideologi DI sebagai 'ideologi tandingan' (counter ideology) dimunculkan. Gejala serupa juga terjadi di kalangan aktivis-aktivis gerakan kiri radikal. Jadi, struktur kekuasaan Orde Baru yang repressif dikehendaki atau tidak menyediakan lahan subur bagi bangkitnya ideologi-ideologi radikal itu.

Kegagalan ulama, kyai atau kaum intelektual Muslim menawarkan sebuah konseptualisasi ideologis bagi perubahan sosial merupakan unsur penting dalam membangkitkan semangat kaum muda mempelajari ideologi-ideologi radikal. Mereka kecewa dengan tokoh-tokoh agama yang seakan membiarkan maraknya kezaliman penguasa, penindasan, kemaksiatan, kesenjangan sosial. Di mata mereka ulama yang seharusnya memainkan 'peran suci' sebagai 'pewaris perjuangan para Nabi (*ulama' warotsatu al anbiyaa*) justru menjadi pendukung kekuasaan tiranik, koruptif dan zalim. Godaan kekuasaan membuat kaum ulama menjadi *ulama as su'u*. Bagi anak-anak muda itu, keadaan ini memuakkan dan harus dirubah. Bila perlu dilawan dengan kekerasan. Di sinilah motif perlawanan politik dan gejala radikalisasi muncul di kalangan anak-anak muda itu. Salahkah mereka? Tidaklah arif menimpakan seluruh 'kesalahan' pada anak-anak muda yang sedang mencari jati diri itu. Nampaknya para ulama dan cendekiawan Muslim kita perlu intropeksi diri bahwa mereka telah gagal menawarkan wacana ideologi alternatif bagi anak-anak muda itu.

Anak-anak muda yang tertarik pada Marxisme, Komunisme atau Sosialisme Demokratis (*democratic socialism*) menjadikan Marx-Engels, Tan Malaka, Bung Karno, Che Guevarra, atau Antonio Gramci atau tokoh-tokoh teologi pembahasan (*theologi of liberation*) panutan. Dan kekaguman terhadap tokoh-tokoh itu melampaui batas-batas agama (trans agama). Di antara mereka sebagian beragama Islam, Kristen atau Khatolik. Karya para tokoh legendaris sejarah itu dijadikan sumber inspirasi, ideologi dan platform perjuangan mereka. Anak-anak (mahasiswa) Muslim yang memiliki kecenderungan 'radikal' serta terlibat dalam kelompok diskusi Islam di kampus, usrah, atau kegiatan tarbiyyah menemukan 'sumber kekuatan spiritual dan ideologis' dalam sosok Hasan Albana, Sayyid Qutb, Abul A'la Maududi, Mohammad Natsir atau S.M. Kartosoewirjo. Ada juga yang mengagumi Dr. Ali Syariati, ideolog dan arsitek Revolusi Islam Iran. Sebagian mereka juga mengagumi pemikir-pemikir Islam 'moderat' seperti Nurcholish Madjid atau Amien Rais.

Idealisasi terhadap Kartosoewirjo semakin diperkuat oleh proses sosiologis yang berlangsung selama Orde Baru. Modernisasi --sebagai prasyarat pelaksanaan ideologi developmentalisme (*ideology of developmentalism*)-- telah menyebabkan disorientasi kehidupan keagamaan, dan meretakkan ikatan-ikatan persaudaraan dalam struktur kehidupan Muslim Indonesia. Ukhuwah

Islamiyah yang intinya, meminjam Emile Durkheim, solidaritas organis digantikan oleh solidaritas mekanis. Semangat kolektif digantikan individualisme. Manusia menjadi egois dengan dirinya. Kehausan spiritual pun menggejala, khususnya di kalangan kaum muda terpelajar di kampus-kampus. Mereka frustasi dengan ideologi sekuler --sebagai bagian dari modernitas-- dan meng-anggapnya sebagai bencana bagi kemanusiaan dan penyebab degradasi kehidupan spiritual. Mereka mengalami kehausan spiritual, lalu mencari jalan yang bisa memuaskan dahaga spiritual itu. Dalam proses pencarian itulah sebagian mereka menemukan 'air penyejuk' kehausan spiritualisme dengan memasuki perkumpulan Jama'ah Tabligh atau sejenisnya yang banyak tersebar di kota-kota besar seperti di Jakarta, Bandung dan Surabaya. Sebagian lainnya menemukan 'air penyejuk kedahagaan spiritual' itu dalam ajaran-ajaran S.M. Kartosoewirjo, tokoh utama Darul Islam. Dengan memasuki kelompok pergerakan ini mereka merebut kembali kehangatan persaudaraan sesama Muslim, kesatuan jama'ah dan menemukan wadah yang pas untuk mengeks-presikan makna-makna simbolik politik Islam. Alasan ini misalnya yang melatari keter-libatan Al Chaidar dalam gerakan DI. Dalam wawancaranya dengan Aliansi Keadilan, ia mengatakan, "Saya memang merasa haus belajar Islam karena suasana kampus itu sangat sekuler dan sangat individualis. Jadi, hati saya kosong dan kering. Maka saya merasa harus belajar Islam, tapi harus Islam yang berpolitik, biar tidak tanggung. Saya malas belajar Islam kalau bukan Islam yang berpolitik."

Keterlibatan anak-anak muda dalam gerakan DI juga disebabkan ideologi dan ajaran-ajaran Kartosoewirjo memiliki daya pikat kuat. Ini salah satu kunci untuk mema-hami mengapa gerakan DI mampu bertahan selama puluhan tahun. Daya pikat itu terletak pada:

Pertama, kemampuan Kartosoewirjo mengartikulasikan gagasan-gagasan Islam yang langsung diambil dari sumber utama Islam, Al-Qur`an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Tampaknya ia juga menguasai khasanah sejarah (tarikh) periode Islam klasik. Perpaduan analisa tekstual-skripturalis dengan analisa historis yang dikemukakan dalam karya-karyanya memiliki daya tarik kuat khususnya bagi mereka yang terobsesi untuk 'kembali kepada Al-Qur`an dan Sunnah Nabi' dan perjuangan menegakkan Islam 'kaffah' (sempurna).

Kedua, image Kartosoewirjo sebagai 'pembela' kaum dhu'afa (mustadh'afien, tertindas) menjadi daya tarik lain mengapa kaum muda terpikat pada DI. Ideologi DI yang Kartosoewirjo memiliki andil penting merumuskannya, menunjukkan keberpihakan kuat pada kaum tertindas ini (Buktinya? Lihat kutipan idiom-idiom Al-Qur`an tentang dhu'afa dalam Sikap Hidjrah PSII). Image keberpihakan itu diperkuat oleh kehidupan sehari-hari Kartosoewirjo yang sederhana. Jauh dari kemewahan. Bila tokoh-tokoh 'nasionalis sekuler' banyak menghabiskan waktu mereka dengan berdansa-dansi, minum khamar --sebagaimana kolonialis Belanda yang dimusuhinya-- maka

Kartosoewirjo menghabiskan waktunya di Insitute Suffah, di pedesaan Malangbong Tasikmalaya (Jawa Barat). Di tempat itu ia memasuki dunia tasawuf, mistisisme Islam.

Dalam soal keberpihakan DI terhadap kaum tertindas ideologinya memiliki 'kemiripan' dengan ideologi Marxis (Marxisme). Marxisme memiliki daya pikat kuat bagi kaum tertindas (istilah Marxis: kaum proletariat). Di mata kaum marxis, Karl Marx (1818-1885) adalah 'Nabi kaum tertindas' (Prophet of the Proletariat). Di masa jayanya PKI (1950-1965) pelecehan terhadap Marx membangkitkan kemarahan kaum komunis, sama seperti kemarahan umat beragama manakala seorang nabinya dilecehkan.

Ketiga, janji-janji dan harapan-harapan messianistik yang ditawarkannya kepada generasi muda Islam. Ideologi DI menjadikan bahwa keterlibatan dalam aktivitas DI dan perjuangan demi DI kelak memberikan 'penyelamatan' manusia. Bila tidak di dunia ini, maka 'penyelamatan' itu kelak akan diperoleh di akhirat. Pengorbanan apa pun yang diberikan untuk perjuangan DI tak pernah sia-sia. Kematian akibat perjuangan DI dijanjikan memperoleh kesyahidan (martyrdom) dan membawa seseorang ke surga yang penuh kenikmatan. Ideologi inilah yang menyebabkan banyak anggota DI yang tahan menghadapi siksaan dan penderitaan. Di sini terletak salah satu kekuatan ajaran DI yang tidak mudah dipatahkan.

Keempat, daya pikat ideologi DI juga terletak pada wataknya yang romantis. DI merupakan sebuah gerakan revolusioner yang berupaya menghidupkan kembali romantisme Islam zaman Rasulullah Muhammad SAW. DI merupakan sebuah simboli-sasi 'glorification of the past'. Di kalangan aktivis DI, ajaran-ajaran Kartosoewirjo memberikan --meminjam istilah Holk H. Dengel-- 'angan-angan' akan kejayaan Islam masa lampau, khususnya di zaman Nabi Muhammad. Perjuangan DI berupaya mewu-judkan kembali kejayaan masa lampau Islam itu dalam konteks dunia (modern) masa kini. Romantisme secara emosional memang memikat, karena ia melahirkan gairah untuk perjuangan membela cita-cita.

Kelima, sebagaimana Marxisme, ideologi DI merupakan ideologi monolitik (monolithic ideology). Sebagai ideologi monolistik, ideologi DI meyakinkan para penganutnya akan kemampuannya sebagai 'alat penjelasan' terhadap apa pun persoalan hidup manusia. Tidak hanya persoalan dunia, tapi juga akhirat. Segala persoalan hidup manusia di dunia dan akhirat seakan ada jawabannya dalam ideologi itu. Dan, dalam kehidupan spiritual manusia modern yang mengalami kegamangan, ketidak berdayaan menghadapi masa depan yang tidak pasti, dan 'kekeringan jiwa' ideologi monolistik seperti itu berdaya pikat luar biasa. Inilah faktor-faktor yang membuat ideologi DI dan Kartosoewirjo memiliki daya tarik.

KARTOSOEWIRJO: BIOGRAFI POLITIK INTELEKTUAL

Sampai saat ini biografi Kartosoewirjo tetap merupakan 'misteri' sejarah. Siapa sesungguhnya Kartosoewirjo? Bagaimana tokoh ini menapaki jalan kehidupan intelektual, spiritual dan politiknya ketika hidup? Mengapa akhir kehidupan tokoh ini tragis, mati ditembak seperti 'anak-anak revolusi' Indonesia lainnya? Selama Orde Baru biografi Kartosoewirjo, seperti juga biografi Mohammad Natsir, Syafruddin Prawira-negara, Isa Anshary, Tan Malaka, Syahrir, Bung Karno dan Jenderal Sudirman seakan dihalangi dinding-dinding tebal wacana sejarah formal. Ada semacam kesengajaan untuk menyembunyikan peran-peran historis mereka dengan tujuan politis melanggengkan kekuasaan.

Ini berakibat buruk. Angkatan muda Indonesia saat ini yang nota bene tidak pernah mengalami pahit getirnya dinamika politik zaman Revolusi, Demokrasi Parlementer, dan Orde Lama, kurang atau bahkan tidak mengenal sama sekali tokoh-tokoh sejarah bangsa mereka sendiri. Mereka tidak mengenal secara objektif sisi 'plus-minus' peran historis dan jasa-jasa tokoh-tokoh sejarah itu. Bila demikian, bagaimana mungkin bangsa ini bisa belajar dari kesalahan atau kearifan mereka di masa lampau? Bagaimana mungkin bangsa ini menghargai jasa-jasa pahlawannya bila mereka tak dikenal? Padahal, seperti dikatakan Bung Karno, "Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya."

Yang berkembang kemudian, yang justru diyakini sebagai kebenaran sejarah, adalah mitologisasi sosok mereka. Mitologisasi itu misalnya terjadi dalam sosok Bung Karno. Cerita-cerita sejarah tentang Bung Karno berkembang penuh mitos yang kebenarannya sukar dipertanggung jawabkan secara akademis. Anak-anak muda kita mengidolakan Bung Karno tanpa pemikiran kritis. Dinding-dinding mitos di sekitar tokoh ini tentu perlu di 'sobek', agar sosok tokoh sejarah itu nampak sebagaimana adanya (as it is). Biografi dan sejarah Bung Karno perlu didekonstruksi, sekaligus direkonstruksi.

Ketokohan Kartosoewirjo juga diliputi mitos dan manipulasi sejarah. Di masa Orde Baru karakter tokoh ini dimanipulasi dan dimitoskan, sehingga yang tampil di hadapan kita adalah Kartosoewirjo 'pemberontak', pengkhianat bangsa dan musuh negara jauh dari apa yang digambarkan Hiroko Horikoshi yang menilai tokoh ini sebagai pejuang anti penindasan kolonial, berjasa membendung Komunisme di zaman pergerakan nasional dan pejuang keadilan. Lukisan 'distortif' tentang Kartosoewirjo itu diindoktrinasi selama Orde Baru melalui berbagai penataran P4 (Pedoman, Peng-hayatan, Pengamalan Pancasila) dan pelajaran sekolah dari SD hingga SMU.

Hal serupa dilakukan dalam pendidikan-pendidikan militer tingkat SESKO ABRI. Sisi-sisi positif kehidupan pribadi dan politiknya nyaris tidak akan ditemukan dalam buku-buku sejarah formal Orde Baru.

Dalam hal ini Orde Baru berhasil mensosialisasikan kebohongan sejarah untuk waktu relatif lama. Biografi Kartosoewirjo oleh karena itu perlu didekonstruksi. Peran-peran historisnya, terutama pra-gerakan DI (1949) perlu dikaji secara akademis, jujur dan objektif. Tanpa campur tangan kepentingan kekuasaan. Kartosoewirjo harus dilihat sebagai manusia yang memiliki kelebihan, sekaligus kelemahan. Sama seperti kita melihat sosok Bung Karno. Hanya dengan cara itulah kita bisa jujur pada sejarah. Saya kira dengan cara itulah generasi muda Indonesia akan mampu menempatkan ketokohan Kartosoewirjo dalam spektrum wacana sejarah yang adil dan objektif. Lepas dari bias-bias kepentingan politik. Dan dengan cara itu pula bangsa kita belajar semakin dewasa dalam menatap sejarah masa lampau.

Dekonstruksi sejarah dan biografi Kartosoewirjo dilakukan dengan menggali beberapa topik berikut. Pertama, bagaimana sesungguhnya peran Kartosoewirjo di zaman Kolonial, pergerakan nasional sebelum Indonesia merdeka? Apa makna historis keberadaannya dalam perjuangan melawan penjajahan? Kedua, dengan maksud dan tujuan apakah Kartosoewirjo membentuk DI?

Mengapa ia memberontak terhadap pemerintahan Bung Karno? Apa motif sosial-ekonomi, militer dan ideologis yang melatari pemberontakannya? Adakah ia merasa dikhianati oleh Republik, ataukah karena wataknya yang tidak kompromistis? Mengapa kemudian ia menggunakan cara kekerasan (dengan membentuk Tentara Islam Indonesia/TII) untuk membentuk Negara Islam? Faktor-faktor apakah yang menyebabkan gerakan yang dipimpinnya mampu bertahan untuk jangka waktu relatif lama?

Jawaban-jawaban jujur dan objektif terhadap pertanyaan itu akan mampu memberikan gambaran yang lebih jernih tentang sosok sesungguhnya Kartosoewirjo. Untuk sampai kepada penjelasan-penjelasan historis yang objektif itu tentu diperlukan berbagai persyaratan tehnik-metodologis. Dua di antaranya adalah tersedianya data-data primair seperti tulisan, karya atau pidato-pidato Kartosoewirjo. Data primair ini sangat penting dalam kajian biografis karena mampu memberikan gambaran pemikiran Kartosoewirjo langsung dengan menggali sumber pertama. Sayangnya, tulisan-tulisan Kartosoewirjo sukar diperoleh. Peneliti serius mungkin dapat memperolehnya di perpustakaan luar negeri, seperti perpustakaan Leiden (Belanda), Monash University, Australian National University (Australia), Cornell University (Ithaca, AS), atau Library Congress (Washington DC, AS).

Diperlukan juga sejarawan biografi profesional yang benar-benar mumpuni melacak kehidupan pribadi tokoh sejarah. Namun di sinilah letak kelemahan dunia akademik kita selama ini. Kita belum memiliki, kalau pun ada jumlahnya amat terbatas, sejarawan ahli biografi itu. Dunia akademik barat telah lama memiliki sejarawan yang mengkhu-suskan kajiannya pada biografi

tokoh-tokoh sejarah. Rudolf Mrazeck misalnya yang mengkaji biografi Tan Malaka dan Sutan Syahrir. Karya Mrazeck tentang Tan Malaka menarik dilihat dari perspektif kultural dan psikoanalisa yang dipakainya untuk memahami dinamika pemikiran dan tingkah laku kedua tokoh itu. Riwayat hidup Tan Malaka ibarat cerita detektif, penuh kisah dramatis. Dia juga tokoh unik dan misterius. Mungkin karena alasan ini Mrazeck tertarik mengkaji biografinya. Biografi Kartosoewirjo, saya kira tidak kalah menariknya dengan Tan Malaka, Syahrir, atau juga Bung Karno. Liku-liku dan perjuangan hidup Kartosoewirjo unik, dramatis, penuh 'misteri'.

Kartosoewirjo, meminjam Herbert Marcuse, bukan 'manusia satu dimensi' (one dimensional man) yang melulu bergulat dengan wacana teoritis yang abstrak. Dia juga seorang aktivis politik yang bergulat dengan dunia praxis dan menjadi bagian darinya. Karier semasa hidup membuktikan hal itu; Kartosoewirjo menjadi teoritisi dan politikus (PSII dan Masyumi, era 1920-an - pertengahan 1940-an), mistikus, wartawan, dan iman gerilyawan DI TII.

Kartosoewirjo adalah tokoh gerilyawan legendaris. Tidak berlebihan menyebut reputasinya sebagai gerilyawan jauh di atas tokoh Falintil, Xanana Gusmao. Ia mungkin setara dengan Che Guevarra, gerilyawan dan teoritisi Marxis terkemuka Amerika Latin. Atau setara dengan Nur Misuari, gerilyawan MNLF (Moro National Liberation Front). Belasan tahun lamanya Kartosoewirjo bersama pengikutnya tetap survive bergerilya di belantara hutan-hutan pegunungan Jawa Barat. Dalam keadaan sakit parah pun, sama seperti almarhum Panglima Besar Jenderal Sudirman, gerilya itu tetap dilakukannya.

Banyak persoalan di sekitar kehidupan pribadinya sejak remaja, masa pendudukan Jepang, zaman revolusi hingga detik-detik terakhir kehidupannya masih menjadi 'teka-teki' sampai saat ini. Sejarawan telah mengungkap sebagian perjalanan hidupnya. Namun, sejauh penelitian yang telah dilakukan mereka, tetap saja masih banyak 'misteri' kehidupan Kartosoewirjo yang tetap menuntut kejelasan.

Kartosoewirjo dilahirkan 7 Januari 1907 di Cepu, perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ayahnya seorang makelar candu di desa Pamotan, Rembang. Melihat pekerjaan ayahnya, jelas Kartosoewirjo bukanlah dilahirkan dalam keluarga santri, tapi keluarga abangan atau priyayi. Yang pasti keluarganya termasuk keluarga terpandang di masa itu. Ini dibuktikan dengan kemampuan keluarganya menyekolahkan Kartosoewirjo ke sekolah Belanda. Mengenai struktur nasabnya, Kartosoewirjo pernah menyebarkan desas-desus dirinya 'berdarah biru', keturunan Aryo Jipang, seorang cucu Raden Patah sang penakluk kerajaan Hindu Majapahit. Pada usia 6 tahun ia masuk SR (Sekolah Rakyat), sekolah yang khusus bagi pribumi di Pamotan. Kartosoewirjo belajar hanya sampai kelas IV di SR itu, karena kemudian pindah ke HIS

(Hollandsch-Inlandsche School). Tahun 1919 orang tuanya pindah ke Bojonegoro, maka Kartosoewirjo pun pindah sekolah. Oleh orang tuanya ia dimasukkan ke ELS (Europeesche Leger School). Semasa di Bojonegoro inilah ia belajar Islam pada Notodihardjo. Inilah satu-satunya pendidikan agama yang diperoleh Kartosoewirjo di masa kanak-kanak dan remajanya. Kartosoewirjo tidak pernah memasuki sistem pendidikan Islam seperti pesantren yang banyak terdapat di Jawa Timur. Kartosoewirjo, seperti Soekarno, adalah seorang otodidak. Pengetahuannya tentang Islam sangat mungkin diperolehnya melalui buku-buku agama (berbahasa Belanda dan Inggris) atau diskusi dengan pemimpin-pemimpin politik Islam seperti H.O.S. Tjokroaminoto dan H. Agus Salim.

Setelah lulus dari ELS (1923) Kartosoewirjo masuk Sekolah Kedokteran NIAS (Nederlandsche Indische Artsen School). Pendidikannya di NIAS tidak diselesaikannya karena ia diberhentikan (drop out) akibat menyimpan buku-buku Marxis-Komunis, 1927. Di mana itu (1926-1927) pemerintah kolonial Belanda sedang gencar-gencarnya memburu orang-orang komunis yang dianggap terlibat dalam pemberontakan PKI. Sebagian komunis yang tertangkap dipenjarakan, disiksa atau dibuang ke Boven Digoel. Siapa pun yang kedapatan menyebarkan ideologi Marxis-Komunis ditangkap. Maka sangat beralasan bila pihak sekolah NIAS menghukum Kartosoewirjo dengan mengeluarkannya dari sekolah tersebut. Berhenti dari sekolah, bukanlah akhir proses belajar otodidaknya. Sistem pendidikan kolonial yang sempat digelutinya memberi-kannya bekal yang relatif cukup untuk menjelajahi berbagai pemikiran dan filsafat politik yang berkembang pada zaman itu, antara lain Marxisme.

Kartosoewirjo mempelajari (menyimpan) karya-karya Marxis? Dari mana ia memperoleh tulisan-tulisan itu? Kartosoewirjo mempunyai seorang paman bernama Marko Kartodikromo, tokoh komunis (PKI) seangkatan dengan Alimin, Tan Malaka, Semaun dan Darsono. Marko inilah yang memberikan buku-buku itu kepada Kartosoewirjo . Juga melalui pamannya inilah Kartosoewirjo tertarik pada Marxisme. Tetapi, kenapa ia tertarik? Tampaknya Marxisme (dan Komunisme) di zaman itu merupa-kan sebuah ideologi anti kolonialisme-imperialisme dan berpihak kepada rakyat tertindas. Inilah yang menjadi daya tarik Marxisme-Komunisme bagi kaum pergerakan ketika itu. Maka, tidak terlalu mengejutkan bila banyak tokoh pergerakan --termasuk yang beragama Islam-- yang mempelajari dan terinspirasi ideologi itu (terutama Marxisme). Di antara tokoh pergerakan itu antara lain: Tjokroaminoto, Soekarno, Hatta, Syahrir, Haji Misbach dan Kartosoewirjo.

Bila ini diakui keabsahannya, maka terbuka kemungkinan radikalisme Kartosoe-wirjo dan semangat anti kolonialisme-imperialismenya di masa remajanya produk interaksi intelektualnya yang intensif dengan pemikiran-pemikiran Marxis. Ini bisa dimengerti mengingat akses

Kartosoewirjo terhadap pemikiran atau ideologi Islam amat terbatas. Pendidikan agamanya, sebagaimana dikatakan di atas, juga terbatas. Ini barulah sebuah hipotesis yang perlu diteliti lebih jauh. Tapi tidak tertutup kemungkinan pula Kartosoewirjo mengalami radikalisasi akibat persentuhan dirinya dengan gagasan-gagasan Pan Islamisme Al-Afghani yang di masa itu cukup berpengaruh terhadap tokoh-tokoh pergerakan Islam. Situasi revolusioner, khususnya menjelang pemberontakan 1926-1927 juga telah membentuk wataknya menjadi radikalis.

Kartosoewirjo diusia remaja tidak seperti Natsir atau K.H. Agus Salim --tidak menguasai bahasa Arab yang amat vital bagi usaha memahami pemikiran Islam. Dalam soal ini, Kartosoewirjo tidak banyak berbeda dengan Soekarno. Interaksi pemikiran Kartosoewirjo paling intensif terjadi ketika belajar Islam dari Ajengan Ardiwisastra di Malangbong (Tasikmalaya, Jawa Barat). Lalu, salahkah Kartosoewirjo, seperti juga Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Syahrir dan lain-lain mengadopsi pemikiran-pemikiran Marxis? Saya kira tidak juga. Karena pertama, mereka adalah sebagian dari produk sistem pendidikan kolonial. Dalam sistem pendidikan kolonial, guru-guru Belanda yang mendidik tokoh-tokoh itu sebagian bersemangat marxis-humanis dan liberal.

Mereka inilah yang mempengaruhi anak-anak didiknya seperti Soekarno, Syahrir, atau Hatta. Kedua, di zaman itu bangsa kita membutuhkan sebuah ideologi perlawanan terhadap kolonialisme-imperialisme. Kekejaman penjajahan mesti di ‘sobek’, dan itu hanya mungkin dilakukan oleh gerakan-gerakan ideologis radikal seperti Marxisme. Ketiga, struktur sosial mengalami proses ideologisasi dalam skala pasif. Berbagai aspek kehidupan sosial, politik dan agama mengalami ideologisasi. Oleh karena itu, sejarawan Kuntowijoyo menyebut zaman itu (dekade pertama abad XX), ‘fase ideologi.’ Dalam konteks historis itulah pengadopsian Marxisme mesti dipahami. Dalam perspektif mereka Marxisme menyediakan suatu basis ideologis bagi perlawanan itu. Di mana itu, bahkan berkembang anggapan bahwa Marxisme-Komunisme tidak bertentangan dengan Islam karena keduanya sama-sama berpihak kepada kaum tertindas dan anti kolonialisme-imperialisme. Penganut pandangan ini antara lain Soekarno dan Haji Misbach.

Di sinilah saya kira perbedaan menyolok antara Kartosoewirjo dengan Natsir misalnya. Sama seperti patriot bangsa lainnya, Natsir juga anti kolonialisme-impe-rialisme. Namun wataknya yang demikian lebih terinspirasikan oleh Islam, ketimbang Marxisme. Natsir sejak kanak-kanak telah belajar Islam di surau dan beranjak remaja dididik tokoh-tokoh Islam seperti Ahmad Hasan, radikalis Persis (Persatuan Islam) dan Haji Agus Salim. Bagi Natsir, Islam adalah agama anti penindasan yang menolak ekploitasi manusia oleh manusia (L’exploitation de L’homme par L’homme).

Bila benar radikalisme Kartosoewirjo terinspirasikan oleh Marxisme maka persoalannya kemudian adalah bagaimana tokoh ini bisa memilah Marxisme sebagai ideologi perlawanan (ideologi of protest) dan pada saat yang sama membuang jauh-jauh 'unsur-unsur ateistik' dalam ajaran-ajaran Marx itu? Persoalan ini patut dikaji sejarawan biografi.

Kecenderungan Kartosoewirjo pada kegiatan organisasi sudah mulai nampak tatkala memasuki Jong Java, Jong Islamieten Bond (JIB) dan kemudian PSII. Dalam waktu relatif singkat Kartosoewirjo telah menunjukkan kemampuannya memimpin. Tidak terlalu mengejutkan bila tokoh Sarekat Islam H.O.S. Tjokroaminoto kemudian mengangkatnya menjadi sekretaris pribadinya. Sebagai sekretaris Tjokroaminoto, Kartosoewirjo jelas memiliki tempat tersendiri di hati tokoh puncak Sarekat Islam itu. Dalam hubungan dekatnya dengan Tjokroaminoto itulah nampaknya Kartosoewirjo belajar banyak tentang Islam, metode organisasi, berkomunikasi dengan massa dan membangun kekuatan umat. Dan di masa ini pula 'sosok Islam ideologis' Kartosoe-wirjo mulai terbentuk. Ia mulai mendambakan lahirnya Negara Islam dan masyarakat Islam ideal di Indonesia suatu saat kelak. Juga di rumah Tjokroaminoto (Cimahi, Bandung) untuk pertama kalinya Kartosoewirjo berkenalan dengan Soekarno yang ketika itu telah menjadi ketua PNI. Interaksi Soekarno dengan Kartosoewirjo di rumah Tjokroaminoto masa itu tentu merupakan peristiwa sejarah menarik yang patut diteliti sejarawan.

Dalam usia 20 tahun (1927), Kartosoewirjo menjadi wartawan surat kabar Fadjar Asia mulai dari bawah sebagai korektor dan reporter. Dalam waktu 16 bulan kemudian ia diangkat sebagai wakil pemimpin redaksi dan kuasa usaha. Ini prestasi cukup mengesankan ketika itu. Dalam fase kehidupan jurnalistik inilah Kartosoewirjo mengembangkan kemampuan artikulasi gagasan-gagasannya. Fadjar Asia wadah pa-ling tepat untuk itu. Dalam Fadjar Asia itulah tulisan-tulisannya 'mengalir' bak air terjun.

Gagasan-gagasan radikal Kartosoewirjo mulai nampak dalam artikel-artikel Fadjar Asia itu. Ia menentang para bangsawan Jawa (kaum priyayi) yang bekerja sama dengan pemerintahan Belanda. Pembelaannya terhadap kaum tertindas, petani kecil dan buruh-buruh juga dikemukakan. Ketika para petani kecil di Lampung diusir dari tanah miliknya oleh 'kapitalis asing', Kartosoewirjo menulis: "Orang-orang Lampung dipandang dan diperlakukan sebagai monyet belaka, ialah monyet yang diusir dari sebatang pohon ke sebatang pohon lainnya." Dikecamnya Volksraad yang tidak melindungi dan berpihak kepada rakyat serta 'hanya omong kosong belaka.'

Kepada kaum buruh ia menyerukan melawan para penindasnya: "Jangan berkeluh kesah, jangan meminta-minta! Jangan tinggal diam saja! Kalau takut mati jangan hidup! Kalau hendak hidup janganlah takut mati!" Dalam tulisannya yang lain ia mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia

hanya bisa diperoleh dengan pengorbanan: "Sebab kemerdekaan tanah air itu tidaklah sedikit harganya, yang oleh karenanya harganya, tentu bakal memakan korban luar biasa."

Kepada kaum abangan dan PNI Soekarno yang menyerang Islam, reaksi Kartosoewirjo lebih keras lagi. Mengetahui Parada Harahap --ketua redaksi Bintang Timoer-- menghina Islam, Kartosoewirjo menulis: "Si Parada Harahap menjilat-jilat pantat dan mencari muka kaum Nasionalis (PNI). Menjilat pantat dan mencari muka, karena ia perlu akan hal itu sebab boleh jadi Parada Harahap takut kalau ia lantaran berbuat berkhianat terhadap kepada bangsa dan tanah air -mendapat kemplangan di arah kepalanya, sehingga boleh jadi ia menjadi tidak sadar kalau tidak mampus sama sekali." Kartosoewirjo juga menjuluki Parada Harahap 'Penjual Bangsa Indonesia', dan 'Binatang Tikus dari Krekot.'

Dalam dekade 1930-an peran politik Sarekat Islam semakin menurun akibat wafatnya Tjokroaminoto (1934), krisis keuangan, munculnya golongan nasionalis sekuler (PNI Soekarno), dan konflik internal antara kubu kooperatif versus non-kooperatif. Sebelumnya SI dilanda konflik antara 'SI Merah versus SI Putih?' Dalam pergolakan di tubuh SI itu, Kartosoewirjo bersama Abikoesno Tjokrosoejoso berpihak ke kubu 'SI Putih' dan kubu non-kooperatif. Di masa ini Kartosoewirjo memainkan peran politiknya yang strategis dalam Sarekat Islam. Ia seakan menjadi 'pemimpin politik bayangan' yang menggantikan Tjokroaminoto. 'Peran sentral' tampak dari per-mintaan organisasi agar Kartosoewirjo menulis Brosur Sikap Hidjrah PSII yang dapat dijadikan landasan ideologis perjuangan PSII. Sikap Hidjrah PSII merupakan master-pice, salah satu karya tulis terbaik Kartosoewirjo.

Dalam tulisan itu Kartosoewirjo membahas fase-fase perjuangan Islam PSII, kewajiban jihad dan hijrah dan konsolidasi kekuatan Islam. Secara kreatif-inovatif ia menganalogikan Indonesia sebagai Makkah yang harus ditransformasikan menjadi Madinah. Makkah dan Madinah bermakna simbolik, yang pertama bermakna negara kafir (jahiliyah) dan yang kedua Negara Islam. Menegakkan negara berdasar Islam menurutnya adalah bagian dari upaya umat Islam mengikuti sunnah (tradisi) Rasulullah Muhammad SAW. Di sini Kartosoewirjo mendemonstrasikan secara piawai pengetahuannya mengenai tarikh klasik Islam, tafsir Al-Qur`an dan strategi perjuangan mene-gakkan Islam.

DI : ANGAN-ANGAN KEKUASAAN POLITIK ISLAM

Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Proklamasi merupakan ekspresi simbolik tegaknya Indonesia sebagai sebuah negara bangsa yang berdaulat penuh, otonom. Indonesia memasuki fase paska kolonialisme. Tidak semua pejuang kemerdekaan sepakat dengan proklamasi itu. Tokoh-tokoh ber-ideologi komunis (PKI) seperti

Muso dan Amir Syarifuddin menolak negara Republik Soekarno. Mereka berontak, dan meletuslah peristiwa Madiun (1948). Pemberontakan gagal, dan keduanya ditembak mati.

Kartosoewirjo pada awalnya tidak bersikap antagonistik terhadap RI. Tapi kekecewaan demi kekecewaan yang dialami Kartosoewirjo dan pengikut-pengikutnya menyangkut berbagai sektor sosial, ekonomi, politik, militer, agama dan psikologis mengubah keadaan itu. Ia membentuk Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dan melakukan perlawanan frontal terhadap RI. Jadi, pemberontakan Kartosoewirjo bukanlah suatu peristiwa politik yang berdiri sendiri lepas dari konteksnya. Maka, tidak-lah adil menilai Kartosoewirjo dan DI sebagai pemberontak tanpa menganalisis sebab-sebab yang melatarinya.

Awal kekecewaan Kartosoewirjo, dan saya kira juga banyak faksi-faksi politik Islam, adalah ketika 'tujuh kata' dalam Piagam Jakarta (Jakarta Charter) "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya" dicoret oleh Hatta tidak lama setelah teks proklamasi dibacakan. Peristiwa pencoretan itu merupakan 'pukulan telak' (KO, Knock out) bagi umat Islam yang sejak zaman penjajahan Belanda mendambakan diberlakukannya syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pan-dangan Kartosoewirjo pencoretan itu merupakan awal kekalahan politik Islam berha-dapan dengan golongan nasionalis sekuler di saat negara Indonesia baru saja dilahirkan. Benih-benih perlawanan terhadap RI pun mulai tumbuh.

Kekecewaan lain menyusul. Paska perjanjian Renville (1948), semua kekuatan gerilya TNI yang berada di kantong-kantong pertahanan Jawa Barat diwajibkan hijrah (mengungsi) ke Yogyakarta. Ibu Kota negara pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Bagi para pejuang DI hal itu mengecewakan tidak hanya karena menunjukkan sikap kompro-mistis RI dan TNI kepada pihak Belanda, tapi juga membiarkan rakyat Jawa Barat tidak terproteksi. Hijrah TNI ini dianggap 'penghianatan' yang kemudian membang-kitkan amarah rakyat Jawa Barat. Apalagi yang mengungsi itu adalah Divisi Siliwangi, tentara kebanggaan rakyat Jawa Barat. Kartosoewirjo dan laskar bersenjatanya menolak hijrah ke Yogyakarta dan tetap bertahan di kantong-kantong gerilya di hutan-hutan Jawa Barat. Dari sinilah awal munculnya simpati rakyat Jawa Barat terhadap perjuangan heroik-patriotik Kartosoewirjo dan DI. Apalagi selama itu Kartosoewirjo dikenal sangat tidak kompromistis terhadap Belanda, khususnya menyangkut eksistensi Negara Pasundan.

Natsir, ketika itu menteri penerangan mengomentari hijrah TNI: "Hubungan kami dengan Kartosoewirjo pada masa sebelumnya rapat sekali. Bung Hatta juga selalu berhubungan dengannya. Soalnya, Persetujuan Renville telah mengusir TNI "hijrah" dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Orang-orang Jawa Barat merasa ditinggalkan dalam perjuangan. Waktu itu Kartosoewirjo pulang balik ke Yogyakarta dan langsung menemui Bung Hatta. Bung Hatta

memberi bantuan supaya Kartosoewirjo bisa sedikit mendi-nginkan orang-orang Jawa Barat yang merasa ditinggalkan Republik." Menurut pengakuan Natsir, tidak hanya Kartosoewirjo dan rakyat Jawa Barat yang kecewa dengan hijrah TNI itu. Bung Hatta juga sedih Perjanjian Renville menyebabkan Jawa Barat di-tinggalkan TNI. Hatta menilai hijrah TNI akibat ulah Perdana Menteri Amir Syarifuddin (PKI) yang tanpa pikir panjang menyerahkan Jawa Barat begitu saja kepada Belanda.

Merasa posisinya semakin kuat pada 7 Agustus 1949 Kartosoewirjo memprokla-masikan Negara Islam Indonesia (NII) di Cisampah, daerah Cisayong (Jawa Barat) sebagai tandingan atas Negara Republik Indonesia. NII menjadi 'negara dalam negara'. Negara bentukan Kartosoewirjo ini memiliki konstitusi (Qonun Azasi), struktur administratif dan birokrasi pemerintahan maupun angkatan bersenjata yang terlatih (Tentara Islam Indonesia/TII). Sejak awal kelahirannya NII telah menunjukkan keunggulannya sebagai negara berdasar agama di abad modern Indonesia. Sejauh yang saya ketahui tidak ada satu pun gerakan Islam Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini yang mampu mengungguli struktur kenegaraan NII dan angkatan bersenjatanya.

Tidak semua pemimpin politik Islam ketika itu setuju dengan NII. Mohammad Natsir, tokoh puncak Partai Islam Masyumi misalnya menolak NII. Melalui surat yang dikirim melalui mantan gurunya di Persis, Ahmad Hassan, Natsir meminta Kartosoewirjo membatalkan proklamasi berdirinya NII. Namun ikhtiar Natsir sudah terlambat, sebab Kartosoewirjo telah memproklamasikan NII tiga hari sebelumnya.

Mengapa Natsir menolak NII? Bukanlah elite-elite partai Islam ketika itu, termasuk Masyumi, juga memiliki obsesi untuk mendirikan Negara Islam atau negara berdasar Islam? Dan mengapa DI bersikeras mendirikan NII? Penolakan elite-elite politik Islam itu antara lain karena umat Islam telah memiliki konsensus bersama bahwa persoalan genting yang harus segera diselesaikan bukanlah persoalan apa dan bagaimana bentuk negara Indonesia, tetapi bagaimana menghadapi agresi kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Dengan memproklamasikan NII berarti kekuatan umat Islam terpolarisasi. Di satu pihak memprioritaskan soal bentuk negara, sementara di pihak lain mempersiapkan diri untuk menghadapi agresi kolonial.

Antara Natsir dengan Kartosoewirjo juga terdapat pertikaian ideologis yang cukup tajam. Meski keduanya sama-sama Muslim 'puritan' dari segi akidah Islam, namun prilaku politik keduanya menunjukkan perbedaan yang cignifikan. Natsir adalah seorang politikus moderat, atau bahkan liberal seperti yang ditunjukkannya ketika menjadi Perdana Menteri (1950-1951). Dalam menyusun komposisi kabinetnya ia merekrut anggota kabinetnya tidak hanya berasal dari Masyumi atau partai-partai Islam tapi juga tokoh Partai Katolik seperti Kasimo atau tokoh Partai

Sosialis Indonesia, seperti Soemitro Djoyohadikusumo. Sikap politik Natsir ini membedakannya secara tegas de-ngan Kartosoewirjo yang cenderung ekslusif. Kartosoewirjo mustahil merekrut golongan Katolik, kaum sosialis atau nasionalis sekuler menjadi 'orang penting' dalam struktur kenegaraan NII.

Meskipun terdapat perbedaan pandangan cukup tajam di antara keduanya, hubungan pribadi mereka tetap baik. Keadaan itu baru berubah setelah Natsir menjadi Perdana Menteri (1950-1951). Natsir, didukung tentara (Abdul Haris Nasution) meme-rintahkan agar memerangi Kartosoewirjo dan pengikut-pengikutnya. Di mata Natsir, gerakan Kartosoewirjo telah mengacaukan situasi keamanan nasional. Oleh karena itu harus segera diredam. Banyak tentara Islam Kartosoewirjo (TII) yang terbunuh dalam berbagai clash bersenjata itu. Peristiwa ini terus berlangsung hingga Kabinet Natsir jatuh dan digantikan oleh Kabinet Dr. Sukiman. Kartosoewirjo, sebagaimana dikatakan Natsir ketika itu berucap, "Dari sekarang, tidak ada lagi hubungan dengan RI."

Perpecahan yang melanda umat Islam akibat perseteruan Natsir versus Karto-soewirjo itu menguntungkan PKI, musuh bebuyutan keduanya. Konflik Natsir versus Kartosoewirjo memberikan 'angin segar' bagi kekuatan komunis (PKI) mengon-solidasi diri. Apalagi ketika itu partai kiri ini telah membentuk jaringan aliansi khusus dengan kekuatan nasionalis sekuler, termasuk Soekarno. PKI memanfaatkan konflik internal kubu Islam untuk menyusun kekuatan di berbagai lapisan sosial khususnya lapisan bawah (graas root). Hasilnya kongkrit, PKI yang sempat dihancurkan paska peristiwa Madiun (1948) mulai bangkit kembali, dan dalam pemilu 1955 partai kiri ini berada di urutan keempat pemenang pemilu.

Mengapa Natsir bertarung dengan Kartosoewirjo? Siapa yang salah? Siapa yang benar? Kartosoewirjo memaksakan kehendaknya? Ataukah Natsir --demi memperta-hankan jabatannya sebagai Perdana Menteri-- 'mengkhianati' cita-cita kenegaraan Islam yang diperjuangkan Kartosoewirjo? Bagi angkatan muda Islam sekarang tidak terlalu penting siapa yang benar atau yang salah. Yang jelas pertarungan terbuka antara dua tokoh politik Islam itu amat merugikan Islam dan menguntungkan PKI.

Di benak mereka muncul berbagai pertanyaan mengapa hal itu harus terjadi. Apakah perbedaan-perbedaan visi, orientasi dan tujuan politik Natsir dan Kartosoewirjo sama sekali tidak memiliki 'titik temu' sehingga harus diselesaikan melalui clash bersenjata? Ataukah konteks historis saat itu tidak memungkinkan penyelesaian konflik secara damai, sehingga harus diselesaikan melalui jalan kekerasan? Pertarungan kedua tokoh umat itu menjadi warisan dan beban sejarah (historical burden) bagi generasi Islam masa kini dan mendatang. Perlu diratapi? Mungkin. Tapi pertarungan itu telah menyejarah. Angkatan muda Islam saat ini perlu mengambil hikmah dari

peristiwa itu agar ikhtilaf (perbedaan visi dan misi politik) setajam apa pun di antara umat Islam tidak dieks-presikan dalam konflik bernuansa kekerasan.

Salahkah Kartosoewirjo dan DI menawarkan ideologi Negara Islam? Tentu saja tidak. Sah-sah saja karena pada masa paska kolonialisme, khususnya dekade 1950-an semua, kekuatan sosial politik (organisasi kemasyarakatan dan partai-partai politik) diberikan hak sama untuk menyuarakan aspirasi ideologis mereka, termasuk PKI. PKI berhak mempropagandakan Komunisme menjadi dasar negara. Demikianlah juga pen-dukung Pancasila, atau faksi Murba (Musyawarah Rakyat Banyak) yang memper-juangkan ideologi sosial ekonomi atau Masyumi dan DI yang memperjuangkan Islam. Menawarkan Islam menjadi dasar negara Indonesia --apalagi dalam forum resmi seperti Dewan Konstituante (1956-1959) dan alam kebebasan Demokrasi Parlementer-- bukanlah aib politik, apalagi sebuah 'pengkhianatan' dan pemberontakan. Hanya satu hal mesti dicamkan: perjuangan ideologis itu tidak boleh melanggar konstitusi. Semua pihak harus mematuhi 'aturan main' (rule of the game) yang disepakati bersama.

Di sinilah letak demokratisnya zaman Demokrasi Parlementer yang oleh Orde Baru diklaim sebagai masa-masa suram kehidupan politik Indonesia. Kebebasan benar-benar ditegakkan. Dan kebebasan politik masa itu berhasil mengantarkan bangsa ini ke pemilu pertama (1955) yang paling demokratis dalam sejarah Republik kita. Kita saat ini mestinya banyak belajar dari pengalaman-pengalaman historis masa itu. Dan umat Islam patut 'bangga' karena pemilu itu dilakukan di masa Kabinet Burhanuddin Harahap, seorang tokoh penting Masyumi. Saya katakan patut 'bangga' karena tidak terbayangkan apa yang terjadi seandainya pemilu itu dilaksanakan di masa kabinet yang dipimpin tokoh PKI.

Persaingan politik dan ideologis akan demokratis dan adil manakala masing-masing pihak yang bersaing menanggalkan cara-cara kekerasan untuk mencapai kemenangan. Sekali cara kekerasan dipakai, ketika itu persaingan yang demokratis pun mati. Keke-rasan akan melahirkan kekerasan pula. Inilah yang terjadi ketika Kartosoewirjo dan DI-nya memakai jalan kekerasan sebagai cara paling legitimate untuk mendirikan Negara Islam. Kartosoewirjo harus berhadapan dengan Natsir yang pada mulanya menolak jalan kekerasan. Namun akhirnya memakai kekerasan pula.

Apakah perbedaan perspektif mengenai apa sesungguhnya Negara Islam itu merupakan sumber konflik di antara pemimpin-pemimpin Islam? Mungkin juga. Sejak lama tidak ada kejelasan tentang persoalan eksistensi-fundamental ini. Dalam perspektif Kartosoewirjo Islam memiliki konsepsi negara yang sangat jelas. Islam adalah agama dan negara (ad dien wa ad daulah). Gagasan Negara Islam bukanlah wishful thinking, tapi sebuah kenyataan historis. Bukan sekedar

teori politik normatif (normative political theory), tapi teori politik empiris (empirical political theory). 'Negara Madinah' zaman Nabi Muhammad SAW membuktikan hal itu. 'Negara Islam' memang 'alat' belaka, tapi sangat diperlukan demi terealisasinya syariat-syariat Islam. Di luar Negara Islam yang ada hanyalah negara thagut, sebuah pemaknaan simbolik Al-Qur`an bagi negara yang tidak didasarkan Islam.

Tidak semua tokoh-tokoh politik Islam di masa itu memiliki konsep negara yang sama seperti Kartosoewirjo. Tokoh Masyumi, Zainal Abidin Ahmad misalnya, menulis karya Membentuk Negara Islam (1956). Bila ditelaah, konsep Negara Islam versi Zainal tidak lain merupakan konsep kenegaraan barat yang dibungkus dengan wacana, idiom-idiom Islam. Jadi, konsep barat 'berbaju' Islam. Institusi-institusi politik Negara Islam (seperti DPR) yang dikemukakannya dalam buku itu nyaris tidak ada bedanya dengan institusi-institusi politik barat modern. Di sini letak perbedaan tajam konsep Zainal dengan Kartosoewirjo tentang Negara Islam. Beberapa tokoh Masyumi menegaskan bahwa partai Islam ini menghendaki masyarakat Islam (Islamic society). Kalaupun ada yang menghendaki Negara Islam dalam Masyumi, itu bukan kecende-rungan umum dalam partai Islam itu. Tokoh senior Masyumi, Mohammad Roem mengatakan bahwa dalam statuta dan anggaran dasar Masyumi tidak ditemukan satu pun kalimat yang menyebut Negara Islam. Yang ada, masyarakat Islam.

Konflik politik rupanya tidak hanya terjadi antara mereka yang berbeda organisasi namun juga yang seorganisasi. Ini misalnya nampak dalam Darul Islam sendiri seperti yang terjadi antara Kartosoewirjo dengan K.H. Yusuf Tauzuri. Di masa awal gerakan, K.H. Tauzuri adalah pendukung setia Darul Islam, namun dalam fase selanjutnya ia memisahkan diri dan berpihak ke tentara Republik. Para "tentara perlawanan" itu, terma-suk K.H. Tauzuri berpihak kepada Republik Indonesia antara lain karena alasan ideologis. Dalam Masyumi juga terjadi pertikaian antara tokoh 'moderat' seperti Natsir dengan Sukiman. Atau antara Natsir dengan K.H. Isa Anshari, tokoh radikal Masyumi Jawa Barat. Keduanya berselisih paham tentang metode menghadapi Komunisme (PKI). Natsir menghendaki cara moderat-konstitusional sedangkan Anshari memilih jalan radikal-revolusioner dalam menghadapi Komunisme.

Setelah melalui pertarungan panjang, melelahkan dan memakan banyak korban DI berhasil dilumpuhkan. Sebagian anggota DI menyerah atau kembali kepangkuan Republik. Kartosoewirjo berhasil ditangkap. Peristiwa ini menyebabkan intensitas gerakan DI berada di titik paling rendah.

Pada 5 September 1962 jam 5.50 Kartosoewirjo dihukum mati. Ini sesuai dengan keputusan sidang ke tiga MAHADPER, 16 Agustus 1960 (?). Kartosoewirjo dinyatakan bersalah karena kejahatan-kejahatan politik yang dilakukannya: (1) Makar untuk merobohkan negara Republik

Indonesia; (2) Pembe-rontakan terhadap kekuasaan yang sah di Indonesia dan; (3) Makar untuk membunuh kepala negara Republik Indonesia (Presiden Soekarno).

Dalam pengadilan terhadap dirinya Kartosoewirjo menolak tegas telah memerin-tahkan anak buahnya membunuh Presiden Soekarno. Keterangan-keterangan para saksi (11 orang) tentang adanya perintah pembunuhan oleh Kartosoewirjo itu, dibantahnya. Perintah pembunuhan itu diibaratkannya 'dongeng dan isapan jempol berbahaya' yang sengaja direkayasa untuk memastikan Kartosoewirjo dijatuhkan hukuman mati. Kartosoewirjo memberikan analogi tentang 'isapan jempol berbahaya' yang benar-benar pernah terjadi dalam sejarah. Hitler, katanya telah memanfaatkan kebakaran Gedung Reichstag di Berlin untuk membunuh kaum Yahudi Jerman. Belanda pernah mengasingkan ratusan pejuang ke Boven Digoel (Irian Barat) karena dituduh terlibat pembe-rontakan komunis (1926-1927) padahal mereka itu tidak ada sangkut-pautnya dengan pemberontakan itu. Disebutkannya juga isapan jempol berbahaya lainnya yang dikemukakan seorang saksi bernama Haris. Saksi ini mengaku telah melihat Kartosoewirjo ongkang-ongkang di Klub Konkordia (Bandung) bersama seorang Belanda bernama Schmidt sambil minum bir dan bertemu dengan Komisaris Tinggi Mahkota Belanda Lovink di Hotel Des Indes Jakarta.

Mana yang benar, pengakuan Kartosoewirjo itu, ataukah kesaksian para saksi bohong? Perihal perintah pembunuhan oleh Kartosoewirjo itu tentu perlu diteliti se-jauh mana kebenarannya. Tidakkah terbuka kemungkinan --seperti dikatakan Karto-soewirjo-- bahwa pengadilan terhadap dirinya adalah rekayasa kekuasaan Soekarno, tokoh nasionalis 'sekuler' yang semenjak zaman pergerakan menjadi musuh utamanya. Kita telah memaklumi bahwa pengadilan terhadap tokoh DI itu sepenuhnya pengadilan yang bersifat politis, bukan pengadilan demi penegakkan keadilan.

Dalam pengadilan politis --sebagaimana terjadi pada masa-masa Orde Baru-- keputusan hukuman terhadap terpidana sering telah ditentukan dari 'atas' (penguasa politik) sebelum proses pengadilan dilangsungkan.

'Misteri' hukuman mati terhadap Kartosoewirjo juga diperkuat oleh kenyataan bahwa hukuman itu benar-benar dilaksanakan. Persoalan begini. Setelah mengetahui keputusan hukuman mati itu, para pembela hukum Kartosoewirjo memohon keringanan agar kliennya tidak dihukum mati.

Hukuman itu menurut mereka terlalu berat. Kartosoewirjo pun sudah tua renta dan sakit-sakitan. Ia juga sangat berjasa bagi negara semasa zaman pergerakan dan di pengadilan bersikap baik, mempermudah jalannya persidangan dan masih memiliki tanggung jawab menghidupi keluarganya.

Lalu, bagaimana dengan Presiden Soekarno sebagai orang paling otoritatif menen-tukan 'nasib akhir' Kartosoewirjo? Soekarno ternyata juga menolak memberikan grasi yang diajukan penasihat hukum Kartosoewirjo, dengan alasan tidak ada dasar argumen-tasi untuk mengabulkannya. Tidak tertutup kemungkinan PKI berperan penting mem-pengaruhi keputusan Presiden Soekarno mengingat hubungan antara keduanya di masa itu sangat dekat. Dengan demikian, maka hukuman mati atas tokoh sejarah ini harus dilaksanakan. Yang menarik, menurut catatan Dengel, keputusan hukum mati itu disambut antusias oleh kaum komunis. Mereka mengirimkan telegram-telegram ke MAHADPER berisi pernyataan senang atas dijatuhkannya hukuman mati itu. Fakta sejarah ini tentu menarik dikaji mengingat --seperti dinyatakan di atas-- keputusan pengadilan terhadap Kartosoewirjo lebih bersifat politis, ketimbang usaha mencari 'dewi keadilan.' Kematian Kartosoewirjo ibarat 'revolusi memakan anaknya sendiri' persis seperti yang dialami oleh Amir Syarifuddin (PKI), dan Soekarno.

MENGGAGAS IDEOLOGI ALTERNATIF?

Kegetiran perjuangan DI menegakkan Negara Islam menimbulkan trauma historis dan ketegangan dalam hubungan Islam-negara Orde Baru selama beberapa dekade. Islam kemudian seakan identik dengan kekerasan politik (political violence) dan pem-berontakan. Umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk negeri ini mengidap apa yang dinamakan Wertheim kompleks minoritas (minority complex). Keadaan ini merugikan umat Islam secara keseluruhan. Inilah salah satu alasan strategis kemunculan pemikiran yang menolak konsep Negara Islam dan menyebut fenomena DI 'kekeliruan sejarah' Islam di masa lampau.

Gagasan penolakan Negara Islam terutama muncul di kalangan cendekiawan terkemuka seperti Nurcholish Madjid, Amien Rais dan Abdurrahman Wahid. Mereka sependapat dengan Moehammad Roem bahwa Islam tidak memiliki bentuk negara. Nurcholish menilai Negara Islam sebagai apologia dan reaksi atas gelombang ideologi sekuler barat (Sosialisme, Komunisme, Nasionalisme) di dunia Islam. Tiada suksesi kepe-mimpinan negara paska kewafatan Rasul Muhammad SAW menurut Nurcholish merupa-kan bukti kuat bahwa Islam tidak secara spesifik menentukan negara yang harus dibangun. Amien Rais menilai Negara Islam tidak ada, karena tidak ada satupun ayat dalam Al-Qur`an yang menyebut istilah Negara Islam. Abdurrahman Wahid menolak Negara Islam, karena konsep itu mengancam eksistensi demokrasi, plurarisme, ekslusif-sektarian dan bahaya bagi integrasi bangsa Indonesia. Memaksakan Islam menjadi dasar negara berbahaya karena Islam dalam konteks ke-Indonesiaan menurut Abdurrahman hanyalah sub-kultur dan 'komplementer' bagi nasion Indonesia yang memiliki prinsip 'bhineka tunggal ika.'

Menegakkan Negara Islam samalah artinya memporak-poran-dakan negara kesatuan RI. Konsep Negara Islam dalam perspektif mereka memposisikan umat Islam menjadi kelompok pinggiran, oposisional dan selalu bersitegang dengan pemerintah (Orde Baru). Kondisi ini merugikan kepentingan umat Islam. Oleh karena itu, menurut Abdurrahman, konsep Negara Islam harus ditolak dan Islam dituntut akomodatif terhadap Pancasila. Bukan sebaliknya, Pancasila akomodatif terhadap Islam. Terlepas kita setuju atau tidak dengan logika itu, kecenderungan menolak konsep Negara Islam mendominasi wacana politik Islam Orde Baru.

Dalam tingkat tertentu akomodasi Islam ke dalam struktur politik Orde Baru berhasil mencairkan ketegangan hubungan antara keduanya. Interaksi Islam-negara Orde Baru semakin membaik memasuki dekade 1990-an. Inilah fase 'bulan madu' hubungan Islam-negara Orde Baru. Saat ini ketika sistem politik Orde Baru mulai rontok dengan lengsernya mantan Presiden Soeharto (21 Mei 1998), masihkah relevan penolakan Negara Islam, atau negara berdasarkan Islam itu? Masihkah kita harus terus menerus menyalahkan Karto-soewirjo dan DI-nya? Masihkah kita tetap bersikeras bahwa ideologi Pancasila yang tertutup (versi Orde Baru) dan UUD 1945 itu harus dipertahankan mati-matian sementara gugatan terhadap relevansinya dengan perkembangan zaman semakin dipertanyakan dari hari ke hari?

Kekalkah Pancasila sebagai ideologi negara? Sampai kapan ia mampu bertahan? Sampai dunia kiamat? Para pembela Pancasila percaya bahwa nilai-nilai universal Pancasila membuat ideologi ini bertahan menghadapi gempuran zaman. Pancasila abadi, 'tak lekang karena panas, tak lapuk karena hujan.' Tapi beberapa pengamat menilai ke-cenderungan-kecenderungan politik akhir-akhir ini serta proses globalisasi yang melanda Indonesia menimbulkan pertanyaan serius tentang daya tahan (resistensi) Pancasila sebagai ideologi negara. Pengamat politik seperti Arbi Sanit menilai Pancasila tidak akan mampu bertahan menghadapi gempuran zaman. Cepat atau lambat Pancasila akan menjadi peninggalan sejarah. Tanda-tanda zaman ke arah itu menurut Arbi Sanit telah nampak saat ini. Jadi sebenarnya Pancasila tidaklah 'sakti' seperti yang disakralkan dan dimitoskan Orde Baru selama tiga dekade. Ideologi-ideologi yang mampu bertahan menghadapi gempuran zaman menurut Arbi adalah 'ideologi-ideologi klasik' seperti Islam, Kristen, Sosialisme dan Liberalisme.

Demikian juga dengan UUD 1945. Dr. Mochtar Pabottingi dan Syamsu Rizal Pangabean berpendapat bahwa UUD 1945 dirumuskan dalam situasi darurat. Karena itu UUD 1945 tidak bisa dianggap UUD yang telah final. Oleh karena itu ia perlu direvisi atau diubah apabila UUD itu ingin tetap relevan dengan perkembangan zaman. Buyung Nasution bahkan berpendapat pasal-pasal tertentu UUD 1945 memposisikan seorang presiden RI menjadi penguasa otoriter, bahkan diktator. Pandangan ini disetujui pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra.

Kini bangsa kita sedang membangun Indonesia baru yang demokratis. Dalam konteks perkembangan itulah berbagai usaha menawarkan wacana ideologi alternatif harus ditolerir -- sejauh tidak menggunakan cara-cara repressif dan anti demokratis. Sebagai ideologi, Pancasila semestinya akomodatif terhadap tawaran-tawaran ideologis dari mana pun datangnya. Tidak menutup diri dan merasa benar sendiri seperti di zaman Orde Baru. Ini bila Pancasila ingin tetap bertahan menghadapi gempuran zaman. Di sinilah letak tugas penting sejarah para pemimpin bangsa yang kini berada di tampuk kekuasaan. Mereka dituntut untuk mampu menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka yang akomodatif terhadap tawaran-tawaran wacana ideologis lain. Di pihak lain, di sini pula letak tanggung jawab historis mereka yang kini mencoba menawarkan ideologi alternatif itu, termasuk dari kalangan faksi-faksi Islam.

Dalam sebuah diskusi buku 'Wacana Ideologi Negara Islam' karya Al Chaidar di Masjid Ukhuwah Islamiyah Univeritas Indonesia, Depok (9 April '99), Fahri Hamzah mengemukakan pandangannya tentang bagaimana kita seharusnya mensikapi munculnya tawaran ideologi Negara Islam sebagai wacana alternatif bagi ideologi negara saat ini seperti dilakukan Al Chaidar, aktivis muda DI. Dalam perspektif Fachry tawaran ideologi alternatif Al Chaidar itu tidak lain dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan proses dialogis di antara komponen bangsa.

Dialog yang jujur, terbuka, cerdas dan penuh pengertian sangat dibutuhkan saat dimana kita saat ini mengalami keterpurukan akibat iklim politik yang tertutup selama beberapa dekade lalu. Ikhtiar tawaran dialog Al Chaidar itu perlu didukung. Dan dalam proses dialog itu kita harus terus menerus melakukan kritik-kritik tajam terhadap gagasan-gagasan Al Chaidar. Atau kepada siapa pun yang menawarkan wacana ideologi alternatif saat ini. Ini perlu dilakukan menurut Fachry agar ia 'tidak jalan sendirian', lalu justru membahaya-kan tidak hanya bagi dirinya. Tapi juga bagi orang lain. Dengan melakukan kritik terus menerus, kita memperkuat basis argumentasi wacana ideologi Negara Islam yang ditawarkan Al Chaidar. Di sisi Al Chaidar sendiri ia perlu mensikapi kritik-kritik itu secara dewasa, cerdas dan terbuka dan menghindari sikap mau menang sendiri. Sikap mau menang sendiri jelas menutup rapat-rapat pintu dialog.

Saya sependapat dengan Fachry. Wacana ideologi yang ditawarkan Al Chaidar perlu dikritik agar ia tidak kebablasan dan gegabah. Ia dituntut memiliki kesadaran historis dalam menawarkan sebuah ideologi negara alternatif mengingat persoalan ini bukan persoalan sepele. Dan, tidak menawarkan ideologi alternatif itu sebagai ekpe-rimentasi belaka. Suatu kekeliruan 'kecil' yang tidak perlu, bisa akan berdampak besar bagi perjalanan sejarah Islam Indonesia di masa depan. Bila kebablasan bukan tidak mungkin TNI akan mengambil sikap keras. Sejarah lampau hubungan TNI-DI telah membuktikan hal itu. Ideologi negara bagi TNI adalah masalah amat prinsipil.

Masalah hidup-matinya. Menawarkan ideologi Negara Islam dengan cara mendongkel ideologi Pancasila diibaratkan Prof. Mansur Suryanegara "membangunkan macan tidur."

Era liberalisasi ideologi saat ini patut disambut antusia, sekaligus kewaspadaan penuh. Mengapa? Proses ideologisasi potensial menimbulkan konflik politik di antara kelompok-kelompok masyarakat. Konflik ideologis sangatlah serius implikasinya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita sudah mengalaminya di era pergerakan nasional dan dekade 1950-1960'an. Konflik ideologi itu mencapai puncaknya dalam tragedi berdarah G 30 S/PKI 1965. Di sisi lain, liberalisasi ideologi membuka peluang Komunisme PKI untuk merasa berhak dijadikan wacana ideologi alternatif pula. Ini tentu merugikan umat Islam. Oleh karena itu usaha 'pendongkelan' Pancasila yang gejalanya nampak akhir-akhir ini bila kebablasan akan merugikan umat Islam sendiri.

Jadi bagaimana pun, dalam mensikapi sejarah DI dan ideologi Negara Islam kita selalu dituntut hati-hati, kritis, objektif dan evaluatif. Agar tidak terjebak dalam --meminjam Jalaluddin Rakhmat-- jebakan determinisme sejarah (historical determinism). Orang yang terjebak dalam determinisme sejarah, menganggap apa yang terjadi dalam sejarah Islam masa lampau sebagai acuan yang paling absah (legitimate) dan ideal karena itu patut dijadikan contoh. Masa lalu dijadikan patokan kebenaran bagi masa kini. Padahal sesungguhnya tidak demikian. Dalam sejarah ada 'mutiara hikmah yang patut diambil sebagai pelajaran, namun ada juga 'warisan buruk' yang mesti dibuang ke tempat sampah.' Generasi muda Islam saat ini dituntut kritis mensikapinya.

Di sisi lain, sejarah merupakan suatu proses kreatif dan inovatif yang kerap melahirkan model-model pergerakan Islam yang baru 'sama sekali' dengan apa yang pernah muncul di masa lampau. Ini karena, seperti dikatakan Hegel, setiap zaman memiliki 'jiwanya sendiri' (zeitgeist). Prilaku mencontoh gerakan-gerakan Islam masa lampau tanpa sikap objektif dan kritis samalah artinya dengan memasukkan diri ke dalam jebakan determinisme sejarah itu. Determinisme sejarah mematikan proses kreativitas dan inovatif. Mudah-mudahan penawaran ideologi alternatif yang dikemukakan Al Chaidar tidak terjebak dalam determinisme sejarah itu.

EPILOG

Karya tentang DI dan pemikiran politik Kartosoewirjo ini merupakan upaya untuk menawarkan proses dialogis yang kreatif, cerdas dan konstruktif. Oleh karena itu perlu disambut baik. Dari segi akademis upaya ini tentu memiliki makna yang cukup berarti mengingat selama ini karya tentang pemikiran politik Kartosoewirjo apalagi yang ditulisnya sendiri tergolong langka dan sukar ditemukan. Bagi saya ini mengherankan, sebab ketokohan Kartosoewirjo dalam sejarah

Indonesia kontemporer tak perlu dipertanyakan. Apa pun kekhilafan politiknya di masa lampau, Kartosoewirjo tetaplah seorang tokoh sejarah yang pemikiran dan prilaku politiknya perlu dikaji. Dari kajian itu, generasi kini dan mendatang mungkin bisa memetik hikmahnya. Mengambil apa yang baik, membuang segala yang buruk.

Penerbitan karya ini melengkapi bacaan kita tentang pemikiran politik Indonesia yang telah ada yaitu karya Dr. Deliar Noer, 'Pengantar ke Pemikiran Politik' dan karya suntingan Dr. Herbert Feith dan Dr. Lance Castles, 'Indonesian Political Thinking 1945-1965.' Keduanya karya klasik yang selama ini dijadikan buku teks di pelbagai perguruan tinggi, khususnya untuk studi pemikiran politik Indonesia. Karya Deliar memfokuskan pembahasannya pada pemikiran tentang hubungan agama-negara, demokrasi dan kebangsaan sebelum dan sesudah masa perjuangan kemerdekaan.

Feith dan Castles mengoleksi tulisan dan pidato yang berisi pemikiran politik para negarawan dan tokoh politik Indonesia terkemuka (1945-1965) yang mewakili lima 'politik aliran' atau ideologi: Islam, Jawa Tradisional, Nasionalisme, Marxisme, dan Sosialisme Demokrasi. Jadi pemikiran politik dalam buku ini sangat variatif; ada pemi-kiran politik tokoh PKI (Aidit), Nasionalis Radikal (Soekarno), Masyumi (Natsir), Jawa Tradisional (Atmodarminto), Partai Sosialis Indonesia (Syahrir) dan lain-lain.

'Anehnya' karya Feith dan Castles itu tidak memuat satu pun tulisan atau pidato Kartosoewirjo. Saya katakan 'aneh' karena ketokohan Kartosoewirjo dan pemikiran-pemikiran politiknya tidak kalah pengaruhnya dibanding tokoh-tokoh sejarah lain seperti Syahrir, Soekarno, Natsir, atau Aidit. Apalagi dibandingkan dengan Atmodarminto misalnya, jelas ketokohan Kartosoewirjo atau pengaruh pemikirannya jauh melebihi pengaruh anggota Dewan Konstituante dari kelompok abangan itu. Apakah karena kedua editor buku itu tidak memiliki sumber-sumber otentik tulisan atau pidato Kartosoewirjo? Karena pertimbangan akademis, ataukah pertimbangan politis?

Mengingat integritas keilmuan dua penyunting itu, saya percaya alasan pertama dan kedua, bukan yang ketiga (pertimbangan politis) yang mendasari tidak dimuatnya pemikiran Kartosoewirjo dalam buku itu. Ada beberapa studi awal tentang DI dan Kartosoewirjo seperti yang ditulis Pinardi, Hersri dan Joebaar Ayoeb, serta Soebardi. Karya mendalam mengenai topik yang sama dilakukan Nazaruddin Syamsuddin, Anhar Gonggong, Al Chaidar dan Agus Nugraha.

Namun sayangnya, tidak semua karya itu ditulis dengan tujuan akademis. Karya-karya itu termasuk kajian terbaik mengenai Kartosoewirjo dan DI, meskipun ada di antaranya yang ditulis sarat kepentingan politik. Karya Pinardi misalnya, meskipun kaya dan data 'akurat' - lebih merupakan pamplet politik - propaganda anti Darul Islam dan Kartosoewirjo- daripada kajian

akademis yang 'objektif dan jujur'. Ada indikasi karya Pinardi ditulis untuk mendukung usaha operasi militer dan Soekarno (didukung PKI) mengikis sisa-sisa pengaruh ideologi DI paska kematian Kartosoewirjo.

Selama ini kajian DI dan Kartosoewirjo lebih banyak dilakukan oleh kaum Indo-nesianists asing, seperti: Karl D. Jackson (1990), Hiroko Horikoshi, Nieuwenhijze, Van Dijk , B.J. Boland dan Dengel (1995). Dalam menganalisis Darul Islam dan peran historis Kartosoewirjo, mereka --sebagaimana umumnya Indonesianis asing-- kerap terjebak oleh bias-bias orientalisme dan Islamo-phobia, sehingga karya akademis yang dilahirkan tidak jarang memberikan gambaran distortif. Bias orientalisme dan Islamo-phobia itu relatif sukar kita temukan dalam karya Al Chaidar atau Agus Nugraha.

Dengan diterbitkannya buku berisi pemikiran politik Kartosoewirjo ini tentu semakin memperkaya khazanah intelektual Islam Indonesia. Lahirnya karya ini patut disyukuri. Kelahiran karya ini mesti dipandang sebagai suatu langkah maju tidak hanya dalam konteks perkembangan dunia penerbitan buku, tapi juga dunia keilmuan. Saat ini, seperti telah dikemukakan di atas, bangsa kita perlu mengenal tokoh-tokoh sejarah dengan segala sisi 'plus-minus' peran-peran historis mereka. Oleh karena itu, kajian-kajian akademis atas pemikiran tokoh-tokoh itu sangat strategis. Di sinilah makna penting penerbitan buku ini.

Saya tidak menafikan kenyataan bahwa ada sebagian kalangan dihinggapi rasa khawatir karya ini dijadikan 'instrumen' sosialisasi dan penyebaran gagasan-gagasan 'Islam ekstrim' dan ideologi Negara Islam. Bagi mereka yang pernah mengalami per-golakan sejarah masa lampau khususnya di kalangan TNI (Angkatan '45) kekhawa-tiran itu cukup beralasan karena citra Kartosoewirjo dan DI bagi mereka identik dengan trauma sejarah dan pemberontakan. Angkatan muda saat ini relatif 'bebas' dari trauma sejarah itu, sehingga mampu memandang jernih persoalan Kartosoewirjo dan DI. Di kalangan TNI pun mulai tumbuh paradigma baru yang relatif bebas dari trauma sejarah itu. Ada perubahan paradigmatik, khususnya di kalangan para perwira muda TNI. Dalam kaitan ini, seorang perwira tinggi TNI, Mayjen Agus Wirahadikusumah mengatakan, "Kita tidak usah bicara lagi masalah radikal kanan atau kiri, komunis atau liberal, siapa pun dipersilakan mengembangkan pikirannya. Yang penting taat hukum."

Saat ini kita memang dituntut berfikir positif (positive thinking) dalam menatap sejarah masa silam itu. Sebab bagaimana pun sejarah masa silam itu bagian dari alam 'ingatan kolektif' (collective memory) yang membentuk kejatidirian bangsa kita saat ini. Yang penting dalam menatap masa silam itu, kita pandai-pandailah mengambil pelajaran darinya. Pengalaman (masa lampau) adalah guru yang paling baik. Lagi pula seperti dikatakan Bung Karno, kita tidak bisa

melarikan diri dari sejarah (We can not escape from history). Mudah-mudahan karya ini, terlepas dari kelemahan dan kekurang-annya, bisa memberikan hikmah dan pencerahan bagi kita semua. Dan dengan itu kita menyongsong Indonesia baru yang demokratis, adil, makmur dan memperoleh ampunan Allah. Wallahu a'lam bis showwab.

Bojong Gede, 6 Mei 1999.

Bab Satu

JAWA PADA AWAL ABAD XX

Untuk memahami sosok dan pemikiran S.M. Kartosoewirjo sebagai seorang tokoh gerakan Islam, harus dipahami bagaimana lingkungan sosial-budaya dan masyarakat tempat ia berasal, yang membentuk pribadi dan mempengaruhi pemikirannya. Sebagai seorang yang dilahirkan dari lingkungan masyarakat Jawa pesisiran, Kartosoewirjo sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial-budaya dan tradisi Jawa, yang kemudian membentuk nilai-nilai bagi gerakan dan pemikirannya, sebagaimana ia memahami dan menerjemahkan ajaran-ajaran Islam ke dalam gerakannya, untuk itu harus dilihat situasi sosial masyarakat dan kondisi politik pada masa ia lahir dan tumbuh menjadi sosok proklamtor Negara Islam Indonesia.

Sudah sejak lama pulau Jawa merupakan pulau yang paling padat populasi penduduknya dibandingkan dengan pulau lainnya yang ada di kepulauan Indonesia. Di samping itu, pulau Jawa sangat strategis letaknya sebagai jalur lintas antar-pulau dan perdagangan di Nusantara. Maka tidak mengherankan jika pada abad ke-6 dan ke-7, telah berdiri kerajaan-kerajaan Hindu yang dibawa orang-orang India yang menandai perkembangan awal sejarah kerajaan Hindu di Nusantara. Disamping itu, pulau Jawa memiliki kesuburan tanah yang sangat baik bagi pengembangan pertanian. Tanahnya yang subur juga mempengaruhi suburnya gerakan-gerakan pemikiran. Meskipun agama Hindu telah memberi kontribusi yang banyak terhadap perkembangan masyarakat Indonesia, ditambah dengan inkulturasi budaya Islam dan Indo-Eropa, telah menghasilkan suatu "affinities and extreme" bagi perkembangan Indonesia modern kelak, namun Islamlah yang paling dinamis memberikan bentuk bulat-lonjongnya sejarah Indonesia hingga kini. Bulat-lonjongnya Indonesia terutama sangat dipengaruhi gerak dinamika kehidupan orang-orang di Jawa.

Dengan gemah-ripah-nya pulau Jawa membangkitkan semangat para imperialis Barat untuk menjadikan Indonesia khususnya pulau Jawa sebagai garden continuum untuk menyokong perekonomian negerinya. Para pedagang Belanda datang ke Hindia dengan maksud hendak menguasai perdagangan yang menguntungkan dari daerah ini, khususnya perdagangan rempah-rempah. Daya upaya untuk itu, telah mendorong hasrat untuk bersaing diantara negara-negara Eropa, seperti Portugis di wilayah perairan timur Indonesia ; Belanda, yang umumnya dilakukan Persekutuan Dagang Hindia Timur (Verenigde Oost-Indische Compagnie, disingkat VOC); dan Inggris di wilayah barat. Semenjak berdirinya VOC pada tahun 1602, Belanda menjadi empirium dagang yang kuat. Tahun 1619 Belanda memperkuat tempat pijakannya bagi perdagangan di

Jawa Barat, dan berlanjut pada tahun 1620-an dengan mengusir pesaing-pesaingnya —Portugis dan Inggris — keluar dari Kepulauan Maluku, untuk mendapatkan basis kekuasaannya di kawasan ini.

Dengan daya pikat yang demikian besar dari Jawa atau Nusantara ini, maka kita melihat selama paruh pertama abad ke-18, Belanda sudah ikut campur tangan dalam kekuasaan para raja Jawa dengan serangkaian perang dalam suksesi di masa keruntuhan kerajaan Mataram. Dengan demikian, persaingan diantara penguasa Jawa ini telah menggugah Belanda untuk terlibat jauh dalam urusan politik di Jawa, tidak terkecuali persoalan intern di tubuh kerajaan-kerajaan Jawa.

Upaya yang dilakukan Belanda dalam hal ini adalah dengan melindungi salah seorang diantara penuntut tahta kekuasaan yang saling bersaing. Begitu pula dalam usahanya mengembangkan perdagangannya, Belanda melalui VOC melibatkan diri dalam usaha-usaha "menentramkan" daerah pantai, yang berlanjut ke daerah pedalaman Jawa. Penentraman ini dimaksudkan untuk mengatur masyarakat dan penguasa Jawa dengan pola politik mereka. Selama bertahun-tahun Belanda menjalankan pengaruh terhadap penguasa-penguasa di Jawa dan perdagangan dikuasainya. Sampai kemudian pemerintah Belanda mengambil alih utang-piutang VOC yang bangkrut pada akhir abad ke-18, Belanda telah menjalankan kekuasaan politik yang luas atas Jawa. Semua orang yang hidup, beranak dan mati di Jawa sekecil apapun merasakan pengaruh kekuasaan Belanda ini. Dan, Kartosoewirjo adalah salah satu di antara mereka.

Tiga dasawarsa menjelang berakhirnya abad ke-19, politik liberal sudah mulai menggejala dan berpengaruh dalam perekonomian Indonesia. Di tengah-tengah sistem ekonomi yang tradisional, kondisi ekonomi Belanda mulai menampakkan perbedaannya yang mencolok. Keberadaan "pembangunan ekonomi" Barat ala Belanda belum mengangkat taraf hidup masyarakat pribumi di Jawa. Pengejaran keuntungan pengusaha-pengusaha Eropa membawa dampak yang sangat buruk dan memporak-poranda sendi-sendi perekonomian. Perkebunan dan pabrik muncul di mana-mana dan semuanya dikelola Belanda. Di pihak lain, usaha pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat jauh tertinggal dari percepatan perkembangan penduduk Jawa. Melihat kenyataan pengusaha-pengusaha swasta Belanda yang tidak mau memberi keuntungan dan kemakmuran bagi penduduk pribumi, telah menyadarkan para politikus yang dipengaruhi pemikiran humanisme liberal dan Marxisme yang sedang melanda daratan Eropa pada saat itu, bahwa kemiskinan pribumi harus diatasi terlebih dahulu, sebelum menumbuhkan tanah jajahan menjadi sebuah pasar yang lebih menggembirakan.

Melihat kebijakan kolonial Belanda yang tidak ada keberpihakannya terhadap kaum pribumi di Hindia, beberapa tokoh humanis memberikan reaksi yang sangat keras, bahkan dari orang-orang

Belanda sendiri. C. Th. Van Deventer, seorang pengacara dan bekas pejabat peradilan kolonial kemudian anggota parlemen Negeri Belanda, menuliskan cerita-cerita nasib rakyat jajahan di dalam sebuah bukunya di tahun 1899, tentang kebiadaban dan kesewenang-wenangan yang dilakukan para pengusaha Belanda. Kritik ini, sekecil apapun telah sangat berpengaruh yang menentukan bagi perubahan politik kolonial. Desakan ini membuat Ratu Wilhelmina mengubah kebijakan Kerajaan Belanda dalam menghadapi persoalan tanah jajahan dan rakyat pribumi. Di tahun 1901 Ratu Wilhelmina menyerukan perubahan kebijakan politik tanah jajahan, yang merupakan bermulanya zaman baru dalam politik kolonial Belanda, yang kemudian disebut sebagai "Politik Etis" Belanda. Inilah pidato yang diucapkannya dari atas tahta Kerajaan Belanda:

"Sebagai negara Kristen, Negeri Belanda wajib memperbaiki kedudukan hukum orang-orang Kristen pribumi di Kepulauan Hindia, memberikan dukungan kuat pada misi Kristen, dan menanamkan pada seluruh sistem pemerintahan dengan kesadaran bahwa Negeri Belanda mempunyai kewajiban moral terhadap penduduk di kawasan ini. Walaupun pada awalnya, sasaran yang diharapkan dari pidato Ratu tersebut lebih menekankan kepada kesejahteraan pribumi Kristen, namun perhatian itu kemudian meluas meliputi juga seluruh penduduk pribumi, tanpa pandang agama. Tetapi sangatlah penting untuk diperhatikan, bahwa sikap politik etis ini didasari oleh suatu keyakinan yang mendalam tentang keunggulan budaya Barat. Dengan perkataan lain pembaharuan harus dilaksanakan dari atas; modernisasi dipersamakan dengan pem-Barat-an atau lebih tegas lagi pem-Belanda-an."

Maka, dengan segala "keinsyafannya", meskipun dangkal di mata pribumi negeri jajahan, dibangunlah institusi-institusi pendidikan modern di Nusantara. Jawa mendapat prioritas karena pulau ini memiliki masyarakat pasifis dalam jumlah yang besar. Perangkat-perangkat keras berdatangan dari Eropa, memasuki masyarakat agraris tradisional dan berpola pikir sederhana.

Perangkat ideologis pun ikut serta di dalamnya secara bersamaan. Yang terlihat kemudian adalah sebuah potret yang berubah dari wajah-wajah Jawa dan pribumi lainnya. Kalaulah disimak lebih jauh lagi, sikap politik etis itu mempunyai sifat yang ganda, diantaranya: (1) ingin meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi; dan (2) berangsur-angsur ingin menumbuhkan otonomi dan desentralisasi politik di Hindia Timur Belanda. Dalam hal ini pemerintah kolonial Belanda amat menyadari bahwa dua tujuan ini tidak dipisahkan, dan bahwa tujuan yang pertama hanya bisa diwujudkan apabila pemerintahan lokal benar-benar mau bertanggung jawab terhadap penduduk pribumi.

Oleh Karena itu, walaupun masalah kesejahteraan yang lebih penting, namun langkah pertama yang diambil oleh pemerintah adalah masalah desentralisasi. Adapun yang menjadi alasannya

ialah bahwa: kekuasaan pemerintahan harus dialihkan (1) dari Negeri Belanda ke Hindia, (2) dari Batavia ke daerah-daerah lain, dan (3) dari bangsa Eropa ke penduduk pribumi. Politik kolonial kali ini berbelok ke arah menumbuhkan otonomi pemerintahan, tetapi Belanda tidak bermaksud memberikan kemerdekaan politik kepada Hindia.

Namun dalam kenyataannya, peralihan kekuasaan dari Negeri Belanda ke Hindia tidak pernah dapat dilaksanakan. Mereka hanya "memindahkan" tradisi dan ideologi mereka di Barat untuk bisa hidup di tanah-tanah yang tadinya dikuasai oleh orang-orang Timur. Pemerintah Belanda mengadakan desentralisasi dan ekspansi birokrasi kolonial ke dalam lapangan-lapangan baru, yaitu menciptakan tuntutan sejumlah besar orang Jawa terpelajar untuk mengabdikan diri di dalam tubuh pemerintahan.

Ayahanda S.M. Kartosoewirjo adalah salah seorang dari ratusan ribu kaum birokrat kolonial yang menghirup suasana ini, menghirup harapan-harapan baru yang tumbuh di tanah ini. Dengan harapan bahwa Pemerintah kolonial dapat mengisi jabatan itu bekerjasama dengan para pembesar pribumi dan bawahan mereka yang masih bekerja, alasan mereka adalah karena hanya merekalah orang-orang di Jawa yang benar-benar bisa menjalankan pekerjaan birokrasi. Kaum tani yang berwawasan animisme pada umumnya tidak terdidik secara teknis, demikian juga secara psikologis tidak siap untuk pekerjaan semacam itu. Pedagang dan petani yang berwawasan Islam agaknya enggan memangku jabatan demi "sesuatu" dengan pemerintahan asing dan sekuler.

Maka, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa perkembangan masyarakat Indonesia banyak dilihat dari mula kedatangan Islam di Indonesia. C. Snouck Hurgronje, salah seorang sarjana Politis Etis yang paling berpengaruh, menyimpulkan bahwa pem-Barat-an Hindia Timur Belanda hanya bisa dilakukan dengan dukungan bangsawan Jawa oleh karena kecanggihan budaya mereka, hubungan mereka dengan pengaruh Barat, dan kerenggangan sikap tradisional mereka terhadap Islam. Maka yang terjadi kemudian adalah timbulnya arogansi di kalangan kaum terpelajar Indonesia saat itu yang telah mengikuti pendidikannya di luar negeri. Pengaruh budaya Barat teradopsi dalam alam pikiran mereka sehingga tidak ada lagi dalam otak mereka untuk memperjuangkan Islam.

Kendatipun Politik Etis secara resmi dimulai tahun 1901, namun politik tersebut masih belum sepenuhnya bisa mengganti liberalisme laissez-faire dengan campur tangan negara di dalam masalah-masalah ekonomi dan suatu program legislasi kesejahteraan yang ambisius. Swasta, yang terwakili oleh kalangan pedagang dan usahawan pribumi Islam, adalah bagian dari gerakan laissez-faire yang mulai menggeliat di jantung Nusantara: Jawa. Fungsi kelas pedagang Islam ini

adalah untuk menciptakan kondisi-kondisi sosial dan politik yang langgeng di negeri jajahan sehingga bisa mengimbangi efek-efek disintegrasi dari pengaruh Barat terhadap Indonesia. Kemakmuran haruslah menggantikan eksploitasi, dan pembaharuan haruslah menggantikan regimentasi yang merupakan kata kunci penjajahan Belanda abad keduapuluh. Karena dengan menjalankan politik eksploitasinya penjajah Belanda telah menguras habis kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, sehingga bukan hanya ekonomi yang dimatikan sampai kepada politik pun dihapuskan. Maka, Jawa adalah wilayah pertumbuhan ekonomi yang sangat subur, sekaligus juga tanah yang membesarkan banyak pembangkang dan penerobos zaman yang brilian dan para penentang kemapanan serta arogansi kekuasaan.

Politik Etis juga merupakan suatu reformasi politik dalam rangka mengukuhkan status-quo dengan jalan mengelola perubahan dalam suatu siklus konjungtur yang teratur dan sedapat mungkin diatur. Secara administratif, Zaman Etis membawa langkah-langkah otonomi dari negara induk, penyerahan tanggung jawab sebagian dari pemerintahan pusat di Batavia kepada pejabat-pejabat daerah, dari korps administratif pribumi dan dari penjagaan yang ketat oleh pejabat Belanda. Reformasi politik difokuskan pada pembentukan dewan-dewan perwakilan untuk penduduk Jawa. Reformasi politik ini, sebagaimana reformasi politik Indonesia di bawah Habibie sekarang ini, hanyalah semata-mata membuat sebuah perubahan bagi mapannya sebuah situasi yang kembali statis. Ini termasuk dewan-dewan walikota dengan keanggotaan terbanyak pada orang-orang Eropa, Dewan-dewan Propinsi dan, yang terpenting dari semuanya, Dewan Kabupaten di wilayah-wilayah pedesaan, yang direncanakan sebagai pengontrol yang kuasi-demokratik terhadap otoritarianisme tradisional kelas yang memerintah, para priyayi. Kartosoewirjo sesungguhnya adalah seorang priyayi, namun karena pengaruh Islam, ia lebih merasakan dirinya sebagai seorang rakyat biasa.

Dan tidaklah mengherankan bahwa respons organisatoris yang pertama terhadap Politik Etis itu terjadi di kalangan para anggota kelas priyayi, di mana mereka merasa telah diuntungkan dengan diadakannya pendidikan Barat. Organisasi Budi Utomo yang dibentuk sebagai suatu persekutuan kebudayaan pada tahun 1908, memperlihatkan usahanya dengan menggelar sebuah program pengembangan diri sendiri --organisasi Budi Oetomo banyak merangkul pengikutnya yang berpendidikan Barat, orang-orang Indonesia profesional– yang didasarkan atas gabungan antara nilai-nilai Barat dan nilai-nilai Jawa. Organisasi ini menghargai orang berdasarkan derajat keterpengaruhan sistem Barat dan darah priyayi Jawa. Di sini bisa terlihat bahwa mereka berusaha untuk mempertahankan harapan-harapan tinggi kaum pembaharu asosiasionis. Beruntung Kartosoewirjo tidak pernah masuk organisasi "sesat" ini.

Begitupun partai politik pertama Indische Partij (Partai Hindia) dari Douwes Dekker, yang secara eksplisit berdasarkan prinsip asosiasi dan dipimpin oleh orang-orang Indo-Eropa dan orang-orang Indonesia, namun masih menghitung orang berdasarkan latar-belakang derajat pendidikannya. Maka, hanya mereka yang berpendidikan saja yang "dianggap orang" oleh tokoh-tokoh the founding father kita ini. Namun, organisasi ini dengan intelektualitasnya yang tinggi menggaruk langit itu adalah kelompok orang-orang yang paling banyak menuntut.

Tuntutan-tuntutannya itulah yang telah memberi banyak pengaruh bagi kemajuan bangsa, meski dengan jalan yang penuh liku dan curam sehingga banyak biaya dan kurban yang hilang. Dengan tuntutan-tuntutan otonominya demi kebaikan semua kelompok-kelompok ras yang berdomisili tetap di tanah jajahan tersebut, maka dibentuklah dewan penasehat yang dinamakan Volksraad.

Semua kalangan, tak terkecuali Islam maupun sekuler, menghabiskan banyak energinya untuk "rumah rakyat" yang diciptakan sebagai arena bermain baru bagi pribumi yang mulai bisa berpikir ini. Yang sangat pesat dalam gerakan politik Indonesia, hanya partai Sarekat Islam (SI), yang mana organisasi ini tidak berjalan di atas jalan asosiasionis. Partai Sarekat Islam ini lahir di perkotaan sebagaimana Budi Oetomo dan Indische Partij sama-sama berasal dari kota, begitu juga latar belakang sosial dan pendidikan pemimpin-pemimpinnya yang utama, seperti Haji Oemar Said Tjokroaminoto dan Haji Agus Salim; kedua-duanya dididik dalam sekolah-sekolah Barat dan masing-masing adalah elite Indonesia tradisional di Jawa dan Sumatra. Yang sangat menarik dari organisasi ini adalah rekrutmen anggotanya, di mana tidak terbatas kepada anggota-anggotanya yang mendapat pendidikan Barat saja sebagaimana yang dilakukan oleh Organisasi Budi Oetomo. Maka tidak heran partai ini mendapatkan pengikut-pengikutnya dari semua kelas, baik di kota maupun di desa. Bahkan para pimpinannya mengambil inspirasi dari sumber-sumber yang berbeda-beda termasuk sumber Islam. Sebagai alasan lain, bahwa daya tarik yang ditimbulkan oleh organisasi Sarekat Islam ini lebih jauh jangkauannya daripada sekedar mencapai sekelompok penduduk kota yang berorientasi Barat. Karena partai Sarekat Islam memusatkan perhatiannya secara eksklusif bagi orang-orang Indonesia, para pedagang Muslim, para pekerja di kota-kota, para kiai dan ulama, dan bahkan beberapa priyayi. Kartosoewirjo pun terlibat di dalam partai ini.

Sarekat Islam menempati suatu tempat yang unik namun kompleks, baik di dalam sejarah nasionalisme Indonesia maupun sejarah Islam Indonesia. Sejarah Indonesia masa lalu yang penuh dengan dinamika telah mengilhami para elit politik SI untuk membuat perencanaan yang lebih representatif terhadap perkembangan politik Indonesia yang sedang tumbuh. Jawa adalah tempat pertama di mana organisasi diperkenalkan sebagai wadah modern bagi misi dan idealisme bergerak. Maka organisasi pertama, SI, secara ideologis, dia mendahului suatu

nasionalisme yang programatik sebagaimana kemudian diungkapkan dalam istilah kebangsaan yang merdeka. Secara religius, dia juga mendahului formulasi program pembaharuan Islam sebagaimana kemudian secara khusus diungkapkan di dalam nilai-nilai sosial dan politik Islam.

Namun protes-protesnya yang keras melawan status quo kolonial, keluhan-keluhannya yang lantang di bidang ekonomi dan sosial, dan tuntutan-tuntutannya yang tidak sabar lagi bagi otonomi yang lebih besar, menggabungkan aspirasi-aspirasi nasionalis dan Islam, betapa pun tidak jelasnya diterangkan, ke dalam suatu program politik yang menjadi semakin militan dan khas Indonesia.

Akan tetapi radikalisme program ini bukanlah pantulan ideologis para pemimpinnya yang oleh kebanyakan pengikutnya, terutama sebagian besar orang-orang desa, dianggap terjelma di dalam Sarekat Islam. Para pengikut partai Islam ini, terutama di desa, berhimpun di sekeliling panjinya bukan karena perjuangannya untuk otonomi atau pembaharuan sosial dan ekonomi, akan tetapi karena dia tampak mengekspresikan kegelisahan dan keinginan berontak kaum tani yang selama ini tertahan melawan perubahan jaman. Para petani Jawa hanya membutuhkan pemimpin sebagai ujung, sedangkan mereka sendiri adalah batang dan tiang penegak. Sarekat Islam yang berdiri jauh lebih awal ketimbang Boedi Oetomo adalah pendingin kegelisahan dan sekaligus penghangat darah untuk memberontak. Dengan membuat aksi seperti itu, Sarekat Islam berada dalam kerangka konservatisme Islam yang selama berpuluh tahun memberikan inspirasi kepada keresahan di desa. Ini berarti bahwa di tingkat desa, "keanggotaan" partai tersebut tidak dengan sendirinya menjadi indikasi tentang sesuatu yang baru—misalnya sebagai kekuatan organisatoris yang real—akan tetapi lebih sebagai penegasan kembali tentang sesuatu yang tradisional. Ketidakpuasan berpusat di sekeliling pujaan atau pahlawan jaman lalu (*laudatores temporis acti*) yaitu para kiai dan para ulama yang bertempur melawan pemerintahan "kafir" dan terutama melawan para pegawai-priyayi Indonesia dari pemerintah itu, yang di mata kaum tani adalah wakil par excellence dari suatu perubahan sosial yang tidak diingini.

Dengan demikian Sarekat Islam membawa sebuah perubahan kuantitatif, bukannya kualitatif di dalam hakekat Islam di desa di Jawa. Untuk beberapa tahun, dia merangkaikan insiden-insiden lokal karena ketidakpuasan di bawah pimpinan orang-orang Islam ke dalam suatu fenomena nasional di bawah pimpinan orang-orang kota. Akan tetapi hal ini dibuatnya tanpa mengarahkan baik kepercayaan abangan atau keyakinan ortodoks yang militan ke jalan-jalan yang positif dan modern. Oleh karena itu, Sarekat Islam lebih banyak mempunyai makna sosial daripada ideologi. Dengan memanfaatkan kontrol administratif Belanda yang tidak terlalu ketat dan prestise priyayi yang semakin melemah, para pemimpin Sarekat Islam telah menerobos desa-desa di Jawa yang terpencil dan membuatnya menjadi juru bicara malaise sosial yang lantang dari penduduk tani

Jawa dan menghasutnya melewati para pemimpin agama yang tradisional, untuk memberontak melawan kekuasaan yang sedang berlangsung, walaupun pemberontakan tersebut sifatnya abortif dan bunuh diri.

Begitu Sarekat Islam muncul sebagai simbol keberanian dan vatalisme serta menjadi pelepas ketegangan-ketegangan yang berakumulasi sepanjang satu dasawarsa, yang lahir dalam bentuk ledakan pergolakan-pergolakan di desa-desa dan pemogokan di kalangan proletar di kota, perpecahan di dalam dirinya sendiri dan tindakan tegas pemerintah kolonial — sebagian besar dalam bentuk tindakan-tindakan represif dan memperkuat kekuasaan kaum priyayi—bergabung dan meruntuhkan Sarekat Islam dalam tempo singkat pada awal tahun 1920. Para pemimpin Islam akhirnya memutuskan aliansinya dengan komunisme pada tahun 1924 dan sejak itu beralih menjadi propaganda pan-Islam. Sisa-sisa keresahan di desa yang berkobar-kobar diperbesar menjadi suatu pemberontakan terakhir dan besar-besaran di Jawa Barat di bawah hasutan orang-orang komunis pada akhir tahun 1926 - disusul juga oleh pemberontakan yang serupa di Pantai Barat Sumatra pada permulaan tahun berikutnya—yang tanpa kesulitan sedikit pun dipadamkan oleh pemerintah kolonial dengan kekerasan.

Dengan padamnya pemberontakan-pemberontakan ini, maka panggung jaman pertama yang penuh pergolakan berakhir dan bersamanya massa aksi politik yang berbasiskan dukungan para petani berakhir pula, untuk memberikan jalan kepada perkembangan baru di dalam nasionalisme Indonesia dan Islam Indonesia. Karena kedua-duanya menjadi lebih jelas mengkristal di dalam kelompok-kelompok ideologis dan organisatoris, maka kerangka persatuan dan perbedaan di dalam masyarakat Indonesia diberikan batasan-batasan yang jelas. Di satu pihak, tampil kekuatan-kekuatan yang berusaha menuju realisasi peradaban Islam yang modern, sambil merangkul dan pada saat yang sama melampaui pusat-pusat santri abad-yang lalu. Di pihak lain, nasionalisme yang berorientasi Barat dan berpusat di kota-kota tampil ke depan, sebagian sekurang-kurangnya berakar di sekitar lingkungan para priyayi yang ditolaknya dan di saat yang sama digantinya. Memang benar, bahwa golongan Muslim dan kaum nasionalis sama-sama menolak pemerintahan kolonial. Akan tetapi oposisi bersama terhadap pemerintahan Belanda itu jauh daripada berhasil menempa aliansi yang bertahan lama, namun hanya sekedar mengaburkan jurang yang semakin melebar antara nasionalisme 'sekuler' dan Islam Indonesia yang sebagian besar tujuan akhirnya tidak dapat bertemu satu sama lain. Adalah penting bahwa Sarekat Islam, yang merupakan bayangan. awal dari dan sebagian mengandung benih nasionalisme dan Islam modern, mendapatkan dirinya semakin terpenjara antara kedua pergerakan itu, dan kemudian ditakdirkan bertahan sebagai suatu kekuatan militan yang berada di tepi-tepi selama bertahun-tahun berikutnya.

Sebagaimana disebutkan oleh Benda, aliran-aliran ideologis politis yang mempengaruhi Indonesia di awal abad keduapuluh berasal mula di luar negeri maka renesans Islam Indonesia pun bermula dari perkembangan-perkembangan Islam di luar negeri. Seperti Muslimin Cina, Jepang, Turki, Timur Tengah, dan India berada di dalam genggaman reaksi yang kurang lebih keras terhadap pengaruh Barat. Ragi politik dan agama segera meluas ke dunia Muslim lainnya. Kemudian Islam menjadi salah satu kekuatan dalam peta kekuatan politik dalam sejarah.

Pemberontakan Turki Muda terhadap kekaisaran Ottoman tahun 1908 disusul oleh kejatuhan Sultan dan Khalifah satu dasawarsa kemudian. Kekalahan Turki dalam Perang Dunia pertama menyebabkan perluasan. dan konsolidasi kekuasaan Perancis dan Inggris di wilayah-wilayah seperti Mesir, Palestina, Syria, dan Lebanon. Kemenangan kaum Wahabi di Mekkah pada pertengahan tahun 1920-an menandakan juga suatu perubahan penting lainnya di pusat Islam itu sendiri. Maka perang-perang yang kemudian dibawa oleh Belanda dan penjajah lainnya ke Indonesia adalah suatu "war without mercy" yang paling keji dan biadab. Semua ini untuk menghancurkan Islam dan merupakan kelanjutan dari Perang Salib di dunai Barat terhadap Islam.

Perkembangan-perkembangan politik ini pun paralel dengan kebangkitan reformisme Islam, yang dilahirkan dalam pertukaran abad ini di Timur Tengah dan India, dan Wahabisme yang puritan di Arab. Dibukanya Terusan Suez tahun 1869 memungkinkan peningkatan hubungan dan semakin dekatnya hubungan antara Indonesia dan Timur Tengah. Dari Mekkah dan Universitas Al-Azhar Kairo—dalam ukuran yang tidak terlalu besar dari pusat-pusat Islam di India seperti Lahore, Qadian, dan Perguruan Tinggi Islam di Aligarh.

Ketiga, kaum reformis Indonesia berusaha untuk membendung gelombang Westernisasi dengan mengidentifikasikan Islam dengan keterpisahan yang berpusatkan Indonesia, bertentangan dengan penyerahan bulat-bulat kepada nilai-nilai dan norma-norma Barat —baik yang Kristen maupun yang sekuler. Meskipun pendidikan Barat terbatas dalam jangkauan, dan terpisah dari kebijakssnaan-kebijaksanaan asosiasionis di pihak para penguasa Barat, kaum reformis melihat kaum intelektual yang berpendidikan Barat, apa pun orientasi politiknya terhadap pemerintahan Belanda, sebagai musuh-musuh Islam yang paling mengkhawatirkan. Lagi-lagi mereka menganut pendapat yang sama dalam kecurigaan yang mendalam ini bersama kaum ortodoks. Akan tetapi berbeda dengan kaum ulama, mereka berusaha melawan ideologi Westernisasi dengan mempergunakan senjata organisasi Barat itu sendiri. Jong Islamieten Bond (Liga Pemuda Islam) yang didirikan Haji Agus Salim di ibukota Batavia pada akhir tahun 1925, menjadi suatu organisasi yang secara politik amat penting dalam serangan balasan kaum reformis terhadap alienasi di kalangan mahasiswa yang terdidik secara Belanda. Dia bertumbuh menjadi pusat latihan bagi kepemimpinan Islam yang berbeda dari intelektual Indonesia 'sekuler' yang berorientasi ke Barat.

Kedatangan perangkat-perang teknologi, pendidikan dan ideologi Barat telah menyebabkan Islam dan non-Islam masing-masing terbelah dua; yang satu reformis dan lainnya ortodoks. Kemudian di Jawa juga terjadi suatu keadaan di mana reformisme Indonesia terpaksa berbenturan dengan status quo kolonial itu sendiri. Ini adalah suatu konsekuensi yang hampir tidak terelakkan bukan saja dari kesadaran Islam yang mendalam yang timbul dari aktivitas-aktivitas yang beragam-ragam itu di kalangan orang-orang kota dan di kalangan orang-orang desa yang lebih makmur yang berada dalam wilayah pengaruhnya, akan tetapi juga dari kebijaksanaan Belanda yang mendukung lembaga-lembaga adat —sebagaimana akan dilihat dalam bab berikut— ke mana pemerintahan kolonial berpaling di akhir tahun 1920-an dan selanjutnya. Tampaknya segala hal mungkin terjadi di "Pulau Jahiliyah" ini.

Di Jawa perbedaan gaya hidup Barat dan Islam, juga antara Islam modern Islam ortodoks, sudah mulai memperlihatkan dampak disintegratifnya. Kebangkitan kaum reformisme Islam, dengan semangat pertentangannya yang sekaligus diarahkan kepada Islam ortodoks, adat, orang-orang Indonesia bergaya Barat, membangkitkan dendam dan permusuhan di kalangan Islam Indonesia dan dalam masyarakat Indonesia pada umumnya. Kaum ortodoks menggalang kekuatannya melawan kaum reformisme, dan untuk beberapa tahun bahkan mengundang dukungan musuh-musuh tradisionalnya, para kepala adat dan elite priyayi - dan bahkan pemerintah kolonial itu sendiri—untuk melawan pendatang baru yang terlalu bersemangat tersebut. Sama halnya, kaum reformis mengalami konflik yang semakin meningkat dengan kaum elite yang dididik secara Barat; pada mulanya berpusat pada ketidaksetujuannya terhadap jalanjalan organisasi –yang bersifat politis atau religius sosial-- yang paling sesuai untuk meningkatkan penemuan diri (self realization) Indonesia itu sendiri, akan tetapi tidak lama berselang bergeser kepada perpecahan yang semakin mendalam tentang tujuan perkembangan sosial Indonesia itu sendiri. Tambahan pula kebijaksanaan kolonial Belanda yang memberikan reaksinya terhadap ketegangan-ketegangan yang semakin meningkat yang diciptakan oleh penyebaran reformisme, maupun terhadap kekhawatiran yang baru terhadap perkembangan Islam di luar negeri, untuk beberapa waktu cenderung untuk semakin mempertajam perpecahan di dalam kalangan Islam itu sendiri.

Namun pada saat yang sama setting kolonial sendiri cenderung untuk mengaburkan perpecahan-perpecahan tertentu yang memisahkan orang-orang Islam dari nasionalis-nasionalis 'sekuler' sampai akhir pemerintahan Belanda. Berhadapan dengan rintangan-rintangan inilah, bangkitnya reformisme Islam sebagai suatu gerakan organisatoris yang terkuat di tanah jajahan Indonesia adalah suatu fenomena yang patut dicatat.

Jawa, sejak dulu hingga sekarang, adalah pusat bagi bentrokan ideologis: sekuler dan Islam; lebih dinamis dari tempat lain di manapun di dunia ini. Bangkitnya nasionalisme 'sekuler' tidak saja

mempengaruhi Sarekat Islam; dia membangkitkan masalah yang serius bagi segenap gerakan Islam di Jawa. Dihadapkan dengan tantangan yang kuat ini, kaum reformis dan ortodoks dipaksa merapatkan barisannya untuk bertahan. Yang lebih penting adalah, terkesan oleh kemunduran Sarekat Islam secara spektakuler dan takut akan kekejian pemerintah maka Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mengambil jalan yang secara sadar non-politis, dan meninggalkan aksi-aksi politik Islam kepada Sarekat Islam yang semakin lumpuh dan kepada sekelompok kecil orang-orang muda yang terorganisasikan dalam Jong Islamieten Bond. Tidaklah terhindarkan bahwa pemisahan secara sadar antara aliran ortodoks yang utama dan organisasi-organisasi reformis Islam dari politik — kelihatannya sesuai dengan diktum Snouck Hurgronje — akan menciptakan jurang antara nasionalisme dan Islam, antara kebudayaan Indonesia yang berorientasi ke Barat dan kebudayaan santri.

Jawa adalah juga tempat munculnya beragam polah para pemimpin dan para pendukung atau pengikutnya. Keseganan pemimpin-pemimpin Islam untuk melibatkan organisasi-organisasinya secara terbuka di dalam gerakan nasionalis Indonesia, dan yang lebih buruk lagi, kesediaannya secara malu-malu untuk menerima sedikit bantuan dari pemerintah kolonial, bisalah dimengerti bilamana ditafsirkan sebagai tindakan-tindakan pengkhianatan baik oleh kaum nasional 'sekuler' dan oleh juru bicara Sarekat. Akan tetapi, cukup paradoks, perpecahan antara agama dan politik dalam hal-hal tertentu lebih artifisial daripada real - dan karena itu untuk sebagian sifatnya lokal dan sementara daripada universal dan bertahan lama - sedangkan dalam hal-hal tertentu dia berakar di dalam alasan-alasan yang lebih fundamental yang menghalangi perkembangan kekuatan-kekuatan politik Islam yang langgeng untuk dasawarsa-dasawarsa mendatang. Maka secara politik Jawa sangat penting artinya dibandingkan secara ekonomi.

Di luar Jawa pembagian antara politik dan tidak begitu terlihat seperti dalam bidang ekonomi. Terutama di Sumatra, reformisme Islam hampir sejak semula terlibat dalam politik, dan beberapa kali malah menjadi gerakan-gerakan radikal keras, meskipun hal itu menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemimpin-pemimpin pusat di Jawa. Hal ini bukanlah karena kenyataan bahwa reformisme Sumatra itu ada dalam dirinya (sui generis) tapi lebih disebabkan oleh lingkungan sosial tempat dia bergerak. Di Sumatra, terutama di daerah Minangkabau di pantai barat pulau tersebut, telah bangkit sebuah kelas menengah baru yang hampir secara eksklusif berasal dari diperkenalkannya tanaman-tanaman ekspor —terutama karet—di daerah tersebut. Sementara di Jawa hal ini tidak terlihat. Daya respon orang-orang Sumatera lebih tinggi dibandingkan orang-orang di Jawa. Kalau sekiranya di Jawa ada 'kelas menengah' maka itu adalah terutama fenomena sosial, dan bukannya ekonomi, di Sumatra dia berakar di dalam perubahan ekonomi.

Bilamana di Jawa kaum inteligensia yang memperoleh pendidikan Barat lebih berkuasa daripada masyarakat dagang yang berorientasi kepada Islam, maka di Sumatra yang terjadi adalah sebaliknya. Dengan demikian arti penting reformisme Sumatra secara politis sebagian besar adalah akibat dari ketiadaan elite politik di pulau tersebut yang memperoleh pendidikan Barat dan berorientasi kepada Barat. Memang benar orang-orang Sumatra, mengambil manfaat dari sekolah Belanda sama besarnya, kalau relatif tidak lebih besar, dengan orangorang Jawa dan orang Sunda. Akan tetapi karena pendidikan tinggi, maupun lowongan menjadi pegawai pemerintah lebih bisa diperoleh di Jawa, maka orang-orang Sumatra yang telah memperoleh pendidikan Barat bukannya kembali ke daerahnya akan tetapi menetap di Jawa, di mana mereka memainkan peranan yang penting dalam gerakan nasionalisme 'sekuler' yang berpusat di Jawa. Maka, Jawa awal abad ke-20 adalah wilayah yang sangat heterogen, tapi juga sangat berwarna-warni, penuh dengan spektrum keanehan dan keganjilan.

Di Jawa terlihat banyak ketidakadilan dan menciptakan banyak kubu-kubu yang berbeda: yang mendapatkan fasilitas dan yang dianaktirikan oleh penguasa. Kaum elite Indonesia yang memperoleh pendidikan Barat bisa berbuat lebih banyak karena akomodasi yang disediakan oleh pemerintah kolonial terhadap kaum pelajar berpendidikan Barat. Di Jawa juga gaya hidup Jahiliyah pertama dimulai di Nusantara ini. Berbeda dengan kepemimpinan agama, yang mempunyai kubu-kubunya di pusat-pusat kediaman orang-orang Indonesia, kebanyakan pemimpin-pemimpin nasionalis berkelompok di seputar kota-kota bergaya Barat, terutama di ibukota Batavia, tempat kediaman pemerintahan kolonial dan Volksraad, yang menjadi titik tumpu politik nasional. Gaya orang-orang beragama menjadi ejekan dan gaya Barat menjadi pujaan. Orang pribumi sekuler mempunyai kemampuan mengungkapkan dirinya secara baik bukan saja di dalam warisan tradisi politik liberalisme dan sosialisme Barat, akan tetapi juga di dalam permainan politik parlementer di dalam lembaga-lembaga perwakilan di pusat dan di propinsi, kaum nasionalis 'sekuler' dengan demikian memberi dampak semacam keahlian yang bagi kebanyakan pemimpin Islam.

Jawa adalah tempat di mana pertimbangan pendidikan telah menghilangkan pertimbangan agama untuk loyalitas kepada pemimpin. Bilamana ini benar bagi para pemimpinnya maka ini pun sama benarnya bagi anggota-anggota eselon kedua para pengikutnya masing-masing. Karena pendidikan gaya Barat merupakan prasyarat bagi pegawai negeri dan bagi pekerjaan-pekerjaan di perusahaan-perusahaan Barat, beberapa orang Indonesia yang mengambil manfaat dari pendidikan Barat mulai berkenalan dengan metode-metode administrasi Barat dan, sebagian kecil, metode-metode kewiraswastaan Barat, dari mana kebanyakan tamatan sekolah-sekolah Islam ipso facto tersingkirkan.

Di Jawa pula, oleh karena pengaruh Barat yang demikian hebat, agama menjadi sesuatu yang tidak rasional lagi di tengah-tengah masyarakatnya. Dibandingkan dengan tujuan-tujuan politik Islam, nasionalisme Indonesia menawarkan kritik yang masuk akal terhadap kolonialisme dan sebuah program bagi negara Indonesia yang sekuler, yang berdasarkan lembaga-lembaga perwakilan, yang berdedikasi kepada prinsip-prinsip nasionalisme dan demokrasi maupun tugas-tugas perencanaan ekonomi dan sosial —kalau bukan sosialis — atau singkatnya reproduksi sistem politik Barat di bawah naungan paham Barat yang secara paradoks anti Barat (anti-Westernism) yang begitu khas bagi kebanyakan negara-negara bukan Barat. Paradoks ini hanya terdapat di Jawa, tidak di Aceh atau wilayah lainnya. Maka kondisi yang demikian inilah yang menggambarkan betapa jahiliyahnya penduduk Jawa di awal abad ke-20 ini.

Di Jawa awal abad ke-20 inilah terlihat arogansi orang-orang yang mengaku intelektual; mereka memandang rendah terhadap agama. Meskipun ada beberapa orang Indonesia yang memperoleh pendidikan Barat yang berhasil membangun jembatan antara kebudayaan Barat dengan reformisme Islam, mayoritas kaum nasionalis yang secara politis sadar, menganut sikap angkuh dan menghina terhadap Islam, suatu sikap yang jelas-jelas diambil dari Barat, dan sangat serupa dengan sikap-sikap yang ada di kalangan-kalangan orang Barat. Negara sekuler dan modern yang diidamkannya hanya sedikit saja gunanya bagi para santri dan ulama demikian pula bagi adat dan priyayi. Kedua-duanya, di dalam pandangannya mewakili elemen-elemen yang secara intrinsik konservatif yang telah ditakdirkan untuk hancur di dalam evolusi politik negaranya. Bahkan mereka mulai mengejek dan menuduh agama (Islam) dengan macam-macam istilah yang tidak masuk akal. Beberapa pemimpinnya malah melihat di dalam Islam sebuah unsur perusak historik persatuan Indonesia yang lebih besar di masa lalu, sambil memuja kebesaran kerajaan pra-Islam seperti Sriwijaya dan Majapahit, sebagai model-model ideal tentang Indonesia Raya menurut aspirasi-aspirasi politiknya. Padahal Islamlah yang telah menyatukan semua hati mereka pada awal dan akhirnya.

Maka di pulau Jawa mulai terjadi perang logika tingkat tinggi. Kaum Muslimin melihat kaum intelegensia berpendidikan Barat sebagai produk Barat tanpa Allah serta materialistik, yang secara licik meremehkan justru dasar identitas Indonesia, yang menurut anggapannya serupa dengan Islam. Khususnya, juru bicara kaum ortodoks melawan ide nasionalisme dengan kosmopolitanisme Islam sebagai suatu budaya dunia. Dan bahkan kaum reformis, yang lebih bersimpati kepada ide negara nasional, mengatakan bahwa negara Indonesia merdeka, sejauh dia menjadi negara sekuler, akan menjadi musuh besar Islam sebagaimana kekuasaan penjajahan orang-orang 'kafir'. Perang logika tingkat tinggi ini kemudian diturunkan ke tingkat yang lebih rendah. Mereka mulai membenci kenyataan bahwa inspirasi ideologis nasionalisme Indonesia

datang dari sumber-sumber asing, sedangkan Nabi sendiri, di dalam pesannya, mempersiapkan norma-norma etis yang mengandung dan melebihi semua spekulasi politis tandus milik pemikir-pemikir Barat.

Kaum intelektual dan semua orang yang bukan intelektual serta berpikiran waras di Jawa adalah orang-orang yang "sabar" dan perlahan-lahan. Namun ketika suasana ini sudah demikian mengendap di dasar alam bawah sadar, maka pemberontakan terhadap situasi statis mulai muncul. Awal pemberontakan adalah konflik. Kaum nasionalis sekuler dan nasionalis Muslim berada dalam suasana konflik yang semakin meningkat di dalam masa pemerintahan kolonial, dalam hal kaum nasionalis ini terjadi karena mereka semakin tidak sabar terhadap perubahan kekuasaan kolonial yang begitu perlahan-lahan dan menjengkelkan, sedangkan dalam hal kaum Muslim terutama karena arah yang diambil oleh perubahan tersebut. Perbedaan-perbedaan yang menentukan ini tetap membekas dalam sejarah Indonesia selanjutnya, sebuah sejarah, yang karena masalah itu, tetap dalam proses yang tak kunjung mencapai akhir. Semua orang di Indonesia hampir gila menanti kapan berakhirnya semua drama kemanusiaan ini, kapan Negara Islam berkesempatan mengatur semua ketidakteraturan ini.

Bab Dua

Masa Kecil SM Kartosoewirjo

Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo demikian nama lengkap dari S.M. Kartosoewirjo, yang dilahirkan pada tanggal 7 Januari 1907 di Cepu, sebuah kota kecil antara Blora dan Bojonegoro yang menjadi daerah perbatasan Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Kota Cepu ini menjadi tempat di mana budaya Jawa bagian timur dan bagian tengah bertemu dalam suatu garis budaya yang unik. Untuk memahami dalam konteks yang bagaimana ia lahir dan tumbuh besar, kita perlu melihat bagaimana setting sejarah Indonesia di awal abad ke-20 ini. Mungkin gaya pendekatan sejarah alternatif (alternative hiostory) akan cocok untuk memahami sosok Kartosoewirjo sebenarnya.

Pada awal abad ini dimulai suatu perubahan besar di Hindia Belanda (nama Indonesia ketika itu). Pada bulan Januari 1901 Ratu Wilhelmina di depan Parlemen yang anggota-anggotanya ketika itu baru terpilih, mengumumkan sebuah kebijakan program Pemerintah Belanda tentang negeri jajahan yang nantinya akan berpengaruh besar terhadap perkembangan situasi dan kondisi Indonesia selanjutnya. Ketika Pemerintah Kerajaan Belanda sangat menyadari betul bahwa di masa lalu sudah banyak perusahaan milik orang-orang Belanda dalam menjalankan roda perekonomiannya telah memperoleh keuntungan materi yang berlimpah ruah dari Hindia Belanda, sementara itu mereka melihat banyak sekali dari penduduk di tanah jajahan Hindia Belanda mengalami dampak eksploitasi ekonomi besar-besaran tersebut berupa kemiskinan di mana-mana. Sejarah ekonomi Indonesia masa kolonial Belanda telah menghasilkan banyak kemelaratan di tengah gemerlapannya kemodernan ekonomi yang dibawa penjajah kafir ini.

Maka timbul niat untuk sedikit mengubah kondisi yang ada. Kesadaran ini menjadikan tujuan utama pemerintah jajahan di masa mendatang, adalah bagaimana dari program itu mampu merubah dan memperbaiki kesejahteraan rakyat. Dan memang haruslah mereka fahami bahwa selama ini bangsa Belanda "telah berhutang budi" kepada rakyat Hindia Belanda. Dengan bernaung di bawah apa yang kemudian dikenal dengan politik etis (Etische Politiek), pemerintah Hindia Belanda mencoba perlahan demi perlahan menjalankan programnya membuka kesempatan bagi anak-anak Indonesia dari golongan atas untuk mengikuti sekolah-sekolah berbahasa Belanda tingkat dasar dan menengah. Maka enlightened elit modern kolonial mulai terbentuk di Indonesia setelah pegawai-pegawai negeri pemerintah kolonial Hindia Belanda melahirkan generasi pertamanya. Seiring dengan dibukanya kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang lebih maju, maka terjadilah proses transisi

masyarakat Indonesia dari tradisional ke modern. Dari Generasi terdidik inilah yang nantinya sebagai tonggak awal kebangkitan bangsa Hindia Belanda dimana kesadaran nasionalisme telah muncul di dalam hati sanubari mereka yang paling dalam.

Begitulah Kartosoewirjo, dia lahir dalam situasi yang sedemikian menguntungkan sehingga — karena kedudukan "istimewa" orang-tuanya— ia termasuk dalam salah seorang anak-anak negeri ini yang berkesempatan mengecap pendidikan modern kolonial Belanda yang sangat maju di zamannya. Maka, Belanda tidak hanya menggunakan kekuatan senjata untuk "menjinakkan" Indonesia. Selama ini tentara marsose sering sekali dipakai sebagai kekuatan represif yang ampuh untuk menentramkan Indonesia.

Politik Etis telah memberikan perhatian yang cukup besar pada pendidikan Barat bagi penduduk Indonesia, dengan dibangunnya sejumlah sarana pendidikan di beberapa tempat. Namun sayangnya kebanyakan dari sekolah-sekolah ini menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantarnya, sedikit sekali dari sekolah-sekolah tersebut yang menggunakan bahasa Belanda sebagai pengantar, kalaupun ada itupun yang prestigious, yang para tamatannya kemudian mendapat pekerjaan orang-orang berdasi (white collar jobs), yang memang banyak dicari, atau meneruskan pelajarannya ke perguruan tinggi di daerah jajahan ataupun di negeri Belanda.

Semangat penggalian akan pendidikan Barat oleh kebanyakan pelajar Indonesia ternyata jauh lebih besar dari yang diantisipasi atau diinginkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kebutuhan ini disambut dengan pertumbuhan pesat sekolah-sekolah swasta pada tahun 1920-an dan 1931-an, khususnya di Jawa dan di daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Sangat disayangkan sekolah-sekolah swasta ini yang umumnya kecil-kecil, tidak mempunyai perlengkapan dan gedung yang memadai, serta kurikulumnya seringkali tidak sama dengan kurikulum sekolah pemerintah, Atau istilahnya sekolah yang didirikan ini dikenal sebagai "sekolah liar" dan bervariasi yang dibuat dari sistem yang longgar, dimana sekolah ini dikelola oleh Taman Siswa dan Muhammadiyah hingga ke sejumlah sekolah perorangan yang didirikan oleh organisasi-organisasi keagamaan dan partai-partai politik. Namun di Minang berkembang suatu kesadaran historis dan pendidikan yang luar biasa bagi dunia gerakan penyadaran bangsa lewat usaha swasta.

Organisasi Islam modern Muhammadiyah merupakan organisasi paling penting di Indonesia ketika itu. Berdiri di Yogyakarta pada tahun 1912. Didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan (1868-1923) yang berasal dari elite agama kesultanan Yogyakarta. Ahmad Dahlan ini pada dasarnya adalah seorang tokoh aristokrat, namun karena keberpihakannya pada rakyat Muslim menjadikan ia dikenal sebagai tokoh populis. Selain itu, sesuai dengan semangat pada masa itu, ia juga adalah seorang peletak dasar pendidikan Islam modern. Sebagai pendidik, ia memulai

karir intelektualnya pada tahun 1890 ketika ia naik haji ke Mekah sekaligus belajar bersama-sama Ahmad Khatib dan yang lain-lain. Haji merupakan simbol pengakuan agamis terhadap seseorang, sedangkan belajar atau berguru pada beberapa syech di sana merupakan simbol pengakuan dunia pendidikan yang relatif sekuler. Usai pengembaraan intelektualnya, ia kembali pulang dengan tekad bulat untuk memperbaharui Islam dan menentang usaha-usaha kristenisasi yang dilakukan oleh kaum misionaris Barat. Tahun 1909 ia masuk ke dalam organisasi Budi Utomo dengan harapan dapat berkhotbah tentang pembaharuan di kalangan anggotanya, namun para pendukungnya yang telah mengenal pemikiran-pemikirannya berusaha mendesak Ahmad Dahlan untuk mendirikan sebuah organisasi sendiri. Akhirnya pada tahun 1912 didirikanlah organisasi Muhammadiyah di Yogyakarta. Berbeda dengan Budi Utomo, Muhammadiyah di sebagian besar programnya sangat mencurahkan pada usaha-usaha pendidikan serta kesejahteraan sekaligus gencar melakukan kegiatan program dakwah guna melawan usaha-usaha kristenisasi yang mulai menjamur di daerah Jawa, juga memberantas 'ketakhyulan-ketakhyulan' lokal yang memang sudah menjadi kepercayaan dikalangan rakyat.

Dengan semangat pembaharuan pemikiran yang dilaksanakan oleh Organisasi Muhamadiyah ini banyak sekali mengalami hambatan, sehingga pada awal berjalannya, Muhamadiyah berkembang secara lamban. Organisasi ini ditentang atau diabaikan oleh para pejabat, guru-guru Islam gaya lama di desa-desa, hierarki-hierarki keagamaan yang diakui pemerintah, dan oleh komunitas-komunitas orang saleh yang menolak ide-ide Islam Modern. Dalam rangka upaya-upaya pemurniannya, organisasi ini mengecam kebiasaan-kebiasaan yang telah diyakini oleh orang-orang saleh Jawa selama berabad-abad sebagai Islam yang sebenarnya, seperti selamatan, ziarah ke kubur. Dengan demikian, maka kehadiran Muhammadiyah dianggap mengancam kelanggengan tradisi masyarakat sehingga menimbulkan banyak permusuhan dan kebencian di dalam komunitas agama di Jawa.

Bersamaan dengan itu, lingkungan politik berbalik arus menentang radikalisme, tetapi ironisnya keadaan ini malah menempatkan ISDV (Indische Social-Democratische Vereniging) dalam posisi untuk memimpin gerakan politik rakyat. ISDV saat itu berada di tangan Semaun dan seorang pemuda bangsawan Jawa yang bernama Darsono (lahir tahun 1897). Pada awal perjalanannya, dengan jumlah anggotanya hanya 269 orang pada tahun 1920, organisasi ini memang masih sangat kecil dan juga sangat terbatas, tetapi kemudian sebagian besar anggotanya adalah orang Indonesia. Maka organisasi ini menjadi organisasi pribumi yang meraup banyak pengikut. Inilah cikal-bakal organisasi yang menggerogoti Islam secara sangat kejam hingga ke PKI dan gerakan-gerakan kiri lainnya di era reformasi sekarang ini. Pada bulan Mei 1920 organisasi ini mengalami pergantian nama menjadi Perserikatan Komunis di Hindia dan pada tahun 1924 berganti nama

lagi menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Organisasi inilah yang paling banyak berperang dengan kalangan ideolog Islam, secara fisik maupun psywar. Dengan pasang naiknya paham-paham Barat non-agama, maka PKI dan organisasi-organisasi yang bergerak dengan kesadaran kiri ini kemudian banyak diuntungkan, sementara Islam mulai memasuki pasang surut yang semakin hari semakin "kurang darah".

Untuk melihat kondisi Islam Indonesia pada masa-masa awal sebelum the formative age yang dialami Kartosoewirjo, kita harus melihat Islam yang mulai berubah pada tingkat dunia. Menjelang tahun 1925, di dunia internasional Islam mengalami sebuah perubahan besar. Ketika pada tahun 1924 negara Turki telah menghapus jabatan khalifah, pemimpin agama semua kaum muslim, yang telah dituntut sebagai haknya oleh sultan-sultan Usmani selama sekitar enam dasawarsa. Mesir bermaksud menyelenggarakan suatu konferensi Islam Internasional guna membahas masalah kekhalifahan tersebut. Perpecahan ini tidak hanya memperlihat betap barbariannya para penguasa-penguasa negeri yang dulunya pernah menjadi negeri Islam. Akan tetapi, terjadi kekacauan lagi ketika pada tahun 1924 Ibn Sa'ud merebut Mekah, dan menyebarkan ide-ide pembaharuan Wahabi serta menyatakan bahwa dirinya adalah khalifah. Dia juga menghimbau seluruh kaum muslim supaya menghadiri konferensi-konferensi tersebut, tetapi wakil-wakilnya sebagian besar berasal dari kalangan Islam Modernis, dan ketika itu tokoh Tjokroaminoto sangat menonjol dalam konferensi tersebut. Di Timur Tengah sedang terjadi kemerosotan Islam, maka di Nusantara Islam mengalami titik awal kebangkitan yang baru terlihat seperti seberkas sinar lampu kecil.

Sinar lampu Islam juga terlihat dengan bangkitnya umat Islam melalui pergerakan-pergerakan yang mewarnai gerakan-gerakan lainnya. Muhammadiyah, SI, NU, Al-Irsyad dan lain-lain bermunculan. Namun tak lama kemudian mengalami kekurangan darah semangat kembali. Seiring dengan telah wafatnya Ahmad Dahlan sebagai orang nomor satu di Muhamadiyah, organisasi ini mengalami penyusutan anggota dengan hanya beranggotakan 4.000 orang saja pada tahun 1925, tetapi organisasi ini telah mendirikan lima puluh lima sekolah dengan 4.000 orang murid, dua balai pengobatan di Yogyakarta dan Surabaya, sebuah panti asuhan, dan sebuah rumah miskin. Organisasi Islam Jawa modern ini adalah organisasi yang bisa menyatukan antara orang-orang beriman di Jawa dengan di tempat-tempat lain di Nusantara. Organisasi ini diperkenalkan di Minangkabau oleh Haji Rasul pada tahun 1925 dan mendapatkan sambutan yang luar biasa oleh kalangan agamawan Islam di sana. Sesaat setelah berhubungan dengan dunia Islam yang dinamis di Minangkabau, maka organisasi ini berkembang dengan pesat.

Minang adalah sumber darah segar bagi perkembangan organisasi Islam yang dilahirkan dan dibidani di Jawa. Pada tahun 1930, menurut catatan M.C. Ricklefs, jumlah anggota organisasi ini

sebanyak 24.000 orang, pada tahun 1935 berjumlah 43.000 orang, dan pada tahun 1938 organisasi ini mengklaim mempunyai anggota yang luar biasa banyaknya, yaitu 250.000 orang. Pada tahun 1938 organisasi ini telah menyebar di semua pulau utama di Indonesia, mengelola 834 mesjid dan langgar, 31 perpustakaan umum dan 1.774 sekolah, serta memiliki 5.516 orang mubalig pria dan 2.114 orang mubalig wanita. Perkembangan yang pesat ini tampaknya tidak diikuti oleh organisasi Islam modern lainnya, karena itu, menuriut Dengel, bisa dikatakan bahwa sejarah Islam Modern di Indonesia sesudah tahun 1925 adalah sejarah Muhammadiyah. Namun, kemerosotan Muhammadiyah setelah tahun-tahun kejayaannya itu dimulai justru di Pulau Jawa, Pulau Penggembosan.

Demikianlah sekilas setting sejarah yang mengitari saat-saat S.M. Kartosoewirjo lahir. Ia lahir dan mengalami masa-masa kecilnya pada saat gerakan-gerakan Islam mengalami pasang naik dan pasang surut secara bersamaan. Maka orang tuanya bukanlah orang yang dikenal fanatik atau anti-Islam; melainkan orang tua yang biasa-biasa saja, yang menyerahkan anaknya pada perputaran zaman. Ayahnya, yang bernama Kartosoewirjo, bekerja sebagai mantri yang bekerja pada kantor yang mengkoordinasikan para penjual candu di kota kecil Pamotan dekat Rembang. Di bawah sistem administrasi pemerintahan Hindia Belanda, profesi pedagang candu memiliki kedudukan istimewa. Karena itu pedagang candu diangkat menjadi pegawai oleh pemerintah kolonial Belanda di bidang distribusi perdagangan candu yang dikontrol oleh pemerintah. Candu, ketika itu, tidak pernah masuk ke dalam persoalan yang dianggap penting oleh organisasi-organisasi Islam. Namun, juga karena ketidakperhatiannya organisasi-organisasi Islam ketika itu, bagi pemerintah Hindia Belanda adalah sesuatu yang sangat penting. Ekonomi Hindia Belanda hampir seperempatnya disokong oleh perdagangan candu ini. Sedemikian pentingnya perdagangan candu di mata penguasa kolonial Belanda, maka jabatan mantri candu pun disamakan dengan Sekretaris Distrik. Dalam posisi inilah, ayah S.M. Kartosoewirjo mempunyai kedudukan yang cukup penting sebagai seorang pribumi saat itu. Kedudukan orang tua berpengaruh terhadap pembentukan dan garis sejarah anaknya. Maka Kartosoewirjo pun kemudian mengikuti tali pengaruh ini hingga pada usia-usia remajanya.

Dengan kedudukan istimewa inilah serta makin mapannya "gerakan pencerahan Indonesia", S.M.Kartosoewirjo dibesarkan dan berkembang. Ia terasuh di bawah sistem rasional Barat yang mulai dicangkokkan Belanda di tanah jajahan Hindia. Suasana politis ini juga mewarnai pola asuh orang tuanya yang berusaha menghidupkan suasana kehidupan keluarga yang liberal. Masing-masing anggota keluarganya mengembangkan visi dan arah pemikirannya ke berbagai orientasi. Ia mempunyai seorang kakak perempuan yang tinggal di Surakarta pada tahun 50-an yang hidup dengan penuh keguyuban, dan seorang kakak laki-laki yang memimpin Serikat Buruh Kereta Api

pada tahun 20-an, ketika di Indonesia terbentuk berbagai Serikat Buruh. Gerakan buruh kemudian banyak dipengaruhi oleh konsepsi-konsepsi Karl Marx tentang "ideologi kaum buruh".

Pada masa sekitar tahun 1909, di seluruh Indonesia banyak bermunculan organisasi-organisasi baru di kalangan elite terpelajar, yang sebagian besar didasarkan atas identitas-identitas kesukuan. Sarekat Ambon (1920) dan organisasi-organisasi pendahulunya sejak tahun 1909 bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan orang Ambon; Jong Java (Pemuda Jawa, 1918) merupakan lembaga para mahasiswa yang pertama; Jong Pasundan (1914) merupakan organisasi semacam Budi Utomo untuk orang Sunda; Sarekat Sumatra (Sumatranen Bond, 1918) merupakan kelompok mahasiswa Sumatera; Jong Minahasa (Pemuda Minahasa, 1918) adalah untuk orang-orang Minahasa; Timorsch Verbond (Persekutuan Orang-orang Timor, 1921) didirikan oleh orang-orang Timor yang keluarga-keluarganya berasal dari Roti dan Savu untuk melindungi kepentingan-kepentingan rakyat Timor; Kaum Betawi (1923) giat berusaha memajukan hak-hak warga Indonesia 'asli' dari Batavia; Pakempalan Politik Katolik Jawa (Persatuan Politik Orang-orang Jawa yang Beragama Katolik, 1925) mengabdi kepada kepentingan-kepentingan kelompok minoritas itu. Organisasi-organisasi tersebut dan masih banyak kelompok lainnya tidak hanya mencerminkan adanya euphoria atau kegairahan baru untuk berorganisasi namun juga mencerminkan masih kuatnya identitas-identitas kesukuan dan kemasyarakatan yang terus berlangsung. Organisasi yang mempunyai konsep tentang suatu identitas untuk seluruh Indonesia masih belum mempunyai pendukung yang berarti. Pembelahan organisasi selain karena masalah kedaerahan, juga masalah ideologi.

Organisasi yang menanamkan ideologi hanya dari kalangan pemikir dan tokoh-tokoh pergerakan Islam dan gerakan kiri. Maka Organisasi yang memperoleh kemajuan adalah organisasi-organisasi Islam dan organisasi sosialis maupun komunis. Islam tidak ketinggalan dalam soal pendidikan, maka tidak ketinggalan juga para buruh dan pegawai yang tergabung dalam serikat-serikat pekerja kiri pun berdiri di Indonesia ketika masa ramai-ramainya pembentukan organisasi ini. Antara tahun 1908 dan 1918 berdiri serikat-serikat bagi para guru di sekolah-sekolah pemerintah, para petugas pabean, para pegawai pegadaian pemerintah, para pegawai monopoli candu pemerintah, para pegawai pekerjaan umum, para pekerja perbendaharaan, para buruh pabrik gula, serta untuk kaum tani dan kaum buruh pada umumnya. Kehadiran pabrik gula ini telah menghasilkan banyak perubahan dalam kehidupan ekonomi petani pedesaan Jawa. Akan tetapi, yang mengambil manfaat dari kehadiran industri gula ini adalah kaum politisi yang menggerakkan buruh untuk kepentingan politik mereka sendiri. Akan tetapi, organisasi serikat buruh pada umumnya lemah karena adanya tenaga kerja yang berlebihan dan tekanan para

majikan (pemerintah maupun swasta) yang tidak dilarang secara hukum maupun sentimen untuk memanfaatkan segala alat yang ada guna mematahkan pemogokan-pemogokan.

Pada bulan 1918 gairah politik masa Perang Dunia I mencapai puncaknya ketika revolusi sosial demokrat di Jerman seolah-olah akan juga berpengaruh ke negeri Belanda. Namun ternyata upaya tersebut mengalami kegagalan. Walaupun hasilnya yang pasti belum diketahui di Indonesia, van Limburg Stirum, yang barangkali juga sudah tahu bahwa kerajaan Belanda selamat dan ssemata-mata memanfaatkan kesempatan itu untuk mendukung pembaharuan lebih lanjut, memberikan 'janji-janji November'-nya yang menyetujui pengalihan wewenang selanjutnya kepada Volksraad dan perbaikan-perbaikan sosial lainnya yang tidak terinci. Bagi para aktivis pergerakan tampaknya Volksraad semakin memberi harapan.

Dua aliran yang bertentangan telah muncul sebagai dasar bagi dilakukannya peremajaan secara nasional, dan kini ditambah aliran pemikiran yang ketiga. Aliran kalangan atas yang mencari modernisasi secara Barat (dan setidak-tidaknya mempunyai unsur-unsur anti Islam) paling jelas diwakili oleh Budi Utomo dan aliran Islam Modern diwakili oleh Muhammadiyah, kini ditambah dengan ide-ide sosialis yang radikal. Namun, perkembangan revivalisme Islam paling hebat justru didukung oleh massa petani di pedesaan. Pada tahun 1911 suatu partai politik yang bernama Indische Partij (Partai Hindia) didirikan oleh seorang Indo-Eropa yang radikal bernama E.F.E. Douwes Dekker (Setiabudi, 1879-1850), seorang keluarga jauh E. Douwes Dekker (Multatuli).

Partai ini mempermaklumkan suatu nasionalisme 'Hindia' dan menuntut kemerdekaan. Dua orang Jawa yang terkemuka, Tjipto Mangunkusumo dan Suwardi Surjaningrat (kemudian disebut Ki Hajar Dewantara, 1889-1959), bergabung dengan Douwes Dekker. Pemerintah tidak mau mengakui partai ini, dan pada tahun 1913 ketiga pemimpin tersebut diasingkan ke negeri Belanda (Tjipto sampai tahun 1914, Douwes Dekker sampai tahun 1918, dan Suwardi sampai tahun 1919). Organisasi-oraganisasi kaum nasionalis ini seperti organisasi KNPI, AMPI atau HMI sekarang yang hanya bisa berdiskusi dan tak berbuat banyak. Yang sebenarnya berbuat adalah para petani di pedesaan yang habis-habisan berontak dan mengadakan resistensi politik sehebat mungkin bahkan tak pernah ada suatu pemberontakan yang lebih hebat dari pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan petani. Dalam dunia ekonomi yang berubah, kaum tanilah yang paling kena getahnya dari sistem baru yang dibawa Belanda.

Pada tahun 1909 seorang lulusan OSVIA bernama Tirtoadisurjo yang telah meninggalkan dinas pemerintahan dan menjadi wartawan, mendirikan Sarekat Dagang Islamiyah di Batavia. Pada tahun 1911, dia mendirikan suatu organisasi semacam itu lagi di Buitenzorg (Bogor). Kedua organisasi tersebut dimaksudkan untuk membantu pedagang-pedagang bangsa Indonesia

dalam menghadapi saingan orang-orang Cina. Pada tahun 1911 dia mendorong seorang pedagang batik yang berhasil di Surakarta bernama Haji Samanhudi (1868-1956) untuk mendirikan Sarekat Dagang Islam sebagai suatu koperasi pedagang batik anti-Cina. Di daerah Jawa Timur juga didirikan cabang-cabang lainnya, adapun sasaran yang ingin dicapai adalah bagaimana mempungsikan peranan Islam dalam masyarakat desa, disamping itu memberikan pendidikan politik terhadap mereka sehingga bisa berperan aktif dalam setiap perjuangan kemerdekaan. Di Surabaya HOS Tjokroaminoto (1882-1934) menjadi pimpinan organisasi itu, ia juga seorang lulusan OSVIA yang telah mengundurkan diri dari dinas pemerintahan. HOS Tjokroaminoto adalah seorang tokoh yang memiliki kharisma yang menjadi terkenal karena sikapnya yang memusuhi orang-orang yang memegang kekuasaan, baik yang berkebangsaan Belanda maupun Indonesia, dan dengan cepat menjadi pemimpin yang paling terkemuka dari gerakan rakyat yang pertama itu. Sejak tahun 1912, SI berkembang dengan pesat, dan untuk pertama kalinya tampak adanya asas rakyat walaupun sukar dikendalikan dan hanya berlangsung sebentar. Pada tahun 1919, SI menyatakan mempunyai anggota 2 juta orang, tetapi jumlah yang sesungguhnya mungkin tidak pernah lebih dari setengah juta orang. Tidak seperti Budi Oetomo, SI berkembang dari Jawa ke daerah-daerah luar Jawa, tetapi Jawa tetap menjadi pusat dari kegiatan-kegiatannya. Anggota-anggotanya harus mengangkat sumpah rahasia dan memiliki kartu anggota yang sering kali dianggap sebagai jimat oleh orang-orang desa. Tjokroaminoto kadang-kadang dianggap sebagai Ratu Adil, 'raja yang adil' yang diramalkan oleh tradisi-tadisi Jawa yang bersifat mesianistis, dan yang disebut Eru Cakra (yaitu nama yang sama dengan Cakra-aminata, Tjokroaminoto).

SI menyatakan setia kepada rezim Belanda, tetapi ketika organisasi tersebut berkembang di desa-desa maka meletuslah tindak kekerasan. Rakyat pedesaan tampaknya lebih menganggap SI sebagai alat bela diri dalam melawan struktur kekuasaan lokal yang kelihatannya monolitis, yang tidak sanggup mereka hadapi, daripada sebagai gerakan politik modern. Oleh karena itulah, maka organisasi tersebut menjadi lambang kesetiakawanan kelompok yang dipersatukan dan tampaknya didorong oleh perasaan tidak suka kepada orang-orang Cina, pejabat-pejabat priyayi, mereka yang tidak menjadi anggota SI, dan orang-orang Belanda, kira-kira dengan urutan seperti itu. Di beberapa daerah SI benar-benar menjadi pemerintahan bayangan dan para pejabat priyayi harus menyesuaikan diri. Aksi boikot yang dilakukan terhadap pedagang batik Cina di Surakarta dengan cepat meningkat menjadi aksi saling menghina antara Cina-Indonesia dan tindak kekerasan di seluruh Jawa. Pada tahun 1913-1914 terjadi letupan tindak kekerasan yang sangat hebat di kota-kota dan desa-desa; dalam hal ini cabang-cabang Sarekat Islam lokal memainkan

peranan penting. Inilah gerakan nasionalis Islam yang kelahirannya mendahului gerakan Boedi Oetomo pada tahun 1908.

Ketika lahirnya Boedi Oetomo, Gubernur Jenderal van Heutsz menyambut baik Budi Utomo sebagai tanda keberhasilan Politik Etis. Memang itulah yang dikehendakinya: suatu organisasi pribumi yang progresif-moderat yang dikendalikan oleh para pejabat yang maju. Pejabat-pejabat Belanda lainnya mencurigai Budi Utomo dan menganggapnya sebagai gangguan yang potensial. Akan tetapi, pada bulan Desember 1909 organisasi tersebut dinyatakan sebagai organisasi yang sah. Adanya sambutan yang hangat dari Batavia menyebabkan banyak orang Indonesia yang merasa tidak puas dengan pemerintah untuk mencurigai Budi Oetomo itu. Sepanjang sejarahnya (organisasi ini secara resmi dibubarkan pada tahun 1935) sebenarnya Budi Utomo sering kali tampak sebagai partai pemerintah yang resmi. Organisasi-organisasi yang lebih aktif dan penting segera berdiri. Beberapa di antaranya bersifat keagamaan, kebudayaan, dan pendidikan, dan beberapa lagi bersifat politik, ada pula yang bersifat keduanya. Organisasi-organisasi itu bergerak di kalangan masyarakat bawah dan untuk pertama kalinya terjalin hubungan antara rakyat desa dan elite-elite baru. Golongan priyayi rendah merupakan lapisan anggota dan pengurus yang paling penting di dalam beberapa gerakan tersebut, tetapi golongan ini merupakan cabang priyayi rendah yang berbeda dari priyayi yang aktif di dalam Budi Oetomo.

Kalau anggota-anggota Budi Oetomo sebagian besar mencetak karir mereka dalam dinas pemerintahan, maka mereka yang memimpin gerakan-gerakan yang lebih aktif tersebut hampir semuanya merupakan orang-orang yang telah berhasil menyelesaikan sekolah-sekolah Belanda, namun kemudian mengundurkan diri atau diberhentikan dari pekerjaan-pekerjaan pemerintahan. Muncul pula suatu kepemimpinan agama yang baru ketika Islam Indonesia diterapkan pada periode pembaharuan yang paling penting dalam sejarahnya.

Dalam masyarakat Jawa, kelompok minoritas yang berusaha benar-benar mentaati kewajiban-kewajiban Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka disebut silih berganti wong muslimin (kaum muslim), putihan (golongan putih), atau santri (murid sekolah agama). Ada dua kelompok yang dapat dibedakan dalam golongan masyarakat ini: kaum muslim pedesaan yang mengelompok di sekeliling para guru agama Islam (kyai) dan sekolah-sekolah agama mereka (pesantren, tempat para santri) dan, di lain pihak kelompok-kelompok muslim perkotaan yang sering kali melibatkan diri di bidang perdagangan. Kelompok-kelompok muslim perkotaan ini tinggal di daerah-daerah yang terpisah di kota-kota Jawa yang disebut kauman (tempat orang-orang yang saleh), biasanya di dekat masjid utama. Pada awal abad XX kaum muslim perkotaan ini merasakan bahwa kegiatan-kegiatan dagang mereka semakin terancam oleh saingan orang-orang Cina. Cina adalah kelompok "luar" yang sangat berpengaruh dalam ekonomi yang sangat fluktuatif ketika itu.

Maka pada tahun 1911, saat para aktivis ramai-ramai mendirikan organisasi, saat itu Kartosoewirjo berusia enam tahun dan masuk Sekolah ISTK (Inlandsche School der Tweede Klasse) atau Sekolah "kelas dua" untuk kaum Bumiputra di Pamotan. Empat tahun kemudian, ia melanjutkan sekolah ke HIS (Hollandsch-Inlandsche School) di Rembang. Tahun 1919 ketika orang tuanya pindah ke Bojonegoro, mereka memasukkan Kartosoewirjo ke sekolah ELS (Europeesche Lagere School). Bagi seorang putra "pribumi" HIS dan ELS merupakan sekolah elite, hanya dengan kecerdasan dan bakat yang khusus yang dimiliki Kartosoewirjo maka dia bisa masuk sekolah yang direncanakan sebagai lembaga pendidikan untuk orang Eropa dan kalangan masyarakat Indo-Eropa. Semasa remajanya di Bojonegoro inilah Kartosoewirjo mendapatkan pendidikan agama dari seorang tokoh bernama Notodihardjo yang menjadi "guru" agamanya. Notodihardjo adalah tokoh Islam modern yang mengikuti Muhammadiyah dan pemikiran-pemikirannya sangat mempengaruhi bagaimana Kartosoewirjo bersikap dalam merespon ajaran-ajaran agama Islam.

Notodihardjo ini kemudian menanamkan banyak aspek kemodernan Islam ke dalam alam pikir Kartosoewirjo remaja, dalam masa-masa yang bisa kita sebuat sebagai the formative age-nya. Ketika Kartosoewirjo mulai memasuki pintu gerbang kedewasaan, ia mulai berkenalan dengan organisasi Islam modern yang lebih jelas garis politiknya ketimbang Muhammadiyah yaitu Sarekat Islam. Pada tahun 1912 organisasi SDI merubah namanya menjadi Sarekat Islam (SI).

Ketika itu terjadi percekcokan antara Tirtoadisurjo dan Samanhudi, sehingga Samanhudi yang sebagian besar waktunya tersita untuk urusan-urusan dagang, meminta bantuan Tjokroaminoto untuk memimpin organisasi itu. Asal-usul organisasi yang bersifat Islam dan dagang segera menjadi kabur, dan istilah Islam pada namanya kini sedikit banyak lebih mencerminkan adanya kesadaran umum bahwa anggota-anggotanya yang berkebangsaan Indonesia adalah kaum muslim, sedangkan orang-orang Cina dan Belanda adalah bukan muslim. Tjokroaminoto sendiri tampaknya tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang Islam, setidak-tidaknya jika dibandingkan dengan para ulama yang mendirikan gerakan pembaharuan agama yang sebenarnya. Tokoh Tjokroaminoto inilah yang kemudian banyak mempengaruhi perkembangan pemikiran dan aksi politik Kartosoewirjo.

Bab Tiga

Kartosoewirjo dalam Kancah Gerakan Nasionalisme Indonesia

Pada tahun 1923, setelah menamatkan sekolah di ELS, Kartosoewirjo pergi ke Surabaya melanjutkan studinya pada Sekolah Kedokteran Belanda untuk Pribumi, NIAS (Nederlandsch Indische Artsen School). Di sekolah tersebut ia mengikuti tingkat persiapan (Voorbereidende School) selama tiga tahun. Kemudian pada tahun 1926 ia memulai kuliah utama yang sebenarnya, yang hanya khusus membahas persoalan-persoalan medis. Justru pada saat-saat kuliah inti inilah ia terlibat dengan banyak aktivitas organisasi pergerakan nasionalisme Indonesia di Surabaya. Dikenal ketika itu daerah Surabaya merupakan kota pergerakan kaum nasionalis Hindia. Untuk melihat bagaimana kiprah dan pemikiran Kartosoewirjo yang dipengaruhi oleh berbagai ideologi ketika itu, maka kita perlu terlebih dahulu memahami konteks sosial-politik kota Surabaya tahun 1920-an.

Di Surabaya sudah banyak bermunculan gerakan kaum nasionalis dengan berbagai organisasi tempat mereka berkumpul dan berdebat tentang cita-cita bagaimana bentuk Indonesia di masa depan. Para intelektual mulai memikirkan tentang sistem negara, ideologi atau haluan politik dan bentuk perjuangan yang kesemuanya mengambil konsep-konsep modern dari Barat. Hanya sedikit yang mengambilnya dari latar belakang sejarah Islam. Maka, tidaklah terlalu salah jika kita mengatakan bahwa modernisasi Indonesia dimulai pada periode ini. Keengganan para modernis Indonesia untuk memakai sistim Islam yang nantinya telah menyeret bangsa Indonesia yang akan diperjuangkan ke dalam lembah krisis yang berkepanjangan. Kunci perkembangan pada masa ini, sebagaimana disebut M.C. Ricklefs, adalah "munculnya ide-ide baru mengenai organisasi dan dikenalnya definisi-definisi dan konsep-konsep baru yang sebelumnya tidak pernah didengar oleh sebagian besar masyarakat Indonesia waktu itu." Ide baru tentang organisasi meliputi bentuk-bentuk organisasi dan sistem kepemimpinan yang baru, sedangkan definisi yang baru dan konsep-konsep baru yang, mengutip Ricklefs, "lebih canggih mengenai identitas meliputi analisis yang lebih mendalam tentang lingkungan agama, sosial, politik, dan ekonomi."

Organisasi-organisasi kaum nasionalis itu terhimpun menjadi satu di dalam wadah yang bernama Perhimpunan Indonesia (PI). Di dalam perhimpunan ini terdapat banyak aliran pemikiran dan kecenderungan ideologis yang sedikitnya ada empat pikiran pokok dalam ideologi PI yang dikembangkannya sejak permulaan tahun 1925. Ideologi perhimpunan menempatkan kemerdekaan Indonesia sebagai tujuan politik utama dengan memperhatikan persoalan-persoalan sosial dan ekonomi serta politik. Keempat pemikiran pokok itu adalah: Pertama, Kesatuan Nasional: perlunya bangsa Indonesia mengenyampingkan perbedaan-

perbedaan sempit dan perbedaan etnis serta kedaerahan sehingga perlu ada kesatuan aksi melawan Belanda untuk menciptakan negara kebangsaan Indonesia yang merdeka dan bersatu. Kedua, Solidaritas: kebulatan dan persatuan yang kukuh antara pribumi tanpa melihat perbedaan yang ada antara sesama orang Indonesia. Yang perlu disadari adalah antara "kita di sini" dan "mereka di sana" berbeda dan ada pertentangan kepentingan yang mendasar antara penjajah dan kaum nasionalis haruslah mempertajam konflik antara orang kulit putih dan sawo matang. Persatuan biasanya diperoleh karena ada musuh bersama dari luar. Ketiga, Non-kooperasi: gerakan yang sama sekali tidak mau berkompromi dengan segala hal yang berbau kolonial. Tidak bekerjasama ini diartikan sebagai upaya menyadari bahwa kemerdekaan bukan hadiah sukarela dari Belanda tetapi harus direbut dan diperjuangkan oleh seluruh rakyat bangsa Indonesia dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri, oleh kerena itu tidak perlu mengindahkan segala kebijakan yang dibuat oleh dewan perwakilan kolonial seperti Volksraad (Majelis Rakyat). Bahkan kaum nasionalis Islam lebih keras lagi dalam memandang Volksraad seperti Volkshuis (Rumah Rakyat) yang bertentangan "Rumah Tuhan" (Masjid). Keempat, Swadaya: dengan swadaya gerakan kaum nasionalis dimaksudkan sebagai "gerakan yang tidak berkenan bersyarikat dengan penjajah"; mengandalkan kekuatan sendiri dan mengembangkan suatu struktur alternatif dalam kehidupan nasional, politik, sosial, ekonomi, dan hukum, yang kuat dan berakar dalam masyarakat pribumi dan sejajar dengan administrasi kolonial.

Yang jauh lebih penting dari pada kemenonjolan sementara dari sayap kooperasi gerakan nasionalis tahun 1930, adalah perpecahan yang terbuka antara kelompok nasionalis sekuler dan nasionalis Islam. Organisasi jahiliyah pertama yang menjadi cikal-bakal semua organisasi sekuler adalah Perserikatan Nasional Indonesia. Pada tanggal 4 Juli 1927 Sukarno dan Algemeene Studieclubnya memprakarsai pembentukan sebuah partai politik baru, Perserikatan Nasional Indonesia, dengan Sukarno sebagai ketuanya. Namun sekitar bulan Mei 1928 nama partai ini diubah menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI). Tujuan PNI adalah kemerdekaan bagi Kepulauan Indonesia yang akan dicapai secara nonkooperatif dan dengan basis serta dukungan dari organisasi massa. Inilah partai politik penting pertama yang beranggotakan bangsa Indonesia, dimana program yang ingin dicapai dari PNI ini semata-mata mencita-citakan kemerdekaan politik, berpandangan kewilayahan yang meliputi batas-batas Indonesia yang nantinya akan memberlakukan ideologi nasionalisme 'sekuler'. Pada bulan Mei 1929 PNI telah mempunyai cabang-cabangnya di kota-kota besar di Jawa dan satu cabang di Palembang, serta menyatakan memiliki anggota sebanyak 3.860 orang (sebagian besar di Bandung, Batavia, dan Surabaya); pada akhir tahun 1929 jumlah anggota partai ini mencapai 10.000 orang.

Perbedaan paham antara kedua kelompok antara nasionalis Sekuler dan Islam melebar secara nyata pada tahun 1928 dan 1929 ketika pemimpin-pemimpin PSI semakin khawatir atas dominasi PNI dalam gelanggang politik dan atas kemerosotan dirinya yang berjalan terus. Usaha untuk mengorganisasi kembali dan meremajakan PSI tidak mampu mencegah merosotnya partai ini. Desas-desus tentang korupsi dalam partai hanya mempercepat proses kemunduran tersebut. Ketegangan antara golongan nasionalis sekuler dengan PSI mendekati titik perpecahan ketika dalam pengadilan terhadap Sukarno pada bulan Agustus diungkapkan sepucuk surat Tjipto Mangunkusumo kepada Sukarno tertanggal Maret 1928, di mana Tjipto memperingatkan bahaya Pan-Islamisme dan kemungkinan usaha-suaha Tjokroaminoto dan Salim untuk menguasai PPPKI. Kalau mereka berhasil, menurut Tjipto, akibatnya akan hancurlah gerakan nasionalis. Tjipto memperingatkan Sukarno terhadap "ulah pengkhianat" yang dilakukan oleh Tjokroaminoto dengan PSI. Semua pembaharu pada awalnya adalah "pemberontak" atau cap-cap negatif lainnya yang diberikan oleh lawan-lawannya.

Begitu tajamnya kritikan yang dialamatkan kepada kelompok Islam telah membuat kalangan pemimpin Islam marah, disamping itu adanya kemerosotan di tubuh organisasi PSI, maka pemimpin-pemimpin Islam yang tergabung dalam PSI mengadakan perlawanan dengan serangan balasan terhadap kaum nasionalis sekuler pada umumnya dan PNI pada khususnya.

Dibalik pertentangan yang begitu sengit ini sebenarnya telah tercipta sebuah pembentukan kepemimpinan Indonesia dimasa mendatang. Namun karena adanya pertentangan mengenai antara garis-garis agama dan ideologi dengan kesadaran diri untuk keluar dari kolonialisme membawa akibat besar dengan telah terpecah belahnya bentuk dasar kepemimpinan. Dan hal ini dimanfaatkan sekali oleh pihak Belanda untuk membuat penindasan baru sebagai jawaban terhadap permasalahan yang sedang terjadi yaitu dengan mengubah pandangan tentang kepemimpinan Indonesia di masa yang akan datang. Bukan hanya di sektor politik tapi juga di sektor ekonomi kolonialisme Belanda telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat yang ada di Pulau Banda. Pengerukan besar-besaran dari hasil kebun pala yang menjadi komoditas di daerah tersebut telah menyeret rakyat disana menghadapi segala kesulitannya. Miskin

Sesungguhnya peran yang dimainkan oleh PPPKI pada sekitar tahun 30an untuk meminimalisasi perseteruan yang sedang terjadi antara golongan nasionalis Islam dan Sekuler tidak mampu berbuat banyak, bahkan perseteruan itu semakin meningkat sehingga membawa akibat perlu adanya koreksi tentang fungsi PPPKI sebagai suatu forum antara golongan yang mempunyai prinsip perjuangan koperatif dan non kooperatif. Dan hal ini pula yang mengancam tentang eksistensi PPPKI.

Dalam rapat PPPKI yang diadakan pada bulan Maret telah diambil keputusan berupa pelarangan membentuk kepengerusan ditingkat daerah tetapi cukup dengan menunjuk agen-agennya di kota-kota besar di Jawa yang bertujuan untuk mengadakan satu kontrol terhadap Dewan Penasehat dalam menjalankan semua aktifitas partai. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa federasi telah menyebar ke tingkat bawah dan terbentuk menjadi satu kekuatan politik. Pada rapat PPPKI di Solo tanggal 25 Desember 1929, ketika wakil-wakil partai anggota sedang mengadakan kongres partai, di di luar dari perkiraan mereka bahwa setelah beberap hari acara kongres itu dilangsungkan ada beberapa dari peserta kongres itu yang akan ditangkap. Padahal inti pembicaraan dalam kongres itu bukanlah pada reaksi terhadap pihak federasi tetapi pada seputar perkembangan gerakan nasionalis di masa depan. Dan di dalam serangkaian perdebatan ketegangan antara golongan nasionalis sekuler dengan nasionalis Islam mencapai puncaknya dan mengancam kelangsungan eksistensi federasi itu.

Hal yang menarik selama periode perjuangan PSI dalam federasi ini ialah dimana Sukiman seorang fungsionaris partai PSI yang juga merupakan pendiri dari PPPKI dan penganjur yang paling gigih dalam keinginannya memasukkan PSI ke dalam PPPKI. Pada kongres partai di Yogyakarta tanggal 24 – 27 Januari 1930, dia dan Drijowongso melaporkan tentang adanya serangan-serangan terhadap PSI, sambil mengajukan usul agar partai itu segera menarik diri dari federasi. Namun usulan yang diajukan oleh Sukiman tidak mendapat jawaban pasti karena dirinya tidak lagi mendapat dukungan dari ketua partai Tjokroaminoto. Bahkan sekarang peranan itu menjadi terbalik karena Tjokroaminoto berusaha mempengaruhi partai tentang manfaat PPPKI dalam situasi di mana Sukiman menghendakinya untuk keluar. Dalam pemikiran Tjokroaminoto sangat riskan jika PSI keluar dari kenggaotaanya di PPPKI dan berakibat buruk terhadap masa depan partai, ditambah semakin terjepitnya posisi partai antara kaum pembaharu Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama yang konservatif. Ditambahkan oleh Tjokroaminoto, jika hal itu terjadi dalam partai maka lepaslah kesempatan dalam mempengaruhi golongan nasionalis sekuler, dan yang lebih parah lagi lambat atau cepat partai akan mati. Dan terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukannya selama menjadi anggota PPPKI, Tjokroaminoto dan Kartosoewirjo akan siap mempertanggungjawabkannya. Namun demikian, rapat tersebut tidak menyiapkan suasana untuk pengakuan semacam itu. Tjokroaminoto kemudian terpaksa memperbaiki usul ini dengan suatu usul lain bahwa bila PPPKI tidak puas dengan permintaan maaf secara tertulis dari dia dan Sukarmadji maka PSI akan keluar dari federasi.

Sekitar tahun 1930 PSI mengadakan kongres partainya, dan dalam salah satu keputusan kongresnya adalah mengubah nama partai menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Disamping itu ingin membuktikan kepada para pengecam tentang jati diri partainya, bahwa PSII|

ini didirikan juga bertujuan hendak membentuk Negara Kesatuan Indonesia. Sekaligus berupaya untuk mengadakan rujuk dengan kalangan nasionalis sekuler. Akan tetapi rujuk dengan golongan nasionalis sekuler bukannya semakin lebih dekat. Pada bulan Juli dan Agustus hubungan ini malah memburuk akibat serangkaian karangan dalam surat kabar Soeara Oemoem, koran baru dari kelompok Studi Indonesia, yaitu karangan-karangan yang oleh banyak anggota PSII ditafsirkan sebagai penghinaan secara sengaja terhadap keyakinan mereka. Karangan-karangan yang dimuat selama hampir dua bulan mempertanyakannya manfaatnya perjalanan naik haji ke Mekkah yang dibandingkan dengan pembuangan para pemimpin nasionalis ke Boven Digul. Yang tersebut belakangan ini dianggap sebagai lebih berhak memperoleh penghargaan.

Haruslah kita mengenal lebih jauh lagi tentang bagaimana ideologi yang diperjuangankan oleh para nasionalis dalam kancah panggung politik Indonesia saat itu. Sesungguhnya Kaum nasionalis Indonesia saat itu memang sudah banyak terpengaruh oleh paham-paham demokrasi, liberalisme, kapitalisme, sosialisme, Islam dan, yang terbanyak, komunisme. Namun "daya celup Indonesia" terhadap semua ideologi itu sangat luar biasa. Misalnya, walaupun para pemimpin PI sangat terpengaruh oleh pikiran-pikiran Marxis-Leninis karena sudah menunjukkan kesuksesannya dalam membebaskan Rusia dan mengubahnya menjadi Soviet melalui sebuah Revolusi Bolshevik pada tahun 1917, namun sedikit sekali dari mereka itu yang menggunakan analisa konflik kelas (antara kelas buruh dan kelas majikan/bourguies) dalam masyarakat Indonesia. Sebagai gantinya, mereka melancarkan suatu perjuangan ras (race struggle) — sesuatu yang tidak ada di Rusia— antara orang Indonesia yang berkulit coklat melawan orang Belanda yang berkulit putih, antara bangsa Asia melawan bangsa Eropa atau, sebagaimana disebut Ingleson, sebagai perjuangan “sini” lawan “sana”. Rakyat Indonesia berusaha menekan perbedaan ideologis di antara mereka dan berusaha berjalan menuju suatu "revolusi integrasi".

Perjuangan antara ras coklat dengan ras putih juga merupakan pergulatan antara ras Asia dengan ras Eropa yang imperialis. Jika abad ke-20 dianggap sebagai abad Asia, maka kegagalan Belanda untuk hidup sesuai dengan cita-cita politik etis mengakibatkan kaum muda Indonesia berkesimpulan bahwa orang Asia tidak dapat lagi mengharapkan bantuan yang berarti dari bangsa Barat dalam usaha mereka mencapai kemerdekaan. “Janji palsu” yang sangat terkenal pernah diucapkan secara meyakinkan oleh Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum tahun 1918 tidak dapat diwujudkan karena terjadinya serangkaian kegagalan pembaharuan konstitusional tahun 1922 untuk mengadakan perubahan-perubahan penting; dan penolakan States General pada tahun 1925 terhadap pasal dalam rancangan undang-undang yang memungkinkan orang Indonesia menjadi mayoritas dalam Volksraad (parlemen yang didirikan di Batavia tahun 1918 dengan kekuasaan yang kecil, dengan mayoritas wakil-wakil orang Eropa dan dengan

pemilihannya secara tidak langsung); maka semuanya itu semakin memerosotkan kepercayaan mereka kepada Belanda. Dalam pandangan kaum nasionalis Volksraad merupakan "parlemen palsu", untuk mengelabui kenyataan bahwa semua aspek kehidupan orang Indonesia sudah diakomodasi oleh pemerintah Belanda.

Kemudian muncullah zaman yang lebih buruk lagi di bawah masa pemerintahan Gubernur Jenderal Fock. Zaman ini ditandai oleh semakin ganasnya tekanan yang dilakukan oleh Gubenur Jenderal Fock terhadap kegiatan politik sejak tahun 1923, terutama terhadap PKI, memperkuat keyakinan mereka bahwa berkerja sama dalam sistem kolonial hanya merupakan "onani politik" yang sia-sia saja. Sistem kolonial harus dirombak secara radikal. Perombakan radikal ini hanya mungkin dilakukan dengan cara menarik garis perbedaan antara sana dan sini, artinya mereka menolak untuk berjuang dengan mempergunakan fasilitas pemerintah kolonial Belanda. Dalam suasana yang penuh hiruk pikuk perdebatan ideologis seperti inilah Kartosoewirjo dibesarkan.

Dan mudahlah dipahami dalam atmosfir seperti ini ia berkenalan dengan berbagai aliran pemikiran, dan aliran pemikiran yang paling berpengaruh ketika itu adalah pemikiran Islam. Selama di sekolah inilah Kartosoewirjo mulai berkenalan dengan pemikiran-pemikiran Islam. Di masa kuliahlah ia mulai "mengaji" secara serius. Saking seriusnya, ia kemudian begitu "terasuki" oleh shibghahtullah sehingga ia kemudian menjadi Islam minded dan semua aktivitasnya kemudian hanya untuk mempelajari Islam semata dan berbuat untuk Islam sahaja. Dia pun kemudian meninggalkan sekolah dan menjadi tidak begitu peduli dengan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh sekolah Belanda, tentunya setelah ia mengkaji dan membaca banyak buku-buku dari berbagai disiplin ilmu, dari kedokteran hingga ilmu-ilmu sosial dan politik. Dengan modal ilmu-ilmu pengetahuan yang tidak sedikit itu, ia kemudian aktif di berbagai diskusi politik. Ia juga memasuki organisasi politik Sjarikat Islam di bawah pimpinan Hajo Oemar Said Tjokroaminoto.

Pemikiran-pemikiran Tjokroaminoto inilah yang kemudian banyak mempengaruhi sikap, tindakan dan orientasi Kartosoewirjo. Setahun kemudian dia dikeluarkan dari sekolah karena dituduh menjadi aktivis politik, dan didapati memiliki sejumlah buku sosialis dan komunis yang diperoleh dari pamannya yaitu Marko Kartodikromo, seorang wartawan dan sastrawan yang cukup terkenal pada zamannya. Sekolah tempat ia menimba ilmu tidak berani menuduhnya karena "terasuki" ilmu-ilmu Islam, melainkan dituduh "komunis" karena memang ideologi ini sering dipandang sebagai ideologi yang akan membahayakan. Padahal ideologi Islamlah yang sangat berbahaya bagi penguasa yang zalim. Karena pengaruh pamannya yang sangat kuat, semakin membangkitkan minat Kartosoewirjo untuk memperdalam ilmu di bidang politik.

Tidaklah mengherankan, kalau Kartosoewirjo nantinya telah tumbuh menjadi pribadi yang memiliki kesadaran politik dan sekaligus memiliki integritas keislaman yang tinggi. Buktinya ialah semenjak tahun 1923, dia sudah aktif dalam gerakan kepemudaan, di antaranya gerakan pemuda Jong Java, di organisasi ini dia terpilih menjadi ketua cabang Jong Java di Surabaya. Kemudian pada tahun 1925, ketika anggota–anggota Jong Java yang lebih mengutamakan cita-cita keislamannya mendirikan Jong Islamieten Bond (JIB). Kartosoewirjo pun pindah ke organisasi ini karena sikap pemihakannya kepada agamanya, bukan pada paham nasionalisme, dan tak lama setelah masuk dalam organisasi ini dia terpilih menjadi ketua cabang JIB Surabaya. Melalui dua organisasi inilah kemudian membawa dia menjadi salah satu pelaku sejarah gerakan pemuda yang sangat terkenal "Sumpah Pemuda". Jadi Sumpah Pemuda bukanlah diprakarsai oleh segelintir orang-orang priyayi Jawa, melainkan oleh tokoh-tokoh Islam.

Di dalam kalangan priyayi Jawa yang 'baru', mereka memandang bahwa pendidikan merupakan sebagai kunci menuju kemajuan. Oleh karena itu mereka membentuk suatu organisasi yang benar-benar modern. Kelompok ini mewakili suatu aliran sosial dan budaya yang penting di Indonesia pada abad XX. Mereka itu terutama adalah abangan Pada awal abad XX. Di antara kalangan-kalangan atas pemerintahan (priyayi) yang berada di lingkungan kaum abangan ada yang berpendapat bahwa pendidikan Barat akan memberikan kepada mereka suatu kunci menuju suatu perpaduan baru yang mereka anggap sebagai dasar bagi suatu peremajaan kembali terhadap kebudayaan, kelas, dan masyarakat mereka. Di antara kelompok ini sebagian besar memandang Islam secara netral dan bersahabat, tetapi dengan semakin meningkatnya tekanan-tekanan Islam beberapa di antaranya menjadi memusuhi Islam.

Dengan keaktifannya di organisasi kepemudaan, Kartosoewirjo berkenalan dengan tokoh Agoes Salim dan Oemar Said Tjokroaminoto, pemimpin PSI (Partai Sjarikat Islam) yang kharismatik, di mana pandangan politiknya, terutama cita-citanya akan suatu Negara Islam (Daulah Islamiyah), yang di kemudian hari ternyata sangat mempengaruhi jalan pikiran Kartosoewirjo. Keakraban secara pribadi terjalin setelah Kartosoewirjo tinggal di rumahnya dan secara kontinyu memperoleh transformasi pengalaman politik dari Tjokroaminoto. PSI merupakan lawan ideologis partai-partai sekuler ketika itu. Partai sekuler yang paling anti dengan PSI adalah Partai Nasional Indonesia (PNI). PNI merupakan puncak usaha menemukan suatu partai yang didasarkan kepada ideologi yang pada intinya berusaha mewujudkan persatuan nasional, non-kooperasi, dan swadaya. PNI adalah organisasi sekuler yang sesungguhnya sangat anti Islam, namun tidak banyak disadari oleh rakyat Indonesia yang sudah tertutup matanya oleh figur kharismatik Soekarno. Maka, menjelang akhir tahun 1927, dominasi PNI dalam gerakan nasionalis sudah sangat luas, seiring dengan dominasi pribadi Soekarno dalam dunia pergerakan.

Penantangan atau persaingan kepemimpinan dan harapan untuk menjadi partai massa yang terbesar hanya diberikan secara tunggal oleh Serikat Islam. Sejak pembentukannya dalam tahun 1911 Sarekat Islam telah merupakan partai politik Islam yang terkemuka dan selama beberapa tahun telah menjadi partai massa satu-satunya dalam zaman kolonial. Kebesaran SI ini karena diawali oleh sebuah gerakan mesianistik Sjarikat Dagang Islam yang didirikan oleh Hadji Samanhoedi di Solo pada tahun 1905 yang kemudian berubah menjadi Sjarikat Islam yang lebih mengkonsentrasikan diri pada gerakan politik dan bukan semata-mata gerakan ekonomi sebagaimana dilakukan oleh SDI. Perkembangan SI mencapai puncaknya hingga tahun 1919 di mana hampir semua tempat di Indonesia sudah memiliki kantor cabang SI. Setelah jaya biasanya segera datang masa surut. Masa surut ini ditandai oleh terpecahnya SI menjadi dua bagian yang secara ideologis berbeda jauh: SI Merah (komunis) dan SI Putih (Islam). Tetapi pendukungnya telah menurun secara dramatis setelah tahun 1919, ketika PKI mengambil alih sebagian besar anggota SI dan memasukkannya pada SI Merah yang merupakan cikal-bakal Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI pun mengalami kemerosotan karena meletusnya pemberontakan pada tahun 1926. Namun, kelemahan PKI bukan berarti kekuatan bagi PSI yang ternyata tetap berada dalam kemerosotan yang berjalan perlahan-lahan tetapi pasti. Namun demikian, kemerosotan PKI setelah pemberontakan, memberi keyakinan kepada para pemimpin Serikat Islam bahwa mereka mempunyai kesempatan untuk mengembalikan kejayaan mereka sebelumnya, dan mengisi kekosongan politik dengan suatu partai yang diremajakan kembali.

Meskipun telah diadakan peningkatan kegiatan dan perhatian terhadap reorganisasi tahun 1927, Serikat Islam, yang pada tahun 1921 telah mengubah namanya menjadi Partai Serikat Islam (PSI), gagal untuk memperoleh kembali dukungan yang telah hilang, Kelemahan kepemimpinan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, merupakan sebab utama kegagalan tersebut. Tjokroaminoto dan Salim adalah para veteran dalam gerakan nasionalis religius, dan meskipun ada kegiatan sekelompok kecil anggota-anggota muda yang dipimpin oleh Sukiman, seorang dokter lulusan Amsterdam, mereka tetap dapat menguasai partai tersebut. Tekanan utama yang terus diberikan kepada Islam dan gerakan Pan Islamisme, telah menyia-nyiakan usaha-usaha PSI untuk menarik dukungan dari elite intelektual muda. Orang-orang ini sebaliknya lebih tertarik kepada citra yang lebih radikal yang diproyeksikan oleh PNI dan memberikan kepada partai tersebut kekuatan kepemimpinan eselon satu atau dua, yang merupakan suatu faktor utama bagi dominasi PNI dalam gerakan nasionalis.

PSI juga gagal dalam mencapai dukungan yang berarti pada tingkat pedesaan, terutama karena ia semakin mengucilkan dukungan kyai-kyai dan ulama pedesaan yang dalam tahun 1910 merupakan elemen kunci bagi keberhasilan PSI. Hilangnya dukungan ini sebagian juga

disebabkan oleh tindakan-tindakan keras dari pemerintah terhadap PKI. Hanya sedikit orang yang sekarang bersedia mengambil resiko membantu suatu partai politik. Lebih penting lagi, sikap keagaamaan Tjokroaminoto yang tidak ortodoks dan acaman bahwa modernisme Islam PSI akan menyulitkan posisi mereka sendiri, menyebabkan mereka meninggalkan PSI. Untuk mempertahankan ortodoksi terhadap penyelewengan-penyelewengan ini, beberapa ulama di Jawa Timur mendirikan Nahdatul Ulama pada tahun 1926, yang keorganisasiannya segera tersebar ke seluruh Jawa. PSI akan jauh lebih sulit untuk dapat berakar di daerah pedesaan. PSI semakin terjepit antara modernisme dinamis dari Muhammadiyah yang mempunyai basis di kota dan ortodoksi dan konservatisme Nahdatul Ulama yang mempunyai basis di pedesaan.

Pada sisi yang lain, langkah-langkah imbangan yang dilakukan oleh pemerintah pada tingkat kabupaten dan desa ternyata efektif, dan baik pegawai-pegawai bangsa Eropa maupun pegawai-pegawai Indonesia semakin menaruh perhatian terhadap keluhan-keluhan di daerah, dalam suatu usaha yang yang cukup berhasil menghilangkan setiap isyu yang dapat dieksploitir oleh PSI. Perhatian terhadap keluhan yang benar ataupun yang merupakan hasil bayangan saja kemudian dibarengi dengan tindakan hukuman terhadap pemimpin-pemimpin PSI setempat yang kegiatannya mengancam ketenangan di daerah. Tindakan itu dapat berbentuk denda atau penjara bagi pemimpin daerah, tetapi meliputi juga taktik-taktik seperti pengaturan kembali kerja-kerja di desa yang bersifat mendesak agar jadwalnya jatuh bersamaan dengan rapat-rapat terbuka yang diselenggarakan oleh PSI, sehingga orang-orang desa akhirnya terhalang untuk mengikutinya, atau tercatat semua yang mengikuti rapat-rapat PSI setempat dan kemudian melaporkan kepada wedana untuk diwawancarai dan diperingatkan masing-masing secara pribadi. Tekanan tersebut memberikan masing-masing secara pribadi. Disamping itu memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan sebab di mana pun taktik itu dijalankan maka ternyata bahwa sejumlah besar anggota PSI segera melepaskan keanggotaannya atau mengembalikan kartu keanggotaannya kepada lurah desa.

Akhirnya, pembaharuan organisasi PSI hanya berlangsung di atas kertas, dan partai tersebut ternyata tidak mampu, bahkan saja pada tahun 1927 tetapi juga pada tahun-tahun berikutnya, untuk menciptakan suatu struktur organisasi yang kuat. PSI tidak bisa mencegah proses kemunduranya secara pelan-pelan, baik melalui kepemimpinan yang kuat maupun melalui reorganisasi. Dari persoalan ini kemudian timbul masalah lain yang lebih permanen sifatnnya seperti masalah kekurangan dana untuk menjalankan proyek-proyek yang lebih ambisius, yang sudah cukup membuat mereka mampu menyaingi nasionalisme keras dari PNI. Sidang kongres pada tanggal 1 Oktober 1927 menyetujui PSI untuk masuk sebagai anggota federasi yang direncanakan, sehingga dengan demikian memberikan kepada Sukiman dan Sukarno dukungan

yang mereka perlukan untuk mengatur pembentukannya secara resmi. Untuk tujuan tersebut diadakan sebuah rapat pada tanggal 17 – 18 Desember 1927 di Sekolah Taman Siswa di Bandung.

Hadir dalam pertemuan tersebut wakil-wakil dari PSI, PNI, Budi Utomo, Pasundan, Sumatranenbond, Kaum Betawi dan Kelompok Studi Indonesia. Pada pertemuan tersebut menerima AD yang dipersiapkan oleh Sukarno dan Sukiman untuk membentuk suatu federasi yang dikenal dengan nama Pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) dan memilih sebuah panitia yang terdiri dari Sabiran sebagai ketua, Sunarjo sebagai Sekretaris dan Dr. Samsi sebagai anggota ketiga untuk menyelenggarakan suatu konferensi dalam bulan Juli 1928. Sebuah dewan penasehat dibentuk untuk mengurusi masalah-masalah yang dihadapi oleh badan federasi sampai terbentuknya pengurusan tetap pada konferensi yang akan datang. Iskaq Tjokroadisurjo menjadi ketua, Dr. Samsi menjadi sekretaris merangkap bendahara, dan Sukiman berserta Sukarno menjadi anggota dewan penasehat tersebut. Terakhir sekali, rapat tersebut memutuskan agar dibentuk sebuah suratkabar nasional dan menunjuk Sartono dan Parada Harahap untuk menjajagi dan melaporkan rencana tersebut.

Akan tertapi, selama tahun 1919 pemerintah kolonial meninggalkan paham liberal, karena van Limburg Stirum mulai menyadari segala sesuatunya mulai tidak terkendalikan. Mula-mula dia berpaling kepada ISDV. Sejak Revolusi Rusia tahun 1917 ISDV telah menjadi badan komunis yang lebih nyata. Pada akhir tahun 1917 organisasi ini menghimpun sebanyak 3.000 orang serdadu dan kelasi ke dalam soviet-soviet (dewan-dewan), terutama di kota pelabuhan Surabaya. Selama tahun 1918 dan 1919 pemerintah membubarkan dewan-dewan tersebut, mengasingkan Sneevliet dan menahan atau mengasingkan sebagian besar orang-orang Belanda lainnya yang menjadi pimpinan partai ini. akan tetapi, ketika orang-orang Belanda yang radikal itu menghilang, ISDV atuh pada pimpinan orang-orang Indonesia, yang dengan cepat memungkinkan partai ini akhirnya mendapatkan basis masanya. Insulinde adalah organisasi berikutnya yang terkena pukulan. Pada awal tahun 1919 di Surakarta berlangsung kekacauan-kekacauan pedesaan yang dipimpin oleh Haji Misbach, yang khotbahnya mengenai doktrin bahwa Islam dan Komunisme adalah hal yang sama menjadikan dirinya terkenal sebagai 'haji merah'. Pemimpin-pemimpin Insulinde lainnya tampaknya juga terlibat, sehingga Misbach dan Douwes Dekker ditahan dan Tjipto Mangunkusumo diasingkan dari semua wilayah yang berbahasa Jawa. Selanjutnya adalah giliran SI.

Kaum nasional dari segala aliran politik dengan cepat menyambut pembentukan PPPKI sebagai suatu kemajuan penting dalam perjuangannya melawan Belanda. Ada kecenderungan untuk melihat pembentukan PPPKI itu sendiri sebagai pergeseran penting dalam perimbangan kekuatan dalam wilayah jajahan, walaupun peringatan-peringatan terhadap sikap puas semacam

itu dikeluarkan oleh organ PNI dan oleh suratkabarnya Singgih Timboel. Problem utama ialah bahwa satu-satunya ikatan bersama yang kuat antara organisasi-organisasi nasionalis tersebut adalah suatu ikatan negatif, yaitu bahwa semua mereka menentang musuh yang sama, yaitu Belanda. Dalam bentuknya yang positif, semua partai-partai anggota menyatakan dengan lantang dan berulang-ulang keinginan mereka untuk bersatu agar dapat menghidupkan kembali masyarakatnya dan memaksa Belanda menarik diri, tetapi masih terdapat hal-hal yang belum disetujui bersama yang menarik masing-masing partai ke arah yang berbeda-beda. Dua isue terpenting adalah prinsip kooperasi dan non-kooperasi dan peranan gerakan Islam dalam gerakan kebangsaan dan, akhirnya, peranan Islam dalam negara Indonesia yang direncanakan.

Dalam rumusan AD federasi Sukiman dan Sukarno berkeyakinan bahwa masalah-masalah ini telah dapat diselesaikan dengan menghindari pembahasan tentangnya dan menegaskan bahwa badan federasi hanya menaruh perhatian kepada hal-hal sampingan saja – hal-hal yang paling sedikit sangkut-pautnya dengan tujuan-tujuan dasar dari partai-partai anggota – sementara bidang-bidang yang paling utama dalam kegiatan politik diserahkan kepada masing-masing partai.

Namun demikian, pembentukan federasi tersebut merupakan sukses besar bagi Sukarno dan Sukiman. Pada saat isyu kooperasi/non-kooperasi menimbulkan emosi yang hebat dan di saat PSI merasa bahwa nasionalisme Islam terancam oleh ideologi sekuler PNI, maka terbentuknya suatu badan federasi merupakan suatu kemenangan bagi jerih payah dan keunggulan diplomatis dari kedua orang tersebut. Usaha keduanya bersifat saling mengisi dan tanpa salah satu dari keduanya maka PPPKI tak akan dapat terbentuk. Sukarno memberi dorongan kepada persatuan dan menunjukkan komitmen pribadi yang mampu menyingkirkan semua rintangan dan yang menggairahkan sejumlah besar partai dan pemimpin-pemimpin dari berbagai keyakinan untuk percaya bahwa suatu badan persatuan dapat terbentuk, dan adalah kemenangan pribadi bagi pembela yang gigih dari prinsip non-kooperasi itu bahwa ia dapat melakukan tawar-menawar secara damai dengan penganut paham kooperasi. Tetapi untuk dapat berhasil, ia memerlukan kerjasama dari partai Islam yang paling besar.

Pada awal tahun 1927 ketika dikeluarkan dari NIAS dan dikeluarkan dari JIB, Kartosoewirjo pulang ke rumah orang tuanya di Bojonegoro untuk beberapa bulan. Kepulangan Kartosoewirjo tersebut setelah sebelumnya mendengar khabar bahwa orangtuanya telah meninggal dunia. Untuk menunjukkan sebuah pengabdian kepada orangtua di sana dia menjadi guru partikulir guna membantu biaya hidup ibunya. Kehidupannya kemudian mengalami suatu pergolakan yang luar biasa. Pemikiran-pemikirannya menjadi demikian berkembang dan oleh beberapa orang Jawa yang masih jahiliyah ketika itu, pandangan-pandangan Kartosoewirjo dianggap cukup

radikal. Bahkan hingga Jepang datang menjadi kekuatan imperialis baru, kisah hidup Kartosoewirjo masih berjalan pada jalur yang radikal ini, yang istiqamah. Padahal, imperialisme Jepang yang sudah dimulai sejak 1894 terkenal begitu kejam.

Namun dari serangkaian siksaan tentara Jepang yang terkenal biadab itu, ternyata ada seberkas janji yang membesarkan hati: janji pemberian kemerdekaan bagi Indonesia. Pada tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Koiso menjanjikan kemerdekaan bagi 'Hindia Timur' (To-indo, istilah dalam bahasa Jepang yang terus dipakai secara resmi sampai bulan April 1954). Akan tetapi, dia tidak menentukan tanggal kemerdekaan itu, dan jelas diharapkan bahwa bangsa Indonesia akan membalas janji ini dengan cara mendukung Jepang sebagai ungkapan rasa terima kasih.

Angkatan Darat ke-16 di Jawa kini diberitahu supaya mendorong kekuatan-kekuatan nasionalis, dan bendera Indonesia boleh dikibarkan di kantor-kantor Jawa Hokokai. Pada umumnya pihak angkatan laut masih tetap tidak tertarik pada keseluruhan gagasan tersebut. Sejak bulan Maret 1944 pihak angkatan laut telah membentuk beberapa komite penasihat di daerah kekuasaannya, tetapi komite-komite itu tidak mempunyai kekuasaan, hanya beranggotakan para pejabat serta bangsawan pribumi dan hanya mengadakan pertemuan beberapa kali sebelum menyerahnya Jepang. Angkatan Darat ke-25 di Sumatera mengumumkan berdirinya suatu Badan Penasihat Pusat (Sumatera Chuo Sangi-in) yang sifatnya konsultatif untuk pulau itu pada bulan Maret 1945, tetapi lembaga ini hanya satu kali mengadakan pertemuan di Bukittinggi sebelum berakhirnya perang.

Dalam bulan September pada tahun yang sama, Kartosoewirjo kembali ke Surabaya, dan selanjutnya menerima tawaran Hadji Oemar Said Tjokroaminoto untuk menjadi sekretaris pribadinya. Kemudian, dia turut serta menemani HOS Tjokroaminoto yang pindah ke Cimahi dekat Bandung. Di rumah Tjokro ini untuk pertama kalinya bertemu dengan Soekarno, yang di saat itu telah menjadi ketua PNI (Peserikatan Nasional Indonesia). Di rumah itulah mereka lama berdiskusi tentang politik, yang akhirnya Kartosoewirjo mendapat kesan bahwa Tjokroaminoto adalah penasehat politik Soekarno pada masa itu. Pertemuan yang sering antara Kartosoewirjo dan Soekarno pada saat konferensi PPPKI (Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia), yaitu suatu musyawarah organisasi-organisasi politik Indonesia, yang dibentuk atas inisiatif Soekarno. Baru bertemu kembali dengan Soekarno pada tahun 1942 di Jakarta pada kantor pusat Djawa Hokokai, ketika dalam pemerintahan militer Jepang.

Kini terbentuklah kelompok-kelompok pemuda dan militer yang baru. Untuk yang pertama kalinya Jawa Hokokai diberikan organisasi pemuda sendiri, Barisan Pelopor, yang pada akhir perang konon beranggotakan 80.000 orang. Pada mulanya Barisan Pelopor akan digunakan

untuk menyiarkan propaganda, tetapi pada bulan Mei 1945 organisasi ini mulai mengadakan latihan gerilya. Para pemimpin pemuda perkotaan yang berpendidikan berhubungan dengan pemuda-pemuda kelas-bawah yang ada di kota-kota besar dan kecil, dan sebaliknya mereka secara resmi berhubungan dengan tokoh-tokoh Hokokai yang dipimpin oleh Sukarno. Pada bulan Desember 1944 Masyumi juga diperbolehkan memiliki sayap militer yang bernama Barisan Hizbullah (Pasukan Tuhan), yang memulai latihannya pada bulan Februari 1945 dan konon mempunyai 50.000 orang anggota pada akhir perang. Kepemimpinan didominasi oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah dan anggota-anggota kelompok PSII dari masa sebelum perang yang bersifat kooperatif yang dipimpin oleh Agus Salim. Sekali lagi, para politisi penting Islam dari masa sebelum perang yang bersifat nonkooperatif dilangkahi.

Pada bulan Desember 1927 di Pekalongan, saat kongres PSIHT (Partai Sjarikat Islam Hindia Timoer) Kartosoewirjo terpilih menjadi sekretaris umum PSIHT. Kemudian diputuskan juga melalui kongres, bahwa pimpinan partai harus dipindahkan ke Batavia. Setahun kemudian tepatnya pada bulan Oktober 1928, Kartosoewirjo pernah menjadi peserta kongres pemuda Indonesia mewakili partainya di Batavia, pada kongres tersebut Kartosoewirjo memberikan pandangan tentang hakikat pendidikan pada masa yang akan datang. Namun pandangannya itu bertentangan dengan pemikiran ketua kongres Sugondo. Sehingga, debat sengit pun tak dapat terelakan. Ketika Kartosoewirjo tetap mempertahankan argumentasinya, terpaksa Sugondo memukulkan palu di atas meja, maka berakhirlah perdebatan itu.

Selain bertugas sebagai sekretaris umum PSIHT, Kartosoewirjo pun bekerja sebagai wartawan di koran harian Fadjar Asia. Semula ia sebagai korektor, kemudian diangkat menjadi reporter. Pada tahun 1928 Kartosoewirjo banyak melakukan perjalanan ke provinsi-provinsi dalam rangka tugasnya, berkaitan dengan jabatannya sebagai Sekretaris Umum PSIHT dia mengunjungi cabang atau ranting di daerah-daerah. Dan sempat dalam perjalanan tugasnya itu dia pergi ke Malangbong, di sana dia bertemu dengan pemimpin PSIHT setempat yang terkenal bernama Ajengan Ardiwisastera, yang pernah tertangkap oleh Belanda beberapa bulan karena terlibat dalam peristiwa Cimareme. Di sana pulalah dia berkenalan dengan Siti Dewi Kalsum putri Ajengan Ardiwisastera, yang kemudian dinikahinya pada bulan April tahun 1929, di saat itu usianya lebih muda dua tahun dari Kartosoewirjo. Dengan kepindahan dia ke Malangbong, maka terangkatlah diri Kartosoewirjo menjadi orang yang sangat terpandang di daerah tersebut. Bukan hanya karena reputasi mertuanya saja yang sangat berpengaruh di daerah Malangbong, akan tetapi reputasi dia juga cukup tinggi, di mana dia pernah merasakan sekolah di NIAS, menjadi sekretaris pribadi HOS Tjokroaminoto, menjabat sebagai sekretaris umum PSIHT dan anggota staff harian

Fadjar Asia. Begitu banyaknya pengalaman telah menghantarkan dirinya sebagai aktor intelektual dalam kancah pergerakan nasional.

Pada tahun 1929, dalam usinya yang relatif muda sekitar 22 tahun, Kartosoewirjo telah menjadi redaktur harian Fadjar Asia. Dalam kapasitasnya sebagai redaktur mulailah dia menerbitkan beberapa artikel-artikel. Langkah awal dalam artikelnya sudah berani mengkritik, sasaran pertama kritiknya ditujukan untuk menentang bangsawan-bangsawan Jawa yang bekerja sama dengan Belanda. Di antara yang diserang oleh Kartosoewirjo adalah Sultan Solo, ketika Sultan ini mengadakan resepsi ulang tahunnya yang ke-64, Sultan Solo itu hanya memperhatikan wartawan-wartawan Belanda. Tentang Sri Sultan Kartosoewirjo menulis sebagai berikut:

"Rasa kebangsaan ta' ada, keislaman poen demikian poela halnja, kendatipoen ia menoeroet titelnja mendjadi kepala agama Islam. Agama kebangsaan kita di tanah toempah darah ini. Bangsanja dibelakangkan dan bangsa lain diberi hak jang lebih dari batas..., jang soedah terang dan njata ialah: Boekan karena tjinta bangsa dan tanah air…, melainkan karena keperloean diri sendiri belaka, keperloean jang bersangkoetan dengan kesoenanannja."

Selanjutnya dia menulis, bahwa tidak ada perbedaan, siapa yang berkuasa, apakah itu pemerintah sendiri atau pemerintahan bangsa lain, hasilnya sama saja, yaitu bahwa rakyat tidak memiliki kemerdekaan.

"Semendjak zaman keradjaan Padjadjaran sampai ke zaman Browidjojo, maka jang boleh dianggap merdeka tjoema radjanja sadja. Tetapi rakjatnja sedjak zaman itoe sampai ini waktoe tetap tinggal dalam gelombang perhambaan dan perhinaan jang serendah-rendahnja dan sedalam-dalamnja".

PSIHT selalu berupaya untuk membela rakyat dan bangsanya, agar supaya kelak di kemudian hari Indonesia menjadi Indonesia merdeka dan agama Islam menjadi agama nasional bangsa Indonesia, demikian tulis Kartosoewirjo. "Nasionalisme dalam Islam boekan satoe sport atau peloeang waktoe dan joega boekan satoe tempat kesenangan melainkan adalah soeatu kewadjiban jang berat atau ringannja haroes ditanggungkan." Kartosoewirjo melihat saatnya telah tiba, di mana rakyat telah terjaga dari tidurnya yang selama berabad-abad lamanya dan sadar akan kewajiban dan haknya serta sama-sama menemukan suatu persatuan yang berjuang untuk kepentingan rakyat. Persatuan ini bagi Kartosoewirjo adalah PSIHT. Dia mengeritik, bagaimana dengan cepatnya seseorang dituduh komunis, termasuk anggota PMI (Pemoeda Moeslim Indonesia) yang dituduh sebagai gerakan komunis yang dapat membahayakan keamanan dan tata tertib.

Kartosoewirjo memperhatikan nasib para petani kecil, "yang menyewakan tanahnya kepada perusahaan Barat atau pada kapitalis pribumi". Dia juga marah sekali atas kenaikan pajak sawah hingga 90%. Dia juga mengeritik kerja rodi (Heerendienst) yang diganti dengan pembayaran tahunan, hanya karena tidak ada lagi lapangan kerja, akibat krisis ekonomi di Hindia Belanda pada masa itu. Ketika beberapa petani di Lampung yang diusir dari tanah mereka oleh "sekelompok kapitalis asing", petani ini meminta bantuan kepada partai, Kartosoewirjo menulis tentang itu:

"Orang-orang Lampoeng dipandang dan diperlakoekan sebagai monjet belaka, ialah monjet jang dioesir dari sebatang pohon ke sebatang pohon lainnja."

"Katanja ada Madjlis ini dan Madjlis itoe, ada Volksraad ada Vinciale Raad dan Madjlis Negeri (Tweede Kamer) dan segalanja boeat melindoengi ra'jat boeat menertibkan keamanan dan keadilan." Tapi mana buktinya, tanya Kartosoewirjo. Bukankah ini semua: "omong kosong belaka?"

Dia mengajak para buruh untuk memperbaiki keadaan mereka: *"Djanganlah berkeloeh-kesah! Djanganlah meminta-minta! Djanganlah tinggal diam sadja! Kalau takoet mati djanganlah hidoep! Kalau hendak hidoep, djanganlah takoet mati."*

Kartosoewirjo juga mencela hubungan orang-orang Belanda di perkebunan-perkebunan dengan wanita-wanita pribumi. Dan dia mengajak para orang kulit putih terutama pers Belanda untuk menjernihkan masalah ini:

"Kalau mereka sesoenggoehnja menghendaki perlakoean jang manis dari fihak kita, hendaklah mereka memboeang segala perlakoean jang tidak lajak kepada bangsa Indonesia."

Kemerdekaan bangsa Indonesia hanya bisa dicapai dengan pengorbanan yang besar, demikianlah keyakinan Kartosoewirjo pada saat itu:

"Sebab kemerdekaan tanah air tidaklah sedikit harganja, jang oleh karena harganja, tentoe bakal memakan korban loear biasa."

Karena artikel-artikel itu, Kartosoewirjo mendapat banyak musuh, tapi justru bukan di pihak penguasa kolonial, melainkan di pihak bangsanya sendiri, terutama di kalangan kaum nasionalis yang netral agama.

Perbedaan pendapat antara kaum nasionalis Islami dan yang netral agama lebih jelas nampak pada tahun 1928/29, dan yang lebih menonjol lagi ketika PNI lebih dominan di dalam pergerakan kebangsaan Indonesia dan di lain pihak mundurnya Partai Serikat Islam Hindia Timoer (PSHIT).

Ketika kemunduran partainya tak dapat dibendung lagi, Kartosoewirjo meluapkan kekecewaannya dan menyerang para Nasionalis netral agama, terutama mereka yang menjadi

anggota PNI. Maka dia dalam bulan-bulan terakhir jabatannya sebagai redaktur dan wakil pimpinan Fadjar Asia menyerang kaum Nasionalis netral agama. Artikel-artikelnya yang paling tajam tidak lagi ditandatanganinya dengan nama aslinya, melainkan dengan nama samaran "Arjo Djipang."

Sasaran kritiknya adalah pimpinan redaksi Bintang Timoer, Parada Harahap yang dimakinya dengan kata-kata emosional tanpa meninggalkan analisis intelektualnya. Koran Bintang Timoer disebutnya reaksioner, Parada Harahap sendiri disebut sebagai penjual Bangsa Indonesia dan "Binatang tikoes dari Krekot." Tentang Parada Harahap dia menulis sebagai berikut:

"Si Parada Harahap mendjilat-djilat pantat dan mentjari moeka dan perlindoengan kepada kaoem Nasionalis (PNI), Mendjilat pantat dan mentjari moeka, karena ia perloe akan hal itoe sebab boleh djadi Parada Harahap takoet kalau ia lantaran berboeat berchianat terhadap kepada bangsa dan tanah-air kita --mendapat kemplangan di arah kepalanya, sehingga boleh djadi ia mendjadi tidak sadar kalau tidak mampoes sama sekali."

Dan dia bertanya, "Parada Harahap kaja dari mana? Ta' melainkan dari mendjilat pantat kaoem kapitalis dan mendjoeal boedi rochnja kepada orang asing."

Keresahan yang besar di antara para Nasionalis timbul karena artikel Kartosoewirjo mengenai bank nasional. Apa itu, tanyanya:

"Jang dinamakan "national" jang tak lain melainkan bank setjara barat, bank systeem tiroean, bank jang menimboelkan kapitalisme, bank jang mendorong kita ke arah persesatan, bank jang akan memperoleh hasil karena memoengoet rente."

Koran harian Darmo Kondo di Solo menulis, bahwa artikel ini menggoncangkan kaum nasionalis Indonesia dan mendidihkan darah mereka. Darmo Kondo menganggap Nasionalisme kita ini aneh, tulis Kartosoewirjo. Dan dia melanjutkan:

"Kebangsaan kita dianggap aneh oleh Darmo Kondo. Djanganlah kira kalau kita kaoem kebangsaan jang berdasarkan kepada Islam dan ke Islaman tidak berangan-angan ke Indonesia merdeka. Tjita-tjita itoe boekan monopolinja collega dalam Darmo Kondo. Dan lagi djangan kira, bila kita orang Islam tidak senantiasa beroesaha dan ichtiar sedapat-dapatnja oentoek mentjapai tjita-tjita kita, soepaja kita dapat menguasai tanah air kita sendiri. Tjoema perbedaan antara collega dalam Darmo Kondo dan kita ialah, bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia bagi Nasionalisme jang dinjatakan oleh redaksi Darmo Kondo itoe adalah poentjaknja jang setinggi-tingginja, sedang kemerdekaan negeri toempah darah kita ini bagi kita hanjalah satoe sjarat, soeatoe djembatan jang haroes kita laloei, oentoek mentjapai tjita-tjita kita jang lebih tinggi dan lebih moelia, ialah kemerdekaan dan

berlakoenja agama Islam di tanah air kita Indonesia ini dalam arti kata jang seloeas-loeasnja dan sebenarnja. Djadi jang bagi kita hanja satoe sjarat (midel) itoe, bagi redaksi Darmo Kondo adalah maksoed dan toejoean (doel) jang tertinggi."

Dengan demikian pengertian Kartosoewirjo tentang kebangsaan sesuai dengan pandangan Tjokroaminoto yang menulis sebagai berikut:

"Islam itoelah tjita-tjita kita jang tertinggi, sedang nasionalisme dan patriotisme itoe ialah tanda-tanda hidoep kita sanggoep akan melakoekan Islam dengan seloeas-loeas dan sepenoeh-penoehnja. Pertama-tama adalah kita Moeslim, dan didalam ke Moesliman itoe adalah kita Nationalist dan Patriot, jang menoedjoe kemerdekaan negeri toempah darah kita tidak tjoema dengan perkataan-perkataan jang hebat dalam vergadering sadja, tetapi pada tiap-tiap saat bersedia djoega mendjadikan korban sedjalan apa sadja jang ada pada kita oentoek mentjari kemerdekaan negeri toempah darah kita."

Pemerintah kolonial merasa khawatir akan dinamika baru di dalam pergerakan kebangsaan terutama yang ditimbulkan oleh PNI, karena dari permulaan, partai ini mengambil sikap radikal dan non-kooperatif dengan pemerintah kolonial. Tuntutannya jelas-jelas "kemerdekaan Indonesia". Sehingga pemerintah mengambil tindakan respresif berupa pelarangan mengunakan istilah-istilah seperti "Merdeka" atau "Kemerdekaan" di dalam pidato-pidato Soekarno. Dan pada akhir tahun 1929 Soekarno bersama dengan tokoh-tokoh nasionalis lainnya ditangkap oleh polisi kolonial karena kegiatan politiknya sudah sangat meresahkan pemerintah kolonial. Tidak lama setelah itu PNI malah dibubarkan sendiri oleh tokohnya, Mr. Sartono. Sementara pada tahun yang sama Kartosoewirjo masih relatif tanpa rintangan dapat mengeluarkan gagasan-gagasan politiknya dalam Fadjar Asia.

Kecewa akan perkembangan politik pada umumnya dan karena kejatuhan partainya sendiri, Kartosoewirjo menulis:

"Dikelak kemoedian hari, djika soedah terbit perang "Brontojoedo Djojobinangoen" kita berdiri di muka barisan kita. Sekarang ini baroe perang gagal sadja."

Selama dia bekerja di Batavia, Kartosoewirjo hidup sangat sederhana, "Sebagai seorang lulusan ELS dan "putus kuliah" di NIAS, sesungguhnya dia dapat hidup cukup mampu sekiranya dia mau menjadi pegawai pemerintah atau bekerja pada kantor swasta. Tetapi Kartosoewirjo tampaknya lebih suka dalam kehidupan yang sederhana (qana'ah) serta mengabdikan semua tenaga dan pikiran bagi kehidupan partai dan jurnalistiknya. Ketika H.O.S Tjokroaminoto jatuh sakit, pada bulan September 1929 Kartosoewirjo mengambil alih pimpinan redaksi Fadjar Asia. Tidak lama

setelah dia memangku jabatan sebagai pimpinan redaksi, Kartosoewirjo pun jatuh sakit disebabkan penyakit beri-beri. Karena ketekunan, kesungguhan dan kegairahan pengabdian yang tinggi dalam menjalankan tugas-tugasnya di harian Fadjar Asia, untuk membebaskan negeri ini dari penjajahan. Sehingga, untuk sementara waktu dia dibebaskan dari tugas kesehariannya di Batavia, kemudian dia pulang ke kampung halaman istrinya di Malangbong untuk beristirahat sejenak menyembuhkan penyakit yang dideritanya.

Pada waktu Kartosoewirjo pindah ke Malangbong, di akhir tahun 1929 dalam kongres partai PSII, Kartosoewirjo terpilih menjadi wakil Partai tersebut untuk daerah Jawa Barat. Selama dia menjalankan tugas-tugasnya di Malangbong, dia tidak muncul di pentas percaturan politik.

Sejarah tentang Jawa Barat ini perlu kita pahami terlebih dahulu sehingga kita bisa mengerti mengapa Kartosoewirjo memilih geografi Sunda ini sebagai tempat dikristalkannya Darul Islam, tempat dimulainya satu pernyataan sikap seorang mujahid. Tindak kekerasan di wilayah pedalaman Jawa semakin meningkat pada awal tahun 1924 ketika bermunculan kelompok-kelompok yang menamakan diri 'sarekat hijau', terutama di Priangan. Kelompok-kelompok tersebut merupakan gerombolan-gerombolan penjahat, para anggota polisi, dan para kyai yang mendapat dukungan pemerintah Belanda dan pejabat-pejabat priyayi. Pada awal tahun 1925 sekitar 20.000 orang anggotanya menyerang rapat-rapat PKI dan SI serta mengancam para anggota mereka. Pengawasan pemerintah semakin diperketat, dan apa yang tersisa dari pimpinan PKI sering berada dalam tahanan.

Pada tahun 1911 kaum muslim Indonesia di Jawa Barat mengambil langkah-langkah pertama ke arah pembaharuan secara hati-hati. Guru-guru Syafi'i membentuk Persyarikatan Ulama (Perserikatan Para Ilmuwan Agama); tetapi mereka juga terbuka menerima beberapa ide pembaharuan paham modern dan sedikit sekali berhubungan dengan kalangan pesantren yang bergaya lama. Keterbukaan dimulai ketika Persyarikatan Ulama membuka sebuah sekolah di tahun 1916, juga mendirikan sebuah panti asuhan yang dikelola oleh cabang wanitanya, serta melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan ekonomi, seperti percetakan, pertenunan, dan pertanian. Oleh karena itu kesempatan bagus tidak disia-siakan oleh Kartosoewirjo untuk menggunakan pengaruhnya demi meluasnya kegiatan PSII di daerah itu. kesempatan ini dipergunakan juga untuk menjalin hubungan pribadi dengan ulama setempat, bukan hanya di sekitar Malangbong, bahkan juga di daerah-daerah lain di Priangan Timur. Di bawah bimbingan mertuanya Ardiwisastera yang menjadi salah seorang anggota PSII terkemuka dari daerah itu dan seorang guru agama yang sangat masyhur dibantu para ulama yang lain Kartosoewirjo memperdalam pengetahuannya tentang agama Islam. Usaha Kartosoewirjo tidak berlalu begitu saja, pada kongres Partai PSII tahun 1931 dia menjabat sebagai Sekretaris Umum PSII.

Partai Sjarikat Islam Indonesia (PSII) merupakan kelanjutan dari Sjarikat Islam (SI) yang dibentuk Hadji Samanhudi tahun 1912 di Solo. Sjarekat Islam itu sendiri berkembang dari Sjarekat Dagang Islam yang dibentuk oleh para pedagang pribumi sebagai jawaban atas gerakan emansipasi Cina pada awal abad ke-20.

Hanya dalam waktu 3 tahun sejak berdirinya SI, partai ini merupakan suatu gerakan massa yang beranggotakan hampir setengah juta orang. Setelah itu partai ini tidak pernah lagi beranggota sebanyak itu. Sebagai gerakan massa yang pertama dan hanya satu-satunya pada saat itu, Sjarikat Islam berusaha untuk mempersatukan sebanyak mungkin rakyat Indonesia di dalam satu organisasi, dan partai ini untuk pertama kali memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk mewujudkan keinginannya. SI merupakan wadah bagi kekuatan politik yang bermacam-macam, dimulai dari Panislamist yang konservatif, hingga para Marxist radikal. Keaneka-ragaman kekuatan politik yang berwadah dalam partai ini menjadi problem yang utama, karena tidak lama kemudian muncul gejala-gejala perpecahan. Ketika Kartosoewirjo memasuki partai ini pada tahun 1927 yang sekarang disebut PSII, proses tersebut telah terjadi.

Sebelum membicarakan reaksi SI terhadap ideologi-ideologi modern ini, sebuah catatan singkat tentang Marxisme di Indonesia perlu disertakan. Marxisme atau kemudian lebih dikenal dalam baju komunisme pertama kali diperkenalkan oleh tokoh-tokoh Marxis Belanda, yang diketuai oleh H.F.J. Sneevliet.

Pada tahun 1913 H.J.F.M. Sneevliet (1883-1942) tiba di Indonesia. Dia memulai karirnya sebagai seorang penganut mistik Katolik tetapi kemudian beralih ke ide-ide sosial demokratis yang revolusioner dan aktivisme serikat dagang. Dia kemudian bertindak sebagai agen Komintern di Cina dengan nama samaran G. Maring. Pada tahun 1914 kelompok Marxis ini mendirikan ISDV (Indische Sociaal Democratsche Vereeninging, Organisasi Sosial Demokrat Hindia Belanda), di Surabaya. Partai kecil beraliran kiri ini dengan cepat akan menjadi partai Komunis pertama di Asia yang berada di luar negeri Uni Soviet. Anggota ISDV hampir seluruhnya orang Belanda, tetapi organisasi ini ingin memperoleh dasar di kalangan rakyat Indonesia. Pada tahun 1915-6 partai ini menjalin persekutuan dengan Insulinde (Kepulauan Hindia), sebuah partai yang didirikan pada tahun 1907 dan setelah tahun 1913 menerima sebagian besar anggota Indische Partij yang berkebangsaan Indo-Eropa, yang radikal. Anggota Insulinde berjumlah 6000 orang termasuk beberapa orang Jawa yang terkemuka, tetapi organisasi ini jelas bukanlah suatu alat yang ideal untuk menarik rakyat sebagai dasarnya. Oleh karena itulah, maka perhatian ISDV mulai beralih kepada Sarekat Islam, satu-satunya organisasi yang memiliki jumlah pengikut yang besar di kalangan rakyat Indonesia.

Lewat organisasi inilah kemudian gagasan-gagasan dan slogan-slogan Marxis diekspor ke dalam tubuh SI. Dengan menginfiltrasi SI diharapkan ISDV dapat menguasai massa. Pada tanggal 23 Mei 1920 sayap kiri partai SI di bawah pimpinan Semaun mengubah menjadi PKI (Partai Komunis Indonesia), dengan SI cabang Semarang sebagai pusatnya. Semaun dipilih sebagai ketuanya yang pertama, sekalipun pada waktu itu masih tetap sebagai anggota SI. Strategi dasar PKI ialah bagaimana menghancurkan pengaruh tokoh-tokoh SI yang lain dan membawa SI secara keseluruhan melalui infiltrasi ke dalam kamp komunis. Pada mulanya anggota PKI juga tetap menjadi anggota SI. Pengaruh kiri di dalam Sarekat Islam semakin bertambah besar karena ISDV berusaha memperoleh rakyat sebagai landasan. Pada tahun1914 seorang pemuda Jawa buruh kereta api yang bernama Semaun (lahir tahun 1899) menjadi anggota SI cabang Surabaya. Pada tahun 1916 dia pindah ke Semarang, di mana Sneevliet aktif dalam Sarikat Buruh Kereta Api dan Trem (VSTP: Vereniging Spoor en Tramweg-personeel). Kini Semaun juga bergabung dengan ISDV. Jumlah anggota SI Semarang berkembang pesat mencapai 20.000 orang pada tahun 1917, dan di bawah pengaruh Semaun cabang ini mengambil garis anti kapitalis yang kuat. Cabang ini menentang peran serta SI dalam kampanye Indië weerbaar, menentang gagasan untuk duduk dalam Volksraad, dan dengan sengit menyerang kepemimpinan Central Sarekat Islam (CSI).

Dalam kongres SI tahun 1917 kelompok radikal tampak memperoleh dukungan yang sangat besar. Tjokroaminoto merasa takut akan dimulai pertikaian intern dengan mereka dan setuju melontarkan kecaman terhadap kapitalisme yang berdosa; dengan demikian, nyata-nyata mengecam modal asing dan Cina tetapi bukan modal yang ada pada para Haji Indonesia dan lain-lain. Abdul Muis (1890-1959), seorang Minangkabau yang pernah menjadi wakil SI di dalam delegasi Indië weerbaar ke negeri Belanda, melangkah sedemikian jauh ketika mengatakan bahwa apabila ternyata Volksraad gagal, SI akan memberontak.

SI kini terpecah menjadi beberapa kelompok, dan Kelompok aliran kiri yang dipimpin oleh cabang Semarang sangat menggebu-gebu dan berusaha keras untuk mendapatkan kekuasaan. Disamping itu pada tahun 1917 di daerah Jawa Barat telah didirikan suatu cabang revolusioner rahasia. Sangat sulit diharapkan dari mereka, disamping ketidak jelasan arah perjuangan juga keanggotaan rakyat sulit dikendalikan karena sebagian besar mereka cenderung terhadap tindakan kekerasan. Badai perpecahan di dalam tubuh SI ini ketika tahun 1915 muncul satu kekuatan baru di dalam tubuh SI. Pada tahun itu seorang Minangkabau bernama Haji Agus Salim (1884-1954), yang bekerja sebagai mata-mata polisi turut hadir dalam satu acara rapat yang diselenggarakan SI. Pada saat itula dia berubah niat justru ingin mendukung tujuan SI, dan membawa bersamanya komitment pada Pan-Islam dan Modernisme sebagai dasar yang tepat untuk menjalankan kegiatan politik partai.

Ketika diadakan pemilihan anggota Volksraad sekitar awal tahun 1918 sekaligus mengumumkan hasilnya—Abdul Muis dari CSI dan Abdul Rivai seorang Minangkabau yang menjadi anggota Insulinde, berhasil terpilih menjadi anggota,—namun seorang Gubernur bernama Jenderal van Limburg Stirum tidak puas dengan hasil ini. Dia menggunakan hak penunjukannya untuk mengangkat Tjipto Mangunkusumo (yang sudah kembali dari pengasingan) dari Insulinde dan Tjokroaminoto dari SI yang lebih bisa diajak bekerja sama. Adapun dari orang Eropa yang berhasil terpilih adalah anggota yang lebih progresif daripada sebagian besar anggota yang berkebangsaan Indonesia. Oleh karena itu Nederlandsch Indische Vrijzinnige Bond (Persekutuan Liberal Hindia Belanda) yang berkecenderungan terhadap politik Ethis bekerja bersama-sama dengan kaum Sosialis Belanda (Sociaal Democratische Arbeiderspartij: Partai Buruh Sosial Demokrat) dan orang-orang Indonesia yang lebih liberal mengadakan satu koalisi dengan membentuk suatu mayoritas dari anggota-anggota yang terpilih.

Tjokroaminoto yang ingin mempertahankan persatuan pergerakan nasional agak sedikit apologetik dengan memberikan kesempatan atau peluang pada golongan kiri. Tjokroaminoto mengatakan bahwa sosialisme Islam "lebih awal dan lebih baik dari sosialisme ciptaan Marx, baik dalam teori maupun praktek." Lebih jauh dikatakan bahwa gagasan-gagasan sosialime sudah inheren dalam Islam. "Kita muslim, jadi kita sosialis," ucap Tjokroaminoto. Ketika SI pada tahun 1921 memberlakukan peraturan baru dalam rangka melaksanakan disiplin partai yang tidak lagi memperbolehkan adanya keanggotaan yang ganda, akhirnya terjadilah perpecahan yang nyata dalam SI yang selanjutnya mempertegas wajah ke-Islamannya. Dan pada tahun 1930 SI berubah nama menjadi PSII (Partai Sjarikat Islam Indonesia).

Organisasi PSII memiliki tradisi non kooperasi yang panjang usianya. Kebijaksanaan politik tentang ini pertama-tama dirumuskan pada Kongres pertama partainya pada tahun 1923 dan 1924. Dengan menemukan ilhamnya dalam gerakan Mahatma Ghandi di India, dikembangkanlah konsep-konsep berdikari (swadeshi) dan dilenyapkannya struktur kolonial yang berlaku (hidjrah). Sifat yang agak agresif dari politik non kooperasi PSII tercermin dalam kombinasi swadeshi dengan hidjrah. Jadi swadeshi sendiri yang sudah mengandung penolakan pengaruh kolonial, selanjutnya diperdalam oleh gagasan hidjrah, yang memungkinkan PSII merumuskan politik non kooperasi yang agresif tanpa perlu menggunakan pemberontakan terang-terangan.

Selanjutnya di dalam tubuh partai PSII terdapat pertentangan antara kedua kelompok besar, yaitu antara Dewan eksekutif (Ladjnah Tanfidzijah) di bawah pimpinan Abikusno Tjokrosujoso (adik Tjokroaminoto) yang tetap memperjuangkan politik non kooperasi, di mana dia tidak mau bekerja sama dengan fihak kolonial. Dan di satu pihak Dewan Partai di bawah pimpinan H. Agus Salim yang cenderung pada sikap untuk bekerja sama dengan kekuasaan kolonial. Dia khawatir,

kalau politik non kooperasi diteruskan, akan ada kerugian forum politik yang akan mempercepat keruntuhan partai dan dia mendesak supaya diadakan suatu referendum tentang masalah ini.

Juga Roem berpendapat, bahwa rakyatlah yang paling menderita karena haluan yang dijalankan Abikusno ini. Sebab partai tidak lagi mewakili kepentingan rakyat di Volksraad dan semua itu hanyalah demi kepentingan politik partai. Meskipun sudah banyak alasan yang dikemukakan oleh Salim tetap tidak berhasil usul-usulnya itu diterima oleh partai, justru sebaliknya Abikusno menuduh Salim hanya untuk mencari kursi dalam Volksraad. Sebelum usul-usul Salim dapat diperdebatkan pada kongres partai yang berikutnya, Abikusno telah meletakkan jabatannya sebagai ketua partai pada akhir tahun 1935, sebab yang dikatakannya, dia tidak mau menghalangi Salim dalam usahanya itu.

Kartosoewirjo yang pada saat itu masih menjabat sebagai sekretaris Dewan Eksekutif, (Ladjnah Tanfidzijah), mengikuti langkah Abikusno meletakkan jabatannya.

Pada kongres partai ke 22 di Batavia bulan Juli tahun 1936 Abikusno terpilih menjadi ketua partai PSII. Setelah cara pemilihan pimpinan partai yang baru diberlakukan, yaitu kongres partai hanya harus memilih ketua partai saja. Di kongres ini terlihat jelas bahwa Abikusno lebih kuat dibandingkan dengan Agus Salim, dengan demikian Abikusno terpilih menjadi formatur, yang dapat memilih sendiri anggota-anggota pimpinan lainnya. Dan melalui rapat formatur ini Abikusno segera mengangkat Kartosoewirjo menjadi wakilnya. Jabatan sebagai wakil ketua PSII dipegang Kartosoewirjo sampai ia keluar dari partai dalam tahun 1939.

Setelah terpilihnya Abikusno menjadi ketua partai dia mengumumkan bahwa pertentangan mengenai politik hidjrah telah berakhir dan memerintahkan semua cabang-cabang partai tersebut untuk tidak mengambil peduli pada saran-saran Salim.

Dalam bulan November 1936 dengan perasaan yang sangat kecewa atas sikap Abikusno itu Salim membentuk suatu fraksi sendiri dalam tubuh partai PSII di bawah pimpinan Moehammad Roem. Fraksi tersebut diberi nama “Barisan Penjadar PSII” dan Salim berharap, bahwa di suatu saat nanti usul-usulnya untuk bekerja sama dengan pemerintahan kolonial akan disetujui. Setelah mendengar khabar bahwa Salim membentuk fraksi baru tersebut, Abikusno segera memberikan responnya dan mengumumkan kepada anggota-anggota PSII , bahwa politik hidjrah menjadi politik resmi partai tersebut, dan dia melarang cabang-cabang partai dengan ancaman pemecatan, bila mereka mendiskusikan usul-usul Salim atau mendukung fraksi Salim. PSII hanya mencontoh Sunnah Rasulullah dan bukan mengikuti pola pergerakan Barat, kata Abikusno.

Anggota-anggota fraksi Salim merasa bahwa mereka yang sudah sangat berjasa untuk partai dan berjasa untuk "Oemat Islam dan kaoem sebangsa Indonesia, oleh poetjoek pimpinan "Baroe" dibentjana namanya dan kehormatannja." Pucuk pimpinan kekurangan kesadaran sebagai pimpinan partai Islam yang hendak menjunjung agama Islam. Tulis Sabirin. Sabirin sebagai anggota fraksi Salim yakin, bahwa PSII akan menjadi satu perhimpunan rakyat "dalam pengawasan polisi, tertutup langkahnja dalam politik." Begitu juga Moh. Roem sebagai ketua Barisan Penjadar menulis bahwa dari pergerakan politik Indonesia akhirnya hanya tinggal namanya saja. Hak-hak dasar demokrasi dianggap rendah oleh pimpinan partai, hak untuk mengeluarkan pendapat secara bebas bagi anggota partai dilanggar, tulis Moehammad Roem.

"Partai memboetoehkan ketentraman, ketentraman jang akan terdapat djika "doodsklok" soedah diboenjikan, ketentraman di liang koeboer."

Dalam bulan Januari 1937 Salim, Roem, Sabirin, Sangadji, Muslich dan 23 anggota fraksi Salim yang lainnya dikeluarkan dari keanggotaan PSII. Dengan demikian terjadilah perpecahan PSII lebih lanjut, karena Salim segera membentuk suatu partai Islam baru yang berdiri sendiri, yang disebutnya "Pergerakan Penjadar".

Kritikan juga dilancarkan oleh Kartosoewirjo kepada Agus Salim ketika diadakan kongres partai, dan Kartosoewirjo menuntut suatu penerapan politik hidjrah yang tidak mengenal kompromi. Kartosoewirjo menerangkan, bahwa politik ini merupakan suatu jalan tengah antara Non-kooperasi dan Kooperasi. Oleh karena itu, dalam kongres Abi Kusno menugaskan Kartosoewirjo untuk menyusun suatu brosur tentang sikap hidjrah partai PSII.

Abikusno Tjokrosujoso membuat pernyataan bahwa kongres PSII Juli 1936 telah menyetujui politik Hijrah dan telah diuraikan secara terperinci oleh Kartosoewirjo dalam suatu brosur dua jilid mengenai masalah ini yang judulnya berbunyi "Sikap Hidjrah PSII" dan untuk Kata Pengantarnya sendiri akan dibuat olehnya serta ditandatanganinya sebagai presiden dan Arudji Kartawinata sebagai sekretaris PSII.

Hasil kongres yang telah diputuskan bersama itu mendapat kritikan dari anggota-anggota fraksi Salim, mereka menyatakan bahwa penjelasan tentang politik hidjrah tidak dapat diperoleh melalui pimpinan partai apalagi melalui brosur-brosur Kartosoewirjo. Semua itu kelihatan hanya sebagai suatu bungkusan yang indah tetapi tanpa isi, tulis Sabirin. Kenyataannya politik Hidjrah atau politik Non kooperasi PSII juga tetap tanpa hasil seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Kritik Moh. Roem terhadap brosur Kartosoewirjo terutama ditujukan pada bab akhir, di mana Kartosoewirjo di dalam brosurnya menerangkan politik Hidjrah. "Mengapa tidak diterangkan setjoekoepnja? Tanya Moehammad Roem. "Oentoek pengertian jang lebih djelas, lebih baik

diadakan sadja dhoekir "baroe" jaitoe, mengoetjapkan perkataan "Politik Islam "100 kali", begitu sarannya.

Pertanyaan tentang Non Kooperasi atau Kooperasi tidak dibahas Kartosoewirjo di dalam brosur-brosurnya, hal itu sesuai dengan petunjuk Abikusno. Masalah Non Kooperasi tidak penting bagi PSII dan tidak ada gunanya. Hanya untuk memikirkan hal tersebut sudah merusak pikiran kita, tulis Kartosoewirjo. Sebagian besar brosurnya ditujukan pada pembahasan arti sebenarnya dan maksud hijrah. Dibedahnya Al-Quran yang memuat kata hijrah dan dijelaskan artinya dalam konteks yang relevan. Penafsiran dan pandangan Kartosoewirjo tentang perubahan konsep pada konteks kolonial sangat teliti dan jauh jangkauannya. Dengan mendasarkan diri pada Al-quran dinyatakan hijrah sebagai kewajiban "semua pria dan wanita, tua dan muda," kecuali mereka yang lemah, dan hijrah tidak boleh dihentikan "sebelum Falah (Keselamatan) dan Fatah (Kemenangan atau Pembukaan) tercapai.

Menurut Kartosoewirjo PSII berdiri di luar badan/lembaga yang dibentuk oleh pemerintah kolonial, tetapi partai ini tidak akan tinggal diam, bila rakyat dan bangsa akan dirugikan. Program politik PSII dia bandingkan dengan Jihad selama waktu Hidjrah. Menurut Kartosoewirjo, politik PSII adalah politik Islam, yang ia terangkan sebagai berikut:

"Jang dimaksoedkan dengan politik dalam faham Party Sjarikat Islam Indonesia ialah politik Islam, politik sepandjang adjaran-adjaran Islam. Dan dari sendirinja, maka politik jang didjalankan oleh PSII ialah politik Islam. Boekan politik barat atau politik membarat! Boekan politik jang tidak ada sangkoet-paoetnja dengan Islam dan boekan poela politik jang "Boekan politik Islam" atau politik di loear Islam"! Dalam brosurnya jilid I, Kartosoewirjo membahas hubungan antara manusia dan agama, begitu juga antara agama dan politik. Sejarah PSII antara tahun 1912-1936 dia bagi dalam tiga tahap, tahap I, zaman Qouliyah yaitu antara tahun 1912-1923. Pada tahap ini perhatian partai kebanyakan ditujukan pada hal-hal duniawi. Tahap yang kedua adalah zaman Fi'liyah yaitu antara tahun 1923-1930, suatu zaman peralihan, dan tahap yang ketiga adalah zaman I'tiqadiyah setelah tahun 1930. Pada tahap ini manusia sadar akan kewajiban-kewajiban agamanya. Kartosoewirjo menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menciptakan suatu dunia Islam yang murni. Dalam dunia Islam manusia harus menjalankan perintah-perintah Allah dan nabinya secara sungguh-sungguh dan benar.

Dalam jilid II, Kartosoewirjo menjelaskan penafsiran arti-arti hidjrah, yang bagi PSII merupakan kewajiban dan yang berhubungan dengan segala aspek kehidupan manusia. Berbeda dengan Non Kooperasi yang mempunyai arti yang lebih negatif, Hidjrah merupakan sikap yang positif, demikian Kartosuwiryo. Dia juga menentang pendapat yang tersebar luas di Barat, bahwa jihad

selalu harus berarti perjuangan fisik. Dia membedakan dua macam Jihad, yaitu jihad kecil (jihad ul asghar) untuk melindungi agama terhadap musuh-musuh luar, dan jihad besar (jihad ul akbar) yang ditujukan untuk memerangi musuh dalam diri manusia itu sendiri. Dan karena tidak ada Hidjrah tanpa Jihad, maka PSII menyusun suatu program Jihad yang menjadi bagian dari "jihad PSII".

Pada kongres partai PSII yang ke 23 tahun 1937 di Bandung, di bawah pimpinan Kartosoewirjo dibentuk suatu komisi yang harus menyusun suatu "program aksi hidjrah" (Daftar Oesaha Hidjrah PSII). Di mana penyusunan program tersebut telah diputuskan juga dalam kongres partai yang berikutnya pada tahun 1938 di Surabaya. Serta diputuskan juga akan didirikan suatu lembaga pendidikan kader di Malangbong dengan nama "Soeffah PSII", yang akan dibuka pada tanggal 20 Februari 1939 di bawah pimpinan Kartosoewirjo sendiri sebagai wakil presiden PSII, yang bertujuan untuk pendidikan politik bagi kaum muslimin Indonesia, agar dengan demikian mereka dapat memerintah negara mereka sendiri bila saatnya nanti telah tiba, khususnya bagi anggota PSII yang laki-laki.

Akan tetapi sangat disayangkan sekali program yang baik tersebut tidak bisa terwujud melalui partai seperti yang direncanakan semula, karena dalam beberapa tahun kemudian situasi dalam partai PSII mengalami perubahan haluan politiknya.

Pada tahun 1939 Kartosoewirjo terlibat dalam pertengkaran yang sengit dengan mayoritas pimpinan PSII yang diketuai Abikusno. Sebagai pimpinan partai Abikusno mengajak Kartosoewirjo untuk memutar haluan politik partai dengan bergabung ke GAPI (Gabungan Politik Islam) dalam mengatasi tekanan Pemerintah Kolonial yang makin mendesak. Tetapi Kartosoewirjo tidak ikut melaksanakan perubahan arah balik politik ini dan tanpa kompromi tetap istiqomah pada pendiriannya, di mana satu-satunya haluan yang benar adalah politik Hidjrah. Menurut Kartosoewirjo tuntutan GAPI, adalah pembentukan suatu parlemen Indonesia, dan itu merupakan "sikap kooperasi juga namun, dengan corak yang lain".

Perubahan politik PSII dari garis non kooperasinya yang dulu membuat brosur Sikap Hidjrah PSII yang dibuat oleh Kartosoewirjo begitu besar arti dan nilainya, kini sudah tidak berguna lagi. Pikiran-pikiran yang dikemukakan oleh Kartosoewirjo dicap sebagai anakronisme (yang tidak berkesesuaian). Maka untuk mempertahankan kebenaran sikap PSII, Kartosoewirjo dengan anggotanya yang sealiran antara lain Jusuf Taudjiri, dan Kamran membentuk partai baru yaitu Komite Pembela Kebenaran PSII (KPK-PSII). Karena dimaksudkan untuk bergerak di dalam PSII. Pada awal tahun 1939 Dewan Eksekutif PSII mengeluarkannya dari partai, yang sebelum pemecatan Kartosoewirjo dituduh telah menyalahgunakan uang partai. Dengan tindakan yang

sepihak dari partai ini Kartosoewirjo tidak menghiraukannya dan terus melanjutkan rencananya semula untuk melaksanakan program aksi hidjrah dan pembentukan lembaga pendidikan kader. Pada kongres partai yang ke 25 dalam bulan Januari 1940 di Palembang, melalui keputusan yang diambil komite eksekutif partai resmilah pemecatan Kartosoewirjo, Joesoef Taudjiri, Akis, Kamran, dan Sukoso dengan perimbangan 134 suara setuju, 9 suara netral. Dan diputuskan juga dalam kongres tersebut bahwa pelaksanaan program aksi Hidjrah tidak lagi diteruskan dan komisi yang sebelumnya ditugaskan untuk menyusun program ini, akan dibubarkan. Serta semua anggota PSII dilarang untuk memasuki Partai yang dibentuk oleh Kartosoewirjo.

Dalam bulan Maret 1940 melalui rapat umum komite Kartosoewirjo memutuskan mengubah KPK-PSII menjadi sebuah partai independen, yang berkantor pusat di Malangbong. Maksud yang terkandung sesungguhnya di belakang ini adalah bahwa komite akan berkembang menjadi PSII yang sebenarnya. Karena PSII Abikusno Tjokrosujoso dirasakan terdiri dari orang-orang yang telah mengkhianati haluan politik partai PSII yang telah dirintis oleh pembesar-pembesar partai sebelumnya dan berkhianat atas perjuangan masyarakat Islam yang sebenarnya.

Dengan memakai anggaran dasar dan peraturan-peraturan PSII yang lama, Kartosoewirjo ingin menegaskan bahwa KPK PSII adalah kelanjutan yang sebenarnya dari PSII yang lama. Sebab Kartosoewirjo merasa yakin bahwa partainya ini adalah partai PSII yang benar. Menurut Horikoshi, pada sidang KPK-PSII yang pertama dalam bulan Maret 1940, dihadiri oleh enam cabang PSII yang lama dari Jawa Barat di antaranya dari Cirebon, Cibadak, Sukabumi, Pasanggrahan, Wanaraja dan Malangbong. Dalam sidang itu, keluar juga Daftar Oesaha Hidjrah PSII yang penyusunannya ditugaskan kepada Kartosoewirjo ketika dia masih menjabat sebagai wakil ketua PSII. Daftar Oesaha Hidjrah PSII tersebut masih keluar dengan judul aslinya dan dicetak oleh penerbitan yang didirikan oleh Kartosoewirjo di Malangbong, yaitu "Poestaka Darul Islam".

Kartosoewirjo juga masih merencanakan untuk menerbitkan suatu penafsiran tentang program tersebut (Tafsir Daftar Oesaha Hidjrah) tetapi rencana ini tertunda. Dalam kata pengantar brosurnya, Kartosoewirjo tidak menyebut pemecatan dirinya dari PSII yang terjadi sebelumnya dan juga tidak menyinggung bagaimana terjadinya pembentukan KPK-PSII. Bahkan dia memberi kesan, bahwa dia sekarang mewakili PSII yang sebenarnya. Dia hanya menyayangkan, bahwa Daftar Oesaha Hidjrah PSII tidak lagi dapat diterbitkan sebelum berlangsungnya kongres PSII di Surabaya seperti yang direncanakan. Dalam Bab I brosurnya, Kartosoewirjo membahas struktur masyarakat yang menurut dia terdiri dari tiga macam masyarakat yang berbeda-beda dalam hukum dan haluannya, dalam susunan dan aturannya dan dalam sikap dan pendiriannya, tetapi hidup bersama-sama dalam satu negeri.

Ketiga macam masyarakat tersebut adalah masyarakat Hindia Belanda atau "masyarakat kejajahan" yang berkuasa; berikutnya adalah masyarakat Indonesia yang belum mempunyai hukum maupun hak dan tidak mempunyai pemerintahan sendiri, dan yang ketiga adalah masyarakat Islam atau "Darul-Islam". Perbedaan antara masyarakat Indonesia dan masyarakat Islam menurut Kartosoewirjo adalah sebagai berikut:

"…masyarakat kebangsaan Indonesia mengarahkan langkah dan sepak terdjangnja ke djoeroesan Indonesia Raja, agar soepaja dapat berbakti kepada Negeri toempah darahnja, berbakti kepada Iboe-Indonesia. Sebaliknja, kaoem Moeslimin jang hidoep dalam masjarakat Islam atau Daroel-Islam, "tidaklah mereka ingin berbakti kepada Indonesia atau siapa poen djoega, melainkan mereka hanja ingin berbakti kepada Allah jang Esa belaka". Maksoed toedjoeannja poen boekan Indonesia Raja, melainkan Daroel-Islam jang sempoerna-sempoernanja di mana tiap-tiap Moeslim dan Moeslimah dapat melakoekan hoekoem-hoekoem agama Allah (Islam), dengan seloeas-loeasnja, baik jang berhoeboengan dengan sjahsiyah maoepoen idjtima'iyah.

Pada bab berikutnya, Kartosoewirjo menyebutkan alasan-alasan turunnya "harkat derajat manusia atau bangsa", yaitu karena "membelakangkan dan membohongkan agama Allah". Kartosoewirjo mengharapkan persatuan dunia Islam dengan umatnya secara keseluruhan. Dan dia yakin, hanya dengan cara demikian dapat tercipta suatu dunia baru atau "Darul Islam".

Program aksi Hidjrah dia bagi dalam bidang-bidang politik, sosial, ekonomi, ibadah dan satu bidang tentang mistik Islam serta "ajaran Islam yang lainnya". Dalam bagian tentang politik dia tanpa memberikan keterangan lebih lanjut hanya menyebut politik Islam nasional, politik Islam Internasional dan politik Islam terhadap dunia non Islam. Selanjutnya Kartosoewirjo menulis bahwa "kalau kita Hidjrah dari Mekkah Indonesia ke Madinah Indonesia…, boekanlah sekali-kali kita haroes berpindah kampoeng dan negeri beralih daerah dan wilajah, melainkan hanjalah di dalam sifat, thabi'at,, amal, itiqad dan lain-lain sebagainja." Untuk mencapai Darul Islam yang sesempurna-sempurnanya, tulis Kartosoewirjo selanjutnya, manusia harus melepaskan "sifat, thabi'at dan laku ke-Mekkah-an dan beralih kepada sifat, thabi'at dan laku ke-Madinah-an." Tentang perekonomian dia menerangkan, bahwa sistem perekonomian harus berlandaskan pada solidaritas dan kolektivitasme. Harta yang berlebihan dari pada keperluan diri masing-masing atau rumah tangga haruslah disetorkan ke dalam tempat perbendaharaan umum seperti Baitul-Mal yang kemudian akan digunakan untuk membantu mereka yang berekonomi lemah.

Dengan cara demikian tidak terdapat penumpukan kekayaan yang berlebihan dan kemiskinan akan dapat diperangi. "Ini adalah gambaran dunia Islam yang kita inginkan" demikian tulis Kartosoewirjo.

Pada bulan Maret 1940, rencana Kartosoewirjo diterima oleh kongres KPK PSII yang mengesahkan sebuah resolusi untuk membuka lembaga pendidikan kader "Suffah" di dekat Malangbong. Lembaga Suffah tersebut dibentuk dalam gaya sebuah pesantren tradisional, di mana para siswanya juga bertempat tinggal di sana. Kartosoewirjo sendiri mengajarkan bahasa Belanda, astrologi, dan ilmu tauhid kepada para siswanya. Metode pengajaran diambil dari metode H.O.S. Tjokroaminoto yang berarti bahwa para siswa di samping mendapat pengajaran pengetahuan umum dan pendidikan agama Islam juga dididik dalam Ilmu politik. Karena mengetahui bahwa mereka menghadapi kehilangan kekuasaan, maka pihak Jepang memutuskan untuk menghapuskan kekangan-kekangan yang masih ada terhadap kekuatan rakyat Indonesia. Angkatan Darat ke-16 mendesak unsur-unsur yang lebih bersifat hati-hati di dalam hierarki-hierarki Jepang supaya bertindak dengan cepat, karena mereka benar-benar mengetahui bahwa bibit-bibit revolusi telah tertanam dalam di Jawa. Pada bulan Maret 1945 pihak Jepang mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang mengadakan pertemuan pada akhir bulan Mei di bangunan lama Volksraad di Jakarta. Keanggotaannya mewakili sebagian besar pemimpin setengah baya di Jawa yang masih hidup yang berasal dari semua aliran pemikiran yang penting. Radjiman Wediodiningrat menduduki jabatan ketua, sedangkan Sukarno, Hatta, Mansur, Dewantara, Salim, Soetardjo Kartohadikoesoemo, Abikoesno Tjokrosoejoso, Ki Bagus Hadikusumo, Wachid Hasjim, Mohammad Yamin, dan yang lain-lain duduk sebagai anggotanya. Keputusan pengangkatan para pemimpin dari generasi tua ini diharapkan oleh Pihak Jepang dapat diajak kerja samanya bila sudah merdeka nanti.

Sebagai dasar pendidikannya dia menggunakan konsep Daftar Usaha Hidjrah yang terdiri dari 5 bagian itu. Siswa-siswanya tidak hanya berasal dari Jawa Barat, tetapi juga dari provinsi lainnya di Jawa dan dari Sulawesi Selatan, Sumatra dan Kalimantan. Awalnya banyak siswa yang merasa kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di lembaga Suffah yang penuh dengan disiplin, pekerjaan yang berat dan makanan yang sederhana. Ternyata dengan niat yang suci dan hati yang tulus untuk mendapatkan ridho ilahi akhirnya mereka mampu menempa dirinya dengan semangat Ruhul-Islam yang memancar dalam pribadi-pribadi kemusliman mereka, dan pada akhirnya dengan kesadaran, keyakinan dan panggilan Ilahi untuk memenangkan Agama Allah di muka bumi ini, mereka siap sedia dengan hati yang ikhlas menjadi tulang punggung kekuatan Darul Islam dan menjadi ma'mum yang setia atas imam Kartosoewirjo, yang di kemudian hari

bersama-sama bahu membahu untuk tetap menggalang Negara Kurnia Allah yang diproklamasikan pada tanggal 7 Agustus 1949.

Bab Empat

Kartosoewirjo dan Setting Sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia: Peristiwa Hijrah ke Jawa Barat

Untuk melihat betapa pentingnya posisi politik Jawa Barat, kita terlebih dahulu harus memahami beberapa political shift di Indonesia dilihat dari wilayah ini. Peristiwa perang Asia Pasifik antara tentara sekutu dengan Jepang mendatangkan berkah bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Ketika terjadinya serangan balik yang dilancarkan oleh pihak sekutu pada tanggal 7 Agustus 1942 dalam upayanya untuk merebut daerah Guadalkanal telah menjadi malapetaka bagi Jepang. Apalagi setelah adanya peristiwa tertembaknya Admiral Jepang bernama Isoroko Yamamoto dalam penerbangannya di daerah Pulau Bougenville, 18 April 1943, sungguh sangat meruntuhkan moral para pejabat militer Jepang yang berada di tanah jajahan termasuk di Indonesia. Ditambah adanya pergolakan di tanah air sendiri yang ditimbulkan oleh revolusi sosial yang dipelopori oleh para alim ulama dan petani dalam menentang setiap penjajahan di tanah air semakin mempersulit langkah-langkah Jepang dalam usahanya menggalang kekuatan personil militernya.

Akumulasi kejadian diatas telah memperlihatkan tanda-tanda kelemahan Jepang. Kelemahan itu diikuti dengan satu demi satu daerah yang telah diduduki Jepang di Asia Timur dapat direbut kembali oleh pihak sekutu setelah melancarkan aksi balasannya. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah yang terjadi baik dari luar maupun dari dalam, pemerintah Jepang yang berada di Indonesia pada tanggal 7 September 1944 telah mengumumkan untuk bangsa Indonesia sebuah janji berupa kemerdekaan Indonesia di kelak kemudian hari, yang akan disiarkan melalui berbagai media massa.

Makna Jawa Barat, khususnya Kota Blitar, Cilacap, Bandung dalam geopolitik Jepang, belajar dari pengalaman sejarah Belanda, adalah sangat penting. Demikian strategisnya Jawa Barat sehingga kita menyadari mengapa Belanda menyerah di Kalijati Subang, 8 Maret 1942, berdampak seluruh nusantara berbalik jatuh ke tangan penjajahan Jepang. Hal ini tidak lain karena Jawa Barat merupakan jantungnya kekuatan Penjajahan Belanda. Maka memahami kondisi Jawa Barat yang demikian strategis inilah maka dipakai oleh Kartosoewirjo sebagai wilayah hijrah. Seluruh potensi militer Jepang ada di sekitar Bandung dan daerah-daerah Sunda lainnya sangat penting artinya bagi dasar-dasar revolusi Islam bersenjata pada akhirnya. Terutama kekuatan infanteri Jepang yang luar biasa terdapat di Cimahi, kavaleri dan udaranya di Bandung, dan pabrik senjata dan mesiunya di Bandung. Departemen perangnya pun di Bandung. Dengan terkuasainya Bandung, maka Tentara Jepang dapat menguasai seluruh Nusantara. Kecuali terhadap Jawa Barat, Tentara

Jepang menaruh sentral atensi sepenuhnyadengan pengertian selalu mendapatkan tanggapan tersendiri dari pemerintah Balatentara Jepang di Jakarta dan Tokyo.

Seperti terhadap Pemberontakan Tentara Peta Cileunca Pangalengan Bandung Selatan, yang mengambil tempat yang beradius sangat dekat dengan kota Bandung dan Jakarta, perhatian Jepang sangat beda perlakuannya bila dibandingkan dengan perlakuannya terhadap Pemberontakan Tentara Peta sebelumnya di Blitar dan Cilacap dan terhadap Pemberontakan Tentara Peta di Aceh (November 1944) yang mendahuluinya. Ternyata Tentara Jepang mengambil sikap yang positif untuk Jawa Barat, berdampak mengubah jalannya sejarah bagi bangsa dan negara Indonesia. Dengan pertimbangan geopolitiknya pula, Tentara Jepang memperlihatkan sikapnya yang sangat berani menyeret para pelaku Pemberontakon Tentara Peta Blitar ke Mahkamah MiliterJepang. Dengan perhitungan proses pengadilan akan menumbuhkan iklim takut, fear strategy, yang lebih mencengkam. Terutama kalangan politisi, tidak berani melancarkan tindakan politik yang tidak sejalan dengan kebijakan Tentara Jepang, bila diperlihatkon proses pengadilan pemberontak Tentara Peta Blitar.

Menjadi satu catatan dalam perjalanan pergerakan Islam Indonesia, ketika lahirnya suatu zaman baru yang sedang menyingsing ialah lahirnya gerakan pembaharuan Islam. Adapun yang melatar belakangi timbulnya gerakan pembaharuan ini perlu ada pengkajian yang lebih mendalam. Keadaan Islam di Indonesia sangat menonjol karena keaneka ragamannya. Tetapi hampir kebanyakan umat Islam Indonesia pada dasarnya adalah kaum Sunni yang menganut faham madzhab Syafi'i yang didirikan di Timur Tengah pada akhir abad VIII dan awal abad IX Masehi. Di dalam keaneka ragaman itu banyak pula diantara muslim yang saleh terlibat dalam masalah mistik Sufi; hal itu ditandai dengan tumbuh suburnya berbagai tarekat-tarekat seperti: tarekat Syattariyah, tarekat Qadiriyah, dan tarekat Naqsyabandiyah. Akan tetapi, di balik keseragaman yang tampak ini terdapat banyak perbedaan, hampir dipastikan lahirnya segala macam keyakinan itu merupakan penyimpangan dari ajaran Islam karena ketidak tahuan mereka dalam penggalian ajarannya. Seperti halnya di semua negeri yang terdapat salah satu agama besar dunia, Islam di Indonesia telah banyak dipengaruhi oleh perkembangan adat dan ide-ide lokal. Oleh karena itulah, maka orang-orang muslim terpelajar Indonesia dengan memperhatikan semua yang ada di sekeliling mereka, membuat perubahan besar dengan pembaharuan pemikiran yang lebih rasional lagi.

Selama masa penjajahan Jepang, sedikit berbeda dengan kondisi masa penjajahan Belanda, kondisi umat Islam sangat menyedihkan. Hanya pada periode pendudukan Jepang yang kendatipun singkat merupakan episode pembuka kembali keterlibatan umat Islam Indonesia dalam dunia politik. Sumbangan terbesar Jepang bagi politik Islam Indonesia terletak pada

upayanya untuk menyatukan berbagai kekuatan Islam dalam suatu organisasi Masyumi yang didirikan pada 7 Agustus 1945, yang didukung baik oleh Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama (NU). Usaha Wahid Hasyim beserta tokoh-tokoh Islam lainnya untuk lepas dari pengaruh Jepang pada awalnya berhasil baik. Hal ini terbukti, ketika Jepang mengalami kekalahan dalam perang, sementara mereka yang terlibat dalam kepengurusan Masyumi tetap memainkan peran penting dalam politik nasional Indonesia.

Pada bulan Maret 1942, ketika itu bala tentara Jepang yang dipimpin oleh Kolonel Shoji sudah masuk ke wilayah Jawa Barat lewat Eretan dekat Subang, mereka terus memobilisasi pasukan untuk terus bergerak menuju pusat pemerintahan kolonial di Bandung, karena di Bandung berada semua pemerintah kolonial yang telah diungsikan sejak bulan Februari 1941. Bersamaan dengan kejadian itu Kartosoewirjo masih tetap berada di Malangbong, di jantung Jawa Barat sehingga tidak langsung merasakan pengaruh perang tersebut.

Seperti ramalan Jayabaya yang kebanyakan orang Indonesia meyakininya, Kartosoewirjo mempunyai prediksi bahwa Jepanglah yang akan mengusir Belanda dan mengakhiri kekuasaan Kolonialnya di Indonesia. Dengan adanya serangan dadakan dari pihak Jepang ini, maka pada tanggal 8 Maret 1942 Panglima Tertinggi Angkatan Perang Kerajaan Belanda, Jenderal Ter Poorten, bersama Gubernur Jenderal Pemerintah kolonial Belanda, Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, menyerahkan Indonesia tanpa sarat kepada Jepang.

Pada tanggal 9 Maret 1942, di mana militer Jepang telah berhasil menaklukkan Belanda, mulailah mereka melanjutkan politik yang pernah dijalankan oleh Belanda. Niponisasi mulai diterapkan di hampir seluruh wilayah pendudukan Jepang di Indonesia. Berbeda dengan Belanda, pemerintah Jepang mengadakan perubahan politik yang baru berupa devide and rule - pecah belah untuk dikuasai. Oleh sebab pihak Jepang sangat faham betul tentang peta kekuatan politik yang sedang berkembang saat itu. Dimana dalam pandangan politiknya, di Indonesia sedang ada dua kekuatan yang sedang bertarung dalam menentukan masa depan negerinya, yaitu nasionalis Islam dan nasionalis yang non Islam.

Sebelum kedatangannya ke Indonesia Jepang sudah mengerti betul bahwa mayoritas masyarakat Indonesia adalah orang Islam, dan keberadaan mereka tersebar disetiap ormas dan parpol Islam. Oleh karena itu khusus untuk umat Islam Jepang telah membuat kebijakan politik tersendiri, yang menurut H.J. Benda disebut Nippon's Islamic Grass Root Policy - Kebijakan Politik Islamnya Jepang. Arah kebijakan politik ini adalah bagaimana Jepang berusaha untuk bisa mengeksploitasi kekuatan umat Islam yang tertumpu pada Ulama Desa dan para cendikian

muslimnya, karena menurut anggapan Jepang keberadaan mereka semua hanyalah sebagai penghambat penjajahannya di Indonesia.

Pembaharuan disegala bidang dilakukan oleh Jepang dalam awal pejajahannya. Hal ini dilakukan oleh Jepang karena di Indonesia telah menggema rasa nasionalisme untuk keluar dari belenggu penjajahan, yang jika dicegahnya akan mengadakan perlawanan. Dan inilah yang tidak diinginkan oleh Jepang setelah belajar banyak dari bagaimana Belanda menjalankan kolonialismenya di Indonesia. Dengan diadakannya pembaharuan tersebut untuk meyakinkan kepada masyarakat Indonesia bahwa kehadiran mereka adalah sebagai Saudara Tua dalam pengertian politik. Yang nantinya akan memberikan kemerdekaan Indonesia.

Dalam hal pembaharuan yang dibuka oleh Jepang disambut baik oleh kalangan politisi Indonesia. Dalam suatu sidang yang diikuti sejumlah politikus Indonesia untuk mengajukan suatu saran kepada pihak Jepang mengenai susunan sebuah kabinet Indonesia masa yang akan datang. Dengan penuh semangat Abikusno yang memimpin sidang itu telah menyusun suatu "Daftar Calon-calon Menteri untuk Pemerintah Indonesia dan para pembantunya", tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari calon-calon yang bersangkutan Abikusno mengusulkan Moh. Hatta menjadi menteri perekonomian dan Soekarno menjadi menteri propaganda. Dan dia sendiri disebut surat kabar Tjahaja Timur sebagai calon yang memenuhi syarat untuk jabatan perdana menteri.

Harapan akan terbentuknya sebuah pemerintahan sendiri menjadi buyar. Segala dugaan tentang susunan Pemerintah Indonesia kelak segera berakhir dengan diumumkannya dekret Panglima Militer Jawa (Maklumat No 3) pada 20 Maret 1942 yang melarang membicarakan – dalam bentuk apa pun – struktur politik Indonesia. Akhirnya para pejabat Jepang meletakkan kartunya di meja. Kata-kata maklumat itu disusun sedemikian rupa hingga benar-benar tidak memungkinkan setiap partai menjalankan fungsinya.Organisasi-organisasi yang hanya diizinkan terus berfungsi adalah yang dapat diawasi dengan teliti dan dapat digunakan untuk memobilisasi rakyat, Pemerintah Pendudukan Jepang lebih menginginkan terbentuknya organisasi massa yang baru, yang diketuai pemimpin-pemimpin Indonesia yang terkenal dan kooperatif, ketimbang bekerja dengan organisasi-organisasi yang ada. Kartosoewirjo yang masih tinggal di Malangbong bersikap menunggu. Sebenarnya dia juga mengetahui seruan Jepang pada semua politikus Indonesia, agar datang ke Jakarta. Namun dalam buku yang disusun oleh pemerintah militer Jepang, dan yang berisikan semua nama-nama orang Indonesia yang terkemuka, nama Kartosoewirjo tidak tercantum.

Kartosoewirjo kini hanya menjadi "tokoh regional" saja, karena sikap hidjrahnya yang benar-benar konsekwen. Dalam masa pendudukan Jepang dia tetap memfungsikan lembaga Suffah, namun kali ini lebih banyak memberikan pendidikan kemiliteran karena saat itu Jepang telah membuka pendidikan militernya. Kemudian siswa yang menerima latihan kemiliteran di Institut Suffah itu akhirnya memasuki salah satu organisasi gerilya Islam yang utama sesudah Perang, Hizbu'llah dan Sabili'llah, yang nantinya menjadi inti Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat.

Pada tahun 1943 Kartosoewirjo kembali aktif di bidang politik. Dia masuk sebuah organisasi kesejahteraan dari MIAI (Madjlis Islam 'Alaa Indonesia) di bawah pimpinan Wondoamiseno, sekaligus menjadi sekretaris dalam Majelis Baitul-Mal pada organisasi tersebut. Kegiatan yang dilakukannya ialah mengunjungi cabang-cabang Baitul-Mal di tiap daerah terutama di daerah Priangan. Dan pada bulan Mei 1943 Kartosoewirjo bersama-sama dengan Wondoamiseno dan Safei mendirikan cabang-cabang di lima kabupaten di Priangan atas izin dari residen Jepang Aseha di Bandung. Kegiatan lain yang dilakukannya menerbitkan sebuah artikel yang tidak berbau politik tentang Isra' dan Mi'raj Rasulullah, dalam Soeara MIAI. Selanjutnya Kartosoewirjo berupaya untuk meneruskan gagasan awalnya yaitu suatu masyarakat Islam yang benar-benar sempurna baik secara ideologi maupun ide, yang disesuaikan dengan propaganda Jepang dengan membuat tulisan-tulisan. Salah satu tulisannya sebagai berikut: "bahwa semua orang dapat ikut membangunkan dunia baru yang memberi jaminan akan kemakmuran, bagi tiap-tiap bagian daripada "Keluarga Asia Timur Raya", apabila mereka kembali kepada ajaran Rasulullah dan umat Islam sadar akan kedudukannya". Begitulah pandangan dan wawasan keislaman yang ada pada diri seorang Kartosoewirjo, di mana setiap gerak langkah kehindupannya hanya untuk kesuksesan dunia Islam.

Organisasi ini hanya berjalan selama enam bulan saja, karena pada bulan Oktober 1943 dibubarkan yang selanjutnya mengadakan fusi ke Masjoemi (Madjlis Sjoero Moeslimin Indonesia) yang didirikan pada tanggal 11 November 1943, dan Kartosoewirjo sendiri masuk menjadi anggota organisasi baru ini.

Ketika rahasia tentang rencana Jepang untuk melaksanakan politik devide and rule diketahui oleh kalangan politikus Indonesia. Dimana pemerintah Jepang memang sengaja menciptakan organisasi Masyumi dan Putera, yang hanya untuk diadu domba dengan sasaran ialah meredam keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka, dan juga untuk langgengnya kekuasaan Jepang di Indonesia. Oleh karena itu, Jepang menciptakan sebuah alat kontrol yang baru dengan mendirikan Jawa Hokokai, yaitu Perhimpunan Kebaktian Rakyat Jawa pada bulan November 1944 sebagai pengganti "Poetra" (Poesat Tenaga Rakyat), semua para politikus Indonesia diintegrasikan pada organisasi buatan jepang ini, agar mereka dapat dikontrol lebih baik tanpa

menimbulkan ekses yang buruk bagi kekuasaan Jepang. Kartosoewirjo sendiri bekerja di kantor pusat Djawa Hokokai (Djawa Hokokai Chuo Honbu) di bagian Chosaka yang mempunyai tugas untuk mengumpulkan data-data ekonomi dan informasi lainnya yang penting. Aktifitas rutin yang sering dikerjakan oleh Kartosoewirjo pada masa itu mengontrol penyerahan beras yang harus dilakukan rakyat setempat.

Di samping itu Jepang juga berusaha untuk memobilisasi rakyat pedesaan, terutama masyarakat Islam untuk kepentingan perang mereka, agar tercapai peningkatan produksi pertanian. Salah satu Program yang dibuat oleh Jepang berupa dipanggilnya 60 ulama dari seluruh pulau Jawa ke Jakarta untuk mengikuti "latihan ulama" sekali tiga minggu, yang pada akhir kursus tersebut mereka harus mengisi suatu angket yang berhubungan dengan kewajiban-kewajibannya terhadap Jepang.

Pada dasarnya kehadiran pendudukan militer Jepang di Indonesia setali tiga uang dengan Kolonial Belanda. Di mana politik devide and rule yang mereka adakan hanya untuk menindasan rakyat Indonesia saja, dan dilaksanakan hanya untuk kepentingan mereka saja. Rakyat diperlakukan dengan tidak wajar, diperas tenaganya untuk bekerja Romusha mana kala tidak mau dibunuhnya. Apa yang mereka impikan selama ini dengan penuh antusias meyakini ramalan Jayabaya hanyalah kesia-siaan. Impian negeri yang merdeka dari belenggu penjajahan harus dilupakan terlebih dahulu. Anak negeri harus menumpahkan darah dulu untuk mendapatkan apa yang menjadi dambaannya.

Pada tanggal 18 Februari 1944 terjadilah gerakan perlawanan terhadap pendudukan Jepang di daerah Singaparna. K.H. Zainal Mustofa memimpin sekitar 1000 orang yang didukung pula oleh para santrinya dan para petani setempat. Adapun motifasi dari adanya aksi tersebut adalah sebuah upaya dari K.H. Zainal Mustafa dan rakyat Singaparna untuk mendapakan arti sebuah kemerdekaan yang dirampas oleh penjajah Jepang. Diawali ketika 2 orang serdadu Jepang dibunuh Tentara rakyat yang dipimpin oleh K.H. Zainal Mustofa yang hanya bermodalkan keyakinan di tengah kebatilan berhadapan dengan persenjataan yang lengkap dan personil yang besar dapatlah diperkirakan akhihrnya. Pertempuran yang tidak seimbang ini berakhir ketika ditangkapnya K.H. Zainal Mustafa bersama 21 pimpinan pesantren dan gugurnya 85 santri. Zainal Mustofa beserta keluarganya dibawa ke Jakarta dan ditembak mati di sana. Perlawanan terhadap penjajah Jepang dilanjutkan di daerah Indramayu. Sebagai rasa solidaritas umat yang berada di Singaparna, maka Haji Madriyas, Kyai Mukasan, Haji Kartiwa, Kyai Kusen, dan Kyai Srengseng dan didukung oleh sebagian besar rakyat Indramayu mengadakan aksi perlawanan terhadap tentara Jepang yang biadab. Perlawanan itu sendiri terjadi pada 30 Juli April 1944. Kali ini Jepang lebih berhati-hati, pertama-tama yang dilakukan untuk memulihkan keadaan mereka

mengajak berunding. Namun kebencian rakyat lebih besar dari ajakan untuk berunding, mereka sudah tidak mempercayai lagi kehadiran tentara Jepang di Indonesia. Maka terjadilah pertempuran antara rakyat setempat dengan tentara Jepang yang dipersenjatai dengan perlatan perang. Tidaklah mengherankan setelah kejadian itu maka banyak yang gugur dari pihak rakyat karena aksi Jepang tersebut.

Ketika situasi perang Asia Pasifik mulai memburuk bagi pihak Jepang, apalagi dengan adanya pemboman dari pihak sekutu kedaerah Jepang di Hiroshima dan Nagasaki, akhirnya untuk lebih memanfaatkan para politikus Indonesia dalam mendukung usaha-usaha perjuangannya mereka bersedia untuk memberi konsesi (kepemilikan) yang lebih besar bagi rakyat Indonesia dari yang pernah dilakukan oleh Belanda sebelumnya. Orang Indonesia kini diperkenankan membentuk organisasi bersenjata sendiri. Pertama, pada bulan Oktober 1943, terbentuknya PETA (Pembela Tanah Air) dan kemudian, pada akhir 1944 dibentuklah Hizbullah (Tentara Allah), cabang bersenjata Masyumi Islam. Di samping itu, pada 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Koiso menjanjikan Indonesia "merdeka di kelak kemudian hari". Dan pada 1 Maret 1945 janji ini diulangi, kali ini oleh Panglima tertinggi Jepang, yang sekaligus mengumumkan pembentukan "Panitia Penyelidik Persiapan Kemerdekaan".

Berkat dibukanya kran kebebasan berupa konsesi dari pemerintah Jepang. Pada bulan Februari 1945, berkumpul sukarelawan Hizbullah di tempat pendidikan mereka untuk mendapatkan pendidikan dasar militer selama tiga bulan, setelah itu mereka ditugaskan untuk kembali ke tempat mereka masing-masing guna mengajarkan ilmunya kepada anggota yang baru. Hal inilah yang sejak lama ditunggu oleh Kartosoewirjo, bahwa rakyat Indonesia sangat berhak untuk menentukan nasib bangsanya sendiri tanpa diberikannya konsesi sekalipun, dia segera mengaktifkan kembali perguruan Suffah di Malangbong untuk melatih para pemuda berupa latihan kemiliteran dengan dipersenjatai tongkat bambu. Kartosoewirjo sendiri tidak terjun langsung menangani latihan tersebut karena dia ditugaskan oleh pemerintah Jepang sebagai pengamat latihan-latihan di Banten. Di mana daerah ini diumumkan menjadi daerah yang terlarang, karena di sini dikhawatirkan akan mendarat pasukan sekutu.

Pada bulan Juli 1945 semua unsur di kalangan pejabat militer Jepang mengadakan kesepakatan bahwa kemerdekaan harus diberikan kepada Indonesia dalam waktu beberapa bulan. Adapun yang menjadi latar belakangnya adalah ketika direbutnya daerah Iwojima oleh tentara Amerika yang kemudian dijadikan pangkalan pesawat pembomnya untuk melancarkan serangan-serangan terhadap Jepang. Dan begitu juga yang dialami oleh sekutunya Jepang, Jerman telah menyerah kepada sekutu, dan dengan demikian pihak Sekutu diberi peluang untuk memusatkan perhatian pada perang Pasifik.

Pada akhir bulan Juli para pemimpin Sekutu di Postdam mengeluarkan suatu tuntutan agar Jepang menyerah tanpa syarat. Jepang tidak dapat lagi memikirkan tentang kemenangan ataupun tindakan mempertahankan wilayah-wilayah pendudukannya. Tujuannya di Indonesia kini adalah membentuk sebuah negara yang merdeka dalam rangka mencegah berkuasanya kembali lawan, yaitu Belanda. Pada akhir bulan Juli angkatan darat dan angkatan laut Jepang mengadakan suatu pertemuan di Singapura guna merencanakan pengalihan politik dan perekonomian ke tangan bangsa Indonesia. Mereka memutuskan bahwa Jawa akan diberi kemerdekaan pada awal bulan September, sedangkan daerah-daerah lainnya segera menyusul. Janji Jepang untuk sebuah kemerdekaan bangsa Indonesia diwujudkannya dengan mendirikan Dokuritsu Jumbi Chosakai, yaitu "Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia", yang didirikan tanggal 28 Mei 1945. Pada saat-saat akan berakhirnya pendudukan Jepang, pihak pemerintah militer Jepang beralih orientasi politiknya dengan memberikan perhatian lebih banyak kepada kelompok nasionalis sekuler. Kendatipun mereka tetap memberikan perlindungan kepada kelompok Islam, namun pemerintah militer Jepang lebih mempersiapkan para politisi Indonesia dari golongan nasionalis sekular untuk memegang kendali politik nasional setelah Indonesia merdeka. Kenyataan ini terlihat dari wakil-wakil Islam yang duduk dalam BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan) dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Penunjukkan pihak Jepang yang diskriminatif ini telah membuat rasa sentimen para politisi dari golongan nasionalis Islam.

Dalam komite BPUPKI inilah terjadi perdebatan ideologis yang serius antara wakil-wakil golongan nasionalis Islam dan kelompok nasionalis sekular. Perbedaan disekitar tentang dasar ideologi negara Indonesia yang akan lahir telah menghangatkan suasana perkembangan politik menjelang kemerdekaan Indonesia. Pihak Islam mengusulkan gagasan negara Indonesia yang berdasarkan syariat Islam. Pihak nasionalis sekuler menolak gagasan tersebut dan mengajukan gagasan negara integralis dengan dasar ideologi Pancasila.

Dari pihak Islam beralasan bahwa sesungguhnya mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Namun demikian, syariat Islam tidak dapat berjalan. Sebab, sebagaimana diutarakan oleh Ki Bagus Hadikusumo, salah seorang wakil kelompok Islam yang duduk di BPUPKI, tidak ada institusi formal (seperti negara) yang mendukungnya. Zaman pemerintahan kolonial Belanda adalah contoh paling tepat untuk melukiskan betapa syariat Islam tidak dapat berjalan, kendatipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Lebih lanjut Hadikusumo menegaskan bahwa sebagian besar ajaran Islam mempunyai hubungan langsung dengan persoalan politik.

Pernyataan Ki Bagus Hadikusumo tadi sepenuhnya dapat dipahami oleh pihak nasionalis sekular. Namun, kelompok ini masih tidak dapat menerima gagasan negara Islam, karena Indonesia menurut Soepomo, salah seorang wakil kelompok nasionalis sekular, mempunyai keistimewaan-keistimewaan tertentu. Lebih dari itu, ia juga meragukan apakah syari'at Islam telah cukup mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat modern. Bahkan Islam menjadi ideologi yang menyumbang banyak terhadap --apa yang disebut oleh B.J. Boland sebagai "modern struggle"-- banyak pergolakan dalam Indonesia modern. Ideologi Islam dalam pandangan kaum Nasionalis sekuler adalah bentuk sistem kuno yang tidak mampu menjawab persoalan-persoalan modern sebuah masyarakat. Padahal cukup banyak referensi yang dihasilkan oleh intelektual Muslim, baik dari dalam maupun dari luar Indonesia, tentang konsep negara modern Islam. Upaya untuk "memahami" Islam tidak sepadan dengan upaya kaum Nasionalis Islam untuk mau mengerti ideologi-ideologi lain.

Perbedaan ini berlangsung terus. Namun setelah Sukarno di dalam Badan Penyelidik menjabarkan tentang konsep nasionalismenya maka berakhirlah perdebatan itu. Keinginan dari Sukarno dengan menawarkan konsepnya bertujuan untuk tidak menimbulkan perpecahan, kompromi pun diambil: maka tercapailah kesepakatan bersama sebagaimana terumuskan dalam Piagam Jakarta, di dalamnya disepakati bahwa Pancasila merupakan dasar negara. Di samping itu dicantumkan pula rumusan "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Implikasi Piagam Jakarta untuk hubungan antara syariat Islam dan negara akan menjadi sumber pertentangan-pertentangan sengit di masa mendatang. Bagaimana tidak terjadi pertentangan, konsep Pancasila yang dibuat oleh Sukarno itu ternyata hanyalah sebuah fantasi dirinya ketika sedang mengalami pergolakan bathin tentang masa depan bangsanya.

Penjelasan Soekarno tentang Pancasila sebagai dasar yang setepat-tepatnya untuk negara Indonesia, demikian menyinggung persoalan-persoalan mendasar tentang ideologi dari negara yang akan lahir, yang nantinya akan terjadi konflik antara para pendukung negara "sekuler" dan para pendukung negara Islam. Inilah realitas yang terlihat dalam negara yang baru merdeka di Indonesia; negara baru dengan masyarakat yang lama.

Bagaimana penuturan Sukarno sendiri mengenai penemuan istilah Marhaen merupakan suatu cerita yang menarik dan juga hasil imaginatif dari romantisme revolusionernya. Menurut Sukarno, ketika dia bersepeda melewati kampung di selatan Bandung, ia terlibat dalam suatu percakapan dengan seorang petani Sunda yang sedang membajak sawahnya. Petani itu menyatakan bahwa ia memiliki sepetak tanah kecil yang digarapnya sendiri, sebuah rumah sederhana, sebuah cangkul, sebuah sekop, dan sebuah bajak, dan dengan kerja keras ia berusaha memberi sandang

dan pangan bagi keluarganya. Ketika ditanya namanya, petani yang dipandang Sukarno sebagai contoh tipikal rakyatnya itu menjawab: Marhaen. Tidaklah penting apakah Sukarno sendiri percaya atau tidak percaya akan kebenaran ceritanya, dan karena cerita itu diulang-ulangnya selama bertahun-tahun maka ia barangkali telah benar-benar mengalaminya. Yang penting ialah bahwa cerita itu menunjukkan bagaimana dalam pikiran Sukarno arti dan kepentingan konsep itu terletak dalam identifikasi dengan rakyat jelata, yang membentuk sebagian besar penduduk Indonesia, dan yang dengan mereka itulah ia, seperti juga banyak elite pemimpin gerakan nasionalis yang urban dan berpendidikan barat, merasa sangat perlu untuk mengidentifikasikan dirinya.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, diproklamasikannya Republik Indonesia dengan bantuan-bantuan bandit-bandit, gangster dan lain sebagainya dalam revolusi jahiliyahnya. Setelah kemerdekaan bangsa dicapai pada tahun 1945, sebagai imbal politik yang proporsional, wajar jika kaum nasionalis Islam kemudian menuntut dan memperjuangkan Islam sebagai dasar negara Indonesia yang baru merdeka. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Piagam Jakarta yang telah ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945 itu dibicarakan kembali. Dengan alasan: demi persatuan nasional, "tujuh kata" yang sangat berarti bagi umat Islam itu dihapus. Toleransi yang diberikan kaum Nasionalis Islam tidak dibalas setimpal oleh kaum Nasionalis sekuler. Kendatipun semua pihak menyadari bahwa kontribusi Islam terhadap kemerdekaan Indonesia lebih besar daripada sumbangan-sumbangan darah yang dipersembahkan oleh kalangan-kalangan non-Islam untuk kemerdekaan tanah air ini. Gerakan-gerakan masyarakat pribumi Muslim berabad-abad lamanya berjuang menentang kolonialisme Eropa dan menuntut kemerdekaan, baik secara konsepsional (melalui perjuangan-perjuangan pemikiran yang bertebaran di media-media cetak) maupun secara fisik, beradunya tulang dan daging para Syuhada dengan mesiu kaum kafir kolonial. Tidak diragukan lagi, dalam upaya-upaya nasionalistik ini, Islam memainkan peranan yang amat menentukan. Seperti apa yang ditulis oleh George McTurnan Kahin, “Agama Muhammad bukan saja merupakan mata rantai yang mengikat persatuan; melainkan bahkan merupakan simbol kesamaan nasib menentang pendatang asing dan penindas dari agama lain.” Atau seperti yang dinyatakan oleh Fred R. Von der Mehden, “Islam merupakan sarana paling jelas, baik untuk membangun persatuan nasional maupun membedakan masyarakat Indonesia dari elite penjajah Belanda. Pulau-pulau yang mencakup Hindia Belanda tidak pernah eksis sebagai entitas linguistik, kultural atau historis. Wilayah-wilayah terakhir yang jatuh ke tangan kontrol Belanda tidak pernah tunduk hingga awal abad ke-20. Karena itu, lantaran terdiri dari berbagai tradisi historis, linguistik, kultural dan bentuk geografis yang berbeda, maka satu-satunya ikatan universal yang tersedia, di luar kekuasaan kolonial, adalah Islam.”

Seperti terlihat jelas diatas, semua pembicaraan hasil rapat sidang Panitia pelaksana tersebut menjadi sia-sia, di mana Piagam Jakarta sendiri yang disusun oleh Panitia Sembilan termasuk di dalamnya tokoh-tokoh Islam yang tetap teguh pendiriannya untuk mempertahankan bahwa perjuangan Islam harus lewat parlemen tidak pernah diberlakukan. Sampai salah satu politikus dari Masyumi yaitu M Isa Anshari, menamakan keputusan tersebut sebagai suatu "permainan sulap" yang masih diliputi kabut rahasia. Yang pada akhirnya Indonesia merdeka sesungguhnya menjadi negara "sekuler", yang di dalamnya tidak ada persoalan mengenai kewajiban hukum bagi umat Muslim menjalankan syariat Islam.

Bagi mereka yang suka bermain angka, ada saja yang menghubung-hubungkan jumlah sembilan tokoh dalam pembentukan Piagam Jakarta tadi dengan sebuah ayat Alqur-an, bahwa tokoh-tokoh yang terlibat dalam BPUPKI itu telah keliru membaca situasi dan membawa ummatnya kejurang yang berbahaya. Ayat yang dimaksudkan, sekali lagi oleh mereka yang suka bermain angka, sesungguhnya berkenaan dengan ummat Nabi Shaleh yaitu kaum Tsamud yang maksudnya adalah: "Dan adalah di kota itu, sembilan orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan". Panitia 9, mungkin bukanlah yang dimaksudkan oleh firman Allah di atas. Tapi melihat kenyataan, situasi politik, latar belakang, segi syariahnya serta akibat-akibat yang ditimbulkannya bagi generasi muslim di kemudian hari, maka sulit untuk menyangkal jika ada orang mencari-cari relevansi antara kandungan ayat dengan perilaku politik yang mereka tunjukkan. Mungkin ini suatu kebetulan saja. Wallahu a'lam.

Selama masa pendudukan Jepang, kegiatan Kartosoewirjo hanya kelihatannya saja bersedia untuk bekerja sama dengan pihak Jepang. Selama masa itu dia tidak pernah mengeluarkan pernyataan politik, juga di hadapan rekan-rekannya dalam Djawa Hokokai. Namun dia memanfaatkan kedudukannya dan memanfaaatkan sarana propaganda yang dibentuk oleh Jepang guna mencapai tujuannya tanpa sepengetahuan Jepang, seperti yang juga dilakukan banyak politikus Indonesia lainnya pada masa itu. Terutama Kartosoewirjo tidak pernah memutuskan hubunganya dengan teman-temannya dari KPK-PSII yang masih tinggal di Jawa Barat. Tetapi dia tidak pernah mengambil bagian proses pengambilan keputusan di waktu-waktu sebelum proklamasi. Untuk itu dia tidak mempunyai kesempatan, karena dia telah menarik diri dari arena politik nasional karena sikap "Hidjrahnya" yang benar-benar konsekwen, dan juga hubungan Kartosuwisrjo dengan hampir semua tokoh organisasi Islam di tingkat nasional waktu itu sudah tidak akrab lagi. Pendapatnya tentang situasi selama masa pendudukan Jepang baru dinyatakan setahun kemudian dalam sebuah brosur di mana dia menulis sebagai berikut:

"Pada zaman pendoedoekan Jepang, maka keadaannya lebih menjedihkan daripada zaman Belanda. Semoeanja pergerakan politik dengan tiada ketjoealinja disapoe bersih sampai ke akar-akarnja, atau diboenoeh mati. Hak politik beoat ra'iat noel, tidak barang sedikitpoen diberikan".

Dan kemudian dia melanjutkan:

"Waktoe itoe praktis tiada hak politik bagi ra'iat Indonesia, melainkan semoea djedjak dan langkah haroes dilahirkan kepada Tokio, ialah peosat persembahan manoesia berhala, jang bernamakan Tenno Heika, dan kiblatnja semoea djepangisme dan kemoesjrikan ala Djepang."

Seterusnya tentang organisasi Islam ciptaan Jepang serta peranannya pada waktu itu, Kartosoewirjo menulis sebagai berikut:

"Masjumi dan kemudian MIAI, kedua-duanja buatan Jepang, dengan perantaraan agen-agennja, kijai-kiaji a la Tokio, merupakan lembaga dan medan pertempuran. Oleh fihak Islam muda, fihak revolusioner dan progressif, lembaga ini dipakai untuk menjusun dan mengatur "gerakan di bawah tanah", seperti juga jang dilakukan oleh kawan-kawan seperdjuangan lainnja di Hokokai dan lain-lain badan kebaktian, buatan saudara tua itu. Benih-benih subversif di masa sangkar mas Jepang, jang sesungguhnja kamp konsentrasi, di masa nanti, mendjadi pendorong dan daja kekuatan jang hebat."

Dan tentang Soekarno, Kartosoewirjo menggambarkannya bahwa pada saat itu Soekarno menjadi agen nomor satu Jepang:

"Ibu pertiwi diselaraskan dengan Dewi Ameterasu, animisme Djawa (kedjawen) ditjampur dengan Sintoisme, marhaenisme disesuaikan dengan tjita-tjita kema'muran Asia Timur Raja dan dengan alat-alat itu atas perintah tuannja, ia siap memperdjepangkan diri dan kawan-kawannja dan kemudian UIBI (Umat Islam Bangsa Indonesia) pun menjadi sasarannja jang istimewa."

Pada bulan Agustus itu Kartosoewirjo berada di Jakarta, dan dia juga mengetahui kekalahan Jepang dari sekutu bahkan dia mempunyai rencana kinilah saatnya rakyat Indonesia khususnya umat Islam merebut kemerdekaannya dari tangan penjajah. Sesungguhnya dia telah memproklamasikan kemerdekaan pada bulan Agustus 1945. Tetapi proklamasinya ditarik kembali sesudah ada pernyataan kemerdekaan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta. Untuk sementara waktu dia tetap loyal kepada Republik dan menerima dasar "sekuler"-nya.

Namun sejak kemerdekaan RI diproklamasikan (17 Agustus 1945), kaum Nasionalis sekulerlah yang memegang tampuk kekuasaan negara dan berusaha menerapkan prinsip-prinsip kenegaraan modern yang sekuler. Semenjak itu kalangan nasionalis Islam tersingkir secara sistematis dan hingga akhir 70-an kalangan Islam berada di luar negara. Dari sinilah dimulainya

pertentangan serius antara kalangan Islam dan kaum Nasionalis sekuler. Karena kaum nasionalis sekuler mulai secara efektif memegang kekuasaan negara, maka pertentangan ini untuk selanjutnya dapat disebut sebagai pertentangan antara Islam dan negara.

Pada bulan oktober 1945 Kartosoewirjo beserta anggota-anggota Masjumi yang lain di antaranya Wahid Hasyim dan Moh. Natsir mengadakan pembicaraan tentang akan menjadikan Masjumi sebagai partai politik. Namun tidak ada sepakat dalam pertemuan tersebut, maka pada tanggal 7-11-1945 di Yogyakarta partai Masjumi didirikan dengan memakai nama yang lama, dan partai Masjumi sekarang ini dijadikan sebagai wahana organisasi bagi semua kelompok Islam. Masjumi dimaksudkan agar menjadi partai politik kesatuan bagi semua Muslim, tanpa membedakan latar belakang agama, sosial pendidikan, dan ekonomi. Dalam organisasi ini Kartosoewirjo menduduki jabatan sebagai sekretaris pertama. Pada kongres itu banyak keputusan yang dapat diperoleh di antaranya ditetapkan bahwa di samping Hizbullah, yaitu sebuah laskar Islam (di mana anggota masih muda) yang masih tetap berdiri, dibentuk lagi sebuah laskar yang dinamakan Sabilillah (yang anggotanya terdiri dari generasi lebih tua). Keputusan yang lainnya adalah, bahwa umat Islam harus dipersiapkan untuk menjalankan Jihad. Dalam programnya, Masjumi merumuskan tujuannya, yaitu untuk menciptakan sebuah negara hukum yang berdasarkan ajaran agama Islam. Setelah dibentuknya partai Masyumi ini banyak sekali didirikan kantor-kantor cabang partai, mulai dari tingkat provinsi sampai ke bawah yaitu tingkat desa. Karena itu pula Kartosoewirjo mengadakan perjalanan ke Jawa Barat untuk mempersiapkan pendirian kantor pusat Masyumi Daerah Priangan.

Bab Lima

Basis Politik Pemikiran Islamic Nation-State Kartosoewirjo

Pada bulan Juni 1946, di Garut diadakan konferensi Masyumi Daerah Priangan dimana akan dipilih pengurus yang baru. Kartosoewirjo menunjuk K.H. Moechtar sebagai ketua umum dan dia sendiri menjadi wakil ketua. Sanusi Partawidjaja menjadi sekretaris badan pengurus, Isa Anshari dan K.H. Toha memimpin bidang informasi, sementara kepada Kamran diserahkan pimpinan Sabilillah. Pada konferensi tersebut Kartosoewirjo mengucapkan sebuah pidato tentang haluan politik Islam tentang pertanyaan siapa yang akan berkuasa di Indonesia. Masih juga ia menganjurkan persatuan dalam cita-cita perjuangan, ia memperingatkan para pendengarnya sekaligus pendukungnya bahwa konflik antara sesama bangsa Indonesia hanyalah akan menguntungkan Belanda, dan ia mendesak menghentikan perbedaan-perbedaan ideologi. Segera setelah tercapai kemerdekaan penuh, perbedaan-perbedaan ini dapat dicari penyelesaiannya secara demokratis, menurut kedaulatan rakyat. Bunyi pidatonya sebagai berikut:

"Dan oleh karena Repoeblik Indonesia berdasarkan koedaoelatan Ra'iat, maka seoara ra'iat jang terbanjak itoelah jang akan memegang kekoeasaan negara. Djika kommoenisme jang diikuti oleh sebagian besar daripada ra'iat, maka pemerintah Negara akan mengikoeti haloean politik, sepandjang adjaran kommoenis. Dan bila sosialisme atau nasionalismelah jang "menang soeara", maka sosialisme atau nasionalismelah yang menentoekan haloean politik negara. Demikian poela, djika Islam jang mendapat koernia Toehan "menang dalam perdjoeangan politik" itoe, maka Islam poelalah jang akan memegang tampoek Pemerintah Negara. Sehingga pada waktoe itoe terbangoenlah doenia Islam atau Dar-oel-Islam, jang tidak menjimpang seramboet dibelah toejoeh sekalipoen daripada adjaran-adjaran Kitabuoellah dan Soennahtoen-Nabi Moehammad Çlm.

Namun yang sangat menonjol sekali ketika itu, bahwa yang sedang melangsungkan pertarungan politiknya adalah antara Nasionalisme sekuler dengan Komunisme. Adapun keterlibatan kalangan politisi Islam dalam percaturan politik tersebut, mereka hanyalah sebagai kambing hitam saja untuk menggolkan usaha-usaha mereka berdua yang sedang terlibat pertarungan. Untuk lebih mempersiapkan perjuangan di Suffah tetap dilatih kemiliteran oleh Ateng Djaelani seorang perwira PETA, karena dalam perhitungan Kartosoewirjo akan terjadi perjuangan senjata. Dan untuk mencapai koordinasi yang lebih baik dari lasykar-lasykar tersebut, maka pada tanggal 15 September 1946 didirikan di Bandung Markas Daerah Pertahanan Priangan (MDPP). Yang menjadi anggotanya adalah lasykar Hizbullah di bawah pimpinan Zainal Abidin, Kadar Solihat, dan Kamran. Juga lasykar dari Sabilillah di bawah pimpinan kalangan politikus Masjumi di

antaranya Isa Anshari, Ajengan Toha, Kiai Jusuf Taudjiri, yang dulu bersama-sama dengan Kartosoewirjo mendirikan KPK-PSII.

Pada bulan Februari dan Maret 1947 di Malang, Kartosoewirjo ditunjuk sebagai salah seorang dari lima anggota Masyumi dalam komite Eksekutif, yang terdiri dari 47 anggota untuk mengikuti sidang KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat), dalam sidang tersebut membahas apakah Persetujuan Linggarjati yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik dan Belanda pada bulan November 1946 akan disetujui atau tidak. Kepergian Kartosoewirjo disertai para pejuang Hizbullah dari Jawa Barat, karena dalam rapat tersebut kemungkinan ada dua kubu yang bertarung antara laskar sayap kiri (diwakili melalui partai Persindo), mereka ingin menyetujui hasil perundingan dengan laskar Hizbullah (diwakili lewat partai Masyumi dan PNI) yang hampir semua wakilnya tidak menyetujui hasil perundingan. Kartosoewirjo sendiri termasuk para politikus Masyumi yang menolak persetujuan Linggarjati tersebut tanpa kompromi. Karena memang jelas sekali bahwa dengan diadakannya perundingan Linggarjati itu sangat menguntungkan pihak Belanda dalam usaha-usahanya menancapkan kuku penjajahannya kembali. Ketika anggota KNIP yang anti Linggarjati benar-benar diancam gerilyawan Pesindo, Sutomo (Bung Tomo) meminta kepada Kartosoewirjo untuk mencegah pasukannya agar tidak menembaki satuan-satuan Pesindo. Terlihat sekali bahwa perjuangan politik umat Islam berada di tangan kelompok sayap kiri, yaitu PKI dan sosialisme.

Terbukti ketika Amir Syarifudin menjabat sebagai Menteri Pertahanan, dia berprogram mengharuskan setiap laki-laki yang berusia 15 tahun ke atas untuk masuk kedalam Inspektorat Perjuangan yang dikordinir oleh orang komunis, namun usaha yang dilakukannya ditentang oleh R. Oni selaku ketua Sabilillah yang dilantik pada bulan April 1947 dengan alasan bahwa usaha-usaha yang dilakukan oleh Amir Syarifudin tersebut untuk membuat umat Islam menjadi Sosialis, dan alasan yang lain bahwa semua tentara Republik adalah anggota sayap kiri. Maka kemungkinan Sabilillah dan Hizbullah diterima masuk TNI sangat tipis karena kekhawatiran lain bahwa TNI hanya akan mengambil senjatanya saja dari kedua laskar tersebut dan selanjutnya mereka segera dipulangkan ke tempat masing-masing.

Pada tanggal 21 Juni 1947, Belanda dengan karakter Yahudinya melanggar persetujuan Linggarjati yang mengakui pemerintah RI di Jawa, Madura dan Sumatera secara de facto. Belanda memang tidak akan pernah bermaksud untuk mematuhi perjanjian itu, mereka menjadikannya hanya sebagai upaya untuk mengulur waktu guna dapat memperkuat kontingen pasukannya. Ketika pasukan tersebut dirasa telah kuat mereka menyerang kembali daerah-daerah vital yang menjadi sarana perhubungan.

Melihat aksi Belanda yang tidak mematuhi perjanjian Linggarjati membuat Sjahrir bingung dan putus asa, maka pada bulan Juli 1947 dia terpaksa dan bercampur malu mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri, karena sebelumnya dia sangat menyetujui tuntutan Belanda dalam menyelesaikan konflik antara pemerintah RI dengan Belanda, setelah terjadinya agresi militer I Belanda pada bulan Juli. Yang menggantikan kedudukan setelah pengunduran dirinya adalah Amir Syarifudin yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Dalam kapasitasnya sebagai Perdana Menteri, dia menggaet anggota PSII yang dulu untuk duduk dalam Kabinetnya. Termasuk menawarkan kepada Kartosoewirjo untuk turut serta duduk dalam kabinetnya menjadi Wakil Menteri Pertahanan kedua. Namun apa jawaban Kartosoewirjo? Seperti yang dijelaskan dalam sepucuk suratnya kepada Soekarno dan Amir Sjarifudin, dia menolak kursi menteri karena "ia belum terlibat dalam PSII dan masih merasa terikat kepada Masyumi". Kartosoewirjo menolak tawaran itu bukan semata-mata karena loyalitasnya kepada Masyumi. Penolakan itu juga ditimbulkan oleh keinginannya untuk menarik diri dari gelanggang politik pusat. Akibat menyaksikan kondisi politik yang tidak menguntungkan bagi Bangsa Indonesia disebabkan berbagai perjanjian yang diadakan pemerintah RI dengan Belanda, di samping itu Kartosoewirjo tidak menyukai arah politik Amir Sjarifudin yang kekiri-kirian. Kalau dilihat dari sepak terjang Amir Syarifudin selama manggung di percaturan politik Nasional dengan menjadi Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan sangat jelas terlihat, bahwa Amir Syarifudin membawa arah politik Indonesia kepada arah Komunisme.

Karena semua perhubungan lalulintas putus dan jembatan melalui sungai Serayu dibom dan dirusak oleh Belanda, Kartosoewirjo kini tidak dapat kembali ke Yogyakarta. Atas persetujuan pimpinan partai dia diangkat menjadi wakil Pengurus Besar Masjumi untuk Jawa Barat. Dalam jabatannya yang terakhir ini dia mulai menyusun kembali pasukan mujahidin Islam di daerah Jawa Barat. Reorganisasi perjuangan gerilya dirasakan perlu mengingat keadaan, dalam tiga minggu sesudah Belanda melancarkan aksi militer besarnya, apa yang disebut politionele actie (aksi polisionil) pertama, Belanda menduduki kota-kota utama di Priangan seperti Garut, Tasikmalaya dan Ciamis. Sementara para pemimpin seperti Soekarno dan tokoh-tokoh lainnya yang senantiasa setia menjaga necisnya pakaian dari kotoran dan debu perjuangan begitu liciknya mempengaruhi rakyat dengan kata-kata dan diplomasinya yang kosong dan menipu. Pada tanggal 6 Agustus bom atom pertama dijatuhkan Amerika di Hiroshima sebagai balasan atas serangan Jepang terhadap pangkalan Pearl Harbour. Bom atom biadab hasil temuan ilmuwan hebat dan sebagai tanda kemajuan manusia dalam merusak alam ini menewaskan sedikitnya 78.000 orang Jepang tak berdosa. Mereka dibunuh tanpa memperhitungkan nilai kemanusiaan sedikitpun, layaknya seperti orang membakar sampah saja. Kenyataan ini

memperlihatkan betapa peperangan di Asia sedang mendekati tahap akhir yang mengerikan. Kartosoewirjo mengetahui perkembangan ini dan segera menyusun rencana-rencana dan tahapan-tahapan menuju kepada sebuah "wajib suci". Namun, para elit "thoghut" yang kebanyakan adalah kaum nasionalis sekuler juga mulai membentuk barisan dan berancang-ancang. Hal ini dapat kita lihat pada sehari setelah jatuhnya bom di Hiroshima, keanggotaan sebuah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia diumumkan di Jakarta, dan berita-berita mengenai panitia ini disiarkan ke seluruh Indonesia. Koran pun lebih bersuka-cita memberikan kejadian-kejadian di perkotaan ketimbang apa yang sesungguhnya sedang bergolak di pedesaan, di dalam dada-dada orang-orang kampung dan dusun terpencil. PPKI lebih dilihat sebagai sosok sinar harapan masa depan, dan bangsa Indonesia tidak pernah tahu bahwa lembaga tersebut beranggotakan wakil-wakil dari Jawa maupun dari daerah-daerah luar Jawa, didominasi oleh generasi tua, dan dijadwalkan mengadakan pertemuan pada tanggal 19 Agustus yang akan memutuskan satu persoalan yang akan menjadi overwhelming force terhadap orang-orang kampung dan pedusunan. Wakil-wakil Jawa menjadi kekuatan penentang paling hebat dari ide Negara Islam Kartosoewirjo karena mereka memiliki the idea of power dalam kultur mereka sendiri yang sudah sangat mapan. Pada tanggal 7 Agustus beberapa anggota kepanitiaan PPKI dari pihak Jepang "mengambil keputusan-keputusan yang riil" untuk mengadakan pertemuan.

Bangsa ini memang dibangun oleh serangkaian perjanjian-perjanjian, pertemuan-pertemuan dan perundingan-perundingan. Semua itu tidak satu pun yang ditepatinya, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi pihak lain. Tekanan terhadap Jepang juga diberikan oleh Uni Soviet yang mengumumkan perang terhadap Jepang pada tanggal 8 Agustus 1945. Pada hari berikutnya, 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki yang telah meluluh-lantakkan semangat bushido tentara Jepang di Indonesia. Tidak sedikit di antara mereka yang mengadakan hara-kiri atas kekalahan ini. Di samping itu, negara komunis Uni Soviet memanfaatkan kelemahan Jepang dengan cara menyerbu Manchuria. Suatu tindakan tidak fair dalam etika perang semesta. Jika lawan lemah, bukanlah saat yang tepat untuk menyatakan diri sebagai pemenang. Pada hari sesudah itu, karena tampak tak terhindarkan lagi bahwa pihak Jepang akan menyerah secara definitif terhadap Amerika, maka Soekarno, Hatta, dan Radjiman terbang ke Saigon untuk menemui Panglima Wilayah Asia Tenggara, Terauchi, pada tanggal 11 Agustus 1945. Kepada mereka Terauchi menjanjikan kemerdekaan bagi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, tetapi memveto penggabungan Malaya dan wilayah-wilayah Inggris di Kalimantan. Soekarno, Hatta dan Radjiman sesungguh sangat yakin bahwa kemerdekaan Indonesia hanya mungkin didapat lewat serangkaian kompromi dan perundingan-perundingan seperti ini. Padahal bentuk kerjasama apapun dengan Jepang tidak akan membawa penyelesaian yang meyeluruh pada

nasib bangsa Indonesia, bahkan dengan kerjasama tersebut telah membawa malapetaka. Mereka adalah pahlawan yang takut perang, tapi begitu perang usai, mereka naik ke atas mengibar-ngibarkan bendera dan mulai berpidato. Maka, wajarlah jika kemudian Soekarno ditunjuk sebagai Ketua Panitia Persiapan tersebut dan Hatta sebagai wakil ketua. Pada tanggal 14 Agustus Sukarno dan rekan-rekannya tiba kembali di Jakarta.

Pada tanggal 15 Agustus Jepang menyerah tanpa syarat, dan dengan demikian menghadapkan para pemimpin Indonesia pada suatu masalah yang berat. Karena pihak Sekutu tidak menaklukkan kembali Indonesia, maka kini terjadi suatu kekosongan politik: pihak Jepang masih tetap berkuasa namun telah menyerah, dan tidak tampak kehadiran pasukan Sekutu yang akan menggantikan mereka. Rencana-rencana bagi kemerdekaan yang disponsori pihak Jepang yang tertib kini tampaknya terhenti, dan pada hari berikutnya gunseikan telah mendapat perintah-perintah khusus supaya mempertahankan keadaan politik yang ada sampai kedatangan pasukan-pasukan Sekutu. Sukarno, Hatta, dan generasi tua ragu-ragu untuk berbuat suatu dan takut memancing konflik dengan pihak Jepang. Maeda ingin melihat pengalihan kekuasaan secara cepat kepada generasi tua, karena merasa khawatir terhadap kelompok-kelompok pemuda yang dianggapnya berbahaya maupun pasukan-pasukan Jepang yang kehilangan semangat. Para pemimpin pemuda menginginkan suatu pernyataan kemerdekaan secara dramatis di luar kerangka yang disusun oleh pihak Jepang, dan dalam hal ini mereka didukung oleh Sjahrir yang yang anti Jepang. Akan tetapi, tak seorang pun berani bergerak tanpa Sukarno dan Hatta.

Sebenarnya, sebelum hari-hari menjelang proklamasi RI tanggal 17 Agustus 1945, Kartosoewirjo telah lebih dulu menebar aroma deklarasi kemerdekaan Islam ketika kedatangannya pada awal bulan Agustus setelah mengetahui bahwa perseteruan antara Jepang dan Amerika memuncak dan menjadi bumerang bagi Jepang. Ia datang ke Jakarta bersama dengan beberapa orang pasukan Lasykar Hizbullah dan segera bertemu dengan beberapa elit pergerakan atau kaum nasionalis memperbincangkan peluang yang mesti diambil untuk mengakhiri dan sekaligus mengubah determinisme sejarah rakyat Indonesia. Untuk memahami mengapa pada tanggal 16 Agustus pagi Hatta dan Sukarno tidak dapat ditemukan di Jakarta, kiranya historical enquiry berikut ini perlu diajukan: Mengapa Soekarno dan Hatta meski menghindar begitu jauh ke Rengas Dengklok padahal Jepang memang sangat menyetujui persiapan kemerdekaan Indonesia? Mengapa ketika Soebardjo ditanya Soekarno, apakah kamu ingat pembukaan Piagam Jakarta? Mengapa jawaban yang diberikan dimulai dengan kami bangsa Indonesia....? Bukankah ini sesungguhnya adalah rancangan proklamasi yang sudah dipersiapkan oleh Kartosoewirjo pada tanggal 13 dan 14 Agustus 1945 kepada mereka? Pada malam harinya mereka telah dibawa oleh para pemimpin pemuda ke garnisun Peta di Rengasdengklok, sebuah kota kecil yang

terletak ke utara dari jalan raya ke Cirebon, dengan dalih melindungi mereka bilamana meletus suatu pemberontakan Peta dan Heiho. Ternyata tidak terjadi suatu pemberontakan pun, sehingga Sukarno dan Hatta segera menyadari bahwa kejadian ini merupakan suatu usaha memaksa mereka supaya menyatakan kemerdekaan di luar rencana pihak Jepang; tujuan ini mereka tolak. Maeda mengirim kabar bahwa jika mereka dikembalikan dengan selamat maka dia dapat mengatur agar pihak Jepang tidak menghiraukan bilamana kemerdekaan dicanangkan.

Pada malam itu Sukarno dan Hatta sudah berada di rumah Maeda di Jakarta. Pernyataan kemerdekaan dirancang sepanjang malam. Kaum aktivis muda menginginkan bahasa yang dramatis dan berapi-api, tetapi untuk menjaga supaya tidak melukai perasaan pihak Jepang atau mendorong terjadinya kekerasan maka disetujuilah suatu pernyataan yang tenang dan bersahaja yang dirancang oleh Sukarno.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 di pagi hari jam 10.00 Sukarno membacakan pernyataan kemerdekaan tersebut di hadapan sekelompok orang yang relatif sedikit jumlahnya di luar rumahnya sendiri:

Proklamasi:
Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan, dll., diselengarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, 17-8-1945

Atas nama bangsa Indonesia,

(tertanda) Sukarno Hatta

Bendera merah-putih dikibarkan dan berkumandanglah lagu 'Indonesia Raya'. Republik Indonesia telah lahir. Sementara itu, Sekutu sebagai pihak yang menang, yang hampir sama sekali tidak mengetahui apa yang telah terjadi di Indonesia selama berlangsungnya perang, dengan tergesa-gesa merencanakan kedatangan mereka untuk menerima penyerahan pihak Jepang dan memulihkan kembali rezim kolonial. Akan tetapi, zaman Jepang telah menciptakan kondisi yang begitu kacau, telah begitu mempolitisasikan rakyat, dan telah begitu mendorong para pemimpin dari generasi tua maupun muda untuk mengambil prakarsa, sehingga pihak Sekutu akan menghadap suatu perang kemerdekaan revolusioner.

Sekitar bulan Mei 1947 pihak Belanda sudah merencanakan bahwa mereka harus menyerang Republik secara langsung. Kalangan militer Belanda merasa yakin bahwa kota-kota yang dikuasai pihak Republik dapat ditaklukan dalam waktu dua minggu dan untuk menguasai seluruh wilayah Republik dalam waktu enam bulan. Namun mereka pun menyadari begitu besarnya biaya yang ditanggung untuk pemeliharaan suatu pasukan bersenjata sekitar 100.000 serdadu di Jawa, yang sebagian besar dari pasukan itu tidak aktif, merupakan pemborosan keuangan yang serius yang tidak mungkin dipikul oleh perekonomian negeri Belanda yang hancur diakbitkan perang. Oleh karena itu untuk mempertahankan pasukan ini maka pihak Belanda memerlukan komoditi dari Jawa (khususnya gula) dan Sumatera (khususnya minyak dan karet).

Pada tanggal 20 Juli 1947 tengah malam mulailah pihak Belanda melancarkan 'aksi polisional' mereka yang pertama. Aksi Belanda ini sudah sangat diperhitungkan sekali dimana mereka telah menempatkan pasukan-pasukannya di tempat yang strategis. Pasukan yang bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat (tidak termasuk Banten), dan dari Surabaya untuk menduduki Madura dan Ujung Timur. Gerakan-gerakan pasukan yang lebih kecil mengamankan wilayah Semarang. Dengan demikian, Belanda menguasai semua pelabuhan perairan-dalam di Jawa. Di Sumatera, perkebunan-perkebunan di sekitar Medan, instalasi-instalasi minyak dan batubara di sekitar Palembang, dan daerah Padang diamankan. Menghadapi aksi Belanda ini, bagi pasukan Republik hanya bisa bergerak mundur dalam kebingungan dan hanya menghancurkan apa yang dapat mereka hancurkan. Dan bagi Belanda, setelah melihat keberhasilan dalam aksi ini menimbulkan keinginan untuk melanjutkan aksinya kembali, dari beberapa orang Belanda, termasuk van Mook, berkeinginan merebut Yogyakarta dan membentuk suatu pemerintahan Republik yang lebih lunak, tetapi pihak Amerika dan Inggris yang menjadi sekutunya tidak menyukai 'aksi polisional' tersebut serta menggiring Belanda untuk segera menghentikan penaklukan sepenuhnya terhadap Republik.

Maka pada bulan Januari 1948 atas prakarsa pihak sekutu diadakanlah satu persetujuan bersama antara pemerintah Republik dengan Belanda di atas kapal Amerika USS Renville di pelabuhan Jakarta. Dimana persetujuan ini mengakui suatu gencatan senjata di sepanjang apa yang disebut sebagai 'garis van Mook'. Walaupun persetujuan ini tampaknya seperti kemenangan besar pihak Belanda dalam perundingan, namun tindakan yang dilakukan oleh pihak Republik dengan mengikuti perundingan itu memperlihatkan tidak mampunya pemerintah dalam mengadakan perundingan untuk tetap mempertahankan makna kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh rakyat Indonesia sehingga menyebabkan mereka memenangkan kemauan pihak Belanda yang sangat menentukan.

Dari adanya 'aksi polisional' pertama dengan hasil diadakannya persetujuan Renville menyebabkan jatuhnya pemerintahan Amir Sjarifuddin. Seluruh Anggota yang tergabung dalam kabinetnya yang terdiri dari anggota PNI dan Masyumi meletakkan jabatan ketika persetujuan Renville ditandatangani, disusul kemudian Amir sendiri meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri pada tanggal 23 Januari 1948. Dengan pengunduran dirinnya ini dia mungkin mengharapkan akan tampilnya kabinet baru yang beraliran komunis untuk menggantikan posisinya. Harapan itu menjadi buyar ketika Sukarno berpaling ke arah lain dengan menunjuk Hatta untuk memimpin suatu 'kabinet presidentil' darurat (1948-9), dimana seluruh pertanggungjawabannya dilaporkan kepada Sukarno sebagai Presiden. Dengan terpilihnya Hatta, dia menunjuk para anggota yang duduk dalam kabinetnya mengambil dari golongan tengah, terutama terdiri dari orang-orang PNI, Masyumi, dan tokoh-tokoh yang tidak berpartai. Dan langkah Amir dan Sayap Kirinya kini menjadi pihak oposisi. Dengan mengambil sikap sebagai oposisi membuat para pengikut Sjahrir mempertegas perpecahan mereka dengan pengikut-pengikut Amir dengan membentuk partai tersendiri yaitu Partai Sosialis Indonesia (PSI), pada bulan Februari 1948, dan sekaligus memberikan dukungannya kepada pemerintah Hatta.

Pada bulan Februari 1948 koalisi Sayap Kiri Golongan kiri di bawah pimpinan Amir Sjarifuddin yang berada di luar pemerintahan Republik kini memulai suatu usaha baru dengan menimbulkan bencana untuk mendapatkan kembali kekuasaan. Dengan merubah nama baru menjadi Front Demokrasi Rakyat (FDR) mencela persetujuan Renville yang sebetulnya dulu dirundingkan pada masa pemerintahannya. Usaha yang dilakukan oleh Front tersebut ialah dengan membentuk organisasi-organisasi petani dan buruh, tetapi usaha itu hanya mencapai sedikit keberhasilan. Untuk lebih mempertegas aksinya pada bulan Mei 1948 dimulailah suatu pemogokan pada sebuah pabrik tekstil milik negara di Delanggu (Jawa Tengah) yang dibarengi juga dengan aksi kekerasan. Kalau dikaji tindak kekerasan yang mengikutinya tampak jelas bahwa basis Front tersebut di wilayah pedesaan lebih merupakan soal identitas kemasyarakatan daripada masalah kelas sosial atau ideologi. Hal itu bisa terlihat pada buruh abangan yang mendukung Front itu mendapat serangan dari para santri pengikut Masyumi yang didukung oleh satuan-satuan Hizbullah. Sehingga aksi pemogokan tersebut pada bulan Juli berhasil diakhiri dengan syarat-syarat yang menguntungkan pihak yang melakukan pemogokan, tetapi kini terbukti bahwa siasat-siasat politik pusat sudah terlibat dalam ketegangan-ketegangan kemasyarakatan di desa-desa Jawa.

Sementara itu Belanda pada akhir bulan Agustus meluruskan garis depannya dengan apa yang disebut sebagai garis demarkasi “van Mook” yang telah merebut semua pelabuhan penting di Jawa serta daerah-daerah sumber hasil bumi di Jawa Barat dan Jawa Timur. Selain itu mereka

masih mengadakan suatu blokade ekonomi terhadap Republik yang wilayahnya di Jawa hanya tinggal kira-kira sepertiga luas pulau tersebut. Pasukan-pasukan Republik mengundurkan diri ke luar kota-kota dan memulai perang gerilya secara besar-besaran di kedua belah garis van Mook. Pihak tentara membunuh Amir Sjarifuddin dan lebih dari lima puluh orang beraliran kiri yang ada di penjara ketika mereka bergerak mundur dari Yogyakarta pada tangal 19/20 Desember malam daripada mengambil risiko bahwa mereka akan dibebaskan oleh Belanda. Sampai akhir bulan Desember semua kota besar di Jawa dan Sumatera telah jatuh ke tangan Belanda. Satu-satunya wilayah besar yang tetap di bawah kekuasaan Republik adalah Aceh, di mana Daud Beureu'eh memegang pimpinan. Belanda masih merasa akan lebih bijaksana jika tidak mengutak-atik Aceh. Situasi yang kacau pada saat itu yang diakibatkan oleh agresi militer Belanda membuat Kartosoewirjo lebih memfokuskan perjuangannya. Dalam suatu rapat Masjumi di Garut, yang dipimpin oleh Kartosoewirjo sendiri dan di mana semua organisasi yang bergabung dalam Masjumi harus mengirimkan wakilnya, diputuskan, bahwa Masjumi tjabang Garut diganti namanya menjadi Dewan Pertahanan Oemat Islam (DPOI). Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga DPOI sama seperti anggaran dasar Masjumi, hanya ditambahkan sebuah pasal baru yang berhubungan dengan pertahanan melawan tentara Belanda. Sebelum pembentukan DPOI di Garut, juga sudah dibentuk 2 Madjlis Pertahanan Oemmat Islam (MPOI) di Tasikmalaya dan di Ciamis. Untuk masalah pertahanan Sabilillah di bawah pimpinan R. Oni ditempatkan di bawah komando MPOI dan DPOI.

Dengan ditanda-tanganinya perjanjian Renville antara pemerintah Republik dengan Belanda. Dimana pada perjanjian tersebut berisi antara lain gencatan senjata dan pengakuan garis demarkasi van Mook. Sementara pemerintah RI harus mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia, maka menjadi pil pahit bagi Republik adalah bahwa tempat-tempat penting yang strategis bagi pasukannya di daerah-daerah yang dikuasai oleh pasukan Belanda harus dikosongkan, dan semua pasukan harus ditarik mundur ke Jawa Tengah. Karena persetujuan ini Tentara Republik resmi dalam Jawa Barat ialah Divisi Siliwangi mematuhi ketentuan-ketentuannya. Hal yang berbeda dengan pasukan gerilya Hizbullah dan Sabilillah bagian yang cukup besar dari kedua organisasi gerilya Jawa Barat, menolak untuk mematuhinya. Di antara satuan-satuan Hizbullah yang tetap tinggal, terdapat mereka yang dipimpin oleh Zainal Abidin di daerah Baluburlimbangan dan oleh Ateng Ku Jaelani Setiawan yang beroperasi sekitar Cicalengka, serta di daerah Cirebon di bawah pimpinan Agus Abdullah Sukunsari. Satuan-satuan Sabilillah yang tetap tinggal berada di bawah komando Enokh di daerah Wanaraja dan Garut, dan oleh Oni di daerah sekitar Gunung Cupu, sebelah Utara Tasikmalaya, dan satu batalyon lengkap

untuk bergerilya di daerah Bandung Selatan, yaitu batalyon 22 Jaya Pangrengot di bawah pimpinan Soegih Arto.

Gerakan Siliwangi ke Jawa Tengah menimbulkan akibat-akibat di wilayah itu yang sangat penting artinya bagi pencapaian terakhir kemerdekaan. Nasution dan para pengikutnya, yang sebagian besar adalah orang Sunda, membentuk suatu pasukan yang setia kepada pemerintahan Hatta dan segera timbul pertentangan dengan satuan-satuan setempat, yang beranggotakan orang-orang Jawa, yang cenderung kepada pimpinan Soedirman atau Front Demokrasi Rakyat di bawah pimpinan Amir Sjarifuddin. Pemerintah Hatta ingin mengurangi jumlah anggota angkatan bersenjata yang sangat besar, secara kasar diperkirakan sebesar 350.000 tentara reguler dan 470.000 tentara tidak reguler, yang menjadi tanggung jawabnya. Nasution pun lebih menyukai suatu angkatan bersenjata yang jumlah anggotanya lebih sedikit tetapi memiliki standar-standar profesionalisme yang lebih tinggi. Tentu saja pihak yang akan kalah dalam rencana rasionalisasi seperti itu tak terelakkan lagi pasti akan menjadi pejuang-pejuang yang mendukung lawan-lawan pemerintahan. Dengan terpecah-pecahnya pihak militer menjadi kelompok-kelompok sebagai akibat diajukannya usaha-usaha rasionalisasi tersebut, maka mulai timbul penculikan-penculikan, pembunuhan-pembunuhan, dan bentrokan-bentrokan senjata di wilayah Yogyakarta - Surabaya. Pada akhir bulan Agustus 1948 tampaknya ada kemungkinan terjadinya lagi perang saudara. Kini berlangsung suasana panas yang merupakan campuran dari siasat-siasat politik kaum elite, politik pihak militer, dan ketegangan-ketegangan kemasyarakatan di Jawa Tengah, sementara pasukan-pasukan Belanda telah mengambil posisi di barat, utara, dan timur Republik. Wilayah ini Timur Indonesia ini menjadi penting karena wilayah Maluku adalah suatu wilayah di mana Islam sudah lama ada.

Adapun reaksi Kartosoewirjo dengan adanya perjanjian Renville itu membuat suatu pernyataan bahwa "Amir Sjarifoedin la'natoellah" dituduh telah berbuat khianat dan menjual Jawa Barat kepada Belanda dan mengangkut semua senjata ke daerah Republik "soepaya Oemat Islam khoesoesnja dan rakjat Djawa Barat semoeanja tidak dapat mengadakan perlawanan terhadap Belanda".

Segera setelah persetujuan Renville, pada tanggal 30 Januari 1948 R. Oni berangkat ke Peuteuynunggal dekat Garut untuk berunding dengan Kartosoewirjo tentang masalah situasi politik dan militer dewasa itu. Keduanya sepakat, bahwa pasukan-pasukan Islam harus tetap berada di Jawa Barat untuk melanjutkan perjuangan bersama-sama dengan rakyat melawan Belanda dan "anggota-anggota Sabilillah dan Hizbullah yang turut mengundurkan diri harus dilucuti senjatanya dengan damai atau dengan paksa". Keputusan lain yang sangat penting

bahwa akan diadakan konferensi pada tanggal 10-11 Februari 1948 di desa Pangwedusan Distrik Cisayong, di mana harus hadir semua pemimpin Islam daerah Priangan.

Maka pada tanggal 10 Januari 1948, telah berkumpul 160 wakil-wakil organisasi Islam di Pangwedusan untuk mengadakan sebuah konferensi yang akan berlangsung dua hari. Di antara mereka hadir Kamran sebagai Komandan Teritorial Sabilillah, Sanusi Partawidjaja sebagai Ketua Masjumi Daerah Priangan, Raden Oni sebagai pemimpin Sabilillah Daerah Priangan, Dahlan Lukman sebagai ketua GPII, Siti Murtadji'ah sebagai ketua Poetri GPII dan Abdullah Ridwan sebagai ketua Hizbullah untuk Priangan. Sebagai ketua Masjumi cabang Garut hadir Saefullah, begitu juga 4 ketua DPOI yang lain. Dari Bandung dan Sumedang hadir juga masing-masing dua utusan dari cabang DPOI di sana, selain itu hadir juga dari Tasikmalaya dan Ciamis 3 orang anggota MPOI.

Dalam konferensi ini Kamran menuntut supaya pemerintah RI membatalkan perjanjian Renville dan "kalau pemerintah RI tidak sanggoep membatalkan Renville, lebih baik pemerintah kita ini kita boebarkan dan membentoek lagi pemerintahan baroe dengan tjorak baroe. Di Eropa doea aliran sedang berdjoeang dan besar kemoengkinan akan terjadi perang doenia III, ja'ni aliran Roesia lawan Amerika". Kamran selanjutnya menerangkan "Kalau kita di sini mengikoeti Roesia, kita akan digempoer Amerika, begitoe joega sebaliknja. Dari itoe, kita haroes mendirikan negara baroe, ja'ni negara Islam. Timboelnja Negara Islam ini, jang akan menjelamatkan Negara". Untuk itu menurut Kamran harus diadakan persiapan, antara lain harus dapat dikuasai satu daerah tertentu yang dapat dipertahankan sungguh-sungguh. Dahlan Lukman menerangkan, bahwa persatuan di masa lampau merupakan "persatuan ayam dan musang", dan kini ummat Islam memerlukan pimpinan yang baru dan kuat, yaitu seorang Imam. Pimpinan ini harus meliputi seluruh Jawa Barat. Selanjutnya dia mengusulkan supaya Masjumi dan seorang organisasinya harus menghentikan kegiatannya.

Affan Ridhwan dari GPII mengusulkan supaya pemerintah di Yogyakarta didesak agar Jawa Barat diserahkan kepada ummat Islam. Dan dia usulkan kepada Pengurus Besar Masjumi di Yogyakarta "soepaja Soekarno ditoereonkan, baik sandiwara atau tidak kalau perloe "Coup d'etat. Menanggapi hal tersebut Kartosoewirjo menjawab sebagai berikut, Jawa Barat bukanlah Shanghai, bukan negara internasional, dan kudeta hanya didjalankan oleh golongan ilegal, sedangkan Masjumi adalah sebuah partai yang legal. Sebuah negara berdiri hanyalah sebagai sarana tempat berkumpulnya komunitas manusia dalam pencarian identitas dan kebanggaan yang semu, di dalamnya juga terjadi fragmentasi berbagai manusia dengan segala simbol, atribut,

dan karakter. Maka tidaklah salah jika dikaitkan dengan hal ini meminjam istilah Clifford Geertz menggambarkannya sebagai "Theatre State".

Keputusan terpenting yang diambil dalam konferensi di Cisayong adalah membekukan Masjumi di Jawa Barat dan semua cabangnya dan "membentuk pemerintah daerah dasar di Jawa Barat yang harus dita'ati oleh seluruh umat Islam di daerah tersebut", serta mendirikan Tentara Islam Indonesia (TII). Dalam pemerintah dasar Jawa Barat yang diusulkan ini – Majelis Islam atau kadang-kadang disebut juga Majelis Umat Islam – organisasi-organisasi Islam yang ada harus bergabung. Ini akan menggantikan kedua Majelis Islam yang telah ada, yang didirikan di Garut dan Tasikmalaya pada tahun sebelumnya, yang sedikit banyak dibentuk atas garis yang sama. Ketua Majelis Islam ini adalah Kartosoewirjo sendiri yang juga bertanggung jawab dalam masalah pertahanan. Sebagai sekretaris diangkat Supradja, dan sebagai bendahara Sanusi Partawidjaja, sedangkan bidang penerangan dan kehakiman masing-masing dikepalai Toha Arsjad dan Abdul Kudus Gozali Tusi.

Beberapa hari sesudah konferensi Cisayong, tepatnya pada pertengahan bulan Februari 1948 dilangsungkan suatu pertemuan lain dengan tujuan memberikan bentuk yang kongkret kepada Tentara Islam Indonesia. Tidak hanya dibentuk Tentara Islam Indonesia yang sebenarnya, tetapi juga sejumlah korps khusus seperti Baris (Barisan Rakyat Islam) dan PADI (Pahlawan Darul Islam). Juga dibentuk Pasukan-pasukan Gestapu. Markas besarnya didirikan di Gunung Cupu, pangkalan pasukan Sabilillah yang dipimpin oleh R. Oni. Sedang R. Oni sendiri diangkat menjadi komandan daerah Tentara Islam Indonesia untuk Priangan. Dia juga menjadi komandan PADI, demikian pula menjadi kepala pasukan polisi rahasia Mahdiyin yang berarti terpimpin secara benar. Juga dibentuk korps polisi biasa. Mulanya badan ini disebut Badan Keamanan Negara, tetapi namanya diubah menjadi Polisi Islam Indonesia.

Setelah terbentuknya T.I.I.,--terbentuknya atas bantuan rakyat yang secara suka rela mendukung adanya aksi ini,-- sekarang T.I.I. telah memiliki kurang lebih 60 senjata ringan. Bahkan kondisi semakin lebih baik ketika dukungan diberikan oleh kesatuan di bawah pimpinan Zainal Abidin, Adah Djaelani Tirtapraja, Agus Abdullah, Danu Muhammad Hasan dan kelompok-kelompok kecil lainnya yang tidak ikut hijrah ke Jawa Tengah.

Kini R. Oni menempatkan batalyon-batalyon resimennya di lereng Gunung Cupu di daerah Gunung Mandaladatar, di antaranya untuk Batalyon I dikuasakan kepada S. Otong dari Bandung, Batalyon II dikuasakan kepada Zainal Abidin, Batalyon III dikuasakan kepada Adah Djaelani dari Singaparna. Seminggu setelah konferensi terjadilah pertempuran yang pertama dengan pasukan Belanda. Adapun Awal mula terjadinya peristiwa tersebut ketika sehari sebelumnya R. Oni

mengintruksikan kepada Moh. Ta'at salah seorang pasukan TII untuk patroli ke Lapangan terbang untuk mengintai pasukan Belanda, namun tidak didapatinya pasukan Belanda.

Kemudian pada tanggal 17 Februari 1948 satu regu pasukan TII sedang berpatroli di daerah Cirahung bertemu dengan pasukan Belanda yang sedang berjalan melewati daerah tersebut, maka tak dapat dihindarkan lagi terjadilah pertempuran. Yang kelak peristiwa ini diabadikan sebagai "Hari Angkatan Senjata". Kejadian ini memang mempunyai arti politis besar bagi perjuangan, karena rakyat terutama para mujahidin Darul Islam memaklumi bahwa tujuan mereka adalah terutama untuk melawan tentara Belanda. Pertempuran dengan Belanda masih terus berlangsung hingga akhir April 1948, ketika pasukan TII meninggalkan daerah kantong gerilya awal Mei dan memencar di daerah Tasikmalaya-Ciamis-Garut-Indihiang,--di mana di daerah tersebut telah diduduki tentara Belanda-- secara sporadis mulai diserang kembali oleh TII.

Sebelum terjadinya peristiwa tersebut, tepatnya pada tanggal 1-2 Maret 1948 diadakan konferensi di Cipeundeuy/Banturujeg di daerah Cirebon yang dihadiri oleh semua pimpinan cabang-cabang Masjumi daerah Jawa Barat seperti dari Banten, Jakarta, Bogor, Priangan, Cirebon, dan juga para komandan TII. Selain Kartosoewirjo hadir juga Sanusi Partawidjaja, R. Oni, Toha Arsjad, Agus Abdullah, Djamil, Kiai Abdul Halim dan wakil cabang Masjumi Jakarta Gozali Tusi. Ketika semua peserta konferensi hadir Kamran membuka acara tersebut. Dalam acara itu Sanusi Partawidjaja menjelaskan keputusan-keputusan konferensi di Pangwedusan, Oni menerangkan Pengleburan Tentara Hizbullah dan Sabilillah menjadi Tentara Islam Indonesia.

Ketika konferensi dilanjutkan pada hari berikutnya, semua keputusan-keputusan Pangwedusan disetujui dan Kartosoewirjo ditetapkan sebagai Imam di Jawa Barat. Keputusan berikutnya adalah Hizbullah Cirebon dilebur menjadi TII dan Kamran diangkat menjadi panglima Divisi. Selanjutnya Kartosoewirjo selaku Imam di Jawa Barat mengangkat tujuh anggota pimpinan pusat. Pimpinan Pusat tersebut dibagi tiga dan susunannya adalah sebagai berikut:

1. Bagian agama terdiri dari Alim Ulama yang "modern", yaitu Kiai Abdul Halim dan K.H. Gozali Tusi.
2. Bagian politik terdiri dari Sanusi Partawidjaja dan Toha Arsjad.
3. Bagian militer terdiri dari Kamran dan R. Oni.

Ketujuh orang ini diintruksikan melalui keputusan rapat tersebut untuk menjadi pemimpin yang bertanggungjawab di seluruh Jawa Barat "hingga di seluruh Indonesia kelak". Kemudian dari hasil rapat tersebut juga ditetapkan suatu "Program Politik Umat Islam" yang terdiri dari butir-butir berikut ini:

1. Memboeat brosoer tentang pemetjahan politik pada dewasa ini ja'ni perloenja lahir satoe negara baroe, ja'ni Negara Islam. Pengarang Kartosoewirjo (oentoek disiarkan ke seloeroeh Indonesia).
2. Mendesak kepada pemerintah Poesat Repoeblik Indonesia agar membatalkan semoea peroendingan dengan Belanda. Kalau tida' moengkin, lebih baik Pemerintah diboebarkan seloeroehnja dan dibentoek soeatoe pemerintah baroe dengan dasar Democratie jang sempoerna (Islam).
3. Mengadakan persiapan oentoek membentoek soeatoe Negara Islam jang akan dilahirkan, bilamana: Negara Djawa Barat a la Belanda lahir, atau Pemerintah Repoeblik Indonesia boebar.
4. Tiap-tiap daerah jang telah kita koeasai sedapat-dapat kita atoer dengan peratoeran Islam, dengan seidzin dan petoendjoek Imam.

Selain itu dibuat juga suatu "Daftar Oesaha Tjepat" yang harus menerangkan kepada rakyat bahwa perjanjian dengan Belanda tidak akan membawa kemerdekaan bagi Indonesia. Juga seluruh pegawai Republik dan semua Umat Islam yang bekerja untuk Belanda, begitu juga semua kepala desa yang berada atau tidak berada dibawa kekuasaan Belanda, supaya secepat mungkin "berjiwa Islam".

Ditetapkan juga untuk memperhebat penerangan tentang tauhid, amal saleh dan semangat berkorban hingga rakyat patut menjadi "warga negara Islam". Selain itu dengan segala daya upaya faham Jihad dan 'amal saleh harus diperdalam dan dipertinggi.

Sampai pada saat itu Kartosoewirjo beserta umat Islam masih berharap untuk dapat merealisasikan cita-citanya, yaitu pendirian Negara Islam secara legal, walaupun belum diproklamasikan secara terang-terangan, namun tidak pernah lenyap dari rencana umat Islam Jawa Barat yang akan dipersiapkan kelahirannya. Struktur militer dan pemerintah yang disusun Kartosoewirjo dan Oni, jelas dimaksudkan sebagai sebuah pemerintahan Islam yang akan menggantikan Pemerintahan Republik jika kalah dalam perang melawan Belanda.

Pada tanggal 1-5 Mei 1948 kembali diadakan konferensi yang ketiga di Cijoho, hasil terpenting yang diputuskan dalam rapat tersebut adalah perubahan nama Madjelis Islam Pusat menjadi Madjlis Imamah (kabinet) di bawah pimpinan Kartosoewirjo sebagai Imam. Madjlis Imamah itu terdiri dari lima "kementerian" yang dipimpin oleh masing-masing seorang kepala Madjlis, kelima Madjlis tersebut adalah:

1. Madjlis Penerangan di bawah pimpinan: Toha Arsjad.

2. Madjlis Keuangan di bawah pimpinan: S. Partawidjaja.
3. Madjlis Kehakiman di bawah pimpinan: K.H. Gozali Tusi.
4. Madjlis Pertahanan di bawah pimpinan: S.M. Kartosoewirjo.
5. Madjlis Dalam Negeri di bawah pimpinan: S. Partawidjaja.

Anggota Madjlis Imamah adalah Kamran sebagai Komandan Divisi TII Syarif Hidajat dan Oni sebagai Komandan Resimen Sunan Rachmat. Di samping itu dibentuk pula Madjlis Fathwa yang dipimpin oleh seorang Mufti Besar, dan anggota-anggotanya terdiri dari para Mufthi. Tugas Madjlis Fathwa ini sebagai penasehat Imam. Keputusan penting lainnya adalah mendirikan dan menguasai satu "Ibu Daerah Negara Islam", yaitu suatu daerah di mana berlaku "kekuasaan dan hukum-hukum agama Islam", yang mana daerah ini dinamakan Daerah I (D.I), daerah di luar Daerah I dibagi-bagi menjadi Daerah II (D.II) yang hanya setengahnya dikuasai oleh umat Islam dan Daerah III (D.III), ialah daerah yang masih dikuasai oleh pihak bukan Islam (Belanda). Untuk lebih jelasnya lagi diberi keterangannya sebagai berikut:

Daerah I (D.I)

Daerah D-I ini merupakan daerah yang hukum-hukum Islam telah berlaku pada kalangan umat Islam baik di bidang hukum, ekonomi, sosial , dan budaya. Di daerah ini pulalah kedudukan Imam beserta apartur Negara dalam menjalankan roda pemerintahan negara dan mempertahankan daerah yang telah dikuasai. serta mengusahakan untuk meluaskan daerah itu dan berusaha menghubungkan Daerah I dengan Daerah II sehingga Daerah II menjadi Daerah I.

Untuk menjalankan roda perekonomian pemerintahan Negara, dalam hal ini yang berwenang adalah Madjlis Keuangan yang telah dibentuk dari pusat sampai ke desa mewajibkan para penduduk menyerahkan 2,5 % dari pendapatannya sebagai pajak (infaq) kepada instansi sipil dan militer (TII) yang nantinya didistribusikan oleh Madjlis keuangan untuk kepentingan tiap-tiap Komandemen yang ada. Jika sistem ekonomi Islam seperti yang diterapkan oleh orang-orang DI, maka Cina di Indonesia akan berkembang secara alamiah dan tanpa ada tekanan-tekanan politik yang mengakibatkan krisis bagi mereka sendiri. Selama Indonesia merdeka--ketika rezim Sukarno dan Suharto berkuasa--kaum etnis Cina sering jadi korban penggayangan dan kerusuhan serta pembakaran dan pemerkosaan. Tidak seperti di RI, hubungan sipil dan militer menempatkan kaum tentara sebagai penjajah yang bertindak semena-mena dan bertindak represif, suka menyiksa dan membunuh rakyatnya sendiri.

Menjadi bagian terpenting dalam perjuangan DI/TII adalah didirikannya di Daerah I Madjlis Doa bagi para ulama dan "orang-orang yang suci hidupnya". Di Madjlis Doa itu siang-malam selalu

mendoa sedikit-dikitnya 41 orang, di antaranya harus ada seorang pemimpin. Hal-hal yang harus dilakukan di markas doa ialah sholat Isti'anah (hajat), syukur, membaca ayat-ayat Al-Quran sebagai doa, terutama ayat-ayat yang bertalian dengan perang, dzikir dan sholat Tahajud. Di samping itu mereka juga dididik dalam bidang ideologi dan politik. Kepada mereka diberi penerangan tentang situasi perjuangan dan jalannya perang yang sedang berlangsung.

Tugas ketua Madjlis Doa ialah badan yang bertugas mengumpulkan berita yang diperoleh melalui "ilham dan karomah Allah" yang disampaikan kepada pembesar yang tertinggi di tempat itu, baik kepada pemimpin sipil atau pemimpin militer, selanjutnya disampaikan ke pusat". Di samping itu manakala ada pemberangkatan pasukan TII ke medan perang, pemuka Madjlis Doa mengajak para penduduk untuk mengumandangkan shalawat badar untuk kepergian para pasukan supaya mereka "mati syahid" dalam setiap pertempuran.

Daerah II (D II)

Daerah D II merupakan daerah percampuran antara penduduk yang berwarga Negara Islam Indonesia dan penduduk yang berwarga negara Republik Indonesia, di mana lokasi teritorialnya adalah perbatasan kota dan desa. Di daerah ini tidak berlaku hukum Islam, namun manakala ada penduduk warga Negara Islam Indonesia yang melakukan kesalahan (berbuat dosa terhadap ajaran agama), mereka dibawa ke daerah D I untuk diputuskan permasalahannya. Di daerah (D. II) inilah sebagai tempat front perang antara pasukan TII dengan TNI. Kewajiban semua pemimpin di Daerah II adalah, mengusahakan dengan sungguh-sungguh dalam menggalang negara untuk menarik simpati semua penduduk setempat supaya mereka tergugah hatinya untuk bersama-sama berjuang membela kebenaran yang ditunjukkan oleh Negara Islam Indonesia, dan mengusahakan dengan sungguh-sungguh supaya D.II berubah menjadi D.I. Kewajiban infaq 2,5% dari penduduk diserahkan melalui petugas yang diangkat oleh Madjlis Keuangan kemudian diberikan kepada seorang kurir daerah D I untuk dibawa ke Pusat, sementara wajib dinasnya berlangsung selama seminggu.

Daerah III (D.III)

Di Daerah D.III adalah merupakan daerah musuh yang berlokasi di pusat-pusat kota, dan penduduk yang menjadi warga Negara Islam Indonesia di daerah D.III ini ditugaskan untuk mencari dana, senjata dan menjadi intel. Begitupun tentang kewajiban infaq 2,5% dari penduduk diserahkan kepada militer (TII).

Sistem perluasan pengaruh ini dapat berfungsi berdasarkan sebuah prinsip yang sederhana, tapi efisien, dan dalam prakteknya berjalan sebagai berikut:

Setelah sebuah daerah dimasukkan ke dalam Daerah I, menurut luas daerah tersebut ditempatkan seorang kepala desa, lurah atau camat. Pemimpin lokal tersebut sekarang berusaha memperluas daerahnya sesuai dengan kedudukannya, karena daerah yang dikuasai jarang seluas seperti yang diharapkan, dan dia juga berusaha untuk memperkuat pengaruh di daerahnya. Bila kepala desa, lurah atau camat yang bersangkutan yang sekarang – setelah komando sipil dan militer disatukan – juga bertanggung jawab terhadap operasi militer di daerahnya telah berhasil mengkonsolidasi kekuasaannya, maka selanjutnya dia berusaha untuk dapat mengontrol Daerah II yang berbatasan dengan daerahnya. Untuk mencapai tujuannya, digunakan TII, PADI dan Gestapo. Sistem ini memberikan motivasi yang cukup kuat kepada masing-masing penguasa lokal untuk memperluas daerah mereka, sebab bila mereka berhasi memperluas daerahnya, mereka akan naik satu tingkat dalam hirarki administrasi. Dengan demikian seorang kepala desa naik menjadi lurah, lurah menjadi camat dan camat menjadi bupati.

Konsep tentang pembagian daerah-daerah jelas dipengaruhi oleh hukum Islam, yang membagi dunia ke dalam Dar-al Islam, di mana hidup umat Islam dan di mana hukum Islam dipraktekkan sepenuhnya. Sedangkan Dar-al-harb adalah daerah yang dihuni pihak bukan Islam. Karena tugas sebuah Negara Islam ialah menjalankan hukum-hukum Islam dan menetapkan Islam sebagai ideologi yang dominan bagi setiap masyarakat, maka secara teoritis Dar-al-Islam berada dalam keadaan perang yang terus menerus dengan Dar-al-harb, di mana jihad merupakan alat bagi negara untuk mengubah Dar-al-harb menjadi Dar-al-Islam.

Untuk menjaga keutuhan dan menegakkan disiplin gerakan, maka melalui keputusan Konferensi Cijoho diputuskan bahwa setiap anggota haruslah mengangkat sumpah setia (bai'ah) terhadap pimpinannya. Dengan demikian diharapkan terjaminnya loyalitas umat terhadap pimpinannya. Berdasarkan peraturan tersebut di Daerah I (D-I) orang-orang berikut ini harus mengangkat sumpah dari dan kepada:

Imam terhadap Madjlis Imamah (kabinet)

Kepala Madjlis (menteri) terhadap Imam

Residen terhadap Imam

Staf Residen terhadap Residen

Bupati terhadap Imam

Staf Bupati terhadap Bupati

Camat terhadap Bupati

Staf Camat terhadap Camat

Kuwu (pemimpin lokal) terhadap Bupati

Artinya, semua jabatan memiliki garis pertanggung-jawaban yang jelas, antara satu menjadi imam bagi yang lain dan juga sebaliknya serta begitu seterusnya. Prinsip yang sama juga berlaku bagi Daerah II dan Daerah III. Dalam Daerah ini hanya pegawai tinggi langsung harus mengangkat sumpah terhadap Imam. Begitu juga bagi militer berlaku prinsip yang sama, mulai dari Komandan Divisi yang harus mengangkat sumpah terhadap Imam, hingga ke tentara bawahan yang harus mengangkat sumpah terhadap atasannya. Bunyi dari sumpah (mubay'ah) tersebut adalah:

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
Bismillahi tawakkalna 'alallah, lahaoela wala qoewwata illa billah.

Asjhadoe an-la ilaha illallah, wa asyhadoe anna Moehammadr Rasoeloellah.

Wallahi. Demi Allah!

1. Saja menjatakan bai'at ini kepada Allah, di hadapan dan dengan persaksian Komandan Tentara/Pemimpin Negara, jang bertanggoeng djawab.
2. Saja menjatakan Bai'at ini soenggoeh-soenggoeh karena ikhlas dan soetji hati, lillahi ta'ala semata-mata, dan tidak sekali-kali karena sesoeatoe di loear dan ke loear daripada kepentingan Agama Allah. Agama Islam dan Negara Islam Indonesia.
3. Saja sanggoep berkorban dengan djiwa, raga dan njawa saja serta apapoen jang ada pada saja, berdasarkan sebesar-besar taqwa dan sesempoerna-sempoerna tawakal 'alallah, bagi: mentegakkan kalimatillah, li-I'lai Kalimatillah --, dan mempertahankan berdirinja Negara Islam Indonesia; hingga hoekoem Sjari'at Islam seloeroehnja berlakoe dengan seloeas-loeasnja dalam kalangan Oemmat Islam Bangsa Indonesia di Indonesia.
4. Saja akan tha'at sepenoehnja kepada perintah Allah, kepada perintah Rasoeloellah dan kepada perintah Oelil Amri saja, dan mendjaoehi segala larangannja, dengan toeloes dan setia-hati.
5. Saja tidak akan berkhianat kepada Allah, kepada Rasoeloellah dan kepada Komandan Tentara, serta Pemimpin Negara, dan tidak poela akan memboeat noda atas Oemmat Islam Bangsa Indonesia.

6. Saja sanggoep membela Komandan-komandan Tentara Islam Indonesia dan Pemimpin-pemimpin Negara Islam Indonesia, daripada bahaja, bentjana dan khijanat darimana dan apapoen djoega.

7. Saja sanggoep menerima hoekoeman dari Oelil-Amri saja, sepandjang ke'adilan hoekoem Islam, bila saja inkar daripada Bai'at jang saja njatakan ini.

8. Semoga Allah berkenan membenarkan pernjataan Bai'at saja ini, serta berkenan poela kiranja Ia melimpahkan Tolong dan Koernia-Nja atas saja sehingga saja dipandaikan-Nja melakoekan toegas soetji, ialah haq dan kewajiban tiap-tiap Moedjahid: menggalang Negara Koernia Allah, Negara Islam Indonesia! Amin.

9. Allahoe Akbar! Allahoe Akbar! Allahoe Akbar!

Dengan demikian, perjuangan Darul Islam adalah perjuangan kaum sufi yang sangat terkenal dalam bentuk-bentuk bai'at dan thariqat. Pada tanggal 8 Juli 1948 Kartosoewirjo mengutus para kurir di antaranya Abdul Hadi, Soelaiman dan Nanggadisoera untuk membawa pesan-pesan pribadi berupa rencana akan mendirikan Negara Islam kepada sejumlah politikus di Yogyakarta.

Dua hari sebelumnya, Kartosoewirjo juga memberitahukan rencananya kepada Komandan Divisi I/TII Tjakrabuana (Kamran), bahwa ia akan menyampaikan pesan kepada Pengurus Besar Masjumi di Yogyakarta. Dalam pesan tersebut dia ingin menghindarkan timbulnya salah pengertian di masa yang akan datang. Pesan lisannya disampaikan kepada Anwar Tjokroaminoto, Ramlan, A.M. Soebakin, Soedardjo, Soemadhi dan Abikusno Tjokrosujoso. Dalam surat pengantarnya Kartosoewirjo meminta agar mereka datang ke Jawa Barat untuk bersama-sama membicarakan langkah-langkah selanjutnya. Surat pengantar yang singkat itu hanya berisi 6 butir:

> *Sedjak ditandatanganinja Renville kami Oemmat Islam di Djawa Barat telah menentoekan sikap jang tegas.*
>
> *Akibat daripada sikap itoe, terdjadilah Perdjoeangan jang dahsjat, sehingga darah sjoehada teroes mengalir.*
>
> *Tjita-tjita Perdjoeangan kami ini, tidak hanja meroepakan Perdjoeangan regional akan tetapi hendaknja merata keseloeroeh kepoelauan Indonesia.*

Dari itoe oentoek mensatoekan bentoek dan langkah Perdjoeangan kita, di samping keterangan-keterangan jang disampaikan oleh oetoesan kami, diharap soepaja di antara saudara-saudara jang bertanggoeng djawab kepada Perdjoeangan oemmat di sini datang ketempat saja oentoek membitjarakan bentoek dan langkah Perdjoeangan oemmat pada dewasa ini.
Semoga dengan djalan ini, koernia Allah, lahirnja Negara Islam jang merdeka, akan datang dengan setjepat-tjepatnja.

Selesai

Dari surat Kartosoewirjo kepada Kamran juga dengan jelas dapat dilihat bahwa untuk suatu hubungan yang tidak terputus-putus dengan daerah Republik adalah penting sekali. Dia juga memberitahukan Kamran, bahwa dia telah mengirim surat kepada pemimpin-pemimpin di daerah Republik, di mana dia menjelaskan situasi politik dan militer agar supaya mereka "jangan salah paham dan dapat pula menghilangkan salah paham". Kartosoewirjo menulis sebagai berikut:

"*Djoega saja ingin sekali memperingatkan kepada soeatoe hal jang tampaknja ketjil, tapi amat penting sekali dalam perdjoeangan kemerdekaan dan perdjoeangan agama, ja'ni terbentuknja pos-pos di sepandjang djalan antara kita dengan daerah Repoeblik. Satoe djalan doeloe (reote) boleh dimoelai, asal sempoerna. Djangan poetoes-poetoes. Selain daripada itoe, djoega tentang bentoekan koerir jang tetap, jang berangkat dan datang pada waktoe jang tentoe. Saja harap, soepaja kita dengan kawan-kawan di daerah Repoeblik meroepakan rantai jang erat sekali. Insja Allah, iteolah salah sateo djalan dan oesaha, menoejoe kepada Revoloesi Islam Totaliter, di mana komando kita akan dihargakan oleh Oemmat dan Ra'iat seloeroehnja, dan berharga poela dalam pandangan doenia internasional seloeroehnja. Lebih-lebih lagi, di mana-mana tempat dan di tiap-tiap penjoeroe doenia soedah moelai tampak menjala-njala api, jang agaknja akan mendjadi pangkal timboelnja Perang Doenia Ketiga*".

Kemudian Kartosoewirjo merumuskan langkah-langkah menuju kepada suatu Revolusi Islam melanjutkan lagi:

"*Oleh sebab itoe, soepaja dioesahakan meletoesnja Pemberontakan Ra'iat, atau Revoloesi Islam, baik jang meroepakan pentjoelikan, pemboenoehan, sabotasje, dan – di mana moengkin – pertempoeran*".

Pada tanggal 25 Agustus 1948 keluarlah Maklumat yang pertama dari Pemerintah Islam Indonesia yang isinya "mengingat bahwa keadaan dewasa ini adalah keadaan perang

menghadapi keganasan dan kezaliman jang dilakoekan oleh tentara Belanda serta menimbang bahwa tiap-tiap Oemmat Islam wadjib melakoekan Djihad fi sabilillah, oentoek menolak tiap-tiap kedjahatan dan kezaliman dan menegakkan keadilan dan kebenaran maka memoetoeskan seloeroeh pimpinan sipil dari Residen sampai kepala desa, begitoe poela pimpinan oemmat di daerah sampai di desa diberi toegas sebagai Komandan Pertahanan di daerahnja masing-masing. Seloeroeh kepala ketentaraan di desa, Ketjamatan dan selandjoetnja, diberi toegas sebagai Komando dan Pertempoeran di tempatnja masing-masing". Dan dua hari kemudian tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1948 diadakan penyusunan "Qanun Asasi" yaitu Undang-undang Dasar Negara Islam Indonesia dan telah selesai.

Pada saat itu di Republik Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi yang amat sangat. Sebagai akibat bekumpulnya begitu banyak pasukan di wilayah Republik, maka situasi pangan di Jawa Tengah semakin memburuk, karena di daerah tersebut sudah terisolasi dari "gudang beras" Jawa Barat dan Jawa Timur, dan juga pelabuhan Semarang sudah dikuasai Belanda. Terjadilah kelaparan di sana sini, pengangguran, serta pemogokan kerja, sementara rencana demobilisasi yang direncanakan oleh Hatta menimbulkan kegelisahan dalam tubuh Angkatan Bersenjata.

Melihat terjadinya krisis seperti ini, bagi setiap orang yang berjiwa revolusioner sebagai satu kesempatan baik untuk bergerak menjalankan aksinya. Peluang ini dipergunakan oleh PKI untuk menjatuhkan Pemerintahan Republik yang berdasarkan Pancasila, dan menggantinya dengan negara Komunis. Maka pada tanggal 18 September 1948 yang diarsiteki Muso dan Amir Sjarifudin mengumumkan berdirinya Sovyet Republik Indonesia di Madiun. Peristiwa yang serupa juga terulang pada tanggal 30 September 1965, dimana PKI yang berjiwa munafik itu memanfaatkan krisis ekonomi dan politik yang melanda tubuh Republik Indonesia untuk menggulingkan kekuasaan Sukarno. Kesaktian Pancasila yang dirancang oleh Sukarno ternyata tidak mampu membendung arus krisis, sehingga mendamparkan perahu Republik Indonesia untuk kesekian kalinya. Namun dari serangkaian peristiwa kudeta yang dilakukan oleh PKI dalam mengadakan revolusinya, meminjam istilah Herring Aborted Revolt , sebuah revolusi yang diaborsi, dimana setiap gerakannya tanpa persiapan matang sehingga setiap aksinya mengalami kegagalan, disamping itu dalam penumpasan pemberontakannya pun Pemerintah hanya memerlukan waktu sekejap.

Propaganda PKI kini menunjukkan bahwa partai ini telah menjadi benar-benar bersifat Indonesia. PKI kurang menekankan doktrin-doktrin teoritis Marx dan Lenin, melainkan lebih banyak berbicara dengan bahasa yang menarik bagi rakyat Indonesia, khususnya kaum abangan (kaum muslim nominal) Jawa. Masyarakat tanpa kelas dikemukakan sebagai penjelmaan kembali dari

negara Majapahit yang diromantiskan, yang dipandang sebagai zaman persamaan derajat yang mulia sebelum datangnya bangsa Belanda dan secara berarti, sebelum Islam. Pahlawan-pahlawan PKI adalah Dipanagara, Kyai Maja, dan Sentot dari Perang Jawa. Ramalan-ramalan yang bersifat mesianistis mengenai Ratu Adil juga dimanfaatkan sebagai daya tarik PKI. Dan ada suatu versi lagi dari kesemuanya ini, yaitu Komunisme Islam. Antara pembebasannya dari penjara pada akhir tahun 1922 dan pengasingannya ke Irian pada bulan Juni 1924. Haji Misbach menyebarkan Komunisme Islam di wilayah Surakarta. Komunisme Islam juga tersebar di Minangkabau dan di Jawa Barat. Perlu dicatat bahwa walaupun murid-murid sekolah Islam Modern sering kali tertarik pada Komunisme Islam, gerakan itu kebanyakan dipimpin oleh guru-guru Sufi dan para tokoh lain dari bentuk-bentuk Islam yang lebih tradisional. Para pemimpin Islam Modern dengan dedikasi mereka pada keortodoksan berdasarkan atas Quran dan Hadist merupakan penentang utama terhadap Komunisme Islam. Selain itu ada juga pemikiran yang mencoba mengkonstruksi tradisi jawa dalam politik di Inoesia dengan mengemukakan pemikiran gotong-royong sebagai contoh teladan yang seakan-akan mengatasi ajaran Islam tentang ta'awuniyah (saling tolong-menolong dalam kebaikan). Bahkan politik Indonesia dimainkan oleh para penguasa Jawa dari dulu hingga Soekarno dan Soeharto adalah suatu permainan wayang (foreshadow play).

Kini terjadi pertikaian antara SI dan PKI. Suatu federasi dari serikat-serikat dagang mereka, yang terdiri dari dua puluh dua serikat dan 72.000 orang anggota di bawah pimpinan Semaun, didirikan pada bulan Desember 1919. Akan tetapi, pemimpin serikat sekerja dari CSI, Surjopranoto, yang dijuluki 'raja mogok', segera mempersoalkan Kepemimpinan Semaun sehingga hancurlah federasi tersebut. Kemudian pada bulan November 1920 surat kabar PKI yang berbahasa Belanda, Het vrije woord ('Kata yang Bebas'), menerbitkan tesis-tesis Lenin tentang masalah-masalah nasional dan penjajahan yang meliputi kecaman-kecaman terhadap Pan-Islam dan Pan-Asianisme.

SI kini makin lama makin dipengaruhi oleh Haji Agus Salim dan orang-orang lain yang mendukung Pan-Islam. Akibatnya terjadi pertikaian secara terbuka yang sengit, dan tidak menjadi soal apakah langkah-langkah pemutarbalikan yang diusahakan PKI tidak dapat mengelakkan tuduhan bahwa organisasinya adalah anti-Islam. Persaingan-persaingan sengit yang bersifat pribadi yang memecah gerakan politik Indonesia kini telah mencapai definisi ideologis. Dengan menghebatnya pertikaian secara teruka yang berapi-api dalam pertemuan-pertemuan dan surat kabar-surat kabar, maka dasar keanggotaan rakyat yang katanya dimiliki SI bahkan lebih cenderung lagi keluar sama sekali dari organisasi-organisasi politik.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh beberapa orang pemimpin untuk menyelesaikan pertikaian-pertikaian tersebut mengalami kegagalan. 'Disiplin partai' disetujui dalam kongres SI pada bulan Oktober 1921. Dengan adanya disiplin partai tersebut maka seorang anggota SI tidak mungkin lagi menjadi anggota partai lain (walaupun ada beberapa pengecualian, misalnya, Muhammadiyah). Anggota-anggota PKI kini dikeluarkan dari CSI, tetapi pertikaian tetap harus diselesaikan di setiap cabang SI. Sebagai akibatnya SI terpecah dalam cabang-cabang 'SI Merah' dan 'SI Putih'. Semaun meninggalkan Indonesia menuju ke Uni Soviet, sedangkan Tjokroaminoto kini dipenjarakan. Dengan tidak adanya kedua tokoh itu, seorang Minangkabau yang bernama Tan Malaka (1897-1949) melakukan beberapa usaha untuk memulihkan kerja sama PKI-SI namun sia-sia saja. Pada tahun 1922 meletus pemogokan besar-besaran pertama di dalam serikat buruh pengadaian yang dipimpin oleh Abdul Muis dari CSI. PKI merasa wajib menyatakan dukungannya. Pemogokan tersebut dapat dipatahkan oleh pemerintah hanya dengan memecat para pegawai yang mogok, sedangkan Muis dan Tan Malaka kedua-duanya diasingkan.

Pada bulan Mei 1922 Semaun kembali memasuki kancah yang nyata-nyata merupakan malapetaka. Dia segera berusaha untuk mendirikan kembali serikat-serikat sekerja PKI serta menegakkan kembali pengaruh PKI pada cabang-cabang dan sekolah-sekolah SI. Tjokroaminoto dibebaskan dari penjara pada bulan Mei 1922 (dia secara esmi dibebaskan dari tuduhan melakukan sumpah palsu pada bulan Agustus); dia telah bertekad melepaskan diri untuk selama-lamanya dari PKI, yang antara lain telah menyebutnya sebagai seorang pemabuk yang tidak jujur. Dalam kongres SI pada bulan Februari 1923 dia mendirikan Partai Sarekat Islam yang memiliki disiplin partai dan bertekad akan mendirikan cabang partai ini di mana saja yang ada cabang 'SI Merah'. Cabang-cabang 'SI Merah' kini diberi nama baru Sarekat Rakyat, dan pertikaian dilanjutkan dengan lebih sengit lagi .

Pada pertengahan tahun 1923 Semaun dibuang ke Eropa setelah pemerintah berhasil menumpas suatu pemogokan yang dilancarkan oleh serikat buruh kereta api dan trem (VSTP) yang dipimpinnya. Darsono menjadi pimpinan PKI. Pengaruh Agus Salim di dalam CSI kini mendorong organisasi ini untuk menempuh kebijakan nonkooperasi (organisasi ini menarik mundur anggota-anggotanya yang duduk di dalam Volksraad), yang disebut hijrah untuk mengenang hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Medinah pada tahun 622 M. CSI kini menjauhkan diri dari setiap aksi politik yang penting. Ketika CSI semakin lama menjadi semakin tidak aktif, maka PKI mulai melancarkan kampanyenya yang terakhir untuk mengabil alih kepemimpinan atas pergerakan rakyat yang nyaris padam. Kini kancah utama perjuangan berada di tangan apa yang tersisa dari cabang-cabang SI pedesaan yang seperti biasa sukar dikendalikan.

Sementara itu dalam maklumat berikutnya yang keluar pada tanggal 28 Oktober 1948, diumumkan perubahan susunan Dewan Imamah. Berhubung dengan perubahan suasana politik dunia dan pergeseran serta peralihan lapangan, sifat dan corak perjuangan politik militer di Indonesia pada dewasa ini, maka dengan secara referendum antara anggota-anggota Dewan Imamah pada tanggal 6 Oktober 1948 telah diambil beberapa keputusan, yang mengubah seluruh susunan Pimpinan Negara dan Pimpinan Tentara, serta siasat perjuangan kedepan, menuju kepada Mardhatillah, yang berwujudkan Dunia Islam (Darul Islam) di dunia yang fana ini dan Darussalam di Akhirat yang baqa kelak.

Adapun perubahan susunan Dewan Imamah sebagai berikut:

Sdr. Kalipaksi (Kartosoewirjo) diganti oleh Sdr. H.I.M. Tjokro.

Sdr. Tjakrabuana (Kamran) diganti oleh Sdr. H.S. Hidayatullah.

Sdr. K.H. Dajeuhluhur (K.H. Gozali Tusi) diganti oleh Sdr. Chodimudin.

Sdr. K.H. Mandaladatar (R. Oni) diganti oleh Sdr. S. Rahmat.

Sdr. Jogaswara (Toha Arsjad) diganti oleh Sdr. A. Hamami.

Sdr. K.H. Kalisari (S. Partawidjaja) diganti oleh Sdr. H.M. Ridho.

Juga dijelaskan dalam Maklumat No. 2 tersebut bahwa kedudukan Pemerintah Negara Islam Indonesia dan Pusat Pimpinan Majlis Islam beralih kesuatu tempat untuk mengamankan perjuangan. Di samping itu bahwa di ibu kota Republik telah diangkat wakil atau consul Negara Islam Indonesia, ialah Sdr. O. Ridjalullah, begitu pula di daerah lain di Indonesia sudah pula diangkat beberapa orang yang bertanggung jawab, di mana tempat tinggal mereka pada waktu itu belum perlu diumumkan.

Dalam Maklumat berikutnya yang dikeluarkan pada awal November 1948, Kartosoewirjo menerangkan bahwa,"Sitoeasi loear negeri pada dewasa ini, teroetama pertentangan antara blok Roesia dan blok Amerika (Komoenis dan Kapitalis) makin hari makin bertambah genting-roentjing, sehingga sewaktoe-waktoe boleh timboel mara bahaya doenia jang amat mendahsyatkan. Tingkat peroendingan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda telah mendekati kepada poentjak batas kemoengkinan, sehingga kata poetoes dengan cara

damai hampir-hampir tidak dapat diperoleh, mengingat kekejaman dan keganasan jang dilakoekan oleh pihak Belanda dan kaki-tangannja soedah amat djaoeh melaloei batas-batas hoekoem kemanoesiaan dan hoekoem Agama. Oentoek menghadapi kemoengkinan jang sewaktoe-waktoe boleh timboel daripada kepentingan doenia loear dan dalam (Internasional dan Nasional), maka wadjiblah tiap-tiap Moeslim dan Moeslimat khoesoesnja serta seloeroeh Oemmat Islam Bangsa Indonesia oemoemnja, menjelesaikan dan menjempoernakan segala kelengkapan dan kekoeatan, oentoek melakoekan wadjib soetji jang berwoedjoedkan "Perang Soetji Moethlaq" atau "Perang Totaliter" melawan dan mengenjahkan semoea moesoeh Agama dan moesoeh Negara, hingga Allah berkenan menegakkan kerajaan-Nja di tengah-tengah masjarakat Oemmat Islam Bangsa Indonesia.

Di dalam Maklumat itu Kartosoewirjo mengeluarkan "Komando Umum" berupa kebulatan tekad dan niat bersama-sama untuk melenyapkan segala angkara murka, mulai benih sampai akar-akarnya, bahwa hanya Allah sajalah Yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Serta mengajak tiap-tiap masyarakat dan warga Negara mempersenjatai dirinya dengan alat apapun juga yang ada padanya. Saat pecahnya perang Dunia ketiga akan bersamaan dengan saat mulainya perang antara Republik dengan Belanda.

Kira-kira seminggu kemudian tepatnya pada tanggal 14 Desember 1948, benar-benar terjadi perang lagi antara Belanda dengan Republik. Pasukan Belanda menyerbu daerah Republik dan memulai Agresi Militer yang kedua. Dengan demikian Belanda sekarang juga melanggar perjanjian Renville yang telah disepakati bersama. Kota Yogyakarta diserang oleh Belanda dari darat dan udara, dalam waktu yang cepat Belanda telah berhasil pula menawan anggota kabinet Republik di antaranya Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta yang kemudian ditawan ke Rantau-Prapat dan Bangka.

Adapun reaksi Kartosoewirjo terhadap perkembangan terbaru ini, dia mengumumkan Jihad Fi Sabilillah, sampai semua musuh-musuh Islam, rakyat dan Allah berhasil diusir dan Negara Kurnia Allah, "Negara Islam Indonesia (NII), dapat didirikan. Melalui maklumat No.5 yang isinya adalah:

Bismillahirrahmanirrahim.
Assa lamoe 'alaikoem w.w.,

Mengingat:
Isi ma'loemat Imam No. 3, bertarich 1 Moeharram 1368 atau 2 Nopember 1948, tentang persiapan Perang Soeci, Perang Totaliter, Perang Ra'iat dan Revoloesi Ra'iat seloeroehnja, menghadapi pendjadjahan Belanda.

Serboean Belanda kedaerah Repoeblik Indonesia pada tanggal 18/19 Desember 1948. Dan Ditangkap dan ditawannja beberapa Pemimpin besar, jang memegang tampoek Pemerintahan Repoeblik Indonesia, di antaranja: Presiden, Wk. Presiden, Ketoea KNIP, Menteri Loear Negeri, dll-nja lagi.

Berpendapat:
Bahwa kini telah tiba sa'atnja oentoek melakoekan :

PERANG SOETJI, PERANG TOTALITER, PERANG RA'IAT SELOEROEHNJA

Menghadapi Belanda.

Komando:
Diperintahkan kepada seloeroeh lapisan Oemmat Islam Bangsa Indonesia, oentoek moelai melakoekan Perang Soetji Moethlak, Perang Totaliter iteo, hingga pendjadjahan hilang moesna sama sekali. Dan Diperintahkan kepada seloeroeh Angkatan Perang Negara Islam Inonesia, oentoek mempelopori dan membantoe ra'iat, hingga Revoloesi Islam selesai dan Negara Islam Indonesia berdiri dengan sempoernanja, di seloeroeh Indonesia.

Firman Allah:

Infiroe khifafan wa tsiqalan wa jahidoe bi amwalikoem wa anfoesikoem fi sabilillah!

Inna fatahna laka fat-han moebina……!!!

Madinah, 19 Safar 1368.

20 Desember 1948.

Pemerintah Negara Islam Indonesia,

Imam: S.M. Kartosoewirjo.

Dioemoemkan di Madinah,

Pada tanggal 19 Safar 1368/20 Desember 1948

Sekr. Negara:

BINTANG-BOELAN.

Kartosoewirjo menyerukan pentingnya satu kesatuan komando dan kesatuan pimpinan untuk menghindarkan politik "Divide et impera" Belanda di masa yang akan datang. Dan dia

menerangkan, bahwa dia sebagai pimpinan Negara Islam Indonesia yakin akan sanggup untuk memegang kesatuan komando itu.

Maka diumumkan kembali melalui maklumatnya No.6 tanggapan mengenai kejatuhan pemerintah Republik Indonesia yang isinya antara lain:

"Pada tanggal 18-19 Desember 1948, tentara Belanda telah moelai menjerboe daerah Repoeblik dan pada tanggal 19 Desember 1948 Pembesar-pembesar Pemerintah Repoeblik soedah djatoeh di tangan Belanda, ditangkap dan ditawan. Dengan adanja kedjadian dan peristiwa jang amat pahit itoe, maka djatoehlah Repoeblik sebagai Negara.

Djangan dikira, bahwa dengan djatoehnja Pemerintah Repoeblik (Soekarno-Hatta) dan ditandatanganinja soeatoe naskah keadaan akan aman dan tenteram, rakjat akan makmoer dan soeboer.

Tidak, sekali-kali tidak!

Melainkan djatoehnja Pemerintah Repoeblik Soekarno-Hatta dan pil-pahit jang terpaksa ditelan oleh rakjat itoe, insja Allah bagi Oemmat Islam, jang masih berideologi Islam, akan mendjadi sebab bangkit dan bergeraknja, mengangkat sendjata, menghadapi moesoeh djahanam.

Oleh sebab itoe, tiada djalan lain bagi Oemmat Islam Bangsa Indonesia, istimewa jang tinggal di daerah Repoeblik, melainkan: sanggoep menerima Koernia Allah, melakoekan Djihad fi Sabilillah, melakoekan Perang Soetji, bagi mengenjahkan segenap moesoeh Islam, moesoeh Negara dan moesoeh Allah, dan "last but not least" mendirikan Negara Koernia Allah, ialah Negara Islam Indonesia.

Seroean Kami: Boelatkanlah niat soetji, niat membela Agama, Negara dan Oemmat. Dengan tekad "Joeqtal aoe Jaghlib" dan dengan kejakinan jang tegoeh, bahwa Allah akan memberi perlindoengan kepada orang-orang dan Bangsa serta Oemmat jang memperdjoeangkan Agama-Nja Insja Allah.

Kepada saudara-saudara dan handai taulan daripada Bangsa Indonesia, jang masih mengalir darah "Repoeblikeinen" dalam toeboehnja dan masih berdjiwa perdjoeangan: Ketahoeilah ! Bahwa perdjoeangan jang kami oesahakan hingga berdirinja Negara Islam Indonesia itoe adalah kelandjoetan perdjoeangan kemerdekaan, menoeroet dan mengingat Proklamasi 17 Agoestoes 1945! Sekarang soedahlah tiba sa'atnja, segenap Bangsa Indonesia jang mengakoe tjinta Kemerdekaan, tjinta Bangsa tjinta tanah air, tjinta agama, menanggoeng wajib soetji, melakoekan perlawanan sekoeat moengkin terhadap kepada Belanda. Ketahoeilah poela! Bahwa

tiada soeatoe Kemerdekaan jang dapat direboet, hanja dengan gojang-gojang kaki di atas koersi belaka. Kemerdekaan kita, kemerdekaan Negara dan Kemerdekaan Agama, haroes dan wadjib direboet kembali dengan darah!

Hai, Pemimpin-pemimpin Islam dan Oemmat Islam seloeroehnja! Anggaplah serboean Belanda dan djatoehnja Pemerintah Repoeblik Soekarno-Hatta itoe, sebagai Koernia Toehan, jang dengan itoe terboekalah kiranja lapangan baroe, lapangan djihad dan kesempatan jang seloeas-loeasnja oentoek menerima Koernia jang lebih besar lagi daripada Azza wa Jalla, ialah: Lahirnja Negara Islam Indonesia jang merdeka. Terimalah Koernia Allah itoe, walau agak pahit ditelannja sekalipoen."

Dengan berakhirnya Republik di Yogyakarta -- dengan dikibarkannya bendera putih di Karesidenan Yogyakarta -- sebenarnya telah terdapat vakuum kekuasaan, yang oleh Kartosoewirjo dipandang sebagai saat yang tepat untuk memproklamasikan Negara Islam Indonesia. Namun dia masih tetap mencoba untuk memperoleh pimpinan komando tertinggi secara legal. Dan Kartosoewirjo sendiri telah menyatakan bahwa perjuangannya adalah lanjutan dari proklamasi 17 Agustus 1945. Dan dia berharap agar Negara Islam Indonesia yang sudah dia bentuk akhirnya akan dilegalisir meskipun tanpa proklamasi.

Aksi militer Belanda kedua yang dilancarkan kepada pemerintah RI punya akibat lain. Tentara Republik menganggap ini sebagai pelanggaran persetujuan Renville. Karena itu, Pimpinan Tentara tidak lagi merasa terikat pada Renville, dan memberikan perintah kepada Divisi Siliwangi yang telah mengungsi untuk kembali ke Pangkalan asalnya, Jawa Barat.

Ketika setelah apa yang disebut Long March pasukan-pasukan Siliwangi akhirnya kembali ke Jawa Barat, mereka disambut dengan meriah. Kepada mereka dianjurkan untuk bersama-sama bergabung dengan Tentara Islam Indonesia dalam rangka mempertahankan daerah Jawa Barat dari ancaman militer Belanda dan negara bonekanya yaitu "Negara Pasundan".

Semua usaha dari pihak TII yang mencoba untuk mengarahkan ke arah kerja sama melawan Belanda, mengalami kegagalan. Kepada kesatuan TNI diberitahukan bahwa mereka sebaiknya menempatkan diri di bawah komando Tentara Islam Indonesia. Dan diberitahukan pula bahwa semenjak kaburnya mereka ke Jawa Tengah dalam rangka melaksanakan perjanjian Renville, sesungguhnya yang memperjuangkan Jawa Barat adalah Tentara Islam Indonesia bersama-sama dengan rakyat Jawa Barat bahu membahu melaksanakan wajib sucinya mempertahankan bumi Indonesia dari kekerasan dan kezaliman tentara Belanda. Maka terjadilah peristiwa yang dicatat sebagai awal dari pertikaian yang berlangsung pada tanggal 25 Januari 1949 di Antarlina.

Kejadian ini sekaligus merupakan awal dari permusuhan antara TII dengan TNI dan Belanda yang oleh Kartosoewirjo di sebut "Perang Segi Tiga Pertama di Indonesia".

Kartosoewirjo menyatakan dalam Maklumat Militernya bahwa, "Pelarian TNI Divisi Siliwangi kedaerah Djawa Barat, dan jang diseboet sebagai "tentara liar" mempoenjai sifat, thabiat dan perboeatan jang amat memperkosa hak milik rakjat, dan bertindak selaloe kedjam dan kedji sekali terhadap rakjat, teroetama kepada Oemmat Islam, di samping itoe mereka tidak pandai menghargai dirinja sebagai tamoe, melainkan ingin mengoesai daerah dan rakjat Negara Islam Indonesia. Padahal hari-hari pertama pihak Negara Islam Indonesia soedah tjoekoep menoendjoekkan perboeatan-perboeatan dan samboetan-samboetan baik atas kedatangan mereka itoe. Ditambah lagi mereka teroes meneroes melakoekan pelanggaran atas hak-hak Negara Islam Indonesia, sehingga mereka melepaskan tembakan dan menyerang Tentara Islam Indonesia dengan membabi-boeta tanpa perikemanoesiaan".

"Maka wadjib dan perloenja tiap-tiap warga-negara Oemat Islam Bangsa Indonesia, mengangkat sendjata menghadapi tiap-tiap kemoengkinan daripada moesoeh jang khianat itu baik moesoeh Agama maoepoen moesoeh Negara Islam Indonesia serta wadjiblah bagi tiap-tiap Tentara Islam Indonesia, PADI, B.K.N., dan lain-lain alat kelengkapan Negara Islam Indonesia, melakoekan tindakan atas tentara liar dan golongan serta gerombolan pengkhianat itoe, sesoeai dengan hoekoem Islam di masa perang".

Kartosoewirjo menjelaskan pula dalam Lampiran Maklumat Militernya mengenai kedudukan Negara Islam Indonesia. Dengan keterangan sebagai berikut: "Sejak berdirinja Negara Islam Indonesia di Djawa Barat sebelah Barat, maka hanja dikenal doea golongan jang bermoesoehan jakni "Kekoeasaan Belanda, Tentara Belanda dan alat-alatnja" dan "Negara Islam Indonesia dan segala kelengkapannja". Serta dijelaskan pula bahwa yang dikatakan Tentara Liar ialah semua kesatuan Tentara yang keluar dari Daerah Republik dan masuk ke Daerah pendudukan Jawa Barat sebelah Barat, terutama kesatuan-kesatuan lain di luar kesatuan Tentara Islam Indonesia.

Oleh karena itu tindakan yang diambil kepada Tentara Liar tersebut berupa melucuti Tentara liar itu dan merampas harat-benda hak kesatuan mereka yang perlu, bagi kepentingan Negara Islam Indonesia. Dan apabila mereka melakukan perlawanan maka seluruh gerombolan itu dianggap dan diperlakukan sebagai musuh Negara Islam Indonesia dan Agama Islam tanpa memandang jenis, pangkat dan tingkatannya. Dilakukan pengawasan dan pemeriksaan yang teliti kepada mereka, dan bagi Tentara Islam Indonesia beserta unsur yang lain boleh melakukan segala tindakan, sesuai dengan hukum militer di masa revolusi.

Dengan adanya Maklumat Militer No 1 ini, Kartosoewirjo sudah tidak lagi mengizinkan di daerahnya ada kesatuan-kesatuan militer yang tidak menempatkan diri di bawah komandonya. Termasuk juga divisi Siliwangi yang dianggapnya telah menyerahkan Jawa Barat kepada Belanda. Oleh karena itu kesatuan-kesatuan ini tidak lagi punya hak untuk menduduki kembali daerah Jawa Barat.

Upaya TNI untuk menghindarkan terjadinya peristiwa seperti perlucutan senjata dan peperangan dengan TII. Maka mereka mengusahakan sebuah pertemuan dengan Kamran sebagai Komandan Divisi TII di Darma. Ketika Kamran menolak usul-usul yang disodorkan padanya, pihak TNI berkhianat dengan mencoba untuk menyergap Kamran dan rombongannya. Namun Kamran dapat meloloskan diri, hanya Hamid yang tertangkap. Dan pertengahan Februari seorang Komandan TII yang lain dari daerah Cirebon yang bernama Agus Abdullah ditangkap oleh TNI.

Pada tanggal 23 Februari 1949 TNI (diwakili oleh Adimertapraja) ingin mengadakan perundingan kembali dengan TII (diwakili oleh Agus Abdullah dan Abdul Hamid), di mana isi perjanjian tersebut mengenai pembagian daerah di sekitar Cirebon. Masing-masing kekuatan TNI dan TII mendapat sebuah daerah kekuasaan, begitu juga direncanakan pelaksanaan sebuah komando bersama. Akhirnya perjanjian itu tidak jadi ditandatangani, karena Pihak TII berpendapat perjanjian itu diadakan dalam keadaan terpaksa karena sebelumnya Agus Abdullah dan A. Hamid ditahan oleh TNI.

Pada tahun 1949 ini Keberadaan Darul Islam merupakan ancaman yang semakin gawat bagi Republik dan Negara Pasundan yang didukung Belanda. Terutama sekali Negara Pasundan, keadaan dirinya repot sekali. Negara ini tidak mempunyai tentara sendiri dan harus mengandalkan dari pada pasukan-pasukan Belanda dan Divisi Siliwangi untuk melindungi para warga negaranya. Keadaan menjadi begitu gawat bagi Pasundan ketika Tentara Belanda bersiap ditarik mundur sehubungan dengan pengakuan kemerdekaan mendatang. Posisi Belanda diambil alih pasukan Republik, yang akan menjadi inti Tentara federasi Indonesia yang merdeka. Untuk mencegah tercapainya persetujuan apapun yang merugikan eksistensi Negara Pasundan dan keutuhan wilayahnya, mereka mengusahakan kerja sama dengan kesatuan-kesatuan Siliwangi dalam melawan Darul Islam.

Ketika tekanan Internasional datang, terutama dari pihak Amerika Serikat yang mengancam akan menghentikan bantuannya kepada Belanda, akhirnya dengan terpaksa Belanda bersedia untuk kembali berunding dengan RI. Pada tanggal 7 Mei 1949, maka ditandatanganilah Perjanjian Roem-Royen. Dalam perjanjian tersebut Belanda menjanjikan untuk mendirikan kembali

pemerintahan Republik Indonesia dan menghentikan semua permusuhan. Sebaliknya, pihak Indonesia harus dapat menghentikan semua aksi gerilyanya terutama aksi yang dilakukan oleh Darul Islam. Dan harus bersedia pula mengikuti Konferensi Meja Bundar untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat.

Kini terdapat keresahan yang kian meningkat di dalam Negara Pasundan, di mana mereka harus menyandarkan diri benar-benar pada pasukan Republik untuk melawan pasukan Darul Islam, terutama di daerah-daerah yang pasukan-pasukan TII-nya paling kuat kedudukannya. Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi sesudah Tentara Belanda ditarik mundur, dan rakyat meragukan apakah pasukan Republik yang menggantikannya akan cukup kuat memukul mundur serangan Darul Islam. Karena pada tahun 1949 dilaporkan bahwa kegiatan Darul Islam sudah membumi di hampir setiap pojok di Jawa Barat – tidak hanya di daerah-daerah operasi utama Darul Islam, bahkan sebelah timur laut dan tenggara Jawa Barat, terutama Kabupaten Bandung, Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis, begitu juga di daerah-daerah murni Republik seperti daerah Banten.

Kartosoewirjo yang memang tidak pernah setuju dengan kedua perjanjian sebelumnya, menolak juga hasil perundingan Roem-Royen. Di bawah ini dikutipkan uraian Kartosoewirjo sekitar penilaiannya terhadap persetujuan Roem-Royen dan Konferensi Meja Bundar berdasarkan kajian konsep bernegara:

> *,,…. Tiap-tiap kali Revoloesi Nasional hendak menggelora dan hendak menjapoe sampah2 masjarakat, tiap kalinja itoe dihambat, dihalangi dan dirintangi oleh berbagai-bagai randjaoe dan penghalang, dari pihak Belanda pendjadjah, baik jang ada dalam toeboehnja Pemerintahan Belanda sendiri maoepoen jang soedah masoek meresap dalam darah daging dan djantoengnja Pemerintah Repoeblik Indonesia.*
>
> *Dalam riwajat jang tragis, memiloekan dan menjedihkan itoe, maka berkali-kali ,,bachtera-Repoeblik" terdampar di atas batoe karang jang amat tjoeram sekali, ,,Berkat" oesaha diplomasi, jang dilakoekan oleh djago2 alias pemimpin2 Repoeblik……!!!! Itoelah makanan jang disadjikan ,,Belanda", jang berisi ratjoen bagi perdjoeangan kemerdekaan Indonesia. Istilah2 ,,internasional minded" mendjadi alasan jang maha penting, Hanja banteng Repoeblik Indonesia ,,marhoem" dan Masjoemi serta keloearganja jang berani terang2an menjatakan ,,tidak setoedjoe" kepada Naskah Linggardjati itoe, tapi tetap loyal. Naskah Renville lebih tidak berharga lagi dari pada Naskah Linggardjati, jang memang soedah sangat merosot nilainja itoe. Baik dipandang dari soedoet politik, maoepoen ditindjaoe dari djoeroesan militer.*

Daerah Repoeblik, jang sedjak Naskah Linggardjati hanja melipoeti Djawa dan Soematera sadja, maka dengan Naskah Renville lebih merosot lagi sampai batas ,,demarkasi van Mook". Loear daripada daerah itoe, meroepakan daerah pendoedoekan, alias persiapan djadjahan. Taktik dan politik Belanda jang bernatidjahkan Naskah Renville, baik dengan memasoekkan ,, agen2nja" kedalam toeboeh Repoeblik, maoepoen dengan kekerasan dan keganasannja, jang meroepakan Aksi Polisionil Pertama, roepanja dianggap sebagai ,,pertjobaan" (steekproef) oentoek menentoekan sikap dan pendiriannja di masa jang mendatang.

Kedalam digali dengan penjakit, ,,pembangoenan" sedang dari loear diserang dengan poekoelan jang hebat, ialah Aksi Polisionil kedoea, maka dalam sekedjap mata Pemerintah Repoblik djatoeh di tangan Belanda. Setelah ditawan, dengan tjara jang haloes, Pemerintah Repoeblik Indonesia tidak djemoe2nja melagoekan lagi njanjian2nja jang soedah amat tidak aktoeil iteo, ialah: memboeat roendingan diplomasi. Maka maoe ataupoen tidak maoe, banteng Indonesia jang gagah perkasa itoe, karena kalah silatnja dengan singa Belanda terpaksa diikat lehernja dan kemoedian masoek dalam salah satoe kandang dalam keboen binatang modern, jang bernamakan: Negara Indonesia Serikat atau Repoeblik Indonesia Serikat".

Inilah gambaran proses dan natidjah, jang toemboeh daripada Statement Roem-Roijen, jang dilangsoengkan pada tanggal 7 Mei 1949, djam 17.00 itoe.

Dengan adanja statement Roem-Roijen itoe, maka Roem telah menjelesaikan toegasnja: Sebagai wakil Masjoemi, wakil Oemmat Islam…… soenggoeh amat memaloekan sekali!

Kalau doeloe, zaman Naskah Linggardjati, Masjoemi mati-matian ,,anti Naskah Linggardjati", sekarang : Wakil Masjumi dalam Kabinet dan Wakil Oemmat Islam sendiri jang mendapat giliran terachir: mendjoeal negara sampai habis ledis.

Walau kita Oemmat Islam Bangsa Indonesia, di tanah pendoedoekan sekarang Negara Islam Indonesia, tidak ikoet bertanggoeng djawab atas perboeatan Roem dalam oeroesan Statement Reoem-Roijen, tetapi semoenja itoe perhatikan djoega, dengan ikoet ,,bela soengkawa".

Soenggoehpoen peristiwa jang tragis itoe amat memiloekan hati ra'iat bangsa kita, teroetama Oemmat Islam Bangsa Indonesia, tetapi di balik itoe wadjiblah kita sjoekoer kehadirat Ilahy: bahwa di balik keroegian jang amat besar itoe, dalam pandangan nasional tetapi bagi Oemmat Islam Bangsa Indonesia adalah semoeanja itoe mendjadi salah satoe sjarat dan sebab akan toeroennja Koernia Ilahy jang maha besar ialah: Proklamasi berdirinja Negara Islam Indonesia. Tegasnja kini: Repoeblik Indonesia telah kembali kepada deradjat sebeloem proklamasi, ja'ni: deradjat noel-besar.

Kartosoewirjo juga menentang pendapat, bahwa setelah pembentukan sebuah negara basis yang disebut sebagai ”Madinah Indonesia” berakhirlah revolusi Soekarno. Yang belum berakhir adalah "revolusi Islam Indonesia" yang sesungguhnya Revolusi masih harus dilanjutkan hingga negara kurnia Allah, Negara Islam Indonesia didirikan di atas bumi Indonesia.

> *“Seperti air dengan kopi tidak begitoe sadja laloe mendjadi air kopi, sehingga tiap-tiap anasir air bersatoe dengan anasir kopi, melainkan airnja dimasak hingga 100 graad Celcius. Maka tidak loepa moengkin Negara dan Agama, Manoesia dan Agama, dapat bersatoe dalam arti kata jang seloeas-loeas dan sesempoerna-sempoernanja, melainkan apabila Negara dan Masjarakat serta segenap anasir jang termasoek di dalamnja dapat dipanaskan sampai kepada tingkatan jang setinggi-tingginja.*
>
> *Djadi, oentoek membina dan menggalang Negara Koernia Allah itoe, perloe dan wadjiblah bergeloranja Revoloesi, lebih-lebih lagi Revoloesi Islam jang akan memasak masjarakat sampai kepada tingkat mateng jang baik dalam arti kata politis, militer, agama maoepoen dalam arti kata jang lainnja. Djadi kalau kita menghendaki berdirinja Negara Koernia Allah itoe, djangan sekali-kali takoet terdjilat oleh api revoloesi. “Tiada baji jang lahir, melainkan disertai tjoerahan darah!” Inilah satoe-satoenja djalan menoedjoe kepada Mardhotillah doenia dan Mardhotillah achirat, kelak”.*

Selama hampir lima tahun setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia memasuki masa-masa revolusi fisik (1945-1949). Menyusul kekalahan Jepang dengan tentara-tentara sekutu, Belanda berusaha kembali menduduki kepulauan Nusantara. Selama periode ini, tidak ada hambatan penting yang menghalangi hubungan politik antara pemimpin dan aktivitas Islam politik dengan kelompok nasionalis. Untuk menghadapi revolusi fisik dalam berhadapan dengan Belanda dan kekuatan sekutu, perdebatan-perdebatan di antara mereka mengenai corak hubungan antara Islam dan negara dihentikan sementara. Mereka, paling tidak untuk sementara, rela melupakan perbedaan-perbedaan ideologis di antara mereka. Dan tidak diragukan lagi, pada masa itu, para pendiri republik merasa bahwa mereka harus menguras seluruh energi dan kemampuan untuk mempertahankan Republik Indonesia yang baru berdiri dan mencegah Belanda untuk kembali berkuasa.

Meskipun tidak tanpa benturan di sana-sini, kedua kelompok ini mampu mengembangkan hubungan politik yang relatif harmonis antara mereka. Perjuangan fisik memang wilayah peran kaum Muslim yang diperlihatkan oleh bergeraknya lasykar-lasykar Hizbullah, Sabilillah dan lasykar-lasykar lokal lainnya. Namun, kelompok nasionalis tetap memegang kemudi kepemimpinan. Sementara itu, menyusul diserahkannya kekuasan oleh pihak Belanda kepada

Repulik Indonesia pada Desember 1949, kelompok Islam perlahan-lahan mulai memperlihatkan kekuatannya yang besar dalam diskursus politik nasional. Pembentukan partai Masyumi di Yogyakarta pada tanggal 7 November 1945, melalui sebuah kongres umat Islam, tampaknya harus pula dipandang sebagai jawaban atas keperluan umat Islam untuk mempunyai suatu institusi politik yang mampu memperjuangkan aspirasi politik mereka di panggung nasional. Kongres umat Islam waktu itu sekaligus menghasilkan kesepakatan bahwa Masyumi merupakan satu-satunya institusi politik umat Islam. Karenanya, wadah lain, seperti MIAI dan Masyumi buatan Jepang, tidak lagi diakui sebagai institusi mereka. Pembentukan Masyumi ini didukung oleh seluruh umat Islam, baik dari kubu tradisionalis maupun modernis.

Pertentang Islam modern dan tradisional ini sesungguhnya sudah memakan waktu yang cukup lama. Para ulama Syafi'i di Jawa sudah cukup makan garam. Mereka membenci Modernisme yang mereka samakan dengan Wahhabisme (suatu gerakan pemurnian yang hanya mengakui kekuasaan mazhab Hanbali); mereka meremehkan Tjokroaminoto, dan mereka merasa akut bahwa kepentingan-kepentingan keempat mazhab tidak akan dikui di Mekkah dan Kairo seperti halnya mereka telah banyak dikecam di Indonesia. Oleh karena itulah, maka pada tahun 1926 Kyai Haji Hasjim Asjari (1871-1947), pemimpin suatu pesantren tradisional di Jombang, Jawa Timur, mendirikan Nahdatul Ulama (Kebangkitan Para Ulama, NU) untuk mempertahankan kepentingan kaum muslim tradisional. Guru-guru (para kyai) tradisional pedesaan lainnya di Jawa Timur bergabung dengannya; para pemimpinnya terutama adalah orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan Hasjim Asjari. NU berkembang di daerah-daerah lain, etapi Jawa Timur tetap menjadi pusatnya. Organisasi ini mendukung kemajuan sekolah-sekolah Islam tradisional, pemeliharaan kaum fakir miskin, dan usaha-usaha ekonomi. Pada tahun 1942 organisasi ini mempunyai 120 cabang di Jawa dan Kalimantan Selatan, yang sebagian besar anggotanya adalah pedagang.

Dengan Masyumi sebagai wakil politik mereka satu-satunya, kelompok Islam berhasil menarik jumlah pengikut yang besar. Untuk alasan itu, seawal 1946, Syahrir (pemimpin Partai Sosialis Indonesia dan tiga kali menjabat sebagai Perdana Menteri dalam beberapa kabinet semasa revolusi) memperkirakan bahwa "jika pemilihan umum diselenggarakan [di sekitar tahun itu], maka Masyumi —yang saat itu merupakan gabungan dari kalangan Muslim modernis [seperti Muhammadiyah, dengan jumlah anggota yang besar di wilayah perkotaan] dan ortodoks [seperti NU, dengan jumlah anggotanya yang bahkan lebih besar lagi di wilayah-wilayah pedesaan]— akan memperoleh 80% suara."

Dilihat dari komposisi personalia yang terlibat dalam kepengurusan Masyumi, tampak sekali bahwa partai ini melibatkan seluruh fungsionaris Islam pasca kemerdekaan. Kepengurusan dalam Majelis Syuro diketuai oleh Hasyim Asy'ari (wakil dari kalangan tradisionalis); sementara wakil-wakilnya adalah Wahid Hasyim (anaknya sendiri), Agus salim (PSII), Djamil Djambek (wakil dari golongan reformis dari Sumatera Barat) dan lain-lainnya. Sedangkan Pengurus Besar diketuai oleh Sukiman, Abikusno Tjokrosujoso, dan kemudian melibatkan M. Natsir, Muhammad Roem, dan juga Kartosoewirjo.

Sepanjang menyangkut gagasan terbentuknya negara Islam (Islam sebagai dasar negara dan ideologi negara), umat Islam telah berjuang bahu membahu meninggalkan perbedaan-perbedaan paham keagamaan antara mereka, terutama antara kalangan tradisionalis dan modernis. Sebagaimana telah disebutkan di awal, kerjasama yang tercermin dalam BPUPKI dan PPKI, kemudian dilanjutkan dalam Kongres Umat Islam di Yogyakarta, pada permukaan, memang memperlihatkan suatu bentuk persatuan umat yang dirindukan. Namun dalam perkembangannya, baik dalam teori maupun praktek, persatuan itu tidak bertahan lama. Artinya, benih-benih persatuan, yang mulai mereka rajut kembali, tidak mengesankan adanya bangunan kokoh persatuan. Alasan perpecahan yang mengancam persatuan umat ini, pada umumnya, tidak sulit ditemukan. Perpecahan datang karena mekanisme penjatahan kedudukan atau peran politik tidak berjalan, dalam pengertian tidak memuaskan masing-masing pihak yang membentuk fusi dalam Masyumi.Perpecahan yang diawali PSII (1947) dan kemudian NU (1952) merupakan indikasi awal perpecahan persatuan politik internal umat Islam Indonesia. Akhirnya, pada saat peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan yang kelima pada tanggal 17 Agustus 1950 semua struktur konstitusional semasa tahun-tahun Revolusi secara resmi dihapuskan. Republik Indonesia Serikat, dengan Republik Indonesia sebagai unsur di dalamnya, serta negara-negara Sumatera Timur serta Indonesia Timur digantikan oleh suatu Republik Indonesia yang baru, yang memiliki konstitusi kesatuan (namun bersifat sementara). Jakarta dipilih sebagai ibu kota negara baru ini.

Namun demikian, adanya faktor lain yang menyebabkan, atau bahkan mempercepat munculnya perpecahan kemungkinan adalah karena faksionalisme tradisionalis-modernis, yang pada gilirannya membentuk watak keagamaan tertentu pada masing-msing pihak. Secara sederhana, kalangan tradisionalis, karena latar belakang pendidikan mereka, dipahami sebagai suatu kelompok yang buta politik dalam pengertian sangat luas. Artinya, mereka dianggap hanya mampu berfikir tentang persoalan-persoalan keagamaan murni. Sementara kalangan modernis, karena latar belakang pendidikan modern yang mereka terima, dianggap sebagai kalangan yang hanya sedikit memiliki pengetahuan keislaman, namun mempunyai kemampuan-kemampuan

lebih untuk berbicara tentang persoalan-persoalan politik kenegaraan. Benih-benih perpecahan sesungguhnya merupakan implikasi alokasi peran yang telah dirancang sebelumnya. Misalnya, kalangan tradisionalis menduduki kubu Majelis Syuro, yang seringkali hanya bergelut dengan persoalan-persolan keagamaan murni, sehingga kurang mendapatkan peran politiknya, sementara kalangan modernis menduduki kubu Pengurus Eksekutif, yang sehari-hari menjalankan roda kepengurusan Masyumi.

Revolusi politik ini telah selesai, tetapi masih tetap ada banyak persoalan. Tahun-tahun Revolusi tampaknya telah memecahkan beberapa masalah. Layak untuk berpendapat bahwa Indonesia tidak akan menjadi: sebuah negara federal ataupun sebuah negara Islam, atau sebuah negara Komunis, ataupun terutama sekali suatu jajahan Belanda. Akan tetapi, tahun-tahun yang akan datang akan menunjukkan bahwa hal-hal itu tidak sama pastinya dengan yang terlihat pada tahun 1950. Apalagi, tidaklah jelas implikasi-implikasi apakah yang akan timbul dari kemerdekaan tersebut terhadap banyak masalah-masalah sosial, agama, kemasyarakatan, kesukuan, kebudayaan, dan ekonomi yang masih tetap ada. Masih terdapat masalah-masalah dasar yang pada masa anti-kolonialisme, perang, dan Revolusi belum pernah dihadapi oleh bangsa Indonesia karena tidak adanya waktu atau kesempatan. Ketika kini mereka mulai menghadapi masalah-masalah tersebut, maka menjadi jelas bahwa —di luar kemenangan atas Belanda— akhirnya, masih banyak permasalahan yang tidak dipecahkan oleh Revolusi.

Bab Enam

Kartosoewirjo Memproklamasikan Negara Islam Indonesia

Pada tahun 1949 Indonesia mengalami suatu perubahan politik besar-besaran. Ketika itu terjadinya sebuah proklamasi Negara Islam di Nusantara, sebuah negeri Jumhuriyah Indonesia yang kelak kemudian dikenal sebagai Darul Islam atau Negara Islam Indonesia yang lebih dikenal oleh masyarakat sebagai DI/TII, Islam muncul dalam wajah yang tegang. Namun, peristiwa ini dimanipulasi sebagai sebuah "pemberontakan". Kalaupun peristiwa ini disebut sebagai sebuah "pemberontakan", maka ia bukanlah sebuah pemberontakan biasa. Ia merupakan sebuah perjuangan suci anti-kezaliman yang terbesar di dunia di awal abad ke-20 ini. "Pemberontakan" bersenjata yang sempat menguras habis logistik angkatan perang Republik Indonesia ini bukanlah pemberontakan kecil, bukan pula pemberontakan yang bersifat regional, bukan "pemberontakan" yang muncul karena sakit hati atau kekecewaan politik lainnya, melainkan karena sebuah "cita-cita", sebuah "mimpi" yang diilhami oleh ajaran-ajaran Islam yang lurus.

Darul Islam adalah perjuangan umat Islam yang bersifat nasional yang juga meletus di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Aceh. Perjuangan yang bermuara dari Jawa Barat ini telah mengubah banyak persepsi bangsa Indonesia tentang peran ideologi yang ada dalam sebuah perjuangan selama ini. Perjuangan suci Darul Islam di daerah-daerah dipimpin oleh tokoh lokal yang memiliki motivasi yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Banyak studi yang membahas tentang resistensi politik mengalami stagnasi dalam melihat persoalan. Stagnasi itu umumnya hanya melihat persoalan resistensi politik dari sudut pandang "struktur agraria" atau patron-client atau "restrukturisasi lembaga negara " atau "kekecewaan orang-orang bawah". Padahal, jauh di dalamnya, sebuah perjuangan suci sebenamya juga merupakan suatu ekspresi nilai-nilai, suatu pengungkapan idealisme, pemikiran dan keinginan mengadakan perubahan berdasarkan orientasi nilai tersebut yang dianggap berlawanan secara norma umum, sehingga ia disebut pemberontakan.

Pemberontakan sendiri, melihat dari cara Harald Holk Dengel mengungkapkan, lebih banyak bersumber dari nilai-nilai keyakinan yang dipegang oleh para pelakunya. Pemberontakan Darul Islam sekaligus menunjukkan betapa konflik ideologis para pendiri republik ini berkisar sekitar dasar negara dan haluan politik negara. Dari semenjak ketika organisasi-organisasi nasionalisme pertama-tama berdiri di Nusantara ini, pemikiran bahwa Indonesia akan merdeka menyelimuti sebagian besar keyakinan para nasionalis ketika itu. Maka jauh-jauh hari mereka sudah

memperdebatkan tentang jika bangsa ini sudah merdeka maka bagaimanakah bentuk kekuasaan dan tata cara kenegaraannya akan diatur, juga hukum dan pelaksanaa birokrasi negara.

Perdebatan ini begitu alotnya sehingga melibatkan banyak nasionalis tersebut mengajukan berbagai nilai sebagai dasar negara ini. Ada yang mengusulkan nilai nativisme budaya daerah sebagai dasar, juga ada yang mengusulkan demokrasi a la Barat, ada yang menginginkan ideologi komunisme, juga ada Islam. Masing-masing punya alasan kuat kenapa nilai-nilai tersebut diajukan dan masing-masing mengklahll bahwa usulnya sudah merepresentasi mayoritas; keinginan rakyat Indonesia. Sudah sejak semula para nasionalis Islam mencita-citakan suatu negara Islam. Cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan itu berbeda-beda, ada yang dengan jalur konstitusi seperti Muhammad Natsir dan tokoh-tokoh Partai Masyumi lainnya, juga ada dengan jalan perjuangan suci seperti yang dilakukan oleh Kartosuwirjo. Ia sangat konsisten dengan konsep politik hijrah-nya yang berarti memisahkan diri secara pemikiran dan menarik garis demarkasi pembeda antara Negara Islam dan Negara Bukan Islam.

Wajar jika kemudian dia tidak aktif lagi dalam diskusi atau rapat atau sidang partai maupun organisasi. Dia bersikap nonkooperasi dalam semua hal dan membangun sendiri kekuatannya tanpa bantuan pihak lain. Bagaimana rumitnya perdebatan itu, ternyata tidak hanya berhenti sebagai perdebatan semata, namun lebih dari itu berusaha mcngajukan pemikiran tentang ideologi tersebut secara fisik yakni dengan cara memberontak.

Pada awal pergerakan kebangkitan nasional Indonesia, kekuatan logika Islam dalam lapangan politik adalah sangat besar pengaruhnya dan sangat beragam. Ada yang hanya sebatas memihak, ada yang juga sebatas setuju belaka bahkan ada yang sangat menentang. Kartosuwirjo adalah tokoh yang sangat militan dalam intensitas perjuangan untuk mendirikan negara yang berdasarkan ideologi Islam. Meski ketika itu perdebatan tentang ideologi Islam belum final, ia telah menerjemahkan nilai-nilai Al-Qur'an ke dalam bentuk-bentuk praktek birokrasi dan hukum negara. Mungkin, jika ada yang mempraktekkan nilai-nilai ke-Islaman, dia itu adalah Kartosuwirjo dan pejuang mujahidin sejati dalam Darul Islam, sementara umumnya masyarakat hanya mempraktekkan nilai-nilai ritual ibadah dan secara terbatas (bersifat individu) mempraktekkan syari-ah Islam.

Buku ini telah melengkapi satu lagi khazanah sejarah bangsa yang selama ini berada dalam kabut gelap. Penulisan tentang Darul Islam, bukan hanya langka tapi juga usaha ke arah itu bukan suatu kerja yang mudah. Dia memerlukan melihat ke sejarah di masa lampau Indonesia dengan banyak perbandingan dan penelusuran data sekunder, baru kemudian menyusun plot dan wawancara serta memahami istilah-istilah lokal serta terma-terma Islam yang rumit.

Banyak kesan bagus pada organisasi dan struktur Darul Islam. namun juga ini yang sulit orang lain melakukannya, adalah cara Dengel menukik ke persoalan-persoalan esensial yang memperlihatkan kehebatan perjuangan suci Darul Islam ini berdasarkan referensi primer! Sungguh menarik membaca buku karya Holk Harald Dengel yang judul aslinya adalah Darul Islam: Kartosuwirjos Kamf um einen Islamichen Staat Indonesien ini. Buku ini memiliki dua keunggulan sekaligus, pertama, bahwa buku ini adalah sebuah tulisan mendalam tentang biografi seseorang (Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo} dan kedua membahas harakah Darul Islam secara lebih bersifat ideologis. Sebagai sebuah karya disertasi pada jurusan sejarah Universitas Heidelberg buku ini sangat padat berisi berhagai data dan informasi baru yang dikorek langsung dari sumber-sumber utama (primary sources) seperti wawancara dan tulisan-tulisan asli dari subjek target penelitian.

Untuk memberi gambaran lebih jauh mengenai posisi politik kelompok Islam yang semakin kuat pada masa pasca revolusi ini, beberapa catatan historis berikut relevan dikemukakan di sini. Pertama, pada Agustus 1950, aktivitas partai-partai politik di Indonesia telah mengalami penyegaran kembali dan giat setelah masa adem-ayem pada 1949. Dalam Parlemen yang baru dibentuk dengan jumlah keseluruhan anggota 236 orang, Masyumi tampil sebagai partai terbesar dengan menduduki 49 kursi. Namun demikian, karena adanya banyak partai, organisasi, dan asosiasi yang diwakili dalam parlemen (tidak kurang dari 22), bersama PSII, kelompok Islam hanya memperoleh 54 kursi (23%). Kenyataan ini meruntuhkan mitos mayoritas Islam dalam politik. Kedua, dalam beberapa kesempatan, Masyumi diminta untuk membentuk dan memimpin kabinet. Dari tujuh kabinet yang berjalan di bawah sistem demokrasi konstitusional (1950-1957), tiga kabinet dipercayakan kepemimpinannya kepada Masyumi (Kabinet Natsir pada 1950-1951; Kabinet Sukiman pada 1951-1952; dan Kabinet Burhanuddin Harahap pada 1955-1956). Selain itu, ketika Partai Nasionalis Indonesia (PNI) diberi mandat untuk membentuk pemerintahan, baik Masyumi maupun NU, berperan sebagai pasangan koalisi yang utama. Terakhir, hasil pemilihan umum pertama yang diselenggarakan pada September 1955 menunjukan, kelompok Islam (kali ini terdiri dari Masyumi, NU, PSII, dan Perti) menguasai 114 dari 257 kursi (43,5%) dalam parlemen. Walaupun hasil akhir tersebut jelas jauh di bawah perkiraan Sjahrir, namun itu telah menggandakan wakil kelompok Islam dalam parlemen. Kenyataan ini, ditambah dengan tidak adanya kontroversi-kontroversi ideologis yang terbuka, boleh jadi turut menyebabkan berlangsungnya hubungan politik yang relatif harmonis antara kedua payung religio-politik besar ini selama tahun-tahun pertama politik Indonesia pasca revolusi (1950-1953). Kritik terang-terangan terhadap Pancasila oleh para pemimpin dan aktivis politik Islam jarang terjadi. Bahkan Mohammad Natsir menyatakan bahwa —karena

dimasukkannya prinsip "Percaya kepada Tuhan" ke dalam Pancasila— Indonesia tidak menyingkirkan agama dari masalah-masalah kenegaraan.

Namun bukan karena itu negara Indonesia dilanda krisis politik, terutama krisis yang direaksikan oleh Islam. Indonesia saat itu tengah jatuh ke dalam "titik terendah dalam hal kemampuannya memperoleh kontrol sosial dan efektivitasnya dalam mendistribusikan sumber-sumber. Ketidak mampuan negara untuk "mempenetrasi" masyarakat, untuk "mengatur" hubungan-hubungan dengan berbagai pengelompokan sosial-politik, dan untuk "menggali" serta "mendistribusikan" baik sumber daya alam maupun sumber daya ekonomi dalam cara-cara yang kurang-lebih tegas, turut menyebabkan munculnya beberapa gejolak sosial-politik yang amat merepotkan kepemimpinan nasional. Beberapa contoh yang terkenal dari gejolak-gejolak itu adalah "pemberontakan" Darul Islam (DI), Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), dan Perjuangan Semesta Alam (Permesta).

Salah satu di antara butir-butir agenda terpenting dari kabinet-kabinet Indonesia pasca kemerdekaan adalah penyelenggaraan pemilihan umum untuk Parlemen dan Majelis Konstituante. Kabinet Sjahrir berjanji akan menyelenggarakan pemilihan umum pertama pada awal Januari 1946. Sayangnya, situasi revolusi fisik (1945-1949) tidak memungkinkan dilaksanakannya pemilihan umum itu. Ketika kedaulatan negara diserahkan Belanda ke Republik Indonesia, sebagaimana dicatat Feith, "setiap kabinet menjadikan pemilihan umum untuk menyusun Majelis Konstituante sebagai bagian penting dari program-programnya. Meskipun demikian, baru pada kabinet Burhanuddin Harahap sajalah pemilihan umum pertama berhasil diselenggarakan (1955).

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tertundanya penyelenggaraan pemilihan umum itu. Yang paling penting adalah ketakutan para elite negara dan partai, khususnya mereka yang berasal dari kelompok nasionalis sekuler, bahwa pesta-pora demokrasi itu dapat mengancam hubungan politik antara agama (Islam) dan negara yang sudah di-"dekonfessionalisasi" seperti yang berlangsung saat itu. Mereka percaya bahwa peristiwa-peristiwa politik seperti pemilihan umum dapat digunakan oleh kalangan Islam untuk menyusun dukungan rakyat guna merealisasikan gagasan negara Islam. Mengingat potensi mereka untuk memenangkan suara mayoritas, sukses kelompok Islam dalam pemilihan umum akan melempangkan jalan bagi mereka untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara di Majelis Konstituante yang artinya akan menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam.

Sejak 1950 hingga sekitar 1959, dekade yang dikenal sebagai periode Demokrasi Konstitusional, Indonesia berada di bawah UUD Semenetara 1950. Terlepas dari kenyataan bahwa negara telah

mengalami beberapa kali perubahan konstitusi, UUD 1950 itu masih dianggap sementara. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa tugas utama Majelis Konstituante adalah menyusun sebuah rancangan konstitusi yang permanen. Dalam kerangka legal-konstitusional inilah para anggota Majelis Konstituante terlibat dalam perdebatan-perdebatan ideologis-politis yang sengit dan panas. Meski bukan tanpa kesulitan, Majelis Konstituante akhirnya dapat menyelesaikan 90% tugas-tugasnya, termasuk membuat berbagai ketetapan seputar masalah unsur-unsur substansif konstitusi seperti hak-hak asasi manusia, prinsip-prinsip kebijakan negara, dan bentuk pemerintahan.

Dalam diskursus ini, kelompok Islam pada intinya menyatakan kembali aspirasi-aspirasi ideologi-politik yang sudah mereka kemukakan pada masa pra-kemerdekaan, yakni mendirikan negara yang jelas-jelas berdasarkan Islam. Mereka mengusulkan agar Islam dijadikan ideologi negara berdasarkan argumen-argumen mengenai (1) watak holistik Islam, (2) keunggulan Islam atas semua ideologi dunia lain, dan (3) kenyataan bahwa Islam dipeluk oleh mayoritas warga negara Indonesia.

Dipimpin Mohammad Natsir, Kasman Singodimedjo, Zaenal Abidin Ahmad, Isa Anshari, dan K.H. Masjkur, mereka kukuh mempertahankan watak Islam yang holistik. Mereka percaya bahwa Islam mengatur setiap aspek kehidupan. Menurut mereka, negara —yang pada dasarnya merupakan sebuah organisasi yang meliputi seluruh masyarakat dan lembaga, yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan aturan-aturan yang mengikat — tidak bisa lain kecuali mendasarkan diri kepada prinsip-prinsip Ilahiyah.

Dalam konteks Pancasila sebagai ideologi negara, mengingat bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang heterogen secara keagamaan, beberapa tokoh kelompok nasionalis memandang Pancasila sebagai suatu kesepakatan bersama. Bagi para politisi PNI dan aktivis Kristen seperti Arnold Mononutu, Pancasila merupakan sebuah sintesis yang memadai bagi berbagai kelompok agama yang berbeda. Jika Islam harus dijadikan dasar negara, yang terutama ia khawatirkan adalah tempat kelompok-kelompok agama lain di Nusantara. Bagaimana pun, hal itu mengandung citra diskriminasi konstitusional.

Diterimanya Pancasila sebagai ideologi negara serta dihapusnya "tujuh kata" dari Piagam Jakarta dapat ditafsirkan sebagai kekalahan politik Islam. Kendatipun demikian, para pendukung gagasan negara Islam tersebut, untuk sebagian besar, tidak menyerah begitu saja. Perjuangan suci Darul Islam sewaktu perang frontal (1949-1964) dan diproklamsikan berdirinya negara Islam Indonesia (NII) yang dipimpin oleh Sekarmadji Marijan Kartosoewirjo dan perjuangan wakil-wakil

Islam di dalam sidang Konstituante hasil pemilu 1955 untuk menggolkan kembali gagasan negara Islam, merupakan indikasi konsistensi perjuangan mereka.

Pergulatan Islam dan Negara telah menghasilkan banyak pemberontakan, yang secara ekologi kultural dapat dijelaskan sebagai berikut: secara ekonomi, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan Selatan, adalah wilayah pengekspor hasil alam utama, sedangkan Jawa dengan tingkat perkembangan penduduk dan urbanisasi yang tinggi menjadi pengimpor; wilayah wilayah perjuangan suci Islam yang utama di tahun 1957 1958 adalah wilayah wilayah yang surplus ekspornya lebih sejahtera yang mencari jalan untuk memotong garis kekuasaan Jawa dan Pemerintah Pusat dan dengan cara mengambil perdagangan di tangan mereka sendiri dan mencegahnya mengalir ke Jawa.

Pada tahun 1949, tepatnya pada tanggal 7 Agustus, diproklamasikan berdirinya "Negara Islam Indonesia" oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di desa Malangbong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat selain sebagai tanggapan terhadap kecenderungan republik ke arah sekuler, juga merupakan upaya mewujudkan cita-cita teologis Negara Islam. Perjuangan suci yang dikenal dengan nama lain Darul Islam ini berpusat di Jawa Barat dengan meluaskan pengaruhnya hingga ke Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Pemimpin Darul Islam ini, Kartosoewirjo, adalah seorang pemimpin pergerakan umat Islam yang semenjak zaman Hindia Belanda telah lama (mulai 1934-1942) mencita citakan berdirinya suatu negara Islam di Indonesia. Ia telah dari sejak awal mengumpulkan para pengikutnya untuk melawan Belanda dan berjuang tidak secara ko operatif dan tidak mau melalui parlemen (volksraad) atau partai politik yang pernah dimasukinya yaitu PSII (Partai Sjarikat Islam Indonesia) maupun Masjumi (Madjlis Sjoero Moeslimin Indonesia).

Perjuangan suci Darul Islam ini pada awalnya berkesempatan mengkonsolidasikan diri ketika Divisi Siliwangi TNI dipindah ke Jawa Tengah sebagai pelaksanaan perjanjian Renville, pasukan pasukan Hizbullah dan Sabilillah yang berada di bawah kepemimpinan Kartosoewirjo tetap tinggal di Jawa Barat karena memang tidak setuju dengan Perjanjian Renville. Pasukan Hizbullah dan Sabilillah secepatnya mengambil sikap dalam menanggapi kekosongan kekuasaan di wilayah tak bertuan Jawa Barat dengan segera menyusun struktur pertahanan yang merupakan cikal bakal sebuah negara. Ketika pasukan TNI Divisi Siliwangi kembali dari Jawa Tengah untuk melakukan perang gerilya, setelah Belanda melancarkan Agresi Militer II, mereka menjumpai kesatuan kesatuan Hisbullah dan Sabilillah dan kesatuan kesatuan bersenjata lainnya yang kemudian bernama Tentara Islam Indonesia (TII). DI/TII mencoba untuk menghalang halangi kembalinya TNI ke Jawa Barat dan berusaha untuk menarik anggota anggota TNI ke pihaknya. Pertempuran antara pasukan DI/TII dan TNI Divisi Siliwangi pun tidak dapat dihindarkan.

Pertempuran pertama terjadi pada tanggal 25 Januari 1949 di desa Antralina, Malangbong, antara Batalyon M. Rivai yang baru tiba dari Jawa Tengah dengan pasukan Tentara Islam Indonesia (TII).

Jika di zaman kolonial Belanda, perjuangan Islam lebih menyangkut tarik menarik dan perdebatan strategi perjuangan antara "perjuangan politik" dan "pembangunan moral", maka ketika meletusnya perjuangan suci DI/TII ini pembeda utamanya adalah soal keabsahan Republik Indonesia. Sementara partai partai politik Islam bertolak dari sikap dasar bahwa RI adalah negara sah, maka Darul Islam (DI) mengingkari keabsahannya. Betapapun masalah DI kemudian berhasil "diturunkan" menjadi masalah keamanan, tidak lagi soal ideologis, corak pendekatan yang diajukannya di samping bisa menunjukkan lubang lubang dalam argumen politik Islam, juga memberi kesempatan kepada faktor luar untuk mengambil inisiatif politik yang pasti, tanpa ambivalensi moral. Sementara itu faktor luar telah makin mendesak dan masalah konstitusional pun makin mengabur, maka terjadilah kegagalan Konstituante, PRRI/Permesta meletus yang melibatkan orang orang Masyumi dan PSI dan Demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno pun makin kuat.

Perbedaan yang paling mendasar antara Masyumi dengan Darul Islam (DI/TII) yaitu bahwa Masyumi menyetujui rumusan rumusan Pancasila sekaligus berbicara tentang suatu "masyarakat yang Islami", tetapi tidak berbicara tentang "Negara Islam" sebagaimana Darul Islam (DI/TII). Perkembangan perjuangan suci Islam selanjutnya pasca Darul Islam hingga masa Orde Baru adalah gerakan yang terpecah dalam dua arus aktivisme sosial yaitu tradisionalis dan modernis. Yang Tradisionalis adalah gerakan gerakan yang diwakili oleh NU (Nahdlatul Ulama) dan Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah), sementara yang modernis adalah yang diwakili oleh Muhammadiyah, Persis (Persatuan Islam), Al Irsjad dan lain lain. Aktivisme dan idealisme politik tidak lagi berani mengemuka setelah kegagalan politik ini. Semenjak itu Islam terus menjadi sasaran kecurigaan Negara, seberapapun positifnya sumbangan Islam yang bisa diberikan kepada negara. Sejak itu, posisi politik Islam pun mengalami kelumpuhan total.

Kelumpuhan politik ini selanjutnya diperparah oleh perpecahan politik umat Islam masa kemerdekaan yang dimulai dari terpecahnya kekuatan politik Islam Masyumi yang selama tujuh tahun menjadi wakil tunggal politik Islam. Tidak lagi bergabungnya PSII dan NU dalam Masyumi tampaknya memang harus dijelaskan melalui pendekatan sebagaimana telah disebutkan tadi, terutama yang menyangkut persoalan alokasi peran politik antar berbagai faksi kekuatan yang terfusikan dalam Masyumi. Untuk kasus PSII, Soemarso Soemarsono melihat bahwa hal itu disebabkan oleh tak kunjung datangnya kesempatan bagi PSII untuk duduk dalam kabinet.

Namun demikian, persoalan ini tidak begitu mempengaruhi perjalanan Masyumi, karena kecilnya kekuatan PSII itu sendiri. Akan tetapi, di sisi lain, hal ini merupakan awal melemahnya kekuatan Islam dalam diri partai Masyumi.

Melemahnya Masyumi sebagai kekuatan politik Islam lebih terasakan lagi setelah NU mengikrarkan diri keluar dari partai tersebut. Hal ini disebabkan NU mempunyai massa sangat besar, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. Sejak itu (1952) NU mengubah dirinya dari jam'iyyah, organisasi sosial keagamaan, menjadi partai politik. Kebesaran massa NU ini dibuktikan pada Pemilu 1955, di mana NU muncul sebagai partai terbesar nomor tiga sesudah PNI dan Masyumi dengan meraih 18,4 persen suara dari seluruh jumlah peserta Pemilu. Karena itu, NU mendapatkan 45 kursi dalam Parlemen.

Orang boleh melihat bahwa keluarnya NU dari Masyumi sebagai tindakan oportunistik. Tetapi, bagi NU sendiri hal itu merupakan cara terbaik untuk membebaskan diri dan jamaahnya dari rasa tidak puas, baik politik maupun religius, dalam tubuh Masyumi.

Perpecahan-perpecahan politik Islam, tetap tidak mengubah orientasi perjuangan sebagian umat Islam untuk terus memperjuangkan gagasan negara Islam. Di dalam berbagai sidang Dewan Konstituante, khususnya Masyumi, tetap menyuarakan ide-ide negara Islam. Sementara itu masa Demokrasi Liberal atau Demokrasi Konstitusional yang ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet-kabinet, baik oleh alasan-alasan politis-sekuler maupun politis keagamaan, telah mendorong Presiden Soekarno untuk membubarkan Konstituante. Sejak Soekarno memberlakukan sistem Demokrasi Terpimpin (1957-1965), Indonesia memasuki masa di mana peranan demokrasi telah termanipulasikan oleh prinsip-prinsip kediktatoran, merupakan sebentuk pemerintahan otokratis yang menumpas tanpa setiap oposisi atau pandangan yang tidak menyetujuinya. Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup (1962) pada periode Demokrasi Terpimpin ini. Ironisnya, dukungan besar untuk itu justru diberikan oleh kaum nasionalis dari kalangan NU. Posisi Presiden pada masa ini sangat dominan dalam hampir semua bidang kehidupan dan diharapkan sebagai pemeberi kata putus terhadap segala persoalan. Masa ini juga ditandai oleh keengganan kelompok militer karena keberhasilan PKI (Partai Komunis Indonesia) mendekati Soekarno. Meski pernah digunting tahun 1948 oleh pemberontakan Komunis di Madiun, Presiden Soekarno justru memberikan keleluasan lebih besar kepada PKI untuk bergerak dan menguasai panggung politik nasional. Hal ini mendatangkan implikasi cukup serius terhadap seluruh aspek kebijaksanaan pemerintah yang mempunyai relevansi dengan kehidupan keagamaan umat Islam. Kebijaksanaan Soekarno itu, menurut W.F. Wertheim, telah "menjinakkan" kekuatan Islam.

Kebijaksanaan lain Soekarno yang dinilai sangat merugikan Islam adalah keputusannya untuk membubarkan Masyumi yang pernah bekerjasama dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI) untuk membuat demokrasi tandingan yang diberi nama Liga Demokrasi, karena keterlibatan sebagian pemimpin dalam pemberontakan PRRI/Permesta. Dengan dibubarkannya Masyumi pada bulan Agustus 1960 itu, NU yang telah menjadi partai politik dan keluar dari keanggotaannya sebagai salah satu partai pendukung Masyumi, tampil sebagai wakil politik Islam. Namun juga memperbesar potensi PKI untuk menguasai massa. PKI tidak hanya berhasil dalam meningkatkan peranannya dalam pemerintahan dan masyarakat, juga lambat laut bekerja sama dengan Presiden lebih erat apalagi karena Presiden tambah lama tambah bergantung pada negara-negara komunis, terutama Cina. Hubungan dengan Cina semakin membuat ekonomi Indonesia terwarnai oleh sistem negara tersebut dan pengaruh orang-orang Cina yang menguasai perekonomian Indonesia.

Data perjuangan umat Islam yang terentang di atas ini sesungguhnya menggambarkan pergolakan pemikiran dan perjuangan politik umat Islam. pada periode itu, terutama periode menjelang kemerdekaan dan pada masa Demokrasi Liberal, perhatian sebagian besar pemimpin Islam terpusatkan pada persoalan-persoalan Islam dalam hubungannya dengan pembangunan politik-ideologi. Yang berkembang ketika itu, misalnya, konsepsi bahwa Islam itu adalah dinun wa daulah (agama sekaligus terlibat dalam persoalan-persoalan kenegaraan); Islam itu meliputi kehidupan dunya wa al-akhirah (dunia dan akhirat) dan lain sebagainya.

Apa yang dimaksud sebagai perjuangan politik-ideologi itu adalah Islam sebagai dasar dan ideologi Negara, yang pada awalnya diperjuangkan oleh para pemimpin Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo, KH A. Sanusi, KH Mas Mansyur, Abdul Khahar Muzakir, KH A. Wahid Hasyim, KH Masykur, Sukiman Wirjosandjojo, Abikusno Tjokrosujoso, Agus Salim dan lain sebagainya. Di dalam periode Konstituante (1956-1959), perjuangan itu dilanjutkan oleh Mohammad Natsir, Masykur, Hamka, Isa Anshari dan Osman Raliby.

Tentang Islam sebagai dasar negara, misalnya, Mohammad Natsir menegaskan pendiriannya bahwa Islam harus dijadikan sebagai dasar negara Indonesia, mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. Menurutnya, Indonesia hanya mempunyai dua pilihan, yaitu sekularisme (la-dieniyah) atau paham keagamaan (dien). Dan menurut pendapatnya, Pancasila bercorak la-dieniyah, karena itu ia sekuler, sebab tidak mengakui wahyu sebagai sumbernya. Artinya, Pancasila hanyalah semacam produk non-Tuhan, atau produk setan. Adapun sepanjang menyangkut persoalan pemberian gelar Kepala Negara, Natsir tidak mengikuti tradisi pemberian gelar sebagaimana diwajibkan oleh teori politik Islam klasik, yaitu Khalifah. Baginya, sebutan apa saja boleh. Yang penting, seorang kepala negara memiliki sifat, hak dan kewajiban yang sesuai

dengan ajaran agama Islam, di antaranya adalah dengan memberlakukan prinsip-prinsip Syura (musyawarah) yang dikembangkan dan disesuaikan menurut hasil ijtihad umat. Demikian, corak pemikiran politik Islam Indonesia yang tidak terikat oleh tradisi politik Islam Klasik, melainkan bersiteguh pada esensi ajaran Islam yang menyangkut masalah kenegaraan dan kepemerintahan.

Tidak satupun keinginan para pemimpin Islam, dalam hal ini Islam sebagai dasar dan ideologi negara, terwujud. Kendatipun demikian, hal ini tidak menjadikan proses Islamisasi terhenti sama sekali. Pada masa Soekarno, kendatipun banyak menggariskan kebijaksanaan politik yang kurang menguntungkan perkembangan politik Islam, sebagian langkahnya cukup berarti untuk dinilai sebagai gerak Islamisasi birokrasi. Gagasan-gagasannya untuk menyelenggarakan peringatan hari-hari besar Islam, seperti Maulid Nabi, Israj Mi'raj, Nuzul Qur'an dan lain sebagainya di lingkungan Istana Merdeka, serta upaya membangun mesjid Istana Baiturrahim dan Masjid Istiqlal yang megah itu, merupakan kegiatan yang secara tidak langsung mengarah pada adanya proses 'ofisialisasi Islam'. Jika boleh disimpulkan, sementara pemimimpin Islam berusaha keras agar gagasan tentang Islam sebagai dasar dan ideologi negara diterima, Soekarno, untuk maksud perimbangan kekuasaan, melakukan gerak ofisialisasi Islam. Karenanya, dapat dikatakan bahwa perkembangan Islam pada masa Soekarno hanya menampilkan dimensi eksoterismenya saja. Yang menarik dari penjelasan tentang pola-pola pemikiran politik umat Islam pasca kemerdekaan ini adalah munculnya beberapa asumsi tentang persatuan dan perpecahan umat Islam dalam hubungannya dengan persoalan politik-pemerintahan, kekuasaan, dan pemahaman keagamaan itu sendiri. Di bidang politik, sepanjang hal itu menyangkut perjuangan untuk mendirikan negara Islam, terutama pada masa pasca kemerdekaan dan Demokrasi Liberal, karena sifat liberalisasi politik Indonesia ketika itu, umat Islam bersatu untuk membuat gagasan tersebut berhasil.

Sementara itu, perkembangan partai politik Islam Masyumi yang berjalan dengan sistem alokasi peran dan kekuasaan yang tidak memuaskan sementara pihak, dalam sejarah telah dianggap sebagai faktor perpecahan. Hal ini nampak benar pada kasus keluarnya PSII dan NU dari Masyumi. Kenyataan demikian, menimbulkan asumsi lain, bahwa sepanjang menyangkut kekuasaan, umat Islam cenderung melupakan prinsip ukhuwwah Islamiyah (persatuan), cita-cita bersama dan lain sebagainya. Kenyataan ini tampak pada upaya Masyumi untuk membuat PSII dan NU merasa tidak puas dengan alokasi peran dan kekuasaan yang dirancang.

Sementara itu, NU yang telah mengubah dirinya menjadi partai politik menyadari kegagalan demi kegagalan perjuangan politik Islam yang bersifat oposan terhadap kekuasaan pemerintahan, tampil dengan manuver-manuver politik yang sama sekali baru. Dalam perjalanannya sebagai partai politik pada periode Demokrasi Terpimpin, NU tampil sebagai partner pemerintah dalam pembangunan politik nasional, dengan harapan mendapatkan kedudukan politik tertentu —

seperti pos Departemen Agama. Untuk mempertahankan alokasi itu, tak jarang NU melangkah terlalu jauh, meninggalkan prinsip-prinsip yang ada pada partai-partai Islam lainnya. Kesediaan NU untuk menyuarakan perjuangan suci Darul Islam sebagai bughat (pemberontakan) dan menerima nasakom, merupakan indikasi betapa organisasi ini berusaha keras untuk dapat tetap menjadi partner pemerintah. Dan, karenanya tetap mendapatkan alokasi kekuasaan dalam struktur pemerintahan. Perebutan demi alokasi kekuasaan yang sempit ini harus dibayar dengan kekalahan demi kekalahan politik Islam secara keseluruhan.

Sekali lagi, kelompok Islam secara simbolik berhasil dikalahkan. Dan di balik kekalahan simbolik itu, selama masa Demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno, artikulasi legalistik/formalistik gagasan dan praktik politik Islam, terutama gagasan Islam sebagai dasar ideologi negara, mulai menunjukkan implikasi-implikasi bawaannya yang lebih negatif. Kecuali NU, yang segera mengarahkan kembali orientasi politiknya dan menerima Manipol Usdek-nya soekarno, kekuatan politik Islam menurun drastis. Para pemimpin Masyumi khususnya, yang sejak awal diskursus ideologi di indonesia dipandang sebagai pendukung-pendukung sejati gagasan negara Islam, dijebloskan ke dalam penjara karena oposisi mereka terhadap rezim yang terus berkelanjutan. Dan akhirnya, Soekarno membubarkan Masyumi pada tahun 1960 dengan alasan bahwa beberapa pemimpin utamanya (seperti Mohammad Natsir, Sjafruddin Prawiranegara) terlibat dalam pemberontakan PRRI. Sebagaimana dikatakan oleh Natsir, "selama masih ada kebebasan partai, selama itu demokrasi ditegakkan. Kalau partai dikubur, demokrasi pun otomatis akan terkubur, dan di atas kuburan ini hanya diktatur yang akan memerintah." Kedekatan nilai-nilai Islam dengan demokrasi dapat kita lihat seperti "zat dengan sifat Tuhan".

Sepeninggal Masyumi, politik Islam yang berlangsung adalah politik penyesuaian diri. Di antara partai-partai Islam di Indonesia, tiga partai yaitu NU, PSII dan Perti berhasil bertahan hidup selama periode Demokrasi Terpimpin. Keberhasilan partai-partai ini bertahan karena mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan Demokrasi Terpimpin seperti yang dikehendak Presiden Soekarno.

Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Dewan Konstituante dibubarkan, dan Presiden mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945. Dengan dekrit itu, otomatis persoalan Piagam Jakarta terungkit kembali. Untuk itu, Presiden memutuskan bahwa Piagam Jakarta mempunyai hubungan kesejarahan khusus dengan Undang-Undang Dasar (UUD), karenanya dianggap sebagai suatu bagian integral dari UUD itu sendiri. Pengakuan semacam ini terhadap Piagam Jakarta dapat diartikan sebagai indikasi adanya posisi khusus yang dimiliki umat Islam. Dan tampaknya umat Islam, baik dikarenakan oleh problematika intern yang mereka hadapi, seperti konflik-konflik keagamaan, konsep politik yang tidak begitu jelas dan lain sebagainya, membuat mereka tidak

begitu tanggap dalam mempergunakan kemunculan pengakuan terhadap Piagam Jakarta yang kedua kalinya itu.

Di sinilah "politik ketakutan akan mayoritas" dari kalangan minoritas yang ademokratis ikut memainkan peran. Keprihatinan terhadap kemungkinan bahwa kelompok Islam akan memenangkan pemilihan umum menyebabkan para pemimpin dan aktivis politik kelompok nasionalis meninjau kembali strategi mereka berkenaan dengan penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam hal ini, salah satu pilihan yang paling memadai adalah menunda waktu penyelenggaraan pemilihan umum. Seperti dinyatakan A.R. Djokoprawiro dari Partai Indonesia Raya (PIR), strategi partainya adalah "menunda pemilihan umum sampai posisi para pendukung Pancasila lebih kuat". Pemimpin-pemimpin lain seperti Soekarno, yang saat itu kepala negara, berusaha keras mempengaruhi diskursus politik negara untuk mendukung politik yang sudah di-"dekonfessionalisasi". Pada 27 Januari 1953, dalam safari politiknya di Amuntai (terletak di sebelah selatan Kalimantan yang komunitas Muslimnya sangat kuat), ia mengingatkan para pendengarnya akan pentingnya upaya mempertahankan Indonesia sebagai negara kesatuan nasional. "Negara yang kita inginkan," katanya, "adalah sebuah negara nasional yang mencakup seluruh Indonesia. Jika kita mendirikan negara yang di dasarkan atas Islam, beberapa wilayah yang penduduknya bukan Muslim, seperti Maluku, Bali, Flores, Timor, Kepulauan Kai, dan Sulawesi, akan melepaskan diri. Dan Irian Barat, yang belum menjadi bagian dari wilayah Indonesia, Akan tidak mau menjadi bagian dari Republik."

Ketika pesta demokrasi yang pertama berlangsung (1955) kelompok Islam hanya menguasai 43,5% kursi di Parlemen membuat mereka sulit untuk segera memutuskan apakah mereka akan terus mendesakkan gagasan Islam sebagai dasar ideologi negara atau tidak. Para politisi Islam menghadapi dilema berat antara agama dan politik. Secara keagamaan, seperti ditunjukkan oleh salah seorang pemimpin mereka, mereka digerakkan oleh kewajiban transendental untuk menghadirkan watak holistik Islam ke dalam realitas. Secara politis, bagaimanapun mereka tetap harus menunjukkan bahwa mereka adalah politisi-politisi yang tidak mengingkari janji mereka dalam kampanye. Setidak-tidaknya, sementara pada akhirnya akan menerima Pancasila sebagai ideologi negara, upaya mendesak dijadikannya Islam sebagai dasar ideologi negara berfungsi sebagai alat tawar-menawar politik untuk memenangkan tujuan-tujuan politik yang lebih kecil (yakni dilegalisasikannya kembali Piagam Jakarta dan Islam sebagai agama negara).

Pada tanggal 4 Agustus 1949 disusun Delegasi Indonesia yang akan mengikuti perundingan-perundingan dengan Belanda di Den Haag selama Konferensi Meja Bundar. Bertepatan dengan itu Moh. Hatta menyarankan kepada Muhammad Natsir untuk mengadakan hubungan dengan Kartosoewirjo, agar Kartosoewirjo menghentikan semua permusuhan terhadap angkatan

Bersenjata Republik. Kemudian Muhammad Natsir menugaskan A. Hassan seorang pemimpin Persis yang juga mengenal Kartosoewirjo untuk menyampaikan surat yang dibuat oleh M. Natsir dengan menggunakan kertas surat hotel, surat tersebut tidak dianggap sebagai surat resmi, dan ditahan selama tiga hari sebelum diteruskan kepada Kartosoewirjo.

Sementara itu, Islam Modern mencapai puncak-puncak baru. Pada tahun 1923 sekelompok pedagang mendirikan Persatuan Islam di Bandung. Pada tahun 1924 seorang Tamil kelahiran Singapura bernama A. Hassan (lahir tahun 1887) yang beribukan orang Jawa bergabung dengan organisasi tersebut. Pembelaannya yang gigih terhadap doktrin-doktrin Islam Modern, kecamannya terhadap segala sesuatu yang berbau takhyul (yaitu banyak dari apa yang diterima sebagai Islam yang sebenarnya oleh kaum muslim lokal), perlawanannya yang berapi-api terhadap nasionalisme dengan alasan bahwa nasionalisme telah memecah belah kaum muslim daerah yang satu dengan daerah lainnya, kesemuanya itu membenarkan julukan organisasi tersebut, yaitu 'Persis' (berdasarkan atas kata Belanda precies, yaitu tepat). Hal ini mengakibatkan keluarnya banyak anggota kelompok ini yang lebih moderat; pada tahun 1926 mereka mendirikan organisasi tersendiri yang bernama Permufakatan Islam.

Pada tanggal 6 Agustus 1949 Mohammad Hatta berangkat ke Den Haag untuk mengikuti Konferensi Meja Bundar yang dimulai 12 hari kemudian. Kejadian ini bagi Kartosoewirjo merupakan pertanda untuk bertindak, karena dengan keberangkatan Hatta ke Holland baginya kini terdapat "vakuum kekuasaan" Tetapi tentunya Kartosoewirjo juga bermaksud untuk menghadapkan Hatta pada suatu fait accompli sebelum Konferensi Meja Bundar di Den Haag dimulai.

Kemudian Kartosoewirjo sekali lagi menandaskan perlunya berdiri Negara Islam Indonesia dalam masa "vacuum of power" dengan mengeluarkan Maklumat Pemerintah NII no.II/7 yang berbunyi:

Bismillahirachman nirrachim

MAKLOEMAT PEMERINTAH

Negara Islam Indonesia

No. II/7

Sjahdan, maka perdjoeangan kemerdekaan nasional, jang dimoelaikan dengan Proklamasi berdirinja Repoeblik Indonesia, 17 Agoestoes 1945, soedahlah mengachiri riwajatnja. Orang boleh memberi tafsir jang moeloek2, jang memboeboeng tinggi menemboes angkasa; orang boleh tjari lagi alasan2 jang lebih litjin, lebih juridis, lebih staasrechtelijk, lehin volkenrechtelijk; tetapi meski dipoetar balik betapa poela, dengan lakoe jang serong dan alasan jang tjurang sekalipoen, orang

tak koeasa membalik hitam mendjadi poetih, bathil mendjadi haq, haram mendjadi halal……sepandai-pandai manoesia bersilat, tidaklah ia koeasa membalik Timoer mendjadi Barat!

Setinggi-tinggi bangau terbang, kembali kekoebangan djoega. Maka Repoeblik djatoeh poela kepada tingkatan sebeloem proklamasi; kembali kepada pokok-pangkal pertama, di tangan moesoeh, di tangan Belanda pendjadjah.

Alhamdoelillah, pada saat kosong (vacuum), saat di mana tiada kekoeasaan, dan pemerintahan jang bertanggoeng jawab (gezags en regringsvacuum), maka pada saat jang kritis (membahajakan) dan psychologisch lemah itoelah Oemmat Islam Bangsa Indonesia memberanikan dirinja menjatakan sikap dan pendiriannja jang djelas-tegas, kepada seloeroeh doenia: Proklamasi berdirinja Negara Islam Indonesia, 7 Agoestoes 1949.

Pada saat itoe, maka automatis (dengan sendirinja) perdjoeangan kemerdekaan Indonesia beralih arah, bentoek, sifat, tjorak dan toedjoeannja, mendjadilah: perdjoeangan Islam Indonesia. Setelah bermusyawarah dengan petinggi-petinggi Dewan Imamah dan semua unsur-unsur yang terkait dalam wadah T.I.I., maka dengan kebulatan tekad bersama untuk menerima Kurnia Allah yang maha besar akan Lahirnya Negara Islam Indonesia, maka pada tanggal 12 Sjawal 1368/7 Agustus 1949 di desa Cisampah, kecamatan Cilugalar, kawedanan Cisayong Tasikmalaya di proklamasikannya NEGARA ISLAM INDONESIA. Yang ditanda-tangani oleh Kartosoewirjo sendiri atas nama Umat Islam Bangsa Indonesia. Selengkapnya teks proklamasi N.I.I. adalah sebagai berikut:

> *PROKLAMASI*
> *Berdirinja*
> *NEGARA ISLAM INDONESIA*
> *Bismillahirrahmanirrahim*
> *Asjhadoe anla ilaha illallah wa asjhadoe anna Moehammadar Rasoeloellah*
> *Kami, Oemmat Islam Bangsa Indonesia*
> *MENJATAKAN:*
> *Berdirinja*
> *,,NEGARA ISLAM INDONESIA"*
> *Maka hoekoem jang berlakoe atas Negara Islam Indonesia itoe, ialah:*
> *HOEKOEM ISLAM*
> *Allahoe Akbar! Allahoe Akbar! Allahoe Akbar!*
> *Atas nama Oemmat Islam Bangsa Indonesia*

Imam
NEGARA ISLAM INDONESIA
ttd.
(S.M. KARTOSOEWIRJO)
MADINAH-INDONESIA, 12 Sjawal 1368 / 7 Agoestoes 1949

Proklamasi itu selanjutnya diberi penjelasan terdiri atas 10 pasal sebagai berikut:

Pendjelasan singkat:

1. Alhamdoelillah, maka Allah telah berkenan menganoegerahkan Koernianja jang Maha Besar atas Oemmat Islam Bangsa Indonesia, ialah: Negara Koernia Allah, jang melipoeti seloeroeh Indonesia.
2. Negara Koernia Allah itoe, adalah ,,Negara Islam Indonesia". Atau dengan kata lain ,,Ad-daoelat-oel-Islamijah" atau ,,Daroel Islam" atau dengan singkatan jang sering dipakai orang ,,D.I." selandjoetnja hanja dipakai satoe istilah jang resmi, ja'ni ,,NEGARA ISLAM INDONESIA".
3. Sedjak boelan September 1945, pada ketika toeroennja Belanda di Indonesia choesoes di Poelau Djawa, atau seboelan kemoedian daripada Proklamasi berdirinja ,,Negara Repoeblik Indonesia" maka revoloesi Nasional jang dimoelai menjala pada tanggal 17 Agoestoes 1945 itoe, meroepakan ,,perang" sehingga sedjak masa itoe seloeroeh Indonesia di dalam Keadaan Perang.
4. Negara Islam Indonesia toemboeh di masa perang, di tengah-tengah revoloesi Nasional, jang pada achir kemoediannja, setelah Naskah Renville dan Oemmat Islam bangoen serta berbangkit melawan keganasan pendjadjahan dan perboedakan jang dilakoekan oleh Belanda, beralih sifat dan woedjoednja mendjadilah Revoloesi Islam atau Perang Soetji.
5. Insja Allah, perang soetji atau revoloesi Islam itoe akan berdjalan teroes hingga:
   a. N.I.I. berdiri dengan sentaoesa dan tegak tegoehnja, keloear dan ke dalam 100% de-facto dan de jure di seloeroeh Indonesia.
   b. Lenjapnja segala matjam pendjadjahan dan perboedakan.
   c. Teroesirnja segala moesoeh Allah, moesoeh Agama dan moesoeh N.I.I.
   d. Hoekoem2 Islam berlakoe dengan sempoerna di seloeroeh N.I.I.
6. Selama itoe ,,N.I.I." meroepakan: Negara Islam di masa Perang, atau Daroel Islam Fi Waqtil-Harbi.

7. Maka segala Hoekoem jang berlakoe dalam masa itoe, di dalam lingkoengan N.I.I. ialah Hoekoem Islam di masa Perang.
8. Proklamasi ini disiarkan ke seloeroeh doenia, karena Oemmat Islam Bangsa Indonesia berpendapat dan berkejakinan bahwa kini adalah tiba saatnja melakoekan wadjib soetji, jang seroepa itoe bagi mendjaga keselamatan N.I.I. dan segenap Ra'iatnja, serta bagi memelihara kesoetjian Agama, teroetama sekali bagi ,,Mendhohirkan Keadilan Allah di Doenia".
9. Pada dewasa ini Perdjoeangan Kemerdekaan Nasional jang dioesahakan selama hampir boelat 4 (empat) tahoen itoe kandaslah soedah.
10. Semoga Allah membenarkan Proklamasi Berdirinja Negara Islam Indonesia itoe, djoea adanja.
    Insja Allah Amin.
    Bismillahi…… Allahoe Akbar.

Lahirnya Negara Islam Indonesia sesungguhnya bukanlah hasil rekayasa manusia dalam hal ini adalah Kartosoewirjo, melainkan af'alullah. Yaitu perbuatan serta program langsung dari Allah SWT. Manakala kita mau mengamati dengan arif dan bijaksana perjalanannya sejarah Indonesia, di situ terlihat jelas bahwa manusia hanyalah sebagai fa'il. Pelaksana program dari keinginan Allah tersebut.

Pada saat proklamasi ini diikrarkan, sejak saat itulah Umat Islam di seluruh Indonesia khususnya, telah memperoleh kemerdekaannya secara hakiki. Mereka telah memiliki negara dan pemerintahan yang akan melaksanakan syari'at Islam. Karena sesungguhnya Islam datang untuk memerdekakan seluruh umat manusia. Jika kaum muslimin berada di suatu negara, di manapun di seluruh muka bumi ini, baik mereka menjadi penduduk mayoritas ataukah minoritas.

Sementara mereka tidak bebas melaksanakan syari'at Islam dan tidak pula diperintah oleh aturan serta undang-undang Islam. Hakekatnya mereka belum merdeka, tidak akan pernah ada kebebasan. Apalagi kemerdekaan dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam di sebuah negara yang menolak berlakunya hukum Allah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits shahih. Maka menjadi kewajiban setiap muslim untuk memperjuangkan kemerdekaannya bebas dari segala bentuk belenggu jahiliyah demi kemanusiaan, keadilan, serta kebebasan melaksanakan syari'at Islam.

Sebesar apapun aktivitas yang dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam di negara yang bukan negara Islam. Dan betapapun barangkali menguntungkannya, segala itu tidak akan dapat menghapus kewajiban mereka untuk berjuang menegakkan Negara Islam, yang menjamin terlaksananya hukum Allah dan Rasul-Nya di muka bumi ini. Sekarang timbul satu pertanyaan,

apakah setiap pribadi muslim menginginkan agar Darul Islam (Negara Islam) itu tegak? Pertanyaan ini patut disertakan, karena masalah Negara Islam ini menjadi polemik yang berkepanjangan di sekitar pandangan kaum muslimin bahwa di dalam Al-Qur'an tidak ada istilah yang memuat tentang Negara Islam tersebut, terlebih lagi bahwa Rasulullah Muhammad saw itu tidak pernah mendirikan Negara Islam atau Daulah Islam atau Darul Islam. Wallahu 'alam ! Kartosoewirjo sebelumnya telah merealisasikan gambaran tentang sebuah Negara Islam, ketika pada bulan Mei 1948 membentuk Dewan Imamah, begitu pula Undang-undang Dasar Negara Islam Indonesia (Qanun Asasi) disertakan penjelasan singkat yang terdiri atas 10 pokok yang konsepnya telah disusun pada bulan Agustus 1948. Maka dengan demikian secara formal telah mendirikan Negara Islam.

Susunan organisasi kenegaraan dari Negara Islam Indonesia pada hakekatnya hanyalah sederhana saja, namun cukup praktis. Bahkan dalam kesederhanaan tersebut tampak adanya originalitet pemikiran Kartosoewirjo dalam mengatur administrasi "pemerintahan" dan "kenegaraan" dan "ketentaraan" yang sedang tumbuh. Ketika Negara Islam Indonesia masih dalam prototype, yaitu pengaturan kekuasaan sebelum proklamasi, maka pada tanggal 25 Agustus 1948 dikeluarkan apa yang disebut "Maklumat Imam No 1", di mana disebutkan peraturan-peraturan yang menyangkut bidang pemerintahan baik pemerintahan sipil maupun militer. Dalam maklumat No 1 itu disebutkan juga antara lain bahwa seluruh pimpinan pemerintahan sipil diberi tugas sebagai "Komandan pertahanan" di daerahnya masing-masing, sedang pemimpin ketentaraan diberi tugas sebagai "komadan pertempuran". Dalam mengatur kekuasaan yang sedang tumbuh ini Kartosoewirjo mengerahkan potensi yang berada di bawah kekuasaannya. Adapun pembagian administrasi pemerintahan Negara Islam Indonesia sebelum proklamasi adalah sebagai berikut:

1. Divisi dan Wilayah. (Wilayah = Propinsi).
   Divisi adalah pemerintahan militer yang dipimpin oleh panglima Divisi dan Gubernur bertindak selaku Komandan Pertahanan bagian Politik.
2. Resimen dan Residensi. (Karesidenan).
   Pemerintahan militer dipimpin oleh Komandan Resimen dan Residen bertindak selaku komandan Pertahanan Daerah dan bagian politik.
3. Batalyon dan Kabupaten.
   Pemerintahan militer dipimpin Komandan Batalyon dan Komandan Pertahanan Kabupaten I dan II dipimpin oleh Bupati I dan II.
4. Kecamatan.
   Dipimpin oleh Camat/Wakil Camat dan Komandan pertahanan kecamatan I dan II.

Berhubung tidak ada parlemen, semua peraturan Negara Islam Indonesia dikeluarkan oleh Komandemen Tertinggi, yaitu Dewan Imamah yang dulu, dalam bentuk Maklumat yang ditandatangani oleh Imam dan kemudian dibagi-bagikan. Adapun anggota Dewan Imamah yang pertama kali terbentuk setelah proklamasi Negara Islam Indonesia adalah:
Imam dan Panglima Tertinggi merangkap Kuasa Usaha (Menteri Luar Negeri).-- S.M. Kartosoewirjo.
Wakil Imam dan Komandan Divisi -- Kamran.
Menteri Dalam Negeri -- Sanusi Partawidjaja.
Menteri Penerangan -- Toha Arsyad.
Menteri Keuangan -- Udin Kartasasmita.
Menteri Pertahanan -- R. Oni.
Menteri Kehakiman -- Gozali Tusi.

Pada tanggal 3 Oktober 1949 keluarlah Maklumat Komandemen Tertinggi No. 1 tentang penyesuaian susunan pemerintahan (Administrasi Pemerintahan N.I.I.) dengan situasi dan kondisi yang sedang berlangsung saat itu. Dalam penjelasan maklumat Komandemen Tertinggi No. 1 tersebut antara lain dikatakan sebagai berikut:

"Segala model organisasi dibentoek dengan tjara jang amat praktis jang sekiranja dapat menoenaikan wadjibnja dengan tjepat dan tepat sesoeai dengan toentoetan pergolakan revoloesi. Dan segala sesoeatoe jang menghambat, memperlambat, menghalangi dan menentang kepada hoekoem revoloesi itoe haroes dan wadjiblah diloempoehkan, dipatahkan dan dimoesnahkan".

Inilah beberapa sebab, maka "Komandemen Tertinggi merasa wadjib, dengan selekas moengkin mengoebah Soesoenan Pemerintahan Negara Islam Indonesia dengan woedjoed ,,Komandemen Tertinggi Angkatan Perang NII". Dengan bentoek sekarang, maka oeroesan politik dan militer dipersatoekan. Bahkan segala oesaha dan tjabang2nja „Pemerintahan Negara Islam Indonesia" disesoeaikan dengan beleid politik dan gerakan militer. Ahli politik haroes di-permiliter-kan (gemilitairieseerde politici). Sebaliknja ahli militer haroes di-perpolitik-kan (verpolitiseerde militaren).

Maklumat Komandemen Tertinggi No. 1 tersebut dalam batas-batas tertentu juga dapat memberikan gambaran sampai di mana dinamika cara berpikir Kartosoewirjo dalam usahanya untuk mengemudikan dan menguasai NII yang sedang tumbuh dalam masa pancaroba itu. Pemisahan kekuasaan politik dan militer sebagaimana dipraktekkan oleh RI dan yang ternyata banyak merugikan perjuangan itu telah memberikan pelajaran bagi Kartosoewirjo untuk

mengeluarkan MKT No 1 tersebut. Dengan demikian maka pimpinan pemerintahan dan kenegaraan dapat dipersatukan dan tidak akan terjadi dualisme dalam pimpinan.

Terutama untuk mencegah dualisme dan pertentangan yang mungkin disebabkan oleh perasaan superior antara satu golongan dengan golongan lainnya. Misalnya golongan militer yang merasa lebih tinggi daripada golongan sipil atau sebaliknya. Program yang telah dirancang oleh Kartosoewirjo tersebut pada hakekatnya memang baik untuk dipraktekkan dalam negara yang sedang masa bergolak atau dalam keadaan perang. Kepentingannya terutama terletak pada penyatuan pimpinan dan potensi yang ada dalam negara tersebut. Masing-masing pemimpin dari suatu daerah, baik ia militer maupun sipil dapat dengan mudah dan lancar menggerakkan alat-alat kekuasaan yang ada pada mereka. Seorang komandan sipil yang telah dimiliterisir kalau perlu dapat memberikan perintah kepada anggota-anggota pasukan bersenjata untuk menghadapi suatu keadaan yang timbulnya secara tiba-tiba. Demikian pula seorang Komandan militer yang telah diverpolitisir dapat memerintahkan alat-alat kekuasaan sipil, sekiranya memang diperlukan.

Jika di suatu daerah yang dikuasi DI antara pimpinan militer dan sipil tidak ada persesuaian paham dalam menghadapi sesuatu persoalan, maka pimpinan yang lebih tinggi akan mengambil kebijaksanaan untuk menyelesaikan persoalan tersebut dan mendamaikan perselisihan yang terjadi antara kedua pimpinan daerah tersebut. Dan apabila usaha dari pimpinan yang lebih tinggi tersebut tidak berhasil maka diadakanlah mutasi atau pemindahan dari salah seorang pimpinan daerah tersebut sampai kedua pimpinan dalam suatu daerah tersebut benar-benar merupakan dwi-tunggal. Demikianlah salah satu dari segi kebaikan dari sistim penyatuan pimpinan yang pernah dipraktekkan oleh Kartosoewirjo untuk mengatur kekuasaan dalam Negara Islam Indonesia.

Selanjutnya mari kita lihat bagaimana susunan bagian dari sistem pemerintahan Negara Islam Indonesia dalam keadaan perang berdasarkan maklumat Komandemen Tertingi Negara Islam Indonesia No.1 tersebut:

ORGANISASI PEMERINTAHAN

NEGARA ISLAM INDONESIA

Menurut Maklumat Komandemen Tertinggi No. 1

1. Komandemen Tertinggi (K.T). Pimpinan Umum, politis dan milite dipegang oleh Imam sebagai Panglima Tertinggi. Pimpinan Harian, dilakukan oleh Kepala Staf Umum (K.S.U.) atau “Generale-Staf”.

2. Komandemen Wilayah (K.W). Pimpinan Umum, politis dan militer dilakukan oleh Panglima Komandemen Wilayah (Plm. K.W.), selanjutnya bila berhalangan, maka kewajiban itu dilakukan oleh Kmd. II dan Kmd. III (wkl. I dan wkl. II Plm. K.W.). Selainnya, jika dilakukan pembagian pekerjaan yang merupakan pembagian tugas. Pimpinan Harian, oleh Kepala Staf Komandemen Wilayah (K.S. K.W.).
3. Komandemen Daerah (K.D). Pimpinan Umum, oleh Kmd. K.D. (Kmd. I). Jika berhalangan, pindah tugas itu kepada Kmd. II dan Kmd. III (wkl. 1 Kmd. K.D dan wkl. Kmd. K.D.). Selainnya, jika dilakukan pembagian pekerjaan yang merupakan pembagian tugas. Pimpinan Harian, dilakukan oleh Kepala Staf (K.D) (K.S.K.D.)
4. Komandemen Kabupaten (K.K.). Pimpinan Umum, oleh Kmd. K.K. (Kmd.I.) Jika berhalangan, maka kewajiban itu beralih kepada Kmd. II dan Kmd. III (wkl. I dan wkl. II Kmd. Kmd. K.K.). Selainnya, jika dilakukan pembagian pekerjaan yang merupakan pembagian tugas. Pimpinan Harian, dipegang oleh Kepala Staf K.K. (K.S.K.K.).
5. Komandemen Kecamatan (K. Kt). Pimpinan Umum, oleh K. Kt. (Kmd. I), atau Kmd. II, (wkl. I Kmd. K. Kt.). Pimpinan Harian, oleh Kepala Staf K. Kt. (K.S.K.Kt.).

Untuk melengkapi administrasi kenegaraan, maka Negara Islam Indonesia menetapkan "Administrasi Keuangan Negara" guna menstabilkan roda pemerintahan negara yang serasi dengan tuntutan negara di masa perang, hingga sanggup dan siap sedia untuk menghadapi segala kemungkinan (war minded). Adapun keterangannya sebagai berikut:
Hal: Ma'na beberapa istilah:

1. Infaq
   Infaq ialah: kewajiban tiap-tiap warga negara terhadap negara, baik yang merupakan harta ataupun benda, yang ditunaikan:
   a. Di tiap-tiap masa, damai atau perang (infaquddin); dan
   b. hanya di dalam masa perang (infaq fi sabilillah).
2. Sidkah tathawu'…… ma'lum.
3. Zakat …… ma'lum.
4. Fitrah …… ma'lum.
5. Ta'zir ialah: denda, sepanjang hukum yang dijatuhkan oleh mahkamah.
6. Harta Ma'sum ialah: harta-benda kepunyaan seorang Muslim warga-negara (Mujahid) yang :
   a. meninggalkan tempat-kedudukannya, karena tugas atau karena tertawan oleh musuh; dan
   b. tiada orang atau keluarga yang memelihara harta bendanya.

7. Harta Mauquf ialah: harta-benda kepunyaan seorang warga-negara Muslim yang:
   a. meninggalkan tempat kedudukannya;
   b. tiada persekutuan, sangkutan dan hubungan dengan fihak musuh atau/dan penghianat; dan
   c. tiada orang atau keluarga yang memelihara harta bendanya.
8. Fai ialah:
   a. barang/harta yang dirampas dari musuh, tidak dengan jalan perang;
   b. barang/harta penghianat;
   c. barang/harta orang yang bersekutu dengan golongan a. dan b.;
   d. barang/harta orang murtad kepada Agama dan Negara;
   e. barang/harta yang disediakan untuk atau/dan dipergunakan oleh musuh; dan
   f. barang/harta orang dzimi (orang kafir yang di bawah perlindungan Pemerintah Negara Islam Indonesia), yang meninggal dunia, sedang dia tidak mempunyai ahli waris.
9. Ghanimah ialah: segala harta-benda yang diperdapat daripada hasil pertempuran.
10. Harta Shalab ialah: semua barang, kecuali alat perang, yang ada dan melekat pada badan musuh (tentara atau/dan penghianat), ketika dia dibunuh di luar keputusan mahkamah. Barang-barang yang dibawa, di luar yang ada dan melekat pada badannya, ketika ia dibunuh, maka barang-barang itu adalah Ghanimah. Sedang barang-barang yang ditinggalkannya (di rumah dan kekayaan lainnya) adalah harta Fai.
11. Adapun barang-barang yang diperdapat dari musuh atau/dan penghianat, karena menjalani hukuman mati atas keputusan Mahkamah, maka barang itu bukanlah Shalab, melainkan masuk barang Fai.

    Hal Pembagian Infaq Negara:

    1. Desa ……. 25 %
    2. K. Kt. (Komandemen Kecamatan) …….. 20 %
    3. K.K. (Komandemen Kabupaten) ……. 15 %
    4. K.D. (Komandemen Daerah) ……... 15 %
    5. K.W. (Komandemen Wilayah) ……. 15 %
    6. K.T. (Komandemen Tertinggi) ……. 10 %

    Pembagian Sidkah, Zakat dan Fitrah:

    Seperti yang telah diatur oleh Hukum Syara' Hal Pemeliharaan harta Ma'sum dan Mauquf.

    Harta Ma'sum dan Mauquf dibagi menjadi dua macam:

    (1). Barang dan harta, yang tidak dapat diangkat; dan

    (2). Barang dan harta yang dapat diangkat.

1. Pemeliharaan harta Ma'sum dan Mauquf, yang tidak dapat diangkat.

Jika harta Ma'sum dan Mauquf yang dipelihara itu membuahkan hasil, maka pendapatan bersih daripadanya, dibagi sebagai yang berikut:

(1). 20 % untuk Pemelihara atau pengusaha;

(2). 20 % ,, Desa;

(3). 15 % ,, K.Kt. (Komandemen Kecamatan).

(4). 15 % ,, K.K. (Komandemen Kabupaten).

(5). 10 % ,, K.D. (Komandemen Daerah).

(6). 10 % ,, K.W. (Komandemen Wilayah).

(7). 10 % ,, K.T. (Komandemen Tertinggi).

2. Pemeliharaan harta Ma'sum dan Mauquf, yang dapat diangkat:

(1). Pengangkutan dan pemeliharaan atasnya, di tugaskan kepada Kmd. K.Kt. yang bersangkutan, dengan pengawasan K.K.

(2). Tiap-tiap instansi Negara mempunyai hak untuk mempergunakan harta Ma'sum dan Mauquf tersebut di atas, dengan pemeliharaan baik-baik, setelah berdamai dengan Kmd. K.Kt. yang bersangkutan.

(3). Laporan ini dikirimkan oleh Kmd. K.Kt. tersebut, kepada Kepala Majelis Keuangan, dan tembusannya kepada K.K.

Catatan:

(1). Harta Ma'sum yang dipelihara dan dipergunakan oleh Negara itu, boleh dipulangkan kembali kepada yang mempunyai, apabila ia telah kembali di tempat tinggalnya dan ternyata bebas daripada tuntutan hukum, sepanjang keputusan Mahkamah.

(2). Harta benda Mauquf yang dipergunakan dan dipelihara oleh Negara itu, boleh dipulangkan kembali kepada yang mempunyainya, apabila ia telah kembali di tempat tinggalnya dan ternyata bebas daripada tuntutan hukum, sepanjang keputusan Mahkamah.

(3). Harta Mauquf yang termaktub di dalam lampiran III catatan (2), beralih sifat dan hukumnya menjadi Harta Fai, bila yang empunya ternyata masuk salah satu golongan, seperti yang tertulis dalam Lampiran I angka 8 huruf a. hingga f.

Hal Pembagian harta Fai

Harta Fai dibagi menjadi dua macam, ya'ni:

(1). Barang-barang yang dapat diangkat (roorende goederen) dan

(2). Barang-barang yang tidak dapat diangkat (on roerende goederen).

1. Pembagian barang-barang Fai yang dapat diangkat:

(1). 4 % untuk Imam/Plm. Tertinggi dan keluarganya;

(2). 4 % ,, Mashalihul-Muslimin, di bawah kekuasaan Imam/Plm. Tertinggi;

(3). 4 % ,, Fukara dan Masakin;

(4). 4 % ,, Yatama;

(5). 4 % ,, Ibnu-Sabil;

(6). 20 % ,, Tentara-pendudukan, atau / dan Tentara yang ikut serta dan ditugaskan untuk perampasan tsb., kesatuan polisi dan Baris yang bersangkutan (yang mengerjakan).

(7). 10 % ,, Desa, di mana barang itu dirampas;

(8). 10 % ,, K.Kt. yang bersangkutan;

(9). 10 % ,, K.K. yang bersangkutan;

(10). 10 % ,, K.D. yang bersangkutan;

(11). 10 % ,, K.W. yang bersangkutan;

(12). 10 % ,, K.T.

2. Pembagian barang harta Fai yang tidak dapat diangkat: Jika pemeliharaan dan pengusahaan barang-barang itu memberikab hasil, maka pendapatan bersih daripadanya diatur sebagai berikut:

(1). 4 % Untuk Imam/Plm. Tertinggi dan keluarganya;

(2). 4 % ,, Mashalihul Muslimin, di bawah kekuasaan Imam/Plm. Tertinggi;

(3). 4 % ,, Yatama;

(4). 4 % ,, Fuqara dan Masakin;

(5). 4 % ,, Ibnu Sabil;

(6). 20% ,, Pengusaha;

(7). 15% ,, Desa;

(8). 15% ,, K.Kt.;

(9). 10% ,, K.K.;

(10). 7 ½% ,, K.D.;

(11). 7 ½% ,, K.W.; dan

(12). 5 % ,, K.T.

Hal Pembagian Ghanimah Semuanya pendapatan Ghanimah, dengan segera harus dibagi menurut aturan sebagai berikut:

(1). 4 % untuk Imam/Plm. Tertinggi dan keluarganya;

(2). 4 % ,, Mashalihul Muslimin, di bawah kekuasaan Imam/Plm. Tertinggi;

(3). 4 % ,, Fuqara dan Masakin;
(4). 4 % ,, Yatama;
(5). 4 % ,, Ibnu Sabil;
(6). 25 % ,, Kesatuan Tentara, Polisi, Baris dll, yang ikut serta dalam gerakan di waktu mendapatkan Ghanimah (mengerjakan);
(7). 10 % ,, Batalyon yang kesatuannya ikut serta melakukan tugas tersebut, dalam (6); jika dalam kesatuan daripada beberapa batalyon, maka jumlah ini (10%) dibagi rata atas banyaknya batalyon yang bersangkutan.
(8). 5 % ,, Batalyon yang memegang Teritorium;
(9). 5 % ,, Detasemen Polisi, yang memegang Daerah;
(10). 15% ,, Komandemen Kecamatan, darimana Ghanimah itu diperoleh.
(11). 10% ,, Resimen yang daerah gerakannya itu masuk dalam daerah tugasnya; dan
(12). 10% ,, Divisi yang bersangkutan.

Hal Pembagian Shalab. Shalab harus diberikan kepada pembunuh atas musuh atau dan penghianat, di luar keputusan Mahkamah.

Tentang kedudukan Tentara Islam Indonesia, secara singkat dapat diterangkan sebagai berikut:
Sebagai tentara Allah, jang menerima dan bertanggoeng djawab langsoeng atas penoenaian toegas Ilahy moetlak, toegas mendhohirkan Keradjaan Allah di doenia, toegas menggalang Negara Koernia Allah, Negara Islam Indonesia. Kiranja toegas jang maha soetji ini dapat dilaksanakan dengan sempoernanja. Dengan Koernia Tolong dan Koernia Allah djoega Insja Allah Amin.
Sebagai Tentara Ideologi, tegasnja: Ideologi Islam. Oleh karenanja, maka tiap-tiap anggota Tentara Islam Indonesia, dan setiap Moedjahid oemoemnja, haroeslah jakin akan:
1. Kesabaran Islam dan Keadilan Hoekoem-hoekoem Allah dan
2. Wadjib membela berdirinja Negara Koernia Allah, Negara Islam Indonesia.

Realisasi daripada kejakinan itoe toemboeh daripada:
1. Tekad jang soetji, (Tasdiq bil-qalbi), menanam dalam-dalam dan hidoepan sehari-hari tampak kejakinan jang koeat dan semangat membadja.

2. Pernjataan jang tegas dan pasti, (Iqrar billisan), dengan kesanggoepan jang soenggoeh-soenggoeh dan sempoernanja, bagi melakoekan toegas maha soetji: mendhohirkan ke'adilan dan kebesaran Islam, dipermoekaan boemi Allah, Indonesia. Dan
3. Kemadjoean, ketjakapan, kemahiran, kepandaian dll., (Qalboel bil amal), oentoek melaksanakan wadjib soetji : Menggalang Negara Koernia Allah, Negara Islam Indonesia! Dengan peloeh (keringat) dan darah, dengan djiwa dan raga.

Sebagai Tentara Islam wadjib:

1. Taat dengan sepenoeh-penoehnja kepada Allah, kepada Rasoeloelah, dan kepada Oelil Amri.
2. Patoeh kepada Pimpinan atasan, dengan dasar disiplin tentara jang tanggoeh.
3. Mentjontoh soennah Nabi Moehammad Clm., dan sahabat-sahabat beliaoe, serta pahlawan-pahlawan Islam kemoedian daripada itoe, jang telah mendapat kesempatan dan anoegerah Allah, oentoek dan memoeliakan Agama Allah, lebih daripada sesoedah jang boleh dipikirkan.
4. Mendjadi tjontoh dan pelopor bagi Oemmat Islam dan Moedjahidin seloeroehnja, dalam mempersembahkan dharma-soetji, dalam melakoekan perang (totaliter) dan menggelorakan revoloesi Islam, sehingga hoekoem Alllah berlakoe dengan sempoernanja, di tengah-tengah Oemat Islam dan masjarakat Indonesia.
5. Mendjadi pembela Agama, teroetama agama Islam, dalam arti kata jang loeas dan sempoerna.

Sebagai Tentara Rakjat haroes pandai, tjakap dan tjoekoep mendjadi:
1. Pembela Rakjat kearah Mardlotillah jang sedjati.
2. Pembela Rakjat teroetama fakir-miskin dan jang tertindas oleh kekoeasaan djahiliyah (seperti: R.I. – R.I.K.) dan Moedjahidin oemoemnja.
3. Hamba Allah (Moeslim, Moedjahid, Moewahid, jang berachlak, berboedi pekerti dan berboeat demikian roepa, sehingga patoet menerima dan mendapat kepertjajaan, penghargaan dan ketjintaan Rakjat.

P.P.T. I (Peraturan Panglima Tertinggi).
Tentara Islam Indonesia:
Hendaklah diperhatikan poela dengan soenggoeh-soenggoeh:
1. Disiplin Tentara haroes dan wadjib diperhebat.

2. Tata tertib dan ketentaraan haroes selaloe diingati dan dipergoenakan sebaik-baiknja, teroetama di lapang peperangan.
3. Latihan ketentaraan hendaknja dilakoekan, menoeroet keadaan dan kesempatan, walaupoen masih di medan gerilja.

P.P.T. II

Tentara Islam Indonesia:

Boekanlah Tentara boeroeh, tentara belian dan tentara pendjadjah jang berlakoe sebagai "alat mati" jang diperintah dan digerakkan oleh toeannja, komandannja, jang memberi makan pakaian kepadanja.

Boekanlah Tentara jang kosong daripada ideologi, sepi dari pada kejakinan dan djaoeh daripada keagamaan dan ketoehanan (Islam), serta tiada berdjiwa hidoep. Boekanlah Tentara Djahilijah, seperti tentara R.I (T.N.I), jang tidak mengenal hoekoem-hoekoem keadilan, kebenaran, dan kemanoesiaan; bahkan, djika mereka satoe-satoe kali tahoe, maka mereka selaloe sengadja melanggar dan mengindjak-indjaknja. Dan boekanlah poela Tentara alat dan kekoeasaan negara jang dholim dan angkara moerka (imperialisme, fascisme dll.).

P.P.T. III

Sapta Subaja:

Di samping Bai'at jang telah dinjatakan oleh tiap-tiap Tentara Islam Indonesia, maka di waktoe jang tertentoe, menoeroet lapang dan keadaan, hendaklah dinjatakan bersama atau masing-masing oleh anggota Tentara Islam Indonesia, djandji-djandji Tentara, sebagaimana jang tertjantoem dalam Sapta Soebaja ini:

SAPTA SOEBAJA

1. Seorang Tentara Islam Indonesia haroes berdisiplin.
2. Seorang Tentara Islam Indonesia haroes berani.
3. Seorang Tentara Islam Indonesia haroes membela Pemimpin Negara dan Komandan Tentara, sebagai toelang poenggoeng Negara.
4. Seorang Tentara Islam Indonesia haroes djoedjoer dan hemat.
5. Seorang Tentara Islam Indonesia haroes bidjaksana.
6. Seorang Tentara Islam Indonesia haroes mentjintai dan membela sesama Moedjahid.
7. Seorang Tentara Islam Indonesia pantang menjerah.

P.P.T. IV

Kedoedoekan Polisi Islam Indonesia dan Baris.

Kedoedoekan (Polisi Islam Indonesia) menghampiri (mendekati) kedoedoekan Tentara Islam Indonesia. Oleh sebab itoe, maka Polisi mendjadi pembantoe tentara jang pertama dan teroetama, istimewa dalam soal-soal militer dan kemiliteran. Adapoen Baris (Barisan Rakyat Islam) hendaknja betoel-betoel meroepakan Barisan Rakjat, Pembela Rakjat dan Tentara Rakjat.

P.P.T. V

Kedoedoekan Rois dan Baris.

Golongan Rois dan Baris tidak masoek Angkatan Perang Negara Islam Indonesia, melainkan mendjadi Pembantoe yang aktif, di dalam menoenaikan toegas-soetji, menggalang Negara Koernia Allah, Negara Islam Indonesia. Kepada Panglima K.W./Div., Kmd./Res., Kmd. K.K/Bat., dibolehkan mengeloearkan peratoeran-peratoeran tersendiri, bagi keperloean golongan Rois dan Baris, sesoeai dengan isi dan maksoed jang terkandoeng dalam M.K.T. (Makloemat Komandemen Tertinggi).

Bendera NII

Dalam maklumat Militer Negara Islam Indonesia No. II, memutuskan bahwa Negara Islam Indonesia memiliki 3 macam bendera di antaranya:

1. Bendera Negara: Merah-Putih berbulan bintang;
2. Bendera Tentara: Dasar (warna hijau), bergambar bulan bintang (putih);
3. Bendera Negara/Tentara dalam keadaan Perang: Dasar (warna merah) bergambar bulan bintang (warna putih).

Dalam manifesto politiknya yang dikeluarkan tak lama setelah proklamasi NII, Kartosoewirjo menentang KMB dan pembentukan Republik Indonesia Serikat. Pernyataan dia dalam manifesto tersebut adalah sebagai berikut: "Telah tiba saat jang menentoekan nasib bangsa Indonesia, teroetama nasib Oemat Islam Indonesia. Perdjoeangan kini haroes diteroeskan dengan Islam sampai Mardlotillah tertjapai, itoe adalah satoe-satoenja djalan oentoek membebaskan Oemmat Islam dari segala penderitaan di doenia dan di achirat.

Moesoeh-moesoeh Allah, moesoeh-moesoeh agama Islam dan moesoeh Negara Islam Indonesia haroes dihantjoerkan agar hoekoem Islam jang sesoeai dengan adjaran Al-Qoer'an dan Soennah Nabi setjara menjeloeroeh dan oetoeh dapat dilaksanakan di seloeroeh Indonesia.

Menurut Manifesto Politiknya Kartosoewirjo menjelaskan bahwa "Negara Islam Indonesia dapat mendjalin hoeboengan dengan setiap negara lain, tetapi dengan sjarat, negara terseboet haroes mengakoei Negara Islam Indonesia, bahkan djoega dengan Belanda Negara Islam Indonesia dapat mengadakan hoeboengan berdasarkan sjarat terseboet".

Karena Islam mentjakoep semoea aspek kehidoepan manoesia, boekan hanja jang berhoeboengan dengan keachiratan, melainkan djoega jang berhoeboengan dengan kehidoepan bermasjarkat dan bernegara, maka setjara teoritis di dalam seboeh negara Islam tidak terdapat pemisahan antara negara dan pemerintah, antara politik dan agama.

Ada doea anasir jang haroes disatoekan, pertama: "Satoe negara jang berdaoelat penoeh 100 % keloear dan kedalam, "de facto dan de jure". Kedoea: "Haroes ada peratoeran Allah, jang meroepakan agama Allah, atau agama Islam". Kedoea anasir ini haroes bersatoe atau dipersatoekan. Boekan sebagai minjak dan air jang ada di seboeh perioek.

Sementara itu sejak tanggal 23 Agustus – 2 November 1949 dalam Konferensi Meja Bundar Di Den Haag dibahas masa depan Indonesia, salah satu hasilnya adalah perjanjian tentang "penyerahan" kedaulatan oleh Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Di samping itu dari perjanjian-perjanjian tersebut banyak dikaitkan dengan persetujuan lain yang mengarah ke suatu ketergantungan langsung RIS kepada Belanda dan memungkinkan Belanda mengontrol politik dalam dan luar negeri RIS. Masalah berikutnya adalah peleburan anggota-anggota KNIL ke dalam APRIS dan pembentukan misi militer Belanda yang akan ditugaskan untuk melatih anggota-anggota APRIS. Dan yang terpenting dari masalah itu adalah bagaimana upaya pemerintah RIS yang dipimpin oleh Soekarno menyelesaikan kasus Darul Islam sampai tuntas.

Pada akhir bulan Oktober 1949 rancangan Undang-Undang Dasar RIS selesai disusun, dan pada tanggal 27 Desember 1949 dilaksanakan penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada RIS. Sehari kemudian Soekarno diangkat kembali menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat.

Dalam sebuah keterangan pemerintah NII pada awal Oktober 1949, Kartosoewirjo mengumumkan pendapatnya tentang Konferensi Meja Bundar: "Konferensi terseboet boekanlah seboeah konferensi antara doea negara jang berdaoelat. Negara soedah didjoeal! Kedaoelatan telah moesnah! Kemerdekaan djatoeh di tangan moesoeh!". Pengakuan kedaulatan Republik Indonesia dari Belanda membuat keadaan lebih mendesak bagi Soekarno, Bagaimana caranya untuk mencari penyelesaian masalah secepatnya tentang Negara Islam Indonesia yang telah diproklamasikan oleh Kartosoewirjo. Namun Pemerintah RIS dan Tentara Republik merasa dihadapkan pada suatu dilema. Karena sebagian dari Tentara Republik yang tergabung di dalam TNI tidaklah mungkin menindak secara cepat para Tentara Islam Indonesia disebabkan sedikitnya jumlah pasukan dan tidak dimilikinya senjata serta perlengkapan. Di samping itu, lawan mereka walaupun dipandang dengan sebelah mata ternyata memperoleh simpati yang sangat besar dari rakyat Jawa Barat. Itulah sebabnya mengapa kebijaksanaan pemerintah sering berubah dalam menghadapi persoalan ini. Apakah ingin melakukan tindakan operasi militer atau memberikan amnesti? Selain daripada itu banyak sekali kritikan yang dialamatkan kepada pemerintah tentang penyelesaian masalahnya, terutama dari kalangan politisi Islam yang mendesak untuk diadakan perundingan.

Maka pada bulan Desember 1949 diadakan sebuah usaha untuk membujuk atau menyadarkan Kartosoewirjo supaya dia kembali ke dalam pangkuan Republik. Usaha pertama yang dilakukan oleh pemerintah RIS yaitu dengan menugaskan menteri agama K.H. Masjkur yang akan berangkat ke Yogyakarta untuk mengadakan pembicaraan dengan Kartosoewirjo. Namun gagal disebabkan K.H. Masjkur tidak bertemu dengannya.

Dalam kongres Muslimin Indonesia pada tangal 20-25 Desember 1949, ada usaha untuk memasukkan pembahasan mengenai perjuangan suci DI/TII. Di mana sebagian besar dari pembicaraan para peserta kongres membela Kartosoewirjo, mereka menerangkan bahwa perjuangan suci DI/TII itu bukan menentang Republik melainkan ditujukan menentang Belanda, dan "anak-anak kita" yang telah mempertahankan Jawa Barat dengan gigihnya berperang, telah melemahkan pengaruh Belanda di mata Internasional dan melemahkan kekuatan militer Belanda. Justru sebaliknya memperkuat posisi Republik dalam setiap perundingannya. Dalam kongres itu juga dinyatakan, mengapa Republik kemudian tidak berusaha untuk mengadakan kompromi dengan perjuangan suci DI/TII. Bila Republik telah bersedia untuk bekerja sama dengan negara-negara boneka yang mengkhianati Republik, mengapa Republik tidak pula menempuh jalan kompromi dengan perjuangan suci DI/TII. Bagaimanapun penggunaan kekerasan tidak akan

membawa penyelesaian masalah melainkan hanya menyebarkan benih dendam dalam hati umat Islam terhadap Republik. Selanjutnya dianjurkan supaya pemerintah RIS menyelesaikan masalah DI/TII dengan jalan damai, dan dalam kongres Muslimin tersebut menyokong resolusi Muktamar Masjumi untuk membentuk sebuah komisi pemerintah untuk menyelesaikan masalah DI/TII. Yang dikritik pula adalah Maklumat Rahasia MBKD NO. V. Dalam maklumat tersebut diperintahkan kepada semua instansi, militer, polisi, dan pamongpraja untuk mengawasi gerak-gerik umat Islam. Sebagai akibat adanya maklumat itu, anggota Masjumi didaftar, di setiap rapat-rapat Masjumi dihadiri oleh wakil pemerintah. Penderitaan dan korban yang diberikan umat Islam demikian diterangkan, umat Islam dihukum dengan sikap curiga, tuduhan dan pengawasan.

Melihat kenyataan pahit yang dirasakan oleh setiap partai, pada tanggal 1 Januari 1950 Kartosoewirjo mengeluarkan Maklumat Komandemen Tertinggi No. 5 yang isinya antara lain: "Menimbang bahwa lebih besar moedharat dan keroegiannja, bagi Negara dan Agama Allah serta Oemmat Islam Bangsa Indonesia, akan adanja soeatoe organisasi, party, perhimpoenan, perkoempoelan, gerakan atau apapoen djoega, di loear organisasi Negara, atau di loear organisasi jang dibentoek/disahkan oleh pemerintah. Maka memoetoeskan dilarang keras mendirikan, membentoek dan mempropagandakan satoe organisasi, di loear dan selain daripada organisasi Negara, atau organisasi jang dibentoek/disahkan oleh Pemerintah. Dan dileboer dalam salah satoe bagian daripada organisasi Negara, atau salah satoe bagian daripada organisasi jang dibentoek/disahkan oleh Pemerintah.

Setelah Belanda meninggalkan kekuasaanya di Indonesia, maka semakin hebatlah pertarungan politik di Indonesia. Kini ada 3 kekuatan yang saling tarik menarik untuk mempengaruhi peta politik yang sedang berkembang saat itu. Terutama dari kalangan Komunis, mereka berusaha selalu masuk dalam sendi-sendi kehidupan politik Indonesia dan mereka berupaya untuk mengadu kekuatan Nasionalis Islam dengan Darul Islam yang dipimpin oleh Kartosoewirjo. Oleh karena itu dalam setiap maklumat-maklumat yang dibuat oleh Komandemen Tertinggi makin sering menyerang Komunis yang dinyatakannya sebagai musuh utama. Dalam nota rahasia pada bulan Oktober 1950 yang dikirim kepada Soekarno, Kartosoewirjo menawarkan pada Soekarno agar bersama-sama dengan Negara Islam Indonesia membasmi komunisme dan meninggalkan politik netral yang dipraktekkan selama itu. Apabila RI mengakui NII, Kartosoewirjo menjamin bahwa RI akan mempunyai "sahabat sehidup semati" dalam menghadapi segala kemungkinan, terutama menghadapi komunisme, karena nasionalisme tidak dapat mengikat jiwa rakyat

Indonesia yang sebagian besar memeluk agama Islam. Kekuatan untuk membendung komunisme, menurut Kartosoewirjo hanya dimiliki Islam, karena itu secepatnya membuat Islam sebagai dasar negara.

Sebuah nota rahasia berikutnya yang isinya mirip seperti nota di atas, dikirimkan Kartosoewirjo kepada Sukarno pada bulan Februari 1951. Nota tersebut merupakan penjelasan nota sebelumnya. Kata Kartosoewirjo, "Pemimpin RI mempoenjai tanggoengdjawab oentoek membendoeng "aroes merah" dan sekaligoes haroes siap oentoek menghadapi "Perang Barata Joeda Djaja Binangoen". Dia meramalkan dalam notanya ini, bahwa nasionalisme Indonesia akan mengalami perpecahan, sebagian akan mengikuti komunisme dan sebagian lagi menggabungkan diri dengan golongan Islam.

Kartosoewirjo menerangkan, bahwa di Indonesia sejak tiga tahun berdirilah dua negara yang berbeda dalam hukum dan pendirinya, berlainan sikap dan haluan politiknya, bertentangan maksud dan tujuannya; pendek kata berselisih hampir dalam setiap hal. Filsafat Pancasila dinamakannya sebagai satu campuran masakan yang terdiri dari pada Sintoisme, Hokko Itciu, Islam-syirik dan nasionalisme jahil yang kemerah-merahan. Namun amat disayangkan kedua nota tersebut tidak pernah dijawab oleh Soekarno, sehingga Kartosoewirjo menyesalkan, bahwa pemerintah RI tidak menjawab kedua nota rahasianya, melainkan mencap negaranya sebagai "gerombolan Darul Islam", pemberontak, perampok, dll, dan menyerang negaranya dengan kekuatan senjata.

Semua usaha pemerintah RI untuk menyelesaikan masalah DI/TII secara damai dinamakannya sebagai perbuatan khianat dan sebagai penipuan. Yang sangat memalukan sekali bahwa diikut sertakannya para alim ulama sebagai penghubung dan pengantara. Yang pada akhirnya Kartosoewirjo menamakan Republik Indonesia sebagai "Repoeblik Indonesia Komoenis" (RIK) dan angkatan perangnya sebagai "Tentara Repoeblik Indonesia Komoenis (TRIK)". Dalam sebuah Manifesto Politik, Kartosoewirjo memberikan restrospeksi pada perkembangan politik Indonesia secara menyeluruh dan menjelaskan pandangannya tentang masa depan negeri ini. Dengan judul Manifesto politiknya "Heru Tjokro bersabda: Indonesia kini dan kelak". Menurutnya "Heru Tjokro" menggambarkan satu makhluk Allah yang menguasai dan memutarkan roda dunia menuju Mardlotillah sejati, yaitu Negara Islam Indonesia. Heru Tjokro artikan sebagai: "Penjapoe masjarakat Djahilijah, pembela gelap goelita, pembasmi barang siapa jang chianat dan moertad, koefoer, dan moenafiq tjoerang dan serong, pendjoeal Agama dan Negara. Tegasnja: segala anak-tjoetjoe iblis la'natoellah jang kini masih leloeasa

berkeliaran di tengah-tengah masjarakat dan rakjat Indonesia". Dan sebagai: "Pelepas dan pembebas bagi segenap perikemanoesiaan, daripada bentjana dan malapetaka, dlohir dan batin, di doenia dan achirat kelak".

Selanjutnya Kartosoewirjo menulis di dalam statement Negara Islam Indonesia, bahwa Soekarno telah menerangkan, Negara Islam Indonesia tidak bersedia diadjak beroending. "Kapan RIK mengadjak beroending, atau kapan mereka maoe beroending, demikian pertanjaannja: "Negara Islam Indonesia doea kali kirim nota rahasia, apa reaksi atas nota terseboet? Lebih baik Soekarno soeroeh periksa otak dan hatinja oleh achli djiwa jang tjakap dan berani teroes terang menjatakan penjakit Bung Karno beserta RIK.... "Lebih baik istirahat di Tjikeumeuh, Bogor (R.S. Gila) daripada memboeat bentjana di tengah-tengah oemmat dan negara, hanja oentoek menoeroet nafsoe merah moskow belaka".

Demikianlah cara Soekarno yang tidak terpuji, dengan seenak hatinya tanpa berpikir panjang telah menjatuhkan vonis salah kepada temannya sendiri yang telah lama dikenalnya hanya karena teman tersebut menjalankan sebuah misi dari Sang Kholik yang sangat mulia dan terpuji. Dengan pikiran komunis yang telah lama dipelajarinya, Soekarno hendak memadamkan Nur Ilahy berupa Surganya Allah di dunia (Negara Islam), namun Allah senantiasa menjaga agar cahaya-Nya tetap terang benderang di bumi Indonesia ini. Sehingga menerangi alam Indonesia yang dipenuhi kabut kejahiliyahan dan kemunafikan.

Ketika Muh. Natsir mulai menjabat sebagai Perdana Menteri, dia memasukkan pesoalan DI/TII dalam program kabinetnya. Awal mula yang dijalankannya dia berusaha untuk memecahkan masalah perjuangan D.I lewat cara damai dengan mengutus beberapa tokoh yang dekat dengan Kartosoewirjo. Pada tanggal 14 Mei 1950, Natsir mengutus Wali Alfatah untuk berangkat ke Priangan menemui Kartosoewirjo. Namun pertemuan itu gagal karena pasukan APRIS di bawah perintah Kolonel Nasuhi yang sebelumnya telah membuat perencanaan pertemuan tersebut mengepung sebuah kesatuan TII terdiri dari kira-kira 100 tentara yang ditugaskan untuk menjamin keamanan pertemuan itu. Dalam pertempuran yang selanjutnya terjadi, gugurlah Toha Arsjad Menteri Penerangan NII.

Kemudian PM Natsir mengadakan usaha berikutnya, ketika dia pada tanggal 14 November 1950 menawarkan amnesti bagi semua kelompok bersenjata yang belum menggabungkan diri dengan Republik dan masih memusuhi pemerintah RI. Natsir menugaskan Kyai Muslich, kepala Kantor Urusan Agama Provinsi Jawa Tengah untuk

menyampaikan pesan pemerintah kepada Amir Fatah, pemimpin perjuangan suci Darul Islam di Jawa Tengah. Dalam perjalanan menuju Jawa Barat Amir Fatah dan pasukannya selalu diikuti pasukan pemerintah hingga dia akhirnya menyerah di Jawa Barat tanpa bertemu dengan Kartosoewirjo.

Pada akhir Desember 1950 Natsir menugaskan kembali Kyai Muslich untuk menyampaikan amanat pemerintah RI kepada "Tuan Kartosoewirjo". Muslich dibawa ke markasnya Kartosoewirjo di Gunung Galunggung oleh seorang penghubung perjuangan suci Darul Islam yang hidup di Bandung. Sebelum keberangkatannya, Kyai Muslich masih menemui Panglima Teritorium III/Siliwangi, Kol. Sadikin dan kemudian mendapat disposisi yang ditandatangani oleh Kepala Staf Letkol Soetoko yang berbunyi: "Berikan bantuan seperlunya, supaya order YM Perdana Menteri dapat dilaksanakan dalam tempo dekat".

Setelah tiba di tempat tujuan Kyai Muslich tidak bertemu muka dengan Katosoewirjo yang dia sudah kenal sejak tahun tigapuluhan ketika sama-sama menjadi anggota PSII. Lewat ajudannya Kartosoewirjo menyampaikan pesan, bahwa sebenarnya dia ingin bertemu dengan Kyai Muslich, namun sebagai Imam dan Panglima Tertinggi NII dia tidak dapat menerima seorang kurir dari kedudukan serendah Kyai Muslich. Sebaiknya pemerintah di Jakarta mengirimkan seorang utusan yang resmi, maka dia akan menerimanya. Tetapi sebelumnya, pemerintah RI harus mengakui Negara Islam Indonesia dulu. Menurut Kyai Muslich, dia dititipi 2 surat untuk PM Natsir, yang satu katanya untuk Natsir pribadi. Dalam surat tersebut Kartosoewirjo menulis pada Natsir, bahwa sebagai Perdana Menteri, Natsir punya kekuasaan untuk menambahkan huruf "I" berikutnya di belakang RI, menjadi "Republik Islam Indonesia". Sekiranya Natsir berbuat demikian maka dia akan mempunyai dukungan sepenuhnya dari pihak NII dalam segala hal. Dalam surat berikutnya yang ditujukan kepada Moh. Natsir sebagai Perdana Menteri, Kartosoewirjo menamakan amanat pemerintah RI sebagai "panggilan daun nyiur" karena semua anggota kelompok bersenjata yang menyerah, harus membawa daun nyiur sebagai tanda tekad mereka yang damai.

Tetapi selama masa berlakunya amnesti yang dikeluarkan oleh Muh. Natsir atas nama pemerintah, hanya sedikit dari anggota kelompok bersenjata TII yang turun gunung. Lagi pula, sementara amnesti tersebut masih berlaku, Panglima Teritorium III Jawa Barat mengeluarkan instruksi yang menyatakan 16 organisasi sebagai organisasi terlarang, termasuk perjuangan suci DI/TII. Banyak dari mereka yang tertangkap adalah politisi dari kalangan Masjumi. Sebagai akibat kegagalan himbauan pemerintah RI, dan Moh. Natsir

juga menyesalkan, bahwa dia dikecam. Maka pada bulan Desember, Natsir didukung oleh pihak militer mengambil langkah-langkah yang lebih keras dengan menjalankan operasi Merdeka untuk menjawab seluruh permasalahan tentang Darul Islam.

Menurut Nasution, sudah tidak dapat disangkal lagi, bahwa ini adalah keadaan perang yang harus dihadapi secara perang pula karena intensitas peperangan ini tidak kalah dengan perang gerilya melawan Belanda. Nasution juga menyesalkan sikap pemerintah yang sampai saat itu hanya mengambil tindakan "setengah hati" saja terhadap pemberontahakan Darul Islam. Lagi pula semua tindakan tidak pernah dikoordinasi satu dengan yang lainnya. Juga hanya 10% dari seluruh pasukan Divisi Siliwangi mengambil bagian dalam penumpasan perjuangan suci Darul Islam pada waktu itu.

Semakin pihak RI mengadakan penumpasan terhadap perjuangan Darul Islam, disitu pula kiranya Allah memberikan pertolongan-Nya terhadap perjuangan suci Kartosoewirjo ini. Dengan "Kurnia Allah" pada tanggal 20 Januari 1952, Negara Islam Indonesia yang diproklamasikan Kartosoewirjo diterima oleh Kahar Mudzakar yang siap menggabungkan diri dalam NII. Dan siap pula menerima tawaran Kartosoewirjo untuk memegang pimpinan Tentara Islam Indonesia. Yang berdasarkan keputusan Komandemen Tertinggi APNII dia diangkat sebagai Panglima Divisi IV TII untuk daerah Sulawesi dan Indonesia Timur. Menyusul kemudian pada tanggal 21 September 1953, Abu Daud Beureueh menyatakan bahwa daerah Aceh menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia dan memutuskan semua hubungan dengan pemerintah pusat di Jakarta. Melalui kurir yang bernama Mustafa Rasjid, Kartosoewirjo mengirimkan surat pengangkatan Daud Beureueh sebagai Panglima TII untuk daerah Aceh. Maka dengan demikian bertambah kuatlah kedudukan Negara Islam Indonesia dengan masuknya kedua tokoh besar itu.

Dalam usaha Kartosoewirjo untuk terus menggalang Darul Islam Pada bulan Oktober 1952, Kartosoewirjo memerintahkan untuk mempercepat dan memperhebat semua usaha menyelenggarakan persiapan perang totaliter dan memperbaiki organisasi Polisi dan BARIS begitu juga sistem Komandemen. Badan-badan ini haroes membentoek seboeah "Benteng Islam" agar apabila dalam memasoeki tahap ketiga dapat menyelenggarakan negara basis atau "Madinah Indonesia" jang mana: "Kedalam, berlakoe sebagai alat-alat pembersih dan penjapoe segala matjam koetoe-koetoe masjarakat, dan obat penjemboeh beraneka warna penjakit, pemelihara kadaoelatan Negara Islam Indonesia dan kesoetjian Agama Islam. Keloear, meroepakan Benteng Islam jang koeat sentaoesa,

jang sanggoep menghadapi tiap-tiap moesoeh Allah (Islam), dari djoeroesan manapoen djoega".

Juga penganugerahan pangkat militer dan penggunaan lencana kepangkatan, serta bentuk dan pembuatan lencana tersebut kini diatur oleh sebuah Maklumat Komando Tertinggi. Selanjutnya ditetapkan konsolidasi militer dan aparatur Negara Islam Indonesia, agar negara ini juga dalam pandangan internasional sesuai dengan negara yang bebas merdeka. Konsolidasi ini terutama mencakup kekuatan tentara dan persenjataan kesatuan militer Tentara Islam Indonesia yang masih tetap jauh tertinggal dari standar seharusnya. Sebuah batalyon Tentara Isalm Indonesia harus terdiri dari 4 kompi masing-masing dengan 290 tentara dan masing-masing kompi harus mempunyai 12 senjata otomatis berat dan ringan, 3 mortir, 189 pucuk senapan, dan 12 pucuk pistol. Namun standar persenjataan yang ideal ini tidak pernah tercapai, karena selalu kekurangan senjata berat.

Lambat laun situasi di bidang militer mulai berubah dan terlihat tanda-tanda yang lebih menguntungkan pihak perjuangan suci TII. Pada tahun 1953, rata-rata setiap hari ada saja yang gugur dari tentara Republik dalam pertempuran dengan pasukan TII. Sebaliknya pada tahun 1954 kerugian akibat serangan perjuangan suci TII setiap tahun sudah meningkat dua kali lipat.

Dari berita "kemenangan" dan laporan-laporan yang disampaikan dalam setiap brifing pasukan juga menjadi jelas, bahwa sebagian besar senjata yang dimiliki perjuangan suci DI/TII adalah hasil rampasan dalam pertempuran. Dengan demikian pada tahun 1956, rata-rata dalam satu bulan jatuh 15 senjata ke tangan sebuah kesatuan TII.

Sadar akan kekuatannya sendiri yang pada tahun 1957 T.I.I. mencapai 13.129 tentara, serta mengingat keadaan politik dan ekonomi pemerintah pusat di Jakarta sedang terjadi kekacauan yang diakibatkan oleh intrik politik Komunis yang semakin mempengaruhi kebijakan pemerintah, keyakinan nampak pada setiap anggota TII bahwa sesungguhnya dalam waktu dekat tujuan perjuangan akan tercapai.

"Dalam keadaan RIK jang soenggoeh katjau balau seperti sekarang ini, kita haroes pandai dalam menoendjoekkan segenap tindakan revoloesioner kita jang memoengkinkan lebih besar oentoek dapat menarik hati ra'iat, sekali lagi: Hati ra'iat! Sebaliknja, djanganlah kita melakoekan tindakan-tindakan jang membawa akibat bertambah sakitnja djiwa ra'iat jang memang telah loeka hatinja oleh karena tindakan kekedjaman dari serdadoe-serdadoe

pantjasila. Tindakan-tindakan kita jang langsoeng berhoeboengan dengan kepentingan dan keselamatan ra'iat banjak, hendaklah dilakoekan sebidjaksana-bidjaksananja".

Dengan adanya kekalahan demi kekalahan yang diterima oleh tentara Republik dalam menghadapi perjuangan suci DI/TII, maka membuat hati Soekarno menjadi resah dan gelisah. Karena dia khawatir manakala perjuangan suci yang dipimpin oleh Kartosoewirjo menang dalam gelanggang pertempuran baik ideologi maupun fisik akan mengancam eksistensi dia sebagai presiden, terlebih dia masih punya hutang "PR" kepada Belanda bahwa masalah perjuangan suci DI/TII harus diselesaikan dengan secepatnya.

Untuk tetap mempertahankan kedudukan bahwa dialah sebagai presiden yang sah di Indonesia dan dia pulalah yang berhak mengatur jalannya roda pemerintahan Indonesia, maka Soekarno mengadakan perjalanan keliling kebeberapa provinsi dan menegaskan dalam setiap pidatonya, bahwa "Negara Indonesia ini adalah negara nasional yang berdasarkan Pancasila, dan bukan negara berdasarkan Islam maka banyak daerah-daerah yang penduduknya yang tidak beragama Islam akan melepaskan diri dari Republik".

Pidato Soekarno menimbulkan reaksi yang sangat keras di kalangan kaum Muslimin dan para politisi partai-partai Islam. Salah satu di antara politisi tersebut, yaitu Isa Anshori dari Masjumi yang sejak dulu memperjuangkan ide sebuah negara Islam. Sebagai jawaban atas kericuhan politik yang diakibatkan pidatonya, Soekarno pada bulan Mei 1953 memberi sebuah ceramah kuliah di hadapan mahasiswa-mahasiswa Universitas Indonesia di Jakarta, mengenai "Negara Nasional dan Cita-cita Islam". Dalam ceramahnya itu Soekarno menyatakan, bahwa dia belum pernah menjumpai perkataan "negara" dalam kitab-kitab Islam, yang dia jumpai adalah perkataan-perkataan seperti Darul-Islam, Darul-Salam, atau Ad-Daulah, tetapi istilah yang terakhir tersebut berarti "Kedaulatan".

Begitu juga dalam pidato pada malam resepsi penutupan Muktamar ke 7 Partai Masjumi Sukarno pernah mengatakan, bahwa menurut anggapannya segala sesuatu akhir-akhir ini berkembang ke arah yang kurang sehat. Bagi setiap orang terbukalah kesempatan untuk mendukung pemerintahan atau beroposisi, namun janganlah melupakan toleransi karena demokrasi yang sejati tidak dapat hidup dengan tiada toleransi.

Masih sebelum dimulainya sidang-sidang Konstituante pada 2-7 Maret 1954, untuk tetap melanggengkan kekuasaannya, Soekarno mengumpulkan 3000 orang ulama NU dan lainnya dalam suatu konferensi di Cipanas Jawa Barat. Menurut mantan menteri agama K.H. Masjkur yang turut serta dalam konferensi itu bahwa "Dalam prinsip keislaman

negara dianggap sah dan dituruti bila pemimpinnya memenuhi syarat Waliyul Amri. Yaitu ia seorang yang jujur, mempunyai kekuatan dan kewibawaan, yang terpenting dia muslim yang taat. Apabila ada pihak lain yang menentang dan memberontak, maka hukumnya bughat, wajib dibasmi. Persoalannya, apakah Soekarno memenuhi syarat dan siap diuji sebagai Waliyul Amri? Adalah jawaban Soekarno saat itu sanggup diperiksa. Maka selama tiga hari pada tahun 1954 para ulama seluruh Indonesia berkumpul di Cipanas dengan membawa kitab-kitab untuk membicarakan soal ini. Dari pertemuan ulama itu dan dialog dengan Bung Karno, akhirnya disimpulkan bahwa Bung Karno memang seorang yang jujur, berwibawa dan seorang muslim. Tapi Bung Karno sholat Jum'at di mana? Mendapat pertanyaan tersebut Bung Karno lalu mendirikan masjid di istana negara. Sebelumnya masjid tersebut memang belum ada. Dari penilaian tersebut Bung Karno dianggap memenuhi syarat sebagai "Waliyul Amri Addharuri Bisy Syaukah". Menyinggung soal shalat Jum'at, dari beberapa sumber yang dapat dipercaya menerangkan, bahwa Soekarno dikenal tidak pernah melakukan shalat Jum'at, kecuali pada saat pembukaan atau peresmian masjid Baitur rahim yang terletak di kompleks Istana Jakarta. Dengan adanya pemberian gelar ini banyak kecaman yang datang dari tokoh-tokoh Islam dan organisasi Islam yang menyatakan, bahwa istilah Waliyul Amri Ad-dharuri hanya dapat dipergunakan pada negara yang berdasarkan Islam, dan selanjutnya dikatakan, bahwa tiap-tiap negara dalam Islam, termasuk Waliyul Amri harus bertanggung jawab kepada rakyat atau lembaga perwakilan rakyat Islam yang tidak dianut dalam UUD Sementara 1950. Oleh karena itu presiden Indonesia tidak bisa menjadi Waliyul Amri Ad-dharuri. Di sisi lain presiden dan kabinetnya bersumpah untuk setia kepada Pancasila dan bukan kepada Islam.

Pertemuan para ulama di Cipanas itu jelas merupakan rekayasa politik, semata-mata dimaksudkan memberikan legalitas pada Soekarno untuk menumpas perjuangan Darul Islam. Dan untuk itu dia memerlukan bantuan para ulama pendukungnya guna menentukan. "siapa bughat yang harus diperangi dan siapa Waliyul Amri yang mesti dita'ati". Topeng yang menutupi wajah para pengkhianat agama sedikit demi sedikit mulai tersingkap. Dari pengakuan yang dituturkan ini saja, orang dapat mengerti bahwa ini semua adalah permainan politik. Sekalipun mereka memikul sekeranjang kitab laksana "keledai", pertemuan para ulama di Cipanas itu pasti tidak akan menemukan hujjah yang benar bagi penumpasan suatu perjuangan suci Darul Islam yang berjuang kearah terlaksananya hukum Allah. Begitu pula mereka tidak akan bisa meyakinkan dirinya sendiri, bahwa manusia macam Soekarno yang mempelajari Islam sekedar kebutuhan,

layak dinobatkan sebagai Waliyul Amri. Jika pada akhirnya mereka memutuskan "yang ini bughat dan yang itu Ulil Amri", maka itu tidak lain hanya sekedar rekayasa guna memenuhi tuntutan politik penguasa dengan memperalat Islam serta memanfaatkan kebodohan ulamanya. Allah menegaskan dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an Surat: Muhammad, ayat 14.

"Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Rabb-Nya sama dengan orang yang (syetan) menjadikan ia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?".

Dalam sebuah keterangan pemerintah Negara Islam Indonesia pada bulan Mei 1955, yang dianggap Kartosoewirjo sebagai jawaban atas "permakluman perang resmi oleh RIK terhadap Negara Islam Indonesia", dan yang juga merupakan sebuah jawaban atas sikap kabinet Ali Sastromidjojo, Kartosoewirjo kembali lagi mengingatkan bentrokan senjata yang pertama antara TNI dan TII di Antarlina. Pada saat itu umat Islam merasa haknya diperkosa, karena TNI "melanggar batas-batas daerah de facto Negara Islam Indonesia", demikian keterangan Kartosoewirjo. Dia juga membenarkan aksi-aksi teror terhadap pengkhianat-pengkhianat Negara Islam Indonesia, pengkhianat Agama (Islam) dan pengkhianat Allah beserta kaki tangannya, sedang pembakaran dilakukan atas serangan serdadu TRIK dan hak milik anak cucu Iblis la-natullah, yang haram mutlak itu. Merampas hak milik pengkhianat bukanlah barang baru. Semua itu berlaku atas sendi-sendi tegasnya hukum perang".

Seluruh anggota Angkatan Perang Negara Islam Indonesia (APNII) kini dilarang memiliki radio, kamera dan dilarang main kartu, catur, bulutangkis, dan sepak bola. Waktu senggang mereka harus diisi hanya dengan pendidikan militer dan politik. Selanjutnya penduduk di daerah Negara Islam Indonesia berada dalam keadaan perang. Setiap orang diwajibkan untuk menyediakan harta kekayaannya untuk Negara Islam Indonesia. Seandainya masih tetap ada yang melakukan perjalanan Haji meskipun ada larangan tersebut, maka sebagai hukumannya dia harus membayar pada Negara Islam Indonesia jumlah uang yang digunakannya untuk perjalanan tersebut. Sebagai alasan atas larangan tersebut dijelaskan, bahwa perjalanan naik haji hanya dapat dilakukan atas nama Republik Indonesia, dan ini akan merusak citra Negara Islam Indonesia. Tetapi dalam kenyataan memang banyak surat-surat Negara Islam Indonesia dibawa ke Mekkah oleh Haji-haji dari daerah Priangan, seperti terbukti oleh sebuat surat rahasia dari seorang Sunda yang berdiam di Mekkah.

Sistem komandemen kini tetap bertahan pada bentuknya yang lama selama 7 tahun mendatang, dan juga semua peraturan dan perundang-undangan Negara Islam Indonesia terus berlaku. Maklumat yang berikutnya dari komandemen Tertinggi APNII baru dikeluarkan pada bulan Agustus 1959, ketika diadakan reorganisasi militer dan aparatur Negara Islam Indonesia secara menyeluruh namun pada saat itu titik klimaks Negara Islam Indonesia telah berlalu. Menurut keterangan Kartosoewirjo sendiri, bahwa dia dan keluarganya antara tahun 1954-1959 pindah ke daerah pegunungan selatan Jawa Barat di sekitar Karangnunggal (hutan Denuh). Sementara itu dia mengangkat Sanusi Partawidjaja sebagai wakilnya. Namun selama tahun-tahun itu semua Maklumat NII masih tetap ditandatangani oleh beliau sendiri.

Ketika Kartosoewirjo mendengar, bahwa Sanusi Partawidjaja bersama-sama dengan van Kleef, seorang Belanda yang bergabung dengan Darul Islam, merencanakan kup untuk menggulingkan Kartosoewirjo, maka Kartosoewirjo mengambil alih kembali pimpinan NII dan pada bulan Juli 1959, dia berangkat kembali ke daerah pusat Perjuangan suci Darul Islam. Pada waktu itu Kartosoewirjo rupanya benar-benar prihatin melihat keadaan perjuangan sucinya, sehingga dia pada bulan Juli 1959 mengatakan, bahwa kalau kemenangan tidak dapat dicapai dalam waktu dekat ini, kesempatan berikutnya baru akan tiba dalam waktu 32 tahun. Dalam pidatonya pada waktu penyerahan ijazah pada lulusan akademi Wana Yudha, semacam akademi militer NII, Kartosoewirjo juga menyindir rencana Sanusi Partawidjaja untuk menggulingkannya dan dia berkata: "Soenggoeh pahit bagi Bapak, dengan keadaan Negara kita sekarang karena banjak hal-hal jang menjeleweng. Bahaja akan datang, apabila ada doealisme dan bertengkaran dalam tiap-tiap komandemen. Ada pertengkaran antara komandan-komandan, maka kebawahannja apalagi".

Untuk dapat kembali mengendalikan secara menyeluruh perjuangan suci Darul Islam yang telah didirikan, Kartosoewirjo kini mengadakan reorganisasi dan pengetatan seluruh pimpinan militer, begitu juga Kartosoewirjo sebagai Imam dan Panglima Tertinggi.

Tampaknya selama Kartosoewirjo diwakili oleh Sanusi Partawidjaja telah terjadi beberapa perkembangan dalam perjuangan suci DI yang tidak lagi dapat ditolerir oleh Kartosoewirjo. Seruan akan tanggung jawab setiap orang terhadap pimpinan dan terhadap tujuan-tujuan perjuangan suci, terhadap solidaritas Islam dan kewajiban untuk menegakkan hukum Islam adalah petunjuk, bahwa Kartosoewirjo sangat khawatir tentang keadaan perjuangan suci Darul Islam pada waktu itu.

Dijelaskan Kartosoewirjo dalam Maklumat Komandemen Tertinggi APNII No. 11. "Mengingat, bahwa perloe dibentoek Pimpinan Perang atau Komando Perang jang lebih koeat, dan penjempoernaan systeem atau Stelsel Komandemen jang lebih effektif demikian roepa, sehingga lebih terdjamin makin hebat dan bergeloranja peperangan, dan sehingga tertjapailah dengan tolong dan koernia Allah djoea kemenangan perang terachir, tegasnja kemenangan Islam dan Negara Islam Indonesia, ialah satoe-satoenja pintoe gerbang menoedjoe dan memasoeki Negara Madinah Indonesia, atau/dan Negara Islam Indonesia boelat sempoerna, merdeka dan berdaoelat sepenoehnja, kedalam dan keloear, de facto dan de jure, sepanjang boekti-boekti kenjataan dan hoekoem. Dan berpendapat, bahwa perloe dalam waktoe jang sesingkat-singkatnja diselenggarkan Soesoenan Pimpinan Perang dalam bentoek baroe, ialah perpadoean antara Stelsel Komandemen lama jang tetap berlakoe hingga sa'at ini, dan peratoeran-peratoeran perang baroe atau jang diperbaroekan, demikian roepa:

A. Sehingga terdjaminlah dengan pasti berlakoenja dan pelaksanaan Komando Perang jang berdaja goena sebesar-besarnja, teroetama pada sa'at-sa'at dikeloerkannja Komando Perang Semesta atau Komando Perang Totaliter dalam kata jang seloeas-loeasnja, dan terlebih-lebih lagi mendjelang sa'at moestari, atau sa'at di keloearkannja Komado Perang Moethlak, Komando Oemoem, ialah Komando Allah langsoeng melaloei Imam Panglima Tertinggi Angkatan Perang NII, selakoe Chalifatoellah dan Chalifatoen-Nabi di noesantara Indonesia; ialah Perang Semesta dan Perang Moethlak, jang akan menentoekan nasibnja Negara Islam Indonesia dan hari depan Oemat Islam Bangsa Indonesia di masa mendatang; dan

B. Sehingga seloeroeh Negara Islam Indonesia, beserta segenap Angkatan perang dan ra'iat warga negaranja, tanpa ketjoeali soenggoeh-soenggoeh ikoet serta mewoedjoedkan tenaga perang raksasa maha/dahsjat, satoe gelombang Jamaah Moedjahidin maha-Besar, jang lagi madjoe-bergerak memenoehi panggilan dan seroean Allah, langsoeng menoedjoe arah Mardlatillah sejati, di doenia dan di akhirat; ialah potensi perang maha-berat, persatoe-padoean segenap tenaga dan kekoeatan seloeroeh Oemmat Moedjahidin; Oemmat-pilihan dan kekasih Allah, jang sanggoep dan mampoe menghadapi serta mengatasi, dan akhirnja menghantjoer-lidaskan segala jenis dan bentoek moesoeh-moesoeh Allah, moesoeh Islam, moesoeh Negara Islam Indonesia dan moesoeh-moesoeh seloeroeh Barisan Moedjahidin, hingga tekoek-loetoet atau hancoer-binasa; dengan karena berkat kehendak dan kekoeasaan, tolong dan koernia Allah, Dzat Jang Maha Agoeng djoea adanja.

Dalam Maklumat No.11 itu Kartosoewirjo memutuskan Membagi Indonesia dalam 7 (tujuh) Daerah Perang, atau "Sapta Palagan". Yang klasifikasi dan penggolongannya secara administratif adalah sebagai berikut:

1. Daerah Perang Pertama melipoeti seloeroeh Indonesia dan diseboet "Komando Perang Seloeroeh Indonesia" (KPSI) jang dipimpin langsoeng oleh Imam dan Panglima Besar APNII, jang djoega berwenang oentoek mengeloearkan "Komando Oemoem". KPSI terseboet adalah identik dengan Dewan Imamah jang doeloe dan Komandemen Tertinggi.

2. Daerah Perang Kedoea melipoeti beberapa wilayah NII dan diseboet sebagai "Komado Perang Wilajah Besar" (KPWB), dengan tjatatan, bahwa oentoek seloeroeh Indonesia ditetapkan 3 KPWB jang masing-masing dipimpin oleh seorang Panglima Perang KPWB, ja'ni:
   a. KPWB I, terdiri atas poelau Jawa dan Madoera dan dipimpin oleh Agoes Abdoellah.
   b. KPWB II, terdiri atas seloeroeh Indonesia Timoer termasoek Soelawesi, Noesatenggara, Maloekoe, Irian Barat dan Kalimantan dan di pimpin oleh Kahar Muzakkar.
   c. KPWB III, terdiri atas seloeroeh Soematra dan kepoelauan sekitarnja di bawah pimpinan Daud Beureueh.

3. Daerah Perang Ketiga hanya melipoeti satoe wilayah NII dan diseboet sebagai "Komando Perang Wilayah" (KPW). Dengan demikian beberapa KPW meroepakan satoe KPWB. Djoega setiap KPW dipimpin oleh seorang Panglima Perang KPW. Seluruhnya terdapat 7 KPW di Indonesia.

   KPW I.
   Terdiri dari daerah keresidenan Jakarta, Purwakarta, Cirebon dan Priangan Timur.
   KPW II.
   Hanya terdiri dari Jawa Tengah, namun wilayah ini dihapus, karena Perjuangan suci DI yang dipimpin oleh Amir Fattah telah lama gagal.
   KPW III.
   Direncanakan Jawa Timur di bawah pimpinan Masduki.
   KPW IV.
   Sulawesi Selatan dan daerah sekitarnya yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar.
   KPW V.

Sumatra dipimpin oleh Daud Beureueh.

KPW VI.

Direncanakan daerah Kalimantan, tapi gagal.

KPW VII.

Keresidenan Bogor, Kabupaten/Kota Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang dan Keresidenan Banten dipimpin oleh Ateng Djaelani Selatan.

4. Daerah Perang Keempat melipoeti satoe Keresidenan/Resimen dan diseboet "Komando Militer Pangkalan Setempat" (Komando Operasi Resimen Pertempoeran Setempat) djoega dioebah mendjadi "Kompas" jang hanja mempoenjai foengsi taktis dan tidak boleh lagi mentjampoeri administrasi negara. Setiap Kompas dipimpin oleh seorang Komandan Pertempoeran Kompas.

5. Daerah Perang Kelima hanjalah melipoeti satoe Kaboepaten/Batalyon dan diseboet "Sub-Kompas" dan dipimpin oleh seorang Komandan Pertempoeran Sub-Kompas.

6. Daerah Perang Keenam hanjalah melipoeti satoe Ketjamatan/Kompi atau lebih dan diseboet "Sektor". Setiap Sektor dipimpin oleh seorang Komandan Pertempoeran Sektor.

7. Daerah Perang Ketoedjoeh melipoeti satoe desa atau lebih dan diseboet sebagai "Sub-Sektor" jang dipimpin oleh seorang Komandan Pertempoeran Sub-Sektor.

Memerintahkan kepada seloeroeh Komandan dan Komandemen, serta segenap Pedjabat/Foengsionaris dan Petoegas Negara dalam lingkoengan Negara Islam Indonesia: Soepaja segera, dengan tjepat dan tepat, tapi tetap tertib, teratoer dan berentjana, menjelenggarakan isi dan djiwa Makloemat Komandemen Tertinggi No. 11 ini, dengan sebaik-baik dan sesempoerna-sempoernanja, sehingga segala persiapan dan pelaksanaannja soedah boleh diselesaikan pada tanggal 1 Januari 1960 dengan tjatatan, bahwa oentoek daerah-daerah Negara Islam Indonesia jang terpentjil letaknja, sehingga terhalang oleh djarak djaoeh dan kesoelitan perhoeboengan, diberi batas waktoe hingga tanggal 1 Februari 1960".

Menurut struktur komando yang baru, hampir semua perjuangan suci militer dan komandonya kini dipertanggungjawabkan kepada Komandan Pertempuran Kompas, yang mengatur langsung setiap pasukan yang ada di bawah pimpinannya. Juga

Komandan Kompas adalah pengantara terakhir untuk menyalurkan dan melanjutkan segala instruksi atasannya kepada bawahannya. Sebagai komadan lapangan, Komandan Kompas juga harus menentukan siasat dan strategi militer, Kartosoewirjo berharap, bahwa dengan pelaksanaan penyusunan struktur komando yang baru, Negara Islam Indonesia terhindar daripada "setiap jenis, sifat dan bentuk dualisme", dalam bidang dan lapangan apa dan manapun sehingga di lingkungan NII hanya dikenal satu pimpinan negara yang juga bertugas memegang Pimpinan Perang dan Pimpinan Umat Berperang.

Bab Tujuh

DITABUHNYA GENDERANG PERANG SEMESTA: MUNCULNYA DARUL ISLAM DI JAWA TENGAH, SULAWESI SELATAN, KALIMANTAN SELATAN DAN ACEH

Darul Islam Jawa Tengah

Terjadinya perlawanan Darul Islam terhadap pemerintahan RI di Jawa Tengah, berasal dari tiga kelompok yang berbeda. Pertama, yang berasal dari wilayah barat berbatasan dengan Jawa Barat, terutama daerah Brebes dan Tegal yang merupakan basis gerakan Darul Islam untuk Jawa Tengah yang dipimpin Amir Fatah. Karena kedekatan daerah, kelompok ini mendapat pengawasan dari pusat gerakan yang ada di Jawa Barat. Kedua, yang dimotori oleh pergerakan Angkatan Umat Islam di Kebumen, di mana organisasi ini menjadi penentang Pemerintah Indonesia (Soekarno) karena keterlibatan pihak pemerintah pada masa pendudukan Jepang. Dan kelompok ketiga yang terbentuk dari pembelotan sebagian pasukan Tentara Republik dari kesatuan Divisi Diponegoro.

Perlawanan Darul Islam pimpinan Amir Fatah terjadi menyusul berakhirnya perlawanan rakyat pimpinan Kutil dan rekan-rekannya, yang mengikutsertakan satuan-satuan lokal seperti Barisan Pelopor. Peristiwa tersebut menimbulkan penangkapan besar-besaran dan pembalasan kejam dalam upaya "untuk memberikan pelajaran kepada rakyat" yang dilakukan Tentara Republik, dalam masa yang singkat. Lebih lanjut untuk menenangkan keadaan di daerah tersebut dilaksanakanlah suatu sikap yang lebih luwes. Sukarno, dengan didampingi Wakil Presiden Mohammad Hatta, Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan Panglima Tentara Republik Sudirman mengadakan kunjungan ke daerah itu. Di dalam kunjungan tersebut, Sukarno — pada suatu rapat umum yang dilangsungkan di Tegal — mendesak rakyat untuk tetap setia kepada Republik Indonesia dengan mengatakan, "Rakyat Tegal-Brebes-Pekalongan, janganlah membentuk republik kecil-kecilan, suatu Republik Talang, Republik Slawi, Republik Tegal". Peristiwa revolusi sosial yang terjadi sebelumnya di Jawa Tengah telah menimbulkan kesadaran rakyat akan hak-hak politiknya. Namun karena sikap pemerintah yang setengah hati dalam menangani setiap keinginannya telah membawa mereka kepada konflik yang semakin terbuka.

Sesungguhnya rakyat berkeinginan, bahwa kemerdekaan yang telah diraih dengan darah itu tidak dikhianati para pemimpin Republik yang hanya menyelesaikan masalah negerinya dari satu perundingan ke perundingan lain. Tentu saja hal ini sangat merugikan perjuangan rakyat seluruhnya, yang merasa tertipu dengan diplomasi RI-Belanda yang sering diingkari Belanda.

Apalagi Belanda selalu mengadakan aksi-aksi militernya untuk menancapkan kembali penjajahannya di Republik Indonesia setelah perundingan dengan RI disepakati kedua belah pihak.

Agresi militer pertama yang dilakukan Belanda merupakan ancaman yang mengkhawatirkan bagi kedudukan wilayah RI, dimana wilayah pedesaan di sebagian besar wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah sebelah barat dapat diduduki Belanda. Disamping itu Belanda juga menduduki daerah yang mengelilingi pusat-pusat wilayah RI. Walau pasukan TNI mengadakan perlawanan di distrik-distrik luar wilayahnya, namun tidak membawa hasil yang memuaskan. Karena ketidakmampuan tersebut, pihak pemerintah yang diwakili Syahrir mengadakan perundingan dengan pihak Belanda. Dan berdasarkan hasil Perjanjian Renville pada bulan Januari 1948, Karesidenan Pekalongan menjadi daerah yang dikuasai Belanda. Dalam perjanjian Renville, seperti juga sebagian besar wilayah Jawa Barat, pasukan TNI harus meninggalkan daerah yang telah dikuasai Belanda. Baik pasukan TNI maupun pasukan lain yang bergerak di Karesidenan Pekalongan diperintahkan meninggalkan daerah ini. Kemudian kesatuan TNI menarik diri ke Desa Karangkobar di Banjarnegara, dan satuan pasukan lainnya, seperti Hizbullah dan BPRI, ke Wonosobo.

Berbeda di daerah Brebes. Ketika ada perintah untuk mengosongkan daerah kantong-kantong Republik, sebagaimana yang diisyaratkan sebagai hasil perundingan dengan Belanda, masih ada para pejuang yang tetap tinggal di daerah tersebut. Kemudian para pejuang itu melakukan operasi militernya, dengan membagi pasukannya dalam dua kelompok, masing-masing bernama Gerakan Antareja Republik Indonesia (GARI), dan Gerilya Republik Indonesia (GRI). Gerakan perlawanan yang diperlihatkan kedua kelompok pasukan ini, beberapa bulan kemudian diikuti juga satuan Hizbullah yang merasakan ketidakpuasan dengan hasil perundingan, walaupun pada permulaan penarikan mundur pasukan turut bersama TNI, namun kemudian kembali ke pangkalan asalnya. Adapun pemisahan diri yang dilakukan lasykar Hizbullah lebih banyak disebabkan adanya gelombang baru reorganisasi yang diprogramkan pemerintah di dalam TNI.

Adanya program pemerintah berupa rasionalisasi pasukan, menimbulkan kekecewaan dan kemarahan anggota satuan-satuan pasukan lain di luar TNI, baik satuan pasukan yang didemobilisasikan maupun yang tidak Peristiwa inilah yang menjadi dasar bagi satuan-satuan Hizbullah untuk menginfiltrasi ke daerah Brebes dan Tegal. Kelompok pertama yang kembali ke daerah ini dipimpin Abas Abdullah. Ketika Abas Abdullah kembali ke Brebes, ia mendirikan Majelis Islam, dan memberikan nama bagi pasukannya, Pasukan Mujahidin (Pejuang-pejuang di jalan Allah). Ia menganggap bahwa Majelis Islam yang didirikannya sebagai pemerintah daerah

sementara yang sah, dan berusaha mencoba menaklukkan pasukan yang tergabung dalam GARI dan GRI dengan paksa.

Seperti yang terjadi di Jawa Barat, dimana terlihat ketidaksungguhan para elit pemerintah RI dalam menghadapi Belanda baik di meja perundingan maupun di medan perang untuk mengeksiskan Republik sendiri di mata dunia internasional, telah memberikan dorongan yang sangat kuat bagi timbulnya perjuangan jihad suci Darul Islam. Kelahiran perjuangan Darul Islam di Jawa Tengah pun dalam banyak hal ada persamaan dengan lahirnya perjuangan Darul Islam di Jawa Barat. Dimana adanya sejumlah satuan militer yang tergabung dalam setiap kelompok menolak mengundurkan diri dari daerahnya dan tetap tinggal di sana. Tambahan lagi terdapat rasa tidak senang akan cara Tentara Republik memperlakukan satuan-satuan pasukan tersebut.

Tetapi, suatu gerakan Islam merdeka yang baru lahir, setelah Amir Fatah muncul di gelanggang, gerakan ini memperoleh momentumnya hanya beberapa bulan kemudian. Amir Fatah yang menjadi komandannya adalah nama lengkap dari Amir Fatah Wijayakusuma, dia seorang pribumi Kroya di Banyumas. Dalam karir politiknya, dia pernah menjabat sebagai ketua Dewan Pembelaan Masyumi Pusat. Dan dia adalah seorang rekan akrab Kartosoewirjo, pernah juga memimpin pasukan Hizbullah untuk menyertai Kartosoewirjo ke Malang dalam rangka menghadiri sidang paripurna kelima Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai semacam pengawal, Februari 1947. Di Malang dia menjadi Kepala Staf Divisi 17 Agustus, yaitu campuran pasukan yang menentang Persetujuan Linggarjati — masalah inilah yang menjadi persoalan pokok dalam acara.

Banyak analisa yang sangsi sekitar kepindahan Amir Fatah dari Jawa Barat, dan juga status dan peranan Hizbullah. Namun melihat dari hasil Persetujuan Linggarjati yang dilakukan oleh pemerintah Republik telah banyak mempengaruhi pemikiran Amir Fatah untuk mengadakan perlawanan dalam upaya menentang Perjanjian tersebut. Usaha yang dilakukannya ialah dengan menggabungkan diri dengan pejuang mujahidin T.I.I. yang memang telah dipersiapkan oleh Kartosoewirjo dalam mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan mendatang ketika dia dan sebagian besar pasukan Hizubullah yang telah dipersiapkannya tidak turut serta hijrah dalam upayanya menentang Belanda. Disamping itu bukti yang menguatkannya adalah sekitar tahun 1948, Sudirman memerintahkan Amir Fatah untuk melanjutkan kegiatan gerilya melawan Belanda di Jawa Barat, dan dengan demikian mengisi kekosongan yang ditinggalkan Divisi Siliwangi. Walaupun pada saat itu Tentara Republik telah mengangkat Letnan Kolonel Sutoko sebagai koordinator operasi gerilya di Jawa Barat.

Ketika bergabungnya Amir Fatah dengan perjuangan jihad suci Kartosoerwirjo, oleh suatu sebab, Amir Fatah kemudian diinstruksikan untuk mengundurkan diri ke daerah Brebes dan Tegal, tempat asal sebagian besar anak buahnya. Dan seperti terlihat kemudian, keadaan yang terakhir ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan gerilya Amir Fatah melawan Republik, sekitar tahun 1949. Dalam usaha menumpas kegiatan Darul Islam di Jawa Tengah ini, Tentara Republik menghadapi rintangan yang berat karena dukungan yang sangat besar diberikan rakyat Brebes dan Tegal kepada perjuangan jihad suci Amir Fatah, disamping itu banyak dari mereka ini yang punya hubungan kekerabatan dengan para pejuang mujahid.

Kemungkinan Amir Fatah memasuki Brebes dan Tegal lewat Wonosobo, sekitar Oktober 1948, ketika itu pun di daerah ini telah ditempatkan Batalyon 52 Hizbullah. Pada saat itu dia berhasil mengajak batalyon 52 Hizbullah ini kembali ke Brebes dan Tegal bersamanya, walaupun ditentang komandannya, Muh. Bakhrin. Ketika batalyon yang kini di bawah pimpinan Amir Fatah sendiri itu mencapai garis demarkasi, mereka dihadang pasukan Republik. Dengan siasat hendak kembali lagi, mereka lalu melintasi perbatasan di tempat lain. Sesudah memasuki zone yang dikuasai Belanda, dengan mengikuti contoh Abas Abdullah, Amir Fatah membentuk "sel Pemerintah Islam," dan mendirikan Majelis Islam. Pasukannya diberinya nama Mujahidin.

Dalam langkah Amir Fatah menuju pembentukan negara Islam ini, pada mulanya ia tidak menentang setiap kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Republik. Seperti kejadian yang dialami ketika pasukan Republik kembali sesudah aksi militer kedua Belanda dilancarkan, tidak terjadi konflik terbuka yang langsung antara pasukan Republik dan satuan Hizbullah seperti di Jawa Barat. Bahkan sebaliknya, Majelis Islam dan Pemerintah Republik setuju mengadakan kerja sama, dimana fungsi administratif dan militer yang tertinggi diserahkan kepada Pemerintah Republik. Selanjutnya Mayor Wongsoatmojo diangkat menjadi komandan pasukan Indonesia di daerah itu, termasuk menjadi komandan satuan Hizbullah.

Ketika sampai di daerah Brebes dan Tegal, Wongsoatmodjo membentuk Sub Wehrkreise III (SWKS III), sebagai divisi Pemerintah Militer yang berlaku di Jawa, dia telah menggabungkan fungsi administratif, militer, dan sipil. Biarpun tidak mengangkat personil militer pada Pemerintahan Sipil, tetapi personil sipil tetap tunduk kepada militer. Sebagai bagian dari struktur komando Tentara Republik, Sub Wehrkreise juga mempersatukan pasukan-pasukan biasa dan liar. Pada saat diadakan pembentukan, mereka bukan saja menghilangkan penggunaan nama-nama Batalyon 50, 51, atau 52, yang akan digantikan dengan nama singkatan TNI-SWKS-III, tetapi mereka juga melarang semua referensi dengan Hizbullah, Mujahidin, dan sebagainya. Seluruh pasukan yang disebut dengan nama-nama ini kini telah dilebur bersama Tentara Republik, dan hanya dapat disebut sebagai bagian dari Tentara Nasional Indonesia.

Bersamaan dengan kejadian di atas, Amir Fatah diangkat sebagai koordinator kepala keamanan Sub Wehrkreise. Dalam kedudukannya ini, salah satu tugasnya adalah mengawasi penggabungan satuan-satuan gerilyawan ke dalam Tentara Republik. Hubungan yang bersahabat antara Amir Fatah dan Tentara serta Pemerintah Republik hanya berlanjut dalam beberapa waktu. Tidak lama berselang hubungan ini menjadi macet karena baik Amir Fatah maupun Tentara Pemerintah sendiri masing-masing menganggap partnernya itu sebagai saingan.

Ketidak harmonisan ini terjadi terutama mengenai pemerintah daerah. Dalam permasalahan ini antara Pemerintah Republik dan Majelis Islam masing-masing telah mempunyai personil yang akan dipersiapkan sebelumnya untuk menduduki kursi jabatan di pemerintah daerah. Tambahan lagi yang menjadi penyebab ketidak harmonisan itu ialah ketika Pemerintah Republik melakukan provokasi terhadap rakyat agar menerima para pamong praja yang mereka angkat, karena mereka merasa perlu, bahwa para fungsionaris yang disokong Majelis Islam harus berhenti.

Usaha Pemerintah untuk merintangi turut-sertanya Majelis Islam dalam pemerintahan sebenarnya tidak membantu menciptakan suasana yang bersahabat. Segera situasi pun meningkat menjadi luar biasa tegang. Akhirnya keadaan menjadi begitu genting, hingga Tentara Republik terpaksa mengirimkan suatu kompi Brigade Mobil dan Angkatan Kepolisian untuk memperkuat pasukannya sendiri.

Pada akhir April, setelah terbentuknya Sub Wehrkreise Slamet 111, Amir Fatah keluar dari jabatan sebagai koordinator kepala keamanan Sub Wehrkreise. Adapun yang melatar belakangi pengunduran diri ini Menurut Jusmar Basri, setelah Amir Fatah mengadakan pembicaraan khusus dengan seorang utusan Kartosoewirjo yang bernama Kamran. Dan hasil dari pembicaraan tersebut adalah pengangkatan Amir Fatah. Pembicaraan antara mereka berdua berlangsung pada tanggal 22 dan 23 April 1949 di Desa Pengarasan, sebelah barat Bumiayu, dekat perbatasan selatan Kabupaten Brebes, Pranata, dalam melukiskan peristiwa-peristiwa di Pengarasan menjelang penggabungan Negara Islam Indonesia di Jawa Tengah, tidak menyebut Kamran. Tetapi, ia mengemukakan kehadiran Syarif Hidayat, seorang komandan Hizbullah Jawa Barat.

Disamping aksi pengunduran dirinya, Amir Fatah juga secara diam-diam menarik mundur para pejuang mujahid bekas Batalyon Hizbullah di Brebes dan Tegal ke Desa Pengarasan. Namun ketika hal ini diketahui oleh komandan militer Brebes, Kapten Prawoto, lalu ia mengirimkan kira-kira 50 orang untuk mengetahui maksud Amir Fatah. Dari hasil keterangan yang diperoleh mengenai pengalaman Amir Fatah ini yang diberikan Pranata, tampaknya adalah kemungkinan berhasilnya perundingan tentang pembentukan Republik Indonesia Serikat federal antara

Pemerintah Republik dan Pemerintah Belanda yang menyebabkan Amir Fatah memutuskan hubungan dengan Republik.

Untuk memperjelas arah perjuangannya, Amir Fatah mengklasifikasikan perjuangan dengan tiga jenis: a) perjuangan Islam, b) perjuangan komunis, dan c) perjuangan federal. Menurutnya, dari ketiga jenis perjuangan tersebut, perjuangan Islamlah yang terunggul, alasan yang dikemukakan oleh Amir Fatah dalam menguatkan pernyataannya ialah, karena Republik telah mengkhianati cita-cita perjuangan kemerdekaan rakyat bangsa Indonesia. Yang kemudian Pemerintah Republik berpaling menggunakan perjuangan federal dengan menandatangani Persetujuan Renville dan Linggarjati, dengan mengubah haluan perjuangan ini, menurut Amir Fatah bahwa Pemerintah Republik telah menyerah kepada tuntutan-tuntutan Belanda yang menghendaki Republik Indonesia Serikat. Dengan demikian jelaslah faktor penyebab perjuangan jihad suci yang dilakukan oleh Amir Fatah, adalah: ”kemunafikan" yang setiap saat diperankan baik oleh pemerintah dan tentara Republik Indonesia terhadap para pejuang yang dengan kesetiaan dan keikhlasannya berperang melawan penjajah Belanda.

Aksi perjuangan jihad pertama yang diarahkan untuk menyerang posisi Republik dan merebut pos komando Sub Wehrkreise di Bentarsari, Amir Fatah dan pasukan mujahidinnya berhasil dengan baik, pos komando itu telah ditinggalkan pasukan Republik karena takut dikepung Tentara Islam yang jumlahnya lebih besar. Ketika terjadi pertempuran di daerah ini Tentara Islam dapat menangkap komandan distrik militer (KDM) Brebes yang bernama Abduljalil, yang karena suatu sebab tidak turut bersama Tentara Republik mengundurkan diri.

Selanjutnya Amir Fatah dan pejuang mujahidin menyerang dan melucuti satuan Brigade Mobil milik tentara Pemerintah yang dikirim ke daerah ini beberapa bulan sebelumnya dengan maksud memperkuat pasukan Republik, mengingat adanya persoalan dengan Majelis Islam, lalu para pejuang mujahidin menangkap komandannya yang bernama R.M. Bambang Suprapto. Beberapa hari kemudian, dia bersama dengan Abduldjalil ditembak mati oleh pejuang mujahidin Darul Islam Pemimpin pejuang mujahidin Darul Islam Amir Fatah, selanjutnya meluaskan pengaruh pada bulan-bulan berikutnya.

Dengan memakai basis perjuangan sebagai bentengnya di daerah sekitar Bumiayu, Amir Fatah mengalihkan perjuangannya ke utara dengan memasuki daerah Pekalongan, dan di daerah ini pasukan pejuang mujahidin menyerang pos-pos tentara di berbagai tempat, seperti Margasari, Prupuk, Larangan, dan Tonjong. Pada tanggal 11 November pasukan pejuang mujahidin Darul Islam memasuki daerah Wonosari dan Siasem, dua desa di pinggiran Brebes. Serangan ini dipimpin langsung oleh Amir Fatah sendiri yang mengendalikan pasukannya dari sebuah tandu

yang diusung prajurit-prajuritnya, karena kepalanya terluka dalam suatu pertempuran kecil sebelumnya dengan pasukan Republik. Langkah berikutnya yang direncanakan para pejuang mujahidin adalah menyerang Brebes sendiri. Sebagai ekspresi kekecewaan mereka terhadap "penyerahan kedaulatan", adapun tanggal yang sudah ditetapkan dalam penyerangan ini adalah 27 Desember. Karena rencana para pejuang mujahidin ini sudah terdengar oleh pasukan tentara Republik, maka tentara Republik dalam menghadang serangan Amir Fatah mendapat kemudahan sehingga memudahkannya untuk dipukul mundur. Namun perjuangan Amir Fatah dapat berhasil beberapa hari kemudian, pada hari Tahun Baru, ketika pasukannya akhirnya memasuki Brebes dan menduduki sebagian dari kota.

Kemudian tentara republik melancarkan serangan pula dengan pasukan yang diberi nama Gerakan Banteng Nasional di Tegal, Bumiayu, purwokerto, Majenang, dan Cilacap. Dalam operasi GBN ini, diikut sertakan pasukan infantri dari tiga divisi tentara Jawa -- Diponegoro, Brawijaya, dan Siliwangi. Tujuan gabungan operasi itu tidak lain adalah untuk mengisolasi pasukan Amir Fatah di Tegal dan Bumiayu, di sampin itu untuk mencegah para mujahidin Amir Fatah mngadakan kontak dengan pusat gerakan yang ada di Jawa Barat . Dalam operasi ini ada segi keberhasilan dan kegagalannya. Sebagian karena ada bujukan yang didukung oleh kekuatan militer sehingga sejumlah pemimpin NII wilayah Jawa Tengah jadi menyerah. Di pihak lain, tujuan untuk menutup batas propinsi, tidak tercapai. Mengakibatkan masih sering terdapat serangan oleh pasukan mujahidin dari Brebes dan Tegal ke Kabupaten Cirebon Jawa Barat. Dengan adanya serangan ini menunjukkan sebagian besar aktifitas tentara mujahidin di wilayah yang dikuasai pihak NII.

Amir Fatah bersama prajuritnya, diantar oleh Kamran berangkat menuju Jawa Barat untuk menjumpai Kartosoewirjo. Dalam perjalanan ke Tasikmalaya mengalami dua puluh satu kali pertempuran. Sesampainya di Ciamis, Amir Fatah bersama pasukannya, terpisah dari Kamran yang mengetahui keberadaannya Kartosoewirjo. Akibat keterpisahan itu Amir Fatah kehilangan jejak, gagal untuk bertemu dengan Kartosoewirjo, sehingga pasukannya tidak sempat bergabung dengan TII (Tentara Islam Indonesia) di Jawa Barat. Dalam kondisi sedemikian, Amir Fatah bersama sisa prajurit yang tinggal 150 orang lagi, terkepung oleh pasukan Republik yang jumlah kekuatannya berkali lipat daripada pasukan Amir Fatah. Akhirnya dalam kontak senjata dengan tentara Republik itu Amir Fatah tertangkap pada tanggal 22 Desember 1950. Sebagian dari prajuritnya silam dan sebagian lagi gugur menjadi Syuhaada, setelah jual beli dengan Allah (Qur'an.Surat 9:111), yakni berperang agar berlakunya hukum-hukum Islam di bumi Indonesia secara Kaffah (sempurna).

Di Surakarta timbul gerakan yang dilakukan Batalion 426. Motif para anggota Batalyon 426 untuk memberontak dan memihak Darul Islam sebagian adalah berdasarkan keagamaan. Sebagai pasukan Islam dan bekas pejuang Hizbullah mereka bersimpati dengan berdirinya Negara Islam Indonesia. Sehingga selanjutnya mereka berhubungan erat dengan rakyat Muslim tidak hanya yang dari Klaten, tetapi juga dari Surakarta kota. Karena itu di Klaten banyak sekali orang yang diinterogasi karena dicurigai membantu kaum pejuang mujahidin, dan di Surakarta pun banyak yang ditahan dalam hubungan ini. Dalam suatu gerakan di Surakarta pada malam tanggal 12 Desember saja tujuh puluh lima orang yang dimasukkan dalam tahanan. Pada 2 Januari 1952 ini diikuti lagi dengan penangkapan pemimpin-pemimpin Islam terkemuka di Kauman, Surakarta—pusat Islam — termasuk di dalamnya R.H. Adnan, Ketua Mahkamah Tinggi Islam.

Divisi Diponegoro melancarkan gerakan besar-besaran terhadap batalyon pejuang mujahidin dan melakukan pengejaran yang gencar. Berjam-jam, kadang-kadang bahkan berhari-hari pertempuran berlangsung, dan banyak penduduk yang tewas. Semua jalan raya sekitar Yogyakarta dan Surakarta ditutup selama operasi berlaku. Kaum pejuang mujahidin terlalu letih akhirnya karena terus-menerus terganggu. Seperti dilaporkan sebuah surat kabar pada awal April: "Sering kali korban-korban manusia didapati TNI yang sudah meninggal dunia atau keadaannya amat menyedihkan. Banyak senjata yang tak bisa dibawa harus disembunyikan dalam tanah".

Tidak selalu Tentara Republik bertindak sangat bijaksana dalam operasinya. Sebaliknya, sayangnya ada saja kelihaian khusus untuk menimbulkan kemarahan rakyat. Karena itu, Februari 1952 suatu pertanyaan tertulis diajukan Prawoto Mangkusasmito, seorang anggota Parlemen mewakili Masyumi,—suatu partai yang karena sifat Islamnya bukan tanpa simpati terhadap kaum pejuang mujahidin Islam—kepada Pemerintah. Contoh-contoh tindakan yang dinyatakan sebagai tingkah laku yang buruk di pihak prajurit Republik yang dikemukakan di sini melukiskan suatu tipe peri laku yang diperhitungkan untuk memperhebat dendam masyarakat Islam. Di Klaten, di Desa Kardirejo umpamanya, prajurit-prajurit Tentara Republik Indonesia dikatakan telah membakar masjid-masjid. Dalam daerah Surakarta mereka menodai masjid-masjid dengan memasukinya seraya memakai sepatu dan membawa anjing masuk ke dalam.

Prawoto Mangkusasmito minta perhatian akan perilaku sewenang-wenang terhadap rakyat setempat dan para tahanan. Dikatakannya, kadang-kadang rakyat dimasukkan dalam tahanan perlindungan begitu saja untuk mencegah mereka membantu kaum pejuang mujahidin, baik secara sukarela ataupun secara paksaan. Dalam hal-hal lain, orang ditangkap sebagai sandera para kerabat yang lari atau menghilang. Di samping itu ia menyebut laporan tentang pembunuhan atas tawanantawanan yang ditangkap tidak dalam pertempuran tetapi dalam

operasi pembersihan. Semua ini, menurut Prawoto Mangkusasmito, telah membuat rakyat memihak pejuang mujahidin, sehingga sulitlah untuk menaklukkan Batalyon 426.

Mujahid dan Mujahidah yang Bertahan dari Jawa Tengah

Untuk menceritakan mujahidin yang bertahan, terlebih dulu renungkan Firman Allah S.W.T. : "Diantara orang-orang mu'min itu ada yang menepati apa yang sudah mereka janjikan kepada Allah; maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada (juga) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak merobah (janjinya)". Q.S.33 Al-Ahzaab 23).

Mujahid yang bertahan ialah mujahid yang tidak merobah janjinya kepada Allah untuk tetap menegakkan hukum-hukum-Nya selama mata bisa berkedip. Dirinya merasa dibayangi siksaan Api Jahannam, jika berhenti jihad. Sebab, ingatannya, apabila dirinya mundur dari jihad berarti maju ke Jahannam. Jiwanya merasa hina bilamana matinya dalam keadaan pengecut, sementara pelaksanaan hukum-hukum Al-Qur'an sedang dijegal oleh kaum Thogut. Hatinya akan sedih jika kalah berani daripada tentara Thoghut. Dari itu bahwa semboyan "Pilih hidup dalam keadaan mulia atau mati dalam keadaan Syahid", bukanlah hanya dalam ungkapan lisan, melainkan juga berwujud perbuatan. Hal demikian dilakukan di antaranya oleh para mujahid yang dituturkan dalam sejarah di bawah ini.

Seorang mujahid pelaku sejarah dari daerah Brebes, Jawa Tengah menuturkan bahwa dirinya menyaksikan sekitar sebulan sebelum Imam S.M.Kartosoewirjo tertangkap 4 Juni 1962 ditemukan banyak pamplet yang melekat pada pohon-pohon di daerah Gunung Kembang. Isi pamplet-pamplet itu bahwa Kartosoewirjo di Jawa Barat sedang berunding, Darul Islam dalam keadaan Cease fire. Tetapi karena di daerah itu pimpinan yang paling tinggi hanya komandan tingkat kecamatan, maka tidak bisa menentukan sikap menanggapi banyaknya pamplet, karena sudah sering adanya propaganda pihak lawan, sehingga tidak diambil pusing oleh para mujahid.

Hanya kurang lebih dua bulan sesudah menerima pamplet, para mujahid di daerah itu didatangi rombongan dari Jawa Tengah ujung timur daerah Gunung Slamet yang kebetulan di antaranya ialah H.Ismail Pranoto (Hispran), Panglima Divisi NII Jawa Tengah. Datang ke daerah perbatasan Jawa Barat itu bermaksud mengecek pamlet-pamlet guna meyakinkan sebenarnya. Sesudah dua bulan lamanya Hispran bersama mujahid di daerah itu, datang pula beberapa orang dari anak buah Hispran sendiri. Di antaranya, Miftah, Abu Kisno, Rakun, Sahwad, dan Saki.

Sesampainya mereka di bukit Gunung Kumbang tepi Sungai Cigorek, menghadap kepada Hispran maksudnya memberi informasi bahwa pasukan pak Hispran yang di gunung Slamet sudah turun

ke Tegal (maksudnya ke masyarakat). Beberapa macam informasi yang disampaikan oleh kawan-kawan mereka yang sudah menyerah di Jawa Barat, di antaranya Nasrun yang pertama kali datang. Satu kali, dua kali, dan ketiga kalinya ditembak, karena mengajak turun menyerah. Pasukan mujahidin memang siap menembak siapa saja yang memerintahkan menyerah. Walau begitu, beberapa lama kemudian Nasrun mengajak turun lagi merayu pasukan pak Hispran. Setelah tidak mempan dengan cara pamplet dan speker, akhirnya Nasrun itu datang waktu subuh, ia lolos dari tempat penjagaan. Kemudian setelah ia tiba di hadapan para mujahid ia bersumpah: " Demi Allah saya datang ke sini lillaahi ta'alaa. Saya mau ditembak terserah, diapakan terserah, saya datang ke sini bahwa Kartosoewirjo dalam keadaan Cease Fire dan berunding. Mungkin Indonesia dalam perundingan bisa menjadi negara Islam, atau setidak-tidaknya indonesia dibagi dua, NII dan RI .

Sebagian mujahidin pada bingung, bimbang setelah mendengar persaksian ini. Akhirnya, mujahidin yang didatangi Nasrun itu, berijtihad. Setelah bermusyawarah akhirnya mengemukakan kepada Nasrun:'Kalau memang telah terjadi Cease Fire, coba buktikan: "Satu, kami minta dijemput oleh satu kompi TNI di Desa Kebantingan, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal. Kedua, senjata TNI ujungnya kebawahkan sebagai ciri damai. Ketiga, Tidak ada tanda-tanda perampasan apapun. Dan keempat kami tidak dipisahkan, tidak dipencar-pencar".

Hal demikian dikabulkan oleh Nasrun. Pada jam-jam yang sudah ditentukan di Desa Kebantingan Kecamatan Margasari itu pasukan TNI hanya satu kompi. Pasukan Hispran pada waktu itu ada satu resimen. Dan yang turun pada waktu itu, senjata brennya ada sepuluh, biasanya bila satu bren itu sepuluh senjata ringan. Pada waktu yang ditentukan, betul di Desa Kebantingan dijemput, ujung senjata dikebahwahkan dan tidak ada perampasan apapun. Kemudian pasukan tidak ada yang dipencar, laki-laki, wanita disamakan ke Tegal, ke Panggungan , asrama TNI. Setelah di sana selama satu minggu pasukan-pasukan tidak ada yang dilucuti senjatanya, anak-anak seperti saudara, Bajo yang tadinya dari Batalion 426, Marjuki dan Kholil ke pasar itu bawa senjata seperti TNI, belanja dan segala macam.

Demikianlah inti informasi yang disampaikan oleh lima orang anak buah Hispran sebagaimana yang telah disebutkan tadi di atas. Hispran, karena sebagai Panglima Divisi, lain lagi sinyalemennya, dia tidak menanyakan cara bertele-tele. Cukup dengan analisa bahwa mereka tidak melucuti senjata pasukan yang turun ke kota itu, karena merayu Panglima Divisi-nya (Hispran). Selama satu minggu pasukan yang sudah di kota Tegal itu belum mengetahui sebenarnya mau diapakan. Mereka mengutus lima orang untuk memberi informasi kepadanya bahwa pasukan sudah ada di kota Tegal.

Setelah menerima laporan itu Hispran mengumpulkan pasukan termasuk Kastolani, H. Anas, Komandan Batalyon merangkap Komandan kompi. Kemudian Hispran berpidato dihadapan pasukan," Ini tipu muslihat musuh. Saya tidak diajak oleh Kartosoewiryo jihad bersama-sama kalau terdesak lalu damai, tidak pernah ! Jadi, kalian mau turun terserah, turun kembali, mau ikut saya terserah, saya cukup dengan Allah dan malaikat-Nya. Kalau kalian tidak mau ikut saya, kalian mau kembali silahkan". Kemudian Hispran memberikan beberapa kalimat amanat atau nasihat-nasihat dari Kartosoewiryo, sewaktu Hispran dipanggil menghadap Imam pada tahun 1959, yang waktu dihadiri oleh para panglima lainnya. Adapun amanat Kartosoewiryo itu diantaranya ialah: Kawan akan mendjadi lawan, dan lawan akan mendjadi kawan.

Panglima akan mendjadi Pradjurit, Pradjurit akan mendjadi Panglima. Mudjahid djadi luar Mudjahid, luar Mudjahid djadi Mudjahid.

Djika mudjahid telah ingkar, ingatlah;"Itu lebih djahat dari iblis", sebab dia mengetahui Strategi dan Rahasia perdjuangan kita, sedang musuh tidak mengetahui. Demi kelandjutan tetap berdirinja Negara Islam Indonesia, maka tembaklah dia.

Djika Imam berhalangan, dan kalian terputus hubungan dengan Panglima, dan jang tertinggal hanja Pradjurit petit sadja maka Pradjurit petit harus sanggup tampil djadi Imam. Djika Imam menjerah tembaklah saja, sebab itu berarti iblis. Djika Imam memerintahkan terus berdjuang, ikutila saja sebagai hamba Alloh SWT.

Djika kalian kehilangan sjarat berdjuang, teruskanlah perdjuangan selama Pantja sila masih ada, walaupun gigi tinggal satu, dan gunakanlah gigi jang satu itu untuk menggigit.

Djika kalian masih dalam keadaan djihad, ingat rasa aman itu, sebagai ratjun.

Setelah Hispran menjawab demikian, dan menyampaikan sebagian amanat- amanat Imam S.M.Kartosoewirjo, maka pasukan yang lima orang yang tadi turun di kota Tegal itu akhirnya kembali lagi bersama Hispran. Tahun 1963-1964 di antara yang lima itu empat orang sudah Syahid. Washijat tersebut membangkitkan ruhul jihad, sehingga mereka yang sudah turunpun mengurungkan niatnya dan kembali berjihad, apalagi yang masih bertahan di gunung,mereka semakin teguh dalam perlawanannya.

Kemudian setelah nyata-nyata Hispran tidak mau menyerah, maka lain lagi bentuk kalimatnya, yakni bukan Sease Fire lagi, melainkan sifatnya sudah merupakan ancaman dari mereka yang sudah turun menyerah. Di antara yang menandatanganinya waktu itu kiayi Maskur yang dari Kebumen, bekas KW.- Ks-nya Hispran. Mereka memberikan ancaman: "Jika kalian tidak turun, kami akan kerahkan seluruh kekuatan kawan-kawan yang sudah turun dan segala alat negara

akan kami kerahkan". Maksud mereka untuk menghancurkan yang masih bertahan. Kurang lebih pasukan NII pada waktu kejadian itu ada seratus orang. Kemudian pasukan diatur, maksudnya mencari tempat yang lebar dan mengatur siasat. Mujahid yang seratus itu dibagi-bagi supaya menghilangkan jejak. Pasukan dibagi-bagi dalam grup-grup yang kecil, dan ada yang terdiri tiga orang. Secara kebetulan di antara yang terdiri dari tiga orang itu tatkala akan pergi ke perbatasan Jawa Barat, di perjalanan bertemu dengan "pagar betis". Dalam pikiran yang tiga orang pada waktu itu jelas bahwa Cease Fire itu ada, nyatanya musuh hanya jarak dua meter dengan pasukan, mereka tidak menembak. Setelah musuh tidak menembak maka, pasukan pun tidak menembak, karena bawa rombongan di belakang, ditambah lagi dugaan barangkali itu itu Cease Fire, hanya pasukan ingin mencari kejernihan informasi dari Jawa Barat. Rombomgan para mujahid berpencar-pencar selama tiga bulan. Kemudian pasukan pulih kembali sesudah tahun 1963. Setelah terkoordinir kembali kemudian pasukan dipimpin oleh Kastolani, sebab Haji Anas dan Miftah telah gugur.

Mungkin karena keilmuannya belum masuk bagi salah seorang pasukan pada waktu itu, yang ingat pada dirinya cuma bai'at, bahwa dalam bai'at pada point tiga disebutkan " Saya sanggup berkorban dengan jiwa, raga dan nyawa saya serta apapun yang ada pada saya, berdasarkan sebesar-besar taqwa dan sesempurna-sempurna tawakal 'alallah, bagi mentegakkan Kalimatillah, li-I'lai Kalimatillah, dan mempertahankan berdirinya Negara Islam Indonesia; hingga hukum Syari'at Islam seluruhnya berlaku dengan seluas-luasnya dalam kalangan Umat Islam Bangsa Indonesia di Indonesia,: a. mentegakkan kalimatillah. Yang jika disimpulkan dengan Qur'an surat 8 ayat 39 yang bunyinya:"Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah (gangguan-gangguan terhadap Hukum-hukum Allah) dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah (tegaknya hukum Islam secara sempurna dan lenyapnya kebathilan), maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan". Maka Ridwan salah seorang dari mujahid yang pernah melihat Pagar Betis tidak menembak, bertanya kepada Abu Kisno," Mana yang benar, apakah mereka yang mengatakan adanya Cease Fire ataukah kita"? Abu Kisno menjawabnya,"Kita yang benar !" Disambut oleh Ridwan,"Jika kita yang benar biar kita jadi 'lutung' dari pada turun gunung", maksudnya apapun risikonya bertahan saja di hutan melanjutkan jihad jangan menyerah kepada musuh.

Sehingga pada waktu itu betul, ancaman ultimatum itu terbukti. Tidak ada tempat tanah yang bisa ditempati, semua kena operasi musuh. Mungkin karena kebodohan atau wallaahu'alam sehingga yang tadinya menjadi mujahid mengoperasi mujahid pula. Sehingga selama dua tahun itu dalam darurat sungguh berat, sulit air untuk bisa mandi, untuk minum saja sampai potong

bogol pisang dan dilobangi. Memotong –motong areuy dan dedaunan, berbulan bulan tidak bertemu dengan nasi.

Disebabkan jihad mesti terus berlanjut, tetapi bagaimanapun harus mengurangi risiko, Para mujahid bemusyawarah untuk menghindari musuh, Hispran mencari basis ke Yogya, maksudnya akan selam, menyilamkan seluruh pasukan yang ada di Jabal, Hispran mengatur komunikasi antara pasukan yang dibawa ke Yogya dan pasukan yang ditinggalkan bersama Kastolani. Hispran membawa beberapa orang pengawal, di antaranya Hanif, Safri, Nahdhor, Sahwad dan Muhtar. Sesudah itu selama dua bulan di Yogya tidak ada komunikasi antara Jabal dan Hispran. Menerima informasi terakhir, bahwa Hispran sudah menemui beberapa orang kiayi, mereka sanggup menempatkan pasukan yang berada di Jabal itu. Kemudian Hispran mempunyai basis di daerah Klasan Kaliurang antara jalan yang ke Boyolali dan ke Kaliurang. Pasukan punya basis di sana sampai tahun 1964. Akan tetapi, kebetulan penghubung yang diutus menyampaikan informasi ke pasukan di Jabal, ada yang gugur dan ada yang menyerah memberikan informasi kepada musuh bahwa Hispran berada di Yogya, maka tempatnya digerebeg , dioperasi. Yang menyerah tadi itu Nahdhor bekas pengawal Hispran sendiri yang dari Kecamatan Bantar Kawung.

Pada waktu itu para mujahid tidak ketinggalan masalah penghubung untuk mengetahui keadaan lawan sampai dimana, sehingga Hispran bisa menyelamatkan diri, waktu digerebeg sudah ke Sumatera. Di Sumatera Hispran bergerak idhar, karena beda nama, terkenalnya ialah Kiayi Maksum, tidak diam operasi mencari basis hingga bertemu dengan Rivai yang dulunya pasukan Amir Fatah, Hispran tidak mengalami kesulitan. Setelah di sana putus dengan pasukan, karena ada yang menyerah. Tetapi, Alhadulillah, tutur seorang yang pernah mengikutinya, Hispran waspada sebelumnya dengan berpesan,"Kalau kalian putus hubungan dengan saya, tentukan gerakan menurut ijtihad kalian, tidak usah menunggu komando dari saya". Sebab, tahun 65-an digambarkan olehnya akan ada probahan di RI. Nyatanya, betul tanggal 30 September ada gerakan PKI. Dan yang tidak lepas dari rombongan pasukan adalah radio meski beritanya dari musuh, tapi kebetulan ada suara dari Radio Suara Indonesia Bebas yang mungkin dari Aceh , dan Radio Suara Mujahid dari Sulawesi Selatan. Dengan situasi demikian menurut Kastolani dan pasukannya bahwa gerakan harus idhhar. Maka gerakan yang tadinya bersifat dipensif, bersembunyi, selam, akhirnya tahun 1965 itu idhar gerakan jadi menghancurkan PKI dengan rakyat-rakyat yang berada didaerah basis pasukan. Kastolani terbuka kepada masyarakat dan menyatakan," Kami adalah pasukan Kastolani yang ada di Jabal". Tapi tanggapan dari musuh untuk menyedikitkan atau melemahkan Kastolani, dipropagandakannya, "bahwa itu PKI yang lari ke Jabal dan Kastolani sudah tidak ada", dihadapan umum sambil TNI itu beroperasi. Namun, pada tahun 1965 itu beberapa daerah PKI yang tidak bisa dihancurkan oleh rakyat, pasukan

Kastolani menghancurkannya. Mujahid pada waktu itu tinggal dua belas orang dari yang seratus orang pada tahun 1962, ada yang Syahid, meninggal dan macam-macam lainnya.

Dari gerakan idhar itu akhinya rakyat yang pernah putus kumunikasi pun daerahnya bisa dijadikan basis. Gerilya jarang di Jabal lagi. Gerilya kebanyakan di Masyarakat. Sehingga ukuran ekonomi boleh dikatakan jauh berbeda dari masa yang sudah lalu, baik itu dalam hal makan, maupun alat-alat, yang biasanya peluru untuk satu orang cuma 10 atau 15 butir, tetapi sewaktu idhar gerakan menjadi tidak kekurangan bahkan sampai tidak terbawa sehingga harus disembunyikan atau dititipkan kepada rakyat di daerah basis. Kemudian pasukan mujahid itu malah bisa menjamin rakyat yang lemah, dijadikan rahmat. Mujahid operasi kepada musuh, rakyat bisa mengenyam.

Kemudian pada tahun 1967 para mujahid itu kena tipu, karena kekurangan pemberitahuan sehingga tidak tahu informasi keadaan yang sesungguhnya. Pada tahun itu dihubungi oleh yang bernama Khairuddin, bekas Bupati NII Purwokerto yang istrinya orang Salem Sadiyah. Khairuddin bercerita,"Kalian harus tinggalkan ini Jabal, ini sudah tidak memungkinkan lagi. Bukan untuk menghentikan jihad. Jihad tetap, tetapi hanya ada tiga tempat yang kemungkinan kalian bisa tempati, bisa pilih apakah nanti ke Sulawesi, karena pasukan Kahar Muzakar pun masih punya daerah-daerah basis di masyarakat. Kemudian apakah ke Aceh, karena Daud Beureuh juga punya daerah otonomi. Kemudian apakah langsung dengan Siliwangi karena Siliwangi separohnya sudah NII". Dengan kalimat-kalimat itu mungkin Kastolani dan Zaenal Asikin sebagai Camat Darul Islam itu kena rayu juga tidak kontrol, wallaahu'alam, kata seorang pasukan yang tidak diajak berunding. Dengan demikian itu diaturlah rombongan dari yang ada 12 orang itu, diberangkatkan dari Jawa Tengah menuju Bandung empat orang untuk mengetahui situasi. Sesampainya di Kota Bandung dijemput oleh Fajri, bekas Resimen Cilacap NII, dan dibawa olehnya ke rumah Kadar Solihat, Jalan Kancra XI No.13. Keempat orang itu yakni, Mumtahar, Ridwan, Zaenal Asikin dan Tarmunah, istrinya Zaenal Asikin. Mereka tidak mau keluar dari rumah, karena menyangka sekedar bersembunyi sebab sudah biasa bila dalam bergerilya di masyarakat harus demikian. Di tempat itu bertemu dengan Tahmid, putranya Kartosoewiryo, Djadja Sudjadi. Keempat mujahid dan mujahidah tidak tahu mau dibawa kemana. Akhirnya, setelah satu minggu mereka itu dibawa ke Brigif 13 Tasikmalaya oleh Kadar Solihat. Waktu itu komandan brigifnya Kolonel Suprapto, Komandan Camp-nya Mayor Ilyas, Kapten Siswadi. Ketika masih di rumah Kadar Solihat belum merasa ditipu. Merasa ditipu itu sesudah diserahkan ke Brigif 13 Galuh Tasikmalaya, dan dimasukkan ke sel , ketika mau ambil air wudhu dikawal dengan senjata otomatis, sampai mau shalat pun dikawal dengan geren. Hal itu terjadi pada bulan September 1967, artinya tidak semua mujahid menyerah (perhatikan Q.S.33: 23).

Sementara itu Kastolani di Jawa Tengah belum mengetahui hal yang menimpa keempat anak buahnya yang diutus ke Bandung. Kira-kira dua minggu sesudah kedatangan Abdullah dan Khairuddin atau seminggu sesudah empat mujahid dan mujahidah tadi ditangkap, datang lagi Khairuddin mengantar Kadar Sholihat bersama Sam'un, bekas komandan kompi TII di Jawa Barat, disertai tiga orang TNI yang menyamar dengan pakaian preman yang sebelumnya tidak diketahui oleh Kastolani pada masing-masing pinggangnya terselip pistol. Dalam pembicaran waktu itu Kastolani bertanya kepada Kadar Sholihat, apakah hal ini tidak menggunakan sarana musuh (maksudnya tidak diketahui musuh)? Kadar Solihat meyakinkan bahwa tugas mereka akan dimutasikan dalam rangka melanjutkan perjuangan. Kastolani mempercayainya, karena ingat pesan dari Ismail Pranoto (Hispran) yang berusaha menyediakan tempat di Sumatera, dan inilah dianggap hasilnya. Selain itu juga Kastolani pada waktu itu percaya bila Siliwangi separohnya sudah NII, sehingga tidak curiga ketika diperintahkan naik pickup oleh Kadar Solihat. Maka Kastolani,Tamdjid, Tami, Ahmad, Zaenudin, Rahmat, Rusmi (istrinya Rama, dan tiga mujahid lainnya naik ke atas pickup. Rombongan Kastolani, bersama kelima orang penjemput meninggalkan Brebes. Kastolani baru sadar dirinya ditipu takala pickup yang ditumpanginya itu masuk ke markas Brigif 13 Galuh Tasikmalaya.

Dari sekian mujahid yang diinterogasi adalah Kastolani dan Ridwan. Kastolani diinterogasi mungkin karena sebagai komandan keseluruhan. Sedangkan Ridwan diinterogasi mungkin dianggap yang paling bisa membuka rahasia, karena yang paling muda usianya. Maksud TNI menyudutkan para mujahid. Yang ditanyakan di antaranya:

Dasarnya apa kamu jadi Darul Islam? Mengapa kamu tidak turun menyerah dan dimana saja?

Begitulah pokok pemeriksaan. "Tapi alhamdulillah, dengan pertolongan Allah, mujahid menjawab sebagaimana mestinya seorang kader. Betapapun beratnya siksaan ketiga diinterograsi tersebut, mereka tetap istiqamah, mereka berkeyakinan bahwa dalam tekanan bagaimanapun tetap harus bisa menyelamatkan tiga hal : Pertama, pemimpin sesuai dengan bai'at point ke 6. Kedua, perjuangan. Ketiga, kawan. Sebab, diselamatkan kawan, berarti menyelamatkan perjuangan. Demikian tutur dari seorang mujahid yang diperiksa pada waktu itu. Kemudian sesudah selama dua bulan di Tasikmalaya diperiksa, mungkin dianggap tidak selesai, maka dibawa ke Bandung ke Jalan Sumatera.

Bila di Jawa Barat jihad Islam itu hancur karena disusupi musuhnya, akibat membuka akses informasi terhadap orang yang telah menyerah. Tanpa proses hukum lebih dahulu langsung mengangkat Ali Murtado (lihat Bab VIII) sebagai penghubung di kota. Maka di Jawa tengah mujahid yang tersisa, pasukan perlawanan yang masih bertahan berhasil diangkut ke kota,

tertipu oleh kemanisan mulut Nasrun, yang sebelumnya telah berkali kali meminta mujahidin untuk menyerah. Seharusnya sesuai dengan amanat Imam, mereka yang mengajak menyerah haruslah ditembak -sebab berarti dia iblis- bukan sekedar diancam mau ditembak tapi tidak jadi. Kekeliruan ini berlanjut dengan "menerima kesaksian" Nasrun, sang pengkhianat itu, bahwa keadaan sudah cease fire. Bukannya menyelidiki berita orang fasik ini (lihat Q.S. 49 : 6), malah mujahidin itu meminta sipengkhianat untuk membuktikannya. Terbukalah kesempatan bagi Nasrun untuk membuat sandiwara cease fire tadi, dan siasat licin ini berhasil dijalankan TNI untuk menghentikan perlawanan suci mereka.

Di sini pun kita melihat persekongkolan kotor orang orang yang telah menyerah, untuk membawa para mujahid yang masih istiqamah berjuang. Nyatalah washijat Imam tahun 1959, bahwa mujahid yang telah ingkar itu lebih berbahaya dari pada Iblis, sebab pengkhianat itu memiliki akses informasi ke jaringan Jihad, sedangkan musuh tidak. Dan akses ini bukannya disyukuri dan dimanfaatkan untuk mengkoordinasikan jihad, dasar mentalnya sudah busuk, malah digunakan untuk menggusur mereka yang masih berjihad. Na'udzubillah.

DARUL ISLAM SULAWESI SELATAN

Di Sulawesi Selatan meletus pula suatu perlawanan terhadap Republik Indonesia. Para mujahid di daerah itu menggabungkan diri ke dalam Negara Islam Indonesia dibawah pimpinan Kartosoewirjo. Perlawanan rakyat terhadap Republik di Sulawesi dipimpin oleh Kahar Muzzakar. Dengan dimulainya perlawanan di daerah ini sangat mempengaruhi bagian-bagian luas lainnya di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara untuk mengadakan perlawanan selama bertahun-tahun.

Abdul Kahar Muzakkar lahir pada tanggal 24 Maret 1921 di Desa Lanipa dekat Palopo, Distrik Ponrang, Kabupaten Luwu, di pantai barat laut Teluk Bone. Pada saat kanak-kanaknya dia lebih dikenal oleh keluarga dan masyarakat di desanya dengan nama La Domeng. Adapun orang tuanya bernama Malinrang adalah seorang petani yang cukup mampu dan tergolong pada aristokrasi rendah. Dengan kedudukan dan kemampuan orang tuanya, ketika usianya sudah mencapai tujuh belas tahun ia dikirim ke Surakarta untuk belajar di sebuah sekolah Perguruan Islam (Kweekschool Muhammadiyah), dari tahun 1938 sampai tahun 1941. Pada masa-masa pendidikannya dia tergolong anak yang cerdas dan supel dalam pergaulan. Oleh karena itu dia begitu aktif di berbagai kegiatan organisasi yang dibuka oleh Perguruan Islam tersebut, diantaranya ialah menjadi salah seorang pemimpin lokal Pemuda Muhammadiyah di Hizbul Wathon, gerakan kepanduan Muhammadiyah. Kegiatan ini dilakukannya sampai mendaratnya Bala Tentara Kerajaan Jepang. Pada awal pendudukan Jepang dia bekerja sebagai pegawai Nippon Dohobu di Ujungpandang, namun tak lama kemudian ia berhenti.

Setelah menyelesaikan pendidikannya dan kembali ke daerah asalnya, Kahar Muzakkar bentrok dengan kepala-kepala adat setempat karena pengaruh faham modernisme Islam yang dibawanya. Dampak dari kritikan yang dilancarkan oleh Kahar itu telah membawa dirinya kepada satu pertentangan terbuka dengan pihak kepala adat. Akibatnya timbullah kemarahan pada sebagian kepala adat, dan dari kemarahan itu selanjutnya beralih kepada tuduhan kepada Kahar Mudzakkar yang mana telah menghasut terhadap kepala-kepala. Menurut kepala adat, Kahar telah "mengutuk sistem feodal yang berlaku di Sulawesi Selatan dan menganjurkan dihapuskannya aristokrasi". Oleh karena itu resiko yang diambil Kahar yakni dibuang dari pulau itu—atau secara lebih tepat diasingkan untuk seumur hidup — selanjutnya Kahar Muzakkar kembali ke Surakarta pada tahun 1943. Dan mulailah dia membuka hidup baru. Ia yang didampingi oleh isterinya membuka sebuah perusahaan yang diberinama "Usaha Semangat Muda", selanjutnya menjadikan Jawa sebagai tempat tinggalnya.

Ketika proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan oleh Sukarno, dimana memanggil segenap pejuang untuk membela dan mempertahankannya. Dia pun turut serta dalam perjuangan kemerdekaan tersebut, dan di dalam perjalanan perjuangannya itu dialah salah seorang barisan pengawal Soekarno, ketika Soekarno menyampaikan salah satu pidato rapat umumnya di lapangan Merdeka di Jakarta pada tanggal 19 September 1945. Tentang pertemuan ini Kahar Muzakkar sendiri membanggakan dirinya bahwa dia adalah satu-satunya orang — saat itu ia hanya bersenjatakan golok — yang siap melindungi Soekarno dan Mohammad Hatta — dengan melingkari mobil yang di kendarai oleh Soekarno dan Mohammad Hatta — terhadap bayonet serdadu Jepang yang berusaha membubarkan pertemuan.

Begitulah Kahar Muzakkar dengan darah Makasarnya telah muncul ke pentas nasional sebagai seorang tokoh yang berwatak pemberani dengan daya tarik pribadi yang besar. Pada dirinya terdapat "keberanian yang nekat dalam pertempuran, ketangkasan yang tiada taranya dalam menggunakan senjata dan dalam olahraga, dan kecerdasan yang tajam, disertai prakarsa cemerlang yang nyerempet-nyerempet", sedangkan "kemampuannya untuk menggerakkan massa oleh pidato-pidatonya bolehlah dibandingkan dengan kemampuan Soekarno ...." Sesudah proklamasi kemerdekaan Kahar Muzakkar menjadi salah seorang pendiri suatu organisasi pemuda dari Sulawesi yang menetap di Jawa, Gerakan Pemuda Indonesia Sulawesi (Gepis). Selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 1945 Gepis berfusi dengan suatu organisasi gerilya lain yang terdiri dari pemuda Sulawesi juga, yaitu Angkatan Pemuda Indonesia Sulawesi (APIS). Setelah penggabungan dua organisasi ini, maka dihasilkan satu kesepakatan untuk membuat nama baru yaitu Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS).

Dalam sebuah rapat yang diselenggarakan KRIS, Kahar Muzakkar diangkat menjadi sekretaris pertama KRIS, dan dalam kedudukannya ini dia ditugaskan untuk mendirikan cabang-cabang KRIS di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Harvey, mayoritas yang turut dalam KRIS adalah pemuda yang datang dari Minahasa, bagian timur laut Semenanjung Sulawesi. Dan sebagian besar rakyat dari Minahasa dan Manado tersebut beragama Kristen, dan tergolong salah satu kelompok etnis. Sebelum terjadinya Perang Dunia Kedua, di daerah Jawa inilah Tentara Kolonial Hindia Belanda (KNIL) banyak merekrut serdadunya yang didatangkan dari sana, karena pertautan dengan rezim kolonial Belanda ini pula orang Minahasa dan Manado dicurigai bersikap pro Belanda atau bekerja sebagai kaki tangan Belanda, sehingga mereka merasa dirinya dalam suatu lingkungan yang bermusuhan. Oleh karena itu, mereka bentuk KRIS dengan maksud untuk membela diri dan memperlihatkan kesediaan mereka bertempur melawan Belanda di berpihak kepada Republik. Organisasi yang serupa juga didirikan oleh orang dari Ambon yang berdiam di Jawa, seperti Angkatan Pemuda Indonesia (API) Ambon dan Pemuda Indonesia Maluku (PIM). Khusus untuk KRIS karena pertautan KNIL-nya memperoleh nama sebagai kesatuan militer yang terorganisasi baik dan berdisiplin.

Setelah lepas dari organisasi KRIS, Kahar Muzakkar mempunyai peranan sangat penting dalam membentuk Batalyon Kesatuan Indonesia (BKI) pada akhir bulan Desember 1945, selanjutnya aktif pula dalam mengatur penyusupan para pejuang ke Sulawesi—Belanda saat itu telah menegakkan kembali kekuasaannya di Sulawesi—dengan menggunakan perahu dari Jawa.

Adapun pasukan yang tergabung dalam Batalyon Kesatuan Indonesia yang dipersiapkan oleh Kahar adalah terbentuk dari orang-orang yang berasal dari pulau-pulau seberang yang dipenjarakan di Nusakambangan Cilacap. Dengan melalui keterlibatannya para tahanan ini banyak yang dibebaskan dan selanjutnya kepada mereka diberi latihan militer secara singkat. Menurut beberapa sumber, awalnya batalyon ini ditugaskan sebagai pengawal Presiden Soekarno pada waktu Pemerintah Republik pindah dari Jakarta ke Yogyakarta, namun kemudian ada perubahan nama menjadi "pasukan gerak cepat Penyelidik Militer Khusus (PMC)" yang dipimpin oleh Kolonel Zulkifli Lubis di Yogyakarta. Akan tetapi pembentukan pasukan ini hanya berlangsung beberapa bulan saja. Pada tanggal 24 Maret 1946 Kahar Muzakkar mendapat kuasa penuh dari Panglima Tentara Republik Jenderal Sudirman untuk membentuk Tentara Republik Indonesia Persiapan di Sulawesi (TRIPS). Adapun untuk membentuk pasukan tersebut Kahar Muzakkar banyak mengambil pasukannya dari yang telah tergabung sebelumnya dalam BKI.

Untuk menjalankan tugas ini Kahar Muzakkar mulai mengatur penyusupan ke Sulawesi Selatan dengan menggunakan perahu layar. Pada mulanya ekspedisi pasukan ini berjalan lancar, kurang

lebih ada sepuluh ekspedisi dikirimkan dari Jawa oleh TRIPES dengan jumlah 1200 orang prajurit sudah dikirimkan selama tahun 1946 dan lebih terutama ekspedisi yang keempat dan keenam yang kelak menjadi bagian penting bagi perkembangan sejarah. Tetapi sesudah 1946, kegiatan penyusupan benar-benar terhenti. Yang menjadi penyebabnya adalah karena penyusupan digagalkan oleh taktik anti kekacauan Belanda yang digunakan Westerling oleh karenanya harapan bagi pasukan Republik di Sulawesi agak suram. Sebagian besar pejuang gerilya yang datang dari Jawa tertangkap atau terbunuh. Sisanya kembali ke Jawa. Begitu juga yang dialami para pejuang setempat yang tidak pernah meninggalkan Sulawesi pun menderita pukulan hebat karena aksi-aksi Westerling tersebut.

Sementara itu orang-orang Sulawesi yang berdomisili di Jawa, terus melakukan perlawanannya dalam bertempur dengan Belanda. Dan dalam masa perjuangan ini nama dan kedudukan TRIPES beberapa kali mengalami perubahan. Pada bulan November tidak lama sesudah diadakannya perjanjian Linggarjati, namanya berubah menjadi Lasykar Sulawesi. Bersamaan waktunya, ketika itu Kahar Muzakkar dan anak buahnya yang sedang berjuang di Madiun membentuk pasukan penggempurnya sendiri, Barisan Berani Mati (BBM), mereka diambil dari prajurit-prajurit TRIPES yang terbaik, dan dalam teori juga terdapat cabangnya di Sulawesi.

Pada bulan Juni 1947 Tentara Republik berganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam kedudukan yang barunya, Kahar Muzakkar diberi tugas mengkoordinasi satuan-satuan gerilya di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara—sesungguhnya, seluruh daerah seberang. Disamping itu pula, dia ditugasi membina kader militer di daerah-daerah ini; usaha ini pada tahun-tahun 1946 dan 1947 gagal karena aksi-aksi Westerling. Kahar Muzakkar dalam hal ini memulai dengan awal yang baik dengan mengirimkan dua perwira stafnya—Saleh Sjahban (Saleh Syahban) dan Bahar Mattaliu—ke Sulawesi untuk mengadakan hubungan dengan pasukan-pasukan gerilya yang tersisa di sini bahkan sebelum pengangkatannya Oktober.

Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1949, dibentuklah Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) oleh Saleh Sjahban dengan tujuan mempersatukan demikian banyaknya pejuang yang terpencar dan terpencil yang beroperasi sendiri-sendiri di daerah itu.

Kahar Muzakkar sendiri tiba di Ujungpandang 22 Juni 1950. Selama beberapa hari sesudah kedatangannya, dia melakukan wawancara dengan Kawilarang kemudian melakukan kunjungan singkat ke Sulawesi Selatan untuk berusaha meyakinkan para pejuang agar menerima syarat yang diusulkan Tentara Republik, "mereka diakui sebagai prajurit dulu, dan rasionalisasi seyogyanya barulah dijalankan sesudah itu". Syarat ini, menurut Harvey sejalan dengan kompromi yang sebelumnya diajukan para pemimpin KGSS sendiri. Tetapi sekembalinya dari

perjalanannya, Kahar Muzakkar mengajukan usul balasan yang diinginkan oleh para pejuang . Mereka menghendaki agar jumlah pejuang yang akan diterima mencapai sedikit-dikitnya kekuatan satu brigade. Disamping itu, Kahar Muzakkar dan para pejuang ini menghendaki mereka membentuk brigade tersendiri, tidak terpencar dalam sejumlah satuan yang berbeda-beda.

Usul KGSS itu ditolak oleh Kawilarang dalam suatu pertemuan dengan Kahar Muzakkar pada tanggal 1 Juli 1950. Kemudian Kawilarang mengeluarkan pengumuman untuk membubarkan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan, dan pada hari yang sama melarang semua kegiatan yang berkaitan dengan pembentukan organisasi gerilya baru, menurut Kawilarang, karena masa integrasi pejuang ke dalam Tentara telah berakhir. Pada Agustus Kawilarang menyatakan, 70% pejuang telah memasuki Tentara, dan hanya 30% yang menolak melakukan demikian, kemudian dia memperingatkan terhadap yang belakangan ini Tentara akan bertindak. Ketika mendengar reaksi Kawilarang atas usul-usul yang dibawanya, Kahar Muzakkar menyatakan mengundurkan diri dari Tentara dan menyerahkan lencananya kepada panglima. Beberapa hari kemudian dia masuk hutan. Dalam kenyataan yang sesungguhnya, dia diculik KGSS, atas prakarsa Andi Sose, walaupun mungkin sekali Andi Sose bertindak demikian berdasarkan perintah, atau setidak-tidaknya dengan persetujuan Kahar Muzakkar diam-diam. Kahar Muzakkar mengintruksikan para pejuang lain untuk mengabaikan larangan yang dikeluarkan oleh Kawilarang tentang KGSS. Oleh karena itu KGSS terus berfungsi walaupun sekarang sebagai organisasi ilegal. Seluruh keadaan menjadi lebih ironis, beberapa bulan ketegangan berkelanjutan dengan pertempuran-pertempuran antara pasukan TNI dengan pasukan Kahar Muzakkar.

Berdasarkan keterangan resmi Tentara yang dikeluarkan oleh Letnan Kolonel Kosasih, Kepala Staf Tentara Republik untuk Sulawesi Selatan, Tentara memutuskan melancarkan serangan terhadap kaum pejuang karena barisan mereka telah disusupi penjahat-penjahat. Tudingan yang demikian kerap dilontarkan oleh Tentara Republik dengan maksud memojokkan setiap orang yang tidak setuju dengan kebijaksanaan Republik, dan terus menentangnya.

Setelah adanya sikap keras Tentara yang tidak kenal kompromi ini berbuntut panjang. Kini di kalangan sipil di Sulawesi Selatan sendiri maupun di Jakarta tidak sependapat dengan sikap yang diambil oleh Tentara. Mereka berpendapat, bahwa pada setiap pejuang ada sifat patriotismenya.

Namun oleh kalangan Tentara dianggapnya sebagai gerombolan pengacau. Ditambahkannya, sesungguhnya di Sulawesi Selatan lebih banyak terdapat simpati terhadap kaum pejuang, dimana mereka banyak yang diberi makanan oleh penduduk desa, ketimbang terhadap Tentara

Republik. Mengenai dukungan rakyat setempat ini Andaya menulis: "Sejak semula benar, Kahar dan para pejuang mendapat dukungan luar biasa dari rakyat setempat yang memperlihatkan simpati yang besar dengan penderitaan mereka ini", dan "mereka anggap kehadiran pasukan-pasukan orang Jawa, pemimpin-pemimpin pemerintah, dan unsur-unsur kebudayaan Jawa di pantai mereka, sebagai penghinaan terhadap rakyat Sulawesi, padahal rakyat Sulawesi telah demikian banyaknya menyumbang harta dan darah sehingga mengalami penderitaan yang amat sangat untuk memperoleh kemerdekaan dari Belanda".

Begitu juga ada indikasi kuat yang menyatakan bahwa, Tentara Republiklah yang menyebabkan terjadinya pertempuran karena menduduki pangkalan-pangkalan gerilya. Hal ini pula yang memperkuat kecurigaan para pejuang mujahidin. Dari pihak pejuang menyatakan, sesungguhnya mereka mengundurkan diri ke hutan untuk menghindarkan terjadinya pertumpahan darah, dan mereka hanya membalas dan bertempur dalam keadaan terpaksa. Para pejuang sendiri sebenarnya lebih menginginkan jalan kompromi dalam menyelesaikan kemelut yang ada. Pada bulan September Kahar Muzakkar memberitahukan, tuntutan menghendaki Brigade Hasanuddin dan dia sendiri yang menjadi komandannya bukanlah tuntutan yang mutlak. Dalam hal masuknya Kahar Muzakkar sendiri beserta anak buahnya kedalam Tentara, dia sama sekali bersedia menyerahkan kepada Tentara berapa jumlah tepatnya dan siapa yang tetap dan siapa yang akan di demobilisasikan. Pendirian sikap ini jelas-jelas dikatakan oleh seorang juru bicara pejuang pada akhir Oktober. Juru bicara ini menekankan, perbedaan antara Tentara Republik dan pejuang bukanlah perbedaan prinsip atau ideologi. Satu-satunya masalah yang tetap harus diselesaikan ialah masalah integrasi Brigade Hasanuddin ke dalam Tentara Republik. Begitu masalah ini dapat diselesaikan, demikian dikemukakannya, para pejuang bersedia memasuki batalyon "depot" dan akan mematuhi perintah para atasannya sebagai prajurit yang setia.

Bukti sebagai syarat yang jelas akan kesetiaan mereka bahwa para pejuang membantu Tentara dalam bulan Mei dan Agustus. Oleh karena itu ada permintaan dari banyak kalangan untuk berusaha mencari penyelesaiannya dengan cara damai. Suatu resolusi yang mendesak Pemerintah untuk tidak menggunakan kekerasan disampaikan oleh dua puluh dua partai politik dan organisasi Sulawesi Selatan, maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas prakarsa fraksi Kerakyatan. Di samping itu, pada 18 Agustus, sebuah Panitia Jasa Baik dibentuk penduduk setempat yang terkemuka. Panitia ini diketuai Jusuf Bauti, anggota Dewan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan, beserta seorang anggotanya yang paling aktif Nyonya Salawati Daud, istri seorang pejabat pemerintah di Maros, salah satu benteng pejuang mujahidin.

Pada tanggal 25 Maret 1951, akhirnya tibalah hari yang lama dinanti-nantikan: pembentukan resmi Persiapan Brigade Hasanuddin sebagai bagian dari Korps Cadangan Nasional Tentara

Republik. Pada hari ini juga Kahar Muzakkar meninggalkan tempat persembunyiannya. Suatu upacara khusus untuk menyambutnya diadakan di Maros: sebanyak lima sampai enam ribu orang telah berkumpul untuk menyaksikan dia bersama prajurit-prajuritnya memasuki kota pukul tujuh malam hari. Salawati Daud dan Kahar Muzakkar sendiri yang bicara kepada pasukan. Kahar Muzakkar dalam pidatonya, yang berlangsung kira-kira setengah jam, secara panjang lebar membicarakan tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepadanya bahwa ia terlalu ambisius, ia masuk hutan semata-mata untuk melanjutkan tujuannya, dan ia sengaja melarut-larutkan perundingan agar terjamin pengukuhan pangkatnya sebagai letnan kolonel. Walaupun banyak orang yang percaya, dia dan Saleh Sjahban "haus pangkat dan kedudukan", disangkalnya tuduhan-tuduhan ini dengan mengemukakan, walaupun kenyataan membuktikan ia memiliki "kursi-kursi besar, meja-meja besar, dan telah menghadapi orang-orang penting "di masa lampau, semuanya ini bukanlah satu-satunya tujuan hidupnya. Saya dicurigai sangat mendambakan pangkat letnan kolonel, tetapi pangkat letnan kolonel ini yang didesakkan kepada saya", ditegaskannya, sambil menambahkan, bila ada orang yang menginginkan mengambil alih pimpinan Brigade Hasanuddin, mereka dipersilakan maju ke depan dan melakukan keinginan itu; hanya saja dia tidak sudi menyerahkan tugas ini kepada mereka yang telah membakari rumah-rumah rakyat yang tidak berdosa.

Namun amat disayangkan adanya pembentukan Korps Cadangan Nasional pada bulan Maret sama sekali tidak berarti, pejuang-pejuang muslim Kahar Muzakkar telah menjadi prajurit biasa dari Tentara Republik. Penggabungan resminya direncanakan pada bulan Agustus. Tetapi antara Maret dan Agustus 1951 terjadi serangkaian insiden yang mengakibatkan perpecahan baru lagi antara Tentara dan Kahar Muzakkar. Pertentangan baru ini pada akhirnya menuju keretakan terbuka dan tak terdamaikan.

Dalam minggu-minggu sebelum hari yang telah ditetapkan untuk integrasi resmi Korps Cadangan Nasional, pertentangan intern yang pertama di kalangan pengikut-pengikut Kahar Muzakkar terjadi ketika Andi Selle memihak Pemerintah dalam persoalan apakah integrasi Korps Cadangan Nasional Sulawesi Selatan akan dilakukan batalyon demi batalyon atau tidak.

Penggabungan Batalyon Bau Masseppe Andi Selle ke dalam Tentara sebagai Batalyon 719 pada 7 Agustus 1951 hanyalah memperbesar pertentangan antara Kahar Muzakkar dan Tentara, selanjutnya. Namun tidak seluruh Batalyon Bau Masseppe mengikuti komandannya, melainkan sebagian dari padanya dengan Hamid Gali dan Usman Balo sebagai pemimpin-pemimpin utamanya dan tetap setia kepada Kahar Muzakkar. Setelah terjadi sedikit pertempuran dengan para pengikut Andi Selle mereka mengundurkan diri ke bagian lain Pare-pare dan membentuk batalyon baru, yang dipimpin Hamid Gali. Tidak pula hubungan-hubungan antara Kahar Muzakkar

dan Andi Selle putus sama sekali, dan pada waktunya hubungan antara keduanya membaik lagi. Bahar Mattaliu menyebut Andi Selle sebagai salah satu sumber pokok senjata Kahar Muzakkar, dan benar-benar dikatakannya: "Ini berarti, bahan-bahan mentah terus dikirimkan Kahar kepada Andi Selle yang membayarya dengan pelor, senjata berat dan ringan, dan dengan pakaian seragam tentara".

Dalam menghadapi perjuangan Kahar Muzakkar, Tentara Republik berusaha menghadapinya dengan melakukan serangkaian operasi militer. Terutama sekali pada tahun-tahun mula kerusuhan dengan mengajak kesatuan-kesatuan pejuang yang merasa tidak puas dengan Kahar Muzakkar untuk menyerah. Dan mengenai hal yang akhir ini, Tentara Republik mengambil sedikit keuntungan dari adanya perselisihan antar pejuang sendiri. Pertikaian ini bisa muncul karena sebagian ambisi dan dendam pribadi, sebagian lagi karena perbedaan ideologi mengenai jalan yang harus ditempuh dalam perlawanannya terhadap Pemerintah Republik.

Bertepatan waktunya dengan ketika Pemerintah menganjurkan penyelesaian "politik psikologis", Kahar Muzakkar memperkuat posisinya. Dalam masa inilah dilakukan pembaharuan hubungan antara dia dan Kartosoewirjo. Hubungan pertama antara mereka telah dilakukan Agustus tahun sebelumnya, ketika Kahar Muzakkar masuk hutan. Pada waktu itu Kahar Muzakkar didesak melalui perantaraan Bukhari, ketika itu wakil ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), dan Abdullah Riau Soshby, salah seorang tampuk pimpinan Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat, untuk membentuk "Komandemen TII" untuk Sulawesi. Kartosoewirjo secara pribadi mengirimkan sepucuk surat kepada Kahar Muzakkar yang menawarkan kepadanya pimpinan Tentara Islam Indonesia di Sulawesi beberapa bulan kemudian.

Secara resmi tawaran ini diterima Kahar Muzakkar pada 20 Januari 1952. Demikianlah ia menjadi panglima Divisi IV Tentara Islam Indonesia, yang juga disebut Divisi Hasanuddin. Syamsul Bachri diangkat menjadi Gubernur Militer Sulawesi Selatan. Dalam sepucuk surat tanggal yang tersebut di atas yang ditulis Kahar Muzakkar dalam menerima pengangkatannya, dinyatakan bahwa ia sendiri merasa berterima kasih dan menjunjung tinggi kepercayaan yang diperlihatkan Kartosoewirjo kepadanya dengan keputusan mengangkatnya menjadi panglima Tentara Islam Indonesia untuk Sulawesi. Bersamaan dengan itu dinyatakannya, tak dapat sepenuhnya ia mengabdikan diri, karena berbagai keadaan yang mungkin merintanginya dalam setiap tindakan yang diambilnya sebagai panglima Tentara Islam. Selanjutnya dikemukakannya, dari lima batalyon yang dipimpinnya beberapa di antaranya meliputi kelompok bukan Muslim yang dipengaruhi ide-ide Komunis. Dilanjutkannya dengan menyatakan, dia ingin memulai suatu revolusi Islam sejak 16 Agustus 1951, dan segala sesuatunya telah direncanakan bersama komandan-komandan bawahan Saleh Sjahban dan Abdul Fatah, tetapi yang belakangan ini

ternyata tidak teguh pendiriannya sehingga rencana itu gagal. Dia dirintangi, katanya, oleh kekuatan yang lebih perkasa dengan pengaruh yang lebih besar dalam masyarakat, yaitu "kaum feodalis dan rakyat banyak". Mengenai penduduk Islam di Sulawesi Selatan menurut pendapatnya "diperlukan waktu untuk menanamkan dan memupuk semangat Islam yang sejati dalam diri mereka". Dalam sebuah surat jawaban pada 27 Februari, Kartosoewirjo mendesak Kahar Muzakkar melakukan segala upaya untuk menjadikan rakyat "bersemangat Islam" dan "bersemangat Negara Islam", serta melanjutkan melakukan apa saja yang dianjurkan syariat Islam di masa perang.

Walaupun ada pengangkatannya sebagai panglima daerah Tentara Islam Indonesia Kahar Muzakkar untuk sementara tidak mau menggunakan nama ini bagi pasukan-pasukannya. Pada bulan Maret 1952 sesungguhnya pasukannya diberinya nama Tentara Kemerdekaan Rakyat (TKR). Baru pada 7 Agustus 1953, tepat empat tahun sesudah proklamasi Negara Islam Kartosoewirjo, Kahar Muzakkar mempermaklumkan bahwa daerah Sulawesi dan daerah-daerah sekitarnya (yaitu Indonesia Timur lainnya, termasuk Irian Barat) menyatakan bagian dari Negara Islam Indonesia. Bersamaan dengan ini ia menamakan pasukannya Tentara Islam Indonesia.

Kahar Muzakkar bahkan menjadi lebih terlibat dalam Negara Islam Indonesia dengan pengangkatannya pada 1 Januari 1955, sebagai Wakil Pertama Menteri Pertahanan Negara Islam Indonesia yang meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia.

Politik Kahar Muzakkar yang lebih agresif pada bulan-bulan awal 1952 oleh sementara pengamat dinyatakan, susungguhnya, karena hubungannya dengan gerakan Darul Islam Jawa Barat. Dia sendiri mendasarkan serangannya terhadap posisi Tentara dan Pemerintah Indonesia dengan menyatakannya sebagai pembalasan untuk aksi-aksi militer Tentara yang dilakukan terhadapnya.

Yang demikian ini secara tegas dikemukakannya dalam perintah yang dikeluarkan 5 April 1952. Di dalamnya disebutnya moment operasi-nya, dengan memerintahkan pasukannya menerapkan taktik tabrak lari, yaitu, mengejutkan pasukan Republik dengan serangan mendadak dan mengundurkan diri sebelum tentara dapat memukul kembali, sebagai aksi balasan terhadap sweeps operasi (operasi pembersihan) Tentara. Taktik-taktik khas militer ini digabungkan dengan cara perang psikologis, yang sebagian besar mengungkapkan kejahatan-kejahatan Pemerintah Indonesia.

Pada konperensi pemimpin gerilya sebelum proklamasi Sulawesi sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia, disusun sebuah konstitusi Negara Republik Islam Indonesia, atau, disebut juga Republik Islam Indonesia. Konstitusi ini dikenal sebagai Piagam Makalua, menurut nama tempat konperensi.Di dalam dokumen tersebut Kahar Muzakkar memuat lebih banyak dan lebih teliti

mengenai pasal-pasal yang mengatur kehidupan sosial dan ekonomi dibandingkan dengan perjuangan Darul Islam di Jawa Barat.

Butir kedua yang timbul dari bahan-bahan ini adalah bahwa Darul Islam bertujuan menciptakan ragam masyarakat sama derajat, dan dalam beberapa hal masyarakat puritan. Ingin menghilangkan semua sisa norma sosial tradisional, membayangkan land reform yang sederhana, dan bertujuan melenyapkan perbedaan-perbedaan dalam kekayaan pribadi pada umumnya.

Kedua kecenderungan pokok yang dikemukakan ini tidaklah sangat baru. Kahar Muzakkar sudah sejak lama musuh kaum penguasa tradisional dan telah lama bertentangan dengan pemimpin-pemimpin adat sejak 1943. Sebagian para pengikutnya pun di samping itu menginginkan perubahan sosial. Sikap kaum bangsawan yang pada mulanya menyokong proklamasi kemerdekaan Indonesia dan kehadiran militer Belanda yang kuat kemudian di daerah itu, mungkin yang mencegah meletusnya di sini suatu "revolusi sosial" sejenis yang terjadi di Pekalongan dan Aceh. Ada beberapa petunjuk tentang dasar-dasar mula revolusi sosial demikian pada 1950, sesudah Belanda berangkat dan sebelum Pemerintah Republik menegakkan kekuasaanya didaerah ini. Demikianlah Jusuf Bauti melihat pada akhir 1950 ada tanda-tanda ke arah "revolusi sosial" di Makale. Kelompok-kelompok yang menginginkan dihapuskannya pranata-pranata dan praktek tradisional kuat sekali menurut dia. Keadaan yang serupa dilaporkan tentang Mandar; disini para pejuang Republik berusaha melenyapkan para penguasa tradisional dengan paksa bahkan selama revolusi.Sejumlah mereka itu benar-benar terbunuh.

Namun, kecenderungan yang relevan tak pernah memperoleh momentum, karena penguasa daerah itu, Maraddi dari Balanipa, mendukung perjuangan Republik. Dia jugalah yang menjadi kepala Pemerintahan Sipil dari distriknya yang dipilih rakyat pada 1950. Kecenderungan-kecenderungan yang sama ini terlihat dalam tujuan-tujuan Gukrindo, yang dibentuk Kahar Muzakkar, 1951. Seperti ternyata dari anggaran dasarnya, tujuannya termasuk melindungi rakyat terhadap kapitalisme monopoli, didirikannya lembaga-lembaga untuk mendidik rakyat dan poliklinik-poliklinik di desa-desa, dan penghapusan buta huruf dan pengangguran.

Kahar Muzakkar berusaha melenyapkan praktek-praktek tradisional di Sulawesi Selatan dengan menanggulangi jebakan-jebakan luarnya. Demikianlah Piagam Makalua berusaha menghapuskan penggunaan gelar atau kehormatan sengaja atau tidak sengaja. Sesuai dengan itu penggunaan gelar.gelar seperti andi, daeng, gede-bagus, teuku, dan raden dilarang. Dalam kegiatannya untuk menegakkan persamaan, dia juga melarang penggunaan gelar khas Islam seperti haji, demikian pula kata-kata umum yang digunakan untuk menghormat, seperti bapak atau ibu. Kata-kata ini

juga dicap feodal. Selanjutnya Piagam Makalua menyatakan perang terhadap semua orang turunan bangsawan atau aristokrat yang tidak mau membuang gelarnya, demikian pula terhadap kelompok-kelompok mistik yang fanatik (pasal 15-16).

Bagian lain dari bab yang sama membicarakan pemilikan harta benda pribadi oleh "Pejuang-pejuang Islam revolusioner" dan keluarganya. Demikianlah mereka dilarang memiliki atau memakai emas dan permata, mengenakan pakaian yang terbuat dari bahan mahal seperti wol atau sutera, menggunakan minyak rambut, pemerah bibir atau bedak, dan memakan makanan atau minuman yang dibeli di kota yang dikuasai musuh, seperti susu, coklat, mentega, keju, daging atau ikan kalengan, biskuit, gandum, gula tebu, dan teh (pasal 50). Bila barang-barang ini dengan sah telah dalam penguasaan pemilik yang sekarang, maka organisasi revolusioner akan membeli atau meminjamnya: bila sebaliknya barang-barang ini diperoleh melalui "penipuan moral", maka barang-barang ini akan disita (pasal 52).

Masih dalam hubungan ini, peraturan-peraturan yang lebih ketat ditetapkan dalam Catatan Bathin Pejuang Islam Revolusioner. Kahar Muzakkar di sini menganut pandangan revolusi moral dan spiritual. Di samping itu dia yakin, tidak mungkin terdapat perbaikan materiil tanpa perubahan revolusioner dalam pemikiran. Ketika mendengar keluhan-keluhan rakyat dan menyaksikan "krisis moral" dan "kecenderungan anak buahnya terhadap kesenangan dan hidup yang mewah", Kahar Muzakkar menempuh gerakan sosialisme primitif. Gerakannya mulai 1 Maret 1955, dan direncanakan berlangsung enam bulan, dan selama masa ini prajurit-prajurit Kahar Muzakkar dan keluarga mereka harus menyerahkan semua milik yang dianggap Kahar Muzakkar bersifat mewah atau berlebihan. Emas dan intan gosokan harus "dipinjamkan" kepada Pemerintah Militer, yang akan mengubah barang-barang ini menjadi uang tunai melalui pedagang-pedagang tepercaya di kota-kota. Dengan uang yang terkumpul lewat cara ini akan dibeli senjata dan keperluan yang lain-lain.

Dalam usahanya memberikan isi kepada gagasannya, Kahar Muzakkar mulai mendirikan poliklinik-poliklinik, sekolah-sekolah, rumah-rumah sakit, dan akademi ilmu sastra. Agar akademi ini memperoleh bahan-bahan yang diperlukannya, pasukannya menggedor perpustakaan di Majene, dan menurut laporan 2.500 judul. Diculiknya pula dokter-dokter untuk bekerja di poliklinik-polikliniknya.

Kahar Muzakkar juga seorang Muslim yang saleh. Walaupun ada kalanya orang-orang Kristen yang menjadi korban serangan yang dilakukan pasukannya, dan hal ini biasanya banyak dipersoalkan, tampaknya orang yang bersangkutan hanya dibunuh bila mereka melawan para

pejuang mujahidin dan menolak memberikan makanan dan informasi kepada mereka. Pada umumnya orang-orang sipil—Muslim dan Kristen sama saja—diperlakukannya dengan baik.

Demikianlah dilaporkan, "gerombolan-gerombolan di bawah pimpinan Kahar Muzakkar masih menghormati hak-hak kemanusiaan" ... dan ... "yang menjadi kenyataan ialah, para pejuang melakukan tekanan pada orang-orang Muslim agar mematuhi suruhan Tuhan dan sembahyang lima kali sehari"

Pada 1950 dan 1951 banyak orang yang karena memikirkan jasa-jasa pejuang mujahidin selama perjuangan kemerdekaan, terus juga mendesak adanya suatu penyelesaian lewat perundingan. Panglima Tentara Indonesia Timur mula-mula menganut sikap yang lunak, dan berhasil dalam paruh pertama 1952 memikat beberapa komandan bawahan Kahar Muzakkar. Tetapi sesudah Peristiwa Oktober, J. F Warouw mengambil alih pimpinan Tentara Republik, sikapnya tadi makin tidak kenal kompromi.

Sikap tidak kenal kompromi yang sama diperlihatkan Warouw dan komandonya pada Februari tahun berikutnya, ketika Presiden Soekarno mengunjungi Sulawesi Selatan dan minta Kahar Muzakkar menyerahkan diri—salah satu upaya pribadi Soekarno yang banyak untuk meyakinkan kelompok-kelompok yang memberontak agar menghentikan pertempuran. Kunjungan khusus Soekarno ini merupakan bagian dari jenis perjalanan ke daerah-daerah pusat kekacauan yang istimewa. Sebelum mengunjungi Sulawesi Selatan dia ke Kalimantan dulu. Di sini pun terjadi jihad bekas pejuang mujahidin, yang beberapa waktu kemudian turut gerakan Darul Islam. Perjalanan ini merupakan petunjuk ketegangan dan keresahan yang terdapat pada tahun-tahun mula sesudah 1949 ketika Pemerintah Republik dihadapkan pada segala macam resistensi politik Islam besar dan kecil serta kekacauan dan pertentangan dalam negeri.

Kahar Muzakkar menulis surat-suratnya tersebut di atas kepada Soekarno dan J.F. Warouw hanya dua bulan sebelum kunjungan Soekarno ke Sulawesi Selatan. Terdapat harapan akan tercapainya penyelesaian. Bahkan desas-desus beredar mengenai pertemuan Kahar Muzakkar dengan Soekarno pada kunjungan Soekarno ke Pare-pare. Soekarno sendiri tidak pula meniadakan kemungkinan penyelesaian damai. Dalam pidatonya di Pare-pare sesungguhnya secara tidak langsung diimbaunya Kahar Muzakkar agar keluar dari hutan dengan menyatakan, "Kemerdekaan Indonesia bukanlah miliknya Bung Karno atau rakyat di kota-kota saja, tetapi juga miliknya Kahar Muzakkar, miliknya Hamid Gali, miliknya yang lain-lain juga". Penekanan pada persatuan dan keinginan akan menguburkan perbedaan-perbedaan yang lampau juga jelas dalam suatu pesan tertulis yang ditinggalkan Soekarno di Pangkajene. Katanya dalam tulisan itu, "Rakyat Pangkajene, kemerdekaan Indonesia adalah buah hasil perjuangan kita bersama.

Marilah kita waspada, agar jangan ada hal yang jadi ternoda oleh tindakan-tindakan kita sendiri". Pada bulan Oktober, pada kunjungan singkat yang kedua ke Sulawesi, Soekarno mengulangi himbauannya kepada kaum pejuang mujahidin dan sekali lagi meminta dengan sangat kepada Kahar Muzakkar agar kembali ke jalan yang benar dan menyerukan kekacauan di pulau itu diakhiri. Walaupun Tentara menentang, imbauan Soekarno yang diperbaharui ini berarti kesempatan baru bagi para pejuang mujahidin untuk menyerah. Mei tahun berikutnya Soekarno menyampaikan; imbauannya yang ketiga. Kali ini diperingatkannya, tidak mungkin terus-menerus dia meminta kaum pejuang mujahidin agar meletakkan senjatanya, dan bahwa kesabarannya dapat berakhir. Dalam hal demikian akan diperintahkannya semua cabang-Angkatan Bersenjata menumpas kaum mujahidin Darul Islam. Lagi-lagi imbauan ini gagal.

Walaupun Perdana Menteri ketika itu, Wongsonegoro, melaporkan menyerahnya dua pertiga kaum pejuang mujahidin, keterangannya jauh dari kebenaran dan tidak jelas dari mana informasinya diperoleh. Pemerintah Pusat, yang percaya bahwa setidak-tidaknya terdapat ribuan orang, mengirimkan sebuah tim ke Sulawesi Selatan untuk mengatur penerimaan. Ketika tiba di sana tim ini terheran-heran sekali karena hanya beberapa orang ternyata yang menyerah, bahkan disebut angka hanya sembilan orang.

Salah satu sebab tidak berhasilnya Tentara Republik di daerah itu adalah, kesatuan-kesatuan yang sebagian terdiri dari orang Jawa Timur harus bertempur dalam medan yang tidak dikenal dan lingkungan yang tidak bersahabat. Hal ini sangat merugikan mereka, apalagi karena topografi daerah menyulitkan bagi mereka untuk memanfaatkan senjata-senjata mereka yang unggul. Ada kalanya tidak mungkin memberikan dukungan artileri kepada para prajurit yqng melakukan patroli medan. Karena kurangnya perhubungan, dukungan artileri atau udara biasanya terlambat datang atau tidak datang sama sekali.

Di samping itu pejuang mujahidin Kahar Muzakkar, yang berpegang pada prinsip moment operasi pemimpin mereka, menghindarkan pertempuran sedapat-dapatnya bila keadaan tidak menguntungkan mereka. Bertahun-tahun barulah pasukan Republik mendapatkan metode menghadapi taktik gerilya ini. Celakanya lagi bagi Tentara, koordinasi antara satuan-satuan gerilya yang tersendiri berangsur-angsur membaik, sementara Kahar Muzakkar pun berhasil meningkatkan kapasitas tempur pasukannya, Yang akhir ini dicapainya dengan membentuk empat satuan kawakan, sebagian dengan maksud untuk menumpas Tentara Kemerdekaan Rakyat Usman Balo. Satuan-satuan ini diberinya nama Momok (Moment Mobile Komando).

Keempat satuan Momok ini masing-masing mempunyai ukurannya sendiri menurut warna yang dinyatakan oleh namanya—merah, hitam, hijau, dan putih—dengan bulan bintang dicat di

atasnya. Menurut laporan inteligen Batalyon 711 sejak awal 1957 Kahar Muzakkar pribadi memimpin satuan yang putih, sedangkan Momok yang hijau, hitam, dan merah dipimpin masing-masing oleh Partawari, Sjamsul Bachri, dan Andi Masse.

Disamping itu Kahar Muzakkar sendiri menolak setiap tawaran perdamaian. Dengan penuh Istiqomah terhadap keislaman dia benar-benar sepenuhnya mengabdikan diri kepada perjuangan Darul Islam dan tidak mau tahu tentang setiap perundingan selain pengakuannya terhadap Negara Islam Indonesia. Keadaan masih baik sekali baginya, dan di samping menguasai bagian Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, dia berusaha meluaskan pengaruhnya ke daerah-daerah di 1uar Sulawesi. Demikianlah dikirimnya pasukan ke Kalimantan Selatan untuk membantu pejuang mujahidin Ibnu Hadjar, dan ke Halmahera serta Maluku untuk melakukan resistensi politik gerakan Darul Islam di bagian-bagian ini. Walaupun ada berita-berita tentang kegiatan Darul Islam di dua daerah yang terakhir, ini tidaklah banyak jumlahnya. Di Maluku Kahar Muzakkar berusaha memperoleh kerja sama dari apa yang tersisa dari RMS. Sesungguhnya ada rencana untuk memproklamasikan Maluku sebagai bagian dari wilayah Negara Islam Indonesia pada 1 Februari 1955. Tetapi sebelum rencana ini dapat terlaksana, bakal panglima Tentara Islam Maluku, Latang, ditangkap.

Demikianlah tentara Kahar Muzakkar pada tahun-tahun kemudian terdiri dari tiga pasukan yang berlainan: Momok, Tentara Islam Indonesia (sekarang terdiri hanya dari dua "divisi", yaitu Divisi 40.000 yang dipimpin Bahar Mattaliu dan Divisi Hasanuddin pimpinan Sjamsul Bachri), dan suatu Kesatuan Permesta. Pada masa pemberontakan PRRI/Permesta diadakannya reorganisasi lagi, dengan membentuk Momok baru, Momok Ansharullah (pembantu-pembantu Allah); rupanya Kahar Muzakkar ingin mengintegrasikan ke dalamnya tidak hanya Momok lama, tetapi juga bagian terbesar kedua divisi TII yang tersisa. Rencana ini menimbulkan pertentangan antara dia dan beberapa komandan bawahannya, terutama dua wakilnya yang terpenting ketika itu — Bahar Mattaliu dan Sjamsul Bachri. Bahar Mattaliu menuduhnya bermaksud menghancurkan Tentara Islam Indonesia di Sulawesi, dan kemudian menulis, mengenai Momok Ansharullah: "Baru sesudah Momok Ansharullah dibentuk mulai ketahuan, gagasan Kahar Muzakkar untuk membentuk Momok ini tidak lain daripada pendahuluan rasionalisasi TII besar-besaran atau bahkan menghapuskannya seluruhnya, karena TII telah ketularan panyakit krisis moral yang menyebabkan merosotnya sama sekali daya tempurnya". Akibat perlawanan komandan-komandan ini TII tetap dipertahankan hidup, walapun kurang mutunya. Momok berfungsi sebagai pasukan gerak cepat, dan jauh lebih baik persenjataannya ketimbang yang lain. Dalam konfrontasi dengan pasukan Republik biasanya TII yang menyerang lebih dulu, bersama-sama dengan satuan-satuan yang hanya bersenjatakan golok dan pisau. Sesudah mereka kena pukulan

pertama, satuan-satuan Momok pun mulai digerakkan, maju "besar-besaran, gelombang demi gelombang".

Dengan adanya pertentangan tersebut hampir saja terjadi konflik bersenjata antara kedua pihak, yaitu Kahar Muzakkar yang memimpin pasukannya melawan Bahar Mattaliu dan komandan-komandan divisi 40.000 yang menolak dimasukkan dalam Momok Ansharullah. Pada akhirnya Kahar Muzakkar memberikan Bahar Mattaliu pilihan menjadi Wakil Menteri Pertahanan Negara Islam Indonesia—mestinya dia sendiri—, atau pergi ke luar negeri melakukan wisata studi. Menurut Bahar Mattaliu dia memilih alternatif yang kedua karena takut dituduh menyaingi Kahar Muzakkar.

Dalam kenyataan yang sesungguhnya dia mempersiapkan diri untuk menyerah. Pada 5 September 1959 seorang utusannya mengunjungi Pimpinan Militer Sulawesi Selatan dan Tenggara. Pada sat mendengar maksud Bahar Mattaliu akan menyerah, Pimpinan Militer lalu mengumumkan amnesti. Pada 12 September, Bahar Mattaliu yang menyebut dirinya Panglima DI/TII Sulawesi Selatan dan Tenggara, secara resmi menyerahkan diri dan mengimbau kepada anggota-anggota Tentara Islam lainnya untuk berbuat demikian pula. Di samping itu surat-surat selebaran dijatuhkan pesawat-pesawat Tentara Republik. Di dalamnya Bahar Mattaliu dalam dengan memanpaatkan jabatan yang telah dikhianatinya sendiri, bahkan mengaku ngaku sebagai Panglima Divisi IV, atau Divisi Hasanuddin DI/TII memerintahkan semua perwira militer dan pejabat sipil Negara Islam di Sulawesi Selatan menyerah kepada Republik. Selanjutnya dilarangnya anggota-anggota DI/III masuk ke dalam Momok Ansharullah atau Permesta karena, katanya menegaskan, kegiatan kedua kelompok pemberontak ini bertanggung jawab akan kehancuran Sulawesi Selatan. Sebuah perintah bathil dibungkus keindahan kata yang menipu (lihat Q.S. 6:112)

Momok Ansharullah juga menjadi sasaran serangan dalam suatu pamflet yang ditulis Bahar Mattaliu dengan judul Manifesto Tahun 1379 H yang di dalamnya dikemukakan, "langkah-langkah Kahar Muzakkar semuanya bertentangan dengan Islam". Pamflet ini, walaupun pengantarnya diberi bertanggal 25 September 1950 (1959), yaitu dua minggu sesudah penulisnya menyerah, namun Bahar mattaliu berusaha menimbulkan kesan seakan akan pamflet itu ditulis ketika ia masih di hutan. Di dalamnya disebutkan sejumlah faktor yang merugikan revolusi Islam, antara lain berkembangnya Momok Ansharullah menjadi sesuatu yang sangat berbeda dari apa yang semula dimaksudkan atau yang disepakati, yaitu suatu kesatuan khusus yang bergerak bahu membahu dengan Tentara Islam dan berfungsi juga sebagai pengawal Kahar Muzakkar. Ia menyesalkan kebijaksanaan Kahar Muzakkar yang memberikan senjata yang terbaik ini selalu kepada Momok dan upayanya untuk memasukkan kesatuan-kesatuan militer yang lain ke

dalamnya. Faktor merugikan kedua, demikian yang disebutnya, ialah kegagalan untuk mengubah pasukan Permesta Gerungan menjadi pasukan pembantu mendukung TII dalam memperjuangkan negara Islam.

Pada 28 November Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekrit yang memberikan amnesti kepada semua yang berada di Sulawesi Selatan, yang telah menyerah antara 12 September dan 28 November. Bahar Mattaliu karena itu diperlakukan dengan amat bermurah hati oleh Pemerintah Republik. Penyerahannya dihubungkan dengan keberhasilan operasi-operasi militer Tentara Republik dan karena itu digunakan untuk tujuan propaganda. Sebaliknya, kaum pejuang mujahidin menuduhnya berkhianat serta kena suap dan berusahaa mengecilkan pengaruh pembelotannya. Menurut pandangan mereka, seperti dinyatakan majalah PRRI Information ".... Bahar Mattaliu dan sebagian kecil dari kesatuannya, tetapi bersama beberapa puluh ribu penduduk desa dari sekitarnya yang tidak sanggup lebih lama lagi menahan tekanan ekonomi dewasa ini, "menyeberang" ke pihak Pemerintah dan diterima dengan tangan terbuka serta dijanjikan mendapat tunjangan Rp 250.000",

Bahar Mattaliu sendiri menyombong, pada masa segera sesudah dia menyerah Kahar Muzakkar kehilangan kira-kira tujuh puluh persen pengikutnya. Pembelotannya memang merupakan kemerosotan bagi Kahar Muzakkar. Untuk kedua kalinya dalam masa resistensi politik harakah Darul Islam-nya dia kehilangan sebagian pengikutnya karena perselisihan intern. Di pihak lain, hal ini membebaskannya dari salah seorang saingannya, yang seperti telah kita lihat di atas, telah dipikirkannya akan mengambil langkah untuk menggesernya dari komandonya. Dengan tersingkirnya Bahar Mattaliu dan Sjamsul Bachri —yang telah dikirimnya ke luar negeri —dia telah melepaskan dirinya dari dua lawan utamanya yang potensial. Tetapi sebelum dia dapat berkuasa lagi dengan kukuh, dia harus pula menyelesaikan persoalannya dengan pasukan Gerungan. Pasukan yang sebagian besarnya beragama Kristen ini juga bermaksud membelot dan harus dengan paksa ditundukkan. Terjadi pertempuran antara kedua kekuatan yang bertentangan ini pada awal 1960, dengan kemenangan di pihak Kahar Muzakkar. Dia lalu menangkap Gerugan bersama 150 pengikutnya, yang kemudian beralih menganut agama Islam. Sesudah ini Gerungan menjadi salah seorang pengikut Kahar Muzakkar "yang paling tepercaya" dan akhirnya malahan menjadi Menteri Pertahanannya.

Pada tahun-tahun ini operasi-operasi militer yang kini lebih baik terorganisasi dan terkoordinasi, akhirnya membuahkan hasil. Berangsur-angsur jalan raya di bagian paling selatan dibersihkan, dan jalan yang menghubungkan Bone dengan Camba melalui Maros dapat lagi normal digunakan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Kahar Muzakkar kian lama kian terdesak ke pedalaman dan harus mundur ke dua benteng pertahanannya tahun-tahun awal perjuangannya,

yang satu tempatnya di Sulawesi Tenggara, di pegunungan sebelah utara Kolaka, yang lain di daerah Latumojang, dekat Palopo, yang sejak dulu merupakan tempat perlindungan bagi rakyat yang melarikan diri dari pengejaran karena melanggar hukum adat.

Kepastian akhir gerakan Darul Islam menyusul pada 1964 dan 1965. Dalam operasi militer berurut-turut yang mendahuluinya Kahar Muzakkar berangsur-angsur makin mengalami kemunduran. Sebagian berkat kenyataan kini mampu menggerakkan lebih banyak pasukan dalam aksi, tetapi sebagian juga berkat keadaan bahwa prajurit-prajurit yang berasal Sulawesi Selatan kian memainkan peranan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi-operasi ini, Tentara Republik kini berhasil. Dalam hal yang akhir ini termasuk panglima militer Sulawesi Selatan dan Tenggara yang tersebut di atas, Jusuf, seorang putra asli Bone, dan kawan-kawan seperjuangan lama Kahar Muzakkar, Andi Sose dan Azis Taba. Sebagai panglima militer daerah, M.Jusuf pribadi memimpin operasi-operasi terakhir terhadap Darul Islam Kahar Muzakkar, Operasi Tumpas dan Operasi Kilat, dengan Solihin sebagai kepala staf, yang sebagai panglima Divisi Siliwangi telah banyak pengalamannya dalam aksi-aksi membasmi berbagai perjuangan politik Islam dan berbagai harakah politik Islam. Walaupun pada mulanya Andi Sose juga turut aktif ambil bagian dalam gerakan terhadap Kahar Muzakkar, malahan pada suatu waktu sempat memimpin operasi-operasi pokok terhadapnya, Pimpinan Tentara tetap tidak mempercayainya sebagai bekas komandan KGSS yang masih mempunyai banyak dukungan di kalangan para prajuritnya dan di kalangan rakyat setempat, dan yang mau bertindak menurut keinginannya sendiri. Akhirnya ia dipindahkan dari kesatuannya, dan pada 1964 ia ditangkap.

Seorang bekas komandan batalyon KGSS lain yang menjadi korban kebijaksanaan Komando Tentara Sulawesi Selatan dan Tenggara yang mengetatkan pengawasannya atas komandan-komandan militernya dan —seperti Andi Sose—kehilangan kekuasaannya, ialah Andi Selle.

Penyelesaian kasusnya terjadi pada 1964. Dia masuk hutan dan guna membicarakan perbedaan-perbedaan-antara mereka secara tuntas, diundangnya Jusuf untuk mengunjunginya dekat Pinrang. Pada pertemuan ini tampaknya semua berjalan lancar dan telah tercatat persetujuan.

Tetapi kemudian, ketika Andi Selle menyertai Jusuf dalam mobilnya menuju Pare-pare untuk menunjukkan kepada rakyat "bahwa ia benar-benar bersedia bekerja sama", beberapa orang anak buahnya yang turut serta dalam mobil-mobil tersendiri memotong jalan mobil yang dikendarai Andi Selle dan Jusuf. Kemudian Jusuf dan Andi Selle keluar, dan Andi Selle memerintahkan anak buahnya menembak Jusuf. Jusuf tidak kena, tetapi dalam tembak-menembak yang terjadi Andi Selle, yang berhasil melarikan diri tertembak bahunya. Lalu ia pun dinyatakan sebagai pejuang mujahidin. Sejak itu aksi militer Republik tidak hanya ditujukan

terhadap Kahar Muzakkar, tetapi juga terhadap Andi Selle yang bergerak di jajaran Gunung Sawitto dekat Pinrang. Tetapi perjuangan Andi Selle tidak panjang usianya. Dikhianati salah seorang pengikutnya sendiri, Andi Selle diserang pasukan Republik pada akhir Agustus. Dia sendiri sempat lolos, tetapi ketika melarikan diri dia terjatuh ke dalam jurang, luka-luka dan meninggal keesokan harinya, 1 September 1964. Kini Tentara dapat memusatkan perhatiannya seluruhnya pada Kahar Muzakkar. Pertama-tama mereka mengadakan pembersihan di daerah Latumojang, dengan memaksa Kahar Muzakkar mengundurkan diri ke Sulawesi Tenggara. Di sini dia dikejar oleh pasukan Republik yang—seperti juga yang dihadapi kesatuan-kesatuan yang digerakkan terhadap Andi Selle—mendapat perintah tidak boleh kembali sebelum mereka menangkap si pemimpin pejuang mujahidin hidup atau mati. Pada 1 Februari 1965 akhirnya mereka menemukan tempat persembunyiannya di Sungai Lasolo yang pada 3 Agustus terus mulai mereka serang. Gubuk yang diduga tempat Kahar berlindung habis berlubang-lubang ditembaki peluru, sehingga terpaksa dia keluar. Dia ditembak dan tewas sebelum sempat lima meter melangkah

Dengan meninggalnya Kahar Muzakkar pejuang mujahidin Darul Islam di Sulawesi Selatan benar-benar berakhir. Menteri Pertahanannya, Gerungan, ditangkap pada bulan Juli, dan kemudian diadili serta ditembak mati. Sesudah itu Pemerintah tetap waspada terhadap sisa-sisa pejuang mujahidin sampai akhir 1960-an. Ketika kunjungan Soeharto ke Sulawesi Selatan pada 1969 kemungkinan kegiatan-kegiatan Darul Islam sekitar Kolaka dan Kendari masih merupakan pertimbangan keamanan, walaupun bersamaan dengan itu diumumkan, mereka tidak lagi merupakan ancaman yang nyata bagi keamanan umum daerah itu.

Bila di Jawa Barat kehancuran jihad diawali dengan memposisikan Ali Murtado yang jelas jelas telah turun gunung menjadi wakil pemerintah NII di Jakarta, maka di Sulawesi selatan kita melihat betapa akibat akibat yang bisa ditimbulkan oleh pengkhianat perjuangan Islam. Dalam sebuah perumpamaan dikatakan bahwa sebuah pohon kayu yang besar mengeluhkan deritanya kepada kampak yang terus menerus dihantamkan penebang kayu untuk menumbangkannya. Kampak mengatakan bahwa dirinya memjadi mampu digunakan orang untuk menumbangkannya, karena ada kawanmu juga (sesama kayu) yang mau menjadi gagang kampak ini. Alloh tidak pernah membuka jalan bagi orang orang kafir untuk mengalahkan orang orang yang beriman, kekalahan itu dibuka oleh kalangan muslimin sendiri yang telah mengkhianati keimanannya .

DARUL ISLAM KALIMANTAN SELATAN

Sebagaimana halnya peristiwa yang terjadi di Sulawesi, perlawanan terhadap Pemerintah Republik meletus di Kalimantan, dimana kejadiannya baru saja setelah pengakuan resmi kedaulatan Indonesia, akhir tahun 1949. Adapun yang menjadi daerah utama yang dipengaruhi oleh gerakan perlawanan yang bergabung dengan Darul Islam ini adalah bagian tenggara Kalimantan, kira-kira bersamaan dengan provinsi Kalimantan Selatan yang sekarang. Pusatnya ialah Kabupaten Hulusungai, khususnya daerah antara Barabai dan Kandangan. Di samping itu daerah sebelah timur ini, terdiri dari Kabupaten Kota Baru, dan ke selatannya, yaitu Kabupaten Banjar.

Sesudah dibentuk Tentara dan Territorium Kalimantan dan subdivisinya nama Divisi Lambung Mangkurat berangsur-angsur kurang dipakai, akhirnya-hilang sama sekali, dan sebagian anggotanya ditempatkan di bagian-bagian lain Indonesia. Karena itu pasukan Hassan Basry hanya disebut pasukan Subwilayah Tiga saja. Satuan-satuannya yang terdiri dari bekas pejuang ALRI Divisi IV dikirim ke Kalimantan Timur, Tenggara, dan Barat. Yang lain-lainnya dikirim guna membantu menumpas perjuangan suci Darul Islam di Jawa Barat. Selanjutnya Divisi ini banyak kehilangan perwiranya, ketika empat puluh sampai lima puluh orang dari mereka ini dikirim ke Yogyakarta untuk mengikuti kursus khusus untuk para perwira di Akademi Militer Nasional. Barangkali karena kesalahan komunikasi— bukan terutama karena maksud-maksud buruk— para perwira ini tiba di Yogyakarta hanya untuk mengetahui, Akademi Militer Nasional telah ditutup lebih dari setahun, sudah sejak didudukinya kota itu oleh pasukan Belanda sejak "aksi militer" kedua. Sejumlah dari mereka itu lalu terus berangkat ke Surabaya; memang di sini terdapat pusat pendidikan militer. Hanya satu orang dari mereka itu akhirnya menyelesaikan pelajarannya. Yang lain-lainnya kembali ke Kalimantan; tak lama kemudian mereka yang menolak masuk Tentara Republik atau tidak mau didemobilisasikan, turut bersama pejuang mujahidin masuk hutan. Tetapi kali ini mereka masuk hutan untuk menentang Tentara Republik.

Dalam golongan yang akhir ini termasuk Ibnu Hadjar, nama aslinya Haderi. Lahir di Kandangan, April 1920, kata orang wataknya keras dan suka berkelahi sejak kanak-kanak, dan benar-benar jadi kepala jagoan dalam setiap percekcokan. Haderi menggunakan nama Ibnu Hadjar ketika turut berjuang untuk kemerdekaan melawan Belanda. Kelak dia menjadi perwira dalam ALRI Divisi IV dengan pangkat letnan dua, memimpin satuan-satuan gerilya sekitar Kandangan.

Pada masa mula sejak pembelotannya dalam triwulan pertama 1950, pengikutnya hanyalah kira-kira enam puluh orang. Selama kira-kira tiga bulan pertama mereka berdiam diri dan tidak melakukan sesuatu. Serangan pertama terhadap pasukan Republik dilancarkan pada pertengahan 1950. Pada waktu itu kekuatan Ibnu Hadjar telah membesar sampai kira-kira dua ratus orang bersenjata dengan kira-kira lima puluh bedil. Walaupun cepat pertumbuhannya

karena kian banyak bekas pejuang mujahidin yang tidak puas masuk pasukannya, kemungkinan akan tercapainya persetujuan masih belum tertutup. Pada awal Oktober, dalam menyambut upaya Republik Indonesia mencari penyelesaian damai terhadap masalah ini, Ibnu Hadjar melapor kepada penguasa di Kandangan. Sesudah dibebaskan agar berusaha membujuk pengikutnya untuk menyerah pula, dia pun menghilang ke dalam hutan untuk selama-lamanya.

Ibnu Hadjar menemukan organisasi gerilya baru yang dipimpinnya Kesatuan Rakyat Indonesia yang Tertindas (KRIyT). Nama ini diambil untuk menyatakan solidaritas nasib para bekas pejuang mujahidin. Dalam hal ini Pemerintah Republik menyalahkan mereka sebagai penyebab kerusuhan yang terjadi di Kalimantan, tetapi dari pihak pejuang mujahidin menuduh Pemerintahlah yang melakukan pengkhianatan dan penindasan. Ada dua penyebab yang menambahi perasaan ini timbul yaitu: tentang cara menangani demobilisasi bekas pejuang gerilya di Kalimantan, dan perlakuan Pemerintah dan Tentara Republik terhadap rakyat pedesaan di daerah ini.

Tugas untuk menyelesaikan masalah ini diserahkan kepada orang yang paling memenuhi syarat untuk ini: Hassan Basry, bekas komandan gerilya. Pada 20 September 1950 dia diserahi pimpinan Komando Penyelesaian Hulusungai. Bulan berikutnya daerah itu diberi Bantuan Militer (Militaire Bijstand), dan satuan-satuan Tentara Republik masuk lagi untuk memulihkan keamanan. Pertama-tama Hassan Basry mencari penyelesaian damai. Karena itu ia mengeluarkan perintah kepada semua pejuang yang belum menyerah untuk berbuat demikian sebelum 10 Oktober, dan dia berusaha berhubungan dengan pemimpin-pemimpin gerilya untuk berusaha mengetahui kehendak mereka.

Seperti terlihat di atas, Ibnu Hadjar termasuk mereka yang mematuhinya. Tetapi dia menghilang, untuk tidak kembali lagi untuk selama-lamanya, ketika diberi kesempatan kembali ke hutan untuk berhubungan dengan para pengikutnya dan membujuk mereka supaya menyerah pula. Ketika pejuang di hutan tetap menolak untuk menyerah dan melanjutkan tindakan mereka, mula-mula di daerah Barabai, Birayang, Batumandi, dan Paringin kemudian juga sekitar Kelua dan Kandangan, habislah kesabaran Hassan Basry. Walaupun pasti dia menaruh simpati akan tuntutan mereka, diputuskannya melakukan tindakan militer terhadap mereka. Karena itu pada 16 Oktober Komando Penyelesaian Hulusungai mengumumkan, penyelesaian secara damai kini sudah tidak mungkin, Tentara dan Polisi memulai pembersihan daerah itu. Bersamaan dengan itu diadakan jam malam—di Hulusungai Utara dari pukul 2 pagi sampai 5 pagi, dan di Hulusungai Selatan, yang keadaannya dianggap paling berbahaya, dari pukul 8 malam sampai pukul 5 pagi.

Ibnu Hadjar membalas pembersihan yang dilancarkan Pemerintah dengan meningkatkan kegiatan-kegiatannya sendiri. Dalam waktu sepuluh hari sesudah gerakan Tentara dan Polisi

dimulai, kaum pejuang mujahidin menyerang Kota Kandangan tiga kali. Namun Bantuan Militer untuk Hulusungai, yang baru saja berlangsung sebulan, ditarik pada awal November.

Demikianlah usaha-usaha Komando Penyelesaian Hulusungai tak berhasil apa-apa. Pada 11 November komando ini dibubarkan, dan cara-caranya, terutama penggunaan paksaan oleh Hassan Basry, ditolak penguasa. Alasan mereka untuk membenarkan langkah membubarkan komando ini ialah, yang diperlukan ialah penyelesaian secara damai. Tanggung jawab untuk ketenteraman dan ketertiban kini dipercayakan kepada Komando Petak Pertahanan Utara, yang terdiri dari Hulusungai dan Barito. Tak lama sesudah itu Hassan Basry menyerahkan pimpinan pasukan Republik di Kalimantan Selatan— kini disebut Brigade F—yang diambil alih oleh Mayor H.T. Sitompul.

Keputusan untuk membubarkan Komando Penyelesaian Hulusungai dan untuk berusaha lagi membujuk pejuang meletakkan senjata mereka melalui perundingan diambil hanya beberapa hari sebelum pengumuman Pemerintah Pusat tentang tawaran amnesti, November 1950. Seperti terlihat di atas, tawaran ini tidak berlaku bagi Sulawesi Selatan dan Kalimantan; untuk daerah-daerah ini diusahakan penyelesaian tersendiri. Jangka waktu bagi kaum pejuang mujahidin untuk menyerah di Kalimantan berlaku dari 5 Desember 1950 sampai 15 Januari 1951. Pejuang yang menyerahkan diri pertama-tama diperiksa daftar kejahatannya. Bila daftar ini bersih, mereka diberi pilihan masuk Angkatan Bersenjata atau menjadi pegawai negeri, atau kembali ke kehidupan sipil.

Tetapi hasil imbauan ini mengecewakan. Walaupun ada kabar-kabar Ibnu Hadjar bersedia menyerah, hal ini tidak terjadi. Zafry Zamzam, yang ketika itu menjadi ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hulusungai, diutus untuk berunding dengan dia. Dia memang bertemu dengan Ibnu Hadjar dan dijelaskannya syarat-syarat Pemerintah yang ditawarkan kepadanya, tetapi tak berhasil dia membujuknya agar menyerah.

Hanya sebagian kecil pejuang yang menyerah minggu-minggu sebelumnya. Di Kandangan hanya delapan, tak seorang pun membawa senjata. Di luar Kandangan, hasilnya sedikit lebih baik, dengan 1.063 pejuang menyerah. Tetapi jumlah senjata api yang diserahkan masih mengecewakan sedikitnya, yaitu hanya kira-kira tiga puluh. Mayoritas mereka yang menyerah (kira-kira 400) tergolong pada kelompok yang menamakan dirinya Perkumpulan Banteng Borneo.

Dengan dimulainya aksi-aksi militer yang baru, Kandangan dinyatakan sebagai daerah militer, dan pos-pos tentara didirikan di seluruh daerah. Pada 26 Februari terjadi pertempuran pertama

secara besar besaran dengan suatu kelompok kira-kira seratus pejuang yang berlangsung kira-kira tiga jam.

Dalam suasana tegang di Kalimantan Selatan, kehadiran Hassan Basry, yang masih tinggi dalam pandangan kaum pejuang , dianggap terlalu berbahaya. Karena itu Kementerian Pertahanan memberikannya beasiswa untuk belajar ke luar negeri. Maka Hassan Basry pun meninggalkan Kalimantan, pertama-tama menuju Jakarta dan kemudian menuju Mesir, Februari 1951. Keberangkatannya didorong pihak penguasa, karena mereka khawatir akan pengaruhnya di kalangan prajurit yang kecewa dan pejuang gerilya yang didemobilisasikan dan menganggapnya sebagai bahaya keamanan. Walaupun Hassan Basry harus tinggal di Mesir lebih dari empat tahun, perjalanannya tidak berhasil baik. Dia tak diterima sebagai mahasiswa di Mesir, dan harus melanjutkan pelajarannya pada tingkatan yang lebih rendah, mengikuti kursus dalam agama dan ilmu kemiliteran.

Keberangkatan Hassan Basry—yang tidak akan berada di Banjarmasin sampai Desember 1955 — memperkuat kecurigaan, kalangan penguasa militer berusaha menggerogoti pengaruh bekas ALRI Divisi IV dengan mencerai-beraikan anggotanya. Selanjutnya hal ini mengukuhkan Ibnu Hadjar dan pejuang mujahidin-pejuang mujahidinnya dalam keyakinan, mereka yang telah mengorbankan diri untuk perjuangan Republik Indonesia di Kalimantan selama revolusi kini ditempatkan di kedudukan bawahan. Semua ini menimbulkan yang disebut "gerakan anti-Jawa". Kalangan penguasa menyangkal, gerakan ini terjadi spontan, dan menyalahkan unsur-unsur tertentu yang berambisi hendak berkuasalah yang menimbulkan perasaan anti-Jawa. Rakyat daerah ini sendiri tidak menaruh dendam kepada orang Jawa, demikian Inspektur Polisi Banjar, Mahmud, menegaskan.

Dalam iklim ini Ibnu Hadjar dengan Kesatuan Rakyat Indonesia yang Tertindasnya jadi menonjol. Dibandingkan dengan perjuangan harakah Darul Islam di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh, gerakan ini hanyalah gerakan kecil. Dengan jumlah pengikut mula hanya kurang dari seratus orang. Pada umumnya mereka hanya terdiri dari lima sampai lima puluh pejuang. Di samping itu, persenjataan mereka sangat kurang dan terus-menerus mereka dikejar pasukan Republik dan Polisi. Pada waktu Ibnu Hadjar masuk hutan, para pejuang mujahidin ditaksir memiliki empat bren dan enam sten gun dan satu-dua kodi bedil. Taksiran akhir 1953 mengatakan masing-masing lima puluh dan 148 senjata api seluruhnya selama masa mula, tetapi ini masih angka rendah juga. Sisa anak buah Ibnu Hadjar lainnya menggunakan senjata seperti pisau, pedang, tombak, dan sebagainya.

Karena kelompok-kelompok KRIyT kurang sekali persenjataannya dan begitu kecil jumlah anggotanya, gerakan Tentara Republik mula-mula berhasil. Sebagian besar senjata pejuang mujahidin yang sedikit itu dirampas, sehingga kelihatannya seolah-olah KRIyT tidak dapat bertahan. Taktik Tentara Republik bertujuan mengisolasikan musuh di pegunungan dan membiarkan mereka kelaparan sampai menyerah. Karena itu, mereka menutup semua jalan menuju ke daerah-daerah tempat pejuang mengundurkan diri, dengan hanya memperbolehkan orang yang ingin melaluinya membawa makanan cukup untuk satu hari saja. Akibatnya, banya.k pejuang mujahidin yang menyerah karena kekurangan makanan. Yang lain-lainnya ditangkap rakyat setempat, yang dijanjikan akan diberi hadiah untuk setiap pejuang yang mereka serahkan.

Ini merupakan sumber pendapatan tambahan yang baik dan juga mengakibatkan orang berusaha menyimpan sendiri rahasia tempat persembunyian para pejuang . Ada perkelahian, karena seorang tertangkap dan masing-masing ingin mengakui dialah yang menangkapnya dan dengan demikian menerima hadiah. Dengan alasan yang bisa dimengerti, permintaan agar dibagikan senjata kepada penduduk dalam perlawanannya terhadap KRIyT ditolak. Hanya di Rantau dibagikan beberapa senjata. Ketika pada akhir 1952 rakyat Riam Kanan mengajukan permohonan memperoleh senjata, hal ini ditolak dengan keterangan, bila dalam masa revolusi mungkin mengalahkan Belanda dengan senjata tidak lebih dari bambu runcing, mengapa pejuang mujahidin, yang (dianggap oleh Pemerintah RI, pen.) adalah penjahat, tidak bisa dikalahkan dengan senjata demikian.

Pada akhir 1951 Pemerintah punya alasan untuk percaya, para gerilyawan KRIyT terisolasi di Hulusungai. Kalimantan Timur dan Barat — daerah yang akhir ini dengan pengecualian Ketapang — dianggap aman dan bebas dari pejuang dan penjahat. Maka, tanggung jawab mempertahankan hukum dan ketertiban di sini diserahkan kepada Polisi dan Pemerintahan Sipil oleh Tentara Republik. Di Hulusungai, di pihak lain, keadaan masih terasa kritis. Staat van Oorlog en Beleg atau Keadaan Darurat Perang dinyatakan berlaku untuk seluruh daerah ini, 1 November 1951. Kabupaten-kabupaten yang lain di Kalimantan Selatan, terutama Kotabaru, dianggap dalam keadaan pertengahan. Ada pula pejuang beroperasi di sini, tetapi lebih kecil ketimbang di Hulusungai. Selama bertahun-tahun Kotabaru mendapat perhatian khusus penguasa karena di sini mendarat bala bantuan untuk Ibnu Hadjar yang dikirim Kahar Muzakkar.

Namun, KRIyT selamat dari gerakan pengamanan, dan sesudah SOB dicabut Juli 1952 berangsur-angsur mereka pulih dari pukulan-pukulan pertama. Ini sebagian karena-pihak penguasa salah perhitungan. Pada waktu SOB berakhir mereka memutuskan — mengingat kegiatan gerilya yang berkelanjutan—Tentara Republik harus terus memberikan bantuan militer. Tetapi enam bulan kemudian mereka mencabut putusan ini. Bencana yang diakibatkan KRIyT dalam dua setengah

tahun bergeraknya sampai ketika itu banyak sekali, walaupun tampaknya tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan bencana di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan.

Pemerintahan sipil—yang sesudah bantuan militer berakhir seluruhnya bertanggung jawab memelihara hukum dan ketertiban—memulai tugasnya dengan gairah. Gubernur Kalimantan, Dr. Murdjani, segera memulai serangkaian pembicaraan dengan anggota-anggota yang terpenting dari kalangan pamong praja dan Angkatan Kepolisian, alimulama, wakil partai-partai politik, dan pemimpin-pemimpin masyarakat lainnya di Kalimantan Selatan. Selama pembicaraan ini diyakinkannya para pemimpin agama agar mengeluarkan fatwa kepada para pengikutnya untuk melawan KRIyT, dan diumumkannya, ia tengah menyusun suatu rencana perang melawan kaum pejuang mujahidin. Menyinggung kurangnya komunikasi dan pengertian antara Tentara Republik, Polisi, dan Pemerintahan Sipil dalam operasi-operasi yang lalu, Murdjani menyatakan, dia pribadi akan memimpin semua operasi pada masa depan. Akhirnya ia menguraikan rencananya sesudah berhari-hari pembicaraan, 24 Februari 1953.

Ibnu Hadjar beroperasi antara Kandangan dan Barabai. Markas besarnya dibuatnya di sebuah gunung tidak jauh dari Kandangan, di Desa Datar Laga. Biasanya juga disebut, karena bentuknya dan mungkin pula karena di situ tempat markas besar KRIyT, Gunung Hantu. Ini merupakan tempat persembunyian yang ideal, hanya dapat dimasuki dari satu jurusan: lagi pula, dari sini musuh yang mendekat harus menempuh tiga kilometer rumput panjang, jadi mudah terlihat. Dari Jurusan lain mana pun tempat ini hanya dapat didekati melalui daerah pegunungan yang di dalamnya terdapat banyak kubu KRIyT. Dari markas besar ini Ibnu Hadjar menjalani seluruh Hulusungai untuk bermusyawarah dengan para komandannya atau memimpin sendiri serangan, dan sering dia menyerbu ke Kabupaten Kotabaru.

Lebih jauh ke utara, sekitar Tanjung, terdapat suatu kelompok yang dipimpin Kartolo yang bergerak sejak awal 1950. Kartolo, nama sebenarnya ialah Asmuni, pangkalannya di Tanjung tetapi juga menggerayangi ke dalam Hulusungai dan jangkauannya sampai ke selatan seperti Alabio. Dia tertangkap sesudah dilakukan operasi bersama oleh satuan-satuan Tentara dan rakyat setempat, Januari 1953. Di daerah Sungai Bulungan pemimpin KRIyT yang utama ialah Utuh Tjilik (Utuh Cilik), sedangkan ke sebelah selatannya, di daerah Batumandi, beroperasi Kurdi, alias Subrata, dan Dahlan.

Komandan-komandan gerilya lainnya dari tahun-tahun mula ini adalah Daeng Matelo, yang bergerak di daerah Sungai Amandit, Rasjaidi dan Mardjajana di Rantau, Tamberani di Sei Pinang, Chairul Muis (Khairul Muis, sesudah meninggal 1954 digantikan A.K. Munsi), dan Gusti Surjah (Gusti Suryah), yang seperti halnya dengan banyak lainnya juga "tertembak ketika berusaha

melarikan diri" Agustus 1954 di Banjar, dan Mawardi dan wakilnya Raden Mochtar Djaja (Mokhtar Jaya) antara Martapura dan Pleihari. Tamberani tertembak pada akhir 1953 dan digantikan wakilnya, Ipul, yang selanjutnya tak lama kemudian ditembak mati salah seorang pembantu Ibnu Hadjar Djumberi (Jumberi), karena dinyatakan menteror rakyat. Mawardi terbunuh pada 1954.

Peningkatan kegiatan-kegiatan pejuang mujahidin pada 1953 mungkin dimaksudkan KRIyT sebagai petunjuk bahwa mereka masih ada. Kaum pejuang mujahidin dalam hal ini didorong bukan saja karena diakhirinya bantuan militer, yang dapat ditafsirkan sebagai tanda, dalam pandangan penguasa masalah keamanan di Kalimantan Selatan telah beres, tetapi mungkin juga ada faktor lain. Yang pertama adalah perselisihan intern, yang kedua kunjungan sial Soekarno ke Kalimantan.

Akibat imbauan-imbauan baru pemerintah RI kepada kaum pejuang untuk menyerah, dan karena kedudukan satuan-satuan KRIyT yang sulit akibat aksi-aksi militer Republik, pihak gerilya jadi terpecah-belah. Satu kelompok—sesudah gagal bertempur selama lebih dari dua tahun —yang menghendaki menyerah, termasuk salah seorang komandan gerilya tertinggi, Haji Machfudz Siddik (Makhfudz Siddik). Pada awal perjuangan dia adalah salah seorang pembantu Ibnu Hadjar yang paling tepercaya dan dianggap hampir sama berkuasanya sebagai Ibnu Hadjar sendiri.

Desember 1950, ketika berlangsung perundingan Zafry Zamzam dengan Ibnu Hadjar, Hadji Machfudz Siddik-lah dan bukan Ibnu Hadjar yang mengeluarkan perintah kepada para prajurit KRIyT untuk tidak menyerah. Tetapi, dua tahun kemudian, ketika kehilangan pengaruh dalam KRIyT, dia menjadi penganjur utama untuk menyerah. Akibatnya, dia ditembak salah seorang anak buah Ibnu Hadjar atas perintah yang akhir ini ketika sedang mandi, 16 Februari 1953. Kemudian, dia digantikan Dardiansjah (Dardiansyah), adik laki-laki Ibnu Hadjar, yang dalam kedudukannya sebagai wakil komandan KRIyT kadang-kadang memimpin pasukan KRIyT di Hulusungai bila Ibnu Hadjar pergi ke Kabupaten Kotabaru.

Dengan menyerang pos-pos Polisi yang terpencil dan terlibat dalam pertempuran kecil dengan satuan-satuan Polisi, KRIyT, dan ini yang lebih penting, memperoleh beberapa senjata lagi. Dengan bertambah kekuatannya, ia pun lebih berani. Para gerilyawan KRIyT berkeliaran keluar dari pegunungan dan mulai menyerang kota-kota yang terpencil yang hanya memiliki ada detasemen Polisi kecil-kecil atau tidak ada sama sekali. Demikianlah, pada September pos-pos polisi yang kekurangan orang di Pengaron dan Karang Intan diserang kira-kira seratus pejuang .

Kota-kota yang lebih besar tidak aman pula. Pada September, Rantau dan Pengaron diserang pada hari yang sama; pada November Negara dapat giliran, sementara Kotabaru juga diduduki kaum pejuang mujahidin sebentar. Pada 12 Desember 1953 malam7 Kandangan diserang dari

empat jurusan. Dari suara teriakan komando disimpulkan, serangan ini kiranya dipimpin sendiri oleh Ibnu Hadjar.

Karena kegiatan KRIyT yang meningkat, diminta lagi bantuan Tentara, sedangkan Brigade Mobil diperkuat dengan suatu kompi dari Jawa Timur. Bahkan dipikirkan untuk membentuk korps sukarelawan. Tetapi gagasan ini pada umumnya diterima dengan sikap hati-hati karena mereka yang menentang khawatir, korps sukarelawan demikian dapat menjadi alat bagi bekas pejuang untuk memaksakan tuntutan mereka agar diakui sebagai prajurit Tentara Republik.

Salah satu gejala menonjol yang menjadi ciri ALRI Divisi IV selama perjuangan kemerdekaan ialah teguhnya mereka berpegang pada ajaran-ajaran Islam. Pemerintah Militer, selain bertujuan melakukan perubahan sosial dan ekonomi yang radikal di daerah-daeTah pedesaan, melakukan banyak usaha untuk memajukan Islam dan pelaksanaan syariahnya. Dengan bangga mereka mengemukakan, selama pemerintahan mereka Islam berkembang. Pendidikan agama dan pengajian Quran mengalami kebangkitan kembali, kata mereka, sementara terdapat pula kemajuan yang nyata dalam kalangan rakyat yang melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya dan meningkatnya jumlah mereka yang mengunjungi masjid-masjid dan pusat-pusat pendidikan agama. Selanjutnya dikatakan, akibat semuanya ini pencurian, judi perzinaan, dan pelacuran lenyap.

Juga KRIyT, yang di dalamnya terdapat banyak pejuang dari ALRI Divisi IV, mengakui bertindak demi kepentingan Islam. Di samping Departemen Penerangan yang umum, segera mereka bentuk suatu badan khusus guna penyebaran penerangan agama. Para pejuang KRIyT dinyatakan sangat bersungguh-sungguh dalam melakukan sembahyang sehari-hari, sedangkan Ibnu Hadjar menurut cerita marah sekali bila para prajuritnya lalai dalam hal ini. Bilamana prajurit KRIyT mengunjungi sebuah desa, mereka desak rakyat untuk mematuhi syariat Islam, sembahyang lima waktu sehari, dan sering mengunjungi masjid. Mereka yang lalai dalam hal ini diancam, dan kadang-kadang didenda. Demikianlah ada laporan pada 1953 tentang orang-orang desa yang mengabaikan sembahyang seharihari didenda Rp. 900,—sampai Rp. 1.000. Pada kesempatan lain pejuang mujahidin KRIyT khusus menyerang orang-orang yang tidak membayar zakat atau membayar tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam suatu seruan untuk syariat Islam, diperingatkan bahwa mereka yang didapati bersalah mencuri akan dipotong tangannya, penjudi akan dipotong sebuah telinganya, dan pezina akan dilempari batu sampai mati.

Pemerintah Daerah Kalimantan, dalam menyambut seruan gerilyawan pejuang mujahidin terhadap agama, melakukan usaha untuk memperoleh dukungan para ulama dan pemimpin agama Islam lainnya dalam gerakannya melawan KRIyT.

Melihat kenyataan ini maka TNI meminta kepada semua pemimpin agama yang bersimpati dengan Republik diminta secara umum mengutuk KRIyT dan kegiatan-kegiatannya, dan untuk mengeluarkan fatwa yang menyatakan demikian. Pemerintah agak berhasil dalam hal ini. Pada 16 November 1952 sekelompok pemimpin Islam Hulusungai mengeluarkan sebuah pernyataan di Amuntai.. Menentang KRIyT. dengan tegas demikian bukan tanpa bahaya. Pada Maret 1953 dua dari para ulama yang mendukung pernyataan ini, Haji Fadhli dari Kandangan dan Haji Kusan dari Rantau, dibunuh.

Mengingat dasar Islam organisasi pejuang mujahidin setempat ini, tidaklah mengherankan sejak mulanya terdapat desas-desus dan dugaan tentang infiltrasi Darul Islam di Kalimantan, khususnya daerah-daerah selatan, tempat beroperasi KRIyT dan tempat selama perjuangan untuk kemerdekaan ALRI Divisi IV sangat berpengaruh. Desas-desus ini berlangsung terus sesudah orang-orang tertentu dengan latar belakang Darul Islam ditangkap dan setelah pamflet-pamflet dan surat-surat Darul Islam mulai beredar, walaupun secara kecil-kecilan.

Pada Juni 1952 umpamanya, seorang yang bernama Anang Sulaiman ditangkap karena dituduh melakukan hubungan dengan pemimpin-pemimpin Negara Islam Indonesia di Jawa Barat. Pada akhir tahun itu seorang buron dari Angkatan Umat Islam Jawa Tengah, yang lari ke Kalimantan sesudah penumpasan organisasi itu, tertangkap di Kalimantan Barat. Pelariannya ke Kalimantan diduga diatur penduduk Kalimantan yang terkemuka, yang bersimpati dengan gerakan Darul Islam di Jawa. Tetapi semua ini masih kecil saja artinya, dan berita-berita yang sedikit tentang kegiatan Darul Islam yang mencapai daerah ini berasal dari luar Kalimantan Selatan dan Hulusungai.

Februari 1953 ada berita radio PJC (Siaran Dunia Belanda) bahwa Kalimantan akan segera menjadi Jawa kedua. Mengingat keadaan yang sesungguhnya, berita ini—dan khususnya keterangan bahwa pedalaman Kalimantan merupakan sarang simpatisan Darul Islam—sangat dibesar-besarkan. Demikian juga halnya tentang tuntutan untuk menumpas Darul Islam di Kalimantan Selatan, yang sering terdengar pada pertengahan 1953. Rakyat di Kalimantan benar-benar diresahkan protes-protes di Jawa Barat yang dipimpin kalangan nasionalis dan komunis untuk turut berteriak menuntut keputusan yang melarang Darul Islam sebagai suatu gerakan yang berbahaya untuk negara.

Untuk mewujudkan usaha ini di Banjarmasin dibentuk suatu panitia "untuk keamanan Kalimantan". Panitia ini menyelenggarakan rapat-rapat yang menonjolkan slogan-slogan seperti "DI-TII dan perjuangan resistensi politik Islam lain adalah musuh Negara dan Rakyat", "Kaum pejuang pemberontak bertanggung jawab akan bertambahnya pengangguran", "Ganyang kaum gerombolan, tukang catut, dan koruptor". Seperti dengan tepat diucapkan Zafry Zamzam, aneh sekali para demonstran tidak menuntut penumpasan KRIyT, malahan lebih menuntut menumpas Darul Islam yang pada waktu itu hampir-hampir belum terdapat di Kalimantan. Namun, ada petunjuk bahwa pikiran untuk masuk ke dalam Negara Islam Indonesia mulai digunakan di Kalimantan, khususnya sesudah Kahar Muzakkar melakukannya di Sulawesi. Segera sesudah pernyataan Kahar Muzakkar bahwa Sulawesi merupakan bagian dari wilayah Negara Islam Indonesia, ditemukan di Hulusungai pamflet-pamflet yang menyatakan daerah-daerah yang dikuasai KRIyT telah masuk ke dalam wilayah Darul Islam.

Juga terdapat beberapa tanda kegiatan Darul Islam di pantai timur Kalimantan. Di sini Imbran Kamarullah yang menamakan dirinya Kepala Staf Divisi Panglima Batur KRIyT, telah membentuk cabang Darul Islam. Semua perintahnya ditandatanganinya atas nama KRIyT dan Tentara Islam Indonesia, dengan menggunakan cap bujur telur yang memperlihatkan bulan sabit dan bintang. Tetapi cabang Darul Islam ini sama sekali tak sempat mempunyai arti. Imbran Abdullah segera ditangkap (Agustus 1953), dan dalam rangka persidangan perkaranya menjadi jelas bahwa kekuatannya tahap penyusunan. Pada saat penangkapannya yang telah dilakukannya hanyalah memilih anggota-anggota stafnya.

Sementara itu, di Jawa Kartosoewirjo masih menganggap Ibnu Hadjar dan KRIyT sebagai sekutu yang potensial. Karena itu diperintahkannya pembantu pertamanya, Sanusi Partawidjaja Februari 1954 meningkatkan usaha-usaha untuk memasukkan Kalimantan ke dalam wilayah de facto Negara Islam dan membentuk Komando Teritorial VI Tentara Islam Indonesia di sini. Ibnu Hadjar sendiri barulah membulatkan pikirannya untuk masuk Negara Islam pada akhir 1954.

Ini sesudah Kartosoewirjo mengajaknya untuk berperan serta dalam mempertahankan Negara Islam ini, masuk dalam struktur pemerintahan NII bersama sama dengan tokoh lain dari gerakan-gerakan pejuang mujahidin di Jawa Barat, Aceh, Sulawesi, dan Kalimantan. Relatif kecilnya cakupan resistensi politik Islam KRIyT di Kalimantan dibandingkan dengan perlawanan di Jawa Barat, Aceh, dan Sulawesi tecermin dalam komposisi Kabinet ini. Tidak diberikan portfolio penuh untuk Ibnu Hadjar, tetapi hanyalah pengangkatan sebagai menteri negara. Ia diangkat pula menjadi Panglima TII untuk Kalimantan.

Kemudian Ibnu Hadjar lalu mereorganisasi pasukannya. Mulailah ia menamakan dirinya "ulul amri". Demikian pula diberinya nama markas besarnya, dengan dijuluki nama hebat-hebat seperti Istana Islam Merdeka atau Istana Agama Islam Agung. Pasukannya berangsur-angsur diberi nama Angkatan Perang Tentara Islam (APTI), sementara kadang-kadang disebut juga Pasukan Islam, kedua nama dengan atau tanpa dibubuhi KRIyT. Kepala Pasukan Islam (Kapai) adalah Paduka yang Mulia Ibnu Hadjar. Untuk menggarisbawahi perpecahannya dengan Republik sekuler, selanjutnya Ibnu Hadjar menggubah versi lain dari lagu kebangsaan. Untuk ini Indonesia Raya diubah dan disesuaikan dengan cita-cita Islam perjuangan bersenjata KRIyT.

Tetapi selain dari nama-nama baru ini, tak ada lagi yang berubah. Tak dilancarkan serangan baru. Bahkan pemilihan umum 1955 tidak digunakan KRIyT untuk meningkatkan kegiatannya. KRIyT tidak menyerang desa-desa, dan tidak menghalangi petugas-petugas atau para pemilih. Mereka tidak merintangi pemilihan umum walaupun pernah menyatakannya akan melakukan yang demikian pada awal 1955, dan turut bertarung sendiri dengan mendesak rakyat agar memberikan suara untuk partai Islam.

Sesudah pasukan Ibnu Hadjar masuk gerakan Darul Islam KRIyT, demikian masih disebut namanya, atau APTI, sebagai namanya yang baru, terus juga beroperasi dalam kelompok yang kecil-kecil. Serangan dilakukan oleh bagian gerilyawan yang sangat kecil, yang terdiri dari paling banyak dua puluh orang. Namun, pada 1955, terdapat struktur pimpinan yang lebih tegas pembatasannya. Maka, diangkat komandan-komandan daerah yang merangkap sebagai kepala Pemerintahan Daerah pejuang mujahidin dan masing-masing mempunyai daerah operasi khusus.

Di Hulusungai Utara, misalnya, Bahranu adalah kepala Komando Pertahanan Paringin dan Batumandi. Di Amandit Utara, selain dari Balhum yang disebut terdahulu, Aman dan Samsi, Dardiansyah, adik laki-laki Ibnu Hadjar, yang menjadi komandan KRIyT paling terkemuka. Di Amandit Selatan Djohansjah (Johansyah), nama sebenarnya ialah Djahri bin Bako (Jahri bin Bako), komandan, sampai ia tertangkap pada 1954. Seorang komandan KRIyT yang sangat terkenal masa itu adalah Djarman (Jarman) di Pleihari. Riam Kanan merupakan basis operasi Guru Budjanab (Guru Bujanab) dan Djenggot (Jenggot).

Jauh lebih terkenal dahsyat ketimbang pemimpin-pemimpin yang tersebut di atas adalah dua orang komandan KRIyT Djumberi dan Raden Mochtar Djaja. Djumberi, yang menjadi Komandan Batalyon Garuda Putih, beroperasi sekitar Riam Kiwa dan gugur dalam aksi Agustus 1955. Raden Mochtar Djaja, yang memulai kariernya dalam KRIyT sebagai pembantu Mawardi, beroperasi sekitar Martapura, pada waktunya menjadi komandan KRIyT untuk seluruh Kabupaten Banjar, dengan memimpin pasukan KRIyT Mobil. Dalam kedudukannya yang akhir ini ia adalah salah

seorang pemimpin gerilya yang dicari dan salah satu sasaran pokok operasi keamanan Pemerintah. Sekali pada 1952 dia tertangkap, tetapi berhasil lolos lagi. Tahun berikutnya hampir dia tertangkap untuk kedua kalinya, sementara turut dalam suatu pertandingan bola di Desa Sungai Ulin. Ketika pasukan Tentara mendatangi lapangan bola, tepat pada waktunya benar dia berhasil lolos.

Kalangan sipil sementara itu terus juga mendesak diadakannya amnesti umum. Pada akhir 1953 PNI cabang Amandit mendesak Presiden Soekarno agar di depan umum meminta Ibnu Hadjar menghentikan perlawanannya. Semua mereka yang menyerah akan diberi kesempatan memasuki Angkatan Bersenjata atau suatu badan Pemerintah lain. Cabang Amandit selanjutnya mendesak digantinya Murdjani sebagai gubernur oleh Burhanuddin, bekas perunding ALRI Divisi IV.

Lama Soekarno baru berbuat demikian. Baru pada kunjungan lain ke Banjarmasin pada akhir 1955 dia mengimbau Ibnu Hadjar dalam salah satu pidatonya untuk meletakkan senjatanya. Tetapi tak ada jawaban yang positif terhadap ini dari pihak pejuang mujahidin, dan kegiatan-kegiatan KRIyT tidak juga berkurang. Sebaliknya, tahun berikutnya bantuan militer diperlukan lagi untuk Kalimantan Selatan. Untuk menambah peluang berhasilnya operasi, tentara Hassan Basry dipanggil lagi dalam dinas aktif untuk memimpin operasi-operasi ini. Diharapkan agar dia memanfaatkan pengaruhnya yang masih terdapat di kalangan gerilyawan untuk menumpas perjuangan Islam untuk selama-lamanya. Hassan Basry sendiri pun optimistis tentang keberhasilan tugasnya; dia diberi waktu setahun seluruhnya. Operasi sesungguhnya berlangsung dari Mei sampai akhir tahun itu.

Langkah Hassan Basry yang pertama ialah melancarkan "gerakan dari mulut ke mulut" untuk meyakinkan kaum pejuang mujahidin bahwa mereka akan diperlakukan dengan baik sesuai dengan hukum yang berlaku bila mereka menyerah. Di samping itu ia mengimbau mereka agar menyerah dengan menggunakan selebaran dan siaran radio. Untuk menambah tekan moril, diatur kunjungan ke Kalimantan Selatan yang dilakukan "dua orang putra daerah" lainnya—Firmansjah, bekas Kepala Staf Pesindo Kalimantan, dan Idham Chalid (Idham Khalid), seorang politikus Nahdatul Ulama terkenal. Idham Chalid berusaha memperoleh dukungan pemimpin-pemimpin agama untuk usaha-usaha Pemerintah mengakhiri perjuangan Islam. Pemimpin-pemimpin ini menyambut dengan menyampaikan permintaan kepada para pejuang mujahidin agar menyerahkan diri.

Sambutan luar biasa besarnya. Dalam waktu satu bulan kira-kira empat ratus orang melapor kepada penguasa, di antara mereka terdapat beberapa pemimpin gerilya yang terkenal seperti

Raden Mochtar Djaja. Pada Agustus menyusul pula Dardiansjah, adik laki-laki Ibnu Hadjar, dan Tjinaby (Cinaby), Kepala Staf dan Jaksa Agung pejuang mujahidin. Keduanya dikirim ke Jakarta untuk mengadakan pembicaraan dengan Kepala Staf Angkatan Darat, Mayor Jenderal Nasution, tentang cara untuk menyelesaikan pertikaian ini secara tuntas. Beberapa hari sebelumnya, Dardiansjah, ketika masih di Banjarmasin, bicara melalui siaran radio memuji maksud Pemerintah Pusat dalam mengakhiri perjuangan politik Negara Islam ini.

Sejenak tampaknya perjuangan Negara Islam di Kalimantan seolah-olah berakhir. Ibnu Hadjar kehilangan rekan-rekannya yang paling tepercaya, seperti Dardiansjah dan Tjinaby, dan terdapat kabar-kabar yang meyakinkan, didorong oleh kenyataan-kenyataan ini bahwa ia pun sungguh-sungguh memikirkan untuk menyerah. Pada September Hassan Basry bahkan berangkat ke Pegatan, di pantai Kotabaru, untuk berunding pribadi dengan dia mengenai penyerahan.

Pada akhirnya ternyata harapan tentang menyerahnya Ibnu Hadjar lenyap. Dan ia terus memberikan perlawanan selama tujuh tahun lagi. Bahkan dia bisa menarik manfaat dari gejolak umum dalam sentimen kedaerahan di luar Jawa pada akhir 1950-an. Walaupun di Kalimantan hal ini tidak sampai memuncak menjadi perjuangan terang-terangan seperti di Sumatera dan Sulawesi, orang-orang yang tidak puas di sini lalu membentuk dewan daerah, Dewan Lambung Mangkurat diketuai oleh panglima daerah. Akibatnya, kalangan militer di daerah ini lebih banyak mengarahkan waktu serta daya-upayanya kepada perselisihan mereka dengan Pemerintah Pusat dan Pimpinan Tentara ketimbang kepada penumpasan gerakan Darul Islam. Dengan demikian Ibnu Hadjar memperoleh kesempatan meningkatkan kegiatannya sekali lagi.

Gerakan perlawanan baru berakhir Juli 1963. Pada akhir bulan ini Ibnu Hadjar dan anak buahnya dengan resmi menyerah kepada pejabat dalam suatu upacara singkat di Desa Ambun di Hulusungai Selatan. Pada awal September dia ditangkap. Pada Maret 1965 dia diadili sebuah pengadilan militer khusus dan dijatuhi hukuman mati. Pada ketika persidangan perkaranya, Ibnu Hadjar mengenakan pakaian seragam tentara dengan tanda pangkat letnan dua.

DARUL ISLAM ACEH

Daerah yang terakhir dalam pembelaannya terhadap Islam dari penjajahan Republik Indonesia adalah daerah Aceh. Disana para pejuang mujahidin masuk dalam Negara Islam Indonesia Kartosoewirjo. Permaklumannya dalam perjuangan membela Negara Islam Indonesia ini pada bulan September 1953. Ketika salah seorang pemimpin Islam yang sangat berpengaruh di daerah itu, Daud Beureueh menyatakan bahwa Aceh dan daerah-daerahnya yang berbatasan dengannya menjadi bagian Negara Islam Indonesia.

Perjuangan politik Negara Islam yang diilhami oleh Darul Islam di Aceh ini berakhir secara damai melalui musyawarah sesudah Pemerintah Pusat pada tahun 1959, akhirnya memenuhi juga beberapa tuntutan dari rakyat Aceh dengan memberikan status Provinsi Istimewa untuk daerah Aceh, dengan otonomi di bidang agama, hukum adat, dan pendidikan. Di samping itu, Daud Beureueh merupakan salah seorang pejuang mujahidin terakhir yang kembali dari hutan pada tahun 1962. Dia tidak tewas dalam pertempuran atau dihukum mati, tetapi diberi ampun. Nama-nama yang paling sering muncul sehubungan dengan persiapan-persiapan perjuangan jihad suci dalam masa ini adalah Daud Beureueh, Hasan Aly, Husin Jusuf, dan Amir Husin al Mudjahid. Dalam awal perjuangannya, kaum pejuang mujahidin menguasai hampir seluruh Aceh. Hanya kota-kota besar yang utama saja yang belum dikuasainya, seperti Banda Aceh (atau Kutaradja, demikian namanya ketika itu), Sigli dan Langsa di utara, dan Meulaboh di pantai selatan, daerah tersebut masih tetap dalam tangan Republik. Setelah dalam beberapa minggu di awal perjuangan tersebut, kaum pejuang mujahidin Darul Islam dapat dihalau keluar pusat-pusat perkotaan lagi. Oleh karena itu, untuk melanjutkan perjuangan, mereka mengalihkan basis perjuangannya ke daerah-daerah pedesaan. Dan terbukti kemudian, bahwa setelah pengalihan tersebut para kaum pejuang mujahidin dapat bertahan selama bertahun-tahun, terutama di bagian utara mereka sangat kuat sekali, begitu juga di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, dan Kabupaten Aceh Utara.

Sebelum bulan September 1953, bahwa sudah terdapat hubungan antara Daud Beureueh dan gerakan Darul Islam. Tetapi kurang dapat dipastikan, siapa yang mengambil prakarsa: para pejuang mujahidin di Aceh atau Kartosoewirjo. Menurut sebuah laporan rahasia, Daud Beureueh dan Amir Husin al Mudjahid dikatakan telah pergi ke Jawa untuk berunding dengan Kartosoewirjo di Bandung sesudah suatu pertemuan rahasia yang diadakan Daud Beureueh pada tanggal 13 Maret 1953, yang dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Amir Husin al Mudjahid, Husin Jusuf, Sulaiman Daud, Hasan Aly (Kepala Kejaksaan di Aceh, ketika itu sedang cuti resmi), Said Abubakar, dan A.R. Hanafiah (pegawai Kantor Agama Aceh Timur). Dalam pertemuan ini telah mengutus dua orang untuk pergi ke Jawa untuk melakukan hubungan dengan pemimpin-pemimpin Darul Islam di sini. Menurut laporan yang sama, sekembalinya dari Jawa, Amir Husin al Mudjahid tinggal beberapa hari di Medan untuk menemui wakil organisasi-organisasi lainnya di sana, seperti Masyumi dan cabang pemudanya, GPII.

Oleh karena itu dapat dipastikan antara Daud Beureueh dan Kartosoewirjo saling mengadakan kontak hubungan melalui para utusan. Pada bulan Mei 1953, Kartosoewirjo pernah mengirim utusannya yang bernama Abdul Fattah Wirananggapati dengan nama samarannya Mustafa Rasjid sebagai K.U.K.T.(Kuasa Usaha Komandemen Tertinggi) Negara Islam Indonesia ke Aceh

untuk membicarakan penggabungan wilayah Aceh ke dalam Negara Islam Indonesia sekaligus untuk mengangkat Daud Beureueh sebagai Panglima Wilayah V TII (Tentara Islam Indonesia) Chik Di Tiro. Namun nasib kurang baik menimpa utusan itu, ketika kembali ke Jawa ia tertangkap oleh Tentara Republik. Pada saat kejadian itu pun juga tertangkap seorang utusan Daud Beureueh. Dengan adanya peristiwa tersebut, pihak Pemerintah Pusat tidak cepat mengambil reaksi, namun berusaha merahasiakan penangkapan terhadap dua utusan itu, dan juga tidak langsung mengadakan penangkapan terhadap Daud Beureueh, hanya saja pihak Pemerintah menambah jumlah satuan Brigade Mobil di Aceh.

Dalam pada itu sebelumnya, pada bulan April 1953 ada dua peristiwa penting yang sedang berlangsung di Aceh, yaitu telah berlangsungnya dua kongres. Pertama diadakannya kongres alim ulama di Medan dari 11 sampai 15 April. Kedua, kongres untuk menilai hasil-hasil kongres Medan diadakan PUSA di Langsa dari 15 sampai 29 April. Kedua pertemuan ini diketuai Daud Beureueh, yang dengan demikian mendapat kesempatan yang baik sekali untuk menyampaikan kepada para peserta rencananya dan membicarakan bersama mereka kemungkinan mengadakan resistensi politik dan jihad suci.

Kedua kongres ini merupakan titik awal dari suatu gerakan luas yang meliputi seluruh Aceh, yang digunakan pemimpin-pemimpin Islam untuk mendesak rakyat memberikan suara untuk partai Islam dalam pemilihan umum yang akan datang (yang ketika itu tampaknya sudah dekat), dan untuk Islam sebagai dasar konstitusional Negara Indonesia. Di samping itu mereka mengemukakan sejumlah persoalan yang sejak lama telah menimbulkan kemarahan sebagian besar rakyat Aceh, yaitu sikap Pemerintah Indonesia yang dinyatakan anti-atau bukan-Islam, kelalaian Pemerintah terhadap Aceh, dan penggantian orang Aceh dengan orang dari luar daerah dalam pemerintahan daerah dan tentara. Dalam rapat-rapat umum dan khotbah-khotbah mereka selanjutnya menuduh orang Jawa dan orang Batak mengandung maksud untuk mengambil alih Aceh. Menurut mereka, pasukan Angkatan Darat yang dikirim ke Aceh terdiri dari bekas serdadu-serdadu KNIL dan orang-orang kafir, dan mereka menyerang Soekarno karena ingin memajukan agama Hindu. Sebuah monografi tentang perjuangan jihad suci Aceh menyatakan, para alim ulama "dengan tegas bersumpah ... bahwa sekembalinya mereka ke daerah mereka, mereka akan mengusahakan dengan sekuat tenaga untuk meyakinkan rakyat memperjuangkan Negara Islam dalam pemilihan umum yang akan datang untuk DPR dan Konstituante, dan bahwa bila kemenangan tidak tercapai dengan jalan ini, mereka tidak akan ragu-ragu menggunakan cara-cara yang melanggar hukum Pemerintah RI guna mencapai tujuan ini".

Kedua kongres ini tidak hanya memberikan titik awal untuk gerakan seluruh Aceh guna menjelaskan pandangan pemimpin-pemimpin Islam tentang Negara Islam dan menghasut rakyat memberontak terhadap Pemerintah Pusat. Juga memberikan dorongan guna memperbaharui usaha meluaskan pengaruh PUSA dalam masyarakat. Struktur organisasi PUSA diperkukuh dengan dibentuknya organisasi-organisasi massa untuk mengerahkan para pendukung. Demikianlah cabang Pemuda PUSA yang selama bertahun-tahun tidak aktif dihidupkan kembali, didirikan Persatuan Bekas Pejuang Mujahidin Islam yang tersebut di atas, dan PUSA memperkuat penguasaannya atas gerakan Pandu Aceh, Pandu Islam, dengan mengangkat A.G. Mutiara sebagai pemimpinnya. Ketiga organisasi ini memainkan peranan penting dalam persiapan-persiapan militer bagi perjuangan Negara Islam yang akan datang. Di samping memberikan Darul Islam Aceh bagian terbesar pasukannya, mereka barsyak memudahkan perencanaan untuk aksi-aksi yang terkoordinasi pada saat resistensi politik meletus dengan menyerang kota-kota utama Aceh sekaligus. Para bekas gerilyawan yang dipersatukan dalam Persatuan Bekas Pejuang Islam Aceh merupakan pasukan tempur pokok, disokong para pemuda dari Pemuda PUSA dan Pandu Islam sebagai pembantunya.

Pandu Islam ini tidak hanya sebagai gerakan Pandu biasa. Di samping latihan militer-militeran, kepada para anggota yang tergabung di dalamnya diberikan latihan dasar militer sesungguhnya. "Pandu Islam hari demi hari bertambah sehat dan pengikutnya makin bertambah banyak. Kemudian ternyata, para anggotanya menerima latihan militer dari prajurit-prajurit berpengalaman pilihan khusus dan diajarkan metode menyerang dan menyerbu. Latihan ini mereka terima tidak hanya siang tetapi juga malam hari". Menurut taksiran Pemerintah, sebagian dari Pandu yang jumlahnya adalah 4.000 orang, juga bekas para gerilyawan .

Setelah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, maka tibalah saatnya menentukan hari dimulainya jihad suci. Dari titik pandangan ideologis hari yang paling cocok mestinya adalah 7 Agustus, hari Kartosoewirjo memproklamasikan Negara Islam Indonesia. Sebenarnya ada tanda-tanda, para pemimpin Darul Islam menganggap ini sebagai hari yang layak. Sebagaimana yang dituturkan dalam majalah Singapura Asia Newsletter, "Pada mulanya kaum pejuang mujahidin memutuskan akan mulai jihad suci pada 7 Agustus, tetapi rencana mereka berubah sesudah Pemerintah Pusat mengetahui informasi ini. Yang kemudian Wakil Presiden Mohammad Hatta mendesak pemimpin-pemimpin pejuang mujahidin untuk membatalkan rencananya". Tanggal kemungkinan yang lain disebut adalah 17 Agustus, hari ulang tahun pernyataan kemerdekaan Indonesia. Menurut laporan rahasia tersebut, tanggal 17 Agustus telah diputuskan pada suatu rapat 1 Agustus. Pada rapat ini dua belas orang, termasuk Amir Husin al Mudjahid tetapi Daud Beureueh tidak berkumpul di rumah Zainy Bakri, bupati di Langsa. Juga telah disetujui pada

pertemuan ini, yaitu untuk mengundurkan awal jihad suci sampai selambat-lambatnya pertengahan September, bila persiapan-persiapan masih belum selesai pada tanggal 17 Agustus. Upaya Pemerintah Pusat untuk meredakan situasi di Aceh, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta melakukan kunjungan ke daerah ini. Kunjungan yang pertama berlangsung Maret 1953.

Tetapi dengan adanya kunjungannya ini tidak banyak mengurangi ketegangan daerah Aceh, yang menjadi sebab adalah karena rakyat Aceh terlalu banyak dikuasai pidatonya Sukarno di Amuntai, yang juga telah menimbulkan amarah umat Muslim yang saleh di Aceh. Kedatang Soekarno ke Aceh disambut dengan tulisan-tulisan slogan seperti "Kami cinta presiden, tetapi kami lebih mencintai agama". Yang nampak berhasil dalam kunjungan itu adalah usaha Hatta. Selama kunjungannya — yang berlangsung pada bulan Juli — dia dapat berunding dengan Daud Beureueh. Setelah mengadakan perundingan, Hatta kembali ke Jakarta dengan kerangka pikiran yang optimistis, bahwa ia merasa yakin suatu persoalan telah dipecahkan dan bahwa keadaan masih dapat dikendalikan. Namun belakangan timbul kecaman dari berbagai kalangan. Termasuk Partai Komunis Indonesia (PKI) — partai politik yang paling mengecam jihad suci ini — mereka menyalahkan Hatta karena secara pribadi telah mencampuri urusan Pemerintah dengan memerintahkan Perdana Menteri Wilopo agar tidak mengambil tindakan pencegahan di Aceh. Menurut para juru bicara PKI, tidak berbeda sikap Hatta sebelum dan sesudah kunjungannya ke Aceh. Sebelum berangkat dia merasa yakin akan sanggup menghadapi masalah-masalah di Aceh. Sekembalinya, ia memberi tahu Wilopo bahwa tak akan terjadi apa-apa dan ia merasa pasti, keamanan dan ketenteraman dapat dipelihara.

Melihat sikap Pemerintah yang lunak terhadap perjuangan para mujahid. Kalangan penguasa Pemerintah Daerah di Sumatera Utara dan Aceh mengikuti garis Pemerintah Pusat di Jakarta dan berusaha sungguh-sungguh menghilangkan kesan bahwa suatu jihad sedang bergolak. Berulang kali mereka menyangkal bahwa keadaan gawat atau bahwa terjadi suatu gerakan Negara Islam. Dalam beberapa hal pernyataan ini memang dibuat karena benar-benar tidak tahu, dalam hal-hal yang lain disebabkan keinginan menenangkan pikiran rakyat.

Pada tanggal 14 September 1952, diadakan rapat resmi — tepatnya seminggu sebelum jihad suci Negara Islam pecah — untuk membicarakan situasi keamanan di Aceh. Dalam rapat ini dihadiri bupati Aceh Timur, Zainy Bakri, bupati Pidie, T.A. Hasan, dan bupati Aceh Utara, Usman Azis, dalam rapat tersebut mereka menguraikan secara singkat kepada gubernur Sumatera Utara, Abdul Hakim, tentang keadaan dalam daerahnya masing-masing dan memberi jaminan kepadanya bahwa segalanya beres dan tidak terdapat ancaman langsung bagi keamanan. Rapat ini juga dihadiri Sulaiman Daud, pejabat residen-koordinator Aceh, Dalam rapat itu terjadi silang pendapat tentang situasi yang sedang terjadi di Aceh. Menurut berita yang disampaikan oleh

Nya' Umar, koordinator Polisi untuk Aceh, bahwa keadaan di Aceh demikian gawat hingga ia memerintahkan penempatan pengawal di gedung-gedung pemerintah yang penting. Tentu saja Abdul Hakim juga menerima informasi yang bertentangan dengan pandangan yang dikemukakan para bupati. Dalam informasi yang berbeda ini, Posisi Abdul Hakim lebih percaya kepada jenis informasi yang belakangan ini. Pada akhir September, ketika bebas untuk mengungkapkan keadaan yang sebenarnya, ia mengakui, suasana memang "hangat" pada Agustus, lalu keadaan menenang kembali, namun mencapai klimaks baru pada pertengahan September, ketika jihad suci mempertahankan Negara Islam meletus.

Pada bula Agustus situasi di Aceh semakin tidak menentu. Oleh karenanya, rakyat mulai mempersiapkan diri untuk meninggalkan daerah Aceh menuju Medan dan Sumatera Timur dalam jumlah yang besar. Kebanyakan mereka ini adalah keluarga uleebalang dan anggota atau simpatisan partai-partai sekuler, terutama PKI, para pimpinan yang tergabung dalam PUSA juga merasa tidak aman. Para pimpinan PUSA merasa khawatir akan tindakan yang akan dilakukan oleh Angkatan Darat dalam usahanya menghentikan setiap aksi perlawanan di daerah,— seperti yang mereka saksikan pada Agustus 1951—ketika tersebar kabar, bahwa Pemerintah telah menyusun daftar nama orang Aceh terkemuka yang dinyatakan akan ditangkap. Menurut sementara orang, daftar ini memuat tiga ratus, menurut yang lain-lain, seratus sembilan puluh nama.

Beberapa penulis menyatakan, daftar inilah yang menjadi penyebab langsung resistensi politik umat Islam. Boland menulis, "Menurut informasi yang diperoleh di Aceh, para kaum politisi sayap kiri di Jakarta telah menyebarkan isu bahwa Aceh benar-benar mengatur suatu perlawanan politik berdasarkan Islam. Akibatnya "Djakarta" mencantumkan dalam daftar 190 orang Aceh terkemuka yang harus ditangkap. Hal ini diketahui di Aceh pada Juli 1953, belakangan ternyata bahwa daftar nama ini barangkali sengaja dibocorkan dengan tujuan tertentu. Karena orang-orang Aceh terkemuka ini merasa bahwa mereka mungkin akan ditangkap, mereka memutuskan lari ke gunung pada 19 September 1953. Kejadian ini merupakan pemutusan resmi dengan "Djakarta", dan awal dari apa yang disebut pemberontakan Darul Islam di Aceh."

Dalam persoalan yang sama juga dikemukan oleh Amelz, dia memberikan pandangannya dalam suatu perdebatan parlemen ketika meletus jihad suci menegakkan Negara Islam. Amlez menyatakan, bahwa kebocoran daftar itu pada tanggal lebih belakangan, yaitu sesudah terjadi tindakan jihad suci menegakkan Negara Islam pertama pada 20 dan 21 September. Tetapi dia menyetujui pendapat Boland bahwa hadirnya nama mereka di daftar menyebabkan sejumlah pemimpin mengikuti jihad suci menegakkan Negara Islam. Mereka yang bermaksud tidak akan

bertindak sebelum Pemerintah lebih dulu bertindak, kini sesudah diberitahu tentang daftar itu, menurut Amelz, mereka memutuskan untuk membelot.

Dalam dua minggu pertama melaksanakan jihad suci menegakkan Negara Islam berbagai kota kecil dan kota besar diserang, termasuk Banda Aceh. Rencana penyerang kota ini belakangan baru diketahui Polisi sehari sebelum malam jihad suci menegakkan Negara Islam dimulai, yaitu 19 September. Di pantai timur serangan dipusatkan pada kota-kota yang tempatnya pada jalan kereta api dari Banda Aceh, lewat Seulimeum di Aceh Besar, Sigli dan Meureudu di Pidie, Bireuen dan Lhokseumawe di Aceh Utara, dan Idi, Peureulak dan Langsa di Aceh Timur ke Medan. Di Peureulak penyerangan pertama dilakukan terhadap Pos Polisi kecil yang anggotanya kira-kira sepuluh petugas. Karena tidak ada perlawanan yang diperlihatkan oleh pasukan polisi setempat, maka baik pos polisi maupun kota Peureulak diduduki pasukan pejuang mujahidin yang dipimpin Ghazali Idris tanpa suatu perlawanan pun dalam waktu dua jam. Pada tempat-tempat yang strategis diadakan penjagaan dan bendera Darul Islam pun dikibarkan dari gedung-gedung penting di kota itu. Sesudah itu dalam beberapa hari berikutnya kota-kota yang berdekatan, Idi dan Bayeuen, pun direbut lagi-lagi tanpa perlawanan sedikit pun. Pendudukan semua kota ini banyak dipermudah karena adanya dukungan yang diperolehnya kaum pejuang mujahidin dari sejumlah pegawai negeri setempat. Di Peureulak yang membantu kaum pejuang mujahidin adalah asisten wedana A.R. Hasan, dan di Idi inspektur polisi Aminuddin Ali.

Sesudah merebut Idi, Bayeuen, dan Peureulak dan menghentikan semua lalu lintas kereta api, pasukan pejuang mujahidin bergabung menuju Langsa, ibukota Aceh Timur. Untuk tujuan ini semua bus dan mobil pribadi disita untuk mengangkut pasukan. Sampai pada saat itu kaum pejuang mujahidin hanya sedikit mendapat perlawanan dan tanpa mengalami kesulitan sama sekali. Sejenak tampaknya seolah-olah mungkin pula Langsa mereka rebut tanpa melepaskan sekali tembakan pun. Karena penduduk kota ini, dengan tidak adanya bupati Aceh Timur (yang bagaimana pun memihak kaum pejuang mujahidin) dan kepala Polisi, yang kedua-duanya masih berada di Medan, sangat ingin menyerah. Karena itu dikirimkanlah utusan ke Peureulak dan Bayeuen untuk menyampaikan kepada kaum pejuang mujahidin maksud keinginan mereka dan membicarakan syarat-syarat penyerahan dengan mereka. Mereka ini kembali dengan pesan, pasukan Darul Islam bagaimana pun akan menuju Langsa untuk mengumpulkan senjata Tentara dan Polisi yang ditempatkan di sana. Rencana menyerah ini dihalangi kepala Polisi ketika kembali dari Medan yang sebaliknya menyodorkan ultimatum kepada kaum pejuang mujahidin untuk menyerahkan senjata mereka. Pasukan Darul Islam mendekati Langsa dari barat dan utara serta melancarkan serangan bersama terhadap asrama Polisi Militer dan Brigade Mobil pada 21 September. Tentara Republik yang telah mendapat bala bantuan baru dari Medan dapat

memukul serangan ini. Kekalahan kaum pejuang mujahidin di Langsa merupakan titik balik dalam pertempuran di Aceh Timur. Pada 23 September pasukan Republik merebut kembali Bayeuen, dan dalam dua hari berikutnya Idi dan Peureulak.

Dalam pertempuran di Aceh Utara ibukota daerah Lhokseumawe, pagi hari 21 September pasukan pejuang mujahid mengadakan aksinya, namun menghadapi perlawanan yang berarti dari pasukan Republik. Oleh karena itu serangan pasukan mujahidin mengalami kegagalan. Dengan kegagalannya itu pasukan pejuang mujahidin mengundurkan diri sesudah bertempur kira-kira empat jam. Mereka perbaharui lagi siasat dalam penggempurannya, tetapi karena kuatnya pertahanan yang diperlihatkan oleh pasukan Republik lagi-lagi tanpa hasil. Walaupun pada satu saat keadaan menjadi begitu gawat hingga dipertimbangkan untuk mengungsikan penduduk. Sebuah kota lain di Aceh Utara, Bireuen, mereka duduki sebentar. Demikian pula Seulimeum di Aceh Besar, yang direbut pada 21 September. Ketika kaum pejuang mujahidin menyerangnya, garnisun Polisi Republik tidak memberikan perlawanan.

Di daerah Pidie Aceh Barat, kaum pejuang mujahidin gagal merebut Sigli. Mereka lebih berhasil di Tangse, Geumpang, dan Meureudu, tetapi kota yang terakhir ini sempat banyak menyulitkan mereka. Di samping itu, baru direbut sesudah serangan dilakukan "pasukan kawakan Darul Islam Aceh" dan sesudah pembela-pembelanya kehabisan peluru. Pasukan yang menduduki Meureudu terdiri dari satuan prajurit Angkatan Darat yang berasal dari Aceh, dipimpin Hasan Saleh, yang ketika pejuang mujahidinan meletus melakukan desersi dan bergerak dari Sidikalang di Tapanuli, tempat mereka bertugas kembali ke Aceh Utara. Hasan Saleh sendiri sudah diberi cuti panjang sebelum meletus jihad suci menegakkan Negara Islam.

Di Aceh Tengah pasukan Darul Islam menduduki Takengon. Seperti juga di Meureudu, mereka baru dapat memasuki kota sesudah pasukan Republik kehabisan amunisi. Kota lain yang jatuh adalah Tapak Tuan di Aceh Selatan.

Tidak banyak yang dicapai kaum pejuang mujahidin dengan menduduki kota-kota ini. Mungkin pemimpin-pemimpin mereka mengharapkan, mereka cukup kuat menghalau Tentara Republik paling tidak dari sebagian besar wilayah Aceh dan memukul setiap serangan balasan, tetapi ternyata ini merupakan taksiran yang terlalu tinggi tentang pasukan Darul Islam. Mereka tidak mampu menguasai terlalu lama kota-kota kecil dan kota-kota besar. Ternyata mudah saja pasukan Pemerintah Republik dalam serangan balasan menghalau pasukan Darul Islam ke luar kota-kota ini. Beberapa kota dikuasai kembali dalam beberapa hari. Yang lain-lain lebih lama tahan. Tetapi dengan jatuhnya Takengon, Tangse dan Geumpang pada akhir November, kaum pejuang mujahidin telah terusir dari daerah-daerah perkotaan. Mereka mengundurkan diri ke

daerah pedalaman. Di sini, terutama di kabupaten-kabupaten sepanjang pantai utara, mereka melakukan perlawanan gigih.

Para pejabat pemerintah sendiri menyatakan sangat gembira akan hasil yang cepat dari aksi-aksi militer pertama. Demikianlah S.M. Amin, yang segera sesudah itu diangkat menjadi gubernur Sumatera Utara, mengemukakan, dari segi pandangan militer jihad suci menegakkan Negara Islam telah berakhir dan apa yang masih perlu harus dilancarkan Pemerintah adalah gerakan pengamanan. Namun, tentulah jelas waktu itu juga— mengingat keadaan di Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan — pengamanan bukanlah masalah yang mudah. Pasti ini disadari panglima Divisi Sumatera Utara Bukit Barisan Kolonel Maludin Simbolon, yang sejak semula mengemukakan pendapat, keadaan sangat gawat dan terus demikian, sehingga para pejuang mujahidin tidak mungkin ditaklukkan dengan cara militer saja.

Tambahan lagi pecahnya jihad suci menegakkan Negara Islam membuat pemerintahan daerah ini jadi sangat sulit bagi Pemerintah Republik dan sangat mengganggu berfungsinya pemerintah dan ekonomi daerah. Mulanya departemen yang paling banyak pengikut PUSA-nyalah yang paling banyak terkena karena pegawai-pegawainya membelot. Amin dalam suatu penilaian sementara akan keadaan memperkirakan sekitar tujuh puluh persen pegawai Pemerintah Daerah di Jawatan Agama, Urusan Sosial, dan Penerangan telah meninggalkan pekerjaannya dan mengikuti kaum pejuang mujahidin. Jawatan Pendidikan menghadapi masalah yang berbeda walaupun sama gawatnya, yaitu sebagian besar para guru melarikan diri ke Medan atau mengungsi. Pada bulan-bulan pertama jihad suci menegakkan Negara Islam mereka menolak kembali ke Aceh dengan mengatakan, mereka lebih suka dipecat. Terdapat soal-soal yang sama dalam pemerintahan setempat. Seperti telah kita lihat, sejumlah bupati memihak kaum pejuang mujahidin. Keadaan pada tingkatan yang lebih rendah lebih buruk lagi. Banyak dari pejabat tingkat yang terendah, para keuchik dan imam mukim, menyeberang ke pihak pejuang mujahidin.

Yang paling parah terkena adalah Pidie, yang bupatinya, semua wedana, dan semua camat kecuali seorang, dan 99 dari 188 imam mukim berubah pengabdian kesetiaannya. Seperti juga di daerah-daerah lain yang terkena jihad suci menegakkan Negara Islam Darul Islam, pejabat-pejabat paling rendahlah yang merasakan dampak jihad suci menegakkan Negara Islam paling langsung. Melaksanakan pekerjaan di daerah-daerah yang pengaruh Darul Islam-nya kuat berbahaya sekali. Jadi tidaklah mengherankan, Pemerintah Republik—dalam usahanya untuk membangun pemerintahan lokalnya lagi—menghadapi kesulitan mendapatkan orang yang bersedia mewakilinya di tingkat desa. Walaupun berhasil mengisi lowongan-lowongan dan mengganti para pejabat yang kesetiaannya diragukan dalam eselon-eselon pemerintahan yang lebih tinggi, Pemerintah tidak bisa mendapatkan cukup calon yang setia untuk jabatan-jabatan

yang lebih rendah ini. Pada April 1954 Pemerintah Republik berhasil membangun pemerintahan lagi dari tingkat camat ke atas, yaitu di daerah-daerah perkotaan yang relatif aman. Namun suatu komisi parlemen yang mengunjungi Aceh pada awal 1954 terpaksa melaporkan bahwa para bupati, wedana, dan camat yang baru diangkat di Aceh Besar dan Pidie masih tidak bisa melakukan perjalanan tugas di daerah-daerahnya dan hanyalah Saman di kota-kota dan tempat-tempat tugas pasukan Angkatan Darat. Beberapa camat harus diiringi pengawalan bersenjata ke posnya pada pagi hari dan kembali ke kota dengan cara yang sama pada malam hari. Bersamaan dengan itu dua puluh persen jabatan imam mukim dan keuchik masih lowong. Tambahan lagi, di sejumlah desa, imam mukim pemerintah Republik Indonesia dan keuchik juga diam-diam bekerja untuk kaum mujahidin.

Pada mulanya jihad suci menegakkan Negara Islam tampaknya tidak mengakibatkan terjadinya kekurangan pangan secara mendadak atau penurunan dalam produktivitas perkebunan pertanian. Ada laporan-laporan menggelisahkan yang beredar tentang pengaruh jihad suci menegakkan Negara Islam yang negatif di ekonomi perkebunan, seperti larinya buruh dalam jumlah besar dan bahwa pekerjaan pertanian dan pengurusan perkebunan sangat menderita. Personil asing dianjurkan mengungsi dari perkebunan, sedangkan dalam beberapa hal di samping itu manajemen Indonesia lari mengikuti pejuang mujahidin. Ada laporan tentang Said Abubakar, yang mengontrak sebuah perkebunan di Langsa, lenyap dengan membawa serta Rp 300.000,— uang gaji. Selanjutnya di ladang-ladang minyak Aceh Timur, seluruh manajemen, termasuk Direktur Umum Amir Husin al Mudjahid menghilang. Tetapi sumber-sumber resmi pemerintah menyatakan semua ini tidak mempengaruhi produktivitas. Ladang-ladang minyak masih berfungsi normal (artinya sedikit sekali) sedangkan hasil perkebunan malahan naik dengan 15 persen, demikian penuturan Amin.

Masalah pelik yang dihadapi oleh Pemerintah waktu itu bukan hanya aksi-aksi militer saja, disamping itu adalah masalah pengurusan dan akomodasi tawanan. Sampai pada akhir Maret 1954, sudah ada 4.666 orang yang ditangkap. Namun kapasitas dan ruangan penjara-penjara yang ada tidak cukup untuk menampung jumlah yang besar ini. Lalu Pemerintah mengambil kebijakan terhadap para tawanan yaitu diangkutnya para tawanan ke tempat-tempat di luar Aceh. Dengan cara yang terakhir ini Pemerintah Republik juga mengharapkan ingin mempercepat pemeriksaan para tawanan, karena di Aceh tidak cukup jumlah personil yang memenuhi syarat untuk masalah seperti ini. Sebenarnya langkah ini pun tidak mencapai hasil yang diharapkan. Penjara dan kamp-kamp di Aceh terus juga dipenuhi hingga melimpah, dan proses pemeriksaan para tawanan sangat lambat. Ketika pemeriksaan benar-benar berlangsung, sebagian besar tawanan ternyata tidak bersalah dan ditangkap hanyalah berdasarkan kecurigaan

yang sangat kecil. Pada 1956 kecuali 400 orang semua tawanan dibebaskan lagi. Ketika jihad suci menegakkan Negara Islam meletus, Daud Beureueh mengumumkan proklamasi: atas nama masyarakat Islam Aceh, ia menyatakan Aceh dan daerah-daerah sekitarnya menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia. Untuk membenarkan proklamasi ini ia mengemukakan alasan, bahwa pemimpin-pemimpin Republik di Jakarta telah menyimpang dari jalan yang benar.

Republik Indonesia tidak berkembang menjadi suatu negara yang berdasarkan Islam. Demikianlah, unsur pokok yang dikemukakannya mengenai pidato Soekarno "yang malang" di Amuntai. Dengan mengemukakan keterangan Soekarno bahwa dia memilih negara nasional karena takut kalau-kalau jika terbentuk negara Islam beberapa daerah akan memisahkan diri, Daud Beureueh menyatakan memelopori dalam memisahkan diri dari suatu negara yang hanya didasarkan atas nasionalisme. Kata-kata Daud Beureueh membuktikan, tentang perbedaan antara negara agama atau Islam dan negara nasional tidak lagi merupakan masalah peristilahan, tetapi telah berkembang menjadi suatu penentangan sesungguhnya. Daud Beureueh menyatakan, rakyat Aceh memahami arti sebenarnya kata-kata "agama" dan "nasionalisme" dan setiap orang yang percaya bahwa orang yang beragama tidak mencintai negerinya barangkali tidak memahami Islam. Selanjutnya ia menegaskan, sebenarnya Republik Indonesia tidak menjamin kebebasan beragama dalam arti kata sesungguhnya. Dia tidak menerima kenyataan bahwa Islam tidak membedakan bidang keagamaan dengan bidang sekuler atau pandangan Muslim bahwa prinsip-prinsip Islam harus diterapkan dalam semua lapangan kehidupan. Jika memang terdapat kebebasan beragama yang sesungguhnya, maka syariat Islam haruslah berlaku di Aceh, mengingat bahwa seratus persen rakyat di Aceh adalah Muslim. Dalam keadaan seperti itu sama sekali tidak mungkin Jaksa Agung melarang khotbah yang mengandung politik, katanya, karena politik dan agama tak dapat dibedakan.

Hal lain yang diserang oleh Daud Beureueh terhadap Pemerintah Pusat adalah bahwa Pemerintah ini tidak pernah mengabulkan suatu permintaan Aceh apa pun dan bahwa ia sekarang menganggap Aceh— yang selama revolusi merupakan daerah "modal" Republik— sebagai daerah yang tidak patuh. Tidak pula diberikan suatu konsesi apa pun terhadap permohonan otonomi Aceh yang ketika itu masih dibayangkan dalam kerangka Republik Indonesia. Daud Beureueh mempertanyakan mengapa perdebatan tentang ini harus menunggu terbentuknya Konstituante, dan apakah ini barangkali karena Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Pusat hanya ingin menyisihkan persoalan ini. Padahal, bahwa lembaga yang akhir ini mampu bertindak cepat telah diperlihatkan pada waktu pengubahan Republik Indonesia Serikat menjadi Republik Indonesia kesatuan. Daud Beureueh menggarisbawahi kenyataan, rakyat Aceh dengan sabar telah menanti terbentuknya Konstituante selama bertahun-tahun, tetapi

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyadari ini dan bahkan memutuskan menunda pemilihan umum. Ia menduga, barangkali pemerintah lebih mengutamakan kepentingannya sendiri daripada kepentingan rakyat. Selanjutnya dipertanyakannya, apakah pemerintah mungkin lebih memberikan bantuan dan dorongan kepada kelompok kecil mereka yang mempercayai Ketuhanan yang Maha Esa suatu keyakinan lain, atau kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan sama sekali, dengan secara menyolok bertentangan dengan cita-cita dan hasrat mayoritas.

Rakyat Aceh tidak ingin memisahkan diri dari saudara-saudaranya, Daud Beureueh menegaskan, tetapi tidak pula mereka ingin diperlakukan sebagai anak tiri. Dalam hubungan ini ia mengemukakan kurangnya fasilitas pendidikan yang baik dan kesempatan kerja bagi anak-anak Aceh, sedangkan tidak adanya sistem perhubungan yang memadai menghalangi rakyat dalam kegiatan ekonominya. Ia menambahkan, proklamasi Negara Islam Aceh tidaklah berarti bahwa telah terbentuk suatu negara dalam negara. Pada masa lalu Republik Indonesia dianggap sebagai jembatan emas menuju pelaksanaan cita-cita negara yang diidamkan sejak semula. Tetapi kini jembatan ini tidak lagi dianggap sebagai sarana komunikasi, melainkan lebih merupakan rintangan. Kesetiaan kepada Republik, yang didasarkan pada nasionalisme, telah lenyap sedangkan selanjutnya rakyat pun tidak merasa dipersatukan oleh suatu sistem hukum yang sama.

Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan bahwa proklamasi Negara Islam akan menimbulkan kekacauan dan bertentangan dengan hukum, Daud Beureueh menegaskan, sebaliknya kekacauan hukum yang berlakulah yang telah menimbulkan jihad suci menegakkan Negara Islam. Ia menasihati para pemimpin Republik agar tidak menggunakan kekerasan, tetapi menanggulangi inti pokok persoalan dan memperlabaiki. dasar-dasar negara mereka, juga kebijaksanaan mereka.

Dalam pernyataan-pernyataan yang lain jihad suci menegakkan Negara Islam ini ditandai sebagai suatu gerakan untuk membebaskan Aceh dari kolonialisme Jawa yang memberlakukan hukum-hukm yang betentangan dengan hukum-hukum Allah S.W.T. Di sini pemimpin-pemimpin di Jakarta dilukiskan sebagai orang kafir sesudah Islam dihancurkan, umpamanya melalui pengubahan sistem pendidikan. Selanjutnya mereka dicap sebagai pejabat-pejabat yang korup, mengangkat teman-teman sendiri pada jabatan-jabatan yang penting, dan dinyatakan memecat atau memberhentikan dengan sewenang-wenang setiap orang yang tidak termasuk kalangannya "karena kesehatan mereka tidak seratus persen, karena mereka tidak berpendidikan, ada yang tidak beres dengan penampilan mereka, pendeknya senbu satu alasan". Sambil lalu, kutipan yang akhir ini menunjukkan, kebijaksanaan Pemerintah Pusat menggunakan

ukuran-ukuran tertentu untuk diterima menjadi pegawai negeri dan tentara juga menimbulkan kemarahan yang sangat besar di Aceh.

Pemimpin-pemimpin Republik di Jakarta dituduh berusaha mengutamakan kepentingan Jawa dan orang Jawa. Banyak dikemukakan latar belakang Hindu mereka. Pada April 1954 umpamanya, Daud Beureueh melukiskan Pemerintah Republik sebagai pemerintah Hindu yang mengenakan baju nasionalis yang sangat mirip dengan komunisme. Hasrat pokoknya, dalam mata kaum pejuang mujahidin Aceh, adalah untuk mengembalikan zaman kerajaan Majapahit dalam masa jayanya. Dikatakan, penyebaran ide-idenya dilakukan melalui saluran undang-undang, peraturan-peraturan, dan sebagainya yang dikeluarkan Republik Indonesia, yang semuanya bernapaskan semangat Hinduisme. PNI dan sejumlah partai kecil dituduh menjadi alat dalam usaha-usaha ini. Karena partai-partai ini semuanya menekankan sila Pancasila nasionalisme Indonesia sebagai kedok politik bagi usaha-usaha mereka melanjutkan Hinduisme. Banyak orang muslim menurut laporan masuk dalam perangkap dan mendukung orang-orang yang sesungguhnya berusaha menghancurkan Islam.

Jihad suci menegakkan Negara Islam selanjutnya digambarkan kepada rakyat Aceh sebagai kelanjutan perlawanan sebelum Perang terhadap kolonialisme Belanda dan perjuangan mereka untuk kemerdekaan. Republik Indonesia secara tegas dinyatakan telah kehilangan hak untuk bertindak atas nama proklamasi kemerdekaan. Bukan saja ia tidak memberikan kepada Islam tempat yang layak dalam masyarakat, tetapi lebih celaka lagi, sesungguhnya ia merupakan produk Belanda. Menurut kebiasaan gerakan-gerakan pejuang mujahidin lain, ia dijuluki nama "Republik Konperensi Meja Bundar". Ahli waris yang sah dari proklamasi Agustus 1945 adalah Negara Islam Indonesia, yang telah mengambil alih perjuangan untuk kemerdekaan setelah eksistensi Republik Indonesia berakhir sebagai akibat Pemerintahnya ditangkap Belanda Desember 1948.

Ketika mengajukan alasan yang terakhir, para pemimpin pejuang mujahidin mengalami sedikit kesulitan dalam menjelaskan mengapa mereka baru sekarang masuk Negara Islam Indonesia dan tidak sejak lahirnya pada 1949. Karena itu tekanan pada penangguhan pemilihan umum dan pada perubahan dalam pemerintah. Walaupun rakyat Aceh terus menerus telah mengharapkan dan dengan sabar menantikan permohonan mereka dikabulkan Jakarta, dua peristiwa ini merupakan bahan yang terakhir.

Pada mulanya Aceh dibayangkan sebagai suatu provinsi Negara Islam Indonesia dengan otonomi yang luas. Kepala provinsi ini adalah Daud Beureueh, yang seperti semasa perjuangan kemerdekaan menduduki jabatan gubernur sipil dan militer dan dalam kedudukan ini juga

menjadi panglima Divisi Territorium V Tentara Islam Indonesia, Divisi Tengku Chik Ditiro, dan wakil Pemerintah Pusat Negara Islam Indonesia. Dalam urusan sipil ia dibantu suatu dewan pemerintahan, yang disebut Dewan Syura. Juga diumumkan terbentuknya suatu parlemen, Majelis Syura. Dalam urusan militer ia dibantu Dewan Militer, yang terdiri dari tiga orang: Daud Beureueh sendiri, Amir Husin al Mudjahid, sebagai wakil ketua Dewan Syura, dan Husin Jusuf, sebagai Kepala Staf Divisi Tengku Chik Ditiro. Pada tingkat-tingkat yang lebih rendah, tingkat kabupaten dan kecamatan, urusan militer dan sipil untuk sementara tetap terpisah, setidak-tidaknya dalam prinsip. Para komandan satuan tentara setempat tidak perlu menjadi kepala pemerintahan sipil, dan sebaliknya.

Dalam dua tahun berikutnya struktur pemerintahan dua kali berubah. Penyesuaian-penyesuaian yang pertama dilakukan setelah kaum pejuang mujahidin pulih dari kejutan yang diderita akibat gagalnya rencana menduduki kota-kota besar dan kecil dan- pasukan Darul Islam terusir ke hutan. Mereka terdorong kesadaran, strategi harus diubah dari strategi serangan frontal terhadap pasukan Republik Indonesia menjadi strategi perang gerilya dan kesadaran, jumlah rakyat yang dengan suatu dan cara lain membantu musuh hari demi hari bertambah.

Demi perang gerilya yang lebih efektif, pemerintah militer dan sipil dijadikan dalam satu tangan dengan pembentukan komandemen-komandemen. Maka terdapat suatu komandemen demikian untuk Aceh secara menyeluruh maupun untuk masing-masing kabupaten (yang terbagi dalam sejumlah sub-komandemen) dan kecamatan. Komandan satuan militer yang bersangkutan menjadi komandan pertama komandemen dan kepala stafnya menjadi kepala staf komandemen. Para kepala pemerintahan sipil, bupati atau camat (dan dalam hal subkomandan kabupaten wedana), dijadikan komandan kedua. Ketiga fungsionaris ini—komandan pertama dari mereka ini adalah pimpinan tertinggi—dengan demikian merupakan komite pelaksana dari setiap komandemen.

Perubahan-perubahan ini selanjutnya memperkukuh kedudukan Daud Beureueh, karena kini dia mengepalai baik pemerintahan sipil maupun militer. Bagi Komando Aceh secara menyeluruh ini berarti, dia adalah hampir seluruh komite pelaksana. Di samping itu, Dewan Syura, Majelis Syura dan Dewan Militer dinyatakan "pasif", sedangkan komandemen diberi kekuasaan legislatif. Sebagai imbalan, diumumkan bersamaan waktunya bahwa semua keputusan yang bersifat legislatif harus dibicarakan dengan suatu badan konsultatif yang baru dibentuk. Tetapi badan ini terdiri dari pelaksana komandemen dilengkapi dengan kepala-kepala perwakilan pemerintah dari daerah yang bersangkutan— yang semuanya termasuk dalam staf komandemen dan tunduk kepada komandan pertamanya—dan paling-paling tiga orang luar, biasanya pemimpin-pemimpin agama.

Untuk menghasilkan perubahan-perubahan, struktur Tentara Islam Aceh juga harus diubah. Mula-mula Divisi Tengku Chik Ditiro terdiri dari lima resimen, masing-masing terbagi dalam sejumlah batalyon. Sejak akhir 1953 resimen-resimen ini disebut "pangkalan", dan dianggap dalam teori setidak-tidaknya terdiri dari pasukan mobil dan teritorial, yang belakangan ini terdiri sebagian besar dari rakyat setempat yang bersenjatakan parang, pisau, dan sebagainya. Kini, Juni 1954, divisi ini dibagi lagi dalam enam resimen, satu resimen untuk tiap kabupaten. Kemudian resimen yag ketujuh, Resimen Tharmihim, terbentuk, untuk melakukan operasi-operasi gerilya di Sumatera bagian timur.

Perubahan-perubahan selanjutnya dilakukan pada September tahun berikutnya, ketika para pejuang mujahidin melakukan konperensi di Batee Kureng, di Aceh Besar. Konperensi ini dihadiri sembilan puluh orang, dua orang dari mereka mewakili Sumatera Timur. Konperensi ini diselenggarakan beberapa bulan sesudah Daud Beureueh diangkat Kartosoewirjo sebagai wakil presiden Negara Islam Indonesia, Januari 1955. Selain dari Daud Beureueh dimasukkan orang-orang Aceh lainnya dalam kabinet baru seluruh Indonesia Negara Islam Indonesia. Demikianlah Al Murthada (Amin Husin al Mudjahid) diangkat menjadi Wakil Kedua Menteri Pertahanan, Hasan Ali Menteri Urusan Luar Negeri dan Tengku Nya' Tjut (Nya' Cut) Menteri Pendidikan. Di konperensi Batee Kureng dibicarakan kedudukan Aceh dalam Negara Islam Indonesia dan struktur pemerintahan daerah. Mula-mula Daud Beureueh hanya bermaksud mengadakan perundingan dengan penasihat-penasihatnya yang terdekat, para anggota badan konsultatif Komandemen Aceh, tentang hubungan daerah dengan Negara Islam Indonesia dan Republik Indonesia. Ia menganjurkan pembentukan suatu negara Aceh yang tersendiri, masih dalam kerangka Negara Islam (federal). Hadirnya benar-benar sejumlah pemimpin Darul Islam lebih banyak di Batee Kureng sehubungan dengan rencana untuk merayakan ulang tahun kedua proklamasi 1953 memaksa Daud Beureueh mengadakan pertemuan yang lebih besar. Pada pertemuan kedua ini para pemimpin sepakat tentang pembentukan suatu negara tersendiri, walaupun beberapa orang, seperti T.A. Hasan, enggan berbuat yang demikian. Sebagai gantinya mereka mengajukan keinginan mereka menghendaki struktur negara ini yang lebih demokratis, yang di dalamnya pemerintah sipil akan bebas lagi dari pengawasan militer dan akan dibentuk parlemen. Konperensi mencapai puncaknya dalam Piagam Batee Kureng, dengan mengubah status Aceh dari status provinsi menjadi negara dalam Negara Islam Indonesia.

Piagam, yang menjadi semacam undang-undang dasar sementara, lagi-lagi mengemukakan pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kepala negara, wali negara, yang akan dipilih rakyat Aceh, akan menjadi kepala eksekutif. Tetapi untuk sementara Daud Beureueh-lah yang ditunjuk para hadirin. (pasal. 3). Dia dibantu dalam fungsinya oleh suatu kabinet yang diketuai

seorang perdana menteri. Kabinet dan para menteri bertanggung jawab kepada kepala negara (pasal 4). Dalam Piagam ini Majelis Syura muncul lagi. Walaupun para anggota parlemen ini dipilih rakyat, untuk sementara waktu mereka ditunjuk Kepala Negara (pasal 5) Majelis Syura yang disetujui di Batee Kureng terdiri dari seorang ketua (Amir Husin al Mudjahid), dua wakil ketua dan enam puluh satu anggota. Tidak dibuat ketentuan-ketentuan khusus mengenai masa jabatan para anggota atau kekuasaannya. Di samping Majelis Syura, dibentuk Majelis Ifta, dewan untuk memberikan fatwa yang diketuai Tengku Hasbullah Indrapuri. Tentang masalah hubungan daerah terhadap Pemerintah Pusat Negara Islam Indonesia, Piagam Batee Kureng menyatakan, Negara Aceh melaksanakan urusannya sendiri kecuali dalam soal-soal kebijaksanaan luar negeri, politik pertahanan, dan ekonomi (pasal 6). Bersamaan dengan itu ditekankan, selama Negara Islam Indonesia berada dalam perang dan terus bertempur mempertahankan Islam, satuan-satuan Tentara Islam Indonesia yang beroperasi di Aceh harus tetap merupakan alat Negara Aceh seperti juga Angkatan Kepolisian dan lasykar (pasal 8). Dalam kabinet yang baru terbentuk, yang diketuai Hasan Aly sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan, Husin Jusuf menduduki jabatan Menteri Keamanan, dan T.A. Hasan memegang portfolio Keuangan dan Kesehatan, sedangkan T.M. Amin diangkat menjadi Menteri Urusan Ekonomi dan Kesejahteraan, Zainul Abidin Muhammad Tiro Menteri Kehakiman. M. Ali Kasim Menteri Pendidikan, dan Abdul Gani Mutiara Menteri Penerangan.

Kabinet baru ini menyusun program sembilan pasal yang di dalamnya mengadakan reorganisasi dan memperbaiki Pemerintahan Sipil, Tentara dan Angkatan Kepolisian, dan untuk memperbaiki keadaan sosial pegawai sipil dan militernya, maupun rakyat pada umumnya. Langkah-langkah ke arah ini telah diambil dengan pembentukan Akademi Militer di Aceh Timur dan pembangunan rumah- rumah sakit.

Kabinet baru selanjutnya berjanji dalam programnya untuk meluaskan peradilan, yang secara tegas dinyatakan dalam Piagam Batee Kureng merupakan kekuatan terpisah. Tetapi, sebagaimana halnya dengan Pemerintahan Sipil, ia mengemukakan syarat nyata dalam program itu bahwa harus disadari kenyataan, negara masih dalam perang (gerilya) harus diperhitungkan dalam pelaksanaannya.

Kabinet tidak mempunyai menteri luar negeri, karena Piagam menyerahkan urusan luar negeri kepada Pemerintah Pusat. Sungguhpun begitu, persis seperti ia pun mempunyai politik pertahanannya, demikian pula Aceh mempunyai hubungan luar negerinya sendiri. Dalam hal ini ia jauh lebih beruntung ketimbang daerah-daerah Darul Islam yang lain. Sebagian ini adalah akibat dekatnya dengan Semenanjung Malaysia, yang memudahkan penyelundupan senjata dan barang-barang lain serta uang, maupun hubungan yang akrab dengan para wakil dan simpatisan

di pantai yang berseberangan. Sesewaktu beredar desas-desus, Daud Beureueh telah menyeberangi Selat untuk memperoleh dukungan di Malaysia. Di samping itu, Said Abubakar sering disebut berada di Penang atau Singapura untuk mengumpulkan bantuan keuangan. (J. Mossman, Rebels in Paradise Indonesia's Civil War, London:Jonathan Cap,1961, hal 44. Dalam paruh kedua tahun 1954 dia menimbulkan hal-hal yang mengabaikan Pemerintah Republik.

Dengan menamakan dirinya "Menteri Berkuasa Penuh" dan "Dutabesar pada Perserikatan BangsaBangsa dan Amerika Serikat" Republik Islam Indonesia, demikian disebutnya Negara Islam ini, ia mengirim ultimatum kepada Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo pada awal September tahun itu. Dalam ultimatum ini ia menuduh pemerintah "fasis-komunis" membawa bangsa Indonesia hampir ke dalam kehancuran ekonomi dan politik, kemiskinan, percekcokan, dan perang saudara, serta melakukan agresi terhadap rakyat Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Tengah dan Kalimantan, dan selanjutnya menjalankan politik divide et impera dan kolonialisme, dan mengadu domba berbagai suku bangsa dan agama satu sama lain.

Langkah-langkah lain yang dipertimbangkan Hasan Muhammad Tiro mengadukan Pemerintah Republik Indonesia di depan PBB atas tuduhan melakukan pembunuhan massal untuk memberitahu Dunia Islam akan kekejaman yang dilakukan terhadap para alim ulama di Aceh, Jawa Barat dan Tengah, Kalimantan dan Sulawesi dan memperjuangkan pengakuan internasional akan dukungan moril dan materiil untuk Republik Islam Indonesia. Di samping itu ia mengumumkan, bila Pemerintah Republik tidak memenuhi tuntutan-tuntutannya, ia akan mengusahakan pemboikotan diplomatik dan ekonomi secara internasional terhadap Republik Indonesia juga penghentian bantuan yang diberikan lewat Rencana Kolombo atau oleh Perserikatan BangsaBangsa dan Amerika Serikat.

Pemerintah Indonesia menolak tuntutan-tuntutan Hasan Muhammad Tiro dan memberinya waktu sampai 22 September untuk kembali ke Indonesia. Bila perintah ini diabaikannya, maka paspornya ditarik. Hasan Muhammad Tiro lalu dimasukkan dalam tahanan oleh Imigrasi Amerika dan disekap di Ellis Island. Dia dibebaskan lagi sesudah membayar denda US$ 500,—Ia membalas dengan mengumumkan sepucuk surat dalam New York Times yang meminta perhatian akan kemajuan komunisme di Indonesia sejak Pemerintah Ali Sastroamidjojo berkuasa dan menyampaikan sebuah laporan tentang "Pelanggaranpelanggaran Hak Asasi Manusia oleh rezim Sastroamidjojo di Indonesia".

Pemerintah Indonesia tidak mampu membungkam Muhammad Hasan Tiro, atau memintanya diekstradisikan dari Amerika Serikat. Hasan Muhammad Tiro dengan demikian dapat melanjutkan kampanye propaganda anti-Indonesia-nya di New York. Pada awal 1955 ia mengirim

surat kepada dua belas negara Islam dengan meminta kepada mereka memboikot Konperensi Asia-Afrika, kebanggaan Pemerintah Republik, yang akan diadakan di Bandung pada bulan April. Sebagai alasan mendasari permintaannya, ia mengemukakan, pemimpin-pemimpin Islam dan para pengikutnya—kecuali mereka yang membungkuk terhadap kaum komunis—disiksa dan dibunuh Tentara dan Polisi Pemerintah Ali Sastroamidjojo yang "didominasi komunis".

Segera sesudah proklamasi jihad suci menegakkan Negara Islam Daud Beureueh gubernur Sumatera Utara meminta bantuan militer kepada Pemerintah Pusat. Permintaannya cepat dikabulkan, dan pasukan dari Sumatera Tengah dan daerah lain Sumatera pun digerakkan untuk bertindak. Kemudian satuan-satuan Divisi Jawa Tengah Diponegoro juga diperiritahkan ke Aceh. Pemerintah bertekad akan menghadapi situasi dengan keteguhan hati dan menyapu jihad suci menegakkan Negara Islam dengan cepat. Seperti dikemukakan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo: "Bila rumah terbakar, padamkanlah api tanpa berhenti menanyakan macam-macam" . Namun tanggung jawab terakhir untuk operasi-operasi keamanan terus juga terletak pada para penguasa sipil. Ini disebabkan sifat khusus daerah, dan lebih khusus ialah sifat-sifat khusus Aceh dan kekuatan Islam di daerah ini, seperti dijelaskan Ali Sastroamidjojo dalam DPR pada 1955. Tidak ada pengumuman keadaan perang, yang membuat militer mengambil alih pimpinan. Di samping itu, sejak mula jihad suci menegakkan Negara Islam Pemerintah berjanji menyelidiki masalah otonomi untuk Aceh dan memberikan lebih banyak perhatian terhadap perkembangan ekonomi daerah. Dalam menyusun kebijaksanaannya, Pemerintah harus mempertimbangkan di satu pihak tuntutan PNI dan PKI untuk mengambil tindakan militer yang lebih keras, dan di pihak lain tekanan untuk melakukan perundingan dan memenuhi beberapa tuntutan kaum pejuang mujahidin.

Pemerintah dikecam tentang ketidakamanan Aceh maupun kelakuan pasukan yang tidak senonoh. Walau pun aksi-aksi militer ada hasilnya, keadaan jauh dari memuaskan. Hasil operasi-operasi Angkatan Darat dan Brigade Mobil demikian rupa hingga pada pertengahan 1954 hampir setengah dari Aceh cukup aman untuk bisa menarik bantuan militer dan menyerahkan pemeliharaan hukum dan ketertiban kepada Angkatan Kepolisian daerah. Hanya di Kabupaten Aceh Besar (di sini kaum pejuang mujahidin bergerak hanya beberapa mil dari Banda Aceh), Kabupaten Pidie (tempat Daud Beureueh memusatkan pemerintahan sipil dan militernya), Kabupaten Aceh Utara dan daerah Takengon di Aceh Tengah—daerah-daerah tempat kaum pejuang mujahidin yang paling kuat—dilanjutkan bantuan militer.

Di daerah-daerah yang belakangan ini Darul Islam tetap sangat aktif. Di desa-desa di bawah pengawasannya ini mereka menetapkan pajak— dalam beberapa hal juga dikenakan pada guru-guru sekolah dan para pejabat Pemerintah Republik yang terus bekerja —, melakukan

pencatatan perkawinan dan perceraian, dan pada umumnya menjalankan hukum, mengadili kasus-kasus kejahatan rutin dan kasus-kasus yang merupakan pelanggaran syariat Islam, seperti membatalkan puasa, dan kadang-kadang juga menjatuhkan hukuman pada mereka yang ragu-ragu mengambil keputusan apakah memihak Negara Islam atau memihak Republik Indonesia. Dari posisi mereka di gunung-gunung dan hutan-hutan kaum pejuang mujahidin terus juga mengganggu lalu lintas dan menyerang patroli dan pos-pos tentara, dengan beroperasi dalam kelompok-kelompok yang kadang-kadang terdiri dari beberapa ratus orang. Sekali-sekali mereka lakukan pula serangan pada kota-kota kecil dan besar. Pada kunjungan komisi parlemen ke Aceh pada Januari 1954 para anggotanya sempat mencatat beberapa kali tembak-menembak di sekitar Banda Aceh dan Sigli. Selama komisi tinggal di Banda Aceh kaum pejuang mujahidin melemparkan bom-bom pembakar dan berusaha mengadakan pembakaran di dalam kota. Pada 17 Agustus 1954, pasukan Darul Islam memasuki dan menduduki Lamno, yang dikuasai selama dua hari. Sekitar waktu yang sama mereka menyerang Seulimeum, juga di Aceh Besar. Tahun berikutnya kaum pejuang mujahidin berusaha memasuki Idi dan menembaki Sigli. Serangan terhadap Idi merupakan satu petunjuk bahwa juga daerah-daerah lain Aceh ini masih menghadapi kegiatan-kegiatan Darul Islam, yang sesudah 1954 menjadi sering lagi. Di Aceh Barat, Tengah, dan Timur pun—daerah-daerah yang dianggap Pemerintah Repubtik relatif aman—Darul Islam menjadi lebih aktif, sebagian akibat kemarahan terhadap tingkah laku pasukan Republik dan sebagian karena gerakan pasukan Tentara Islam. Pada awal 1955 Hasan Saleh pindah dari Pidie ke Aceh Barat. Sesudah meninggalkan saudaranya Ibrahim Saleh memimpin di sini, dia lalu terus ke Aceh Timur, dengan tujuan terakhir Tapanuli. Pasukannya di Aceh Timur diperkuat satuan-satuan yang dipimpin Banda Chairullah (Banda Khairullah), yang juga berasal dari Pidie. Pasukan lain dari Pidie, yang dipimpin A.G. Mutiara, masuk di Aceh Barat.

Lebih daripada sebelumnya, Darul Islam di Aceh kini juga berusaha merugikan Pemerintah Republik secara ekonomis. Bukan saja mereka terus melakukan upaya mengganggu perhubungan, tetapi juga menujukan serangan pada bermacam perkebunan dan perusahaan industri. Sejumlah perkebunan damar di Aceh Tengah diserang dan dibakar. Di Aceh Timur ladang-ladang minyak menjadi sasaran serangan kaum pejuang mujahidin. Pejuang mencatat salah satu hasilnya yang terbesar pada Maret 1955, ketika meleka menyerang Pelabuhan Kuala Langsa, dengan membakari semua gudang (hanya gudang KPM yang luput secara misterius), dan mengakibatkan banyak sekali kerugian.

Sulit sekali Tentara Republik menumpas kegiatan-kegiatan pejuang . Pada 1956 Komando Militer Sumatera Utara terpaksa mengakui, semangat tinggi tentara pejuang mujahidin—yang kekuatannya ditaksir 1.400 orang, musuh mempunyai pendukung dan simpatisan di hampir

setiap desa. Di Aceh, demikian dinyatakan, satu syarat utama untuk melakukan perang gerilya dengan berhasil terpenuhi, yaitu dukungan rakyat setempat. Bahkan orang-orang yang pada mulanya menentang Negara Islam Indonesia, atau bersikap netral, dapat ditarik ke pihak pejuang mujahidin karena propaganda yang mereka lakukan.

Pimpinan tentara mengakui, tingkah laku yang tidak senonoh para prajuritnya sendiri menambah keberhasilan propaganda Darul Islam. Prajurit-prajurit dari luar daerah—Batak Minangkabau, dan Jawa—kadang-kadang sangat menyakitkan hati orang Aceh dengan kelakuan mereka. Untuk memperbaiki hal ini Angkatan Darat mengeluarkan perintah kepada anggotanya agar berlaku baik terhadap rakyat setempat, dengan memberikan keterangan tentang masyarakat Aceh maupun nasihat bagaimana harus bersikap dalam masyarakat ini. Demikianlah mereka dilarang memasuki masjid memakai sepatu dan main judi serta minum minuman keras, dan diperingatkan agar menghormati adat istiadat setempat. Dalam hubungan ini mereka diberi tahu bagaimana bersikap sopan dalam menghadapi wanita Aceh, dengan menasihatkan mereka, bila ingin kawin dengan seorang gadis setempat, agar menghubungi orang tuanya dan kerabatnya, dan mengetahui aturan-aturan yang bersangkutan lebih dahulu.

Peristiwa-peristiwa lain menyangkut perampokan oleh pasukan Republik, pembakaran rumah-rumah yang ditinggalkan pemiliknya karena mereka dicurigai telah menyeberang ke pihak pejuang mujahidin, dan pembunuhan serta penyiksaan para tawanan dan penduduk-penduduk desa yang tidak berdosa.

Menurut laporan, dua peristiwa yang paling hebat adalah di Cot Jeumpa dan Pulot Leupung, dua desa dekat Banda Aceh di Aceh Besar, suatu daerah yang dianggap aman oleh Angkatan Darat, pada Februari 1955. Kedua peristiwa ini disingkapkan harian Peristiwa, yang terbit di Banda Aceh. Menurut berita Peristiwa, pasukan Republik pada 26 Februari menangkapi semua penduduk Cot Jeumpa dan menembak mati mereka semua. Peristiwa yang serupa terjadi dekat Pulot Leupung dua hari kemudian. Peristiwa mengatakan, dalam kedua kejadian ini kira-kira dua ratus orang seluruhnya terbunuh, termasuk anak-anak. Tetapi versi yang dikemukakan Tentara berbeda.

Dengan tidak menyangkal besarnya jumlah kematian, mereka berusaha memberi alasan dengan mengatakan, korban-korban ini semua tewas dalam pertempuran. Beberapa hari sebelum kejadian-kejadian ini, juru bicara Angkatan Darat menjelaskan, tembakan-tembakan dilepaskan terhadap sebuah truk tentara pada sebuah jembatan dekat Cot Jeumpa. Salah sebuah peluru mengenai tank bensin, truk terbakar, akibatnya lima belas prajurit mati terbakar. Jebakan itu dipasang Pawang Leman, bekas mayor pada zaman revolusi dan bekas camat setempat. Keterangan yang dikumpulkan Tentara Republik menyatakan, rakyat setempat pada hari yang

nahas itu menyuruh pulang kembali semua lalu lintas—kecuali truk tentara itu—dengan dalih bahwa jembatan putus. Menurut sumber yang sama, Pawang Leman telah menghasut rakyat untuk memulai perang sabil. Kemudian komandan pasukan Angkatan Darat setempat memutuskan menyelidiki berdasarkan keterangan ini, dan mengirimkan sebuah patroli ke Cot Jeumpa. Di sini patroli ini ditembaki dan diserang pasukan Darul Islam (dengan ini dimaksudkan rakyat setempat) dengan parang dan pisau dan harus menjawab serangan ini. Hal seperti itu terjadi di Pulot Leupung. Di sini sebuah patroli tentara diserang penduduk desa. Sebuah keterangan lain yang dikeSuarkan menekankan, tidaklah mungkin membedakan pejuang mujahidin dari penduduk desa biasa, karena para pejuang mujahidin telah bercampur dengan rakyat setempat atau memaksa penduduk desa maju di barisan depan. Pembunuhan di Cot Jeumpa dan Pulot Leupung menimbulkan protes hebat dari organisasi-organisasi Islam dan Aceh. Front Pemuda Aceh mengancam akan melaporkan peristiwa ini kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara Konperensi Asia-Afrika, bila tidak ditindak demi keadilan dan suatu penyelidikan dimulai Pemerintah. Dalam Parlemen pernyataan-pernyataan diajukan Muhammad Nur el Ibrahimy, Amelz, dan Sutardjo Kartohadikusumo. Di pihak Pemerintah Menteri Dalam Negeri dikirim ke Aceh, sedangkan wakil-wakil Staf Tentara Pusat dan Jaksa Agung pun mengunjungi daerah itu. Selanjutnya, gubernur Sumatera Utara, S.M. Amin, mulai penyelidikan. Ketika mengunjungi kedua desa itu didapatinya Cot Jeumpa seluruhnya kosong, sedangkan di Pulot Leupung semua mereka yang luput dari pembantaian telah lari ke gunung. Sesudah ini Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo memberikan keterangan kepada DPR atas nama Pemerintah dalam pertengahan April. Keterangan tentang peristiwa-peristiwa ini tidak berbeda dengan yang dikemukakan Angkatan Darat.

Peristiwa yang menyangkut pasukan Republik digunakan mereka yang menyetujui penyelesaian damai untuk mendesak sekali lagi diadakan perundingan dan diberikan konsesi kepada beberapa tuntutan kaum pejuang mujahidin. Sejauh ini upaya untuk meyakinkan pejuang mujahidin-pejuang mujahidin Darul Islam di Aceh untuk menghentikan perjuangan mereka dan berunding dengan Republik telah gagal. Gubernur baru Sumatera Utara, S.M. Amin, melakukan surat-menyurat dengan pemimpin-pemimpin pejuang mujahidin yang terkemuka sejak akhir 1953. Walaupun dia sendiri bukan orang Aceh (dia sendiri seorang Batak Mandailing), hubungan Amin dengan Daud Beureueh dan rekan-rekannya yang akrab baik. Sebenarnya, pengangkatannya sebagai pengganti Abdul Hakim, yang menjauhi pemimpin-pemimpin Aceh dengan sikapnya, sebagian adalah karena didorong perkenalannya yang akrab dengan pemimpin-pemimpin ini. Karena, selama masa Jepang dia menjadi kepala sekolah menengah di Banda Aceh, sedangkan kemudian dia menjadi anggota mahkamah pengadilan di Sigli bersama Usman Raliby dan Hasan

Aly. Sesudah proklamasi kemerdekaan ia menjadi anggota dan kemudian, Januari 1946, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh. Kemudian menyusul pula pengangkatannya sebagai gubernur Sumatera Utara.

Sejak mula jihad suci menegakkan Negara Islam Amin memperlihatkan dirinya sebagai seorang yang membela perundingan dengan pejuang mujahidin sebagai cara memperoleh penyelesaian damai. Berpegang pada prinsip ini, ia melakukan kontak dengan Said Abubakar. Selanjutnya ia mengadakan surat-menyurat dengan pemimpin-pemimpin Darul Islam secara diam-diam, tanpa lebih dahulu memberitahukan kepada Pemerintah Pusat, Desember 1953. Dalam surat-surat ini—yang dinyatakannya sendiri dengan tegas, ia menulis sebagai seorang warga negara pribadi — ia menyatakan, menyetujui tujuan pejuang mujahidin yang merupakan cita-cita semua umat muslim dan ia merasa peristiwa-peristiwa yang telah mencetuskan jihad suci menegakkan Negara Islam adalah akibat salah paham. Tetapi cara-cara yang dipilih kaum pejuang mujahidin tidak disetujui semua umat muslim. Karena itu ia meminta kaum pejuang mujahidin mengemukakan gagasan bagaimana mengakhiri pertumpahan darah.

Amin menerima jawaban dari Husin Jusuf dan Daud Beureueh. Keduanya menggarisbawahi kewajiban setiap muslim Indonesia untuk turut serta dalam jihad mempertahankan Negara Islam Indonesia, yang demikian mereka kemukakan, telah menjadi suatu kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Lalu mereka menyatakan, konflik dapat berakhir segera sesudah Pemerintah Republik memperhatikan hasrat masyarakat Islam. Mereka menyangkal, revolusi sosial atau keinginan memperoleh otonomi mengilhami jihad suci menegakkan Negara Islam mereka, dengan menegaskan, penyebab pangkalnya terletak dalam agama. Mereka tidak sependapat dengan pandangan Amin bahwa kekacauan yang terjadi adalah disebabkan kesalahpahaman. Politik kebijaksanaan yang dijalankan Pemerintah Republik, reaksi Pemerintah terhadap Peristiwa Cumbok dan terhadap tuntutan otonomi, reorganisasi Tentara di Aceh, dan sebagainya merupakan cukup bukti kebalikannya..

Amin menjawab pada Agustus 1954. Dengan menolak menemui pemimpim-pemimpin gerilya ini sendiri, ia mengirim suatu rancangan surat untuk ditandatangani Daud Beureueh dan Hasan Aly yang menyatakan, keduanya berjanji akan mengakhiri perlawanan mereka, meletakkan senjata mereka, dan akan menemui wakil-wakil Pemerintah Republik bila yang belakangan ini bersedia mengakui hak mereka untuk memperjuangkan Negara Islam bukan dengan jalan kekerasan, memberikan lebih banyak perhatian demi kepentingan Aceh di masa depan dan memberikan amnesti kepada para pejuang mujahidin. Bila Daud Beureueh dan Hasan Aly menandatangani rancangan ini, ia, Amin, pribadi akan ke Jakarta untuk memperjuangkan agar persetujuan ini diterima Pemerintah.

Tetapi Daud Beureueh dan Hasan Aly tidak menandatanganinya. Sebaliknya mereka merancangkan suatu peraturan pemerintah untuk ditandatangani Ali Sastroamidjojo yang mereka minta dibawa Amin ke Jakarta. Di dalamnya dinyatakan, Pemerintah Republik berusaha membuka perundingan dengan pendiri-pendiri Negara Islam Indonesia di Jawa, Aceh, Kalimantan, dan Sulawesi, dan melindungi serta membantu para anggota delegasi Negara Islam selama perundingan-perundingan ini berlangsung. Dalam surat pengiringnya, tertanggal 5 Oktober 1954, mereka menjelaskan, apa yang mereka inginkan bukanlah amnesti tetapi perundingan.

Semua surat ini dikirim Amin ke Jakarta, tetapi Pemerintah tidak memberi reaksi. Kemudian surat-menyuratnya untuk sementara dihentikan, dan baru dimulai lagi sesudah Kabinet Ali Sastroamidjojo jatuh, dan digantikan pemerintah baru yang dikepalai Burhanuddin Harahap dari Masyumi pada Agustus 1955.

Konperensi Batee Kureng merupakan salah satu tanda yang paling tidak mungkin diragukan lagi akan adanya perselisihan pendapat di kalangan pejuang mujahidin-pejuang mujahidin Darul Islam di Aceh. Ini membuktikan ketidakpuasan akan cara semua keputusan dibuat Daud Beureueh dengan sekelompok kecil penasihat, dan tunduknya urusan sipil kepada militer.

Walaupun pasti terdapat persaingan dan pertentangan di kalangan pemimpin-pemimpin Negara Islam di Aceh, berbeda dengan daerah-daerah lain, tampaknya di sini ini tidak sampai mengakibatkan sering terjadi bentrokan antara komandan pasukan. Dengan penggeseran beberapa pemimpin angkatan pertama dari pusat kekuasaan pada tahun-tahun pertama, konperensi Batee Kureng mengadakan perubahan tertentu. Pemusatan kekuasaan dan lenyapnya pemimpin-pemimpin tertentu terjadi pada 1954, ketika Dewan Syura, Majelis Syura, dan Dewan Militer dibubarkan. Ketika itu Husin Jusuf kehilangan jabatannya sebagai Kepala Staf Divisi Tengku Chik Ditiro beralih kepada Amir Husin al Mujahid. Walau pun ia diangkat sebagai koordinator keamanan untuk Aceh, kenaikan ini berarti kehilangan kekuasaan atas sebagian besar pasukan tempur. Hal yang sama terjadi kemudian pada penggantinya, Amir Husin al Mudjahid, yang digantikan oleh Hasan Aly.

Di samping itu terdapat perlawanan terhadap reaksi Daud Beureueh mengenai tawaran dari pihak Republik Indonesia. Sementara orang tidak menyetujui penolakannya yang terang-terangan akan kemungkinan tawaran amnesti, dan khususnya dalam Tentara Islam yang sebenarnya, ada sekelompok besar yang kuat menyetujui menerima tawaran yang demikian.

Mengingat hal yang di atas dan banyaknya jumlah prajurit yang sudah kembali ke desa mereka, salah seorang komandan daerah, Iljas Lebai (Ilyas Lebai) dari Aceh Tengah, mengeluarkan

komunike pada November 1955 yang mengumumkan, tidak akan diambil tindakan terhadap para prajurit resimennya yang pulang ke rumah, asal saja ini tidak merugikan perjuangan. Dia sendiri pun diminta melapor kepada para penguasa, katanya, tetapi ia jngin menantikan hasil pemilihan umum. Dia memikirkan akan melapor demikian karena kabinet yang memerintah sekarang, Kabinet Burhanuddin Harahap, ideologinya berdekatan dengan cita-cita perjuangan di Aceh (Pengumuman 20 Novemeber 1955).

Pada umumnya sikap kaum mujahidin Darul Islam di Aceh terhadap pemilihan umum lunak. Mula-mula, ketika jihad suci menegakkan Negara Islam meletus, sikap mereka terhadap ini mendua. Di satu pihak mereka menuduh Pemerintah Republik berusaha membiarkan mereka menunggu tanpa batas waktu, sedangkan di pihak lain pemilihan umum mereka cap sebagai alat Pemerintah Pusat untuk melakukan kehendaknya. Kini ketika pemilihan umum telah di ambang pintu, mereka tidak melakukan apa pun untuk merintanginya.

Hasil pemilihan umum yang memuaskan di Aceh, yaitu Masyumi memperoleh dua pertiga jumlah suara, memberi mereka yang menyetujui diakhirinya jihad suci menegakkan Negara Islam alasan lain untuk menyokong sikap mereka. Kasus mereka lebih diperkukuh ketika, kali ini di bawah Kabinet Ali Satroamidjojo lagi; pada akhir 1956 suatu rancangan undang-undang disahkan, yang memberikan status provinsi otonom kepada Aceh. Undang-undang ini berlaku sejak Januari 1957. A. Hasjmy pemimpin Pemuda PUSA Aceh Besar sebelum Perang dan bekas Ketua BPI/Pesindo, menjadi gubernur pertama provinsi ini.

Namun, faktor lain yang menyokong diakhirinya permusuhan adalah di bidang militer pun diangkat seorang bekas pemimpin gerilya menjadi pimpinan tertinggi di Aceh. Dia adalah Sjammaun Gaharu, panglima Tentara Republik di Aceh untuk masa singkat selama revolusi dan salah seorang penandatangan ultimatum terhadap uleebalang di Lammeulo (sebelum jabatannya direbut Amir Husin al Mudjahid).

Berdasarkan keterangannya sendiri Sjammaun Gaharu mendapat pengangkatannya berkat dukungan yang diterimanya dari Nasution akan gagasannya untuk mengakhiri jihad suci menegakkan Negara Islam di Aceh. Sering kali ia bertemu dengan Nasution dalam masa antara 1952 dan 1955, ketika Nasution dibebaskan dari jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, untuk memberikan keterangan bagi buku-buku yang tengah ditulisnya tentang revolusi Indonesia dan tentang perang gerilya pada umumnya. Selama wawancara-wawancara ini Sjammaun Gaharu berangsur-angsur mengungkapkan pandangannya tentang cara-cara yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan di Aceh. Intisari teori ini adalah, situasi Aceh berbeda dengan di tempat lain dan rumit sekali, dan persoalan ini paling baik diselesaikan orang Aceh

sendiri dengan cara Acoh. Wakil Presiden juga tertarik akan gagasan Sjammaun Gaharu tentang masalah ini dan meminta dia menuliskannya. Pada Oktober 1955 ia menyampaikan hasilnya kepada Hatta, dan ketika beberapa hari kemudian Nasution diangkat kembali menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, ia pun mengirimkan sebuah salinan kepada Nasution.

Nasution kemudian menyambutnya dengan menawarkan kepadanya jabatan pimpinan militer Aceh. Pada mulanya Sjammaun Gaharu bermaksud menolak tawaran ini, karena dia merasa, pandangannya tidak sesuai dengan kebijaksanaan panglima Sumatera Utara, Maludin Simbolon. Tetapi dengan janji Nasution bahwa Maludin Simbolon akan dipindahkan dalam waktu dekat, ia menerima kedudukan ini. ltesempatan untuk melaksanakan gagasannya dalam praktek diperolehnya ketika pada akhir 1956 Maludin Simbolon—yang merupakan saingan utama Nasution untuk jabatan kepala staf—dalam upaya mencegah kepindahannya memutuskan hubungan Komando Tentara Teritorium Sumatera Utara dengan Pimpinan Angkatan Darat. Segera Sjammaun Gaharu menjauhkan diri dari Maludin Simbolon dan tetap berhubungan erat dengan Nasution.

Sekarang Sjammaun Gaharu bebas melaksanakan rencananya. Bersama dengan gubernur yang baru diangkat, A. Hasjmy, dan dengan sokongan tegas Nasution, ia menempuh politik kebijaksanaan perukunan. Pada pertengahan April 1957, pertengahan puasa, diadakan perundingan dengan sejumlah pemimpin Darul Islam terkemuka di Lamteh, sebuah desa beberapa kilometer dari Aceh. Pembicaraan mencapai puncaknya dalam Ikrar Lamteh yang di dalamnya keduanya berjanji masing-masing untuk memajukan Islam, mendorong pembangunan Aceh dalam arti kata yang seluas-luasnya, dan berusaha mendatangkan kemakmuran dan keamanan kepada rakyat dan masyarakat Aceh. Di pihak Republik piagam itu ditandatangani Sjammaun Gaharu dan kepala stafnya, Teuku Hamzah, Hasjmy, dan Kepala Polisi untuk Aceh, M. Insya. Pemimpin-pemimpin Darul Islam yang menandatanganinya adalah Hasan Aly, Hasan Saleh, dan Ishak Amin (bupati Aceh Besar). Kemudian, disertai A. Hasjmy, dan M. Insja, jammaun Gaharu juga menjumpai Daud Beureueh, yang pada waktu itu masih tidak ingin mendengarkan penyelesaian .

Sesuai dengan kebijaksanaannya, yang dinamakannya Konsepsi prinsipiel dan bijaksana, Sjammaun Gaharu bersama dengan A. Hasjmy melanjutkan usaha-usahanya mencari penyelesaian. Keduanya tetap berhubungan dengan pemimpin-pemimpin Darul Islam dan mengunjungi Jakarta berkali-kali untuk mengetahui sejauh mana mereka dapat melangkah dalam perundingan mereka dengan kaum pejuang mujahidin. Pada September 1957 Perdana Menteri Juanda mengatakan kepada mereka, mereka boleh memberikan konsep otonomi daerah penafsiran yang seluas mungkin, bahkan sampai kepada pengertian bahwa Aceh

diperlakukan sebagai negara terselldiri, asal saja mereka tetap dalam batas-batas UUDS Indonesia yang masih mengakui suatu republik kesatuan (Hasjmy 1958:57-58j.

Tetapi tak tercapai penyelesaian pada waktu itu. Sebagiannya ini adalah disebabkan kenyataan bahwa jihad suci menegakkan Negara Islam PRRI-Permesta menarik perhatian, dan sebagiannya karena adanya dalam Negara Islam Aceh suatu faksi yang amat kuat, yang dipimpin Daud Beureueh, yang tidak ingin mendengarkan kompromi apa pun juga dan berpegang pada prinsip perundingan resmi antara Negara Islam Aceh dan Republik Indonesia.

Namun, sikap pendirian Daud Beureueh makin ditentang. Khususnya di dalam Tentara Islam Indonesia Aceh terdapat banyak yang memikirkan untuk menyerah. Kelompok ini dipimpin Hasan Saleh, Panglima Divisi Tengku Chik Ditiro dan Kepala Staf Tentara Islam. Ia menuduh Daud Beureueh berusaha menjerumuskan Aceh ke dalam suatu perang baru tanpa memikirkan nasib prajurit biasa dan rakyat pada umumnya yang harus menanggung akibat-akibatnya.

Akibatnya pertempuran sangat banyak berkurang sesudah Ikrar Lamteh. Namun, belum juga tampak akhir jihad suci menegakkan Negara Islam. Dua tahun lamanya lagi barulah lawan-lawan Daud Beureueh bulat hatinya dan benar-benar memisahkan diri dari padanya. Hal ini terjadi pada Maret 1959, ketika, dengan menuduh Daud Beureueh bertindak sewenang-wenang, Hasan Saleh dan pendukungpendukungnya menggulingkannya. Mereka membentuk pemerintah mereka sendiri pada suatu pertemuan di Pidie yang dihadiri kira-kira seribu orang pada 15 Maret, mereka yang berlainan pendapat ini menamakan dirinya Gerakan Revolusioner Islam Indonesia, kemudian membentuk Dewan Revolusi (Negara Bagian Aceh). Ketuanya adalah Abdul Gani Usman, dan wakil ketuanya adalah Hasan Saleh, dengan Abdul Gani Mutiara sebagai sekretaris umum dan kepala Bagian Penerangan. Sebagai anggota termasuk pemimpin-pemimpin Darul Islam terkemuka seperti Amir Husin al Mudjahid, T.A. Hasan, Ibrahim Salehs T.M. Amin, dan Husin Jusuf.

Langkah pertama Abdul Gani Usman dalam kedudukannya sebagai ketua Dewan Revolusi adalah membuat pengumuman yang menyatakan, jabatan kepala negara untuk sementara dilaksanakan Dewan Pertimbangan Revolusi, yang diketuai Amir Husin al Mudjahid. Pada waktu yang bersamaan ia memerintahkan para pengikutnya menghentikan pemungutan pajak di desa-desa, disertai ancaman terhadap siapa saja yang masih terus melakukannya. Mengenai Tentara Islam, Hasan Saleh membatasi gerak para prajurit Divisi Tengku Chik Ditiro dalam asrama mereka, dengan menarik mereka dari desa-desa tempat mereka ditempatkan. Selanjutnya ia mengumumkan, Dewan Revolusi akan mengirimkan delegasi ke Jakarta untuk membicarakan berakhirnya jihad suci menegakkan Negara Islam dengan para penguasa Republik. Pada bulan-

bulan berikutnya Dewan Revolusi diikuti pasukan dari Aceh Barat yang dipimpin T.R. Idris dan Komandan Resimen VII Sumatera Timur, Haji Hasanuddin. Pada Agustus, Abdul Gani Mutiara menyatakan Dewan revolusi didukung 25.000 anggota Darul Islam.

Perkembangan-perkembangan ini memulai serangkaian perundingan baru. Pada awal Mei Sjammaun Gaharu dan A. Hasjmy bertolak lagi ke Jakarta, kali ini atas undangan Perdana Menteri Djuanda. Mereka menjelaskan situasi yang baru kepada Kabinet dan kepada Presiden Soekarno serta memberikan sejumlah anjuran tentang langkah-langkah yang harus diambil sehubungan dengan ini. Kemudian Juanda mengeluarkan keputusan yang menyatakan, sejak 26 Mei Provinsi Aceh dapat menamakan dirinya Daerah Istimewa Aceh. Ini menempatkan Aceh dalam kedudukan yang agak khas, karena dari provinsi-provinsi yang lain hanyalah ibukota, Jakarta, dan Yogyakarta yang memiliki status istimewa. Kepada Aceh selanjutnya dijanjikan otonomi yang seluas mungkin, terutama dalam bidang agama, pendidikan dan hukum adat, tetapi dengan ketentuan, seperti dinyatakan Djuanda dalam keputusannya, tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pada waktu yang sama Pemerintah Pusat mengirimkan sebuah misi ke Aceh untuk berunding dengan Dewan Revolusi. Misi ini dipimpin Wakil Perdana Menteri Pertama Hardi, dan di dalamnya termasuk Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Mayor Jenderal Gatot Subroto dan Menteri Kestabilan Ekonomi tanpa Portfolio, Kolonel Suprayogi. Dua hari kemudian, 26 Mei 1959, sesudah melalui usaha A. Hasjmy dan Letnan Kolonel T. Hamzah menembus jalan buntu, tercapai persetujuan sementara dengan pemimpin-pemimpin Dewan Revolusi yang menerima usul-usul Pemerintah Pusat. Secara tertulis mereka sendiri berjanji kembali ke dalam haribaan Republik dan mengucapkan sumpah setia kepada Undang-Undang Dasar.

Sifat yang sebenar-benarnya dari kompromi itu tetap samar-samar. Seperti telah ditetapkan Djuanda sebelumnya, otonomi janganlah ditafsirkan sedemikian rupa hingga setiap ketentuan baru yang diadakan akan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Hardi menambahkan di Banda Aceh, masalah apakah masyarakat Islam di Aceh dapat dipaksakan melaksanakan syariat Islam atau tidak, merupakan persoalan yang akan diputuskan Konstituante, yang ketika itu sedang membicarakan kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945. Ia menghubungkan hal ini dengan Piagam Jakarta, yang kini kembali menjadi masalah yang hangat diperdebatkan dalam Konstituante di Jakarta. Seperti ternyata, kaum politisi Islam tidak cukup kuat untuk meluluskannya kali ini. Satu-satunya hasil yang mereka peroleh ialah diakuinya oleh Soekarno dalam Dekret yang menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Piagam Jakarta telah mengilhami Undang-Undang Dasar ini dan merupakan kesatuan dengannya.

Selanjutnya disetujui secara prinsip, sebagian prajurit Tentara Islam, setelah melalui screening wajib, akan dijadikan wajib militer darurat. Kemudian, pada 1 Oktober disetujui akan dibentuk Divisi Tengku Chik Ditiro sebagai bagian khusus dari Divisi Tentara di Aceh. Pegawai-pegawai negeri Darul Islam yang mengikuti Dewan Revolusi mendapat perlakuan yang sedikit banyaknya sama. Usaha yang menyatakan bahwa di mana mungkin mereka akan diintegrasikan ke dalam Pemerintahan Republik dikukuhkan para penguasa militer pusat pada akhir Oktober. Ini berarti memberikan kuasa kepada Pemerintah Daerah Aceh untuk mengangkat bekas pejuang mujahidin yang telah menyatakan sumpah setia kepada Republik Indonsia pada jabatanjabatan dalam pemerintahan sipil.

Daud Beureueh tidak menerima persetujuan itu. Dia dan Hasan Aly melanjutkan bertempur. Menurut gubernur Aceh ketika itu A. Hasjmy, mereka masih dapat mengharapkan dukungan dari kira-kira tiga puluh persen pengikut pertamanya. Seperti juga rekannya di Sulawesi Selatan—Kahar Muzakkar—Daud Beureueh bergabung dengan sisa-sisa pasukan PRRI/Permesta. Mula-mula pasukannya bergerak bersama dengan sejumlah komandan PRRI bawahan dengan anak-anak buahnya. Kemudian diperkuat dengan satuan-satuan pejuang mujahidin yang dipimpin Mayor Nukum dan Kapten Hasanuddin, bekas kapten Polisi Militer. Kedua mereka ini ditawari kedudukan menteri oleh Daud Beureueh untuk mengisi jabatan yang lowong karena mereka yang membelot ke Dewan Revolusi.

Pada waktu yang bersamaan dilakukan pembicaraan oleh pemimpin-pemimpin PRRI dan Darul Islam di Aceh. Ini menghasilkan proklamasi Republik Persatuan Indonesia (RPI) federal, Februari 1960, yang mewakili koalisi mereka yang kalah, orang-orang yang merasa dirinya bertempur dalam perang yang kalah di rimba. Di samping itu, RPI mempersatukan mereka yang di masa lalu berada dalam dua kubu yang berbeda dan paling-paling secara baik mereka memiliki simpati satu sama lain, dan secara jelek, mereka sama sekali bermusuhan. Tambahan lagi, Republik Persatuan Indonesia merupakan urusan Sumatera dan Sulawesi semata-mata. Ini membatalkan pengakuan yang masih dinyatakan oleh Negara Islam Indonesia dan PRR8Permesta, bahwa wilayahnya meliputi seluruh Indonesia.

RPI terdiri dari sepuluh negara, semuanya kecuali dua negara yang berada di Sumatera dan Sulawesi. Aceh, sebagai Republik Islam Aceh (RIA), adalah salah satu dari enam negara Sumatera, dan Sulawesi Selatan satu dari dua negara di pulau itu. Selain dari delapan negara ini, barangkali sebagai tindakan mengambil hati terhadap RMS, terdapat Negara Maluku dan Negara Maluku Selatan. Secara menyolok tidak terdapat negara-negara di Jawa, seperti Negara Jawa Barat, bumi kelahiran gerakan Darul Islam, dan di Kalimantan Selatan, tempat Ibnu Hadjar beroperasi.

Kedua pihak memasuki federasi baru ini dengan rasa enggan. Perundingan-perundingan sebelumnya antara pemimpin-pemimpin Darul Islam dan PRRI/Permesta hampir tak ada hasilnya.

Sekalipun telah dijanjikan kerjasama dan dukungan militer, hal ini tidak pernah terlaksana. Dalam kedua pihak juga terdapat orang yang terangterangan menolak setiap bentuk kerja sama resmi. Di Sulawesi Selatan cumbu rayu Kahar Muzakkar dengan Permesta sebagian menjadi sebab menyerahnya Bahar Mattaliu, sementara di Aceh hubungan yang demikian merupakan salah satu faktor yang mendorong terbentuknya Dewan Revolusi. Pembelotan-pembelotan sekaligus memaksa kaum pejuang mujahidin Darul Islam yang tersisa untuk bekerja sama lebih erat dengan PRRI/Permesta.

Kaum pejuang mujahidin PRRI di Sumatera pada akhir 1959 terbagi dalam tiga kelompok yang berbeda, yang menganjurkan jalan yang berbedabeda. Satu kelompok ingin semata-mata melanjutkan PRRI, bagaimana pun sudah hampir tidak ada artinya lagi akibat aksi-aksi Angkatan Darat, Kelompok lain, dengan Zulkifli Lubis dan Maludin Simbolon sebagai wakil-wakil utamanya, menyetujui proklamasi Republik Indonesia Federal, sekalipun menentang kerja sama dengan Darul Islam. Faksi yang ketiga menyetujui bergabung dengan Darul Islam. Jurubicara utamanya adalah dua bekas perdana menteri, Mohammad Natsir dan Burhanuddin Harahap, dan politikus Indonesia yang berpengaruh, Sjafruddin Prawiranegara. Ketiga mereka ini lari dari Jakarta untuk bergabung dengan panglima-panglima daerah yang merasa tidak puas di Sumatera pada Desember 1957.

RPI tidak banyak harganya baik dalam arti militer atau pun arti politik. Persekutuan yang mengkhawatirkan antara orang-orang muslim seperti Daud Beureueh dan Kahar Muzakkar yang selama bertahuntahun telah bertempur untuk menegakkan dan mempertahankan Negara Islam Indonesia, orang-orang muslim yang terus-menerus dalam waktu yang lama menduduki jabatan-jabatan penting di Republik Indonesia, dan panglima-panglima militer seperti Maludin Simbolon Kawilarang, dan Warouw yang selama masa berikutnya telah memimpin aksi-aksi militer Republik Indonesia terhadap Darul Islam, dan beberapa orang dari mereka itu Kristen pula, sangatlah berbahaya. RPI mungkin mewakili, seperti yang dilukiskan Hasan Muhammad Tiro, suatu tindakan "untuk menjamin hak suci mereka untuk membentuk pemerintahan sendiri yang diingkari kediktatoran Soekarno di Jakarta yang memaksakan kolonialisme Jawa terhadap lebih dari selusin bangsa", atau penolakan terhadap "kolonialisme baru, Jawa sawo matang", tetapi hanya dendam terhadap Soekarno dan orang Jawa sajalah yang merupakan persamaan mereka.

Akibatnya, RPI sangat singkat usianya. Pada April 1961 Maludin Simbolon dan seorang panglima militer lain, Achmad Husein (Achmad Husein), memisahkan diri dari RPI untuk membentuk

Pemerintah Darurat Militer. Kemudian mereka mengeluarkan imbauan kepada para pejuang mujahidin untuk menghentikan perlawanan mereka dan menyerahkan diri pada Juni dan Juli. Pemimpin-pemimpin sipil menyusul setelah menerima janji diberi ampun oleh Soekarno. Sjafruddin Prawiranegara menasihati para pengikutnya untuk menyerah, dia sendiri melapor kepada penguasa pada akhir Agustus.

Ini berarti akhir yang sesungguhnya dari jihad suci menegakkan Negara Islam, termasuk jihad suci menegakkan Negara Islam Darul Islam di Aceh. Di sini pada bulan-bulan sebelumnya banyak orang telah melaporkan diri. Keamanan sepenuhnya pulih di Aceh, Mei 1962, ketika Daud Beureueh pun menghentikan perlawanannya.

Untuk merayakan perubahan Aceh dari Dar al harb, wilayah perang, ke Dar al-salam, daerah damai (untuk menggunakan ungkapan yang berlaku ketika itu), dan selanjutnya guna mengungkapkan pernyataan resmi akan persatuan Aceh yang telah pulih, diselenggarakan suatu upacara akbar pada akhir tahun itu, yaitu Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh (MKRA), yang berlangsung di Blangpadang dari 18 sampai 22 Desember 1962. Puncak hasilnya adalah Ikrar Blangpadang, yang ditandatangani tujuh ratus orang Aceh terkemuka yang hadir. Mereka berjanji akan memelihara dan membina kerukunan serta memancarkan persatuan dan persahabatan.

Sesudah itu Aceh tetap tenang selama kira-kira lima belas tahun. Pada awal 1977, ketika diberitakan lagi tentang kegiatan-kegiatan Darul Islam juga di Jawa dan bagian-bagian lain di Sumatera, Hasan Muhammad Tiro memproklamasikan Aceh sebagai negara merdeka. Dengan menamakan dirinya Ketua Front Pembebasan Nasional dan Kepala Negara, ia kembali ke Aceh untuk secara pribadi memimpin perjuangan Gerakan Aceh Merdeka, tetapi gerakan ini tidak banyak memperoleh momentum.

Bab Delapan

Kartosoewirjo Tertangkap

Kekuatan perjuangan Darul Islam yang diproklamasikan oleh Kartosoewirjo sesungguhnya terletak dalam kemampuan untuk mengatur, menyusun dan menyelenggarakan susunan ketentaraan dan susunan organisasi kenegaraan NII. Pergerakan menuju berdirinya Negara Islam Indonesia sejak tahun 1939 telah dirumuskan dengan langkah langkah yang jelas, namun mengapa pada akhirnya mujahid besar ini ditangkap lawan dan ditinggalkan para pengawalnya sendiri, ini merupakan hal yang menarik untuk dicermati. Bila kita lakukan kilas balik, maka dalam sebuah konferensi di Cisayong, bersama para Ulama dalam Majlis Islam, telah disepakati bahwa langkah perjuangan haruslah melalui langkah langkah berikut :

1. Mendidik rakyat agar cocok menjadi warga negara Islam.
2. Memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa Islam tidak bisa dimenangkan dengan Feblisit (referendum)
3. Membangun daerah daerah basis.
4. Memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia.
5. Membangun Negara Islam Indonesia sehingga kokoh ke luar dan ke dalam, dalam arti, di dalam negeri bisa melaksanakan syari'at Islam seluas luasnya dan sesempurna sempurnanya, sedang keluar, sanggup berdiri sejajar dengan negara negara lain.
6. Membantu perjuangan muslimin di negeri negeri lain sehingga cepat bisa melaksanakan wajib sucinya.
7. Bersama negara negara Islam membentuk Dewan Imamah Dunia untuk mengangkat Kholifah dunia.

Tahapan tahapan di atas demikian realistis, jauh dari kesan tergesa gesa, atau perlawanan sekedar karena tidak kebagian jatah kekuasaan, tetapi muncul dari kebeningan hati, keteguhan jiwa dan langkah langkah yang istiqomah dalam tahapan yang demikian sistematik.

Namun pada dataran praktis, kita lihat rencana tadi tidak berjalan dengan mulus, tragedi "Nabi Musa AS" dan kepedihan yang menimpa "Nabi Isa AS" dialami secara berbarengan. Jika Nabi Isa adalah sosok pembawa risalah, namun sayang didukung oleh Anshorulloh yang sangat sedikit. Dan bila Nabi Musa walaupun memiliki ummat banyak, namun kualitasnya demikian payah, sehingga banyaknya ummat bukannya membantu malah jadi beban dan membuat kinerja menjadi lambat. Maka demikian pula yang dialami Imam Kartosoewirjo dalam meneratas jalan jihadnya. Beliau berhasil mengkader sosok sosok pilihan dalam Institut Suffah, figur figur yang

memiliki sebersih bersih tauhid, setinggi tinggi ilmu dan sepandai pandai siasat. Namun sayang jumlahnya tidak banyak, dan sebagai pejuang, para pemimpin mujahidin tampil di gelanggang terdepan perjuangan, sehingga satu demi satu bunga Negara Islam Indonesia ini gugur sebagai Syuhada. Dan pada giliran berikutnya, ketika perang Totaliter terus berlanjut, rakyat banyak yang bersimpati pada Negara Islam ini, bahkan berbondong bondong menjadi warga dan tentara Islam, namun pengkaderan berbobot semacam Institut Suffah tidak sempat lagi dilakukan. Pada akhirnya mereka yang berduyun duyun meninggalkan Republik Indonesia di saat perjuangan bersenjata NII tengah naik daun ini, mereka itu pula yang berbondong bondong kembali ke pangkuan ibu pertiwi mereka, di saat kekuatan NII terdesak.

Disamping itu Kartosoewirjo juga pandai menggunakan situasi kondisi politik dan militer dalam menyusun dan mengatur administrasi pemerintah NII yang dia selalu sesuaikan dengan keadaan yang berlaku atau dengan perubahan-perubahan keadaan di dalam maupun di luar negeri. Setiap perubahan dan perkembangan politik telah dijadikan dasar pertimbangannya dalam mengatur dan menyempurnakan susunan pemerintahan.

Tentara Nasional Indonesia, sebagai tulang punggung Republik Indonesia mempersiapkan rencana operasi untuk menghancurkan Negara Islam Indonesia ini, peperangan antara RI dan NII benar benar total meliputi segala aspek kehidupan, mulai dari perang propaganda, perang intellijen sampai penghancuran satuan satuan militer TII. Keberhasilan TNI menghancurkan TII didahului dengan keberhasilan operasi intellijen.

Pada tahun 1951 Sersan Mayor Ukon Sukandi yang bertugas sebagai intel dengan nama samaran Sukarta, memperoleh informasi adanya bekas komandan/tokoh TII, dari Batalyon Kalipaksi yang berkedudukan di Garut, bernama Ali Murtado, telah melemah semangat tempurnya dan kembali ke kota. Ukon Sukandi mendatanginya dan berusaha merebut simpati bekas komandan ini dengan berbagai kebaikan. Ali Murtado tertarik dengan segala kebaikan Ukon Sukandi tadi bahkan Ali Murtado melaporkan pada pimpinan TII di atasnya –pamannya sendiri- Bapak Sujai bahwa Ukon Sukandi ini pantas untuk direkrut demi kepentingan TII dalam menjalankan aksi intellijen di kota.

Sebaliknya Sersan Mayor Ukon Sukandi pun melaporkan pada atasannya bahwa Ali Murtado berhasil didekati dan bisa diperalat, diserap informasinya bahkan bisa menjadi jalan bagi masuknya operasi intellijen TNI ke dalam tubuh TII. Lewat Ali Murtado inilah Ukon Sukandi berhasil menipu Bapak Sudjai, ia memberikan banyak bantuan kepada komandan TII tersebut, baik berupa uang, pakaian. Alat alat tulis, surat kabar, dan surat pribadinya yang menunjukan

rasa simpati terhadap perjuangan Negara Islam. Bapak Sudjai terkecoh dengan kemurahan ini, kemudian ia mengirim surat balasan pada Ukon Sukandi bahkan dalam surat itu ia menjelaskan dirinya sudah mengusulkan kepada Panglima Wilayah Divisi I Sunan Rahmat TII, Agus Abdullah agar mengangkat Ali Murtado sebagai petugas khusus di Jakarta, yang setiap saat bisa dihubungi oleh Ukon Sukandi.

Dua hari kemudian datang surat penetapan dari Komandan Divisi I Sunan Rahmat TII, Agus Abdullah yang menetapkan dan mengangkat Ali Murtado sebagai Kepala Pos Hubungan Wilayah I dan berkedudukan di Jakarta. Penugasan ini terasa membawa dampak positif bagi lalu lintas surat menyurat untuk kepentingan perjuangan NII, dan Agus Abdullah melaporkan hal positif ini kepada Imam Kartosoewirjo, yang selanjutnya Imam memerintahkan Agus Abdullah untuk meningkatkan hubungan dan kegiatan di Jakarta, bahkan kalau memungkinkan dibentuk perwakilan pemerintah NII di Jakarta. Akhirnya Agus Abdullah memerintahkan kepada Ali Murtado untuk menyusun personalia guna mengisi jabatan dalam perwakilan Pemerintah NII di Jakarta. Kartosoewirjo mempercayai Ali Murtado, karena usulan ini datang dari orang kepercayaan Kartosoewirjo sendiri di Jawa Barat (Komandan Divisi).

Ali Murtado menyampaikan surat ini kepada Ukon Sukandi, segera saja ia membahasnya bersama Komandan Intellijen TNI, Letnan Muda Satiri dan Kepala seksi I KMKB – DR (Komando Militer Kota Besar Djakarta raya) , Lettu Suhadi. Dengan persetujuan Seksi I KMKB – DR, setelah berhasil menyusupkan anggota kepolisian dari seksi Djatinegara, segera Ukon Sukandi dan Ali Murtado menyusun personalia perwakilan Pemerintah NII sebagai berikut :

Komandan : Ali Murtado
Wakil Komandan : Sukarta (nama samaran Sersan Mayor TNI Ukon Sukandi)
Kepala Kepolisian : Among (Anggota POLRI sesksi Djatinegara)

Perwakilan pemerintahan ini menunjukkan keberhasilan kerja yang lumayan (maklum karena memang disponsori oleh agen intellijen RI), ketika Sukarta berhasil meluluskan transaksi jual beli senjata. Walaupun akhirnya senjata yang telah berhasil dibeli NII itu berhasil dirampas kembali dalam sebuah pemeriksaan truk di jalan Karawang – Purwakarta. Terbongkarnya truk yang membawa senjata ini bukanlah kebetulan, namun demikianlah rencana TNI untuk menjebak aparat NII yang telah berhasil disusupinya.

Meskipun senjata yang berhasil dibeli NII itu gagal tiba di tempat tujuan, namun kepercayaan pemerintah pusat terhadap perwakilan pemerintah NII di Jakarta tidak hilang, karena pihak intellijen RI berhasil membuat alibi, seakan akan kebocoran itu bukan disebabkan adanya unsur

kontra intellijen RI di tubuh NII tetapi karena kecerobahan para prajurit TII sendiri di Karawang. Pada tahun itu juga Agus Abdullah memberitahukan Ali Murtado dan Sukarta bahwa Kolonel TII, wakil Komandan wilayah I Sunan Rahmat akan datang mengontrol pasukan ke Jakarta, sebab sebelumnya Sukarta berhasil menipu Ali Murtado dengan mengatakan bahwa dirinya berhasil menyusun satuan satuan rakyat terlatih yang mendukung perjuangan NII.

Ketika Kolonel TII Sohby datang ke Jakarta dan menyatakan keinginannya untuk menginspeksi pasukan, Sukarta menyampaikan alasan bahwa para prajurit yang dilatihnya tersebar di berbagai wilayah Jakarta, dan ia minta waktu dua hari saja untuk mengumpulkan mereka. Untuk memenuhi keinginan ini dan demi memperkuat rasa percaya pemerintah NII terhadap dirinya, maka "simunafiq" Ukon Sukandi ini mengontak pimpinan intel Jakarta untuk meminjam beberapa puluh karaben dari Detasemen Markas. Bersamaan dengan itu juga dikumpulkan 40 orang intel yang secara kilat dilatih tatacara upacara militer TII oleh Ali Murtadho. untuk hadir di sekitar Rawa Buaya daerah Tangerang, berpura pura sebagai pasukan TII yang siap menyambut kedatangan komandannya.

Kolonel TII Sohby menyatakan kepuasaannya melihat kesigapan 'para prajurit' itu, bahkan mengomentari, "sekalipun berada di daerah jantung musuh, namu semangat dan disiplinnya melibihi pasukan TII yang kini beroperasi di gunung gunung." Selama seminggu di Jakarta Sohby menyuruh Ali Murtado untuk mengetik surat buat Imam Kartosoewirjo dan kepada Agus Abdullah dan ditembuskan kepada semua panglima wilayah TII, bahwa setelah mendapat restu dari Imam NII ia (Kolonel TII Sohby) akan melanjutkan tugasnya sebagai Duta Keliling di luar negeri .

Berita ini tentu saja amat bernilai di mata intellijen RI, Sersan Mayoor Ukon Sukandi segera saja melaporkan hal ini kepada Kepala Seksi I Komando Militer Kota Besar Djakarta Raya. Si munafik Ukon Sukandi mengusulkan agar Sohby tidak ditangkap di Jakarta, sebab itu akan menimbulkan kecurigaan pemerintah pusat NII kepadanya. Akhirnya Sohby dijebak di Bogor, sekaligus Ukon Sukandi memfitnah, melaporkan pada pemerintah pusat, bahwa tertangkapnya Duta besar keliling NII ini disebabkan pengkhianatan A.M Firdaus. Dengan demikian pihak TNI berhasil menghancurkan dua orang sosok pilihan Negara Islam sekaligus. Sohby ditangkapnya, sedang tentara Islam yang asli A.M. Firdaus dihukum mati oleh kawannya sendiri.

Ukon Sukandi sendiri semakin dipercaya oleh Komandan Divisi I TII Sunan Rahmat, ketika ia menyatakan kesiapannya untuk membujuk dan menyogok perwira TNI untuk membebaskan Kolonel TII Sohby yang tertangkap itu. Agus Abdullah menyetujui rencana itu, bahkan sekalian

meminta Ukon Sukandi untuk membeli beberapa peti peluru untuk pasukan TII yang dipimpin Letkol TII Ahmad Sungkawa. Ukon Sukandi berhasil membobol keuangan NII dengan cara menjual peluru jelek yang bisa membuat senjata rusak, disamping itu Sohby pun sengaja dilepaskan, dengan skenario melarikan diri loncat dari pickup di tikungan Jalan Setiabudi, tanjakan Lembang Bandung. Dan dalam upaya melarikan diri itulah Sohby ditembak dengan penembakan yang sudah dipersiapkan, sehingga terjangan peluru sulit dihindarkan. Licin sekali siasat ini, Ukon Sukandi sempurna melaksanakan tugasnya. Tanpa curiga karir si munafik ini terus menanjak, ia berhasil menguasai KBW I NII (Kantor Berita Wilayah) yang berdasarkan keputusan Kartosoewirjo semua surat keluar masuk pulau Jawa harus melalui Jakarta. Demikian strategisnya posisi yang berhasil dicaplok Ukon Sukandi sehingga seluruh jaringan Koordinasi Pemerintah Pusat NII dengan wilayah lainnya berhasil d lacak lewat KBW I Jakarta ini.

Tidak Heran bila pada tahun 1953 KUKT APNII Abdul Fatah Tanu Wirananggapati yang baru saja pulang menggalang wilayah Aceh menjadi bagian dari NII, tertangkap di Jakarta. Penyusupan yang dilakukan lewat Ukon Sukandi dengan memperalat Ali Murtado ini, terus berkembang, sehingga pada tahun 1955, di Bandung saja, antara pejuang TII asli dengan pasukan Intellijen RI yang berhasil disusupkan sudah fifty-fifty . Akibatnya mudah diduga, apapun perintah Kartosoewirjo dalam mengatur strategi perang, dengan mudah digagalkan oleh TNI. Ini diakibatkan oleh kecerobohan aparat TII yang dengan mudahnya menerima kembali seorang yang telah berhenti berjuang dan kembali ke kota (Ali Murtado), yang kemudian hanya karena dianggap berhasil merekrut seorang kader potensial, langsung diangkat kembali untuk menjabat posisi penting, tanpa memproses pelanggarannya.

Kartosoewirjo semakin terdesak , secara militer digerogoti oleh agen agen kontra intellijen RI, dan secara politik dengan semakin menancapnya kuku kekuasaan Presiden Sukarno. Dekrit Presiden Soekarno tanggal 5 Juli 1959 di mana Presiden Soekarno mengemukakan dasar-dasar yang akan dijadikan GBHN, dan kemudian terkenal sebagai Manipol USDEK. Pada waktu itu bagi Kartosoewirjo sudah jelas, bahwa setelah Soekarno dapat memegang kembali kekuasaan di tangannya, bagi Negara Islam Indonesia akan timbul masa-masa yang sulit.

Dalang peperangan strategi pertempuran masing masing negara bisa berbah sesuai keperluan, pimpinan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 1958 merevisi doktrin militer yang selama itu dipraktekkan . Hasilnya adalah konsep Perang Wilayah dengan dasar pemikiran, bahwa tanpa adanya bantuan aktif dari masyarakat, perjuangan suci tidak akan dapat ditumpas. Untuk itu keadaan masyarakat harus distabilisasikan dan cara berpikir yang konstruktif serta integrasi nasional perlu didukung untuk mencapai partisipasi yang aktif dari rakyat dalam tugas-

tugas pertahanan. Yang bertanggung jawab atas pelaksanaan doktrin Perang Wilayah adalah Pangdam Siliwangi, Ibrahim Adjie, yang pernah menjabat sebagai atase militer di Beograd.

Rupanya Ibrahim Adjie berorientasi pada pengalaman perang gerilya Jugoslavia selama perang dunia kedua. Kemudian konsep Perang Wilayah disyahkan oleh Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960.

Namun sebelumnya, pada bulan Februari 1959 telah disusun "Petunjuk Pokok Pelaksanaan Pemulihan Keamanan (P4K) yang bersandar pada konsep Perang Wilayah dan yang merupakan suatu petunjuk untuk penggunaan seluruh sarana militer seefisien mungkin. Akhirnya lahirlah Rencana Pokok 2.1. (RP 2.1.) untuk membatasi kebebasan bergerak lawan sehingga lawan terdorong ke dalam daerah-daerah tertentu yang kemudian diselesaikan satu per satu. Untuk melaksanakan rencana tersebut, pada bulan Desember 1959 disusun Rencana Operasi 2.1.2. dan kemudian pada bulan Februari 1961 dikeluarkan RO 2.1.2.1. yang merupakan percepatan dari Rencana Operasi 2.1.2. Kalau dalam RO 2.1.2. pemulihan keamanan wilayah Jawa Barat direncanakan dalam waktu 5 tahun, yaitu sampai tahun 1965, dalam RO 2.1.2.1. waktu dipercepat sampai akhir tahun 1962.

Tak lama setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit kembali ke Undang-Undang Dasar 45, di seluruh Jawa Barat serempak Operasi Wilayah GERAK, TANAH dan GODAM. Sesuai dengan Rencana Pokok 2.1.2. wilayah Jawa Barat dibagi menjadi tiga daerah operasi, Daerah Operasi A (DO-A), dimana telah tercapai normalisasi keadaan, Daerah Operasi B (DO-B) yang sudah dikontrol oleh TNI tetapi belum 100 % bersih dari pemberontak Darul Islam dan Daerah Operasi C (DO-C) yang masih sepenuhnya dikontrol oleh perjuangan suci Darul Islam. Pihak militer dengan demikian menjiplak sistem D.I/D.II/D.III yang dipraktekkan perjuangan suci Darul Islam.

Penumpasan dan pengisolasian perjuangan suci Darul Islam dimulai pada pertengahan tahun 1960 di Kabupaten Lebak (DO-C 19) yang termasuk Korem Banten, untuk menutup kemungkinan adanya anggota pejuang mujahid Darul Islam dapat menyeberang ke Sumatra. Di daerah Banten ini juga untuk pertama kali penduduk setempat diikut sertakan dalam operasi militer yang mula-mula dinamakan sebagai "Perang Bedok" dan kemudian terkenal sebagai sistem "Pagar Betis". Pada mulanya sistem ini kurang berhasil, namun setelah ada perbaikan maka sistem Pagar Betis merupakan salah satu syarat untuk berhasil dalam peningkatan dan pengisolasian Tentara Islam Indonesia, terutama di daerah Banten dan Priangan.

Situasi yang demikian menjepit, dimana rakyat yang semula berpartisifasi aktif dalam mempertahankan berdirinya negara Islam Indonesia, perlahan lahan menarik bantuannya. Hal ini

disebabkan oleh dua hal, pertama, akibat adanya usaha usaha musuh NII yang membuat satuan satuan TII palsu yang melakukan tindakan tindakan kejam terhadap rakyat, dimana mereka membunuh, membakar dan merampok, sedang pada saat melakukan tindakan keji itu mereka menggunakan tanda tanda yang membuat mereka dikenal sebagai gerilyawan NII. Ke dua, akibat tekanan TNI, dimana seluruh rakyat harus terlibat dalam gerakan "Pagar Betis", jika menolak, maka langsung dituduh sebagai pendukung NII. Pada saat saat genting itu Imam Kartosoewirjo mengeluarkan sebuah "washijat" sebagai berikut. :

WASHIJAT IMAM NEGARA ISLAM INDONESIA S.M. KARTOSOEWIRJO

Bismillaahirrohmaanirrohiem

Washijat Imam pada pertemuan dengan para Panglima/Pradjurit (Mudjahid) pada tahun 1959 diantaranja berbunyi begini : "saja (Imam) melihat tanda tanda bentjana angin jang akan menjapu bersih seluruh mudjahid ketjuali jang tertinggal hanya serah/bidji mudjahid yang benar2 memperdjuangkan/mempertahankan tetap tegaknja Negara islam Indonesia sebagaimana diproklamasikan tanggal 7 Agustus 1949. Disa'at terdjadinja bentjana angin tersebut ingatlah akan semua Washijat saja ini :

1. Kawan akan mendjadi lawan, dan lawan akan mendjadi kawan.
2. Panglima akan mendjadi Pradjurit, Pradjurit akan mendjadi Panglima.
3. Mudjahid djadi luar Mudjahid, luar Mudjahid djadi Mudjahid.
4. Djika mudjahid telah ingkar, ingatlah;"Itu lebih djahat dari iblis", sebab dia mengetahui Strategi dan Rahasia perdjuangan kita, sedang musuh tidak mengetahui. Demi kelandjutan tetap berdirinja Negara Islam Indonesia, maka tembaklah dia.
5. Djika Imam berhalangan, dan kalian terputus hubungan dengan Panglima, dan jang tertinggal hanja Pradjurit petit sadja maka Pradjurit petit harus sanggup tampil djadi Imam.
6. Djika Imam menjerah tembaklah saja, sebab itu berarti iblis. Djika Imam memerintahkan terus berdjuang, ikutila saja sebagai hamba Alloh SWT.
7. Djika kalian kehilangan sjarat berdjuang, teruskanlah perdjuangan selama Pantja sila masih ada, walaupun gigi tinggal satu, dan gunakanlah gigi jang stu itu untuk mengigit.
8. Djika kalian masih dalam keadaan djihad, ingat rasa aman itu, sebagai ratjun.

   Washijat di atas seharusnya dipegang oleh setiap Tentara Islam, sebagai amanat perpisahan, dimana sekalipun setelah ini mereka tidak lagi bertemu dengan Imam. Perjuangan tidak boleh terhenti apalagi menyerah, sebab selama kebathilan masih tegak,

maka selama itu perlawanan harus dilanjutkan, sekalipun yang tersisa tinggal satu gigi, maka gunakanlah gigi yang tinggal satu itu untuk menggigit !

Di pihak lain TNI dalam merealisasikan Konsep Perang wilayah tersebut, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ini merencanakan Operasi Cepat I-XII dari tanggal 1 Januari 1961 sampai 31 Januari 1962, Operasi Brata Yudha I-IV dari bulan Maret sampai bulan Juni 1962 dan Operasi Pamungkas dari bulan Agustus 1962 sampai bulan Januari 1963, yang akan merupakan operasi militer terakhir.

Dalam keadaan terdesak pihak pejuang mujahid Darul Islam pada tanggal 11 Juni 1961 mengeluarkan "Perintah Perang Semesta" (PPS) yang tidak ditandatangani oleh Kartosoewirjo, melainkan oleh Taruna, seorang sekretaris pribadi Kartosoewirjo. Tapi tanpa melihat siapa yang mengeluarkan perintah tersebut, PPS tidak dapat lagi mencegah berakhirnya perjuangan suci Darul Islam. Sebab sementara itu kesatuan-kesatuan TII di daerah Banten, Pangrango-Gede, Burangrang dan Tangkuban Perahu telah dapat ditumpas atau mereka menyerah kepada pasukan pemerintah dalam rangka pemberian amnesti yang berlaku sampai bulan Oktober 1961. Juga peningkatan perjuangan suci Darul Islam yang dilakukan terus menerus oleh pasukan TNI menyulitkan komunikasi antara masing-masing kelompok kesatuan TII.

Sebagai akibat "Perintah Perang Semesta" yang merupakan reaksi terhadap penumpasan perjuangan suci Darul Islam di daerah Banten, kini TII melakukan tindakan balasan terhadap TNI dimana banyak jumlah korban dari pihak TNI ketika kesatuan-kesatuan TNI di pedalaman dihadang oleh pejuang mujahidin TII atau perkemahan mereka diserang pada malam hari. Pada bulan September 1961 Menteri Keamanan Nasional A.H. Nasution mengeluarkan suatu instruksi tentang pelaksanaan kebijaksanaan terhadap pejuang mujahidin TII yang menyerang dalam rangka amnesti yang dikeluarkan pemerintah. Mereka dibagi ke dalam lima golongan, yaitu golongan A yang terdiri dari pemikir, pejabat dan menteri; golongan B terdiri dari perwira; golongan C hanya terdiri dari para pengikut saja dan golongan D adalah mereka yang tidak tercantum dalam A-C golongan terakhir yaitu golongan X adalah warga asing. Untuk golongan A ditetapkan, bahwa mereka dipulangkan ke tempat asalnya dan diberi lapangan kerja. Juga mereka yang termasuk golongan B di bagikan lapangan kerja atau mereka dipekerjakan di perusahaan negara asal mereka memenuhi syarat. Sebaliknya mereka yang termasuk golongan C ditransmigrasikan. Bagi semua yang termasuk dalam kelima golongan tersebut di atas dikenakan "karantina politik" dan mereka tidak boleh turut lagi dalam kegiatan politik. Pada bulan November A.H. Nasution mengeluarkan suatu instruksi lagi "tentang petunjuk persoalan khusus dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan terhadap pejuangan mujahidin Darul Islam

yang menyerah". Berdasarkan instruksi tersebut masing-masing golongan A sampai D dibagi-bagi lagi kedalam golongan-golongan yang lebih kecil. Dengan demikian Kartosoewirjo sekarang termasuk golongan A1.

Tetapi Kartosoewirjo tidak menyerah, meskipun dia sadar bahwa akhir perjuangan sucinya telah dekat. Bahkan dengan semangat juang yang tinggi Kartosoewirjo masih berpidato di markasnya di daerah gunung Galunggung untuk meneguhkan moral para pejuang mujahidin, dan dia mengatakan antara lain bahwa "untuk memasuki gedung Darul Islam itu tidak tanpa melalui proses pengaliran darah secara besar-besaran". Dalam sindiran terhadap tauhid, Kartosoewirjo mengatakan bahwa kalau di dalam suatu negeri terdapat dua kepala negara, maka salah satu dari mereka, Soekarno atau dia harus menyingkir.

Pada tanggal 2 Januari 1962 Panglima Siliwangi Ibrahim Adjie mengeluarkan perintah harian kepada pasukannya. Sementara itu kesatuan-kesatuan Darul Islam yang bermarkas di Cakrabuana dan Galunggung, dimana diperkirakan juga terdapat markas Kartosoewirjo, menghadapi pengepungan total. Pengepungan terhadap para pejuang mujahidin TII hanya dimungkinkan berdasarkan partisipasi rakyat dalam sistem Pagar Betis. Dengan demikian di Kecamatan Ciawi dikerahkan 5653 orang yang dibagi atas 1127 pos penjagaan. Sementara itu pemimpin-pemimpin Darul Islam, diantaranya Zainal Abidin dan Ateng Djaelani telah menyerah kepada pasukan pemerintah RI.

Pada tanggal 1 April 1962 mulai dilancarkan Operasi Brata Yudha I. Dalam operasi ini daerah operasi dibagi menjadi 4 Kuru Setra, suatu istilah yang diambil dari epos Brata Yudha. Yakni: Kuru Setra I (DO-C-5) yang meliputi seluruh kompleks Gunung Galunggung; Kuru Setra II (DO-C 8-9) meliputi kompleks Guntur dan Batara Guru; dalam Kuru Setra III (DO-C 6) termasuk Rangas dan Baroko dan Kuru Setra IV (DO-C 12) meliputi kompleks Cimareme. Pada tanggal 24 April 1962 terjadi pertempuran antara pasukan TII dengan pasukan TNI di daerah Bandung Selatan tepatnya di Gunung Pedang dekat desa Cipaku. Dalam pertempuran tersebut Kartosoewirjo tertembak di pantatnya. Perjuangan yang penuh dengan segala resiko tetap diperlihatkan Kartosoewirjo dengan para pejuang mujahidin TII untuk mempertahankan cita-cita bersama, agar tetap tegaknya negara yang sudah diproklamasikan.

Pada bulan Mei 1962 Toha Machfoed dan Danoe Moehammad Hasan —yang sementara itu telah meletakkan senjata— menyerukan kepada Kartosoewirjo, Agus Abdullah dan Adah Djaelani Tirtapradja agar mereka menghentikan perlawanannya setelah banyak pemimpin pejuang mujahidin Darul Islam bersama-sama dengan pasukannya menyerahkan diri kepada tentara RI.

Satu-satu pejuang Islam turun dan menyerahkan diri, lebih memilih menjadi murtad, fasiq dan dzhalim ketimbang menghadapi kenyataan "terbunuh" atau "menang". Spirit untuk menang begitu terbatas sehingga satu-per-satu pejuang-pejuang itu berusaha untuk melepaskan diri dari tali Allah dan mulai meyakini tali RI yang dirajut oleh Soekarno dan tokoh-tokoh jahilayah lainnya.

Pada akhir bulan Mei, Adah Djaelani Tirtapradja, seorang Komandan Wilayah dari pejuang Darul Islam, menyerahkan diri kepada Pos Pagar Betis di Gunung Cibitung. Maka dengan menyerahnya Adah Djaelani, tokoh-tokoh pejuang mujahid Darul Islam yang masih tinggal di hutan hanyalah Kartosoewirjo dan Agus Abdullah, "Panglima APNII untuk Jawa dan Madura". Tidak ada istilah menyerah terhadap musuh, juga tidak ada istilah bunuh diri jika menghadapi musuh dengan kekuatan besar. Yang ada hanya maju terus untuk mati atau tertawan untuk masuk penjara dan tetap konsisten mempertahankan keyakinan hingga ajal merenggut. Itulah kemenangan terbesar bagi mujahidin yang berperang di jalan Allah. Inilah pilihan-pilihan yang sangat terbatas dalam etika perang Islam.

Setelah Negara Islam Indonesia kehilangan ideolog ideolog nya, ummat satu persatu luntur daya tahan juangnya. Warga Negara Islam Berjuang yang tadinya telah berjanji, "sungguh sungguh dan setia hati akan membela pimpinan dan komandan tentara Islam daripada bencana dan khianat dari mana dan apapun juga" satu demi satu melupakan janjinya, dan turun meninggalkan Imam. Mereka seakan akan Ummat Nabi Musa AS yang berkata kepada nabi mereka : ".. Pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja." Apa yang dialami Cucu Rasulullah SAW terulang pada dirinya. Ribuan orang berbai'at pada saat perjuangan hendak dimulai, tapi ribuan orang pula melepas bai'atnya ketika ancaman kematian telah di depan mata. Namun sebagai pejuang yang istiqomah, yang ditempa oleh tekad yang bulat, bukan sekedar terombang ambing keadaan. Kita akan melihat nanti, dalam kesendiriannya pun Kartosoewirjo tetap kukuh dengan prinsip prinsipnya.

Pasukan tentara "Jalut" RI dengan segala kebenciannya yang menggumpal di dada berusaha dengan segala cara untuk memojokkan dan mempersempit ruang gerak kaum gerilyawan mujahidin Darul Islam. Menjelang hari-hari pertama bulan Juni, Kompi C Batalyon Kujang II Siliwangi mengejar satu kelompok pasukan Darul Islam yang sedang berjalan pulang ke markas mereka. Tidak hanya tentara mujahidin Darul Islam yang diserang, rakyat sipil kampung pun disikat habis oleh tentara RI sehingga para mujahin tidak ada lagi yang mensuplai makanan dan logistik lainnya. Sudah sejak akhir bulan April Letda Suhanda Komandan Kompi tersebut mengetahui bahwa markas Kartosoewirjo berada di daerah dimana sedang diadakan gerakan operasi. Keadaan pasukan Darul Islam yang lapar selama tiga bulan hanya makan dedaunan,

menjadikan semua daunan di hutan sebagai lahapan segar para mujahid agung. Tentara RI semakin yakin bahwa pasukan-pasukan Darul Islam tinggal menunggu ajalnya dan terus-menerus digempur dengan segala kekuatan. Kejakinan tersebut diperolehnya dari benda-benda yang ditinggalkan anggota pejuang suci Darul Islam sewaktu mereka melarikan diri dan yang mengandung petunjuk tentang kehadiran Kartosoewirjo di daerah ini. Maka jelaslah pula bagi Komandan Kompi Suhanda, bahwa di depan mereka terdapat sebuah pasukan TII yang kuat.

Karena telah kehilangan jejak-jejak pasukan TII tersebut, Suhanda membagi kesatuannya menjadi tiga Peleton yang masing-masing terdiri dari 45 anggota tentara, agar secara terpisah dapat melanjutkan pencarian. Pada tanggal 4 Juni anggota pengintai dari pasukan Suhanda menemukan pada waktu turun hujan deras yang disertai angin kencang, sebuah tempat persembunyian TII yang terdapat di sebuah lembah antara Gunung Sangkar dan Gunung Geber.

Pos-pos penjagaan DI yang ditempatkan di bukit-bukit tidak dapat mendengar apa-apa karena hujan yang deras dan dengan demikian pasukan Suhanda dapat melangkah maju sampai sebuah pohon yang roboh. Dari tempat itu dalam kejauhan kurang-lebih 50 meter mereka dapat melihat sebuah gubuk yang dibangun secara darurat di bawah sebuah pohon rimba, yang cabang-cabangnya hampir menyentuh tanah. Ketika Suhanda memerintahkan pasukannya untuk melepaskan tembakan serbuan, kesatuannya juga ditembak dari arah bukit-bukit, namun anggota pasukannya yang lain dapat mematahkan perlawanan pasukan Darul Islam yang ditempatkan di situ. Setelah dari arah gubuk itu tidak ada lagi perlawanan karena memang sudah tidak adanya amunisi, Suhanda mendekati gubuk itu dan bertanya, "Siapa komandannya di situ?". Kepadanya ditunjukkan sebuah gubuk berikutnya yang terletak di belakang gubuk pertama. Di gubuk tersebut mereka menemukan Kartosoewirjo, putranya Darda dan Atjeng Kurnia; seluruhnya yang menyerah berjumlah 46 orang. Kartosoewirjo menanyakan nama Suhanda, dan Suhanda bertanya, apakah Kartosoewirjo masih dapat berjalan kaki, tetapi Kartosoewirjo menyatakan tidak. Dia dalam keadaan sakit payah terbaring di lantai gubuk itu dan mengenakan sebuah jaket militer dan sebuah sarung. Pada saat itu usia Kartosoewirjo sudah 57 tahun.

Suhanda menyuruh anggota pasukannya untuk membuat sebuah tandu untuk Kartosoewirjo yang dibikin dari cabang-cabang pohon, rotan dan mantel. Sejam setelah dia memerintahkan kelompok pertama pasukannya untuk turun, Suhanda menyusul dengan Kartosoewirjo, dengan membawa sisa tawanan dan semua dokumen. Untuk melewati danau Petalengan, Kartosoewirjo minta istirahat. Suhanda mengabulkan permintaan Kartosoewirjo. Barulah menjelang malam hari pasukan ini sampai pada desa terdekat di mana ratusan penduduk desa dengan membawa obor yang menyala menyambut kedatangan Kartosoewirjo yang selanjutnya Kartosoewirjo,

putranya Darda dan Atjeng Kurnia dari desa tersebut dibawa ke Cicalengka. Dari kota itu Kartosoewirjo dengan mobil ambulans dibawa ke markas Ibrahim Adjie dan seterusnya ke Garut. Dan pada tanggal 7 Agustus Kartosoewirjo dibawa dari Bandung ke Jakarta.

Setelah tertawan, Kartosoewirjo dipaksa untuk mencabut proklamasi, membatalkan jihad dan menyatakan menyerah. Namun ketiga hal ini ditolak oleh Kartosoewirjo. Akhirnya pihak TNI berhasil mengintimidasi anak Kartosoewirjo untuk menyusun sebuah perintah harian yang diatasnamakan ayahnya, sebagai berikut :

"Kepada seluruh anggota APNII dan Jama'atul Mujahidin di manapun mereka berada untuk menghentikan tembak menembak dan permusuhan antara APNII dan TNI/APRI dan melaporkan diri kepada pos-pos TNI yang terdekat dengan membawa segala alat perang dan dokumen-dokumen". "Segala pertanggung jawab dlohir-bathin dan dunia achirat yang boleh tumbuh daripada perintah Harian ini menjadi pikulan kami selaku Imam-Plm T.- APNII sepenuhnja".

Perintah harian yang dikeluarkan atas nama Imam NII ini disebarkan kemana mana, dan berhasil meruntuhkan daya perjuangan pasukan TII yang masih ada di dalam hutan, karena tertipu oleh bunyi perintah itu –yang seakan akan pertanggung jawaban itu resmi dari Imam. Karena kondisi kesehatan Kartosoewirjo kurang baik sewaktu tertawan, maka dia mendapat perawatan dokter. Menurut diagnose dokter, ada beberapa penyakit yang dideritanya, diantaranya adalah, dia menderita penyakit gula (diabetes), pembengkakan hati, denyutan jantungnya kurang teratur dan juga menderita kekurangan gizi.

Setelah kesehatan Kartosoewirjo pulih kembali, mulailah diadakan penyelidikan-penyelidikan dan pemeriksaan untuk dapat mengadili perkara tersangka S.M. Kartosoewirjo. Tes analisa dilakukan ketika S.M. Kartosoewirjo berumur 57 tahun, di kamar tahanannya setelah tertangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Hasil evaluasi didasarkan pada penilaian grafologis dari tulisan tangan berupa buku harian dari tahun 1960. Di samping itu, juga melalui observasi dan analisa pembicaraan sewaktu diadakan introgasi oleh AS-1 KASKODAM VI/Slw, 27 Juni 1962. Dan observasi sewaktu diadakan interview oleh PA ROKDAM V1/Siliwangi 18 Juli 1962.

Kecerdasan SM. Kartosoewirjo, berdasarkan hasil evaluasi psychologi adalah bertarap tinggi. Mutunya tidak bertitik berat pada kemampuan akademis semata-mata, melainkan juga pada penggunaan fungsi-fungsi intelektual yang ada padanya. Mengingat pada umurnya yang sudah agak lanjut, fungsi intelektual ini masih tampak baik. Bahkan daya ingat, yang pada tarap umur ini biasanya sudah mulai berkurang, hanya memperlihatkan kemunduran sedikit. Di dalam

struktur kecerdasannya terdapat keseimbangan antara kemampuan yang bersifat teoritis dan yang praktis.

Faktor kedua yang menarik perhatian di dalam struktur intelegensinya ialah, bahwa kemampuan intuisi (intuitievermogen) juga besar. Terutama dibidang inter human relation. Jadi dalam menghadapi manusia lain sebagai individu maupun sebagai suatu kelompok yang ia secara intuitif dapat mengambil langkah-langkah yang paling sesuai dijalankan untuk dapat mencapai maksudnya. Faktor ini dapat memperkuat kedudukannya sebagai pimpinan. Intuisi yang kuat ini juga menyebabkan, interest terhadap mistik dan metaphysik ada. Akan tetapi di lain pihak, rationalitasnya demikian besar sehingga daya kritik yang obyektif tetap terpelihara.

Segi lain dari pada struktur intelegensianya yang pantas disebut adalah jalan fikirannya yang sangat kausal. Kausalitasnya bertitik tolak pada prinsip-prinsipnya, sehingga pembahasan segala persoalan dilakukannya menurut garis-garis tertentu yang tidak dapat dirobah lagi. Dengan demikian, suatu poblem tertentu, bagi dia, mempunyai suatu cara pemecahan yang tertentu pula. Tindakan-tindakannya yang konsekuen dapat dipandang dari sudut ini. Fantasinya adalah konkrit dan disesuaikan dengan keadaan realita. Itu sebabnya ia dapat menunjukkan akal dan siasat yang tepat untuk mengatasi problema-problema yang nyata. Ia adalah seorang intelektual yang sangat produktif.

Sebagaimana manusia umumnya, SM. Kartosoewirjo juga memiliki emosi. Tetapi karena kuatnya kontrol rasional terhadap pergolakan emosinya, menyebabkan ia tidak mudah terangsang oleh kejadian-kejadian sekitarnya. Secara fisik ia dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan di mana ia berada. Berkat intelegensianya yang penuh dengan perhitungan dan pertimbangan yang konkrit, maka ia mampu menghadapi dan menerima situasi aktual secara obyektif, tanpa mengalami perasaan-perasaan depressif.

Menurut hasil tes psikologis yang dilakukan oleh Kapten Drs. Suyono HW, melanjutkan analisisnya, bahwa struktur pribadi S.M. Kartosoewirjo menggambarkan adanya dorongan-dorongan jasmaniah yang benar, dorongan mana berada di bawah dominasi intelektual secara keras. Terdapat keseimbangan yang sangat luar biasa dalam kepribadiannya antara id dan superego. Oleh karena itu, bisalah kita pahami bagaimana higenisnya cara hidup dan cara mengatur lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial-budaya dan politik.

Energi vital yang berakar kuat dari dalam jiwa seorang ulama besar yang penuh kesabaran di tengah penderitaan diri dan pengkhianatan yang dilakukan oleh beberapa orang pelanjutnya meperlihatkan suatu dorongan manusiawi yang menyebabkan dia tidak dapat tinggal diam,

melainkan memerlukan penyaluran melalui kegiatan-kegiatan yang produktif. Arus dari penyaluran energi ini adalah keras dan terpusat. Hal ini dapat dilihat dari usaha-usaha yang dijalankan dengan intensif, agresif dan terfokus pada inti persoalan.

Pragnosa mengenai sikapnya dapat pula dievaluasi. Pada waktu itu SM. Kartosoewirjo telah dapat mengatasi proses penyesuaian dari secara rasional dengan situasinya yang baru sebagai tahanan. Berkat intuisi dan daya analisanya yang tajam, maka ia makin hari makin tambah kewaspadaan. Ia sudah dan akan dapat membuat estimate (perkiraan) yang tepat mengenai maksud dan tujuan sebenarnya dari orang-orang yang datang untuk mengadakan introgasi, interview, wawancara dan sebagainya. Sehingga akan dapat menyesuaikan sikapnya sedemikian rupa, yang praktis menguntungkan bagi dirinya.

Hasil evaluasi psychologi seperti yang sudah dikutip di atas terhadap pribadi S.M. Kartosoewirjo menunjukkan, bahwa motivasi dan kesadaran spiritual yang menjadi dasar perjuangan suci Darul Islam, berpengaruh nyata terhadap kehidupan individu muslim. Memang kesadaran demikian akan bereaksi dalam jiwa seseorang yang menghendaki agar setiap individu memiliki intuisi yang peka, yang dengan itu dapat membedakan “yang ini benar dan yang itu salah”. Serta dapat merasakan antara yang indah dan yang buruk. Bukankah Islam mengajarkan cara paling utama untuk menghubungkan hati seorang muslim dengan khaliqnya, yaitu dengan mujahadah, mendidik intuisi yang peka dan perasaan halus. Pemikiran Islam dapat meningkatkan dan mendorong kepada penemuan baru yang dapat mempengaruhi alam dan mengetahui rahasianya. Karena itu manusia muslim diwajibkan agar senantiasa menjaga ibadah dan mengikuti perintah Allah guna meningkatnya intuisi, mempelajari apa-apa yang dapat memperluas wawasan pengetahuan, agar pengamatannya semakin luas, tajam serta menjangkau ke depan.

Menurut pengadilan MAHADPER dalam sidang ke 3 pada tanggal 16 Agustus 1962 telah terbukti, bahwa segala daya usaha yang telah dilakukan selama kurang lebih 13 tahun oleh Kartosoewirjo dengan mendirikan dan memperjuangkan Negara Islam Indonesia (DI/TII) itu adalah rencana makar yang bertujuan akan menggulingkan pemerintahan RI yang syah. Dan pengadilan menyatakan, bahwa perjuangan suci Kartosoewirjo dalam menegakkan Negara Islam Indonesia itu adalah sebuah "pemberontakan". Disamping itu, bahwa dia telah memerintahkan kepada anak buahnya untuk mengadakan aksi pembunuhan terhadap diri Presiden Soekarno. Oleh karena itu ketua sidang mengumumkan keputusan Mahkamah, yaitu hukuman mati atas terdakwa Kartosoewirjo..

Tuduhan-tuduhan fitnah ini semua tidak diakui oleh Kartosoewirjo. Dengan segala ketegarannya, meskipun fisiknya dalam keadaan lemah dan kurus, ia tetap konsisten mempertahankan idealismenya, sebuah cita-cita mewujudkan Daulah Islamiyah di Indonesia adalah perintah Ilahy yang harus diadakan dan diperjuangkan oleh umat Islam. Selanjutnya Kartosoewirjo menyusun surat wasiat yang terdiri dari empat bagian. Dalam bagian pertama (wasiat A) Kartosoewirjo menerangkan kepada anggota-anggota keluarganya tentang jalannya persidangan dan dia meminta agar supaya seluruh anggauta keluarga untuk tetap bersabar dalam menerima Kadar Allah yang pahit itu. Kepada isterinya Siti Dewi Kalsum dia berpesan untuk selalu terus menerus membimbing anak-anaknya menjadi putra-putri Islam yang sejati. Dalam bagian kedua (Wasiat B) Kartosoewirjo mengucapkan selamat berpisah kepada eks-Mujahidin dan bawahannya. Mereka perlu mengetahui, demikian Kartosoewirjo, bahwa dia hingga saat-saat terakhir bertindak dan berbuat selaku Imam Panglima Tertinggi APNII. Dan dia tidak ragu-ragu, bahwa apa yang dia lakukan bersumberkan perintah-perintah Allah dan Sunnah Rasulullah s.a.w, dan siap menjadi saksi kelak di achirat. Dalam wasiat itu juga dituliskan, bahwa dia haqqul yaqin suatu waktu cita-cita Islam yang telah diperjuangkannya akan terlaksana di bumi Indonesia, walaupun lawannya tetap menentang. Dalam kedua bagian terakhir wasiatnya (Wasiat C) Kartosoewirjo mohon kepada instansi yang berwenang, supaya barang-barang milik pribadi diberikan kepada keluarganya. Dia juga menyatakan keinginannya, (Wasiat D) bahwa jika nanti dia mati, supaya dia dikuburkan di tanah miliknya sendiri, yaitu di Suffah yang terletak di desa Cisitu, kecamatan Malangbong. Kepada pemerintah RI dia mengajukan permintaan, supaya wasiat-wasiatnya disiarkan lewat pers dan radio. Namun tidak ada satupun dari wasiat yang ditujukan kepada pemerintah RI yang dilaksanakan. Pemerintah RI memang merupakan pemerintah yang sejak dari dulu tidak pernah amanah.

Kartosoewirjo adalah seorang ulama besar yang berjuang tidak hanya berdasarkan ilmu agama, melainkan juga praktek kehidupan nabawi yang sangat konsisten. Ia ketika ditawarkan untuk mendapatkan "pengampunan" (amnesti) kepada Presiden Soekarno, dengan tegas dan tenang ia mengatakan: "Saya tidak akan pernah meminta ma'af kepada manusia Soekarno. Secepatnya laksanakan hukuman yang sudah Bapak Hakim Terhormat putuskan." Maka segenap manusia yang berada dalam ruang sidang itu terkejut dan tidak sanggup menjangkau mengapa ia lebih mencari "mati" ketimbang "hidup dengan pengampunan Presiden". MAHADPER ini dibentuk dan dibubarkan hanya untuk memberikan hukuman bagi Kartosoewirjo, tidak lebih dari itu. Menarik untuk disimak sebuah kejadian di akhir-akhir persidangan dimana MAHADPER memutuskan eksekusi mati terhadap diri Kartosoewirjo, adalah upaya dari pihak keluarga Kartosoewirjo dalam hal ini diwakili oleh anak-anaknya, meminta kepada pihak pengadilan untuk

menyaksikan eksekusi. Namun dari pihak MAHADPER setelah berkonsultasi dengan Presiden Soekarno tidak mengabulkan permintaan tersebut. Panglima Kodam Jaya Umar Wirahadikusuma telah memerintahkan untuk melaksanakan keputusan MAHADPER dan menyusun regu tembak yang terdiri dari keempat angkatan.

Pada tanggal 4 September 1962 Kartosoewirjo minta diri dari keluarganya dan keesokan hari di pagi buta, Kartosoewirjo bersama-sama dengan regu penembak dibawa dengan sebuah kapal pendarat kepunyaan Angkatan Laut dari pelabuhan Tanjung Priok ke sebuah pulau di teluk Jakarta. Pada pukul 5.50 WIB, hukuman mati dilaksanakan dan beliau menemui syahidnya dihadapan regu tembak disaksikan 7 orang Jenderal RI. Seorang Ulama, Mujahid dan Intelektual yang konsisten telah menyirami bumi ini dengan tetesan darahnya. Dia syahid untuk menyongsong kehidupan abadi di surga Firdaus, dengan sebelumnya telah meninggalkan 12 mujahid dan mujahidah penerusnya yang dalam hal ini adalah anak-anaknya, seperti:

1. Tati lahir pada tahun 1934 (telah meninggal).
2. Sri Rahajoe lahir pada tahun 1935 (telah meninggal).
3. Moehammad Darda (Dodo) lahir tahun 1936 (masih hidup).
4. Rachmat lahir tahun 1939 (telah meninggal).
5. Saleh lahir tahun 1940-an (telah meninggal).
6. Moehammad Tachmid lahir tahun 1942 (masih hidup).
7. Abdoellah lahir tahun 1943/44 (telah meninggal).
8. Semaoen Sjuhada lahir tahun 1945 (telah meninggal).
9. Danti lahir tahun 1947 (masih hidup).
10. Kartika lahir tahun 1950 (masih hidup).
11. Koemala Sari lahir tahun 1952 (masih hidup).
12. Sardjana lahir tahun 1956/57 (masih hidup).

Tiga anak Kartosoewirjo yang terakhir lahir dan besar di hutan dan suatu kondisi perang gerilya yang serba payah. Keluarga ini, mengutip istilah Pramoedya Ananta Toer, adalah "keluarga gerilya", sebenar-benarnya gerilya bahkan hingga zaman sekarang.

Bab Sembilan

Syahidnya Seorang Ulama Besar/Negarawan Sejati dan Estafeta Kepemimpinan

Tentang kisah wafatnya S.M. Kartosoewirjo, ternyata Sukarno dan A.H. Nasution cukup menyadari bahwa S.M. Kartosoewirjo adalah tokoh besar yang bahkan jika wafat pun akan terus dirindukan umat, maka mereka dengan segala konspirasinya, didukung oleh Umar Wirahadikusuma, berusaha menyembunyikan rencana jahat mereka ketika mengeksekusi Imam Negara Islam ini. Ketika pihak keluarga Kartosoewirjo mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk mengambil jenazah orangtuanya yang seterusnya akan dikebumikan di Tasikmalaya, sebagaimana wasiat yang ditulis sebelum meninggalnya. Namun lagi-lagi permintaan ini ditolak oleh A.H. Nasution yang disaat itu menjadi Menhankam setelah berkonsultasi dengan Soekarno. Kalau jenazahnya tidak dikembalikan ke keluarganya, maka pihak keluarganya juga meminta agar bisa melihat di mana kuburan atau pusaranya. Namun, anehnya, permintaan ini pun tidak diberikan oleh Soekarno. Kartosoewirjo benar-benar berpisah dengan keluarganya dan juga dengan umat Islam Indonesia. Pemisahan ini memang disengaja oleh Soekarno yang ketakutan terhadap kekuatan spiritual yang bisa dimunculkan oleh tokoh S.M. Kartosoewirjo ini di masa depan.

Sekalipun jasad beliau telah tiada dan tidak diketahui di mana pusaranya berada karena alasan-alasan tertentu dari pemerintahan Soekarno, tapi jiwa dan perjuangannya akan tetap hidup. Itulah makna dari firman Allah:

"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah (bahwa mereka itu mati); bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya". (QS. 2:154).

Terbukti ketika seminggu sebelum eksekusi dilaksanakan terhadap Imam Negara Islam Indonesia Kartosoewirjo, melalui dialog antara Kartosoewirjo dengan seorang Mujahid Darul Islam, yang waktu itu sama-sama menjadi tawanan Pemerintah RI antara lain sebagai berikut ini:

Z.H. : "Kalau saya mau tanya Imam, bagaimana ya, bisa atau tidak?"
K. : "Hayo tanya apa !
Z.H. : "Ini, seandainya Imam berhalangan, untuk selanjutnya itu bagaimana kira-kira?"
K. : "Itu bagus sekali kalau begitu. Ya, lanjutkan !
Z.H. : " Ya, kalau lanjutkan itukan mesti saya konsolidasi dulu nanti".
K. : "Tidak begitu ! Disini !
Z.H. : "Kalau di sini bagaimana ini ya?"
K. : "Begini, di sana sahabat kita ada beberapa orang?

Z.H. : "Ada banyak, ada Pak Kiayi Maksum, Haji Sobari".

K. : " Nah, sekarang begini, kalau memang ada Pak Kiayi Sobari, ya, tolonglah bantu dengar dengan Pak Kiayi Maksum supaya saya ini mengamanatkan kepada beliau sampaikanlah kepada Pak Kiayi Haji Sobari, lanjutkan dan bentuklah di sini secara sederhana bentuk organisasi sementara. Nah, kemudian pimpinlah sementara !".

Z.H. : " Ini, bagaimana Imam kalau Pak Kiayi haji Sobari itu bertahan tidak mau terima, sebab ini urusannya berat?".

K. : "Sementara ini ! Ini harus terima, karena ini kan tidak permanen. Di situ ada struktur organisasi negara yang perlu menangani nanti kalau sudah ketemu dengan dia, serahkanlah pada dia. Dia yang harus mampu mengembalikan. Jadi, lanjutkan perjuangan ini. Ikutilah kondisi dan situasi !".

Z.H. : "Bagaimana kalau nanti saya dapat keluar kemudian saya mau mengunjungi putra bapak Den Dodo atau yang lain-lainnya?'.

K. : "Nanti dulu, ya, sekalipun Dodo itu anak saya atau yang lain anak saya, itukan harus "wudhu" lagi !".

Imam mengatakan harus wudhu lagi, karena beberapa hari sebelum dialog itu, telah datang seorang Letnan Kolonel yang pada dadanya dicabut namanya, membawa map. Pertama ia hormat kepada Imam. Ia hormat juga kepada pemeriksa. Ia menyodorkan isi daripada pernyataan dari yang 32 orang. Ia memperlihatkan juga kepada Imam . Imam tidak kelihatan panik. Bahkan beliau ditanya, "Bagaimana Pak Imam mengenai pernyataan ini?". Imam dengan tenang, jawab beliau, "Keseluruhannya orang itu sudah mengundurkan diri dan sudah dianggap batal. Jadi, itu bukannya hanya menyerah, tapi menyeberang !". Dari dialog tersebut diambil kesimpulan bahwa dalam keadaan sedarurat apapun perjuangan harus terus dilanjutkan. Pemimpin perjuangan harus tetap ada, seperti diwashiyatkannya di tahun 1959, bahwa prajurit petit pun dalam keadaan terputus hubungan dengan para perwira harus sanggup tampil mengemban tugas sebagaimana Imam. Apabila keadaan telah berangsur pulih dan hubungan dengan para panglima yang lain bisa dilakukan kembali, maka struktur kepemimpinan negara harus kembali kepada seperti apa yang dinyatakan dalam perundang undangan.

Keteguhan Kartosoewirjo seperti dinyatakan di atas menjadi bukti bahwa dia berjuang di atas keyakinannya yang utuh. Syahidnya Kartosoewirjo tidak menghancur kan nilai negara yang telah didirikannya. Ia tidak menyerah, lebih baik pergi menyongsong syahid, dari pada harus menyerah seperti bawahannya. Ia rela menyaksikan nyawanya lepas dari badan, daripada proklamasi Negara Islam Indonesia dicabut kembali.

Kartosoewirjo tetap konsisten seperti diwashiyatkannya pada tahun 1959, kalaupun warga negara Islam berjuang, baik angkatan perang maupun sipilnya, terputus hubungan dengan pimpinan, maka perjuangan harus terus dilanjutkan. Prajurit petit pun harus sanggup tampil sebagaimana Imam, dalam keadaan hilang syarat berjuang pun, selama kebathilan masih ada, selama itu pula perjuangan harus terus dilanjutkan –kalaupun hanya tinggal punya satu gigi, gunakan gigi yang satu itu untuk menggigit ! Permasalahnnya sekarang, siapakah yang melanjutkan perjuangan ini setelah Kartosoewirjo menemui syahidnya?

Banyak kalangan berpendapat bahwa dari tahun 1962 hingga tahun 1965 tampuk kepemimpinan NII dipegang oleh Kahar Muzakar. Dilanjutkan oleh Agus Abdullah hingga tahun 1970. Setelah Agus Abdullah wafat, kepemimpinan dipegang oleh Tengku Daud beureueh dari tahun 1973 hingga 1978. Dan dari tahun 1978 – 1981 dipegang oleh Adah Djaelani Tirtapradja. Dibalik kepemimpinan Adah Djaelani Tirtapradja itu ada juga yang dipimpin oleh Djadja Sudjadi dari Malangbong – Garut.

Adanya pandangan sedemikian di atas itu disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu:

a) Tidak memakai peraturan estapeta kepemimpinan NII yang berdasarkan perundang-undangan NII sehingga mengangkat pemimpin hanya berdasarkan figuritas atau idolanya masing-masing.

b) Sebagian besar dari para mujahid belum memahami nilai hukum mengenai yang sudah desersi dari NII atau menyerahkan diri kepada musuh sehingga dianggap masih bisa diangkat sebagai pemimpin NII.

Padahal mengenai estapeta (kelanjutan) kepemimpinan NII Dalam Darurat Perang itu sudah ada undang-undangnya. Hal demikian tercantum dalam MKT (Maklumat komandemen Tertinggi) No.11 tahun 1959 . Dengan tegas bahwa dalam Negara Islam Indonesia yang berhak memegang estapeta Imam NII itu ialah yang terdiri dari A.K.T. atau yang jabatannya setaraf dengan A.K.T. seperti halnya K.S.U. dan K.U.K.T.(Kuasa Usaha Komandemen Tertinggi).

Ditinjau dari sudut sejarah bahwa sebelum Imam S.M. Kartosoewirjo tertangkap musuh tanggal 4 Juni 1962, beberapa tokoh tersebut di atas memiliki catatan sendiri sendiri diantaranya : Kahar Muzakar sudah membatalkan NII dengan memproklamirkan R.P.I.I tanggal 14 Mei 1962, artinya sejak itu Kahar Muzakar bukan lagi sebagai pejabat NII. Agus Abdullah masih bertahan sewaktu Imam tertangkap 4 Juni 1962, namun dua puluh hari kemudian Agus Abdullah itu menyerah kepada pemerintah R.I. Dengan itu bukan lagi sebagai A.K.T.

Daud Beureuh, dirinya sudah kembali kepada Pemerintah RI tanggal 9 Mei 1962 sebelum Imam tertangkap tanggal 4 Juni 1962. Jadi, sebelumnya juga sudah bukan lagi sebagai A.K.T. Adah Djaelani Tirtapradja menyerah kepada musuh tanggal 28 Mei 1962, dengan itu dirinya sudah bukan A.K.T. lagi.

Djadja Sudjadi memang dirinya sampai Imam tertangkap 4 Juni 1962, tidak menyerah yakni tidak datang melaporkan diri kepada musuh, namun akhirnya ikut juga menandatangani "Ikrar Bersama" 1Agustus 1962 sehingga lenyap pula jabatan yang diembannya dalam NII. Dengan gugurnya jabatan mereka dalam NII, maka secara hukum pengangkatan mereka bertentangan dengan undang-undang NII.

Sungguh penting mengetahui sejarah. Firman Allah: "... Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berfikir" (Q.S.7:176). Dari ayat di atas itu diambil arti, bagi yang tidak mau mengetahui sejarah sama artinya dengan yang tidak mau berpikir secara obyektif sehingga tidak bisa mengambil pelajaran dari sejarah. Dalam Al-Qur'an banyak ayat yang mensitir mengenai orang-orang yang meninggalkan tugas (Q.S.5:54, 33:13-15) dari medan perang. Tentu, hal itu supaya menjadi peringatan bagi generasi penerusnya sehingga jangan terulang kembali.

Allah memerintahkan kita menceritakan sejarah (Q.S.7:176), berarti sejarah itu cepat atau lambat akhirnya akan terungkap pula, walau tidak sedap dibacanya. Seperti halnya lembaran "Ikrar Bersama" 1 Agustus 1959 di bawah ini :

Untuk lebih jelasnya, berikut salinan dari ikrar bersama tersebut :

IKRAR BERSAMA

Bismillahirrachmanirrachim.

Allah Jang Maha pengasih dan Penjajang telah membukakan mata-hati nurani kami, memberi kesadaran dan keinsjafan kepada kami tentang kesesatan kami dan kemelaratan jang diakibatkan oleh perbuatan2 kami, maka kami bekas pimpinan apa jang dinamakan DI/TII/NII dengan ini menjatakan:

1. Bahwa gerakan kami dulu (DI/TII/NII dan segala sesuatu jang berhubungan kepadanja) adalah sesat, salah dan menjalahi Hukum2 Islam, Hukum2 Kenegaraan, norma2 kemanusiaan dan bertentangan dengan djalan jang seharusnja ditempuh untuk memperdjoangkan idiologie Islam menurut petundjuk2 Allah s.w.t. dalam Al-Qur'an dan Sabda Nabi Muhammad s.a.w.
2. Bahwa kami telah berbuat dosa terhadap Masjarakat Djawa-Barat chususnja dan masjarakat Indonesia umumnja atas gerakan2 kami pada masa jang lalu, atas dosa2 mana

kami mengharapkan ampunan masjarakat dan kami sanggup menebus dosa tersebut dengan djalan mewudjudkan perbuatan jang berfaedah, demi kepentingan masjarakat dan Negara R.I.

3. Bahwa kami telah melepaskan diri lachir dan bathin dari ikatan apa jang dinamakan DI/TII dan NII seraja bertaubat memohon ampunan Allah s.w.t. menjesal sebesar-besarnja atas perbuatan2 kami dulu dan berdjandji untuk tidak mengulanginja.
4. Bahwa djalan jang ditempuh oleh Pemerintah R.I. dengan segala dasar/haluan politik dan pembangunannja adalah djalan jang benar dan diridloi Allah s.w.t. dan oleh karenanja dalam pengabdian kepada Agama dan Negara, kami bersumpah:
   Demi Allah:
   ♣ Setia kepada Pemerintah R.I. dan tunduk kepada Undang2 Dasar R.I. 1945.
   ♣ Setia kepada Manifesto Politik R.I., Usdek, Djarek jang telah mendjadi garis besar haluan Politik Negara R.I.
   ♣ Sanggup menjerahkan tenaga dan fikiran kami guna membantu Pemerintah R.I. cq. Alat2 Negara R.I.
   ♣ Selalu berusaha mendjadi Warga Negara R.I. jang ta'at, baik dan berguna dengan didjiwai Pantja sila.
5. Bahwa kami mempertjajakan serta akan menerima dan menta'ati seluruh tjara penjelesaian nasib kami, jang meliputi lapangan hukum, politik dan sosial, kepada kebidjaksanaan Pemerintah Republik Indonesia.
6. Kami jakin bahwa Mudjahidin lainnja akan mengikuti djedjak kami.
   Semoga pernjataan kami ini diberkahi Allah s.w.t.
   Amien Jaa Robbal A'lamien.-
   Bandung, tgl. 1 Agustus 1962.-
   Kami jang mengeluarkan Ikrar.-

   Agus Abdullah Sukunsari.
   Djadja Sudjadi Widjaja.
   Adah Djaelani Tirtapradja.
   Hadji Zaenal Abidin.
   Ateng Djaelani Setiawan.
   Danu Mohamad Hassan.
   Mohamad Godjin.
   Toha Machfud.
   Dodo Mohamad Darda.

Tachmid.
Cholil.
Hassan Anwar.
Atjeng Abdullah Mudjahid.
Maskun Sudarmi.
Atjeng Hadjar.
Rahmat Slamet.
Ules Sudja'i.
Engkar Rusbandi.
Hadji Jusuf Kamal.
Usman.
Sjarif Muslim.
Hadji Zakaria.
Bakar Misbah.
Emod Hasan Saputra.
Achmad Mustofa Hidajat.
Sobir.
Mubaroq.
Zainudin Abd. Rahman.
Hadji Djunaedi.
Tohir.
Salam.
O.Z.Mansjur

Ada yang berdalih bahwa hal di atas itu karena dipaksa. Namun, bisanya dipaksa karena didahului dengan sebab datang lapor kepada musuh. Jadi, masalahnya itu ialah penyebabnya, dan bukan akibatnya .

Para mujahid NII, baik itu pada strata bawah maupun atas tidak semuanya memiliki nilai menyerah kepada musuh. Jadi, pada saat Imam S.M. Kartosoewirjo menjalani eksekusi di hadapan regu tembak, masih ada figur yang jabatannya setaraf dengan A.K.T. yaitu Abdul Fattah Wirananggapati sebagai K.U.K.T.(Kuasa Usaha Komandemen Tertinggi). Beliau tidak menyerah kepada musuh, melainkan tertangkap di Jakarta tahun 1953 sekembalinya dari Aceh melaksanakan tugas dari Imam mengangkat Daud Beureuh sebagai Panglima Wilayah V TII (Tentara Islam Indonesia) Cik Di Tiro. Dan dikeluarkan dari penjara Nusakambangan tahun 1963.

Kemudian setelah aktivitasnya tercium oleh Pemerintah RI maka tahun 1975 dipenjarakan lagi, dan keluar tahun 1982. Setelah beliau aktif memberikan penjelasan mengenai perundang-undangan NII serta mengkoordinasi para mujahid, maka pada tahun 1991 Abdul Fattah Wirananggapati itu tertangkap kembali, dan dibebaskan tanggal 2 Agustus 1996. Mengenai kelanjutan estapeta kepemimpinan NII sesudah Abdul Fattah Wirananggapati bukan pada tempatnya dikemukan dalam uraian ini.

Adanya kekeliruan pada masa yang telah lampau mengenai estapeta kepemimpinan NII adalah lumrah karena ketidakpahaman akibat proses memiliki keilmuan serta menerima pemahaman sedemikian adanya. Akan tetapi, jika sudah datang Bayyinah (penjelasan) mengenai perundang-undangan serta sejarah mengenai figur-figur yang jabatannya tertera dalam undang-undang itu, maka wajib mengikuti bayyinah sehingga tidak berselisih. Firman Allah:

"Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang meendapat siksa yang berat." (Q.S.3:105).

Kartosoewirjo memerintahkan dalam MKT No. 11 antara lain berbunyi:

"Ikutilah zaman, jang beredar setjepat kilat dan kedjarlah waktu, dan djanganlah biarkan waktoe mengejar-ngejar kita !. Goenakanlah tiap sa'at dan detik oentoek menoenaikan perang mentegakkan Kalimatillah, dalam bentoek dan sifat apa dan manapoen !. Ketahoeilah ! Sekali lampau, ia tidak beroelang kembali !. Songsonglah kedatangan kembali Imam Plm. T., dengan realisasi M.K.T. Nomor 11 ini !".

Kemudian ditambahkannya lagi:

"Toenjoekkanlah boekti patoeh-setiamoe kepada Allah ! kepada Rasoeloellah Çlm. ! Dan kepada Oelil-Amrimoe, Oelil Amir Islam, tegasnja: Imam-Plm. T. !. Itoelah jalan Jihad fi Sabilillah, satoe-satoenja Sirathal-Moestaqim !".

Begitu dalamnya ungkapan yang diucapkan oleh Kartosoewirjo, dan mengisyaratkan kepada kita bahwa totalitas kehidupan dalam mendarma baktikan diri kepada Allah sudah terpatri begitu kuat dalam jiwa Kartosoewirjo sehingga tidak ada kesempatan barang sedikitpun untuk dia bermain-main dengan kehidupan dunia."Hayatuna kulluha ibadatun" (Kehidupan kami seluruhnya hanya untuk satu pengabdian). Mungkin ungkapan ini, dapat menggambarkan tentang kepribadiannya secara menyeluruh.

Estafet kepemimpinan Negara Islam Indonesia tetap berlanjut dan eksis untuk beberapa waktu karena dipegang oleh orang-orang hanif dan konsekwen sebagai penerus perjuangannya, dan hal itu memang sudah digariskan oleh Kartosoewirjo dalam penjelasan lain di MKT No. 11 yang berisi:

"Pada 'oemoemnja segala saloeran kenegaraan, dalam bidang-bidang Militer maoepoen dalam lapangan politik, joega selama masa perang ini, berjalan teroes melaloei systeem Komandemen, seperti jang tetap berlakoe hingga sa'at ini. Tetapi disa'at-sa'at genting-roencing, dimana Imam. Plm.T. mengeloearkan Komando 'Oemoem, maka disa'at itoe kita hanja akan mengenai 2 (doea) tingkatan Pimpinan Perang, Pimpinan Negara dan Pimpinan Jama'ah Mujahidin, Pimpinan Oemmat berjoeang, Ja'ni:

Tingkatan Pimpinan Perang pertama selakoe pemberi Komando, ialah: 1. Imam-Plm.T., 2. Plm. Per. K.P.W.B., 3, Plm. Per. K.P.W., dan 4. Kmd. Pertempoeran Kompas;dan Tingkatan Pimpinan Perang kedoea selakoe pelaksana Komando, terdiri daripada Kmd.2 Pertempoeran sejak Kmd. Pertempoeran Soeb-Sektor/Kmd. Lapangan/Kmd.2 Komandemen hingga sampai Kmd2. Baris, pelaksanaan mana akan melipoeti lapisan-lapisan ra'iat jelata seloeroehnja, tanpa kecoeali.

Sendi-dasar bagi tiap gerak-langkah kedepan, teroetama disa'at-sa'at jang menentoekan, seperti tergambarkan diatas, perloe diletakkan moelai sekarang oentoek menghindarkan tiap-tiap pengjimpangan, penjelewengan, persimpang-sioeran, atau pertentangan dalam saloeran, pimpinan dan pelaksanaan segala toegas-toegas moethlak, menoenaikan hoekoem-hoekoem Jihad, Hoekoem-hoekoem Perang sepanjang ajaran Islam.

Dengan cara, sifat dan bentoek, sepanjang isi dan jiwa M.K.T. Nomor 11 ini, maka Insja Allah terhindarlah Negara kita, Negara Islam Indonesia, istimewa dimasa Hoekoem Perang masih berkobar, daripada setiap jenis, sifat dan bentoek Doealisme, dalam bidang dan lapangan apa dan manapoen. Sehingga dilingkoengan Negara kita hanja dikenal satoe Pimpinan Negara, jang joega bertoegas memegang Pimpinan Perang dan Pimpinan Oemmat Berperang.

Dalam pada itoe, tiap-tiap Moejahid, teroetama Pemimpinannja, haroes percaja dan jakin dengan sepenoeh jiwanja, akan benarnja perintah-perintah Allah, perintah-perintah Nabi Çlm. Dan perintah-perintah Imam-Plm. T., jang terealisasi dalam Hoekoem-hoekoem Jihad dan Perintah-perintah Jihad beserta pelaksanaannja. Tegasnja tiap Moejahid, choesoes Pemimpin Moejahid, haroes percaja, dan jakin akan benarnja tiap-tiap tingkah-lakoenja, berwoejoedkan amal-amal pembinaan Negara Koernia Allah, Negara Islam Indonesia. Dikala Jama'atoel-Moedjahidin meroepakan satoe kesatoean Oemmat kompak, dlahir dan bathin, tidak tercerai berai dan tidak

berpecah belah, maka baroelah setiap anggauta atau bagian Djama'ah tsb. berhak menerima dan menikmati kasih-sajang dan Koernia Allah.

Tapi apa yang terjadi sebaliknya dari hal di atas itu, pada tahun 1978 terjadi pembunuhan terhadap Djadja Sudjadi oleh Adah Djaelani cs . Saksi Toha Machfud dalam persidangan 'membenarkan tahun 1978 ia mendapat perintah dari terdakwa untuk memimpin pelaksanaan pembunuhan. Namun ketika operasi berlangsung, saksi hanya menunjukkan rumah Djadja Sudjadi, sedangkan yang membunuhnya adalah Komandan Pasus, Syarif Hidayat .

Tanpa satu alasan yang syar'i dengan begitu mudahnya mereka menghilangkan nyawa seorang mu'min. Padahal membunuh manusia merupakan satu dosa besar setingkat dibawah dosa melakukan kemusyrikan. Allah berfirman:

"Dan barang siapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahanam." (Q.S. 4: 93).

Terjadinya pembunuhan terhadap Jaja ini awal mula dari kehancuran sendi-sendi moral para pejuang Darul Islam dan terpecah belahnya kesatuan jama'ah mujahidin. Selanjutnya, setelah terbunuhnya Jaja, Adah Jaelani dengan cara yang sangat kontroversial bekerja sama dengan Ali Moertopo, ketua CSIS (Center for Strategic and International Studies), L.B. Moerdany dan Soedjono Hoemardhani untuk menghidupkan kembali NII atau DI, yang rencananya pun telah disiapkan begitu matangnya, sampai orang yang mutaakhir tidak mengetahui tentang kejadian ini. Maka terhadap orang yang belum mengerti betul akan sejarah perjuangan Darul Islam yang sekarang, hendaklah mentabayyunkan dengan orang yang berpengetahuan jangan sampai tersesat dari jalan yang lurus. Karena Allah telah berfirman:

"Jika datang kepadamu orang-orang yang fasik dengan membawa berita, maka telitilah terlebih dahulu dengan seksama. Supaya kamu jangan sampai mencelakakan orang lain tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya, sehingga kamu nanti akan menyesal atas kecerobohanmu itu." (Q.S. 49: 6).

Begitupun program yang dilaksanakan Adah Jaelani hanyalah untuk memeras uang rakyat demi kekayaannya sendiri. Sungguh satu perbuatan yang tercela bila hal itu terjadi pada kehidupan seorang mu'min. Allah swt. Berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamu dengan jalan yang bathil,....." (QS. 4: 29).

Ternyata, bagian dari kehidupan yang rendah telah menodai langkah perjuangan mereka, dibandingkan mengambil kehidupan yang hakiki di akhirat kelak. Dalam kondisi hidup perjuangan yang sedang mengalami pasang surut ini, Kartosoewirjo telah memberikan penjelasan yang sangat rinci tentang bagaimana cara mengorganisir Negara untuk bekal para pejuang Darul Islam. Di dalam sebuah penjelasan maklumatnya, ia menerangkan:

"Soedah agak lama kita beladjar hidoep berorganisasi, dan memang tiada manoesia, djiwa moedjahid, jang pandai berdiri sendiri, jang tidak tergantoeng, tidak terpengaroeh atau tidak memerloekan sesoeatoe diloear pribadinja. Moela pertama kita merasa hidoep seorang diri. Lambat-laoen perasaan itoe meningkat hingga mendjadi kesadaran dan keinsjafan selakoe anggauta sesoeatoe keloearga. Dan selandjoetnja meningkat lagi, hingga kita merasa dan menganggap diri kita, insjaf dan sadar sepenoehnja, sebagai warga masjarakat dan negara, warga oemmat dan bangsa. Dengan meningkatnja nilai perasaan dan anggapan, jang kemoedian terrealisir dalam kelakoean dan perboeatan, maka makin bertambah2 meningkat poela rasa tanggoeng djawab kita. Sebagai seorang diri, kita hanja bertanggoeng djawab atas diri kita. Sebagai warga sesoeatoe keloearga atau kelompok, tanggoeng djawab kita meningkat mendjadi tanggoeng djawab terhadap keloearga dan kelompok".

"Begitoelah selandjoetnja, sebagai warga sesoeatoe oemmmat, bangsa atau djama'ah, maka pertanggoeng djawab kita akan melipoeti seloeroeh oemmat, bangsa dan djama'ah itoe. Rasa tanggoeng-djawab jang makin meningkat itoe, tidak hanja akan menambah besarnja hak kita, melainkan djoega makin menambah besar dan beratnja kewadjiban antar-warga, antar-kelompok dan antar-oemmat."

"Sjahdan, dengan sandaran Ma'loemat K.T. jang mendjadi sendi-dasar hidoep dan perdjoeangan kita, hidoep dan berdjoeang hanja oentoek melaksanakan toegas Ilahy moethlak, merealisir dharma jang tertanam dalam djiwa setiap Moedjahid, maka seloeroeh Barisan Moedjahidin tanpa kecoeali, dimanapoen mereka berada dan bertoegas, terikat erat satoe sama lain demikian roepa, baik oleh Bai'at Negara, Bai'at Djabatan, Bai'at Setia maoepoen Bai'at selakoe Moedjahid, sehingga mereka itoe berwoedjoedkan satoe Djama'ah Besar, jang anggauta-anggautanja terdiri daripada tiap-tiap Moedjahid dan Moedjahidah, tegasnja: Djama'ah Besar Moedjahidin. Selakoe warga Djama'ah Besar Moedjahidin, maka tiap-tiap Moedjahid akan merasa makin bertambah-tambah besar dan mendalamnja rasa-setiakawannja, rasa-tanggoeng-djawabnja, rasa wadjibnja. dst. dst. dst., sampai-sampai achirnja melipoeti seloeroeh Oemmat dan Bangsa, Negara dan Agama. Hendaklah semangat, kesadaran dan keinsjafan seroepa itoe ditanam dalam-dalam dan dipoepoek baik-baik dalam djiwa setiap Moedjahid, dan kemoedian diperkembangkan dan

diwoedjoedkan dalam bentoek amal dan djasa2, baik djasa terhadap Oemmat dan Bangsa maoepoen terhadap Negara dan Agama. Djika demikian halnja, maka cita-cita Baldatoen Thajibatoen wa Rabboe Ghafoer boekan impian atau khajalan belaka. Daja selamat-menjelamatkan, daja rahmat merahmati dst. dst. akan samboeng menjamboeng tidak koendjoeng-poetoes, sehingga melipoeti seloeroeh Oemmat dan bangsa, seloeroeh Negara dan Agama. Demikianlah "dharmaning ksatrija soeci" pentegak-Kalimatillah ! Harap direnoeng-resapkan sebaik-baik dan sedalam-dalamnja, hingga terwoedjoed dalam bentoek boekti-kenjataan jang sebenarnja."

Jika para pejuang belum insyaf terhadap kekeliruannya bahwa apa yang telah mereka lakukan sebelumnya hanyalah menguntungkan kaum kafir dan sangat melemahkan posisi keberadaan Negara Islam. Dan terlebih lagi mereka telah melupakan statemen Imam Negara Islam kartosoewirjo tentang hal tersebut di atas. Padahal kalau dibandingkan dengan Soekarno—yang menyandang gelar Paduka Yang Mulia—belumlah seberapa kemampuannya untuk menciptakan sebuah negara yang begitu kuat dan kokohnya, hanya karena dibelakang Kartosoewirjo para pejuang tidak siap untuk berjiwa militan maka mengalami kemunduran setelah meninggalnya Kartosoewirjo. Semoga dalam hal ini janji Allah untuk mendatangkan satu kaum yang lebih baik dan lebih siap melanjutkan misi-Nya segera hadir dengan segala kebenarannya sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran, Surah Al Maidah, ayat 54.

"Siapa saja diantara kalanganmu yang murtad dari din-Nya , maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah cinta kepada mereka, begitupun mereka cinta kepada-Nya,..."

Padahal kalaulah mereka para pejuang mujahidin mau mengerti tentang situasi dan kondisi umat hari ini, yang mereka semua merindukan kehadiran " Juru Penyelamat" untuk melepaskan dan mengeluarkan mereka dari kondisi keterjajahannya dari penguasa dzalim di bumi Indonesia. Maka tentulah mereka semua umat Islam siap dibelakang para pejuang untuk membela jihad suci baik berupa harta bendanya atau jiwanya sekalipun.Tetapi sangat disayangkan, risalatul haq kepada mereka untuk saat ini belum sampai, mungkin juga disebabkan para pejuang mujahid Darul Islam belum memberikan kontribusi apa-apa demi kemajuan Islam pada umumnya. Belumlah tampil untuk waktu sekarang sosok pejuang sejati pengganti para mujahidin terdahulu sebelum mereka.

Imam Assyahid Kartosoewirjo telah meletakkan dasar-dasar manhaj harakah Darul Islam dari segi akhlakul karimah, bagaimana seharusnya Negara Islam Indonesia yang telah diproklamasikannya dibawa oleh para penerusnya.

1. Membina rasa cinta, tha'at, setia dan patuh.

2. Tha'at-patuh tanpa rasa-cinta setia, akan merasakan kaku-tegang dan kurus-kering-tandus, laksana suara irama. Bahkan kadang-kadang terasakan sebagai sesuatu yang keras dan kejam, kasar dan bengis. Demikian pula benar dan adil, tanpa qisthi dan palamarta. Maka untuk memperoleh hasil amal jang sempurna, jasa-jasa jang besar manfa'at dan maslahat untuk umum, untuk Ummat, Negara dan Agama, maka kuncinja terletak dalam jiwa, atau lebih tegasnja: jiwa Mujahid yang harmonis, selaras dengan tugasnja.

3. Mujahid yang memiliki keselarasan jiwa ini akan menunaikan segala tugas wajibnja dengan sepenuh-jiwanja, dengan tekun, dengan khusu' dan khudlu tanpa menghiraukan atau terpengaruh oleh sesuatu diluarnya. Dan keselarasan jiwa itu hendaknya bersifat vertikal (1) mulai tingkatan pemimpin teratasi hingga bawahan yang terendah, dan sebaliknya, dan bersifat pula horizontal (2), merata-mendatar, hingga sampai meliputi Jama'atul-Mujahidin sebagai kesatuan dan keseluruhan.

4. Maka pokok-pangkal daripada keselarasan jiwa itu terletak pada rasa-cinta, ialah rasa-suci-murni. Yang bersemajam dalam lubuk kalbu setiap Mujahid sejati. Bagi membina jiwa baru, atau menanam jiwa jihad, jiwa yang sanggup dan mampu menyelaraskan diri dengan hukum-hukum Jahad, jiwa yang berani bertindak menyalurkan tingkat-laku dan amal-perbuatannya dengan Hukum-hukum Jihad, maka landasan pembinaan jiwa kesatria suci semacam ini a.l.l. adalah sbb:

5. Rasa-cinta setia kepada Allah (Mahabbah) dalam ma'na dan wujudnya:
   = sanggup dan mampu melaksanakan tiap-tiap perintah-Nya dan menjauhi tiap- tiap larangan-Nya, tanpa kecuali dan tanpa tawar-menawar; = mendahulukan dan mengutamakan pelaksanaan perintah-perintah Allah, daripada sesuatu diluarnya; dan = mendasarkan tiap-tiap laku lampah dan amalnya atas Wahdanijat Allah, tegasnya: atas Tauhid sejati, dan tidak atas alasan, pertimbangan dan dalil apapun, melainkan hanya berdasarkan Khulishan-mukhlisan semata, atau dengan kata-kata lain: "Allah-minded 100%.

6. Rasa-cinta-setia kepada Rasulullah Çlm., dalam ma'na dan wujud:
   = sanggup dan mampu merealisir ajaran dan Sunnah Çlm., dengan kepercajaan dan kejakinan sepenuhnya, bahwa tiada contoh dan tauladan lebih utama daripada ajaran dan Sunnahnya: khusus dalam rangka jihad, tegasnya rangka usaha membina Negara Madinah

Indonesia; dan = pantang melakukan sesuatu diluar ajaran dan hukum Islam, sepanjang Sunnah, hingga mencapai taraf "Islam-minded 100%".

7. Rasa-cinta setia kepada Ulil-Amri Islam, atau Imam N.I.I., atau Plm. T. A.P.N.I.I., yang didalamnya termasuk (1) rasa-cinta-setia kepada pemerintah Negara Islam Indonesia, dan tidak kepada sesuatu Pemerintah diluarnya; (2) rasa cinta-setia kepada Negara Islam Indonesia, dan tidak kepada sesuatu Negara diluarnya; (3) rasa-cinta-setia kepada Undang-Undang (Qanun-Asasy) N.I.I., dan tidak kepada Undang-undang negara manapun; dst. dst. dst., yang semuanya itu tercakup dalam istilah "Negara Islam Indonesia-minded 100%".
   Catatan.
   Kita hanya mengenal satu Ulil Amri Islam, satu Imam-Plm. T. A.P.N.I.I., tidak lebih, dan tidak kurang.

   Tiap-tiap kepercayaan, keyakinan, anggapan dan perlakuan, yang menyimpang atau bertentangan dengan dia, adalah sesat dan menyesatkan, salah, keliru dan durhaka. Rasa-cinta-setia kepada tanah-air, ummat dan masyarakat, sampai-sampai kepada diri – pribadi, dengan catatan dan perhatian:

   - bahwa kecintaan dan kesetiaan kita dalam hubungan ini tidak sekali-kali boleh melanggar atau menyimpang, melebihi atau mengurangi barang apa yang termaktub pada huruf-huruf A., B. dan C. diatas; melainkan semuanya tetap berlaku dalam batas-batas rangka jihad dan usaha jihad, dan tidak sesuatu diluarnya.

   - Dan rasa-cinta-setia kepada tugasnya, tugas dan wajibnya melaksanakan Jihad-berperang pada Jalan Allah, karena Allah, untuk mentegakkan Kalimatillah, langsung menuju Mardlatillah, lebih dan dilebihkan daripada setiap kecintaan diluarnya, dalam makna dan wujud:

   - percaya dan yakin dengan sepenuh jiwanya, bahwa Jihad adalah satu-satunya dharma-bakti muthlak dan maha-suci 'indallah wa 'indannas, yang boleh membawa pelakunya naik meninggi sampai kepada harkat-derajat yang termulia, dibawah para Anbiya-Allah dan para Rasulullah;

   - karena Jihad berhukumkan Fardlu'ain dan Fardlu kifayah (bersama-sama), maka pada tiap-tiap sa'at Allah berkenan mengidzinkannya, wajib jihad itu diletakkan

atas pundak tiap-tiap Mujahid dan atas pundak seluruh Jama'ah Mujahidin, atau dengan kata-kata lain; atas seluruh ummat, tanpa kecuali.

- percaya dan yakin sepenuhnya, bahwa Jihad fi sabilillah adalah satu-satunya cara, laku, usaha dan 'amal memperjuangkan Keluhuran Agama Islam, Kedaulatan Negara Islam Indonesia beserta Hukum-hukum Syari'at Islam yang menjadi sendi-dasarnya, dan Kebahagiaan Ummat dan Bangsa, yang berharap ingin mengucap-menikmati Kurnia Allah yang Maha-Besar, dalam Kerajaan Allah didunia dan diakhirat, atau sekurang-kurangnya dalam lingkungan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur di Indonesia atau Negara Islam Indonesia, ialah ujung kesudahan cita-cita Ummatul-Mujahidin, Ummat pilihan dan kekasih-Allah di Indonesia; dan

- sanggup serta mampu menyalurkan tiap-tiap gerak-langkah dan tingkah-lakunya, dlahir maupun bathin, sepanjang Hukum-hukum Jihad; Hukum-hukum Islam dimasa Perang, sehingga menjadi Mujahid tulen dan Mujahid sejati genap-lengkap dlahir-bathin, tegasnya Mujahid yang "Jihad minded 100%, kejakinan mana akan mendorong Mujahid-pelakunya:

- Untuk menumpahkan dan mengorbankan segenap tenaga dan hartanya hanya pada Jalan yang ditaburi rahmat dan ridla Ilahy;
  - Untuk menggunakan tiap detik sepanyang umurnya hanya bagi jihad mentegakkan Kalimatillah; Untuk mempertaruhkan jiwa, raga dan nyawanya hanya untuk persembahan dharma-bakti muthlak kepada Dzat 'Azza wa Jalla semata; tegasnya hanya untuk mentegakkan Kalimatillah, mendhahirkan Kerajaan Allah didunia, khusus dipermukaan bumi Allah Indonesia. Dan tiada sesuatu diluarnya.

8. Menggalang Benteng Islam Nan Kuat Sentausa. Jika Jama'atul-Mujahidin sungguh-sungguh sanggup, mampu dan kuasa mewujudkan ajaran-ajaran Kitabullah, Al-Qur-anul-'adzim, dan mengikuti Sunnah Çlm., dengan tepat dan seksama, setingkat demi setingkat, selangkah demi selangkah, sepanjang rangka Jihad dan Hukum Jihad, Insja Allah dalam waktu yang singkat gelombang Jama'ah tsb. akan merupakan satu Benteng Islam raksasa yang maha-kuat dan maha-sen tausa, dlahir maupun bathin, yang sanggup dan mampu menghadapi serta mengatasi segala kemungkinan dan keadaan betapapun sifat dan bentuknya. Beberapa fakta utama, yang akan dapat dijadikan landasan-landasan dan

pembinaan ini antara lain ialah: Memupuk dan memperkembangkan rasa-tanggung-jawab dlahir-bathin yang makin bertambah-tambah besar, dalam ma'na:

- Bertanggung-jawab sepenuhnya akan berlakunya Hukum-hukum Allah, Hukum-hukum sepanjang ajaran Al-Qur-an, dan Sunnah Çlm., tegasnya: Hukum-hukum Sjari'at Islam, atau Undang-undang Islam, atau Undang-undang Negara Islam Indonesia; dan

- Bertanggung jawab sepenuhnya akan berlakunya dan dilaksanakannya dengan tepat Hukum-hukum Islam dimasa Perang. Memupuk dan memperkembangkan rasa-setiakawan yang makin bertambah-tambah mendalam, terutama, dalam lingkungan Jama'atul-Mujahidin, sepanjang ajaran Islam, sebagaimana yang telah terlaksana dalam pergaulan antara kaum Anshar dan Muhajirin, ialah kaum Mujahidin dibawah pimpinan, bimbingan, tuntunan dan asuhan langsung Rasulullah Çlm. Pada zaman Madinah awal, di Negara Basis Islam Pertama di Jaziratul-Islamijah termaksud meliputi segala bidang dan segi, khusus dan umum, sakhsy dan ijtima'I, dalam sepanjang ajaran suci, terutama dalam menanam, membangkitkan dan mengobar-ngobarkan Semangat Jihad dalam membina dan memperkembangkan Jiwa Jihad, dan dalam melaksanakan Hukum-hukum Jihad.

- Dengan demikian, maka cita-cita hendak menggalang Persatuan Islam dan Persatuan Ummat, terutama Ummatul-Mujahidin yang kuat-kompak dlahir-bathin bukanlah satu impian khajal ! Jadikanlah Tali-tali Allah, perintah-perintah Allah beserta Sunnah Çlm. Selaku tafsirnya, sebagai daya-pengikat antar-jiwa dalam lingkungan Jama'atul-Mujahidin! Dan kemudian perkuat dan sempurnakanlah segala usahamu dalam jurusan itu, hingga seluruh tubuh Jama'ah akan merupakan satu Benteng Islam raksasa nan kuat-sentausa ! Dalam pada itu, hendaklah diingati pula, tanda setia-kawan itu hendaknya dibuktikan lebih dahulu dari atas kebawah, dan bukan dari bawah keatas, karena pihak atasan Komandan atau Pemimpin, harus lebih dahulu pandai menunjukkan kesungguh-sungguhnya melaksanakan wajibnya: memperlindungi, menuntun dan membimbing pihak bawahan atau anak buahnya, daripada hanya pandai menuntut kepatuhan, kesetiaan, kesetiakawanan, pembelaan dan pertanggung-jawab pihak bawahan terhadap pihak atasnya! Itulah bukti yang nyata daripada apa yang disebut Mahabbah kepada Allah dan Mushahabah terhadap sesama Mujahidin, sesama Ummatul Muslimin !

- Menanam dan memperkuat disiplin, umum dan terutama militer. Disiplin (Dicipline), dalam ma'na Tha'at patuh dan setia, baik dalam bidang-bidang umum maupun dalam segi-segi kemiliteran, wajib ditanam, dipupuk, diperkembangkan dan diperkuat dalam dada, jiwa, tekad dan 'amal setiap Mujahid. Karena tiap Mujahid selaku pelaksana hukum-hukum Jihad, Hukum-hukum Islam dimasa Perang, dengan automatis sesungguhnya adalah Prajurit-Tentara Allah. Tanpa disiplin, maka seorang Mujahid hanya merupakan pejuang liar, pejuang yang ingkar, menyimpang dan menyeleweng daripada Jama'ah Besar, Jama'atul-Mujahidin.

- Dalam keadaan biasa, sikap liar itu hanya akan mengecewakan. Tapi dimasa berlaku Perang Semesta, Perang Totaliter, maka disiplin masuk salah satu kewajiban muthlak, yang harus berlaku tanpa sjarat, tanpa kajid dan tanpa tawar-menawar.Oleh sebab itu, hendaklah setiap Mujahid suka melatih diri demikian rupa, sehingga rasa-disiplin sungguh-sungguh meresap dan terbukti dalam segala hal, sampai-sampai kepada tingkah-laku dan perbuatannya sehari-hari. Beberapa pokok, yang boleh dijadikan anak-tangga mencapai disiplin adalah sebagai berikut:

    - Disiplin kepada Allah, dalam arti kata: tha'at, patuh dan setia melaksanakan setiap perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya, dengan hati nan jujur, ikhlas dan ridla, tanpa tawar-menawar, tanpa syarat dan tanpa kajid apa dan manapun.

    - Disiplin kepada Rasulullah Saw., dengan kenyataan mengikuti jejak Saw., sesempurna mungkin, terutama dalam Jihad membina Negara Basis Madinah.

    - Disiplin terhadap kepada Ulil-Amri Islam, tegasnya tha'at, patuh dan setia melaksanakan segala perintah Imam-Plm.T., dengan penuh keyakinan dan kepercayaan, dan lepas daripada sjak, nifaq, dan dhan. Catatan.
      Sikap dan perbuatan disipliner terhadap kepada Ulil-Amri, boleh dianggap sebagai tanda-bukti yang nyata akan benarnya apa yang termaktub pada huruf C, 1., dan E diatas. Sepanyang qiyas dan dalam batas-batas tertentu, maka termasuk pula dalam golongan C

9. Ini: Disiplin terhadap kepada para Panglima (Perang), para Komandan (Lapangan-Pertempuran) dan para Pemimpin N.I.I. (atasan) lainnya. Disiplin terhadap sesuatu lain diluarnya, termasuk didalamnya disiplin terhadap diri-pribadi. Mitsalnya:

   - ✓ pandai mengawasi dan menguasai ‘amal dan tindakan sendiri;
   - ✓ pandai mengekang dan mengatur segala nafsu getaran jiwa, niat, hajat, ‘adzam, rencana dan segala gerak-gerik panca-indranya sendiri;
   - ✓ sehingga tetap berjalan dan tersalurkan pada jalan dan melalui Hukum-hukum yang ditaburi Rahmat dan Ridla Ilahy; tegasnya: tetap tertib, teliti dan hati-hati dalam melakukan Hukum-hukum Jihad. Hukum-hukum militer, ketentuan-ketentuan militer, tata-tertib Militer, siasat militer, dst. dst.; dalam pada itu segala hal yang membawa kepada daerah dan lalai, ceroboh, dan sembrono/lalainya harus dijauhkan dan dienyahkan, tegasnya sikap tawakkal ‘alallah secara muthlak harus dipersatu-padukan dengan perbuatan-perbuatan taqwa, sifat-sifat ittiqa sepanjang Sunnah; dan kedua unsur jiwa ini harus ditanam dan diperkembangkan dalam jiwa dan ‘amal setiap Mujahid !
   - ✓ Disinilah setiap Mujahid memperoleh kesempatan melakukan Jihadul-Akbar, disamping dan bersama-sama Jihadul-Asghar. Alangkah tinggi nilai setiap Mujahid, yang tahu dan sadar sepenuhnya akan keluhuran fungsinya, dan yang pandai serta cakap-cukup menunaikan tugasnya nan maha-mulia dan maha-suci itu, walau acapkali terasa maha-berat sekalipun!

Beberapa Macam Kualitas Pejuang Sekalipun S.M. Kartosoewirjo demikian telaten membina aparat dan tentaranya untuk berakhlaq Islam. Namun akibat dari situasi revolusi yang sungguh mendesak maka dalam situasi demikian, pada waktu itu Negara Islam Indonesia ditegakkan dengan beberapa keterbatasan, terutama mengenai kualitas para pejuangnya. Diantaranya kurang lebih ada lima tipe gerilyawan NII yang berjuang di tengah tengah berkecamuknya peperangan :

Pertama, yaitu kader yang khusus sudah dipersiapkan untuk menempati posisi dan fungsi fungsi vital dalam struktur Negara Islam Indonesia. Jauh sebelum revolusi proklamasi dikumandangkan Imam S.M. Kartosoewirjo telah menggembleng mereka dalam Institut Suffah di Malangbong. Mereka bukan hanya berani dan siap syahid untuk tugas suci ini, tetapi betul betul berangkat dari semurni murninya jiwa tauhid, setinggi tinggi ilmu dan

sepandai pandai siasat. Siap memimpin perang, siap pula mengelola negara di saat kemenangan telah dicapai. Mampu memelihara diri dan menjadi contoh teladan bagi mujahidin lainnya -baik di masa damai maupun di masa perang. Dan merekalah yang selalu berada di pront terdepan memimpin perjuangan, membangun kesadaran rakyat dalam melawan kebathilan, pada perjalanan jihad NII kader pilihan ini banyak yang memperoleh syahidnya lebih dahulu. Akibat kekurangan kader yang mengerti persis langkah strategi perjuangan NII, akhirnya perjalanan jihad NII bisa bergeser ke arah yang lain tergantung siapa yang ikut bergabung kepadanya. Imam memang terus memimpin hingga tahun 1962, tetapi pengelolaan jumlah besar dengan sedikit orang kader negarawan, membuat jalannya negara tidak lagi seperti direncanakan semula.

Kedua, pejuang yang bergabung karena kesadarannya didorong oleh ilmu yang telah dimilikinya, walaupun tidak dikader secara khusus di Institut Suffah. Sehingga rasa setianya pada NII sebatas pandangan dirinya saja, belum tentu sejalan dengan misi dan visi NII sebagaimana dicanangkan sebelum proklamasi. Dengan kesadaran ilmu yang dimilikinya, ia bersegera mendukung dan membela Negara Islam, dengan kesadarannya ia tinggalkan "Darul Kufur" Republik Indonesia, namun karena kesadaran sebatas muncul dari dirinya, apalagi di saat berkecamuknya perang, proses penyamaan visi pemikiran mujahidin agak sulit dilakukan. Hal ini disebabkan tuntutan keadaan untuk mendahulukan pertahanan, berjuang menahan gempuran pasukan TNI yang terus menerus memberondong daerah daerah basis. Waktu untuk duduk bersama, merundingkan jalannya negara, pada tingkat komandemen wilayah ke bawah relatif agak sulit dilakukan. Akhirnya pasukan pasukan TII perlahan lahan bermetamorphosis mimiliki kekhasan masing masing tergantung latar belakang pemikiran para perjuang sebelum menggabungkan diri dengan NII. Jejak langkah pasukan yang dipimpin komandan yang berasal dari suffah, menjadi berbeda dengan karakter pasukan yang dipimpin oleh seorang kiayi dari sebuah pasantren yang menekankan nilai nilai kesufian misalnya. Namun karena kesadarannya yang tulus tadi, mereka menjadi mujahid mujahid yang tangguh membela Negara Islam. Di Jawa Tengah di antaranya ialah kiayi Ghafur Ismail. Beliau Syahid ketika mereka yang di Jawa Barat tahun 1962 sudah turun. Kiayi Ghafur tidak mau menyerah, meski bersama sanak keluarganya disergap oleh tentara Republik. Beliau kena tembak. Kemudian sesudah Syahid, maka istrinya mengambil senjata dari suaminya langsung menghantam musuh, tapi kehabisan peluru, lalu istrinya juga menjadi Syahidah. Kemudian seperti halnya juga di Jawa Barat,Kiayi Khoer Affandi dari Manonjaya dirinya bergabung dengan NII hanya karena keilmuan, dan setelah turun gunung Kiayi Khoir Affandi tidak merancang taktik gerilya

selanjutnya untuk menggalang Negara Karunia Alloh NII, tetapi membuka pasantren. Walaupun memang ruh tauhid dan ruh jihadnya demikian kental, cintanya pun pada NII tidak diragukan, namun beliau bukanlah seorang negarawan yang terus membela eksistensi Negara Islam Berjuang sebagaimana layaknya sebuah negara dipertahankan.

Ketiga, gerilyawan dan rakyat berjuang yang bergabung ketika revolusi (perang fisik) dimulai. Dalam suasana seperti ini, disaat kebutuhan akan tenaga tempur begitu mendesak, demikian juga keperluan atas rakyat yang mendukung, maka proses rekruitment menjadi kurang memperhatikan unsur kualitas lagi. Saat itu siapa yang siap membantu gerilyawan, siapa yang mendukung mujahidin, maka dia bisa ikut berjuang bersama. Tidak lagi melihat sejauh mana kedalaman ilmunya, sedalam apa kesadarannya dan apakah mereka mengetahui tentang visi negara Islam atau tidak, karena keperluan akan tenaga demikian mendesak maka diterimalah mereka sebagai pasukan TII dan warga Berjuang NII. Masalah yang timbul kemudian adalah, kesulitan memelihara kebersihan citra perjuangan NII itu sendiri, sebab akhlak ketika bertempur, baik keshabaran dan ketabahannya, atau akhlak disaat mereka berinteraksi dengan masyarakat tidaklah sama. Berbeda dengan kader pertama yang benar benar terdidik dengan nilai nilai perjuangan Nabi. Gerilyawan yang bergabung di tengah jalan ini terkadang melangkah atas dasar kemauannya sendiri dan mengabaikan akhlak tentara Islam. Dalam hal ini NII terpaksa harus memikul tanggung jawab kelompok, walaupun itu dilakukan bukan oleh kadernya, maka semua tindakan tidak disiplin mereka berakibat buruk pada citra Negara Islam.

Kempat, yaitu gerilyawan dari yang membelot dari TNI kepada TII, Ketika pasukan tentara Republik kembali dari Yogyakarta menuju Jawa Barat, mereka dicegat oleh kawan kawannya yang tidak ikut mundur ke Yogya, kepada mereka dikatakan bahwa sekarang di Jawa Barat telah diproklamasikan Negara Islam, sebagai wadah bagi tegaknya hukum-hukum Allah secara sempurna. Mendengar itu, berbekal dorongan hati nuraninya yang tulus maka langsung bergabung dengan TII. Misalnya Kadar Solihat seorang perwira TNI yang kemudian bergabung dengan NII, dan menjadi perwira Tentara Islam Indonesia.

Kelima, yaitu pejuang yang lahir dan tumbuh dari daerah yang berhasil dikuasai TII, meskipun mereka bukan dari daerah santri atau kiayi.Mereka pun tidak pernah menjalani masa pengkaderan, bahkan surat Al Fatihah saja banyak yang sama sekali tidak tahu artinya. Namun, karena daerahnya bisa dikuasai TII dan kemudian menjadi basis , maka lama kelamaan mengetahui tujuan Darul Islam. Bahkan tertarik dengan akhlak TII yang demikian wara, membuat mereka pun tertempa menjadi kader mujahid pula, bahkan tidak bisa

dianggap sepele. Sebab kenyataannya pada tahun 1962 bulan Juni saja dari salah satu daerah di Brebes, masih banyak baik laki-laki maupun perempuan ada yang masih berangkat ke hutan bergerilya padahal sebelumnya itu sudah banyak pamlet dari pihak musuh yang isinya bahwa Darul Islam di Jawa Barat sudah cease fire. Dari itu para mujahid NII tidak semuanya menyerah kepada musuh. Itu adalah Sunnattullah. Firman Allah:

"Di antara orang-orang mu'min ada yang menepati apa yang sudah mereka janjikan kepada Allah; maka di antara mereka ada (juga) yang menunggu-nunggu (apa yang Allah janjikan kepadanya) dan mereka sedikitpun tidak merobah (janjinya)." (Q.S.33:23).

Di samping ke lima unsur di atas ada pula mereka yang sengaja disusupkan musuh ke dalam tubuh TII, dengan memperalat orang orang yang telah luntur semangat jihadnya dan turun ke kota. Dari mereka yang telah turun ke kota inilah mereka memperoleh jalan masuk ke pusat pemerintahan NII, seperti yang dilakukan oleh Serma Ukon Sukandi. Yang lebih potensial lagi untuk menghancurkan dukungan rakyat muslim terhadap perjuangan Islam yang dilakukan para mujahid ini adalah; adanya pasukan liar yang sengaja menggunakan tanda tanda pengenal TII, kemudian melakukan aksi aksi brutalnya membunuhi setiap ulama yang mendukung perjuangan NII, merampok dan membakar rumah rumah penduduk yang dicurigai memihak pada Darul Islam dan merusak kehormatan wanita wanita mereka. Dengan didukung oleh mass media yang memang dikuasai pemerintah Republik Indonesia, maka bermunculanlah kabar kabar buruk mengenai Darul Islam. Di sebut gerombolan, perampok bahkan DI diidentikan dengan Duruk Imah (bahasa Sunda yang artinya Bakar Rumah).

Namun demikian, betapapun kejinya fitnah yang dilemparkan fihak fihak yang membenci mereka. NII sebagai wadah Al-H Mnb ak di Indonesia maka jelas estafeta kepemimpinannya tetap berlanjut. Firman Allah:

"Kemudian Kami selamatkan rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman, demikianlah menjadi kewajiban atas Kami menyelamatkan orang-orang yang beriman." (Q.S.10:103).

Bab Sepuluh

KELANJUTAN NEGARA ISLAM INDONESIA DALAM ORDE BARU: DARI PEMANFAATAN KEPADA PENGHANCURAN

Setelah syahidnya Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo, banyak peristiwa-peristiwa penting sebagai kelanjutan resistensi politik Umat Islam dan juga perjuangan Negara Islam Indonesia pada generasi penerusnya. Setelah berakhirnya rezim kekuasaan Orde Lama, pemerintah Orde Baru dan Angkatan Darat dari awalnya telah menyadari betul mengenai adanya kemungkinan naiknya pamor politik umat Islam. Berawal ketika jatuhnya kekuatan PKI yang telah gagal dalam aksi kudetanya kemudian secara formal diperkuat dengan keputusan politis yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang pembubaran partai PKI, secara tidak langsung telah mengangkat citra politik Islam di pentas perjuangan nasional. Yang mana kekita itu dari setiap partai politik Islam banyak mengecam dan mengutuk terhadap perlakuan PKI dan mereka menuntut pemerintah untuk segera menyelesaikan kasus PKI ini, sehingga dengan demikian di dalam struktur peta kekuatan politik Indonesia saat itu terjadilah ketidakseimbangan (imbalance). Gejala yang muncul dari adanya kekalahan PKI membuat Politik Umat Islam sedang mendapat angin, dan ditangkap gejala tersebut oleh pemerintah dengan satu prediksi bahwa politik umat Islam memiliki kecenderungan hendak memperkuat posisinya. Di mana kekuatan tersebut yang akan menghancurkan cita-cita nasionalis sekuler yang telah menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dan hal itu disadari betul oleh Angkatan Darat, bahwa di dalam kalangan umat Islam masih terdapat bibit-bibit ekstrimisme yang amat potensial yang suatu saat bisa muncul kepermukaan.

Maka pada tanggal 21 Desember 1966 diumumkannya suatu pernyataan politik oleh perwira-perwira tentara Angkatan Darat bahwa mereka "akan mengambil tindakan tegas terhadap siapapun, dari pihak mana pun, dan golongan apa pun yang akan menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 seperti yang telah dilakukan oleh Pemberontakan Partai Komunis di Madiun, Gestapu, Darul Islam ...dan Masyumi-Partai Sosialis Indonesia...."

Untuk hal tersebut di atas banyak sekali rekayasa politik yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru melalui operasi badan intelejennya terhadap umat Islam di segala segmen kehidupan. Selama masih bertumbuhnya kekuatan-kekuatan politik umat Islam, selama itu pula gerakan tersebut dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan Orde Baru yang sedang mencari jati dirinya, sehingga sangat diperlukan sekali peredaman bahkan pemusnahannya. Hal tersebut persis sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Qur'an Surah 9: 33. "Mereka berkehendak untuk memadamkan cahaya Allah (Al Islam) dengan sarana propaganda

yang mereka miliki, namun Allah berkehendak lain untuk tetap menyempurnakan cahaya-Nya walaupun orang-orang musyrik itu tidak menyukainya".

Dimana dan sampai kapan pun, selama Islam diyakini oleh ummatnya sebagai minhajul hayat , satu satunya jalan kehidupan yang harus ditegakkan, selama itu pula kekuatan-kekuatan kaum kafir dan musyrik akan menjalin kerjasama bahu membahu dalam menekan laju Islam . Dan kemungkinan yang terburuk yang akan didapat oleh umat Islam dari adanya kerjasama tersebut adalah bagaimana mereka membasmi para pejuang Islam dengan kekuatan senjata yang didukung oleh pasukan militer.

Konspirasi Yahudi dan Nasrani di dalam tubuh pemerintah Orde baru telah mewarnai corak kekuasaan rezim Suharto. Ditandai dengan pelarangan rehabilatasi nama partai Masyumi, pengangkatan elit politik dari golongan nasrani sampai kepada adanya penyederhanaan partai yang bertujuan depolitisasi massa, yang dari program tersebut cukup efektif memarjinalkan posisi politik Islam. Demikianlah mereka berdaya upaya agar jangan sampai Islam memainkan peran dalam panggung politik Indonesia. Allah telah berfirman: "Dan amat sangat tidak suka kaum Yahudi dan Nasrani terhadap Umat Islam, sehingga Umat Islam mau tunduk, patuh dan setia mengikuti pola sistem yang telah mereka buat".(Al-Baqarah: 218).

Untuk mengantisipasi setiap kekuatan arus politik Islam ini, pemerintah Orde Baru dan kaum misionaris menjalankan beberapa pola aksi melalui badan intelejennya. Sasaran pertama yang mereka goyang dengan jalan rekayasa politik adalah partai Parmusi (Partai Muslimin Indonesia), Pemerintah melakukan rekayasanya terhadap Parmusi karena melihat bahwa di dalam partai Masyumi masih banyak bercokol para politikus Islam yang mempunyai militansi Islam sehingga berpotensi untuk membangkitkan kembali misi Islam dalam ajang pemilu dengan menjadikan umat Islam sebagai basis pendukungnya. Oleh karena itu, Pemerintah Orde Baru mengambil satu kebijakan terhadap partai ini. Pada tanggal 5 Februari 1968, Jenderal Suharto memberitahukan bahwa Pemerintah menyetujui pembentukan Partai Parmusi, namun Pemerintah tidak mengizinkan seorang pun kepada pemimpin bekas partai Masyumi memegang peranan dalam kepengurusan partai tersebut, Dan kepada mereka dihimbau untuk menunggu sampai selesainya pemilihan umum. Begitu juga tentang RUU Perkawinan, pada tanggal 31 Juli 1973, ketika pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan kepada DPR. Kemudian RUU tersebut mendapat reaksi keras dari umat Islam. Puncaknya, lebih dari 300 mahasiswa muslim menyerbu ke DPR dan membuat kerusakan ketika Menteri Agama Mukti Ali sedang membacakan jawaban pemerintah dalam sidang pleno DPR.

Disamping itu pemerintah Orde Baru melakukan manuver politiknya terhadap Islam tradisional seperti organisasi NU—yang nota bene memiliki banyak pengikutnya, badan intelejen yang diwakili oleh Opsus melakukan intrik politiknya dengan menciptakan organisasi massa GUPPI (Gabungan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam),—dengan pimpinannya yang bernama Ramadi ,—dalam penggalangan rakyat. Mereka berharap dengan melalui organisasi yang dibentuk, kekuatan umat Islam dapat ditekan. Selanjutnya, setelah bergabungnya umat Islam dalam mesin giling GUPPI ini, dengan sistematis badan intelejen menggarap massa Islam tradisional tersebut untuk ditariknya sebagai penyokong dan pembela Golkar. Demikianlah pemerintah Orde Baru menerapkan strategi kebijakannya, yang intinya adalah bagaimana mengendalikan umat Islam.

Begitu juga badan intelejen dengan program Opsusnya melakukan hal yang sama terhadap mantan para pejuang Darul Islam, mereka membuat rekayasa-rekayasa yang canggih terhadap para pejuang Darul Islam dengan pola "Pancing dan Jaring", para pejuang itu dikumpulkan dalam satu wadah dan kemudian dikorbankan dengan melalui berbagai peristiwa berdarah. Seolah-olah bahwa para pejuang Islam selalu ingin mengadakan konfrontasi dengan pihak ABRI dan penguasa, dengan tindakan pengacauan, pemberontakan dan lain sebagainya. Dengan terciptanya suasana persinggungan itu maka apa yang menjadi keinginan para penguasa dzalim terkabul, ya'ni membuat umat Islam merasa alergi terhadap Negara Islam dan selalu menutup diri bila diceritakannya. Sungguh perbuatan yang sangat keji, seperti kekejian yang dilakukan oleh raja Fir'aun ketika pada masa Nabi Musa a.s..

Kejadian rekayasa ini merupakan gambaran yang terang dari pemerintah Orde Baru, bahwa mereka tidak ingin sama sekali resistensi politik Islam yang diperjuangkan oleh umat Islam pada umumnya dan para pejuang Darul Islam khususnya untuk mengembangkan ideologi Islam di percaturan politik. Yang mereka kehendaki adalah bahwa Islam hanya sebatas ritualitas belaka tanpa ikut campur dalam urusan negara. Demikianlah rencana makar yang sedang diperjuangkan oleh thagut, untuk memberdayakan umat Islam sebagai alat komoditas politik bagi manusia-manusia yang jahil (bodoh).

Yang paling giat dan menonjol dalam usahanya untuk melaksanakan devide et impera nya terhadap umat Islam` di dalam perjuangan suci Darul Islam adalah Ali Moertopo. Menurut hemat dia, siapa dan darimana orang tidak menjadi masalah, bila mau diajak bekerjasama maka akan dirangkulnya untuk bersama-sama melaksanakan program setan Opsus. Salah satu modus operasi Ali Moertopo adalah dengan mengumpulkan para advonturir yang rakus kekayaan untuk dilibatkan dalam setiap aksi Opsus. Dengan keahliannya dalam merangkul massa, dia banyak sekali memanfaatkan kekuatan-kekuatan Islam bukan hanya terhadap para pejuang Darul Islam

tetapi juga terhadap kekuatan-kekuatan bekas Permesta, Masyumi. Berbagai cara pendekatan dia tempuh termasuk juga menginsentifkan material kemudian setelah mereka terbujuk lalu dimasukkannya ke dalam "kandang" yang telah mereka siapkan. Dengan teori 'penggalangan' —dimana dalam teori itu menggariskan bahwa tidak adanya kawan dan lawan,—Ali Murtopo menjalankan taktik dan strateginya dalam memupuk kekuatan-kekuatan tersebut demi kepentingan politiknya.

Sudah sejak awal tahun 1970-an, Ali Moertopo mengadakan jalinan kerjasama dengan sejumlah pejuang DI/TII.. Ketika itu Ali Moertopo giat pergi ke Jawa Barat untuk menarik mereka ke Jakarta,—yang sebelumnya para pejuang tersebut masih di bawah binaan Kodam Siliwangi Bandung—antara lain yaitu Dodo Kartosuwiryo, sebagian lagi adalah seperti Adah Jaelani, Danu Muhammad Hasan. Namun garis kebijakan yang telah dibuat oleh Ali Moertopo untuk mendekati para pejuang DI/TII itu menimbulkan permasalahan di dalam tubuh Bakin. Sesungguhnya, biar bagaimanapun yang namanya perjuangan Islam itu seharusnya tidak membutuhkan jalinan kerjasama dengan penguasa yang dzalim. Bahkan seharusnya ada yang tampil dari orang pemberani menyatakan kebenaran di depan penguasa tiran. Sebagaimana sabda Rasulullah.

"*Afdhalu Jihad Kulil haq 'inda sulthonin jair*" (Seutama-utama Jihad adalah Katakanlah kebenaran itu kepada penguasa yang lalim). Dengan digelarnya Opsus oleh pemerintah, dikalangan petinggi militer sendiri banyak yang merasa heran dan kaget, kenapa berani-beraninya Ali Moertopo merangkul para pejuang Darul Islam tersebut . Menurut pengakuan Ketua Bakin Sutopo Juwono, ia sudah beberapa kali memperingatkan Ali agar jangan main-main dengan para pejuang Darul Islam. Sebab katanya, bisa jadi para pejuang Darul Islam nantinya suka macam-macam, karena merasa punya jasa ikut menghancurkan PKI segala macam, nanti mereka bisa menagih janji. Maka lebih baik jangan. Adanya peringatan tersebut pada dasarnya memberikan isyarat kepada Ali bahwa satu di antara dua kemungkinan pasti terjadi tentang para pejuang Darul Islam: satu kemungkinan bahwa para pejuang Darul Islam itu akan memperalat Opsus; atau sebaliknya, Opsus memperalat mereka.

Dengan adanya peristiwa perselisihan didalam tubuh militer Republik Indonesia kelihatannya bahwa kekuasaan Orde Baru bersatu, secara lahiriyah terlihat kompak dengan kerjasamanya untuk menekan resistensi politik Islam, tetapi sesungguhnya di dalam tubuh mereka sendiri terdapat permusuhan dan pertentangan intern yang sangat hebat. Hati mereka terpecah belah tidak dalam persatuan dan kesaatuan, jiwa para militer mereka kosong dari aqidah Islamiah, bahkan nyaris seperti yang digambarkan oleh Kartosoewirjo dahulu. Allah telah berfirman: "Mereka tidak akan memerangimu secara serentak, kecuali hanya di desa-desa yang telah dibentengi, atau dari balik tembok perlindungan saja. Permusuhan dikalangan mereka telah

memuncak. Kamu kira mereka kompak, namun sesungguhnya hati mereka terpecah belah. Perpecahan itu timbul, karena mereka tidak mengerti makna persatuan".(Q.S. 59: 14) Sebagaimana yang dituturkan oleh Ramadi, bahwa banyak para pejuang Darul Islam yang hilir-mudik di rumahnya, di antaranya Danu, Dodo M. Darda Kartosoewirjo. Ada pula nama-nama dengan panggilan khas, seperti Ki Acun atau Ki Mansyur. Menurut penuturan dari salah seorang anak buah Ali Moertopo di Opsus, dukungan yang diperlihatkan para pejuang Darul Islam terhadap Opsus sangat kuat. Saking kuatnya mereka lalai akan tugas dan fungsi yang diamanahkan oleh pendahulu mereka. Lupa akan ma'na sebuah hadis yang menyatakan "Nahnu kaumun la nuharribu bima'unatil musyrikin". Arti lepasnya: "Kami para mujahid Allah tidak pernah berjuang tanpa adanya dukungan sedikitpun berupa fasilitas yang telah disediakan oleh orang Musyrik". Sebenarnya sudah menjadi kebiasaan orang kafir yang telah digambarkan oleh Allah.:

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, menafkahkan harta mereka dalam upayanya untuk menghalang-halangi orang mu'min dari beribadah Kepada-Nya". (QS 8: 36.)

Kehadiran Opsus dengan segala programnya, rupanya telah dan selalu menjebak para pejuang Darul Islam, dengan iming-iming bahwa mereka akan siap membantu dalam pendirian kembali Negara Islam. Para pejuang Darul Islam percaya betul atas "ucapan" Ali Moertopo tersebut. Di mata mereka, apabila Ali Moertopo menang maka ia akan mendirikan negara Islam. Sungguh satu dusta telah dilakukan oleh orang kafir untuk menutup-nutupi tujuannya, biar siapapun orangnya kalau tetap menjalankan roda pemerintahan jahiliyah, maka hukum-hukum Islam tidak akan pernah diberlakukan. Tipu daya orang kafir telah masuk ke dalam jiwa para pejuang, sehingga mereka lebih mempercayakan orang kafir sebagai teman setianya untuk bersama-sama berkoalisi menegekkan kembali Negara Islam. Padahal Allah telah menegaskan terhadap orang mu'min dalam Al-qur'an.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita Muhammad)...." (QS. 60: 1)

Tidaklah orang-orang kafir itu berkawan, sesungguhnya hanya untuk menyusahkan urusan yang akan dilaksanakan oleh orang mu'min. Allah berfirman:

"Jika mereka berhasil menangkapmu, mereka akan menindakmu sebagai musuh. Mereka akan melepas tangan untuk membunuh, dan menjulurkan lidah untuk mencacimu, Selanjutnya yang mereka inginkan ialah kamu kafir kembali seperti mereka". (QS. 60: 2).

Pada sekitar tahun 1978, berdasarkan cerita seorang pejuang Darul Islam, bahwa Ali Moertopo sangat berambisi untuk menjadi wakil presiden. andai saja Ali Moertopo berhasil menjadi wapres maka yang menjadi sasaran berikutnya adalah Presiden Soeharto, ditambahkannya, Ali Moertopo selanjutnya akan menetralisasi keadaan dengan cara apa pun sehingga Ali Moertopo bisa duduk dikursi kepresidenan. Begitulah gambaran hidup orang kafir yang ambisius. Allah swt. Berfirman:

"Kehidupan dunia telah menipu mereka dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir". (QS. 6: 130)

Program Opsus yang diketuai oleh Ali Moertopo ini, pada permulaan Orde Baru memang sangat berfungsi dalam reformasi politik (political reform), guna memperkuat poros Pancasila dan UUD 45, juga menetralisasi kekuatan politik umat Islam melalui usaha rekayasa politiknya terhadap semua orsospol dan organisasi kemasyarakatan dan profesi.

Yang menjadi target politik dari Ali Moertopo dengan menciptakan gagasan tersebut adalah bagaimana menguasai badan intelijen Negara untuk menjalankan roda pemerintahan Orde Baru yang sedang dalam perkembangannya. Namun karena adanya kendala didalam tubuh Opsus yang disebabkan banyak berkumpul segala aliran disana, sehingga pada akhirnya Ali mempunyai kesimpulan bahwa Opsus tidaklah efektif. Memang disatu sisi bisa berkumpulnya segala aliran di Opsus menandakan akan kapasitas Ali Moertopo. Tetapi dari sisi organisasi, keberadaan Opsus sangat rentan terhadap timbulnya pertikaian yang dibawa oleh setiap aliran yang ada. Masing-masing interest itu kemudian saling berhadapan di dalam tubuh Opsus sendiri (intemal infighting).

Untuk memperlihatkan kelemahan dari strategi Ali Moertopo perlu dikutip sebuah peribahasa, Sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh juga. Ia melakukan kekeliruan ketika tidak mendasarkan operasi intelijennya pada anggota organik, tapi acap kali justru lebih mempercayai anggota jaring seperti Aulia Rahman, Leo Tomasoa, Bambang Trisulo. Atau lebih percaya pada Liem Bian Khoen, maupun para pejuang Darul Islam.

Dalam dunia intelijen, membina jaringan merupakan salah satu hal yang penting, sehingga selain memiliki anggota organisasi yang resmi, intelijen juga mengembangkan anggota jaringan (yang tak resmi) di mana-mana. Tergantung pada sasaran apa yang hendak dicapai. Namun, rahasia-rahasia operasi Ali agaknya lebih banyak diketahui oleh anggota jaring daripada anggota organik. Akibatnya permainan Ali dibongkar oleh anggota-anggota jaringnya sendiri. Di dalam hal ini Ali Moertopo dikritik kurang mematuhi hukum-hukum manajemen intelijen yang menyebutkan:

tidak boleh terlalu percaya pada anggota jaring! Mungkin ia mau berimprovisasi, atau bermaksud nyleneh.

Disamping itu Anggota jaring dikenal pula memiliki disiplin yang rendah sehingga biasanya mereka gampang buka kartu, membuka belang intelijen yang mestinya dirahasiakan. Jadi tidaklah mengherankan bila rahasia keterlibatan Ali dibongkar sendiri oleh bekas-bekas anak buah jaringnya di dalam tahanan. Ramadi cs, mungkin lantaran tidak tahan tekanan hidup di tahanan, maka mereka mengungkap semua permainan Ali Moertopo. Mereka ramai-ramai "bernyanyi". Sebaliknya, anggota organisasi umumnya lebih terdidik, lebih disiplin dan teguh dalam memegang rahasia. Anggota organik juga dapat berlindung di balik suatu peraturan yang tidak mengizinkan mereka membuka rahasia. Perbedaannya yang lain antara anggota organik dengan anggota jaring ialah anggota organik mengetahui tugasnya secara menyeluruh, sementara anggota jaring biasanya hanya tahu per sektor. Misalnya, seseorang anggota jaring ditugaskan membina ulama, maka ia tahunya hanya soal ulama. Lain itu tidak.

Menjelang akhir 1970-an banyak yang ditangkapi dari sejumlah pejuang DI/TII binaan Ali Moertopo seperti, Adah Djaelani Tirtapradja, Danu Mohammad Hassan, serta dua putra Kartosoewiryo Dodo Muhammad Darda dan Tahmid Rahmat Basuki. Ketika pengadilan para mantan tokoh DI/TII itu digelar pada tahun 1980, maka terungkaplah apa yang sebenarnya target dari digelarnya aksi lapangan tersebut. Dan dengan adanya hal itu dicurigai sebagai upaya untuk memojokkan posisi umat Islam. Sebagai salah satu bukti adalah dalam kasus persidangan Danu Mohammad Hassan. Pada saat dia dalam persidangan dia mengaku sebagai orang Bakin. Mungkin inilah akibat yang harus dialami oleh para pejuang Darul Islam setelah mengadakan kerjasamanya dengan organisasi Opsus yang telah dibuat oleh Syaitan yang dzalim itu. Padahal Allah telah memperingatkan sebelumnya.

"Barang siapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya, maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya". (QS. 4: 38).

Dan ditegaskan lagi oleh Allah dalam firmannya.

"Dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan itu kepada mereka melainkan tipuan belaka". (QS. 17: 64).

Peristiwa pahit yang dialami oleh para mujahid NII sejak tahun 1970-an, penyebab utamanya yaitu telah kehilangan rujukan, sehingga telah menyimpang dari hukum / perundang-undangan, sehingga pula mengangkat kepemimpinan diluar jalur Konstitusi NII. Sebab, jika pengangkatan Imam NII tidak berdasarkan undang-undangnya, maka bisa saja terkendalikan oleh intelijen

kuffar, dan pasti didalamnya terjadi kekacauan. Dalam keadaan Darurat Perang dimana wilayah NII dikuasai oleh musuh, maka musuh pun bisa membuat rekayasa pemimpin NII palsu. Karena tanpa undang-undang itu secara hukum tidak ada perbedaan mengenai figur seseorang dengan yang lainnya, sehingga tidak ada perbedaan pula antara nilai yang tidak menyerah dengan yang sudah menyerah kepada musuh. Tanpa undang-undang itu orang tidak bisa membedakan mana pemimipin NII yang sebenarnya dan mana pemimpin NII sempalan.

Sesungguhnya perjuangan NII dari mulai diproklamasikan tahun 1949 hingga tahun 1962 tidak ada kelompok-kelompok dalam perjuangan menggalang Negara Karunia Allah ini. Tetapi apa yang kemudian lahir sesudahnya adalah terjadinya perselisihan pendapat dan faham tentang siapakah yang berhak dan pantas untuk melanjutkan tugas suci sebagai pemimpin. Munculnya bibit perselisihan sekitar tahun 1974 –1979, dimana ketika mujahidin NII pecah kedalam tiga kelompok. Hal demikian diakui oleh Adah Djaelani dalam kesaksiannya dalam sidang pengadilan.”Menurut saksi, organisasi NII di Indonesia ada tiga kelompok yaitu; Kelompok yang Imam-nya Daud Beureuh, wakilnya saksi, kelompok yang Imam-nya Djadja Sudjadi (Garut Timur) dan kelompok Imam-nya H.Sobari (Rajapolah , Tasik Malaya). Sebab-sebab terjadinya pengelompokkan karena masing-masing ingin memisahkan diri dengan alasan seperti dikatakan oleh saksi: “H. Sobari menganggap kami yang menyerah tahun 1962 sebagai pengkhianat sehingga ia membentuk NII sendiri, sedangkan kelompok Djadja Sudjadi menyayangkan kami mengangkat Imam orang Sumatera sehingga ia membentuk NII sendiri”. Kelompok Djadja Sujadi dikenal dalam wadah Fillah. Sedangkan yang lainnya dikenal dalam wadah Sabilillah.

Pada sekitar tahun 90-an, kembali muncul perselisihan faham dalam pergerakan Darul Islam, setelah Adah Jaelani melimpahkan kekuasaan kepada Abu Toto (Toto As-Salam) sebagai Warasatul Mafasid (pewaris orang-orang yang membuat kerusakan). Sebenarnya Toto As-Salam ini tidak pernah terdaftar sebagai anggota DI, namun menggunakan nama NII. Dengan segala kemampuan "intelektual jahili" yang dimilikinya, dia melanjutkan warisan kepemimpinan mengatasnamakan NII dan membawahi jama’ah sekitar 50.000 orang untuk menghambur-hamburkan harta umat demi kepentingan dirinya dan orang yang turut sepaham dengannya. dengan penuh semangat pengabdian jahiliyahnya menghambur-hamburkan harta umat demi kepentingan dirinya dan orang yang turut sepaham dengannya.

Maka apa yang dikenal dan diyakini oleh sementara orang hari ini tentang Negara Islam Indonesia yang diproduk oleh kaki tangan Pemerintah RI, hanyalah merupakan rekayasa sesat dan menyesatkan (dhoollun wa mudhillun) dari tingkah polah oknum-oknum fasikun yang tidak bertanggung jawab terhadap nilai-nilai suci yang terkandung dalam Al-Quran, Al Hadist dan Qanun Asasi Negara Islam Indonesia. Prosedur syari'ah dan manhaj harakah yang telah

digariskan pun banyak yang dilanggar dan diacuhkan, sehingga timbullah tajassus (saling mencari kesalahan) diantara kalangan penerus perjuangan Darul Islam untuk menganggap bahwa pihaknyalah yang paling benar menurut ukuran masing-masing pemimpinnya serta para pengikutnya, dan bukan berdasarkan Qur'an dan Sunnah Nabi s.a.w. bukan pula menurut Undang-Undang NII. Padahal perbuatan tersebut dilarang oleh Allah.

....." Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah bergunjing antara sesamamu. Adakah seseorang di antaramu mau memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentulah hal itu menjijikkan kepadamu. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat dan Penyayang". (Q.S. 49: 12).

Sebagai sunnatullah yang berlaku sepanjang sejarah kehidupan manusia di muka bumi, perburuan harta dan kekuasaan, hari ini mewarnai juga dalam perjuangan kaum fasikun dalam melanjutkan estafeta tugas suci yang telah Allah amanahkan untuk umat Islam Indonesia. Bahkan sudah terjadi rekayasa dengan 'kaum kuffar' untuk mengaburkan harakah Darul Islam yang nantinya dari usaha-usaha tersebut, akan mencemarkan nama baik perjuangan NII hingga umat Islam "kembali menjadi kafir" dengan mengikuti langkah-langkah yang telah dirancang oleh Setan. Sebagian pejuang Darul Islam sudah lari dari garis-garis dasar perjuangan yang telah ditetapkan oleh Imam Negara Islam Kartosoewirjo yaitu: " tegaknya li'ilai kalimatillah fil ardhi".

Padahal Imam Assyahid Kartosoewirjo telah menasehati para pejuang Darul Islam melalui firman Allah yang berbunyi:

"Innallaaha yuhibbulladziina yuqaatiluuna fi sabiilillaahi shaffan ka annahum bunyaanun marshuush". (Q.S. 61: 4),

dengan terjemahan bebas:

"Bahwasanya Allah berkenan menumpahkan (segenap) kasih-sayang-Nya (hanyalah) kepada (golongan, ummat dan bangsa) orang-orang yang jihad-berperang pada jalan-Nya dengan teratur (berorganisasi, bersaf-saf, tersusun rapih, sepanjang hajat dan keperluan Jama'tul-Mujahidin tsb.), (yang bentuk, sifat, dan fungsinya) laksana bina-bina daripada sebuah tembok (bantu-membantu, bela-membela, junjung-menjunjung dst.)".

Kemudian ditambahkan tentang penjelasan maksud tersebut oleh Kartosoewirjo, dengan satu penjelasan yang sangat rinci yang antara lain berbunyi:

"Selain dari pada itoe, dari pada isi dan djiwa Firman Allah terloekis diatas, bolehlah kiranja ditarik dan dipetik peladjaran daripadanja, jang menoendjoekkan akan pentingnja kedoedoekan, peranan dan foengsi Pimpinan dimasa Perang, dimasa Revolusi. Tegasnja: Pimpinan jang

djoedjoer dan ichlas, benar dan ‘adil serta tegas, tapi bidjaksana. Ialah Pemimpin jang sanggoep hidoep dan berdjoeang bersama-sama ra’iat, sehidoep semati, senasib-sepenanggoengan, dan timboel-tenggelam bersama-sama bawahan dan ra’iat, jang mendjadi tanggoeng-djawabnja, didoenia hingga diachirat".

Peristiwa pahit yang dialami oleh kaum Nabi Musa AS, yaitu dengan dipusingkan oleh Allah karena tidak maunya mereka masuk ke Baitul Maqdis, padahal Allah telah menjanjikan hal tersebut untuk kaum Nabi Musa, ternyata dialami juga oleh pejuang NII sekarang ini, Mungkin sebagai sunnatullah pula, bahwa hal tersebut diturunkan kepada mereka semua sebagai bahan tadabbur dan tafakkur untuk tetap istiqomah dan hanif melaksanakan tugas menegakkan kalimatullah. Tidak seperti mereka yang pada tahun 1962 menyerahkan diri kepada musuh. Jangan diulangi agar diri tidak dicatat dalam sejarah sebagai orang-orang yang menyerah kepada musuh.

Jalan keluar dari perpecahan adalah kembali kepada Konstitusi / perundang-undangan NII. Kaum Bani Israil terlepas dari kebingungan, yaitu setelah menemukan Tabut sebagai peninggalan keluarga Nabi Musa dan keluarga Harun (Q.S.2 : 248). Sunnatullah bagi Al-Hak, maka apapun yang sudah menimpa warga NII, persatuan pada akhirnya akan terwujud, jika sudah menemukan kembali alat pemersatunya, yakni merujuk kepada M.K.T. No.11 tahun 1959 mengenai estapeta Imam dalam Darurat Perang, yang merupakan peninggalan Dewan Imamah NII. Sebagai embriyonya, yaitu setelah Abdul Fattah Wirananggapati keluar dari penjara musuh tahun 1982, mengadakan penggalangan terhadap para mujahid untuk merujuk kepada perundang-undangan NII. Hasil dari penggalangan itu terjalinlah kepemimpinan NII dengan rujukan hukum yang jelas.

Solusi kembali kepada undang undang ini membuat kader kader mujahid bersikap demikian ketat dalam memelihara nilai hukum. Ketika Abdul Fattah Wirananggapati ditawan tahun 1991-1996, dan pada saat itu kepemimpinan atas perintah Abdul Fattah Wirananggapati beralih pada mujahid yang bebas di luar. Kepemimpinan ini atas kesepakatan Dewan Imamah dikembalikan padanya setelah Abdul Fattah bebas. Namun ketika belakangan terbukti bahwa dirinya yang telah diangkat sebagai Imam itu memberikan pernyataan pernyataan bernada negatif saat diwawancarai oleh wartawan dari Majalah Ummat . Dewan imamah menyidangkan kasus ini, kemudian memberhentikannya pada awal tahun 1997. Adanya badan usaha yang menopang perjuangan, maka penggalangan NII berkembang semakin pesat meliputi banyak propinsi. Kebingungan lenyap.

Alhamdulillaah.